

**2022**  
Annual Report



# **PLNE Transformation** with Efficiency and Innovation

Along with High Competitiveness Towards Sustainable Business



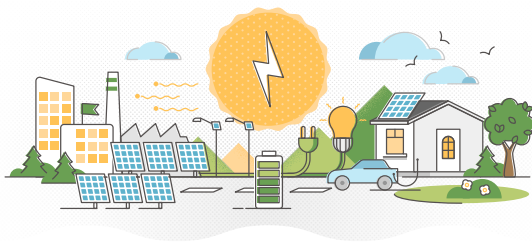


## KESINAMBUNGAN TEMA

Theme & Continuity







## TRANSFORMASI PLNE DENGAN EFISIENSI DAN INOVASI SERTA BERDAYA SAING TINGGI MENUJU BISNIS BERKELANJUTAN

*PLNE TRANSFORMATION WITH EFFICIENCY AND INNOVATION  
AND HIGH COMPETITIVENESS TOWARDS SUSTAINABLE BUSINESS*

Tahun 2022 ini tantangan pasar semakin besar dan serius, PLN Enjiniring melakukan transformasi dengan senantiasa mendukung dan melaksanakan program transformasi PLN Group yang tercermin dalam Tata Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) di setiap inisiatif yang berkaitan. Dengan strategi bisnis ke depan yang lebih matang, dan tahapan-tahapan yang konkrit dengan tetap memperhatikan kepentingan sustainability perusahaan di masa mendatang sehingga menghasilkan eksekusi yang lebih jitu.

Di tahun 2022 ini, program kerja seluruh Bidang dapat terintegrasi dan terealisasi dengan matang, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya serta seluruh insan PLN Enjiniring dapat turut serta berkontribusi untuk memasarkan, mengenalkan, dan meningkatkan produk-produk Enjiniring tidak hanya di pasar internal PLN Group tetapi juga di pasar eksternal.

Selanjutnya didukung oleh Bidang Enjiniring dengan pelayanan yang andal, serta SDM yang berkompeten serta seluruh Bidang lain yang akan memberi support guna tercapainya sebuah sistem pelayanan PLN Enjiniring yang professional dan memuaskan pelanggan, sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan juga kian meningkat.

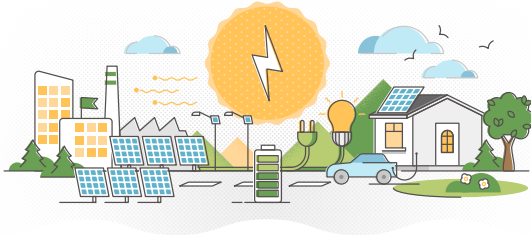
*In 2022, market challenges are getting bigger and more serious, PLN Enjiniring is carrying out a transformation by always supporting and implementing the PLN Group transformation program which is reflected in the AKHLAK Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) in every related initiative. With a more mature future business strategy, and concrete stages while still paying attention to the interests of the company's sustainability in the future, this will result in more accurate execution.*

*In 2022, work programs for all sectors can be thoroughly integrated and realized, both in terms of planning and implementation, and all PLN Engineering personnel can contribute to marketing, introducing and improving Engineering products not only in the PLN Group internal market but also in the external market.*

*Furthermore, it is supported by the Engineering Sector with reliable service, as well as competent human resources and all other sectors who will provide support to achieve a PLN Enjiniring service system that is professional and satisfies customers, so that customer trust and satisfaction also increases.*







# 2021



## TRANSFORMASI MENUJU TRANSISI ENERGI

### TRANSFORMATION TO ENERGY TRANSITION

Dalam RUPTL 2021-2030 yang telah di sah kan, kita dapat melihat bahwa di dalam proses pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia telah terjadi pergeseran dari penggunaan pembangkit listrik dari bahan bakar fosil menjadi Renewable Energy atau Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen dari pemerintah dalam Paris Agreement yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan NDC (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional.

Dengan lebih besarnya porsi penambahan pembangkit EBT di dalam RUPTL 2021-2030 yang mencapai 51,6% lebih besar dari pembangkit fosil yang mencapai 48,4%, PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk merealisasikan RUPTL 2021-2030.

PLN Enjiniring berusaha untuk bertransformasi menuju level yang lebih baik, dapat berkontribusi positif di dalam pekerjaan kelistrikan di Indonesia khususnya proyek-proyek Energi Baru Terbarukan yang akan mengambil porsi besar didalam pembangunan kelistrikan di Indonesia.

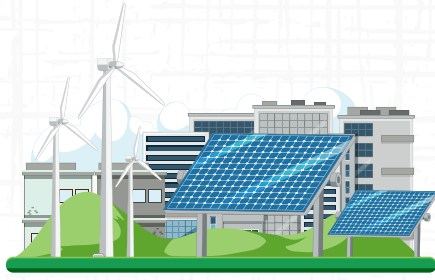
*In the RUPTL 2021-2030 which has been ratified, we can see that in the process of developing electricity in Indonesia, there has been a shift from the use of power plants from fossil fuels to Renewable Energy or New Renewable Energy (EBT) as cleaner and friendlier energy. environment. This is in line with the government's commitment in the Paris Agreement, namely reducing greenhouse gas (GHG) emissions in accordance with the NDC (Nationally Determined Contribution) in 2030 by 29% with its own capabilities and by 41% with international support.*

*With a larger portion of the addition of new and renewable energy plants in the 2021-2030 RUPTL which is 51.6% larger than fossil power plants which reached 48.4%, PT PLN Enjiniring is committed to realizing the 2021-2030 RUPTL.*

*PLN Enjiniring is trying to transform to a better level, can contribute positively to electricity work in Indonesia, especially New and Renewable Energy projects which will take up a large portion of electricity development in Indonesia.*







## PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN LAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

*"INCREASING THE PRODUCTIVITY AND SERVICE TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION"*

Bagi hampir semua perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan pastinya merupakan sebuah misi. Semakin tercapainya kepuasan pelanggan, maka artinya akan semakin bagus pula pelayanan dan produk atau jasa yang ditawarkan.

Kepuasan pelanggan juga mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau kesuksesan dari suatu bisnis. Dengan terus meningkatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan atau bisnis pastinya berkesempatan untuk meraih lebih banyak pelanggan dan mencapai target yang telah di tentukan.

Untuk itu pada Tahun 2020 ini tantangan dari PT PLN Enjiniring adalah bagaimana PLNE bisa membangun kepercayaan yang lebih baik lagi kepada para pelanggan yang menjadi mitra bisnis PLNE selama ini dan kepada para pelanggan baru yang menjadi target potensial bagi plne.

PLNE harus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri yang kuat di dalam bidang keilmuan yang dimiliki sebagai landasan di dalam menjalankan bisnis perusahaan. PLNE harus membangun komitmen yang baik dari sisi internal dan eksternal dan konsisten didalam menjaga relasi yang ada serta membangun reputasi perusahaan dan insan PLNE sendiri, agar tercipta relationship trus yang secara otomatis akan membentuk market trust kepada PT PLN Enjiniring.

Pelayanan yang prima dari insan-insan PLNE adalah kunci utama di dalam membentuk kepercayaan kepada mitra yang berefek kepada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan para mitra/pelanggan terhadap service dan komitmen yang dijalankan oleh PLNE.

*For almost all companies, increasing customer satisfaction is certainly a mission. The more customer satisfaction is achieved; it means that the better the services and products offered.*

*Customer satisfaction also reflects a measure of the success or succes of a business. By continuously improving customer satisfaction, a company or business certainly has the opportunity to reach more customers and achieve the targets that have been set.*

*For this reason, in 2020 the challenge for PT PLN Enjiniring is how PLNE can build better customers trust who have been PLNE's business partners so far and to new customers who are potential targets for PLNE.*

*PLNE must increase credibility and strong self-confidence in science field owned as a foundation in running the company's business. PLNE must build a good internal and external commitment as well as consistent in maintaining existing relationships and build the reputation of the company and PLNE's individual, in order to create a relationship that will automatically form market trust to PT PLN Enjiniring.*

*Excellent service from PLNE personnel is the main key in creating trust in partners which has an effect on increasing partners/customers trust and satisfaction on the services and commitments carried out by PLNE.*



## DAFTAR ISI

### Table of Contents

## Contents

2	<b>Kesinambungan Tema</b> <i>Theme &amp; Continuity</i>	38	<b>Pengawasan Terhadap Kinerja Pemasaran</b> <i>Marketing Performance Supervision</i>
8	<b>Daftar Isi</b> <i>Table of Contents</i>	39	<b>Pengawasan Terhadap Aspek SDM dan Pengembangan Karir SDM</b> <i>Supervision of HR Aspects and HR Career Development</i>
18	<b>Jejak Langkah</b> <i>Milestone</i>	40	<b>Pengawasan Terhadap Pengembangan Usaha/ Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi (APPA)</b> <i>Business Development/Subsidiaries and Affiliated Companies (APPA) Supervision</i>
24	<b>Kekuatan Kami</b> <i>OUR STRENGTH</i>	40	<b>Pengawasan Terhadap Kebijakan Mutu dan Pelayanan</b> <i>Quality Management and Service Policy Supervision</i>
25	<b>Proyek Unggulan</b> <i>Leading Project</i>	41	<b>Pengawasan Terhadap Manajemen Risiko</b> <i>Risk Management Supervision</i>
26	<b>Kilas Kinerja 2022</b> <i>Flash 2022</i>	41	<b>Pengawasan Terhadap Penyusunan Rancangan RKAP dan RJPP</b> <i>The Preparation of RKAP and RJPP Drafts Supervision</i>
28	<b>Ikhtisar Saham</b> <i>Ikhtisar Obligasi</i> <i>Stock Highlights</i> <i>Bond Overview</i>	43	<b>Laporan Direksi</b> <i>Board of Directors Report</i>
29	<b>PERISTIWA PT PLN ENJINIRING TAHUN 2022</b> <i>Important Events in 2022</i>	43	<b>Strategi Bisnis Perusahaan</b> <i>Company Business Strategy</i>
		44	<b>Kinerja Keuangan Tahun 2022</b> <i>2022 Financial Performance</i>
		45	<b>Kinerja Non Keuangan 2022</b> <i>2022 Non-Financial Performance</i>
		46	<b>Aspek Produksi Tahun 2022</b> <i>2022 Production Aspects</i>
		46	<b>Key Performance Index (KPI)</b> <i>Key Performance Index (KPI)</i>
		47	<b>Kendala-kendala yang Dihadapi</b> <i>Obstacles Faced in 2022</i>
		47	<b>Penerapan Good Corporate Governance</b> <i>The Implementation of Good Corporate Governance</i>
		48	<b>Perubahan Komposisi Direksi</b> <i>Changes in the Composition of the Board of Directors</i>
		48	<b>Penutup</b> <i>Concluding</i>
34	<b>Laporan Manajemen</b> <i>Management Report</i>		
36	<b>Laporan Dewan Komisaris</b> <i>BOARD OF COMMISSIONERS REPORT</i>		
38	<b>Pengawasan Terhadap KPI Perusahaan Tahun 2022</b> <i>2022 Company KPIs Supervision</i>		



## Laporan Manajemen

### Management Report







## Profil Perusahaan

Company Profile

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>54</b> <b>Profil Perusahaan</b><br/><i>The Company Profile</i></p> <p><b>56</b> <b>Profil Perusahaan</b><br/><i>Company Profile</i></p> <p><b>56</b> <b>IDENTITAS PERUSAHAAN</b><br/><i>COMPANY IDENTITY</i></p> <p><b>57</b> <b>Riwayat Singkat</b><br/><i>Brief History</i></p> <p><b>57</b> <b>Bidang Usaha</b><br/><i>Line of Business</i></p> <p><b>58</b> <b>Kegiatan Usaha yang Dijalankan</b><br/><i>Business Activities Undertaken</i></p> <p><b>58</b> <b>Produk/Jasa yang Dihasilkan</b><br/><i>Products / services produced</i></p> <p><b>59</b> <b>Jasa Enjiniring Terintegrasi</b><br/><i>Integrated Engineering Services</i></p> <p><b>59</b> <b>Jasa lainnya</b><br/><i>Other Services</i></p> <p><b>62</b> <b>Peta Lokasi Proyek</b><br/><i>Project Location Map</i></p> <p><b>62</b> <b>Struktur Organisasi</b><br/><i>Organization Structure</i></p> <p><b>63</b> <b>Visi, Misi dan Budaya Perusahaan</b><br/><i>Vision, Mission and Company Culture</i></p> <p><b>63</b> <b>VISI</b><br/><i>VISION</i></p> | <p><b>63</b> <b>MISI</b><br/><i>MISSION</i></p> <p><b>63</b> <b>Tata Nilai Perusahaan</b><br/><i>The Company's Culture</i></p> <p><b>66</b> <b>Profil Dewan Komisaris</b><br/><i>Profile of the Board of Commissioners</i></p> <p><b>73</b> <b>Profil Direksi</b><br/><i>Profile of the Board of Directors</i></p> <p><b>78</b> <b>Profil Pejabat Eksekutif</b><br/><i>Profile of Executive Officers</i></p> <p><b>79</b> <b>Struktur Korporasi</b><br/><i>Corporate Structure</i></p> <p><b>79</b> <b>Kronologi Pencatatan Saham</b><br/><i>Chronology of Registered Shares</i></p> <p><b>79</b> <b>Kronologi Pencatatan Efek Lainnya</b><br/><i>Chronology of Other Securities Registers</i></p> <p><b>80</b> <b>Daftar Entitas Anak dan/Entitas Asosiasi</b><br/><i>List of Subsidiary Companies and/or Associated Entities</i></p> <p><b>81</b> <b>Profil Anak Perusahaan</b><br/><i>Table of Subsidiaries and Associations</i></p> <p><b>83</b> <b>Profil Perusahaan Asosiasi</b><br/><i>Associated Company Profile</i></p> <p><b>91</b> <b>Lembaga Profesi Penunjang</b><br/><i>Supporting Professional Agencies</i></p> <p><b>91</b> <b>Kantor Akuntan Publik</b><br/><i>Public Accounting Firm</i></p> <p><b>91</b> <b>Notaris</b><br/><i>Notary</i></p> <p><b>91</b> <b>Konsultan Hukum</b><br/><i>Law Consultant</i></p> <p><b>92</b> <b>Penghargaan dan Sertifikasi</b><br/><i>Award and Certification</i></p> <p><b>93</b> <b>Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek</b><br/><i>Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office</i></p> |
|--|--|



**Analisis dan Pembahasan Manajemen**

*Management Discussion and Analysis*



<b>96</b>	<b>Analisis dan Pembahasan Manajemen</b> <i>Management Discussion and Analysis</i>	<b>119</b>	<b>Informasi Kelangsungan Usaha</b> <i>Business Continuity Information</i>
<b>98</b>	<b>Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan</b> <i>PLN Enjiniring Position in the Electrical Industry</i>	<b>120</b>	<b>Prospek Usaha</b> <i>Business Prospect</i>
<b>99</b>	<b>Tinjauan Operasional</b> <i>Operational Review</i>	<b>123</b>	<b>Strategi Pengembangan Usaha</b> <i>Business Development Strategy</i>
<b>101</b>	<b>Strategi Perusahaan</b> <i>Company Strategy</i>	<b>127</b>	<b>Rencana Investasi Bisnis Baru</b> <i>The New Business Investment Plan</i>
<b>108</b>	<b>Kinerja Operasi Per Segmen Usaha</b> <i>Operating Performance Per Business Segment</i>	<b>127</b>	<b>Tinjauan Keuangan</b> <i>Financial Review</i>
<b>108</b>	<b>Jasa Enjiniring</b> <i>Engineering Services</i>	<b>128</b>	<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b> <i>Consolidated Financial Position Statements</i>
<b>108</b>	<b>Bidang Pembangkit</b> <i>Generating Field</i>	<b>129</b>	<b>Posisi Keuangan Konsolidasian</b> <i>Consolidated Financial Position</i>
<b>110</b>	<b>Bidang Transmisi Dan Distribusi</b> <i>Transmission And Distribution Field</i>	<b>134</b>	<b>Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b> <i>Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income</i>
<b>112</b>	<b>Bidang Konstruksi</b> <i>Construction Field</i>	<b>136</b>	<b>Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b> <i>Consolidated income statement and other comprehensive income</i>
<b>114</b>	<b>Jasa Lainnya</b> <i>Other Service</i>	<b>139</b>	<b>Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih</b> <i>Net Financial Position And Others</i>
<b>115</b>	<b>Aspek Pemasaran</b> <i>Marketing Aspects</i>	<b>140</b>	<b>Laporan Arus Kas Konsolidasian</b> <i>Cash Flows Consolidated Statement</i>
<b>115</b>	<b>Strategi Pemasaran Pelanggan Internal dan Eksternal</b> <i>Internal and External Customer Marketing Strategy</i>	<b>140</b>	<b>Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b> <i>Consolidated profit (loss) and other comprehensive income</i>
<b>118</b>	<b>Pangsa Pasar</b> <i>Market Share</i>	<b>142</b>	<b>Tingkat Kesehatan Perusahaan</b> <i>Corporate Health Level</i>
		<b>143</b>	<b>Rasio Keuangan</b> <i>Financial Ratios</i>
		<b>145</b>	<b>Struktur Modal</b> <i>Capital Structure</i>
		<b>147</b>	<b>Perbandingan Target dan Realisasi</b> <i>Targets and Realization Comparison</i>
		<b>149</b>	<b>Proyeksi Tahun 2022</b> <i>2022 Projections</i>



**149 Informasi Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan**

*Material information that occurs after the date of the accountant's statement*

**149 Kebijakan Deviden**

*Dividend Policy*

**149 Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen Dan/Atau Karyawan**

*Management and/or Employees Share Ownership Program*

**150 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**

*Realization of the Use of Public Offering Funds*

**151 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal**

*Material information regarding Investments, Expansions, Divestitures, Mergers, Acquisitions or Debt/Capital restructurings*

**153 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi**

*Transaction Information Material Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Related Parties*

**154 Transaksi Pihak Berelasi**

*Related Party Transactions*

**157 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan**

*Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company*

**157 Perubahan Kebijakan Akuntansi**

*Changes in Accounting Policies*



## Sumber Daya Manusia

Human Resources



**160 Sumber Daya Manusia**

*Human Resources*

**162 Sumber Daya Manusia**

*Human Resources*

**163 Organisasi Pengelola Sumber Daya Manusia**

*Human Resource Management Organization*

**164 Profil Vice President SDM dan Umum**

*Vice President Of Hr And General Profile*

**164 Fungsi Dan Ruang Lingkup Tugas Bidang SDM & Umum**

*Functions and Scope of Duty in the Sector of Human Resources & General Affairs*

**165 Kebijakan Rekrutmen Sumber Daya Manusia**

*Human Resources Recruitment Policy*

**166 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

*Development Of Human Resources*

**179 Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan**

*Employee Competency Development Costs*

**180 Rencana Pelatihan Dan Sertifikasi Tahun 2022**

*Training And Certification Planning 2022*

**185 Employee Engagement**

*Employee Engagement*

**185 Manajemen Kinerja**

*Performance Management*

**187 Kebijakan Penghargaan Kepada Karyawan**

*Employee Policy To Employees*

**188 Fasilitas Kesehatan**

*Health Facilities*



189	<b>Program Pensiun</b> <i>Retirement Program</i>	209	<b>Tata Kelola Perusahaan Yang Baik</b> <i>Good Corporate Governance</i>
190	<b>Pengelolaan Hubungan Industrial</b> <i>Management Of Industrial Relations</i>	210	<b>Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Implementation of Corporate Governance</i>
190	<b>Survei Budaya</b> <i>Cultural Survey</i>	210	<b>Maksud, Tujuan dan Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Purpose, Objectives and Objectives Of Corporate Governance Implementation</i>
191	<b>Kesimpulan Hasil Survei</b> <i>Conclusion Of Survey Results</i>	210	<b>Maksud Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Purpose Of Implementing Good Corporate Governance</i>
192	<b>Pembinaan Kompetensi Dan Karir</b> <i>Development Of Competency And Career</i>	211	<b>Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Purpose Of Implementation Of Good Corporate Governance</i>
194	<b>Profil Karyawan</b> <i>Employee Profile</i>	212	<b>Sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Targets For The Implementation Of Good Corporate Governance</i>
194	<b>Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian</b> <i>Employee Composition Based on Civil Service Status</i>	212	<b>Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Legal Basis For Implementation Of Corporate Governance</i>
197	<b>Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi</b> <i>Employee Composition Based on Organization Position Levels</i>	215	<b>Struktur GCG</b> <i>GCG Structure</i>
200	<b>Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan</b> <i>Employee Composition Based on Education Level</i>	215	<b>Organ Perseroan</b> <i>Company Organs</i>
202	<b>Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia</b> <i>Employee Composition by Age</i>	218	<b>Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Responsible For Implementation Of Corporate Governance</i>
204	<b>Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender</b> <i>Employee Composition by Gender</i>	218	<b>Tahapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Stages Of Corporate Governance Implementation</i>
206	<b>Biaya Tenaga Kerja</b> <i>Labor Costs</i>	219	<b>Road Map Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Corporate Governance Road Map</i>
206	<b>Tingkat Turnover Pegawai</b> <i>Turnover Of Employees</i>	221	<b>Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2021</b> <i>Assessment Fiscal Year 2021</i>
		223	<b>Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2021</b> <i>Assessment For Financial Year 2022</i>
		224	<b>Sinergi Dengan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan</b> <i>Synergy With The Parent Company And Subsidiaries In The Implementation Of Good Corporate Governance</i>
		226	<b>Rapat Umum Pemegang Saham</b> <i>General Meeting Of Shareholders</i>



**Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**  
*Good Corporate Governance*





<b>226</b>	<b>Pedoman Pelaksanaan Rups</b> <i>Gms Implementation Guidelines</i>	<b>242</b>	<b>Kewajiban Dewan Komisaris</b> <i>Obligations Of The Board Of Commissioners</i>
<b>228</b>	<b>Hak Pemegang Saham</b> <i>Shareholders' Rights</i>	<b>243</b>	<b>Pembagian Tugas Dewan Komisaris</b> <i>Duties Of The Board Of Commissioners</i>
<b>230</b>	<b>Kewajiban Pemegang Saham</b> <i>Shareholders' Obligations</i>	<b>248</b>	<b>Kriteria Anggota Dewan Komisaris</b> <i>Criteria For Members Of The Board Of Commissioners</i>
<b>230</b>	<b>Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2022</b> <i>Implementation Of The 2022 General Meeting Of Shareholders (Gms)</i>	<b>250</b>	<b>Penilaian Kemampuan Dan Keputusan</b> <i>Capability And Fitness Assessment</i>
<b>231</b>	<b>Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</b> <i>Decision Of The General Meeting Of Shareholders (GMS)</i>	<b>250</b>	<b>Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners' Diversity Policy</i>
<b>231</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pengesahan Rkap 2022</b> <i>General Meeting Of Shareholders (GMS) Ratification Of Rkap 2022</i>	<b>253</b>	<b>Rangkap Jabatan Dewan Komisaris</b> <i>Dual Position Of Board Of Commissioners</i>
<b>231</b>	<b>Keputusan Rups :</b> <i>Gms Resolutions:</i>	<b>254</b>	<b>Program Pengenalan Untuk Komisaris Baru</b> <i>Introduction Program For New Commissioners</i>
<b>232</b>	<b>RUPS LPT Tahun Buku 2021</b> <i>GMS Annual Report Fiscal Year 2021</i>	<b>255</b>	<b>Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris</b> <i>Disclaimer And Registration Of The Board Of Commissioners</i>
<b>233</b>	<b>Keputusan RUPS LPT Tahun Buku 2021</b> <i>Decision Of GMS Annual Report Fiscal Year 2021</i>	<b>257</b>	<b>Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris</b> <i>Management Of Conflicts Of Interest Board Of Commissioners</i>
<b>235</b>	<b>Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners</i>	<b>258</b>	<b>Kepemilikan Saham Dewan Komisaris</b> <i>Share Ownership Of The Board Of Commissioners</i>
<b>235</b>	<b>Board Manual Dewan Komisaris</b> <i>Board Manual Of The Board Of Commissioners</i>	<b>259</b>	<b>Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners' Remuneration Policy</i>
<b>236</b>	<b>Komposisi Dewan Komisaris</b> <i>Composition Of The Board Of Commissioners</i>	<b>259</b>	<b>Prosedur Penetapan Remunerasi</b> <i>Remuneration Determination Procedure</i>
<b>238</b>	<b>Komisaris Independen</b> <i>Independent Commissioner</i>	<b>259</b>	<b>Fasilitas Anggota Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners' Facilities</i>
<b>238</b>	<b>Kriteria Penentuan Komisaris Independen</b> <i>Criteria For Determining Independent Commissioners</i>	<b>264</b>	<b>Rapat Dewan Komisaris</b> <i>Meeting Of The Board Of Commissioners</i>
<b>239</b>	<b>Pernyataan Komisaris Independen</b> <i>Statement Of The Independent Commissioner</i>	<b>265</b>	<b>Rapat Internal Dewan Komisaris</b> <i>Internal Meeting Of The Board Of Commissioners</i>
<b>240</b>	<b>Masa Jabatan Dewan Komisaris</b> <i>The Service Of The Board Of Commissioners</i>	<b>271</b>	<b>Rapat Dewan Komisaris Dengan Mengundang Direksi</b> <i>Meeting Of The Board Of Commissioners By Invite The Board Of Directors</i>
<b>240</b>	<b>Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b> <i>Duties And Responsibilities Of The Board Of Commissioners</i>	<b>275</b>	<b>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Performance Assessment Of The Board Of Commissioners</i>
<b>241</b>	<b>Wewenang Dewan Komisaris</b> <i>Authority Of The Board Of Commissioners</i>		



<b>275</b>	<b>Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners' Performance Assessment Criteria</i>	<b>284</b>	<b>Tugas Sekretariat Dewan Komisaris</b> <i>Duties of the Secretariat of the Board of Commissioners</i>
<b>275</b>	<b>Prosedur Pelaksanaan Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners Performance Implementation Procedures</i>	<b>285</b>	<b>Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris</b> <i>Term of Office of Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners</i>
<b>275</b>	<b>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan KPI</b> <i>Board Of Commissioners Performance Assessment Based On KPI</i>	<b>285</b>	<b>Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris</b> <i>Performance Evaluation of the Secretariat of the Board of Commissioners</i>
<b>276</b>	<b>Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Parties That Conduct The Board Of Commissioners' Performance Assessment</i>	<b>285</b>	<b>Profil Sekretaris Dewan Komisaris</b> <i>Board of Commissioners' Secretary Profile</i>
<b>276</b>	<b>Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Results Of The Board Of Commissioners' Performance Assessment</i>	<b>286</b>	<b>Komite Dewan Komisaris</b> <i>Committee Of The Board Of Commissioners</i>
<b>277</b>	<b>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment Good Corporate Governance (GCG)</b> <i>Performance Assessment Of The Board Of Commissioners Based On Good Corporate Governance (GCG) Assessment</i>	<b>286</b>	<b>Komite Audit</b> <i>Audit Committee</i>
<b>278</b>	<b>Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Board Of Commissioners' Performance Assessment Criteria</i>	<b>288</b>	<b>Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit</b> <i>Appointment and Dismissal of the Audit Committee</i>
<b>278</b>	<b>Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Procedure For Implementing The Board Of Commissioners Performance Assessment The Gcg</i>	<b>289</b>	<b>Tugas Komite Audit</b> <i>Audit Committee Duties</i>
<b>279</b>	<b>Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</b> <i>Parties That Perform The Board Of Commissioners' Performance Assessment</i>	<b>290</b>	<b>Masa Jabatan Anggota Komite Audit</b> <i>Term of Office of Audit Committee Members</i>
<b>279</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris</b> <i>Competency Development Of The Board Of Commissioners</i>	<b>290</b>	<b>Persyaratan Keanggotaan Komite Audit</b> <i>Audit Committee Membership Requirements</i>
<b>281</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022</b> <i>Implementation Of The Supervisory Duties Of The Board Of Commissioners In 2022</i>	<b>291</b>	<b>Independensi Komite Audit</b> <i>Independence of the Audit Committee</i>
<b>282</b>	<b>Remunerasi Dewan Komisaris</b> <i>Remuneration Of The Board Of Commissioners</i>	<b>292</b>	<b>Komite Nominasi Dan Remunerasi</b> <i>Nomination And Remuneration Committee</i>
<b>283</b>	<b>Organ Pendukung Dewan Komisaris</b> <i>Supporting Organs Of The Board Of Commissioners</i>	<b>293</b>	<b>Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi</b> <i>Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee</i>
		<b>294</b>	<b>Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi</b> <i>Duties of the Nomination And Remuneration Committee</i>
		<b>296</b>	<b>Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi</b> <i>Term Of Office For Nomination And Remuneration Committee Members</i>
		<b>296</b>	<b>Persyaratan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi</b> <i>Nomination And Remuneration Committee Member Requirements</i>
		<b>296</b>	<b>Komite Manajemen Risiko Dan GCG</b> <i>Risk Management And GCG Committee</i>



<p><b>299 Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko &amp; GCG</b> <i>Risk Management &amp; Gcg Committee Duties And Responsibilities</i></p> <p><b>299 Masa Jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG</b> <i>Term Of Office For Risk Management And Gcg Committee Members</i></p> <p><b>300 Persyaratan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG</b> <i>Risk Management And Gcg Committee Member Requirements</i></p> <p><b>300 Tata Kerja Komite</b> <i>Committee Working Procedures</i></p> <p><b>300 Piagam Komite</b> <i>Committee Charter</i></p> <p><b>300 Pakta Integritas</b> <i>Integrity Pact</i></p> <p><b>301 Rencana Kerja Dan Penganggaran</b> <i>Work Plan And Budget</i></p> <p><b>301 Rapat Komite</b> <i>Committee Meeting</i></p> <p><b>301 Pelaporan</b> <i>Reporting</i></p> <p><b>302 Akses Dan Kerahasiaan Informasi</b> <i>Access And Confidentiality Of Information</i></p> <p><b>302 Evaluasi Kinerja Komite</b> <i>Committee Performance Evaluation</i></p> <p><b>303 Direksi</b> <i>Directors</i></p> <p><b>303 Persyaratan Dan Pengangkatan Direksi</b> <i>Requirements And Appointment Of Board Of Directors</i></p> <p><b>304 Board Manual Direksi</b> <i>Board Manual Board Of Directors</i></p> <p><b>304 Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Direksi</b> <i>Duties, Authorities And Obligations Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>314 Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Direksi</b> <i>Term Of Service, Termination And Redemption Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>314 Masa Jabatan</b> <i>Length Of Service</i></p>	<p><b>314 Pemberhentian Sewaktu-Waktu Anggota Direksi</b> <i>Termination Of A Member Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>316 Pemberhentian Sementara Anggota Direksi</b> <i>Temporary Termination Of Members Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>318 Pengunduran Diri</b> <i>Resignation</i></p> <p><b>318 Pelaksana Tugas Anggota Direksi Yang Lowong</b> <i>Implementation Of Duties For Members Of The Vacant Board Of Directors</i></p> <p><b>320 Program Orientasi Bagi Direksi Baru</b> <i>Orientation Program For New Board Of Directors</i></p> <p><b>321 Ruang Lingkup Pekerjaan Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi</b> <i>Scope Of Work And Responsibilities Of Each Member Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>321 Pembagian Tugas Direksi</b> <i>Development Of Duties Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>323 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan</b> <i>Fitness Assessment</i></p> <p><b>323 Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi</b> <i>Diversity Policy Composition Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>325 Jumlah Dan Komposisi Direksi</b> <i>Number And Composition Of The Board Of Director</i></p> <p><b>326 Dasar Pengangkatan, Pemberhentian Dan Mulai Berlakunya Jabatan Direksi</b> <i>Basis For Appointment, Termination And Entry Into The Position Of Board Of Directors</i></p> <p><b>327 Hubungan Afiliasi Direksi</b> <i>Board Of Directors Affiliate Relationships</i></p> <p><b>329 Kepemilikan Saham Direksi</b> <i>Share Ownership Of The Board Of Directors</i></p> <p><b>330 Rangkap Jabatan Direksi</b> <i>Dual Positions Of Board Of Directors</i></p> <p><b>330 Pengaturan Rangkap Jabatan</b> <i>Multiple Position Arrangements</i></p> <p><b>332 Pengelolaan Benturan Kepentingan</b> <i>Conflict Of Interest Management</i></p> <p><b>333 Benturan Kepentingan</b> <i>Conflict Of Interest</i></p>
---	--



<b>334</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022</b> <i>Implementation Of Duties And Responsibilities Of The Board Of Directors In 2022</i>	<b>399</b>	<b>Kebijakan Teknologi Informasi</b> <i>Information Technology Policy</i>
<b>334</b>	<b>Rapat Direksi</b> <i>Board Of Directors Meeting</i>	<b>401</b>	<b>Roadmap Teknologi Informasi</b> <i>Information Technology Roadmap</i>
<b>335</b>	<b>Frekuensi Dan Kehadiran Rapat Direksi</b> <i>Frequency And Attendance Of Board Of Directors' Meetings</i>	<b>401</b>	<b>Pelaksanaan Teknologi Informasi</b> <i>Information Technology Implementation</i>
<b>336</b>	<b>Agenda, Tanggal Dan Persiapan Rapat Internal Direksi</b> <i>Agenda, Date And Preparation For Internal Meeting Of The Board Of Directors</i>	<b>405</b>	<b>Perkara Hukum Yang Dihadapi Pln Enjiniring</b> <i>Legal Cases Faced By Pln Enjiniring</i>
<b>339</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Direksi</b> <i>Board Of Directors' Competence Development</i>	<b>406</b>	<b>Pedoman Perilaku</b> <i>Code Of Conduct</i>
<b>341</b>	<b>Penilaian Kinerja Direksi</b> <i>Board Of Directors Performance Assessment</i>	<b>406</b>	<b>Tujuan Code Of Conduct</b> <i>Purpose Of The Code Of Conduct</i>
<b>345</b>	<b>Organ Dan Komite Di Bawah Direksi</b> <i>Organs And Committees Below The Board Of Directors</i>	<b>406</b>	<b>Tanggung Jawab Penerapan Dan Pengawasan Code Of Conduct</b> <i>Responsibilities For Implementing And Overseeing The Code Of Conduct</i>
<b>351</b>	<b>Organ Dan Komite Di Bawah Direksi</b> <i>Organs And Committees Below The Board Of Directors</i>	<b>407</b>	<b>Ruang Lingkup Code Of Conduct</b> <i>Scope Of The Code Of Conduct</i>
<b>365</b>	<b>Sistem Pengendalian Intern</b> <i>Internal Control System</i>	<b>407</b>	<b>Isi Code Of Conduct</b> <i>Code Of Conducts Content</i>
<b>366</b>	<b>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern</b> <i>Internal Control System Evaluation</i>	<b>407</b>	<b>Kepatuhan Terhadap Code Of Conduct</b> <i>Code Of Conduct Complianced</i>
<b>366</b>	<b>Kesesuaian Pengendalian Intern Dengan Kerangka Coso</b> <i>Conformity Of Internal Control With Coso Framework</i>	<b>408</b>	<b>Jenis Sanksi Pelanggaran Code Of Conduct</b> <i>Types Of Penalty For Code Of Conduct Violation</i>
<b>368</b>	<b>Organ Dan Komite Di Bawah Direksi</b> <i>Organs And Committees Below The Board Of Directors</i>	<b>410</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Kode Etik</b> <i>Number Of Code Of Conducts Violations</i>
<b>368</b>	<b>Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu Dan Risiko</b> <i>Procurement Unit, Quality And Risk Management</i>	<b>411</b>	<b>Kebijakan Pengendalian Gratifikasi</b> <i>Gratuity Policy</i>
<b>372</b>	<b>Tugas Dan Tanggung Jawab</b> <i>Duties And Responsibilities</i>	<b>414</b>	<b>Whistleblowing System</b> <i>Whistleblowing System</i>
<b>388</b>	<b>Sistem Manajemen Mutu</b> <i>Quality Management System</i>	<b>420</b>	<b>Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali</b> <i>Information On Major And Controlling Shareholders</i>
<b>397</b>	<b>Sistem Manajemen K3</b> <i>Health And Safety System Management</i>	<b>420</b>	<b>Akses Informasi Dan Data Perusahaan</b> <i>Access To Companies Information And Data</i>
<b>399</b>	<b>Sistem Teknologi Informasi</b> <i>Information Technology System</i>	<b>421</b>	<b>Media Informasi Perusahaan</b> <i>Information Media To Company</i>
		<b>421</b>	<b>Website</b> <i>Website</i>
		<b>422</b>	<b>Media Elektronik Interaktif</b> <i>Interactive Electronic Media</i>
		<b>422</b>	<b>Media Sosial</b> <i>Social Media</i>



422 **Media Internal**  
*Internal Media*



**Tanggung Jawab Perusahaan**  
*Company Responsibilities*

424 **Tanggung Jawab Perusahaan**  
*Company Responsibilities*

426 **Tanggung Jawab Perusahaan**  
*Corporate Responsibility*

426 **Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan**  
*Social & Environmental Responsibility*

433 **Corporate Social Responsibility (Csr) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja**  
*Corporate Social Responsibility (CSR) Related to Labor, Health and Safety Work*

433 **Ketenagakerjaan**  
*Employment*

438 **Kesehatan**  
*Health*

440 **Keselamatan Kerja**  
*Work safety*

442 **Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan**  
*Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development*

444 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen**  
*Corporate Social Responsibility Related To Consumer Responsibility*

446 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara**  
*Corporate Social Responsibility Related to Responsibility to the State*

448 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditor**  
*Corporate Social Responsibility With Responsibility To Creditors*

449 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok**  
*Corporate Social Responsibility With Responsibilities To Suppliers*



**Laporan Keuangan**  
*Financial Report*

450 **Laporan Keuangan**  
*Financial Report*

452 **Akuntan Publik**  
*Public Accounting*

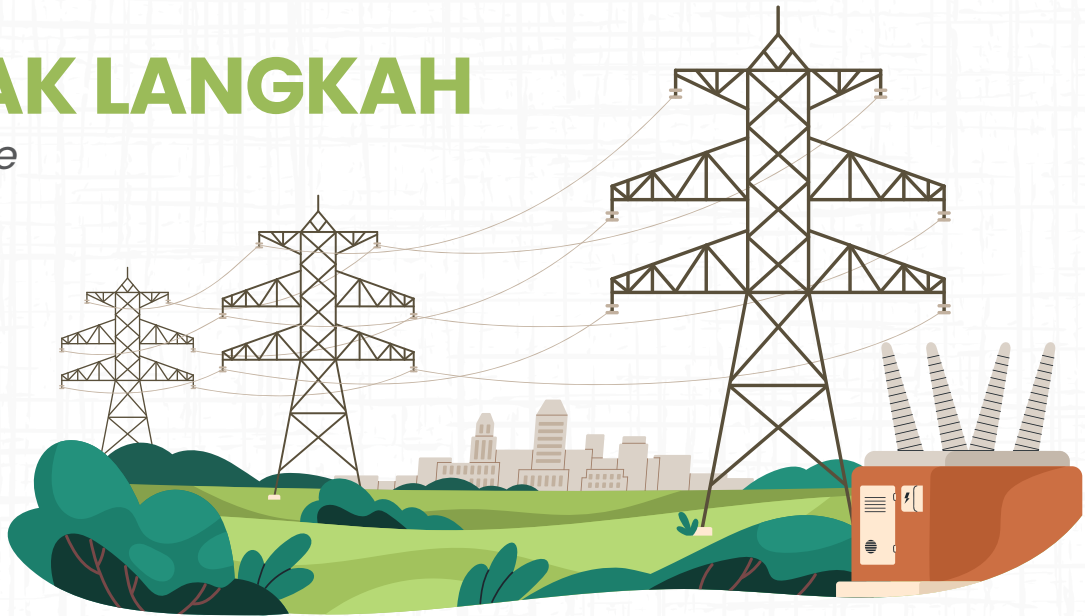
452 **Kantor Akuntan Publik**  
*Public Accounting Firm*

453 **Jasa Lain Yang Diberikan Akuntan**  
*Other Services Accountants Provide*



# JEJAK LANGKAH

Milestone



2002

2003

2004

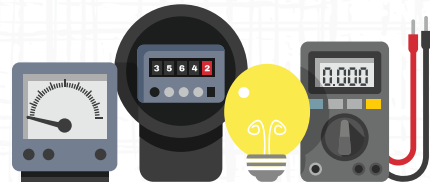
- Pendirian PT PLN Enjiniring.
- *Establishment of PT PLN Enjiniring.*



- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Tanjung Tambalong, Kalimantan Barat.
- *Project Supervision Implementation of PLTU(Steam Plant) Construction at Tanjung Tambalong, West Kalimantan.*
- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi I PLTGB Muara Tawar, Jawa Barat
- *Implementation of Supervision Project for PLTGB MuaraTawar Construction I, West Java*

- Pembangunan Independent Power Producer (IPP) PLTMG Prabumulih Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of Independent Power Producer (IPP) Prabumulih PLTMG with a capacity of 2x6 MW 2005*





- Pembangunan IPP PLTGU Musi, Palembang Kapasitas 3x4,7 MW dan 1x6 MW.
- *Construction of IPP Musi PLTGU, Palembang with a capacity of 3x4.7 MW and 1x6 MW.*
- Pembangunan IPP PLTMG Sako, Palembang Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of IPP Sako PLTMG, Palembang with a capacity of 2x6 MW.*

- Pembangunan IPP PLTU Sarolangun, Jambi Kapasitas 2x7 MW.
- *Construction of IPP Sarolangun PLTU, Jambi with a capacity of 2x7 MW.*

- Penambahan Modal Disetor dari PT PLN (Persero).
- *Paid-in capital addition from PT PLN (Persero).*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.
- *Change in organizational structure based on Directors Decree No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring dan Supervisi Konstruksi High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
- *Implementation of Engineering Design Project and Supervision of High Voltage Direct Current (HVDC) Construction from the Interconnection of Sumatra and Java Islands.*

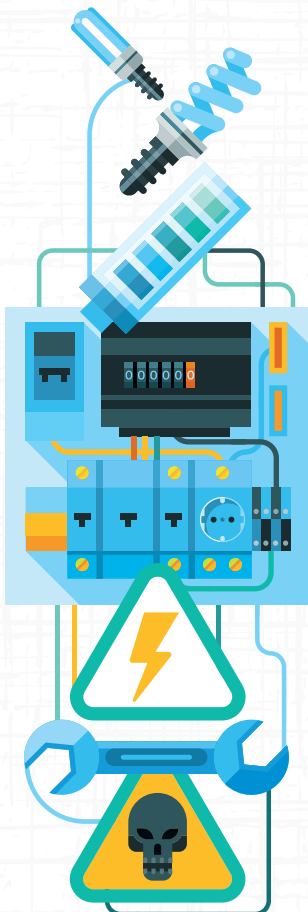
- Pengangkatan Pegawai Organik I PLN Enjiniring.
- *Appointment of Organic Staff I of PLN Enjiniring.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring untuk Pembangunan Pembangkit Skala Kecil dan Tersebar di Seluruh Indonesia.
- *Implementation of Engineering Design Projects for the Construction of Scattered-Small Scale Generators throughout Indonesia.*

- Pembayaran Dividen I ke Pemegang Saham.
- *Payment of Dividend I to Shareholders.*



2011

- Perubahan Visi dan Misi PLN Enjiniring.
- *Changes in the Vision and Mission of PLN Enjiniring.*
- Perubahan Organisasi Dari 4 (empat) Direktorat Menjadi 3 (tiga) Direktorat.
- *Organizational Change From 4 (four) Directorates to 3 (three) Directorates.*



2012

- Persiapan SDM memasuki bisnis sebagai Project Integrator.
- *Preparation of HR to enter business as a Project Integrator.*
- Persiapan bidang usaha baru yang telah disahkan melalui perubahan Anggaran Dasar.
- *Preparation of new business fields that have been ratified through amendments to the Articles of Association.*
- Penunjukan PLN Enjiniring untuk pembangunan pabrik switchgear di Indonesia.
- *Appointment of PLN Enjiniring for the construction of a switchgear factory in Indonesia.*

2013

- Pembentukan Entitas Asosiasi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI).
- *Establishment of Association Entity of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI).*
- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.01.001.K/010/DIR/ PLNE/VIII/2013.
- *Change in organizational structure based on Directors Decree No. 01.001.K/010/DIR/PLNE/VIII/2013.*





2014

- Penandatanganan Anggaran Dasar PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Entitas Asosiasi).
- *Signing of the Articles of Association of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Association Entity).*
- Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara.
- *Approval of the Establishment of a Subsidiary of PT Prima Power Nusantara.*
- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014
- *Changes in organizational structure based on the Directors Decree No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014.*
- Penandatanganan kontrak pembangunan CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Signing of the Bangkanai CNG Plant construction contract, Central Borneo.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Design dan Konstruksi PLTU Parit Baru (2x50 MW) Kalimantan Barat dan PLTA Jati Gede (2x55 MW) di Sumedang Jawa Barat.
- *Consultancy Services for Supervision of Design and Construction of Parit Baru PLTU (2x50 MW) West Borneo and Jati Gede (2x55 MW) PLTA in Sumedang, West Java.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW) di Sumatera Utara dan PLTU Takalar 2x100 MW di Sulawesi Selatan.
- *Consultancy Services for Construction Supervision and QA/QC of Pangkalan Susu PLTU 3 and 4 (2x200 MW) in North Sumatra and Takalar PLTU (2x100 MW) in South Sulawesi.*

2015

- Perjanjian Kerjasama PLN Pusat dan PLNE Penyediaan Jasa Pre-Treatment Gas dan CNG untuk keperluan Pembangkit Peaker di Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Central PLN Cooperation Agreement and PLNE Provision of Gas and CNG Pre-Treatment Services for the requisite of Peaker Generators in Bangkanai, Central Borneo.*
- Ground Breaking Pabrik Air-Insulated Switchgear Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi Pertama di Indonesia yang dimiliki oleh PT CromptonPrima Switchgear Indonesia di Cikande, Banten.
- *Ground Breaking Water Plant - Insulated High Voltage Switchgear and the First Extra High Voltage in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia at Cikande, Banten.*
- Jasa Konsultan Supporting Konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Peaker Grati Extension 450 MW, Grati Pasuruan, Jawa Timur.
- *Consultant Services for Supporting Construction of Peaker Grati Extension 450 MW Steam Power Plant (PLTGU) Project, Grati Pasuruan, East Java.*

2016

- Pendirian anak perusahaan PT Prima Power Nusantara yang bergerak di bidang usaha dalam bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan, minyak dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan.
- *Establishment of a subsidiary company of PT Prima Power Nusantara engaged in business in the fields of investment, operations and maintenance in the electricity and non-electricity, oil and gas sectors and the provision of supporting equipment in the electricity sector.*
- Perjanjian kerjasama jasa operasi dan pemeliharaan PLTMG Bangkanai 16x9,7MW tahap supporting antara PLNE dengan PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- *Agreement on cooperation in the operation and maintenance service of Bangkanai PLTMG 16x9.7MW in the supporting stage between PLNE and PT PLN (Persero) in South Borneo and Central Borneo.*





2017



- Pengoperasian Proyek CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah pada Bulan Maret 2017.
- *Operation of the Bangkanai CNG Plant Project, Central Borneo in March 2017.*
- Penyelesaian pembangunan Pabrik Switchgear PT CPSI dengan realisasi progress mencapai 72% pada Bulan Desember 2017.
- *Completion of the construction of PT CPSI Switchgear Factory with progress realization reaching 72% in December 2017.*
- Pelaksanaan pekerjaan EPC bidang Transmisi dan Gardu Induk oleh PT Prima Power Nusantara (PT PPN) sebagai pengembangan usaha bisnis inti Perseroan.
- *The implementation of EPC work in the field of Transmission and Substation by PT Prima Power Nusantara (PT PPN) as the development of the Company's core business.*

2018



- Peresmian dan Pengoperasian Pabrik Switchgear Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET) pertama di Indonesia milik PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) pada Senin, 20 Agustus 2018 di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten.
- *Inauguration and Operation of the first High Voltage (TT) and Extra High Voltage (TET) Factory in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) on Monday, August 20, 2018 in the Cikande Modern Industrial Estate, Banten.*

2019



- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) untuk Jasa Konsultasi Studi Interkoneksi dari Sistem Labuan Bajo ke Pulau Bajo
- *Agreement between PT PLN Enjiniring and PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) for Interconnection Study Consultation Services from the Labuan Bajo System to Bajo Island*
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN Enjiniring dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner dan Steag dengan bentuk kerjasama terkait Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant dengan Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development dengan GIZ serta Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant dengan Steag.
- *Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between PT PLN Enjiniring and GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner and Steag in a form of collaboration related to Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant with Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development with GIZ and Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant with Steag.*



"PLNE Transformation with Efficiency and Innovation Along With High Competitiveness Towards Sustainable Business"



2020

- Pembangunan PLTS 400 kWp Pulau Sebira – Kepulauan Seribu
- *Construction of 400 kWp PLTS Sebira Island – Seribu Islands*
- Pembangunan pipa gas jalur PK-52 ke PLTGU Tanjung Batu
- *Construction of the PK-52 gas pipeline to PLTGU Tanjung Batu*
- Golden Flag (Bendera Emas) untuk K3 Sektor Industri Treatment Gas dan Peaker CNG Plant Bangkanai dengan hasil capaian 87,34%
- *Golden Flag for health and safety (K3) in Industry Sector for Gas Treatment and CNG Peaker Plant Bangkanai with an achievement of 87.34%*
- BUMN Branding & Marketing Award 2020, Service Development Terbaik
- *BUMN Branding & Marketing Award 2020, Best Service Development*
- Pasokan gas CNG Plant Bangkanai berkontribusi meningkatkan keandalan system kelistrikan Kalimantan Tengah (PLN KITLURKAL)
- *CNG gas from the Bangkanai Plant supply contributes to improving the reliability of the Central Kalimantan electricity system (PLN KITLURKAL)*

2021

- Penandatanganan MoU dengan Masyarakat Biomassa Indonesia (MEBI) terkait Kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)
- *Signing of MoU with Indonesian Biomass Society (MEBI) related to Cooperation in Biomass Power Plant (PLTBm)*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) terkait Mentarang Induk HEP Power Evacuation System Study
- *Cooperation of PT PLN Enjiniring with PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN) related to Mentarang Induk HEP Power Evacuation System Study*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan Thorcon International Pte.Ltd untuk Jasa Konsultasi Enjiniring Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) ThorCon 500 MW
- *Cooperation of PT PLN Enjiniring with Thorcon International Pte.Ltd for Consulting Services for ThorCon 500 MW Thorium Power Plant Engineering (PLTT)*
- Pekerjaan Supervisi Konstruksi GI 150 kV Timika
- *Construction Supervision of GI 150 kV Timika*
- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terkait Pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Proyek Desain Revitalisasi Sistem Kelistrikan Istana Negara
- *Cooperation between PT PLN Enjiniring and PT PLN Main Distribution Unit for Greater Jakarta related to Project Management Consulting Services Design for the Revitalization of the State Palace Electricity System*
- Pekerjaan Desain Review, QA/QC dan Supervisi Konstruksi Shunt Reactor GITET 500/150 Kv PLTU Indramayu
- *Design Review, QA/QC and Construction Supervision of the GITET 500/150 Kv Shunt Reactor PLTU Indramayu Work*

2022

- Penyelesaian Pekerjaan Desain Review QA/QC dan Supervisi Konstruksi dengan tercapainya Energize Bay Shunt Reactor GITET 500kv Indramayu
- *Completion of QA/QC Review Design Work and Construction Supervision with the achievement of Energize Bay Shunt Reactor GITET 500kv Indramayu*
- Divestasi dan Akuisisi PT Rekadaya Elekrika Consult (REC)
- *Divestment and Acquisition of PT Rekadaya Elekrika Consult (REC)*
- Groundbreaking of Upper Cisokan Pumped Storage Hydroelectric Power Plant 4 x 260 MW
- Penyelesaian Design Review Pekerjaan Relokasi PLTG Grati 2 x 100 MW
- *Review of Design for Completion of Relocation Work for PLTG Grati 2 x 100 MW*



## Kekuatan Kami

### OUR STRENGTH

1. Merupakan satu-satunya Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis engineering di PLN Group
  2. Merupakan perusahaan engineering dengan jumlah insinyur terbanyak di Indonesia yaitu 510 orang insinyur dengan pengalaman di bisnis engineering lebih dari 15 tahun dan sudah mengerjakan lebih dari 700 kontrak proyek engineering dan supervisi konstruksi di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi
  3. Memiliki fasilitas ruang rapat dengan klien sebanyak 22 ruang rapat, *engineering software* berlisensi, *design guideline*, dan *code and standard* yang lengkap untuk pekerjaan *basic design*
  4. Memiliki *network* pendukung kegiatan engineering (SI, AMDAL, UKL/UPL, desain, dan manufaktur) baik di seluruh Indonesia maupun di lingkup internasional
  5. Memiliki sertifikat ISO 9001:2018 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  6. Memiliki produk dan layanan terintegrasi (*one stop engineering services* untuk tahap inisiasi, *development*, dan *operation*)
  7. Margin yang diperoleh dari bisnis *mid stream* gas mampu meningkatkan kemampuan finansial sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengembangan
1. *Is the only PLN Group Subsidiary whose engaged in the engineering business.*
  2. *Is an engineering company with the largest engineers number in Indonesia, namely 510 engineers with more than 15 years of experience in the engineering business and has worked on more than 700 engineering project contracts and construction supervision in the fields of generation, transmission and distribution.*
  3. *Has clients meeting room facilities as many as 22 meeting rooms, licensed engineering software, design guidelines, and complete code and standards for basic design work*
  4. *Have a network to support engineering activities (SI, AMDAL, UKL/UPL, design, and manufacturing) both throughout Indonesia and internationally*
  5. *Certified with ISO 9001:2018 certificate and Occupational Health and Safety Management System (SMK3)*
  6. *Have integrated products and services (one stop engineering services for the initiation, development, and operation stages)*
  7. *The margin obtained from the midstream gas business is able to increase financial capacity so that it can be used for development.*



## Proyek Unggulan

### Leading Project

Nama Proyek <i>Project Name</i>	Nilai Proyek <i>Project Value</i>		Durasi <i>Duration</i>	Lokasi <i>Location</i>
	IDR	USD		
Pekerjaan Supervisi Konstruksi SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap (Paket SV-01)	30.550.837.004		13 Mei 2016 – 30 Juni 2023	Riau, Jambi
Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 kV Peranap – Perawang	40.271.406.382		21 Januari 2016 – 31 Desember 2023	Riau, Jambi
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). <i>Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)</i>	53.024.221.637,761	6.827.576	September 2014 – 31 Desember 2021	Jatigede, Jawa Barat
Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project	69.620.826.533,5		06 Maret 2017 – 30 Maret 2021	Bekasi, Jawa Barat
Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan	123,377,562,124.00		17 Nov 2017 – 17 Nov 2024	Cisokan, Jawa barat
Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW)	334,985,483,326.00		16 Nov 2018 – 16 Dec 2023	Cisokan, Jawa barat



## Kilas Kinerja 2022

### Flash 2022

#### IKHTISAR KEUANGAN (DALAM JUTA RUPIAH)

#### FINANCIAL OVERVIEW (DALAM JUTA RUPIAH)

Uraian   Description	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian <i>Consolidated of Comprehensive Income Statements</i>	(dalam juta rupiah)					
Pendapatan Bersih <i>Net Income</i>	536,296	826,403	625,344	978,680	1,117,269	848,682
Beban Langsung <i>Direct Expenses</i>	307,330	574,049	436,166	717,048	812,914	605,463
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	228,966	252,354	189,178	261,632	304,355	243,219
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	153,090	182,494	190,713	136,740	129,098	112,665
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain - lain <i>Profit Before Financial Post and Other</i>	75,876	69,860	-1,535	124,892	175,257	130,554
Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih <i>Financial Post dan Others Net</i>	16,172	12,146	25,663	514	6,117	15,614
Laba Sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	92,048	82,006	24,128	125,406	169,140	114,940
Beban Pajak <i>Tax Expense</i>	9,241	8,184	4,947	7,392	5,056	10,021
Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif <i>Profit of the Current Year and Comprehensive Total Profit</i>	82,807	73,822	19,181	118,014	164,084	104,919
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan <i>Other Comprehensive Income of the current year</i>	3,227	-10,379	1,267	-679	1,509	3,227
Jumlah Penghasilan Komprehensif tahun berjalan <i>Comprehensive Income of the current year</i>	86,034	63,443	20,448	117,335	162,575	108,146
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	1,082,402	1,250,159	1,330,753	1,165,957	1,245,494	1,031,103
Jumlah Liabilitas <i>Amount of Liabilities</i>	304,639	391,621	516,117	496,947	599,838	495,568
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	777,763	858,538	814,636	669,010	645,656	535,535
Investasi pada Entitas Asosiasi <i>Investment in Association Entities</i>	12,373	11,764	9,851	13,726	26,98	32,053
Modal Kerja Bersih <i>Net Working Capital</i>	777,763	858,538	814,636	465,004	421,661	323,838
EBITDA	101,220	105,140	74,006	198,944	240,670	167,772



Rasio Ratio	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Marjin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	42.69	30.54	30.25	26.73	27.24	28.66
Rasio Kas (X) Cash Ratio (X)	1,9	1,41	0,89	0,58	0,69	1,03
Rasio Lancar (X) Current Ratio (X)	3,19	2,71	2,22	2,19	1,91	1,97
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (X) Ratio of Liabilities to Equity (X)	0,39	0,46	0,66	0,74	0,93	0,93
Rasio Liabilitas Terhadap Aset (X) Ratio of Liabilities to Assets (X)	0,28	0,31	0,4	0,43	0,48	0,48
Rasio Imbal Hasil Atas Aset (X) Return on Assets Ratio (X)	7.65	5.91	1.44	10.12	13.17	10.18
Rasio Imbal Hasil Atas Ekuitas (X) Return on Equity Ratio (X)	10.65	8.60	2.35	17.64	25.41	19.59
Rasio Imbal Hasil Atas Pendapatan (X) Revenue Ratio on Revenue (X)	0.15	0.09	0.03	0.12	0.15	0.12

**TABEL JUMLAH KONTRAK TAHUN 2017 - 2022 (DALAM UNIT KONTRAK)**  
TABLE NUMBER OF CONTRACTS YEAR 2017 - 2022 (IN CONTRACT UNIT)

Keterangan Explanation	Jumlah kontrak (Internal Eksternal)   Number of Contract (Internal & Eksternal)																	
	2022			2021			2020			2019			2018			2017		
	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total
Kontak Baru New Contracts	168	17	185	183	15	198	75	10	85	87	11	98	118	9	127	91	9	100
<b>Jumlah Total</b>	<b>169</b>	<b>17</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>15</b>	<b>198</b>	<b>75</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>11</b>	<b>98</b>	<b>118</b>	<b>9</b>	<b>127</b>	<b>91</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

**TABEL PEROLEHAN KONTRAK JASA ENJINIRING (DALAM RUPIAH)**  
ENGINEERING SERVICES CONTRACT GAINS TABLE (IN INDONESIAN RUPIAH)

Uraian Description	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Internal Internal	304.88	283.11	115,100.65	164,160.87	910,719.71	513,431.93
Eksternal External	13.31	38.52	6,136.70	8,321.84	11,061.77	9,825.05
<b>Jumlah Total</b>	<b>318.19</b>	<b>321.63</b>	<b>121,237.35</b>	<b>172,482.71</b>	<b>921,781.49</b>	<b>523,256.98</b>



## IKHTISAR SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN Enjiniring tidak memiliki catatan mengenai Ikhtisar pencatatan saham maupun pencatatan efek lainnya, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

## IKHTISAR OBLIGASI

Sampai dengan akhir tahun 2022, PLN Enjiniring tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

## STOCK HIGHLIGHTS

*Until the end of 2022, PLN Enjiniring does not have a record regarding the Summary of share listings or other securities listings, this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.*

## BOND OVERVIEW

*Until the end of 2022, PLN Enjiniring does not issue bonds, sukuk and convertible bonds, so there is no information regarding the number of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding, interest*



# PERISTIWA PT PLN ENJINIRING TAHUN 2022

Important Events in 2022



## PLNE BERHASIL Mendukung PLN UIP JBT DALAM PROYEK GITET 500/150 kV PLTU INDRAMAYU

PLN Enjiniring berhasil mendukung PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah untuk lingkup pekerjaan Desain Review, QA/QC dan Supervisi Konstruksi Shunt Reactor GITET 500/150 kV PLTU Indramayu yang telah energize pada November 2021.

**Gambar 1.** Energize Bay Shunt Reactor GITET 500kv PLTU Indramayu

*Picture 1.* Energize Bay Shunt Reactor GITET 500kv PLTU Indramayu



## MEMBANGUN NEGERI MELALUI PENDIDIKAN, PLNE MEMBERIKAN BANTUAN FASILITAS PENDIDIKAN KE SMP YAYASAN PENDIDIKAN BANGKANAI

Barito Utara – Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan di daerah 3T, PLN Enjiniring memberikan bantuan fasilitas pendidikan untuk sekolah rintisan, SMP Yayasan Pendidikan Bangkanai, pada Jumat (25/3)

**Gambar 2.** CSR : Bantuan Fasilitas Pendidikan Untuk SMP Yayasan Pendidikan Bangkanai

*Picture 2.* CSR: Educational Facilities Assistance for Bangkanai Education Foundation Middle Schools



## DUKUNG PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA, PLNE MENANDATANGANI AMANDEMEN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN GIZ

PLNE menandatangani Amandemen Nota Kesepahaman dengan Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) secara offline di Menara Enjiniring pada Jum'at (08/04).

**Gambar 3.** Penandatanganan Amandemen Nota Kesepahaman PLN Enjiniring dengan Deutsche Gessellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

*Picture 3.* Signing of Amendment to PLN Enjiniring Memorandum of Understanding with Deutsche Gessellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)u



## PLNE TEKEN MOU DENGAN PLN PUSLITBANG

Guna meningkatkan kompetensi, pendayagunaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi di bidang ketenagalistrikan, PLNE menandatangani MoU atau Nota Kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PUSLITBANG di Menara Enjiniring pada Senin (11/04).

**Gambar 4.** Penandatanganan Nota Kesepahaman PLN Enjiniring dengan PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

*Picture 4.* Signing of a Memorandum of Understanding between PLN Enjiniring and PT PLN (Persero) Electricity Research and Development Center





**PLNE MENANDATANGANI KONTRAK LAYANAN TEKNIS PROYEK UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE POWER PLANT**

Jakarta - PLNE melakukan tanda tangan amandemen kontrak dengan Joint Operation of Nippon Koei, Co. Ltd., Newjec Inc., PT Indokoei Internasional, dan PT Wiratman untuk Proyek Upper Cisokan Pumped Storage pada Senin (25/04).



**Gambar 5.** Penandatanganan Amandemen Kontrak PLN Enjiniring dengan Joint Operation of Nippon Koei, Co.Ltd., Newjec Inc., PT Indokoei Internasional, dan PT Wiratman untuk Proyek Upper Cisokan Pumped Storage

*Picture 5. Signing of the PLN Engineering Contract Amendment with the Joint Operation of Nippon Koei, Co. Ltd., Newjec Inc., PT Indokoei Internasional, and PT Wiratman for the Upper Cisokan Pumped Storage Project*

**PEDULI PENDIDIKAN ANAK, PLNE LAKSANAKAN PROGRAM CSR COMMUNITY DEVELOPMENT DI TK AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH**

PLNE melalui Sub Bidang Kinerja dan Komunikasi menyalurkan bantuan pendidikan ke TK Al Irsyad Al Islamiyyah, Jakarta pada Kamis (11/08). Program yang fokus pada pendidikan tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Enjiniring di sekitar wilayah kerja.



**Gambar 6.** CSR : Bantuan Pendidikan untuk TK Al Irsyad Al Islamiyyahi

*Picture 6. CSR: Educational Assistance for Al Irsyad Al Islamiyyah Kindergarten*

**PLNE SALURKAN BANTUAN UNTUK PENDIDIKAN ANAK MELALUI PROGRAM CSR COMMUNITY DEVELOPMENT**

PLNE salurkan bantuan untuk pendidikan anak melalui program CSR Community Development di TPA Berkah Menyapa Jakarta pada Rabu (24/08). Program yang fokus pada pendidikan tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN Enjiniring di sekitar wilayah kerja.



**Gambar 7.** CSR : Bantuan Pendidikan untuk TPA Berkah Menyapa

*Picture 7. CSR: Educational Assistance for TPA Berkah Menyapa*



**Gambar 8.** Groundbreaking PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS)

*Picture 8. Groundbreaking of Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) Hydroelectric Power Plant*





**Gambar 9.** CSR : Bantuan Pembangunan Jembatan Titian Perangan – CNG Plant Bangkanai

*Picture 9.* CSR: Assistance for the construction of the Titian Panginan Bridge – Bangkanai CNG Plant



**Gambar 10.** Penandatanganan MoU Acara Energy Transition Day)

*Picture 10.* Signing of MoU for Energy Transition Day Event



**Gambar 11.** Peringatan Hari Listrik Nasional Ke-77

*Picture 11.* Commemoration of the 77th National Electricity Day





**MENUJU AKHIR TAHUN 2022,  
PLN ENJINIRING SELENGGARAKAN RAPAT KERJA**

Menuju akhir tahun 2022, PLN Enjiniring selenggarakan Rapat Kerja di Sheraton Bandung Hotel & Towers pada Kamis (03/11). Rapat Kerja yang dihadiri oleh Direksi, Manajemen PLNE serta tamu undangan tersebut mengusung tema "Achieving PLNE Next Level Goals by Strengthening Core Business and Building Adjacency Businesses". Dimana dalam implementasi Program transformasi PLN, posisi PLNE diharapkan dapat menjadi satu-satunya entitas enjiniring yang mendukung fungsi enjiniring dalam penyiapan proyek investasi PLN dan produk ekosistem kelistrikan di PLN Group yang berperan sebagai Center of Excellence yang memelihara kepakaran di bidang enjiniring serta sebagai Guardian Spending project preparation PLN.



**Gambar 12.** Rapat Kerja PT PLN Enjiniring 2022

*Picture 12. PT PLN Enjiniring Working Meeting 2022*

**PLN ENJINIRING SABET PENGHARGAAN  
BUMN BRANDING & MARKETING AWARD 2022**

Jakarta - PLN Enjiniring berhasil mendapatkan penghargaan Bronze Winner di ajang BUMN Branding & Marketing Award kategori Global Branding & Marketing Award, International Recognition pada Rabu (09/11) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.



**Gambar 13.** PLNE Mendapatkan Penghargaan Bronze Winner di Ajang BUMN Branding & Marketing Award

*Picture 13. PLNE Received the Bronze Winner Award at the BUMN Branding & Marketing Award Event*

**PLNE MENOREHKAN PRESTASI  
PADA ACARA LEADERSHIP AWARD TAHUN 2022**

PT PLN Enjiniring menorehkan prestasi pada acara Leadership Award Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) UPDL Jakarta di Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada Kamis (08/12).



**Gambar 14.** PLNE mendapatkan Best Participant Award dalam acara Leadership Award Tahun 2022

*Picture 14. PLNE received the Best Participant Award at the 2022 Leadership Award event*

**DUKUNG PEMBANGKIT BERBASIS EBT,  
PLNE IKUT TERLIBAT DALAM PROYEK PLTB SUMATERA 2X55 MW**

Aceh - Dukung Pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), PLN Enjiniring ikut terlibat dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sumatera 2x55 MW. Pada proyek tersebut, PLN Enjiniring diamanahi untuk mengerjakan Pra Feasibility Study dengan dibantu oleh Pemerintah Denmark melalui DEA/DTU.



**Gambar 15.** PLNE melakukan pekerjaan Pra Feasibility Study Proyek PLTB Sumatera 2x55 MW

*Picture 15. PLNE is carrying out Pre-Feasibility Study work for the 2x55 MW Sumatra PLTB Project*

**Sumber:** Dokumentasi Tim Komunikasi

*Source: Communication Team Documentation*









# Laporan Manajemen

*Management Report*











## Laporan Dewan Komisaris BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi atas kebijakan, pengurusan, dan usaha Perusahaan.

Dalam rangka memenuhi amanah ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dengan ini Dewan Komisaris PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (yang selanjutnya disebut PLN Enjiniring atau Perusahaan) menyampaikan Laporan pengawasan atas pelaksanaan RKAP Tahun 2022.

Pengawasan Dekom pada tahun 2022 difokuskan pada: (i) KPI Perseroan Tahun 2022, (ii) Kinerja Keuangan, (iii) Kinerja Pemasaran, (iv) Aspek SDM dan Pengembangan Karir, (v) Sistem Teknologi Informasi, (vi) Pengawasan Pengembangan Usaha/Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi, (vii) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, (viii) Manajemen Risiko, (ix) Kebijakan Mutu dan Pelayanan, (x) Kebijakan Pengadaan, (xi) Kepatuhan Direksi Dalam Menjalankan Peraturan Perundangan, (xii) Sistem Pengendalian Internal, (xiii) Penyusunan RKAP Tahun 2023, (xiv) Pelaksanaan RJPP, (xv) Tindak Lanjut Arahan RUPS & Dekom.

Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2022 disusun berdasarkan RKAP tahun 2022, Laporan Manajemen dan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2022, hasil rapat-rapat koordinasi antara Dekom dan Direksi, serta melihat perkembangan usaha Perusahaan sampai akhir tahun 2022.

Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2022 disusun dengan membandingkan RKAP Tahun 2022 terhadap laporan-laporan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang terdiri dari:

*Based on the provisions of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners has the duty and obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on the Company's policies, management, and business.*

*In order to fulfill the mandate of the provisions of the laws and regulations and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners of PT Prima Jasa Nasional Enjiniring (hereinafter referred to as PLN Enjiniring or the Company) submits a supervisory report on the implementation of the 2022 RKAP.*

*Board of Commissioner's supervision in 2022 focuses on: (i) the Company's KPI for 2022, (ii) Financial Performance, (iii) Marketing Performance, (iv) HR and Career Development Aspects, (v) Information Technology System, (vi) Supervision of Business Development/Subsidiaries and Affiliated Companies, (vii) Good Corporate Governance, (viii) Risk Management, (ix) Quality and Service Policy, (x) Procurement Policy, (xi) Board of Directors Compliance in Implementing Laws and Regulations, (xii) Internal Control System, (xiii) Preparation of RKAP Year 2023, (xiv) Implementation of RJPP, (xv) Follow-up Directives of General Meeting Shareholder (GMS) & Board of Commissioner (BOC).*

*The 2022 BOC Supervisory Report is prepared based on the 2022 RKAP, Management Report and 2022 Risk Management Implementation Report, the results of coordination meetings between BOC and the Board of Directors (BOD), and at the Company's business development until the end of 2022.*

*The 2022 BOC Supervision Report was prepared by comparing the 2022 RKAP against the audit reports by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners consisting of:*



1. Laporan Keuangan No. 00963/2.1025/AU.1/05/1789-2/1/V/2023, tanggal 26 Mei 2023  
**"Menurut opini kami Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan konsolidasian PT PLN Enjiniring dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia"**
  2. Laporan Kepatuhan No. N20230531022 /DC2/ FSA / 2023, tanggal 31 Mei 2023  
**"Berdasarkan Pertimbangan kami atas pengendalian internal yang diacu di atas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT PLN Enjiniring untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, tidak ada temuan berkaitan dengan pengendalian internal yang kami pandang sebagai kelemahan material"**
  3. Laporan Evaluasi Kinerja No. N20230531023/ DC2/FSA/2023 tanggal 31 Mei 2023  
**"Kami telah melaksanakan prosedur yang telah disepakati oleh manajemen PT PLN Enjiniring (Perseroan) berkaitan dengan laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan untuk tahun anggaran 31 Desember 2022 sebagaimana yang kami uraikan dalam laporan evaluasi kinerja. Perikatan ini kami laksanakan berdasarkan Standar Jasa Terkait yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku untuk perikatan prosedur yang disepakati. Prosedur ini kami laksanakan semata-mata untuk membantu pemegang saham perusahaan dalam mengevaluasi tingkat Kesehatan Perusahaan. Tingkat Kesehatan Perusahaan SEHAT kategori "AAA" dengan nilai 102,51"**
1. *Financial Report No. 00963/2.1025/AU.1/05/1789-2/1/V/2023, dated May 26th, 2023*  
*"In our opinion, the attached Consolidated Financial Statements present fairly in all material respects, the consolidated financial position of PT PLN Enjiniring and its subsidiaries as of December 31st, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in Indonesia"*
  2. *Compliance Report No. N20230531022 /DC2/ FSA/2023, dated May 31st, 2023*  
*"Based on our Consideration of the internal controls referred to above in the planning and conducting of our audit of PT PLN Enjiniring's consolidated financial statements for the year ended December 31st, 2022, there are no findings relating to internal controls that we view as weaknesses material "*
  3. *Performance Evaluation Report No. N20230531023/ DC2/FSA/2023 dated May 31st, 2023*  
*"We have carried out the procedures agreed upon by the management of PT PLN Enjiniring (the Company) regarding the Company's Performance Evaluation report for the fiscal year of December 31st, 2022 as we describe in the performance evaluation report. We carry out this engagement based on the Related Service Standards set by the Indonesian Institute of Public Accountants which apply to the agreed engagement procedure. We carry out this procedure solely to assist the company's shareholders in evaluating the Company's Health level. Company Health Level HEALTHY category "AAA" with a value of 102.51"*



## PENGAWASAN TERHADAP KPI PERUSAHAAN TAHUN 2022

Hasil Pencapaian KPI Perusahaan Tahun 2022 diperoleh skor 102,51, digolongkan dalam kondisi SEHAT. Untuk kinerja tahun 2022 tidak terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai (merah). KPI Manajemen PLN Enjiniring tahun 2022 mendapatkan skor 102,51 (masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia sebesar 40,25, Inovasi Model Bisnis sebesar 25,78, Kepemimpinan Teknologi sebesar 14,60, Peningkatan Investasi sebesar 10,88, Pengembangan Talenta sebesar 11,00, serta Aspek Kepatuhan sebesar 0,00.

Selama tahun 2022, Dekom telah menyampaikan arahan-arahan untuk mendorong Direksi agar melakukan best effort untuk mencapai target KPI Tahun 2022, diantaranya agar Direksi senantiasa melaksanakan strategi pengembangan usaha yang inovatif dan agresif, melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, menyusun roadmap peningkatan kompetensi enjinir-enjinir muda, melakukan optimalisasi dan efisiensi biaya operasional namun dengan tetap memperhatikan mutu, serta melakukan monitoring dan controlling yang ketat atas pencapaian KPI selama tahun 2022.

## PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEMASARAN

Pada tahun 2022, progres bidang pemasaran adalah jumlah penugasan sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) penugasan dengan potensi nilai sebesar Rp.386.099.454.388,- (tanpa PPn) dengan rincian sebagai berikut yaitu :

1. Sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pekerjaan terkontrak dengan nilai sebesar Rp. 318.194.561.742,- (tanpa PPn);
2. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) penugasan dalam proses kontraktual dengan potensi nilai sebesar Rp. 50.296.024.946,- (tanpa PPn);
3. Sebanyak 9 (sembilan) penugasan yang dibatalkan dengan potensi nilai sebesar Rp.12.777.974.300,- (tanpa PPn).

## 2022 COMPANY KPIS SUPERVISION

*The results of 2022 Company's KPI Achievement obtained a score of 102.51, classified as HEALTHY. For 2022 performance, there are no performance indicators that are not achieved (red). PLN Enjiniring Management KPI in 2022 received a score of 102.51 (included in the HEALTHY company group, AAA category) with the achievement of each indicator being the 40.25 in Indonesia's Economic and Social Value, 25.78 in Business Model Innovation, 14.60 in Technology Leadership, 10.88 in Increasing Investment, 11.00 in Talent Development, and 0.00 in Compliance Aspects.*

*During 2022, BOC has conveyed directions to encourage the Board of Directors to make the best effort to achieve the 2022 KPI target, including that the Board of Directors always implements innovative and aggressive business development strategies, takes corrective actions to increase customer satisfaction, roadmap compliance in improving the competence young engineers, optimizing and efficiency the operates costs while still paying attention to quality, and conduct strict monitoring and controlling of KPI achievements during 2022.*

## MARKETING PERFORMANCE SUPERVISION

*In 2022, the marketing sector progress is in the number of assignments until the end of 2022 as many as 234 (two hundred thirty-four) assignments with a potential value of IDR 386.099.454.388,- (without VAT) with the following details, namely:*

1. A total of 185 (one hundred and eighty-five) job contracts valued in IDR 318,194,561,742,- (without VAT);
2. A total of 32 (thirty-two) assignments in the contractual process with a potential value of IDR 50,296,024,946,- (without VAT);
3. A total of 9 (nine) canceled assignments with a potential value of IDR 12, 777, 974,300,- (without VAT).



4. Sebanyak 6 (enam) penugasan yang ditunda dengan potensi nilai sebesar Rp.4.204.532.600,- (tanpa PPN).
5. Sebanyak 2 (dua) penugasan yang menjadi amandemen kerja tambah pada kontrak terdahulu dengan potensi nilai sebesar Rp. 626.360.800,- (tanpa PPN).

Selama tahun 2022, Dekom senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pencapaian kinerja pemasaran dan telah menyampaikan arahan dan rekomendasi diantaranya agar Direksi mengembangkan strategi dan program bisnis untuk menuju perusahaan enjiniring internasional dengan target pasar PLN Group dan di luar PLN Group, mengantisipasi adanya restrukturisasi organisasi terkait pelaksanaan fungsi enjiniring di PLN Group (PUSENLIS), memastikan pengembangan usaha untuk proyek- proyek EBT, memastikan antisipasi terkait isu digitalisasi, dekarbonisasi dan desentralisasi, mengembangkan portofolio yang dapat memberikan kontribusi segera kepada kinerja keuangan serta melakukan kolaborasi dengan mitra untuk pemenuhan tenaga ahli dan antisipasi perkembangan teknologi.

## PENGAWASAN TERHADAP ASPEK SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR SDM

Pada tahun 2022, pengelolaan aspek SDM dan pengembangan karir SDM PLN Enjiniring dilaksanakan selaras dengan tema strategis Perusahaan yaitu meningkatkan keandalan, peningkatan *revenue*, *cost efficiency* dan peningkatan *customer experience*. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut Dekom telah menyampaikan arahan dan rekomendasi, diantaranya agar Direksi menyusun roadmap SDM yang menjelaskan pengelolaan SDM 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan arah pengembangan usaha Perseroan, pengembangan EBT, trend bisnis, perkembangan teknologi, pembangunan tata nilai, syarat sertifikasi, kebutuhan kemitraan dan lain-lain, sehingga pengelolaan SDM dapat memberikan *value* yang maksimal bagi Perseroan. Selain itu Dekom juga telah menyampaikan agar pengembangan talent pool Perseroan dilakukan baik untuk karyawan struktural maupun fungsional karena bidang usaha Perseroan adalah bergerak di bidang enjiniring yang sangat bergantung pada kepakaran.

4. A total of 6 (six) postponed assignments with a potential value of IDR 4,204,532,600,- (without VAT).
5. A total of 2 (two) assignments that become work amendments added to the previous contract with a potential value of IDR 626,360,800,- (without VAT).

*During 2022, BOC continues to supervise the achievement of marketing performance and has conveyed directions and recommendations, including that the Board of Directors develop business strategies and programs towards international engineering companies with PLN Group target markets and outside PLN Group, anticipate organizational restructuring related to the implementation of engineering functions in PLN Group (PUSENLIS), ensure business development for EBT projects, Preventive action related to digitalization, decarbonization and decentralization issues, develop portfolios that can contribute immediately to financial performance and collaborate with partners to fulfill experts and anticipate technological developments.*

## SUPERVISION OF HR ASPECTS AND HR CAREER DEVELOPMENT

*In 2022, the management of HR aspects and career development of PLN Enjiniring will be carried out in line with the Company's strategic theme, namely increasing reliability, increasing revenue, cost efficiency and improving customer experience. In order to support these activities, BOC has conveyed directions and recommendations, including that the Board of Directors compile an HR roadmap that explains the management of human resources for the next 5 years by considering the direction of the Company's business development, EBT development, business trends, technological developments, value development, certification requirements, partnership needs and others, so that HR management can provide value which is maximum for the Company. In addition, BOC has also stated that the Company's talent pool development is carried out both for structural and functional employees because of the Company's business field whom engaged in engineering which is very dependent on expertise.*



## PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA/ ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI (APPA)

Pada tahun 2022, terdapat 2 program Perseroan yang terkait aksi korporasi menyangkut Anak Perusahaan yaitu aksi korporasi implementasi strategi *Quick Win A15* dan *A16/ Akuisisi PPN – REC* dan aksi korporasi penyelesaian permasalahan di PT CPSI. Atas aksi korporasi ini Dekom senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan/rekomendasi diantaranya agar Direksi menyempurnakan prosedur pengawasan APPA sehingga capaian kinerjanya termonitor dan patuh terhadap GCG, memastikan pemilihan opsi penyelesaian permasalahan di PT CPSI didukung oleh kajian komprehensif dari segi operasional, pasar, finansial, legal dan risiko yang penyusunannya dilakukan dengan dukungan dari konsultan yang kompeten dan pengalaman, memastikan kajian yang dihasilkan menggambarkan skenario bisnis dan potensi sustainability atas opsi-opsi yang dapat dipilih sehingga dapat menggambarkan opsi yang dapat memberikan *value* yang optimal bagi Perusahaan, serta memastikan pelaksanaan keseluruhan proses akuisisi PPN-REC dilakukan secara *prudent*, mematuhi peraturan perundang-undangan serta sesuai GCG.

## PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN MUTU DAN PELAYANAN

Untuk memastikan pencapaian sasaran peningkatan kepuasan pelanggan, kualitas produk engineering serta keselamatan dan kesehatan kerja, Perseroan menerapkan SMT yang meliputi Sistem manajemen Mutu – ISO 9001:2015, Manajemen Risiko – ISO 31000:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) – Peraturan Pemerintah RI 50 tahun 2012, Sistem Manajemen Anti Penyuapan – ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Kepatuhan – ISO 19600:2014, Sistem Manajemen Keamanan Informasi – ISO 27001:2016, dan Sistem Manajemen Keamanan Organisasi – Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007.

## BUSINESS DEVELOPMENT/ SUBSIDIARIES AND AFFILIATED COMPANIES (APPA) SUPERVISION

*In 2022, there are 2 Corporate Programs related to corporate actions related to Subsidiaries, namely corporate actions for the implementation of Quick Win A15 and A16 strategies / VAT – REC Acquisition and corporate actions to solve PT CPSI problems. For this corporate action, BOC always supervises and provides directions/recommendations, including that the Board of Directors improve APPA's supervisory procedures so that its performance achievements are monitored and comply with GCG, ensure the selection of problem resolution options at PT CPSI is supported by a comprehensive study in terms of operational, market, financial, legal and risk whose preparation is carried out with the support of competent consultants and experience, to ensure that the resulting study describes the options of business scenario and sustainability potential that can be selected and provide optimal value for the Company, as well as ensuring that the entire VAT and REC acquisition process implementation is carried out prudently, complies with laws and regulations and is in accordance with GCG.*

## QUALITY MANAGEMENT AND SERVICE POLICY SUPERVISION

*To ensure the achievement of increasing customer satisfaction target, engineering product quality target and occupational safety and health target, the Company implements SMT which includes Quality Management System – ISO 9001: 2015, Risk Management – ISO 31000: 2018, Occupational Health and Safety Management System (SMK3) – Government Regulation of the Republic of Indonesia 50 of 2012, Anti-Bribery Management System – ISO 37001: 2016, Compliance Management System – ISO 19600: 2014, Information Security Management System – ISO 27001: 2016, and Organizational Security Management System – Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007.*



Terhadap implementasi kebijakan mutu dan pelayanan Perseroan pada tahun 2022, Dekom telah menyampaikan arahan diantaranya agar Direksi menerapkan standar baku mutu proyek untuk menentukan jumlah *manning schedule*, durasi pelaksanaan pekerjaan, *billing rate* dan lainnya, standar baku mutu ini agar dituangkan dalam Prosedur Enjiniring; selanjutnya Direksi agar melakukan evaluasi terhadap ekspektasi pelanggan dan melakukan tindakan perbaikan atas ketidakpuasan pelanggan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan sehingga pada akhirnya meningkatkan perolehan pendapatan, serta memperhatikan mutu produk dan layanan dalam pelaksanaan kontrak dan pemenuhan kebutuhan resourcesnya.

*Regarding the implementation of the Company's quality and service policies in 2022, BOC has conveyed directions including that the Board of Directors implement project quality standards to determine the number of manning schedules, duration of work implementation, billing rates and others, these quality standards are to be outlined in the Engineering Procedure; Furthermore, the Board of Directors should evaluate customer expectations and take corrective actions for dissatisfaction Customers to increase the customer trust level so as to ultimately generate increase revenue, as well as pay attention to the products and services quality on contracts execution and meeting the needs of their resources.*

## PENGAWASAN TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis Perusahaan yang tertuang dalam RKAP 2022. Profil Risiko Korporat PLN Enjiniring digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor realisasi pencapaian *Key Risk Indicator* risiko perusahaan sebagai bahan manajemen dalam pengambilan keputusan.

## RISK MANAGEMENT SUPERVISION

*The corporate Risk Profile is prepared to ensure the achievement of the Company's strategic objectives as stated in the 2022 RKAP. PLN Enjiniring's Corporate Risk Profile is used as the main reference for company management to monitor the realization of the achievement of the company's Key Risk Indicator as management material in decision making.*

Terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2022, Dekom telah memberikan arahan antara lain agar Direksi memberikan perhatian dalam pelaksanaan manajemen risiko, khususnya untuk memastikan mitigasi risiko dilakukan secara efektif dalam rangka mencapai sasaran RKAP 2022, mendukung terlaksananya Roadmap Manajemen Risiko (MRT) di Lingkungan Perusahaan, serta mengupayakan pencapaian maturity level ERM 2022 sesuai target KPI.

*Regarding the implementation of 2022 risk management, BOC has given directions, among others, for the Board of Directors to pay attention to the risk management implementation, especially to ensure risk mitigation is carried out effectively in order to achieve the 2022 RKAP targets, support the implementation of the Risk Management Roadmap (MRT) in the Corporate Environment, and strive to achieve the 2022 ERM maturity level according to the KPI target.*

## PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN RKAP DAN RJPP

Salah satu tugas Dekom adalah melakukan pengawasan atas penyusunan RKAP 2023, Dekom telah membahas konsep RKAP tahun 2023 bersama Direksi.

## THE PREPARATION OF RKAP AND RJPP DRAFTS SUPERVISION

*One of BOC's tasks is to supervise the preparation of the 2023 RKAP, BOC has discussed the concept of the 2023 RKAP with the Board of Directors.*



Terhadap penyusunan konsep RKAP tahun 2023, Dekom memberikan pendapat dan pandangan, diantaranya agar Direksi menyusun RKAP 2023 berlandaskan manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis, menyiapkan antisipasi atas penurunan target pendapatan dalam RKAP 2023 sebagai dampak implementasi strategi *quick win* A15 dan A16 – Akuisisi PPN-REC, dalam penyusunan RKAP 2023 agar dilakukan dengan *prudent* dan patuh terhadap GCG.

Pada tahun 2022, Dekom juga telah memberikan catatan terkait RJP Perusahaan, diantaranya, agar Direksi melakukan *alignment* terhadap RJP yang didasarkan pada kondisi terkini Perusahaan sehingga menggambarkan arah pengembangan usaha, potensi-potensi pengembangan usaha, roadmap, pencapaian sasaran strategis yang terintegrasi dengan pemenuhan *resources*, serta memastikan keselarasannya dengan visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu Dekom mengarahkan agar Direksi memastikan keselarasan antara RKAP 2023 dengan RJP Perusahaan, serta agar Direksi segera menyusun RJP 2023 – 2027.

*Regarding the preparation of the 2023 RKAP concept, BOC provided opinions and views, including that the Board of Directors prepare the 2023 RKAP based on risk management integrated with business processes, prepare anticipation for a 2023 RKAP decreased revenue targets as a result of the A15 and A16 quick win strategies – VAT Acquisition implementation, in the preparation of the 2023 RKAP to be carried out prudently and in compliance with GCG.*

*In 2022, BOC has also provided notes related to the Company's CPR, among others, so that the Board of Directors aligns the CPR based on the Company's current conditions so as to describe the direction of business development, business development potentials, roadmaps, achievement of strategic goals that are integrated with the fulfillment of resources, as well as ensuring its alignment with the agreed vision and mission. In addition, BOC directed the Board of Directors to ensure alignment between the 2023 RKAP and the Company's RJP, and that the Board of Directors immediately prepare the 2023 – 2027 RJP.*

**PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

**Bob Saril**

Komisaris Utama

**PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

**Bob Saril**

President Commissioner



## Laporan Direksi

### Board of Directors Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian prestasi yang telah diraih PLN Enjiniring pada tahun 2022. Perusahaan telah membukukan kinerja yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022.

Perusahaan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sustainable business. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Direksi PT PLN Enjiniring melaporkan kinerja Perusahaan tahun 2022, semoga penyajian laporan ini memberikan nilai tambahan yang signifikan baik bagi PLN Enjiniring dan Pemegang Saham.

Pada tahun 2022 ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk selalu memperbaiki dan mempertahankan sustainability perusahaan, sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Pemberi Kerja.

*The honorable Stakeholders and Shareholders, We express our gratitude to God Almighty for all the efforts put for the achievements that have been accomplished by PLN Engineering in 2022. The company has recorded good performance according to the targets set in the Company's 2022 Work Plan and Budget (RKAP).*

*The Company is always guided by the vision and mission agreed upon all levels of management and employees to meet the Shareholders and stakeholders expectations in an effort to achieve sustainable business. In this regard, we, on behalf of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring, presented the Company's 2022 performance report, hopefully this report will provide significant additional value for both PLN Engineering and Shareholders.*

*In 2022, PLN Engineering is committed to always improving and maintaining the sustainability of the company, as a form of responsibility for the mandate given by the Employer.*

## STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN

PT PLN Enjiniring melakukan penyesuaian terhadap "Transformasi PLN" melalui pengembangan kompetensi perusahaan untuk mendukung 20 breakthrough, agar 4 strategic goals (Green, Innovative, Customer Focus dan Lean) PT PLN (Persero) tercapai.

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis Optimizing Cost Efficiency dan Leading Industry Capabilities. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

## COMPANY BUSINESS STRATEGY

*Aligns with the "PLN Transformation", through the development of company competencies to support 20 breakthroughs, so that the 4 strategic goals (Green, Innovative, Customer Focus and Lean) of PT PLN (Persero) are achieved.*

*In accordance with PLN Enjiniring's Core Business as a company engaged in engineering services, PLN Engineering carries the strategic mission of Optimizing Cost Efficiency and Leading Industry Capabilities. With these 2 strategic missions, PLN Engineering applies business activities development that are in line with the strategic mission of "PLN SOLID" as follows:*



1. **Optimizing Cost Efficiency**, “mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN Enjiniring dapat menjadi “price setter” dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan.”
2. **Leading Industry Capabilities**, “mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis (“capability setter”) bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global.”

1. **Optimizing Cost Efficiency**, “optimizing PLN Group’s cost structure along with the value chain, so that PT PLN Engineering able to become a “price setter” and maximize PLN Group’s value creation through overall cost efficiency.”
2. **Leading Industry Capabilities**, “developing its capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness, and / or strategic advantage (“capability setter”) for PLN Group with the best standards in the national electricity industry and consistent with international or global applicable standards.”

## KINERJA KEUANGAN TAHUN 2022

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kinerja PLN Enjiniring tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang baik. Perusahaan berusaha memenuhi harapan Pemegang Saham (shareholders) dengan pencapaian kinerja sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kinerja Keuangan PT PLN Enjiniring di 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut ;

1. **Pendapatan Usaha** di 2022 tercatat sebesar Rp 536,30 miliar, mengalami penurunan sebesar 35,10% atau Rp 290,11 miliar jika dibandingkan dengan 2021 yaitu sebesar Rp 826,40 miliar. Peningkatan pendapatan yang signifikan adalah pada Bidang Transmisi dan Dstribusi sebesar Rp 75,42 miliar atau 125,10%, Kompresi Gas sebesar Rp 911 atau 1,69%.  
Hal di atas secara general disebabkan karena adanya peningkatan pekerjaan terkontrak, penyelesaian kontrak terkendala pada tahun sebelumnya dan capaian pendapatan pada tahun berjalan.
2. **Beban Usaha** pada tahun 2022, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 153,09 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,11% dibandingkan tahun 2021. Penurunan pada beban usaha, penurunan signifikan adalah disebabkan atas penurunan beban kerugian penurunan piutang usaha sebagai dampak penerapan PSAK 71 dan penurunan pada beban pemeliharaan.

## 2022 FINANCIAL PERFORMANCE

With various challenges and opportunities, PLN Engineering’s 2022 performance has shown good results. The Company strives to meet the Shareholders expectations by achieving performance according to the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) targets. The Financial Performance of PT PLN Engineering in 2022 can be described as follows;

1. **Operating Revenue** in 2022 was recorded at IDR 536.30 billion, a decrease of 35.10% or IDR 290.11 billion when compared to 2021, which was IDR 826.40 billion. The significant increase in revenue was in the Transmission and Distribution Sector of Rp 75.42 billion or 125.10%, Gas Compression of Rp 911 or 1.69%.  
The above matter is generally due to an increase in contracted work, constrained contract completion in the previous year and revenue achievements in the current year.
2. **Operating Expenses** in 2022, the Company posted Operating Expenses of IDR 153.09 billion, a 16.11% decrease compared to 2021. The significant decrease in operating expenses, was due to a decrease in loss expenses, a decrease in accounts receivable as a result of the PSAK 71 implementation and a decrease in maintenance expenses.



3. Realisasi Laba (Rugi) Periode Berjalan, Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2022 sebesar Rp 38 miliar atau sebesar Rp.56,46% disebabkan adanya peningkatan Arus Kas untuk Investasi sebesar Rp 16,98 miliar atau -29,44% dibanding tahun 2020.

3. *Realization of Profit (Loss) for the Current Period, an increase in Net Cash and Cash Equivalents in 2022 of IDR 38 billion or IDR 56.46% due to an increase of IDR 16.98 billion or -29.44% in Cash Flow for Investment compared to 2021.*

## KINERJA NON KEUANGAN 2022

Direksi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini tercermin dari upaya Perusahaan melakukan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan komplain pelanggan.

Dalam menjalankan operasional usaha, jumlah Karyawan PT PLN Enjiniring pada tahun 2022 (Desember 2022) adalah sebanyak 546 orang yang terdiri dari 16 pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero), 248 pegawai Organik PT PLN Enjiniring, 53 orang tenaga kerja Alih Daya dari PT Haleyora Powerindo, UJPK & DJATAIS, dan 229 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja di kantor Jakarta serta proyek-proyek PT PLN Enjiniring yang tersebar di Indonesia.

Perusahaan terus meningkatkan engagement pegawai melalui berbagai kegiatan seperti rapat kerja, townhall meeting dan knowledge sharing. Berbagai program pelatihan dan pengembangan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Sedangkan pada aspek pengakuan masyarakat/ stakeholder atas pengelolaan Perusahaan, PLN Enjiniring telah mendapatkan berbagai penghargaan.

Penghargaan yang diperoleh Perusahaan pada tahun 2022 antara lain :

1. BUMN Branding & Marketing Award 2022
  - Bronze Winner Global Branding & Marketing Award kategori International Recognition
2. Indonesia Customer Experience Champions 2022
  - The Rising Customer Experience Team
3. TJSL & CSR Awards 2022
  - Spesial Appreciation to Company on Supporting TJSL Pillar of Social in Early Childhood Education Program

## 2022 NON-FINANCIAL PERFORMANCE

*The Board of Directors is committed to improving the customer service. This is reflected in the Company's efforts to manage customer relationships and manage customer complaints.*

*In carrying out business operations, as of 2022 (December 2022), the total number of human resources of PT PLN Enjiniring was 546 people consisting of 16 employees of PT PLN (Persero) work duty officer (Tugas Karya), 248 PT PLN Enjiniring Organic employees, 53 Outsourced workers from PT Haleyora Powerindo, UJPK & DJATAIS, and 229 worker with Limited Time Work agreement contracts status working in the Jakarta office and PT PLN Enjiniring projects spread across Indonesia.*

*The company continues to increase employee engagement through various activities such as work meetings, town hall meetings and knowledge sharing. Various training and development programs have been carried out in order to improve employee competency and quality in their work. Meanwhile, in the community aspect / stakeholder recognition of the management of the Company, PLN Engineering has received various awards.*

*The awards obtained by the Company in 2022 include:*

1. *2022 BUMN Branding & Marketing Award*
  - *Bronze Winner of Global Branding & Marketing Award in International Recognition category.*
2. *The 2022 Indonesia Customer Experience Champions*
  - *The Rising Customer Experience Team*
3. *2022 TJSL & CSR Awards*
  - *Special Appreciation to Company on Supporting TJSL Social Pillar in Early Childhood Education Program*



#### 4. PLN Risk Award 2022

- Bronze Winner Risk Award 2022 Kategori Subsidiaries with Best Risk Leadership
- 4 Besar Risk Award 2022 Kategori Best Risk Implementer

#### 4. 2022 PLN Risk Award

- Bronze Winner of Risk Award 2022 in Subsidiaries with Best Risk Leadership Category.
- Top 4 in 2022 Risk Award, Best Risk Implementer Category.

## ASPEK PRODUKSI TAHUN 2022

Pada tahun 2022 bidang pembangkit melaksanakan 204 pekerjaan, bidang Konstruksi melaksanakan 28 pekerjaan, dan bidang Transmisi dan Distribusi melaksanakan 148 pekerjaan. Total pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Enjiniring tahun 2022 ini adalah 380 pekerjaan.

## 2022 PRODUCTION ASPECTS

The total work carried out in 2022 by the Directorate of Engineering is 380 jobs, consist of 204 jobs in the power plant sector, 28 jobs in the Construction sector, and 148 in the Transmission and Distribution sectors.

## KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)

Dalam kesempatan ini kami laporkan terkait KPI PT PLN Enjiniring. KPI terdiri dari 5 (lima) perspektif sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Ekonomi dan Sosial Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

KPI Manajemen PT PLN Enjiniring tahun 2022 mendapatkan skor 102,51 (masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AAA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia sebesar 40,60, Peningkatan Investasi sebesar 25,78, Kepemimpinan Teknologi sebesar 14,20, Keuangan dan Pasar sebesar 10,88, serta Pengembangan Talenta sebesar 11,00. Skor KPI ini merupakan realisasi capaian tahun 2022 yang telah bersifat Audited oleh Kantor Akuntan Publik.

## KEY PERFORMANCE INDEX (KPI)

We will be reporting the KPI of PT PLN Enjiniring in this occasion. KPI consists of 5 (five) perspectives according to the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Company's Shareholders as follows:

1. Indonesia's Economic and Social Value
2. Business Model Innovation
3. Technology Leadership
4. Increased Investment
5. Talent Development

PT PLN Engineering's Management KPI in 2022 received a score of 102.51 (belong to the HEALTHY group of companies, with AAA category) with the achievement of each indicator being 40.60 in Indonesia's Economic and Social Value, 25.78 in Investment Increase, 14.20 in Technology Leadership, 10.88 in Finance and Market, and 11.00 in Talent Development. This KPI score is the realization of 2022 achievements have been audited by a Public Accounting Firm.



## KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Direksi menyadari bahwa pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh PLN Enjiniring tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun demikian, Perusahaan telah berhasil melakukan upaya kebijakan terhadap kendala yang ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan di 2022 berasal dari pihak eksternal dan internal. Kendala eksternal antara lain adalah munculnya perusahaan konsultan baru sebagai pesaing dengan *billing rate* rendah yang tidak mencerminkan kualitas sehingga menyebabkan penurunan harga pasar dan perubahan nilai kurs yang mempengaruhi siklus kas bisnis enjiniring.

Sedangkan, kendala internal utama terkait dengan kurangnya enjinir yang berpengalaman untuk mendukung perkembangan bisnis. Di samping itu, Perusahaan merupakan pemain baru dalam bisnis EPC dan IPP sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup.

Untuk mengatasi kendala-kendala eksternal, Perusahaan telah melakukan strategi antara lain dengan memitigasi risiko, melakukan efisiensi dan penyederhanaan proses bisnis, dan melakukan *currency hedging* yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, untuk mengatasi kendala-kendala internal, telah dilakukan strategi pengembangan system manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan melaksanakan program sertifikasi enjinir.

## PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable values. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.

## OBSTACLES FACED IN 2022

*The Board of Directors realizes that the performance achievements and achievements that have been achieved by PLN Engineering cannot be separated from various obstacles. However, the Company has succeeded in making policy efforts against existing constraints so that it does not significantly affect the Company's performance.*

*The obstacles faced by the Company in 2022 come from external and internal parties. External obstacles include the raising number of new consulting firms as competitors with low billing rates that do not reflect quality, causing a decrease in market prices and changes in exchange rates that affect the engineering business cash cycle.*

*Meanwhile, the main internal obstacle is related to the lack of experienced engineers to support business development. In addition, the Company is still regard as a new player in the EPC and IPP business so it does not have enough experience yet.*

*To overcome external obstacle, the Company has carried out strategic strategies, among others, by mitigating risks, carrying out efficiency and simplify the business processes, and conducting currency hedging according to the needs. Meanwhile, to overcome internal constraints, a competency-based HR management system development strategy has been carried out and implemented an engineering certification program.*

## THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

*The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long-term process that provides results in the form of sustainable values. Actualization of GCG as a system is carried out through an internal process involving the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.*



Tujuan dilakukannya GCG adalah peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik. Target skor GCG tahun 2021 ini adalah Real 2020 + 0,5 Poin dan berdasarkan hasil self asesmen GCG PLNE tahun 2021 mencapai skor 91,65. Sehingga capaian Penerapan GCG tahun 2021 ini adalah 101,26%.

*The purpose of GCG is to improve performance and create a good corporate image. The target GCG score for 2021 is Real 2020 + 0.5 Points and based on the results of PLNE's GCG self-assessment in 2021 it reached a score of 91.65. So that the achievement of GCG Implementation in 2021 is 101.26%.*

## PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sampai dengan bulan Desember tahun 2022, struktur Direksi PLN Enjiniring tidak mengalami perubahan dengan komposisi seorang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Secara keseluruhan Kepengurusan Direksi sampai dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut: Chairani Rachmatullah sebagai Direktur Utama, Kurnia Rumdhony sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Martono sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan Muhamad Firmansyah sebagai Direktur Enjiniring.

## CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*As of December 2022, the structure of PLN Engineering Board of Directors has not changed with the composition of one President Director and 3 (three) Directors. The overall management of the Board of Directors until 2022 is as follows: Chairani Rachmatullah as President Director, Kurnia Rumdhony as marketing and Business Development Director, Martono as Finance and HR Director, and Muhamad Firmansyah as Engineering Director.*

## PENUTUP

Akhir kata, kami atas nama Direksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah, regulator, masyarakat, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha serta seluruh pegawai dan keluarga besar PLN Enjiniring atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dengan dukungan tersebut, PLN Enjiniring akan semakin maju mewujudkan kinerja terbaik dan terus berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

## CONCLUDING

*Finally, on behalf of the Board of Directors, we express our appreciation and gratitude to the government, regulators, the public, shareholders, customers, business partners and all employees and the extended family of PLN Engineering for all the support and trust that has been given. Hopefully with this support, PLN Engineering will be more advanced in realizing the best performance and continue to play a role in the welfare of the community.*

**PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

**Chairani Rachmatullah**

Direktur Utama

**PT Prima Jasa Nasional Engineering**

**Chairani Rachmatullah**

President Director





"Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan"

















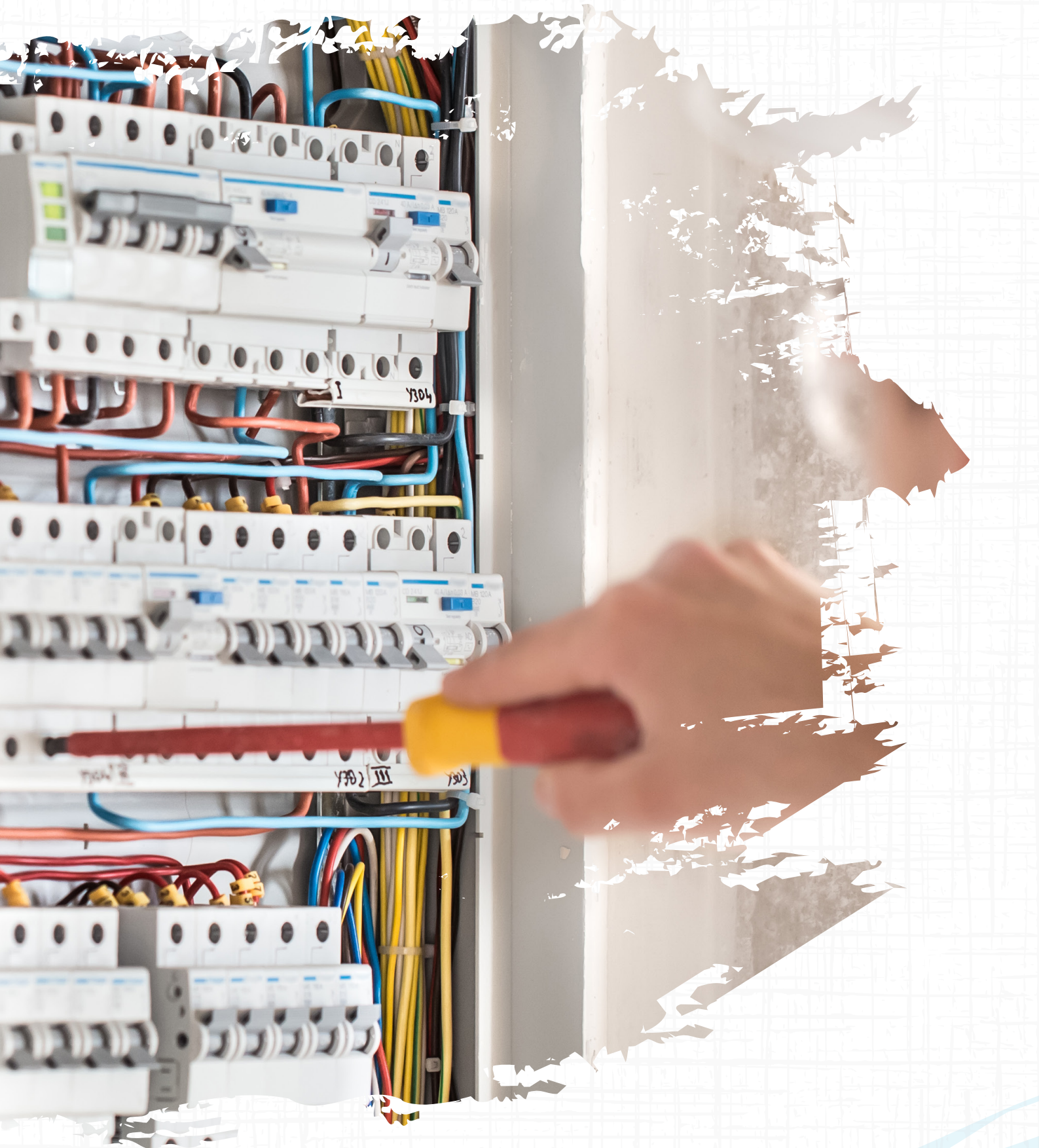




# Profil Perusahaan

*The Company Profile*







## Profil Perusahaan Company Profile

### IDENTITAS PERUSAHAAN

### COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring <i>PT Prima Layanan Nasional Enjiniring</i>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Telephone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062 <i>Menara Enjiniring, Ciputat Raya Street, No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Phone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062</i>
Bidang Usaha <i>Business Sector</i>	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan <i>Engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity sector and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors</i>
Status Perusahaan <i>Company Status</i>	Entitas anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) <i>Entity of Subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 99.90% <i>PT Perusahaan Listrik Negara 99.90%</i>  Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (Persero) 0.1% <i>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 0.1%</i>
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	3 Oktober 2002 <i>October 3, 2002</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Basic Law of Establishment</i>	Akta Nomor 9 oleh Notaris Haryanto, SH <i>The Deed of Incorporation Number 9 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	640 Orang <i>640 employees</i>
Website <i>Website</i>	<a href="http://www.plne.co.id">www.plne.co.id</a> <i>www.plne.co.id</i>



Layanan Informasi  
Information Services

Sekretaris Perusahaan  
Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Telp. (62-21) 275 10363  
Fax. (62-21) 2751062  
Email : contact@plne.co.id  
Company's Secretary  
Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Phone. (62-21) 275 10363,  
Fax. (62-21) 2751062  
Email : contact@plne.co.id

## RIWAYAT SINGKAT

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (untuk selanjutnya disebut dengan PLN Enjiniring atau Perusahaan) merupakan perusahaan terkemuka di bidang konsultasi dan enjiniring. PLN Enjiniring yang merupakan Entitas Anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) didirikan berdasarkan akta No.9 tanggal 3 Oktober 2002 oleh Haryanto, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan akta No. 55 tanggal 23 Desember 2019 oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-0012595.AH.01.11 tanggal 21 Januari 2020. Sampai dengan tahun 2020 Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.

## BIDANG USAHA

### ■ Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang :

## BRIEF HISTORY

*PT Prima Jasa Nasional Engineering (hereinafter referred to as PLN Enjiniring or the Company) is a leading company in the consulting and engineering sector. PLN Enjiniring which is a subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) was established based on deed No.9 dated October 3, 2002 by Haryanto, SH., a notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-00184.HT.01.01TH.2003 dated January 6, 2003 and announced in the State Gazette No. 19, Supplement No. 1891 dated March 7, 2003. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment by deed No. 55 dated December 23, 2019 by Lenny Janis Ishak, SH., Notary in Jakarta regarding the Amendment to the Company's Articles of Association. The change has been registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No.AHU-0012595.AH.01.11 dated January 21, 2020. Until 2020, the Company has never changed its name.*

## LINE OF BUSINESS

### ■ Business activities according to the Articles of Association

*In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the aims and objectives of the Company are to do business in the fields of:*

1. Menyelenggarakan usaha enjiniring , pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan;
2. Menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. Melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/ mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas;

1. *Carrying out engineering, procurement and construction, operation, maintenance businesses in the electricity and non-electricity sectors;*
2. *Organizing an electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company;*
3. *Carry out assignments from the Majority Shareholders in order to support/support the business activities of Shareholders by applying the principles of Good Corporate Governance and Property and Business Ethics in Limited Liability Companies;*

## KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha, yaitu :

### ■ Jasa Enjiniring

Jasa Enjiniring berupa jasa konsultansi enjiniring di industri ketenagalistrikan meliputi bidang Pembangkit, Transmisi dan Distribusi, serta jasa supervisi Konstruksi.

### ■ Jasa Non Enjiniring

Jasa Non Enjiniring berupa penyediaan jasa kompresi gas, bisnis Engineering, Procurement, Construction (EPC), bisnis manufaktur Material Transmisi Utama (MTU), serta bisnis Independent Power Producer (IPP).

## PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN

PT PLN Enjiniring memiliki 3 produk dan jasa yang dihasilkan oleh bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi dan bidang konstruksi. Penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis produk dan jasa terdapat pada Tabel produk dan jasa yang dihasilkan.

## BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

*The business activities currently running are grouped into three business major, namely:*

### ■ Engineering Services

*Engineering services in the form of engineering consultant services in electricity industry covering the fields of Power Plant, Transmission and Distribution, as well as construction supervision services.*

### ■ Non Engineering Service

*Non-engineering services include the provision of gas compression services, the Business Engineering, Procurement, Construction (EPC), manufacture business, the Main Transmission Material (MTU) manufacture, and the Independent Power Producer (IPP).*

## PRODUCTS / SERVICES PRODUCED

*PT PLN Enjiniring has 3 products and services produced by the generation, transmission & distribution and construction sectors. Further explanation regarding the types of products and services contained in the table of products and services produced.*



**TABEL PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN**  
**TABLE OF PRODUCTS AND SERVICE PRODUCED**

Pembangkitan <i>Generation</i>	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survey <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Request for Proposal <i>Preparation of Request for Proposal</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Arrangement</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Engineer's Estimate Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Engineer's Estimate Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Procurement Assistance</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Procurement Assistance</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study of AMDAL and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Study of Electricity System</i>	
	Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study of AMDAL and UKL/UPL</i>	
	Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	

## JASA ENJINIRING TERINTEGRASI

Jasa non enjiniring meliputi pembangunan Transmisi dan Gardu Induk melalui Anak Perusahaan EPC, penyediaan Material Transmisi Utama (MTU) yang terdiri dari *Circuit Breaker, Current Transformer, Capacitor Voltage Transformer, Lightning Arrester* melalui perusahaan *joint venture*, dan bisnis *Independent Power Producer (IPP)* melalui perusahaan afiliasi/kepemilikan saham.

## INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

*Non-engineering services include the Transmission and Substation construction through EPC Subsidiaries, provision of Main Transmission Material (MTU) consisting of Circuit Breakers, Current Transformers, Capacitor Voltage Transformers, Lightning Arrester through joint venture companies, and Independent Power Producer (IPP) business through company through affiliate/share owned.*

## JASA LAINNYA

Jasa lainnya meliputi Bidang Informasi dan Teknologi

## OTHER SERVICES

*Other services include the Information and Technology*



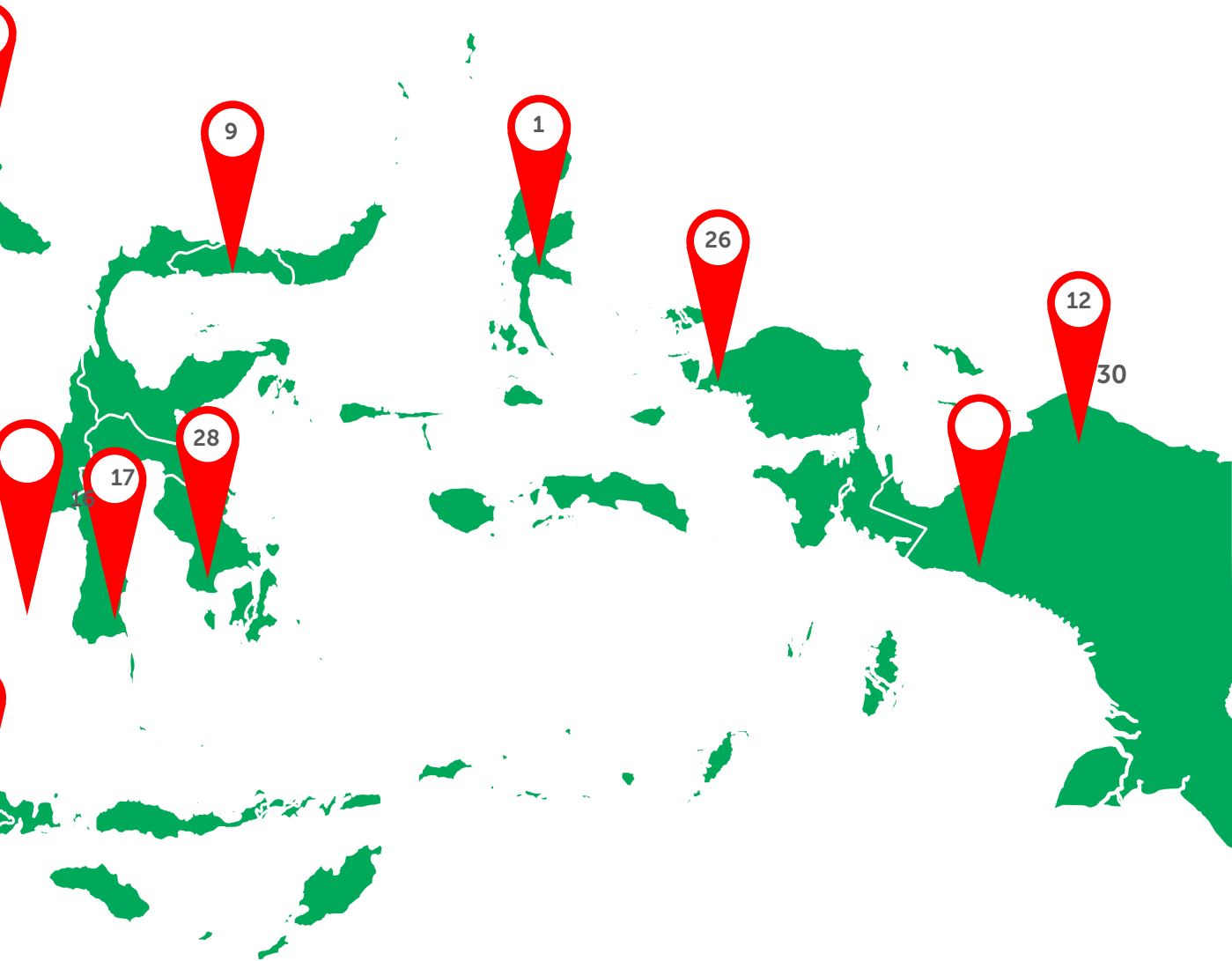
# Peta Lokasi Proyek

## Project Location Map



- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ambon, Maluku                | 9. Gorontalo, Sulawesi   |
| 2. Arun, NAD                    | 10. Grati, Jawa Timur    |
| 3. Balikpapan, Kalimantan Timur | 11. Jakarta              |
| 4. Bandung, Jawa Barat          | 12. Jayapura, Papua      |
| 5. Bangka Belitung              | 13. Kalimantan Barat     |
| 6. Bangkanai, Kalimantan Tengah | 14. Kotabaru, Kalimantan |
| 7. Batam                        | 15. Lampung              |
| 8. Cilegon, Banten              | 16. Makassar             |



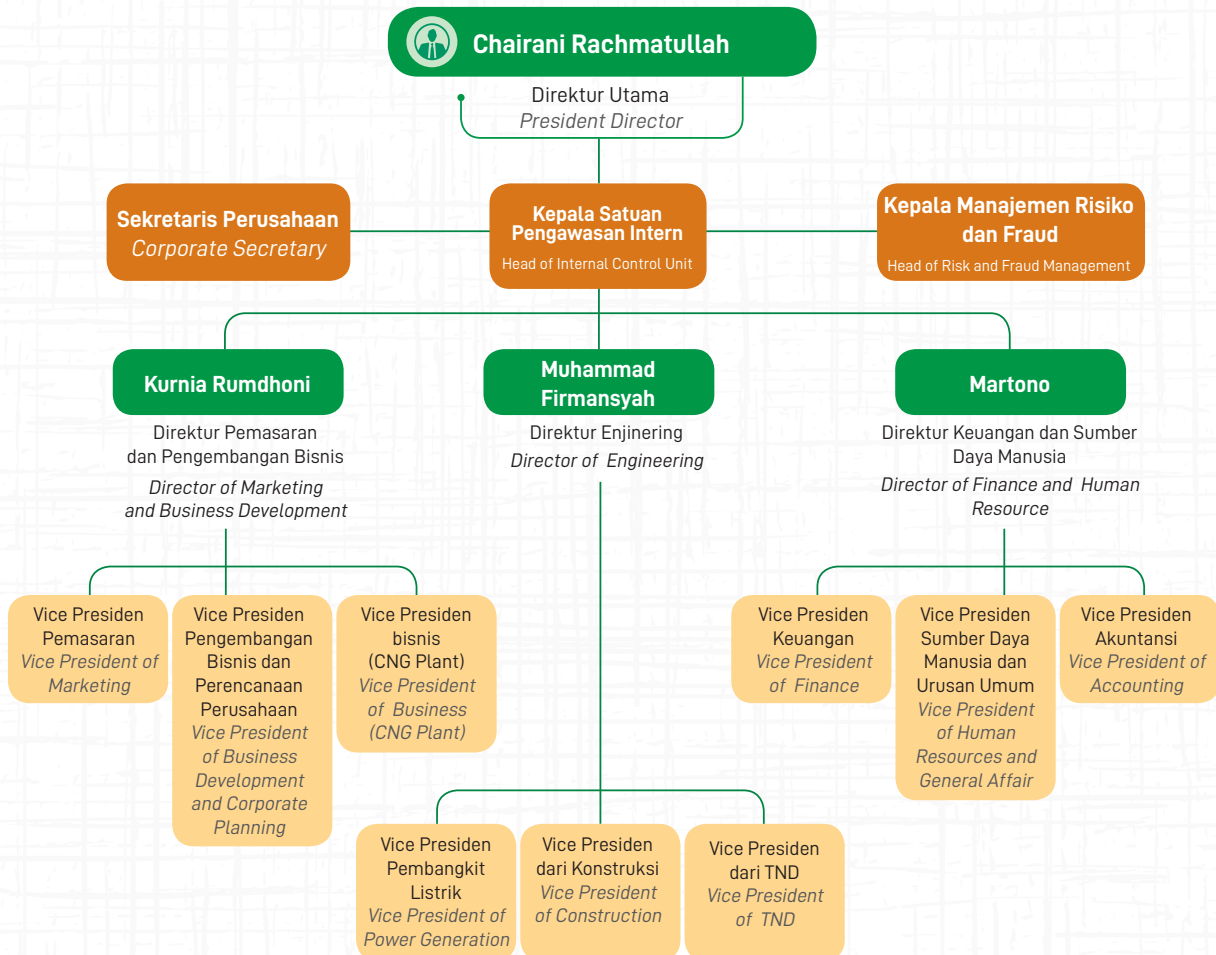


- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 17. Maros, Sulawesi Selatan          | 25. Siberida, Kepulauan Riau |
| 18. Medan, Sumatera Utara            | 26. Sorong, Papua            |
| 19. Nagan Raya, NAD                  | 27. Sumedang, Jawa Barat     |
| 20. Nias, Sumatera Utara             | 28. Takalar, Sulawesi        |
| 21. Padang Sidempuan, Sumatera Utara | 29. Tarakan                  |
| 22. Pangkalan Susu, Sumatera Utara   | 30. Timika, Papua            |
| 23. Pamaron, Bali                    | 31. Yogyakarta               |
| 24. Peranap, Riau                    | 32. NTT                      |



# Struktur Organisasi

## Organization Structure





## VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

### VISION, MISSION AND COMPANY CULTURE

#### VISI

Menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se Asia Tenggara dan Pilihan No. 1 Pelanggan

#### VISION

*To become Southeast Asia's Leading Integrated Engineering Consultant Company and No.1 Choice of Customer.*

#### MISI

Memberikan pelayanan prima:

1. Menyediakan solusi enjiniring terintegrasi dibidang ketenagalistrikan dengan melakukan optimasi efisiensi biaya secara keseluruhan bagi Pemberi Kerja.
2. Menyediakan jasa enjiniring, jasa enjiniring untuk pengadaan serta jasa enjiniring untuk konstruksi yang terkemuka dan memiliki keunggulan daya saing.
3. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

#### MISSION

*Provide excellent service:*

1. *Providing integrated engineering solutions in the electricity sector by optimizing overall cost efficiency for Employers.*
2. *Providing engineering services, engineering services for procurement and engineering services for construction that are leading and have competitive advantages.*
3. *Increase customer satisfaction and loyalty.*

#### TATA NILAI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lepas dari tata nilai budaya Perusahaan yang disebut AKHLAK.

#### THE COMPANY'S CULTURE

*PLN Enjiniring instills strong cultural values in establishing sustainable relationships with stakeholders. This is inseparable from the Company's cultural values, which are called AKHLAK.*

1. **Amanah**, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku tata nilai Amanah :

- a. Memenuhi janji dan komitmen
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan

2. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Panduan perilaku tata nilai Kompeten :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu orang lain belajar
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

1. **Amanah**, namely holding fast to the trust given.

*Amanah value code behavior guidelines:*

- a. *Fulfill promises and commitments*
- b. *Responsible for tasks, decisions and actions taken*

2. **Competent**, that is, continue to learn and develop capabilities

*Competent values behavior guidelines:*

- a. *Improve self-competence to respond to ever-changing challenges*
- b. *Helping others learn*
- c. *Complete tasks with the best quality*



- 3. Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan perilaku tata nilai Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

- 4. Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Panduan perilaku tata nilai Loyal :

- Menjaga nama baik sesama karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
- Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- 5. Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan perilaku tata nilai Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
- Bertindak proaktif

- 6. Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku tata nilai Kolaboratif :

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

- 3. Harmonious**, namely caring for and respecting differences.

*Harmonious values behavior guide:*

- Respect everyone regardless of background*
- Likes to help others*
- Build a conducive work environment*

- 4. Loyal**, namely being dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State

*Loyal values behavior guide :*

- Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs and the State*
- Willing to sacrifice to achieve a bigger goal*
- Obey the leadership as long as it is not against the law and ethics.*

- 5. Adaptive**, namely continuing to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

*Adaptive values behavior guide:*

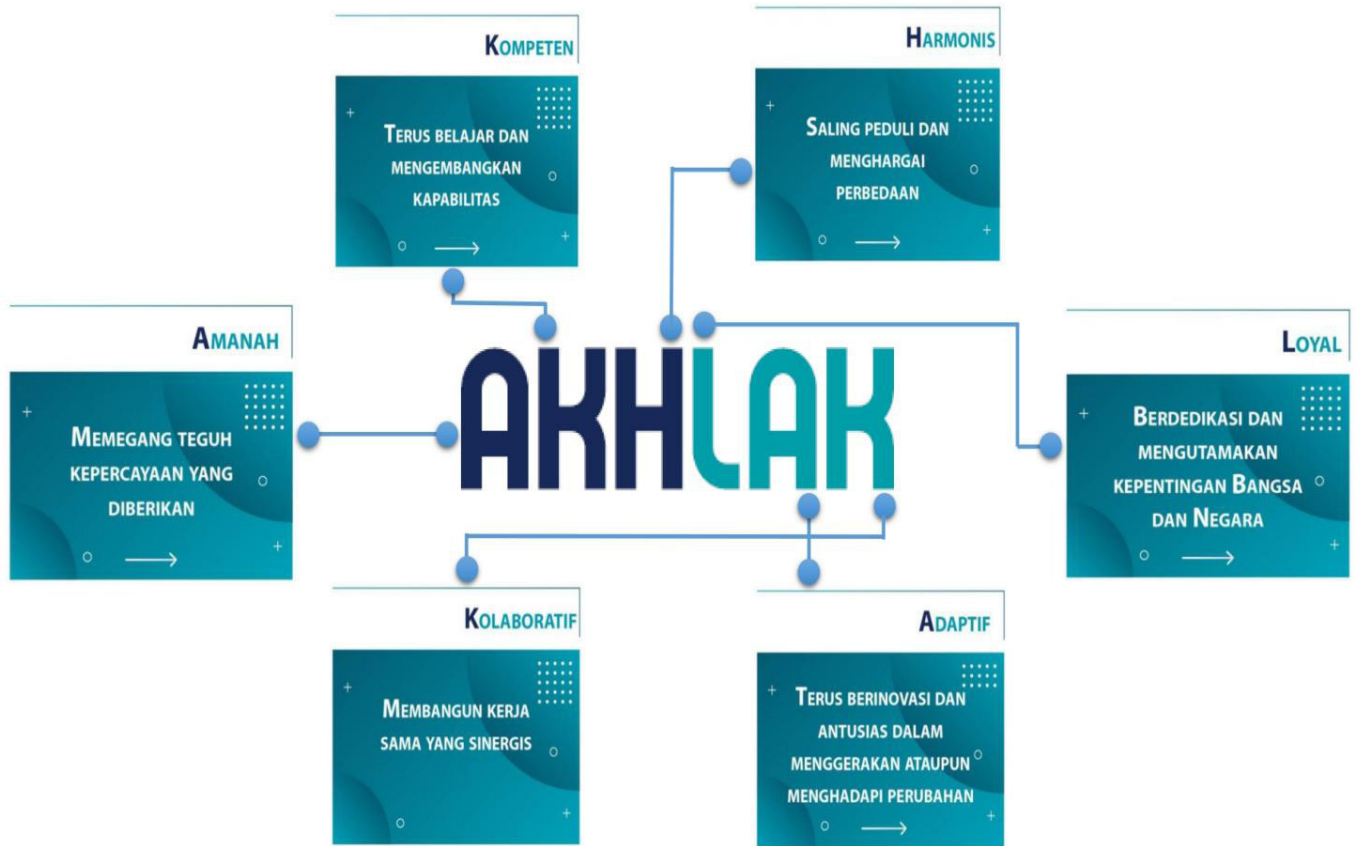
- Quickly adapt to be better*
- Continuously making improvements following technological developments*
- Act proactive*

- 4. Collaborative**, namely building synergistic cooperation.

*Collaborative values behavior guidelines:*

- Provide opportunities for various parties to contribute*
- Open to work together to generate added value*
- Mobilize the use of various resources for common goals*







## Profil Dewan Komisaris

*Profile of the Board of Commissioners*







## Bob Saril

### KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Kantor Pusat tahun 2020 – 2022
- General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur tahun 2019 – 2020
- General Manager PT PLN (Persero) UIW Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tahun 2017 – 2019
- General Manager PT PLN (Persero) UIW Aceh tahun 2015 – 2017.

Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Sriwijaya pada tahun 1993, kemudian melanjutkan Pendidikan Electrical Engineering di University Of New South Wales pada tahun 2022.

*Appointed as PT PLN Enjiniring President Commissioner since September 21st, 2022.*

*Previous experiences:*

- *Director of Commerce and Customer Management of PT PLN (Persero) Head Office in 2020 – 2022*
- *General Manager of PT PLN (Persero) UID East Java in 2019 – 2020*
- *General Manager of PT PLN (Persero) UIW South, Southeast and West Sulawesi in 2017 – 2019*
- *General Manager of PT PLN (Persero) UIW Aceh in 2015 – 2017.*

*Completed his bachelor degree in Electrical Engineering at Sriwijaya University in 1993, then continued his master degree Electrical Engineering Education at the University Of New South Wales in 2022.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022

#### *Basic History of Appointment:*

- *Appointment Circular GMS on September 21st, 2022*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22nd, 2022*



## Edward Siagian

### KOMISARIS COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016
- Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014.

Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

*Appointed as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 8th, 2020.*

*Previously he had experience as:*

- *Project Control Expert (TK) at (Work Assignment to PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016*
- *Senior Specialist I Project Control (TK) at (PT PLN Enjiniring Work Task) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014.*

*Completed his Bachelor degree at the Faculty of Electrical Power Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1982, then continued his Master Education in Management at the Bandung Institute of Technology in 1997.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 08 Desember 2020
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

#### Basic History of Appointment:

- *Appointment Circular GMS on December 8th, 2020*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 9th, 2021*





# Muhammad Rizali Karliansyah

## KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021
- Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015,
- Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Biologi di Universitas Indonesia pada tahun 1985, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 1989.

*Appointed as Commissioner of PT PLN Engineering since February 19th, 2021.*

*Previous experiences:*

- *General of Environmental Pollution and Damage Control Director at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021*
- *Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015,*
- *Assistant Deputy for Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment in 2007 – 2010.*

*Completed his Bachelor degree in Biology Education at the University of Indonesia in 1985, then completed his master degree on Environmental Science Education at the University of Indonesia in 1989.*

### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021

### *Basic History of Appointment:*

- *Appointment Circular GMS on February 19th, 2021*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated March 9th, 2021*



## Fritz Edward Siregar

### KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Anggota Badan Pengawas Pemilu RI dari tahun 2017-2022
- Tenaga Ahli Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah
- Kepala Unit Akreditasi dan Evaluasi STH Indonesia Jentera
- Counselor di Budidjaja & Associates.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Hukum di Erasmus University Rotterdam, Belanda dan melanjutkan Pendidikan Doctor in Juridical Science di University of New South Wales, Australia.

*Appointed as Independent Commissioner of PT PLN Enjiniring since September 21st, 2022.*

*Previously experiences:*

- *Member of the Indonesian Election Supervisory Board from 2017-2022*
- *Regional Representative Council Legal Experts*
- *Head of Accreditation and Evaluation Unit at STH Indonesia Jentera*
- *Counselor at Budidjaja & Associates.*

*Completed his bachelor degree in Law Education at the University of Indonesia, then continued his master degree in Law Education at Erasmus University Rotterdam, the Netherlands and continued his Doctoral in Juridical Science Education at the University of New South Wales, Australia.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022

#### *Basic History of Appointment:*

- *Appointment Circular GMS on September 21, 2022*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22, 2022*





## Edwin Nugraha Putra\*

### KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 30 Desember 2021.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Executive Vice President Electricity System Planning pada Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat tahun 2020 – 2021.
- Senior Specialist I Pengembangan Regional pada Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Tengah Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Kantor Pusat tahun 2019 – 2020.
- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban tahun 2019, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah tahun 2018 – 2019.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1994, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Informatika di University of Abertay Dundee Inggris pada tahun 2007.

*Appointed as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 30<sup>th</sup>, 2021.*

*Previously he had experience as:*

- Executive Vice President of Electricity System Planning at the Directorate of Corporate Planning of PT PLN (Persero) Head Office for 2020 – 2021.
- Senior Specialist I Regional Development at the Central Java Regional Development Division, Central Java Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) Head Office in 2019 – 2020.
- General Manager of PT PLN (Persero) Load Control Center Main Unit in 2019, General Manager of PT PLN (Persero) Central Java Transmission Main Unit in 2018 – 2019.

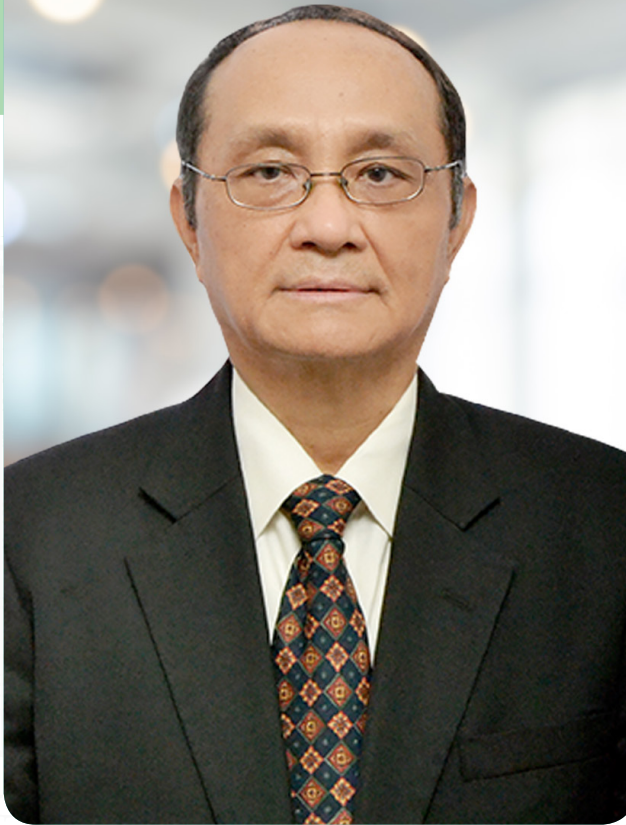
*Completed his bachelor degree in Electricity Education at the University of North Sumatra in 1994, then continued his master degree in Education in Informatics at the University of Abertay Dundee, England in 2007.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 30 Desember 2021
- \*) Menjabat sebagai Komisaris Utama pada 30 Desember 2021 s.d 21 September 2022

#### Basic History of Appointment:

- Circular GMS Appointment dated December 30, 2021
- \*) Appointed as President Commissioner from December 30<sup>th</sup>, 2021 to September 21st, 2022.



## Hardiv Harris Situmeang\*

### KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Enjiniring sejak 15 Maret 2021

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Ahli Utama di PT PLN (Persero) dari tahun 2003,
- Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 2001
- Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) tahun 1998.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung tahun 1976, Pendidikan S2 Electrical Engineering di Union College, Schenectady, New York tahun 1985, dan menyelesaikan S3 System Science & Mathematics di Washington University tahun 1993.

*Appointed as Independent Commissioner of PT PLN Enjiniring since March 15th, 2021*

*Previously he had experience as:*

- *Main Expert at PT PLN (Persero) from 2003,*
- *Planning Director of PT PLN (Persero) in 2001*
- *Planning Director of PT PLN (Persero) in 1998.*

*Completed his bachelor degree in Electrical Power Engineering at Bandung Institute of Technology in 1976, master degree in Electrical Engineering Education at Union College, Schenectady, New York in 1985, and completed his doctoral degree in System Science & Mathematics at Washington University in 1993.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 23 Maret 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 02 tanggal 05 April 2021
- RUPS Sirkuler Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 25 November 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 30 tanggal 30 November 2021

\*) Menjabat sebagai Komisaris Independen pada 30 November 2021 s.d 21 September 2022

#### Basic History of Appointment:

- *Circular GMS Appointment dated March 23rd, 2021*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 02 dated April 5th, 2021*
- *Circular GMS Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners on November 25th, 2021*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 30 dated November 30, 2021*

\*) *Appointed as Independent Commissioner from November 30th, 2021 to September 21st, 2022*



## PROFIL DIREKSI

*Profile of the Board of Directors*





## Chairani Rachmatullah

### DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR

Menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Senior Executive Vice President Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2021 – 2022
- General Manager PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2019 – 2021
- Executive Vice President Gas dan BBM pada tahun 2018 – 2019.

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil pada tahun 1992 dan menyelesaikan pendidikan S2 Teknik Sipil tahun 2001 serta S2 Teknologi Teknik Lainnya pada tahun 2005. Sertifikasi yang pernah dilakukan yakni:

*Appointed as PT PLN Enjiniring President Director since September 21st, 2022.*

*Previous experience:*

- PT PLN (Persero) Head Office Risk Management Senior Executive Vice President in 2021 – 2022
- PT PLN (Persero) Electricity Engineering Center General Manager in 2019 – 2021
- Gas and Fuel Executive Vice President in 2018 – 2019.

*Completed her bachelor degree on Civil Engineering education in 1992 and completed her master degree on Civil Engineering education in 2001 and master degree on Other Engineering Technology in 2005.*

*Certifications that have been carried out are:*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022

#### *Basic History of Appointment:*

- *Appointment Circular GMS on September 21<sup>st</sup>, 2022*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22<sup>nd</sup>, 2022*





## Martono

### DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM DIRECTOR OF FINANCE AND HUMAN RESOURCES

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021.

Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Vice President Anggaran III pada Bagian Anggaran Direktorat Keuangan Kantor Pusat PT PLN (Persero) tahun 2018-2021
- Manajer Senior Anggaran III pada Bagian Anggaran Direktorat Keuangan Kantor Pusat PT PLN (Persero) Tahun 2016-2018
- Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero) Unit Pengembangan Utama III Tahun 2013-2015

Menyelesaikan pendidikan D3 Manajemen Bisnis pada tahun 1994 dan menyelesaikan gelar Sarjana Manajemen Keuangan pada tahun 2008.

*Appointed as PT PLN Enjiniring since Director of Finance and Human Resources since February 19th, 2021.*

*Previous experienced:*

- Vice President of Budget III in the Budget Section of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office in 2018-2021
- Senior Manager of Budget III in the Budget Section of the Directorate of Finance of PT PLN (Persero) Head Office in 2016-2018
- PT PLN (Persero) Main Development Unit III Finance and Human Resources Manager in Year 2013-2015

*Completed his Diploma III on Business Management in 1994 and completed his Bachelor of Financial Management degree in 2008.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- Penunjukan RUPS tanggal 19 Februari 2021
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 13 tanggal 23 Februari 2021

#### *Basic History of Appointment:*

- *Appointment of GMS on February 19<sup>th</sup>, 2021*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 13 dated February 23<sup>rd</sup>, 2021*



## Kurnia Rumdhoni

### DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969. Berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Vice President Business Strategy Development Kantor Pusat PT PLN (Persero) tahun 2020 – 2022
- Vice President Corporate Strategic Planning PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2018 – 2020, dan pernah berkarir di beberapa anak perusahaan antara lain PT PLN Batam sebagai General Manager Service Business Unit, PT Geodipa Energy sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan PT Indonesia Comnet Plus terakhir sebagai Manager of Wilayah Jawa Barat.

Menyelesaikan Pendidikan S1 Informatika pada tahun 1993.

*Indonesian citizen, born in 1969. Depok recidencies. Appointed as PT PLN Enjiniring Marketing and Business Development Director since September 21st, 2022.*

*Previous experience:*

- PT PLN (Persero) Head Office Vice President Business Strategy Development in 2020 – 2022
- PT PLN (Persero) Head Office Vice President of Corporate Strategic Planning in 2018 – 2020, and has had a career in several subsidiaries including PT PLN Batam as General Manager of Service Business Unit, PT Geodipa Energy as Head of Business Planning and Development Division and PT Indonesia Comnet Plus lastly as Manager of West Java Region.

*Completed his bachelor of Informatics Education degree in 1993.*

#### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022

#### Basic History of Appointment:

- Appointment Circular GMS on September 21<sup>st</sup>, 2022
- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22<sup>nd</sup>, 2022





## Muhammad Firmansyah

**DIREKTUR ENJINIRING**  
**DIRECTOR OF ENGINEERING**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Direktur Enjiniring PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai:

- Direktur Utama Anak Perusahaan PT Haleyora Power pada tahun 2021 – 2022
- Executive Vice President Operation di PT Haleyora Power pada tahun 2020 – 2021
- Senior Specialist II Operation dan Distribusi Pemeliharaan PT Haleyora Power tahun 2018 – 2020

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kelistrikan pada tahun 1998, selanjutnya menyelesaikan gelar Master dalam Bidang Kelistrikan pada tahun 2009.

*Indonesian citizen, born in 1975. Based in Bandung. Appointed as Engineering Director at PT PLN Enjiniring since September 21st, 2022.*

*Previous experience:*

- *President Director of PT Haleyora Power Subsidiary in 2021 – 2022*
- *Executive Vice President Operation at PT Haleyora Power in 2020 – 2021*
- *Senior Specialist II Operation and Maintenance Distribution of PT Haleyora Power in 2018 – 2020*

*Completed his Bachelor of Electricity education degree in 1998, then completed his Master's degree in Electricity in 2009.*

### Riwayat Dasar Pengangkatan

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022

### Basic History of Appointment:

- *Appointment Circular GMS on September 21<sup>st</sup>, 2022*
- *Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22<sup>nd</sup>, 2022*



## Profil Pejabat Eksekutif

### Profile of Executive Officers

#### ■ FAJAR SUROYO

##### Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (2018-2020) dan PLT Manajer UPK Kalimantan Barat PT PLN (Persero) Regional Kalimantan Indonesia Bagian Tengah. Menyelesaikan Pendidikan S1 Tehnik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang, S2 Bidang Manajemen Bisnis Administration dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia dan S3 Universitas Padjadjaran DMB UNPAD Bandung.

#### ■ FAJAR SUROYO

##### Corporate Secretary

Indonesian citizens. Served as Corporate Secretary since September 2021. Previously served as PLT General Manager of PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit (2018-2020) and PLT Manager of West Kalimantan UPK PT PLN (Persero) Central Kalimantan Indonesia Region. Completed Bachelor's Degree in Civil Engineering from Diponegoro University Semarang, Master's Degree in Business Administration from Universiti Tenaga Nasional Malaysia and Doctoral Degree from Padjadjaran University DMB UNPAD Bandung.

#### ■ RUNGGUN FREDO AMARTA

##### Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

#### ■ RUNGGUN FREDO AMARTA

##### Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit

Indonesian citizens. Served as Head of Procurement Unit, Quality and Risk Management since April 2020, Previously served as Production & Workshop III Implementation Unit Manager at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 – 2020). Obtained his Bachelor degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

#### ■ IZHAR SYAFRIL

##### Kepala Satuan Pengawasan Internal

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak Juli 2019, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2019 dan menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua pada tahun 2018. Menamatkan pendidikan D3 Mesin Universitas Sriwijaya dan S1 Teknik Mesin di Universitas Taman Siswa Palembang.

#### ■ IZHAR SYAFRIL

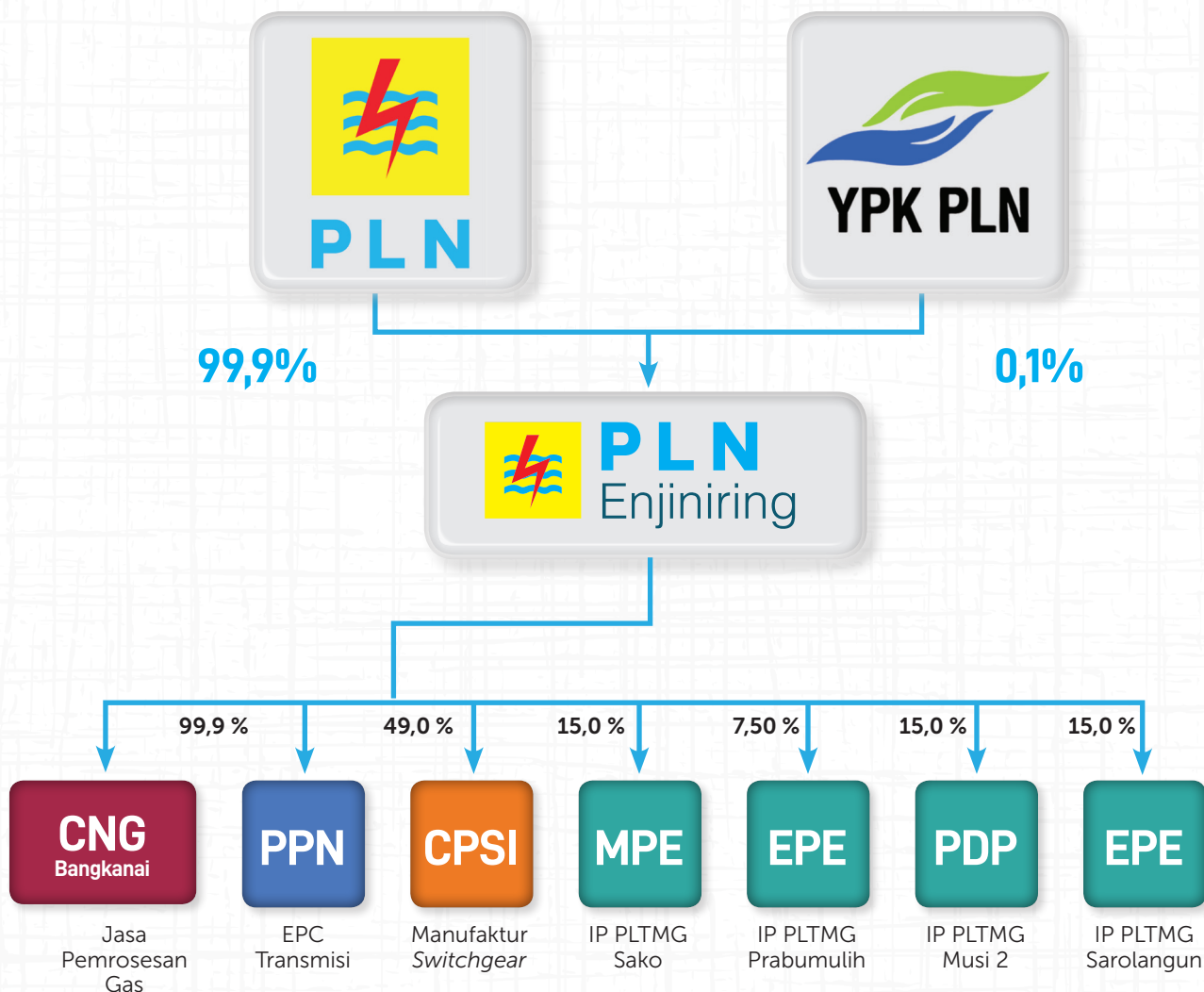
##### Head of Internal Supervision Unit

Indonesian citizen, 52 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 2019. Previously he served as Head of Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) at Head Office 2019 and serves as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from associate degree in Mechanical Engineering at Sriwijaya University and Bachelor's Education in Mechanical Engineering at Taman Siswa University Palembang.



## Struktur Korporasi

Corporate Structure



- Unit Usaha**
- Anak Perusahaan**
- Joint Venture COmpany**
- Afiliasi/Penyertaan Saham**

CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai  
 PPN : PT Prima Power Nusantara  
 CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia  
 MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo  
 EPE : PT Energi Prima Elektrika  
 PDP : PT Putra Daya Prima  
 PPE : PT Permata Prima Elektrindo

### KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF REGISTERED SHARES

PLN Enjiniring merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham.  
 PLN Enjiniring is a non-listed business entity that has not yet registered the shares.

### KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES REGISTERS

PLN Enjiniring belum melakukan pencatatan efek lainnya.  
 PLN Enjiniring has not yet registered the other securities.



## DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ENTITAS ASOSIASI

### LIST OF SUBSIDIARY COMPANIES AND/OR ASSOCIATED ENTITIES

TABEL ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

TABLE OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATIONS

Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Kedudukan
<i>Name of Company</i>	<i>Stock Ownership</i>	<i>Business Fields</i>	<i>Operational Status</i>	<i>Position</i>
<b>Entitas Anak</b> <i>Subsidiary Entity</i>				
PT Prima Power Nusantara	99,9%	Investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk Tenaga Listrik, oil dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan  <i>Investment, Operation and Generation Maintenance, Engineering Procurement and Construction (EPC) of Electric Power Transmission and Substation, Oil and Gas and the provision of supporting equipment in the electricity sector</i>	Beroperasi  Operating	Jakarta
<b>Entitas Asosiasi</b> <i>Associated Entities</i>				
PT Energi Prima ElektriKA	7,5%	Pembangkit  <i>Generator</i>	Beroperasi  <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Pura Daya Prima	15,0%	Pembangkit  <i>Generator</i>	Beroperasi  <i>Operating</i>	Jakarta
PT Multidaya Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit  <i>Generator</i>	Beroperasi  <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Permata Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit  <i>Generator</i>	Beroperasi  <i>Operating</i>	Jakarta
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	49,0%	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik  <i>Industrial electric control and distribution equipment</i>	Beroperasi  Operating	Jakarta Selatan



## Profil Anak Perusahaan

### Table of Subsidiaries and Associations

#### PT PRIMA POWER NUSANTARA

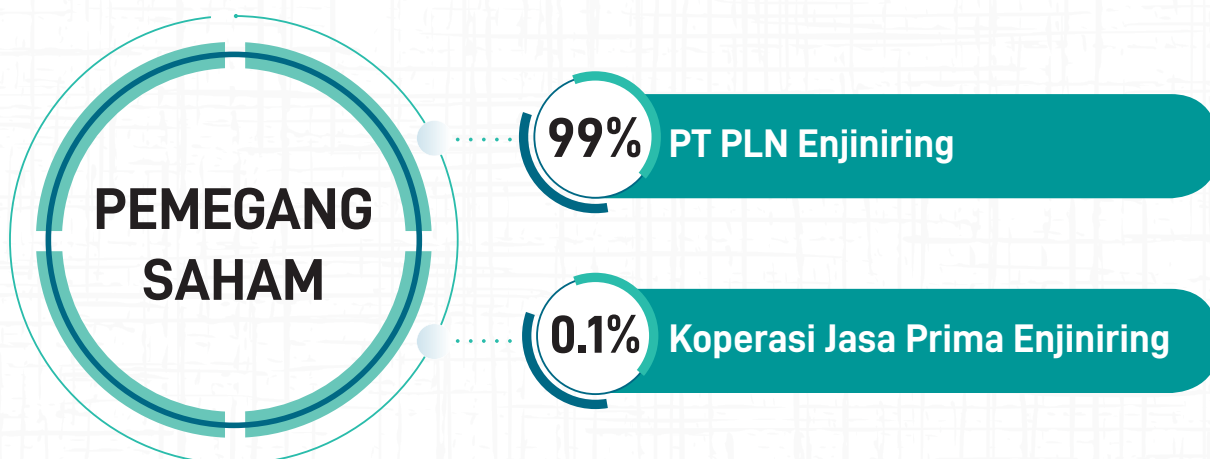
Didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 16 Juni 2016 oleh Notaris Lenny Janis Ishak. Telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0029883.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016. PLN Enjiniring memiliki saham sebesar 99,9%.

#### PT PRIMA POWER NUSANTARA

*Established based on Deed No. 21 dated June 16, 2016 by Notary Lenny Janis Ishak. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Law and Human Rights number AHU-0029883.AH.01.01.Year2016 dated June 21, 2016. PLN Enjiniring owns 99.9% of shares.*

#### ■ Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

#### ■ Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



#### Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Pengembangan usaha di bidang investasi
2. Operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan
3. Pengembangan usaha di bidang EPC transmisi dan gardu induk tenaga listrik
4. Pemeliharaan instalasi minyak dan gas
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang peralatan pendukung dan atau manufaktur dalam bidang ketenagalistrikan
6. Usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan.

#### The Company's business activities include:

1. Business development in the investment sector
2. Operation and maintenance of power plant, transmission and distribution in the electricity and non-electricity sectors
3. Business development in EPC transmission and electric power substations
4. Oil and gas installations Maintenance
5. Running businesses of supporting equipment and or manufacturing field in the electricity sector
6. Other businesses related to the Company's business in order to maximize the potential of the company.



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Power Nusantara sebagai berikut.

*The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Prima Power Nusantara is as follows.*

### SUSUNAN BOD & BOC PT PRIMA POWER NUSANTARA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Sarono
Direktur Keuangan	Abdul Fadil
Direktur Teknik	Setyo Heru Purwoko

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris	M. Sofyan



## Profil Perusahaan Asosiasi

### Associated Company Profile

#### PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

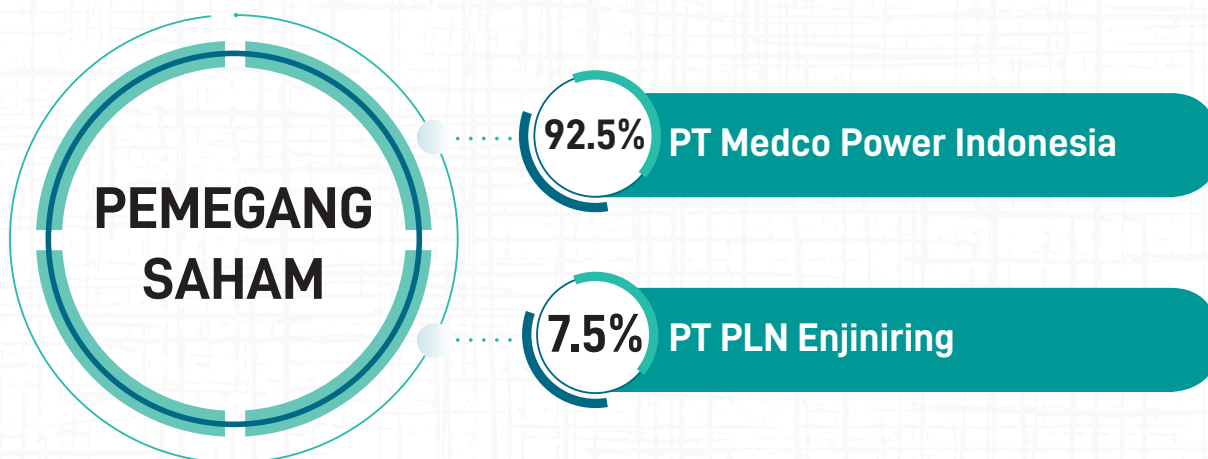
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004 oleh Notaris Jafrizoli, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Prabumulih). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-18964 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juli 2004. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 7,5% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

#### PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

*Established under the Deed of Incorporation No. 1 dated May 24, 2004 by Notary Jafrizoli, SH in the business field of power generation (IPP Prabumulih). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-18964 HT.01.01.TH.2004 dated July 29, 2004. PLN Enjiniring has a business participation by 7.5% of paid-up capital.*

*Shareholders List of PT Prima Power Nusantara*



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Melakukan usaha di bidang industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi aatau amanat.
3. Memberikan jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

*The Company's business activities include:*

1. *Performed business in the power plant industry including electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;*
2. *Running a general trading business, including export, import, interinsular and local, especially in electrical and electronic equipment trading, either for own calculations or on a commission or mandate basis.*
3. *Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.*



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Prima ElektriKa sebagai berikut.

*PT Energi Prima ElektriKa Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.*

### SUSUNAN BOD & BOC PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Danny Pradiya
Direktur	Susilawati

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Budi Nugroho
Komisaris	Sutiyo

Saat ini PT Energi Prima ElektriKa memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

*Currently PT Energi Prima ElektriKa has 1 business line which is engaged in the power plant, which is detailed as follows:*

Lokasi : Prabumulih

*Location : Prabumulih*

Kapasitas : 2 x 6 MW

*Capacity : 2 x 6 MW*

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

*Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)*

Jumlah : 7,5% penyertaan

*Jumlah : 7,5% penyertaan*

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi 2006

*Amount : Construction complete, start operation 2006*

Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

*Other investors : PT Medco Power Indonesia (92,5%)*

### PT PURA DAYA PRIMA

### PT PURA DAYA PRIMA

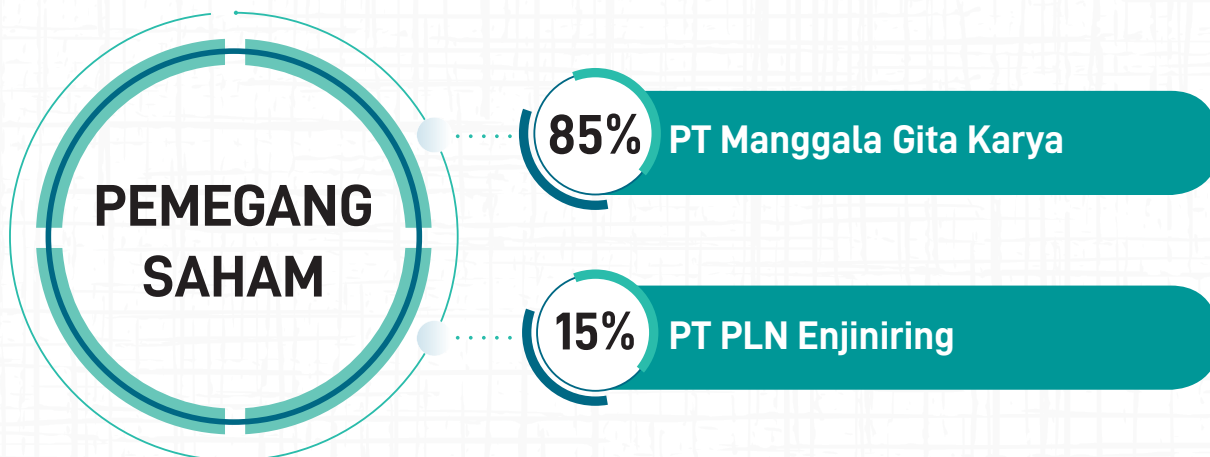
Didirikan sesuai Akta Pendirian No.34 tanggal 30 Maret 2005 oleh Notaris Eddi Setiadi, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Musi II). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-28440 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

*Established under the Deed of Incorporation No.34 dated March 30<sup>th</sup>, 2005 by Notary Eddi Setiadi, SH in the business field of power generation (IPP Musi II). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-28440 HT.01.01.TH.2005 dated October 17<sup>th</sup>, 2005. ENG Engineering has a business participation by 15% of paid-up capital.*

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

*Shareholders List of PT Prima Power Nusantara*





Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Kegiatan usaha perseroan meliputi:
2. Menjalankan usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari berbagai sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya, panas bumi dan lain-lain;
3. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi kelistrikan Gedung dan pabrik;
4. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi control dan instrumentasi;
5. Menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik;
6. Membuat jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pura Daya Prima sebagai berikut.

*The Company's business activities include:*

1. *The company's business activities include:*
2. *Running a electricity plant business from various energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar power, geothermal and others;*
3. *Procurement and/or construction of electrical installations for buildings and factories;*
4. *Procurement and/or construction of control and instrumentation installations;*
5. *Carrying out operation and maintenance activities for power plants and electrical installations;*
6. *Creating a transmission network and conducting business activities of electricity distribution through the electric power network.*

*PT Pura Daya Prima Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.*

### SUSUNAN BOD & BOC PT PURA DAYA PRIMA

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Virgianto
Direktur	Bob Surahno
Direktur	Margono Krido Utomo
Direktur	Yulius Mulyani Halim
DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Robertus Dimas Prakarsa
Komisaris	Aris Setiawan
Komisaris	Ir. Setiadi Wiogo
Komisaris	Budi Setyawan



Saat ini PT Pura Daya Prima memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

*Currently PT Pura Daya Prima has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:*

Lokasi : Musi II Palembang

*Location: Musi II Palembang*

Kapasitas : 3 x 4,7 MW dan 6 MW

*Capacity: 3 x 4.7 MW and 6 MW*

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

*Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)*

Jumlah : 15% Penyertaan

*Amount: Participation by 15%*

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi – Juni 2006 dan combine cycle mulai awal tahun 2009.

*Status: Construction completed, commencing operations in June 2006 and combining cycles starting in early 2009.*

Investor lainnya: PT Manggala Gita Karya (85%)

*Other investors: PT Manggala Gita Karya (85%)*

### **PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO**

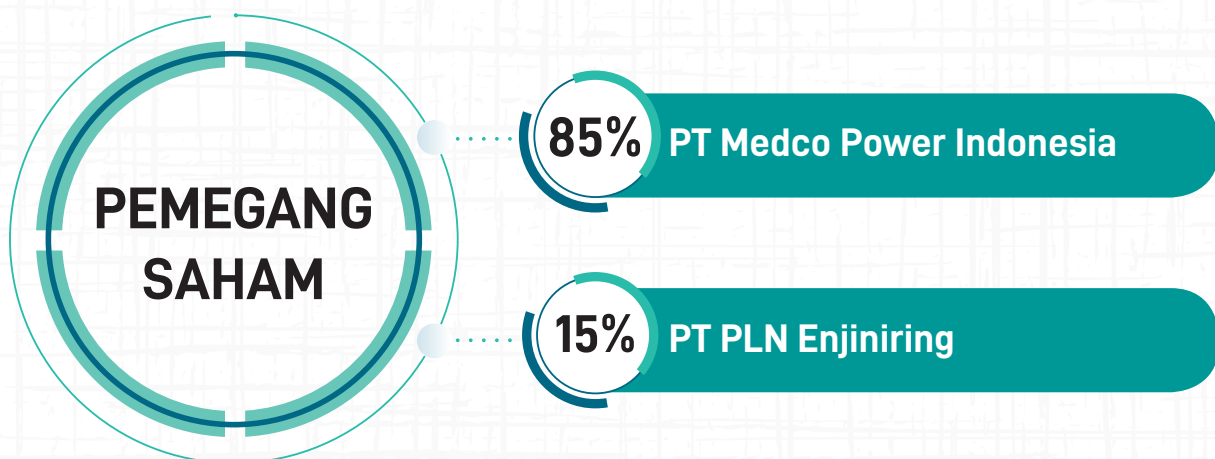
### **PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO**

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005 oleh Notaris Kun Hidayat, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sako). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

*Established under the Deed of Incorporation No. 50 dated July 15<sup>th</sup>, 2005 by Notary Kun Hidayat, SH in the business field of power generation (IPP Sako). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-23107 HT.01.01.TH.2006 dated 7 August 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid-up capital.*

Daftar Pemegang Saham PT Multidaya Prima Elektrindo

*Shareholders List of PT Multidaya Prima Elektrindo*





Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Dalam bidang industri: menjalankan industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Dalam bidang perdagangan: menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atau amanat.
3. Dalam bidang jasa: menjalankan usaha-usaha jasa meliputi, jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

The Company's business activities include:

1. In the industrial sector: operating the power generation industry as well as electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;
2. In trading field: carry out general trading, including export, import, interinsular and local, especially trading in electrical and electronic equipment, both for self-calculation or on a commission or mandate basis.
3. Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.

#### SUSUNAN BOD & BOC PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Danny Pradiya
Direktur	Susilawati

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Eka Satria
Komisaris	Fransiska Widyastuti

Saat ini PT Multidaya Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Multidaya Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Lokasi : Sako, Palembang

Location: Sako, Palembang

Kapasitas : 2 x 6 MW

Capacity: 2 x 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Jumlah : 15 % penyertaan

Amount: Participation by 15%

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi Juni 2008

Status: Construction completed, commencing operations in June 2008

Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (85%).

Other investors: PT Medco Power Indonesia (85%).



## PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

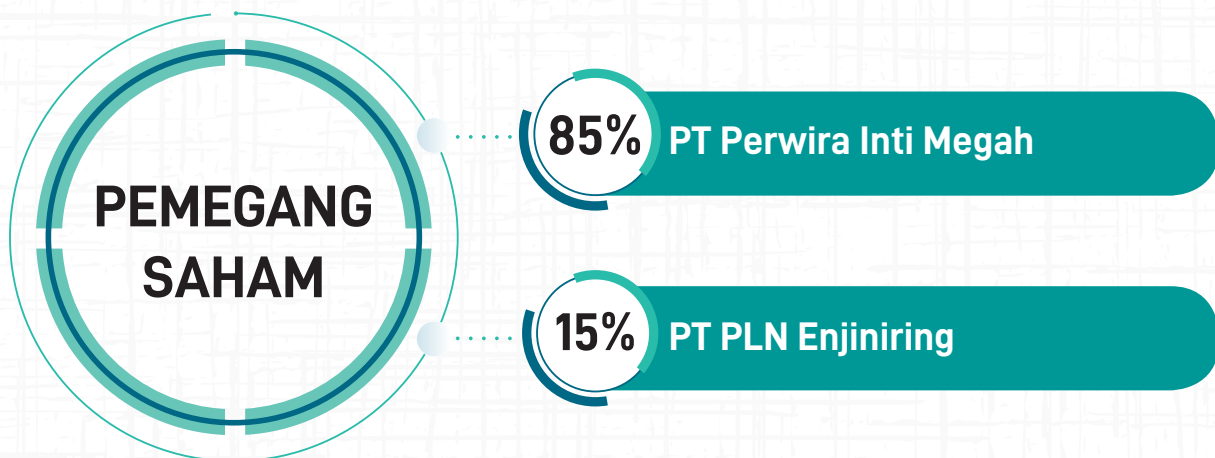
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 22 September 2006 oleh Notaris Edi Priyono, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sarolangun). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 November 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Permata Prima Elektrindo

## PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

*Established under the Deed of Incorporation No. 43 dated September 22<sup>nd</sup>, 2006 by Notary Edi Priyono, SH in the business field of power generation (IPP Sarolangun). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 dated November 14<sup>th</sup>, 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid up capital.*

*Shareholders List of PT Permata Prima Elektrindo*



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri antara lain industry pembangkit tenaga listrik, yang berasal dari sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya dan panas bumi. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa yang meliputi: penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik.

*The Company's business activities include:*

1. *Running businesses in the industrial sector covering a variety of industries including the power generation industry, which comes from energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar and geothermal power. Running a business in manufacturing transmission networks field and conducting business activities in electricity distribution;*
2. *Running businesses in services field which include: power plants operation and maintenance and electrical installations.*



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permata Prima Elektrindo sebagai berikut.

*PT Permata Prima Elektrindo Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.*

### SUSUNAN BOD & BOC PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur	Avit Alfaserian

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris	Herwan

Saat ini PT Permata Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

*Currently PT Permata Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:*

Lokasi : Sarolangun, Jambi

*Location: Sarolangun, Jambi*

Kapasitas : 2 x 7 MW

*Capacity: 2 x 7 MW*

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

*Type: Steam Power Plant (PLTU)*

Jumlah : 15 % penyertaan

*Amount: Participation by 15%*

Status : Pembangunan selesai, Mei 2010

*Status: Construction completed, commencing operations in May 2010*

Investor Lainnya : PT Perwira Inti Megah (85%).

*Other Investors: PT Perwira Inti Megah (85%).*

### PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

### PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerja sama antara PT PLN Persero dengan Crompton Greaves Limited perusahaan asal India yang bergerak di bidang Industri peralatan pengontrol (switchgear component) dan pendistribusian listrik, dengan melakukan sinergi antar anak perusahaan yaitu PT PLN Enjiniring dan PT CG International Holdings Singapore PTE.,LTD. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 49% atas modal disetor.

*PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) is a company established on the basis of cooperation between PT PLN Persero and Crompton Greaves Limited an Indian company engaged in the field of switchgear component production insudtry and electricity distribution, by synergizing between its Subsidiary Companies namely PT PLN Enjiniring and PT CG International Holdings Singapore PTE., LTD. PLN Enjiniring has a business participation by 49% of paid up capital.*

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.3 tanggal 7 Mei 2014 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dengan bidang usaha industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08265.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014.

*Established under the Deed of Incorporation No.3 dated May 7<sup>th</sup>, 2014 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. in the business field of electricity control and distribution equipment industry. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-08265.40.10.2014 dated May 12<sup>th</sup>, 2014.*



Tujuan pendirian CPSI adalah untuk alih teknologi switchgear dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam setiap peralatan untuk infrastruktur ketenagalistrikan. CPSI diharapkan mampu memproduksi komponen switchgear yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.

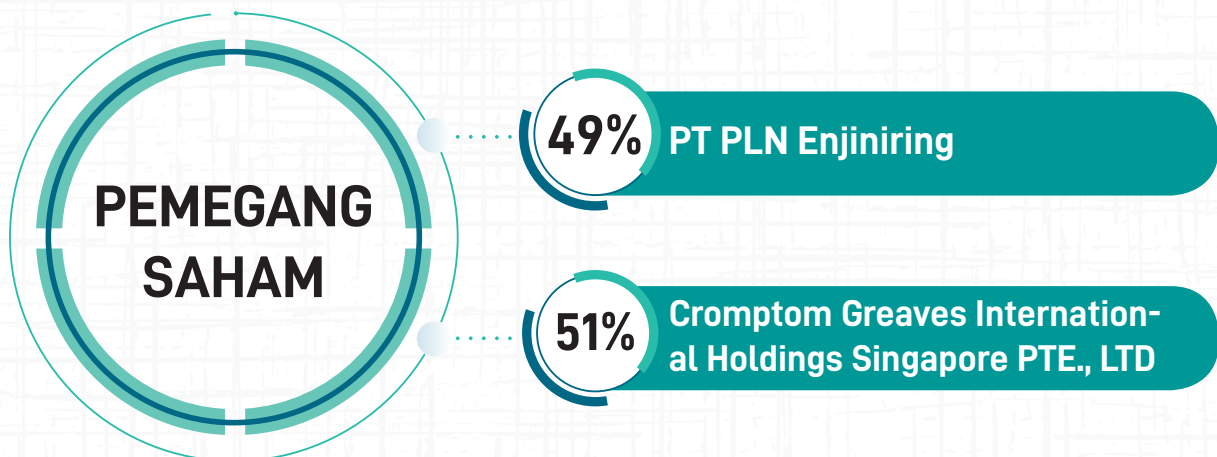
*The purpose of establishing the CPSI is to transfer switchgear technology and as part of efforts to increase the use of local components in each equipment for electricity infrastructure. CPSI is expected to be able to produce switchgear components needed to support electricity infrastructure development in Indonesia.*

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia telah melaksanakan RUPS Pertama pada tanggal 10 Juli 2014 dan peningkatan modal disetor pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar USD3.900.000. CPSI telah membeli lahan sebagai lokasi pabrik di daerah Cikande pada triwulan IV/2014 dan telah dilaksanakan Ground breaking pada bulan November 2015 dan diresmikan pada Senin, 20 Agustus 2018.

*PT Crompton Prima Switchgear Indonesia held the First General Meeting of Shareholders on July 10<sup>th</sup>, 2014 and increased paid-up capital on July 24<sup>th</sup>, 2014 amounted to USD3,900,000. CPSI purchased land as a factory location in the Cikande area in the fourth quarter of 2014 and a ground breaking was held in November 2015 and was inaugurated on Monday, August 20<sup>th</sup>, 2018.*

Daftar Pemegang Saham PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)

*Shareholders List of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)*



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia sebagai berikut.

*PT Crompton Prima Switchgear Indonesia Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.*

**SUSUNAN BOD & BOC PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA**

DIREKSI	
Jabatan	Nama Direktur
Direktur Utama	Manoj Gajanan Naphade
Direktur Keuangan	Bektiwacono
Direktur Teknik	Rajesh Motiram Jadhav

DEWAN KOMISARIS	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lloyd Pinto
Komisaris	Tonny Sarief



## Lembaga Profesi Penunjang

*Supporting Professional Agencies*



### KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PwC Indonesia  
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan  
Gedung WTC 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920

### PUBLIC ACCOUNTING FIRM

PwC Indonesia  
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan  
Gedung WTC 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920

### NOTARIS

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH  
Jl. Hang Lekir 9 No. 1  
Jakarta, 12120

### NOTARY

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH  
Jl. Hang Lekir 9 No. 1  
Jakarta, 12120

### KONSULTAN HUKUM

NAH'R Murdono Law Office  
District 8 - Prosperity Tower  
20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28  
Jalan Jend Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia

### LAW CONSULTANT

NAH'R Murdono Law Office  
District 8 - Prosperity Tower  
20th Floor, Unit E, SCBD Lot 28  
Jalan Jend Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia

### UMBRA

Telkom Landmark Tower, 49th Floor  
Jl. Gatot Suroyo Kav. 52  
Jakarta 12710

### UMBRA

Telkom Landmark Tower, 49th Floor  
Jl. Gatot Suroyo Kav. 52  
Jakarta 12710



## Penghargaan dan Sertifikasi

### Award and Certification

No	Ajang Penghargaan Awards	Penyelenggara Organizers	Penghargaan Appreciation
1	BUMN Branding & Marketing Award 2022	BUMN Track	Bronze Winner Global Branding & Marketing Award kategori International Recognition
2	TJSL & CSR Awards 2022 Tahun ke-2	BUMN Track	Special Appreciation to Company on Supporting TJSL Pillar of Social in Early Childhood Education Program
3	Indonesia Customer Experience Champions 2022	Majalah SWA & Business Digest	The Rising Customer Experience Team
4	Risk Award 2022	PT PLN (Persero)	Bronze Winner Risk Award 2022 Kategori Subsidiaries with Best Risk Leadership dan masuk dalam 4 Besar Risk Award 2022 Kategori Best Risk Implementer



## Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek

*Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office*



### KANTOR INDUK

#### Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044  
Fax.(62-21) 564 0132  
Website : [www.plne.co.id](http://www.plne.co.id)  
Email : [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id)  
Instagram : @pln\_enjiniring

### HEAD OFFICE

#### Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044  
Fax.(62-21) 564 0132  
Website : [www.plne.co.id](http://www.plne.co.id)  
Email : [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id)  
Instagram : @pln\_enjiniring

### KANTOR REPRESENTATIF

#### CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,  
Kalimantan Tengah

### REPRESENTATIVE OFFICE

#### CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,  
Kalimantan Tengah

### ANAK PERUSAHAAN

#### PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7  
Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556  
Fax.(62-21) 227 69986  
Email : [info@primponus.co.id](mailto:info@primponus.co.id)

### SUBSIDIARY

#### PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7  
Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556  
Fax.(62-21) 227 69986  
Email : [info@primponus.co.id](mailto:info@primponus.co.id)



## PERUSAHAAN AFILIASI

### ■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

### ■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19  
Panin Tower Lantai 11  
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

### ■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

### ■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

### ■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring  
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Indonesia  
Telp.(62-21) 2751-0363

## ALAMAT PABRIK :

Kawasan Industri Modern Cikande  
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4  
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin  
Serang – Banten 42185  
Telp. (62-254) 840 8448  
Fax. (62-254) 840 8848

## PERUSAHAAN AFILIASI

### ■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

### ■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19  
Panin Tower Lantai 11  
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

### ■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

### ■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

### ■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring  
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang  
Kebayoran Lama - Jakarta 12310  
Indonesia  
Telp.(62-21) 2751-0363

## FACTORY ADDRESS :

Kawasan Industri Modern Cikande  
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4  
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin  
Serang – Banten 42185  
Telp. (62-254) 840 8448  
Fax. (62-254) 840 8848





"Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan"





# Analisis dan Pembahasan Manajemen

*Management Discussion and Analysis*









## Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan

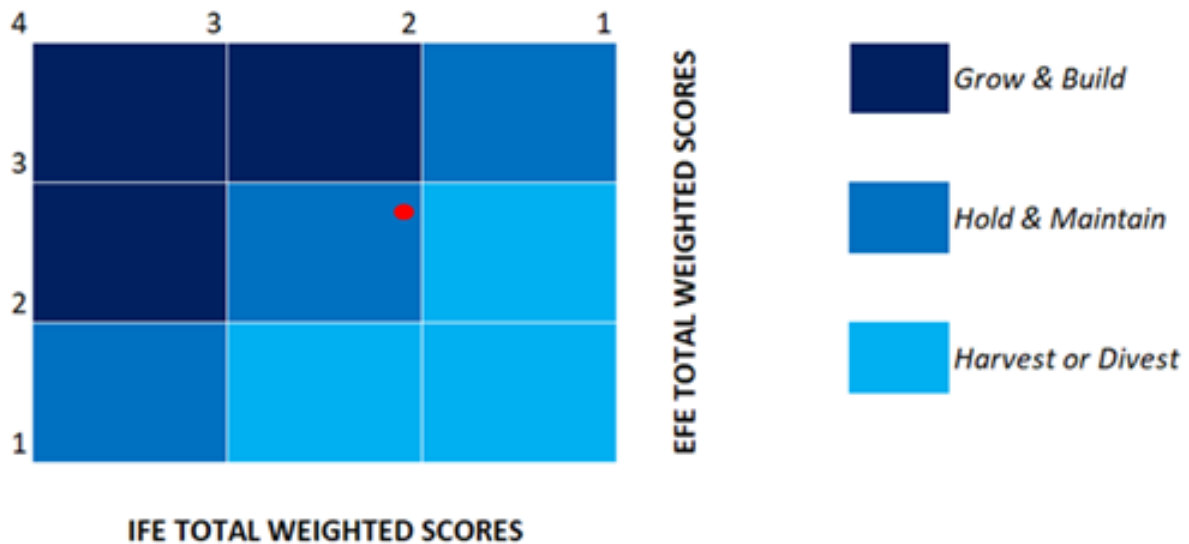
### PLN Enjiniring Position in the Electrical Industry

Pemetaan posisi PT PLN Enjiniring menggunakan Matriks IE yang digambarkan dalam dua sumbu (x,y), yaitu faktor internal (IFE-Internal Factor Evaluation (x)) dan (EFE-External Factor Evaluation (y)); Penilaian posisi perusahaan berada di:

- i. Untuk faktor internal (IFE) masih berada di bawah standar rata-rata (skor 2.17)
- ii. Untuk faktor eksternal (EFE) dalam kondisi baik atau favorable (skor 2.83)

Mapping the position of PT PLN Enjiniring using the IE Matrix which is described in two axes (x,y), namely internal factors (IFE-Internal Factor Evaluation (x)) and (EFE-External Factor Evaluation (y)); The assessment of the company's position is at:

- i. For internal factors (IFE) it is still below the average standard (score 2.17)
- ii. For external factors (EFE) in good condition or favorable (score 2.83)



Dengan demikian posisi perusahaan saat ini adalah berada di **Hold and Maintain**. Pada periode ke depan, perusahaan akan melakukan penguatan serta konsolidasi pada *core business* PT PLN Enjiniring, yaitu dengan fokus pada **Market Penetration** dan **Product Development**.

1. **Market Penetration** (Penetrasi Pasar): Fokus pada peningkatan pendapatan dengan meningkatkan nilai kontrak untuk tiap proyek pekerjaan. Nilai kontrak penjualan produk atau layanan yang sudah ada (*existing*) adalah sebesar 1-2% dari *capex* proyek menuju ke kontrak yang memiliki nilai 10-15% dari *capex* proyek.
2. **Product Development** (Pengembangan Produk): Fokus pada pengembangan produk dan jasa *existing* (FS, BD, ED, SPV) dan jasa *Engineering Integrator* (Detail Engineering Design).

Thus, it can be generally concluded that currently PT PLN Enjiniring is develops a **Hold and Maintain** strategy, where this strategy is still the same as PT PLN Enjiniring strategy in the previous period. The strategies implemented are **Market Penetration** and **Product Development**.

1. **Market Penetration** : Focus on increasing revenue by increasing the contract value for each work project. The value of the existing product or service sales contract is 1-2% of the project *capex* leading to the contract which has a value of 10-15% of the project *capex*.
2. **Product Development**: Focus on developing existing products and services (FS, BD, ED, SPV) and *Engineering Integrator* services (Detail Engineering Design).



## Tinjauan Operasional

### Operational Review

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan sebagai berikut :

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan atau gas bumi;
- k. Penyediaan/manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha yaitu Jasa Enjiniring, Jasa Non Enjiniring, dan Jasa Lainnya. Jasa Enjiniring meliputi Pembangkitan (jasa mendisain), Transmisi dan Distribusi (jasa mendisain) dan Konstruksi (jasa supervisi). Sedangkan untuk Jasa Non Enjiniring berupa jasa dalam bidang *Operation and Maintenance*, dan Jasa Lainnya berupa berupa jasa di bidang Informasi dan Teknologi.

Rincian dari bidang usaha Jasa Enjiniring dijelaskan pada tabel di bawah ini:

*Based on the Article 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities includes engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:*

- a. *Engineering consulting and/or project management services including electricity project integrators;*
- b. *Electrical system study;*
- c. *Environmental impact analysis study (AMDAL);*
- d. *Information technology;*
- e. *Education and training;*
- f. *Research and development;*
- g. *Electricity supply;*
- h. *Planning, procurement, construction and or installation (construction services) in the field of power plants, transmission and/or distribution;*
- i. *Maintenance and or operation of power plant sector, transmission and or distribution;*
- j. *Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and maintaining oil and or natural gas installations;*
- k. *Supply/manufacture of various electrical equipment for transmission and distribution of electricity.*

*The current business activities are grouped into three business sectors, namely Engineering Services, Non-Engineering Services, and Other Services. Engineering services include power plants (design services), transmission and distribution (design services) and construction (supervision services). Meanwhile, non-engineering services are in the form of operating and maintaining services, and other services in the form of information and technology services sector.*

*Details of the Engineering Services business sectors are described in the table below:*



**TABEL JENIS JASA ENJINIRING PLN ENJINIRING**

**TABLE OF TYPES OF ENGINEERING SERVICES FOR PLN ENJINIRING**

Pembangkitan	Transmisi dan Distribusi	Konstruksi
<i>Generation</i>	<i>Transmission and Distribution</i>	<i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survei <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Preparation</i>	
Penyusunan Request for Proposal <i>Request for Proposal Preparation</i>	Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Electrical Power System Study</i>	
	Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	
	Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	



# STRATEGI PERUSAHAAN

## Company Strategy

### Strategi Perusahaan

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan framework Malcolm Baldrige yang didasarkan atas lima perspektif yakni Perspektif Fokus Pelanggan, Perspektif Kualitas Produk dan Layanan, Perspektif Fokus SDM, Perspektif Keuangan dan Pasar, serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab sesuai dengan hasil perumusan menghasilkan 22 KPI yang harus dijadikan sebagai acuan oleh PLNE dalam mencapai sasaran perusahaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perspektif Fokus Pelanggan
  - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
2. Perspektif Kualitas Produk dan Layanan
  - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
  - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
  - c. Produktivitas Supervisi Konstruksi
  - d. Komposisi Enjinirs non organik untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan *Engineering Design*)
3. Perspektif Fokus Tenaga Kerja
  - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
  - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
  - c. Produktivitas Pegawai
  - d. Pemenuhan *Talent Pool* dan *Talent Mobility*.
    - i. % Perempuan dalam *nominated talent*.
    - ii. % milenial (< 40 tahun) dalam *top talent*.
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
  - a. Pendapatan proyek internal (PLN) dari produk enjiniring di luar sinergi anak perusahaan.
  - b. Progress pencapaian investasi.
  - c. Laba Rugi Tahun Berjalan.
  - d. EBITDA.
  - e. Rasio Operasi Korporat.
  - f. Rasio Operasi *Holding*.
  - g. *Subletting Cost Ratio*.
  - h. Sinergi dengan Anak Perusahaan lain.
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

### Company Strategy

*The formulation of the company's strategic objectives is carried out using the Malcolm Baldrige framework which is based on five perspectives, namely Perspective Customer Focus, Product Quality Perspective and Service, HR Focus Perspective, Financial Perspective and Markets, and Leadership, Governance Perspectives and Responsibility in accordance with the results of the formulation produce 22 KPIs that must be used as a reference by PLNE in achieving the company's targets for the year 2021 as follows:*

1. *Customer Focus Perspective*
  - a. *Customer Satisfactory Index*
2. *Product and Services Quality Perspective*
  - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
  - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
  - c. *Construction Supervision Productivity*
  - d. *Composition of non-organic Engineers for Engineering Products (FS, Biddoc dan Engineering Design)*
3. *HR Focus Perspective*
  - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
  - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
  - c. *Employee Productivity*
  - d. *Fulfillment of Talent Pool and Talent Mobility*.
    - i. *% Female nominated talent*.
    - ii. *% of millennials (< 40 years) in top talent*.
4. *Financial and Market Perspective*
  - a. *Internal project revenue (PLN) from engineering products outside of subsidiary synergies*.
  - b. *Investment achievement progress*
  - c. *Profit and Loss for the Year*.
  - d. *EBITDA*.
  - e. *Corporate Operating Ratio*.
  - f. *Rasio Operasi Holding*.
  - g. *Subletting Cost Ratio*.
  - h. *Synergy with other Subsidiaries*
5. *Leadership, Governance and Responsibility Perspective*



- a. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
- b. *Maturity Level* ERM.
- c. *IT Maturity Level*.
- d. Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI, dan Auditor lainnya).
- e. Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup).

Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pemasaran dan Penjualan

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program 35.000 MW. Strategi pemasaran untuk akselerasi program tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan terkait enjiniring program 35.000 MW sesuai dengan RUPTL 2019 - 2028 baik berupa kontrak penugasan atau tender dari PLN maupun pihak swasta.

Perolehan kontrak enjiniring pada tahun 2021 diharapkan berjumlah Rp 700 Miliar. Strategi peningkatan kontrak jasa enjiniring berbasis pada RUPTL 2019-2028 untuk potensi pekerjaan pengembangan ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi dan gardu induk) pada periode 2019-2021 yang dapat dilaksanakan oleh PLN Enjiniring pada tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar program 35.000 MW dapat diselesaikan tepat waktu dan PLNE dapat membuat perencanaan yang lebih baik dalam penyelesaian pekerjaan dan workload SDM serta peningkatan kualitas produk.

Pekerjaan jasa utama (*core business*) di bidang enjiniring ketenagalistrikan terdiri atas pendapatan enjiniring bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi, bidang supervisi konstruksi, detail enjiniring desain dan pengembangan jasa enjiniring.

Pada pengembangan pasar jasa enjiniring lebih lanjut, berbasis pada mengoptimalkan kontrak pekerjaan jasa enjiniring yang didapatkan dari sinergi antar Anak Perusahaan. Disamping pekerjaan jasa tersebut diatas, terdapat pendapatan lainnya dari pengembangan usaha berbasis keenjiniringan diantaranya:

- a. *The implementation of Good Corporate Governance* (GCG)
- b. *Maturity Level* ERM
- c. *IT Maturity Level*.
- d. *Completion of Audit Findings* (BPK, KAP, SPI, and other Auditors).
- e. *Compliance with K3LH* (Health, Occupational Safety & Environment).

*The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follow;*

#### 1. Sales and Marketing

*As part of the PT PLN (Persero) group PT PLN Enjiniring have been participated in the success of the 35,000 MW program. The marketing strategy for the program acceleration is to complete works related to the 35,000 MW engineering program in accordance with the 2019-2028 RUPTL, either in the form of assignment contracts or tenders from PLN or private parties.*

*The acquisition of engineering contracts in 2021 is expected to amount to IDR 700 billion. The strategy for increasing engineering service contracts is based on the 2019-2028 RUPTL for potential electricity development work (generation, transmission and substations) in the 2019-2021 period that can be carried out by PLN Enjiniring in 2021. This is intended so that the 35,000 MW program can be completed on time and PLNE can make better planning in completing work and HR workloads as well as improving product quality. The core business services in electricity engineering field consists of engineering in generation field revenue, transmission & distribution sector, construction supervision, design engineering details and engineering service development. In the further engineering services market development, based on optimizing engineering work service contracts obtained from synergies between Subsidiaries. In addition to the services mentioned above, There are other income from engineering-based business development including:*



- a. Perolehan hasil Investasi dengan mengoptimalkan pengoperasian & pemeliharaan CNG Bangkanai.
- b. Perolehan Jasa Konstruksi maupun EPC Ketenagalistrikan di bidang transmisi, dan distribusi dari PT Prima Power Nusantara.

Untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha, pada setiap program pengembangan usaha yang bersifat investasi, didukung dengan Kajian Enjiniring/Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial serta Kajian Resiko.

## 2. Produksi

Capaian kinerja perusahaan tahun 2021 aspek produksi dilakukan dengan penyelesaian kontrak *carry over* maupun kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2021. Sebagai dukungan atas kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian produk & jasa enjiniring dan pengembangan usaha berbasis keenjiniringan (*investment, operation & maintenance* CNG Bangkanai, dan Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan dari PT Prima Power Nusantara), dilakukan program – program penguatan produksi, dengan sasaran khusus antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas
- b. Mengendalikan biaya pokok produksi
- c. Program Investasi yang prima
- d. Program Prasarana Proyek berbasis *Information Technology*.

## 3. Keuangan dan Akuntansi

Program kerja di bidang Akuntansi, Pajak dan Asuransi pada Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan internal control atas Laporan Keuangan.
- b. Penerapan PSAK terbaru yaitu 71,72 dan 73 pada Laporan Keuangan Perusahaan
- c. Pelaksanaan perhitungan PSAK 24 mengenai imbal kerja
- d. Mengusulkan penyempurnaan integrasi sistem IT antara SAP, Virtual Cubicle dan Sunfish serta mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat dan Anak Perusahaan
- e. Meningkatkan tertib administrasi pajak

- a. *Return on Investment by optimizing the operation & maintenance of CNG Bangkanai.*

- b. *Obtaining Electricity Construction and EPC Services in transmission and distribution sector from PT Prima Power Nusantara..*

*To ensure the business development success, in every investment business development program, supported by an Engineering Study/ Operational Feasibility Study and a Financial Feasibility Study as well as a Risk Assessment.*

## 2. Production

*The company's performance achievement in 2021 in production aspect is carried out by completing the carry over contracts and new contracts obtained in 2021. As a support for the quality and timeline accuracy on completing the engineering products & services and engineering-based business development (investment, operation & maintenance of CNG Bangkanai, and Electricity Construction Services from PT Prima Power Nusantara), the production strengthening programs are carried out, with specific targets including:*

- a. *Increasing production capacity and productivity*
- b. *Controlling the cost of production*
- c. *Excellent Investment Program*
- d. *Project Infrastructure Program based on Information Technology.*

## 3. Finance and Accounting

*Finance and Accounting can be described as follows:*

- a. *Improve internal control over Financial Reports.*
- b. *The implementation of the latest PSAK, namely 71.72 and 73 in the Company's Financial Statements*
- c. *Implementation of PSAK 24 calculations regarding employee benefits*
- d. *Propose improvements to IT system integration between SAP, Virtual Cubicle and Sunfish and support the consolidation of Corporate and Subsidiary Financial Statements*
- e. *Improve tax administration order*



- f. Mendukung pelaksanaan asuransi aset material yang dimiliki oleh Perusahaan
  - g. Mendukung pelaksanaan inventarisasi aset bersama tim yang ditunjuk oleh Manajemen
  - h. Membantu pencapaian target KPI Perusahaan
  - i. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pada bidang Akuntansi, Pajak dan Asuransi dengan mengusulkan pengadaan training, workshop dan program profesi Akuntansi
  - j. Membantu pemenuhan kebutuhan bidang lain terkait Rating Perusahaan.
4. SDM dan Umum

Dalam mendukung misi PLN Group "SOLID" dimana PLNE mendapat arahan dua misi yaitu *Leading Industry Capabilities* dan *Optimizing Cost Efficiency* maka hal ini akan diselaraskan pada strategi Sumber Daya Manusia dan Umum. Pelaksanaan penyelarasan strategi akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan struktur organisasi
  - i. Dalam rangka penguatan proses bisnis Detailed Engineering Design (DED) akan dibentuk VP Enjiniring Pembangkit Thermal dan VP Enjiniring Pembangkit EBT. Masing-masing VP akan membawahi 2 Manajer yaitu yang menangani *Basic Engineering Design* dan *Detailed Engineering Design* (DED).
  - ii. Dalam rangka mendukung arahan pemegang saham untuk implementasi PLN SOLID, penguatan dan pengembangan bisnis inti *Detailed Engineering Design* (DED) dan enjiniring EBT, perlu disempurnakan perangkat SDM (Dirkom, Urjab, KKJ) di lingkungan PT PLN Enjiniring.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi (*Leading Industry Capabilities-allignment* misi PLN "SOLID")
  - i. Penguatan kompetensi inti di bidang enjiniring khususnya *Detail Engineering Design* (DED) dengan pengembangan program kepakaran sesuai Pohon Profesi, dahan Profesi dan nama Profesi di lingkungan PT PLN Enjiniring.

- f. Support the implementation of material asset insurance owned by the Company
- g. Support the implementation of asset inventory with the team appointed by Management
- h. Help achieve the Company's KPI targets
- i. Increase the capacity and capability of HR in the fields of Accounting, Taxes and Insurance by proposing the provision of training, workshops and programs for the Accounting profession
- j. Assist in meeting the needs of other fields related to Corporate Ratings.

4. Human Resources and General Affairs

In support of the PLN Group "SOLID" mission where PLNE has two mission directions, namely *Leading Industry Capabilities* and *Optimizing Cost Efficiency*, this will be aligned with the Human Resources and General Strategy. The implementation of strategy alignment will be described as follows:

- a. Improvement of organizational structure
  - i. In order to strengthen the Detailed Engineering Design (DED) business process, a VP of Thermal Generator Engineering and a VP of EBT Generator Engineering will be formed. Each VP will supervise 2 Managers, namely those who handle *Basic Engineering Design* and *Detailed Engineering Design* (DED).
  - ii. In order to support the direction of shareholders for the implementation of PLN SOLID, strengthening and developing the core business of *Detailed Engineering Design* (DED) and EBT engineering, it is necessary to improve the HR tools (Directorate of Communication, Urjab, KKJ) within PT PLN Enjiniring.
- b. Capacity building and competence (*Leading Industry Capabilities-allignment* PLN "SOLID" mission)
  - i. Strengthening core competencies in the field of engineering, especially *Detail Engineering Design* (DED) by developing an expertise program according to the Professional Tree, Profession branch and Professional name within PT PLN Enjiniring.



- ii. Menyusun jenjang kepakaran sesuai Pohon Profesi, Dahan Profesi dan Nama Profesi dalam rangka membina karir para Enjinir
  - iii. Melaksanakan assessment kompetensi mengacu kepada Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang telah ditetapkan sesuai dengan penyempurnaan Organisasi.
  - iv. Melaksanakan program pemenuhan gap kompetensi antara KKJ dan kompetensi pegawai melalui: a) *Knowledge Management*; b) *Training*; c) *Coaching Mentoring Counseling*; d) *Joint Operation* melalui *partnership* perusahaan internasional atau institusi penelitian.
- c. Optimalisasi biaya (*Optimizing Cost Efficiency – alignment misi PLN “SOLID”*)
- i. Melakukan monitoring efektifitas biaya kepegawaian dengan tolak ukur rasio yang sama atau lebih baik dari rasio biaya SDM/Pendapatan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.
  - ii. Melaksanakan evaluasi peningkatan produktivitas pegawai dengan mempertahankan angka rasio yang sama lebih baik dari perhitungan pendapatan/pegawai (tahun 2018, 2019, dan 2020).

Untuk mendukung implementasi strategi perusahaan dan mendukung kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan pengembangan SDM melalui *Human Capital Readiness (HCR)* dan *Organizational Capital Readiness (OCR)* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapabilitas SDM melalui program sertifikasi, pembelajaran/pelatihan dan penugasan pegawai bisnis inti dan penunjang.
- b. Peningkatan keselarasan strategi perusahaan dengan setiap individu pegawai melalui program internalisasi strategi dan penyelarasan kontrak manajemen hingga level fungsional.
- c. Penyelarasan peraturan atau ketentuan yang berlaku di holding dalam dalam program ratifikasi keputusan direksi untuk mendukung program PLN SOLID.

- ii. *Develop the level of expertise according to the Professional Tree, Professional Branch and Professional Name in order to foster the careers of Engineers*
  - iii. *Carrying out a competency assessment referring to the Job Competency Needs (KKJ) that has been determined in accordance with organizational improvements.*
  - iv. *Implementing competency gap fulfillment programs between KKJ and employee competencies through: a) Knowledge Management; b) Training; c) Coaching Mentoring Counseling; d) Joint Operation through partnership with international companies or research institutions.*
- c. *Cost optimization (Optimizing Cost Efficiency – PLN “SOLID” mission alignment)*
- i. *Monitoring the effectiveness of staffing costs with a benchmark ratio that is equal to or better than the ratio of HR/Revenue costs in 2018, 2019 and 2020.*
  - ii. *Carry out an evaluation of increasing employee productivity by maintaining the same ratio, which is better than the calculation of income/employees (in 2018, 2019, and 2020).*

*To support the implementation of the company’s strategy and support the business process activities of PT PLN Enjiniring, both in the engineering and non-engineering fields, HR development is carried out through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) as follows:*

- a. *Improvement of HR capabilities through certification programs, learning/training and assignment of core and supporting business employees.*
- b. *Increasing the alignment of the company’s strategy with each individual employee through a strategy internalization program and alignment of management contracts to the functional level.*
- c. *Alignment of regulations or provisions that apply to the holding in the ratification program of the board of directors’ decisions to support the PLN SOLID program.*



- d. Konsep CoC dengan penentuan tema isu strategis setiap bulan.
- e. Assessment dan peningkatan Budaya Perusahaan (*corporate value*) pada setiap individu pegawai PLN Enjiniring.
- f. Kaderisasi jabatan structural yang berkualifikasi di dalam semua tingkatan dalam rangka memobilisasi penyelenggaraan strategi Perusahaan.
- g. Meningkatkan implemetansi *Knowledge Management* sebagai sarana dokumentasi Knowledge Asset dan materi pembelajaran untuk setiap pegawai PLN Enjiniring.
- h. Menciptkan hubungan industrial yang harmonis dengan pembinaan hubungan industrial dengan pegawai PLN Enjiniring.
- i. Implementasi inovasi tidak terbatas pada lomba karya inovasi dalam setiap *improvement* yang dilakukan untuk mendukung kinerja PLNE Enjiniring.
- j. *Benchmarking* dengan perusahaan ternama di dalam dan luar negeri.

Untuk prasarana umum, optimalisasi biaya administrasi dan umum kedepan dengan program penyatuan semua aktifitas perusahaan dalam satu gedung untuk efektifitas proses kegiatan perusahaan.

- a. Penyempurnaan pengelolaan ruang kerja dan fasilitas untuk terciptanya suasana kondusif dan kenyamanan bekerja.
  - b. Menerapkan manajemen K3 secara konsisten.
  - c. Tingkat preventif terkait kesehatan pegawai.
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
- a. Dukungan untuk Pencapaian Kinerja Anak Perusahaan dan Afiliasi  
Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut berperan dalam pemberian dukungan dana untuk Anak Perusahaan melalui SHL/Bridging Loan dimana pemberian SHL/Bridging Loan diutamakan pada hal yang bersifat strategis atau emergency (berbasis risiko).
  - b. EBITDA Management Secara Menyeluruh  
Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut berpartisipasi menggunakan EBITDA sebagai cascading tolak ukur kinerja korporat. Seluruh karyawan baik struktural maupun fungsional dapat

- d. *CoC concept with determining the theme of strategic issues every month.*
- e. *Assessment and improvement of Corporate Culture (corporate value) for each individual employee of PLN Enjiniring.*
- f. *The cadre of qualified structural positions at all levels in order to mobilize the implementation of the Company's strategy.*
- g. *Improving the implementation of Knowledge Management as a means of documenting Knowledge Assets and learning materials for every employee of PLN Enjiniring.*
- h. *Creating harmonious industrial relations by fostering industrial relations with PLN Enjiniring employees.*
- i. *The implementation of innovation is not limited to the innovation work competition in every improvement made to support the performance of PLNE Engineering.*
- j. *Benchmarking with well-known companies at home and abroad.*

*For public infrastructure, optimizing administrative and general costs in the future with a program to unify all company activities in one building for the effectiveness of the company's activity processes.*

- a. *Improving the management of workspaces and facilities to create a conducive and comfortable working atmosphere.*
  - b. *Implement OHS management consistently.*
  - c. *Preventive level related to employee health.*
5. *Business Development and Innovation*
- a. *Support for the Achievement of Subsidiaries and Affiliates*  
*The field of Business Development and Corporate Planning plays a role in providing financial support for Subsidiaries through SHL/Bridging Loans where the provision of SHL/Bridging Loans is prioritized on strategic or emergency (risk-based) matters.*
  - b. *Overall EBITDA Management*  
*The Division of Business Development and Corporate Planning participates in using EBITDA as a cascading benchmark for corporate performance. All employees, both structural and functional, can understand the*



memahami struktur EBITDA proses bisnisnya masing-masing, agar setiap anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memberikan hasil yang nyata & terukur. Target Keuangan dan Target Produksi ditetapkan pada setiap langkah proses bisnis di setiap lini bisnis PLNE (level bidang & satuan).

c. **Pengelolaan Kepuasan Pelanggan dan Penanganan Keluhan Pelanggan**

Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat ikut serta mengimplementasikan salah satu sasaran PLN pada Program Transformasi PLN yaitu proses kerja berbasis *Customer Focus* dimana pengelolaan kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan dilakukan di setiap proyek. Kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan memiliki korelasi yang signifikan terhadap keberlangsungan bisnis PLNE. Untuk sementara fungsi tersebut akan diatur melalui program tim KAM (*Key Account Management*) sebelum menjadi tupoksi yang melekat di masing-masing bidang.

d. **Alignment Portofolio PLNE sesuai SOLID – Rencana Akuisisi PT REC**

PLNE siap untuk menjalankan seluruh rencana alignment sesuai dengan misi SOLID PLN dan RJP PLNE 2020-2024. Akuisisi PT REC direncanakan akan diimplementasikan tahun 2022, maka Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat bersama bidang terkait lainnya akan mempersiapkan kajian untuk tahap kedua, yaitu *due diligence* PT REC di tahun 2021. Tahap pertama yang merupakan kajian dan valuasi telah diselesaikan pada tahun 2020. Untuk melanjutkan kajian tahap kedua, PLNE akan meminta ijin kepada PLN untuk dapat melakukan *due diligence* PT REC tahun 2021.

*EBITDA structure of their respective business processes, so that every budget issued by the company can provide tangible & measurable results. Financial Targets and Production Targets are set at every step of the business process in every PLNE business line (field & unit level).*

c. **Customer Satisfaction Management and Customer Complaint Handling**

*The Division of Business Development and Corporate Planning participates in implementing one of PLN's targets in the PLN Transformation Program, namely a Customer Focus-based work process where customer satisfaction management and customer complaint handling are carried out in each project. Customer satisfaction and handling customer complaints have a significant correlation to PLNE's business continuity. For the time being, these functions will be managed through the KAM (Key Account Management) team program before becoming the tupoksi inherent in each field.*

d. **PLNE Portfolio Alignment according to SOLID – PT REC Acquisition Plan**

*PLNE is ready to carry out all alignment plans in accordance with PLN's SOLID mission and PLNE's RJP 2020-2024. The acquisition of PT REC is planned to be implemented in 2022, so the Business Development and Corporate Planning Division together with other related fields will prepare a study for the second phase, namely PT REC due diligence in 2021. The first stage, which is a study and valuation, has been completed in 2020. continuing the second phase of the study, PLNE will ask PLN for permission to carry out due diligence of PT REC in 2021.*



## KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

### OPERATING PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

#### JASA ENJINIRING

Realisasi perolehan kontrak 2022 Jasa Enjiniring internal adalah sebesar Rp. 300,189.37 juta, lebih tinggi 6,10% dibandingkan realisasi perolehan kontrak internal di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 282,925.89 juta. Sedangkan perolehan kontrak jasa Enjiniring eksternal adalah sebesar Rp. 13,313.20 turun 65,45% dibandingkan realisasi penjualan di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 38,538.23 juta. Secara total keseluruhan perolehan kontrak jasa enjiniring, pertumbuhannya turun sebesar 2,48%

#### ENGINEERING SERVICES

The realization of 2022 internal engineering service contract acquisition was IDR 300,189.37 million, 6.10% higher than the realization of the acquisition of internal contracts in 2021 of IDR 282,925.89 million. Meanwhile, the acquisition of external engineering service contracts is IDR 13,313.20 decreased by 65.45% compared to 2021 sales realization of IDR 38,538.23 million. In total, the total acquisition of engineering service contracts, the growth decreased by 2.48%

**TABEL PEROLEHAN KONTRAK JASA ENJINIRING**  
**ENGINEERING SERVICES CONTRACT GAINS TABLE**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**  
**(IN MILLION IDR)**

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Internal	300,189.37	282,925.89	6,10%
Eksternal	13,313.20	38,538.23	-65,45%
<b>Jumlah</b>	<b>313,502.57</b>	<b>321,464.12</b>	<b>-2.48%</b>
<b>Total</b>			

#### BIDANG PEMBANGKIT

Pada tahun 2022 Bidang Pembangkit masih melanjutkan tiga pekerjaan yang termasuk proyek strategis, yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede, Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW).

Di tahun 2022 ini, Bidang Pembangkit menerima penugasan baru yang masih didominasi oleh penugasan yang terkait dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas, asesmen PLTU serta pembuatan kajian infrastruktur gas dan pembangkit EBT.

#### GENERATING FIELD

In 2022, the Power Plant Field will continue its three works including strategic projects on Design and Construction Supervision Consulting Services for Jatigede Hydropower Plant, Project Management Consulting Service Work for Upper Cisokan Hydropower Team and Design Update Consulting Services, Design Supervision and Construction Supervision of Upper Cisokan Pumped Storage Hydropower Plant (4x260 MW).

In 2022, the Power Plant Field received new assignments which are still dominated by assignments related to coal and gas-fired power plants, PLTU assessments and constructing gas infrastructure studies and EBT plants.



Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Pembangkit pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 177.574,39 Juta, turun 9,56% dibandingkan perolehan nilai kontrak di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 196,307.25Juta. Bidang Pembangkit sepanjang tahun ini total pekerjaan yang dilaksanakan adalah 204 pekerjaan yang terdiri dari 95 kontrak 2022 dan 109 kontrak lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang pelaksanaannya dilanjutkan ke tahun 2022. Dari 204 pekerjaan tersebut terdapat 73 kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun ini yaitu 18 kontrak dari kontrak baru dan 55 dari kontrak lanjutan.

The acquisition total value of new contracts in the Power Plant in 2022 is IDR 177,574.39 Million, a decrease by 9.56% compared to the contract value in 2021, which was IDR 196,307.25 Million. The Power Plant Field so far the total work carried out this year was 204 works consisting of 95 contracts in 2022 and 109 follow-up contracts from previous years whose implementation was continued to 2022. Of the 204 works, there are 73 work contracts that have been completed this year, namely 18 contracts new contracts and 55 from follow-on contracts.

**TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG PEMBANGKIT**  
**POWER GENERATION NEW CONTRACT VALUE TABLE**  
(DALAM JUTA RUPIAH)  
(IN MILLION IDR)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Internal Internal	172,873.83	190,508.36	-9,26%
Eksternal External	4,673.56	5,798.89	-19,41%
Jumlah Total	177,574.39	196,307.25	-9,56%

**TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG PEMBANGKIT**  
**POWER GENERATION CONTRACT GAINS TABLE**

Uraian Description	Jumlah Kontrak 2022 (Unit)		Jumlah Kontrak 2021 (Unit)		Perubahan (%)	
	Total Contract of 2022 (Unit)		Total Contract of 2021 (Unit)		Change (%)	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2022* Contract 2022*	77	4	98	3	-21%	33%
Pekerjaan Lanjutan ** Carry Over**	54	0	59	0	-8%	0%
Kontrak selesai di tahun 2022 Contracts Completed in 2022	70	3	63	2	11%	50%

\* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2022

\* Total contracts obtained in 2022

\*\* Total kontrak lanjutan dari tahun 2021 kebawah

\*\* Total Carry Over Contracts from 2021 and below



**PEROLEHAN KONTRAK BIDANG PEMBANGKITAN**  
**POWER GENERATION CONTRACT ACQUISITION**



**BIDANG TRANSMISI DAN  
DISTRIBUSI**

Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 122,752.13 Juta, naik 20,60% dari tahun 2021 dengan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 101,782.46 Juta. Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2022 melaksanakan 146 (seratus tiga puluh enam) kontrak, dimana 91 (sembilan puluh satu) kontrak diantaranya telah dilakukan penutupan kontrak dan 55 (empat puluh lima) kontrak lainnya masih dilanjutkan pekerjaannya ke tahun 2023.

Mayoritas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2022, masih didominasi oleh pelaksanaan Survey, Soil Investigation, pembuatan Bid Dokumen dan HPE, serta Pendampingan Lelang untuk Gardu Induk maupun Transmisi. Selain pekerjaan tersebut, Bidang Transmisi dan Distribusi juga pada tahun ini melaksanakan beberapa pekerjaan Desain Review dan Study.

**TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  
FIELD**

*The total value of new contracts for Transmission and Distribution in 2022 is IDR 122,752.13 Million, an increase by 20.60% from 2021 with the acquisition of a new contract value of IDR 101,782.46 million. The Transmission and Distribution sector in 2022 carried out 146 (one hundred thirty-six) contracts, of which 91 (ninety-one) contracts have been closed and 55 (forty-five) other contracts are still being continued to work in 2023.*

*The majority of work carried out by the Transmission and Distribution Sector in 2022 is still dominated by the implementation of Surveys, Soil Investigations, making Document Bids and HPE, and Auction Assistance for Substations and Transmission. In addition to this work, the Transmission and Distribution Department also this year carried out several Design Review and Study works.*



**TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI**  
**TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NEW CONTRACT VALUE TABLE**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**  
**(IN MILLION IDR)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	116,548.13	69,111.32	68.64%
Eksternal <i>External</i>	6,204.01	32,671.14	-81.01%
Jumlah <i>Total</i>	122,752.13	101,782.46	20.60%

**TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI**  
**TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONTRACT GAINS TABLE**

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2022 (Unit)		Jumlah Kontrak 2021 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2022</i>		<i>Total Contract of 2021</i>		<i>Change</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2022* <i>Contract 2022*</i>	41	4	61	9	-33%	-56%
Pekerjaan Lanjutan ** <i>Carry Over**</i>	6	4	32	6	-81%	-33%
Kontrak selesai di tahun 2022 <i>Contracts Completed in 2022</i>	85	6	51	3	67%	100%

\* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2022

\* *Total contracts obtained in 2022*

\*\* Total kontrak lanjutan dari tahun 2021 ke bawah

\*\* *Total Carry Over Contracts from 2021 and below*



**PEROLEHAN KONTRAK BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI**  
**TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONTRACT ACQUISITION**



**BIDANG KONSTRUKSI**

Pada tahun 2022, Bidang konstruksi melaksanakan 5 (lima) proyek strategis, yaitu:

1. Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW)
2. Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)
3. Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project
4. Pekerjaan Supervisi Konstruksi SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap (Paket SV-01)
5. Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 kV Pranap – Perawang

Sehingga pada tahun 2022 ini, total pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 33 pekerjaan yang terdiri dari : 2 pekerjaan yang terkontrak tahun 2022 dan 31 kontrak lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya

**CONSTRUCTION FIELD**

*In 2022, the construction sector will carry out 5 (five) strategic projects, namely:*

1. *Design Update Consultancy Services, Design Supervision and Construction Supervision of Upper Cisokan Pumped Storage Hydropower Plant (4x260 MW)*
2. *Consulting Services for Design and Construction Supervision of Jatigede Hydropower Plant (2x55 MW). Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)*
3. *Consulting Services Design Supervision, Construction Supervision and Quality Assurance & Quality Control (QA / QC) Muara Tawar Construction Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project*
4. *Construction Supervision Work SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap (Package SV-01)*
5. *Construction Supervision Work T/L 500 kV Pranap – Perawang*

*So that in 2022, the total work carried out by the Construction Sector is 33 works consisting of: 2 contracted works in 2022 and 31 follow-up contracts from previous years whose implementation is continued*



yang pelaksanaannya dilanjutkan ke tahun 2022. Dari 33 pekerjaan tersebut terdapat 5 kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun 2022 yaitu 5 kontrak internal dan 0 kontrak eksternal. Sementara untuk perolehan nilai kontrak baru, di tahun 2022 Bidang Konstruksi mendapat Rp. 13,203,044,558, turun 43% dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 23,374,405,430,

to 2022. Of the 33 works, there are 5 work contracts that have been completed in 2022, namely 5 internal contracts and 0 external contracts. As for the new contract acquisition value, in 2022 the Construction Sector received IDR 13,203,044,558, down 43% from 2021 where in 2021 the acquisition of new contract value amounted to IDR 23,374,405,430,

**TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG KONSTRUKSI**  
**CONSTRUCTION NEW CONTRACT VALUE TABLE**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**  
**(IN MILLION IDR)**

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Internal Internal	10,767.41	23,306.21	-53.80%
Eksternal External	2,435.63	68.20	3471.30%
Jumlah Total	13,203.04	23,374.41	-43.51%

**TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG KONSTRUKSI**  
**CONSTRUCTION CONTRACT GAINS TABLE**

Uraian Description	Jumlah Kontrak 2022 (Unit)		Jumlah Kontrak 2021 (Unit)		Perubahan (%)	
	Total Contract of 2022 (Unit)		Total Contract of 2021 (Unit)		Change (%)	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2022* Contract 2022*	1	1	8	1	-87.50%	0%
Pekerjaan Lanjutan ** Carry Over**	27	1	31	1	-12.90%	0%
Kontrak selesai di tahun 2022 Contracts Completed in 2022	5	0	0	1	500.00%	0%

\* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2021

\* Total contracts obtained in 2021

\*\* Total kontrak lanjutan dari tahun 2020 kebawah

\*\* Total Carry Over Contracts from 2020 and below



**PEROLEHAN KONTRAK BIDANG KONSTRUKSI**  
**CONSTRUCTION CONTRACT ACQUISITION**



**JASA LAINNYA**

Bidang Informasi dan Teknologi

Tidak ada

**OTHER SERVICES**

*Information and Technology*

*None*



## Aspek Pemasaran

### Marketing Aspects

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan konsultan enjiniring terintegrasi yang terkemuka se Asia Tenggara dan pilihan no. 1 pelanggan, PLN Enjiniring terus melakukan upaya dalam menyediakan layanan enjiniring ketenagalistrikan yang prima bagi PLN Group maupun Non-PLN Group.

*In accordance with the company's vision, namely to become the leading integrated engineering consulting company in Southeast Asia and the no. 1 customer, PLN Engineering continues to make efforts to provide excellent electrical engineering services for the PLN Group and Non-PLN Group.*

## STRATEGI PEMASARAN

### STRATEGI PEMASARAN PELANGGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Pangsa pasar PLN Enjiniring sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pelanggan internal (PLN Group) dan sebagian lagi pelanggan eksternal (pelanggan di luar PLN Group), sehingga strategi pemasarannya lebih difokuskan kepada pemenuhan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan keluhan/aspirasi pelanggan.

PLN Enjiniring memiliki strategi Pemasaran yang agresif dan *service development*, mendukung proyek-proyek strategis investasi prioritas PT PLN (Persero) dengan memasarkan produk enjiniring *end to end*. PLN Enjiniring ikut berperan dalam setiap breakthrough PT PLN (Persero) dan melakukan upaya-upaya kerjasama dalam memperoleh pekerjaan termasuk diantaranya potensi pekerjaan eksternal.

#### 1. Pemenuhan Kepuasan Pelanggan

PLN Enjiniring mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan untuk memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan internal dan eksternal

## MARKETING ASPECTS

### INTERNAL AND EXTERNAL CUSTOMER MARKETING STRATEGY

*PLN Enjiniring's market share is still dominated by internal customers (PLN Group) and some external customers (customers outside the PLN Group), so that its marketing strategy is more focused on fulfilling customer satisfaction and building relationships with customers. Fulfilling customer satisfaction is done by listening to the customers' aspirations, either current customers or potential customers. Meanwhile, building relationships with customers is carried out by managing customer relationships and managing customer complaints/aspirations.*

*PLN Enjiniring has an aggressive marketing strategy and service development, supporting strategic investment projects priority PT PLN (Persero) by marketing end-to-end engineering products. PLN Enjiniring plays a role in every breakthrough of PT PLN (Persero) and makes collaborative efforts in obtaining jobs, including the potential for external jobs.*

#### 1. Customer Satisfaction Compliance

*PLN Enjiniring listens, interacts and observes customer behavior to obtain some informations on products and services provided by the Company to internal and external customers through coordination meetings*



melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pelanggan maupun yang pengenalan produk dan layanan yang diinisiasikan sendiri oleh PLN Enjiniring.

Perusahaan mendengarkan suara pelanggan saat ini untuk memperoleh informasi dan umpan balik (feedback) dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a) Rapat koordinasi mingguan dan bulanan untuk mendapatkan informasi/masukan dan umpan balik pada setiap tahapan pekerjaan;
- b) Media komunikasi (telepon, SMS, email, website) untuk menampung masukan dan keluhan;
- c) Survei kinerja proyek yang dilakukan pada setiap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PLN Enjiniring;
- d) Survei kepuasan pelanggan korporat yang dilakukan pada semester 1 dan 2 untuk memperoleh informasi terkait nilai indeks kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian dari persepsi pelanggan serta menampung kritik dan saran pelanggan;
- e) Pendekatan personal yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring dan;
- f) *Roadshow* secara tatap muka maupun virtual kepada pelanggan.

PLN Enjiniring menindaklanjuti informasi dan umpan balik yang diperoleh dari pelanggan untuk memperbaiki mutu produk dan layanan dengan cara:

- a) Mengoptimalkan fungsi tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan;
- b) Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga petugas dapat merespon langsung keluhan pelanggan

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui media rapat formal, diskusi informal, survei kepuasan pelanggan, pameran, serta media elektronik. Media elektronik yang digunakan yaitu *website*, *email*, telepon, dan aplikasi pengiriman pesan.

PLN Enjiniring juga membandingkan kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing berdasarkan hasil survei. Berdasarkan data tersebut, PLN Enjiniring

*organized either by the customer and the introduction of products and services initiated by PLN Enjiniring or those initiated by PLN Enjiniring.*

*The company listens to the current customers' aspirations to obtain information and feedback by taking the following approaches:*

- a) *Perform some weekly and monthly coordination meetings to obtain information/input and feedback at each stage of work;*
- b) *Communication media (telephone, SMS, email, website) to accommodate input and complaints;*
- c) *Project performance survey conducted on each project work carried out by PLN Enjiniring;*
- d) *Corporate customer satisfaction surveys conducted in semester 1 and in semester 2 to obtain information related to the customer satisfaction index scores based on assessments of customer perceptions and to accommodate customer criticism and suggestions;*
- e) *The personal approach taken by the management of PLN Enjiniring and;*
- f) *Face-to-face and virtual roadshows to customers*

*PLN Enjiniring follows up on feedback and information obtained from the customers to improve products and services quality by taking the following approaches:*

- a) *Optimize the function of the project team to coordinate with customers and deliver monthly work progress reports;*
- b) *Field visits conducted by PLN Enjiniring management to listen to the customers' aspirations so that the officers can respond directly to the customers' complaints*

*Regarding the potential customers, their aspirations are obtained through the media of formal meetings, informal discussions, customer satisfaction surveys, exhibitions and electronic media. The electronic media used are the website, email, telephone, and messaging app.*

*PLN Enjiniring also compares customer satisfaction against competitor customer satisfaction based on survey results. Based on this data, PLN Enjiniring makes*



membuat analisis untuk menentukan target kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing di tahun berikutnya. Aktifitas ini dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Enjiniring

## 2. Membangun Hubungan dengan Pelanggan

PLN Enjiniring memasarkan, membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan *Roadshow* kepada pelanggan yang dilakukan secara tatap muka sebelum pandemi Covid-19 dan secara virtual pada masa pandemi, yang bertujuan untuk menyediakan dukungan pelanggan agar mendapatkan *feedback* dari pelanggan serta agar keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan tuntas. PLN Enjiniring juga beradaptasi dengan kondisi marketing era digital yaitu dengan merilis brosur elektronik pada website dan mengoptimalkan media sosial yang dimiliki untuk memberikan informasi terkini terkait perusahaan.

Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, PLN Enjiniring juga mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan. PLN Enjiniring menetapkan Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagai pihak yang mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan.

Data dan informasi keluhan dan aspirasi pelanggan dikumpulkan dan diidentifikasi melalui:

1. Surat keluhan yang dikirimkan oleh pelanggan;
2. Keluhan yang disampaikan secara langsung dan dicatat dalam formulir keluhan dan aspirasi pelanggan;
3. Survei kepuasan pelanggan kinerja proyek dan survei kepuasan pelanggan korporat;
4. Laporan *Roadshow*

Setelah diidentifikasi berdasarkan jenis keluhan, keluhan segera disampaikan kepada Direktorat terkait agar keluhan dapat ditangani secara efektif dan tuntas. Selain itu, Perseroan juga mengelola keluhan berdasarkan data rekaman (*record*) keluhan pelanggan selama pekerjaan berjalan. Untuk memastikan agar keluhan dapat ditangani dengan tuntas, PLN Enjiniring telah membuat Prosedur Enjiniring Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan.

*an analysis to determine customer satisfaction targets against competitor customer satisfaction in the following year. This activity is carried out by the Directorate of Marketing and Business Development in collaboration with the Directorate of Engineering.*

## 2. Customers Relationships Building

*PLN Enjiniring markets, builds and manages relationships with customers through roadshows to customers conducted face-to-face before the Covid-19 pandemic and virtually during the pandemic, which aim to provide customer support in order to get feedback from customers so that customer complaints can be resolved completely. PLN Enjiniring also adapts to the marketing conditions of the digital era, namely by releasing electronic brochures on the website and optimizing their social media to provide the latest information regarding the company.*

*In building relationships with customers, PLN Enjiniring also manages customer complaints and aspirations. PLN Enjiniring establishes the Directorate of Marketing and Business Development as the party that manages customer complaints and aspirations.*

*Data and information on customer complaints and aspirations are collected and identified through:*

1. *Letter of complaint sent by the customer;*
2. *Complaints that are being submitted directly and are being recorded in the complaint form and customer aspirations;*
3. *Project performance customer satisfaction surveys and corporate customer satisfaction surveys;*
4. *Roadshow report*

*After being identified by the type of complaint, complaints are immediately submitted to the relevant Directorate so that those complaints can be handled effectively and thoroughly. In addition, the Company also manages complaints based on customer complaint records during work. To ensure that complaints can be handled throughly, PLN Enjiniring has developed an Engineering Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations.*



## PANGSA PASAR

Dalam program PLN 10 tahun ke depan direncanakan terjadi penambahan kapasitas pembangkit PLN sebanyak 40,6 GW, dengan komposisi penambahan pembangkit teknologi EBT ditargetkan mencapai 51,6% dari jumlah tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan rencana penambahan pembangkit EBT pada RUPTL sebelumnya (RUPTL 2019-2028) yaitu sebanyak 29,6% dari target penambahan kapasitas pembangkit. Program penambahan kapasitas pembangkit tersebut akan selaras dengan penambahan jaringan transmisi dan kapasitas gardu induk.

Eksekusi rencana ini tentu saja akan selalu mempertimbangkan keekonomian proyek agar dapat mengurangi biaya pokok penyediaan listrik, keseimbangan supply demand, dan kesiapan sistem kelistrikan. PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program PLN dalam menyediakan dokumen enjiniring berkualitas agar proyek – proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat terlaksana tepat mutu, biaya dan waktu. Dokumen enjiniring yang dimaksud adalah Penyusunan Pre-Feasibility Study, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Dokumen Lingkungan, Request For Proposal, Draft PJBL, Pendampingan Lelang, Design Review, Supervisi Konstruksi, Desain Penyambungan, Kajian Teknis terkait.

Selain menyediakan layanan konsultasi enjiniring ketenagalistrikan, PLN Enjiniring melaksanakan pengembangan produk pada area pengembangan Green Industry Cluster. Pada tahun 2022, Perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pre Feasibility Study Green Industry Cluster Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

## MARKET SHARE

*In the next 10 years PLN program, it is planned to increase PLN's generation capacity by 40.6 GW, with the composition of the addition of NRE technology plants targeted to reach 51.6% of this amount, much higher than the plan to add NRE plants in the previous RUPTL (RUPTL 2019-2028), which was 29.6% of the target of increasing plant capacity. The program will be in line with the addition of transmission networks and substation capacity.*

*The execution of this plan, of course, will always consider the economics of the project in order to reduce the basic cost of providing electricity, balance supply demand, and readiness of the electricity system. PT PLN Enjiniring as part of the PT PLN (Persero) group participates in the success of the PLN program in providing quality engineering documents so that electricity infrastructure development projects can be carried out on quality, cost and time. The engineering documents in question are Pre-Feasibility Study Feeding, Feasibility Study, Grid Study, Bid Document, HPE, Environmental Document, and Request for Proposal, PJBL Draft, Auction Assistance, Design Review, Construction Supervision, Connection Design, Related Technical Studies.*

*In addition to providing electricity engineering consulting services, PLN Enjiniring carries out product development in the Green Industry Cluster development area. In 2022, the Company can complete the work of Pre-Feasibility Study Consulting Services Green Industry Cluster Special Economic Zone (SEZ) Arun Lhokseumawe.*



## Informasi Kelangsungan Usaha

### *Business Continuity Information*

#### **Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha**

PLN Enjiniring tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

#### ***Matters that have a Significant Effect on Business Continuity***

*PLN Enjiniring is not facing any issues that significantly affect its business continuity.*

#### **Assessment Manajemen Atas Hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha**

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

#### ***Management Assessment of Matters Affecting Business Continuity***

*The Company's management has assessed the Company's ability to continue its business and believes that the Company has the resources to continue its business in the future. In addition, the Company's management does not see any material uncertainties that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.*

#### **Asumsi Yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assessment**

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan Pemegang Saham
- b. Kinerja Keuangan
- c. Likuiditas
- d. Solvabilitas
- e. Masalah Internal
- f. Perkara Hukum

#### ***Assumptions Used by Management in Conducting Assessment***

*Several factors that are considered by management in conducting an assessment of business continuity are as follows.*

- a. *Shareholder Policy*
- b. *Financial Performance*
- c. *Liquidity*
- d. *Solvency*
- e. *Internal Problems*
- f. *Legal Matters*



## Prospek Usaha

### *Business Prospect*

Prospek Perusahaan di masa depan tidak terlepas dari perencanaan investasi Pemegang Saham yang secara umum tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) sebagai perusahaan induk. Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN selaku Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang- Undang tersebut. Sebagai langkah awal PLN harus dapat memperkirakan kebutuhan tenaga listrik paling tidak hingga 10 tahun ke depan.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan *captive power* ke jaringan PLN. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan *output* barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input-input barang dan jasa lainnya. Di samping itu hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Faktor kedua adalah program elektrifikasi. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

*The Company's prospect cannot be separated from the Shareholders' investment planning in the near future which is generally stated in the General Plan of Electricity Supply (RUPTL) of PT PLN (Persero) as the holding company. Referring to Article 28 and Article 29 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, PLN as the Holder of a Business Permit to Supply Electricity for the public interest is obliged to provide electricity continuously, in sufficient quantities and with good quality and reliability. Thus, PLN must be able to serve the current and the future electricity needs so that PLN can fulfill its obligations required by the Law. First off, PLN must be able to estimate the electricity needs for at least the next 10 years.*

*The electricity's needs in an area are driven by three main factors, namely the economic growth, the electrification program and the transfer of captive power to PLN's network. Economic growth in a more simple term is the process of increasing the output of goods and services. This process, in addition to other inputs for goods and services, requires electricity power to support it. In addition, the result of economic growth is an increase in people's income which will be encouraging increases in electrical goods' demands/equipments such as televisions, air conditioners, refrigerators and others. As a result, the demand for electricity will increase.*

*The second factor is the electrification program. It is one of PLN's efforts to support Government programs. PLN needs to establish electricity for all the people inside its business area to increase the electrification ratio. This will directly maintain the existence of PLN's business areas and at the same time will increase the electrification ratio in Indonesia, especially in areas that have become PLN's business areas.*



Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari *captive power* (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. *Captive power* ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka *captive power* ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN. Pengalihan *captive power* ke PLN juga didorong oleh tingginya harga BBM untuk membangkitkan tenaga listrik milik konsumen industri/bisnis, sementara harga jual listrik PLN relatif lebih murah. Faktor ketiga ini sangat bergantung kepada kemampuan pasokan PLN di suatu daerah/sistem kelistrikan dan skema bisnis jual beli listrik PLN dengan *captive power*, jadi tidak berlaku umum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik adalah kemampuan finansial perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan andal.

Sesuai dengan prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang telah dikemukakan oleh PLN tersebut serta kebutuhan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan permintaan pelanggan, maka terlihat bahwa prospek PLN Enjiniring ke depan sangatlah terbuka lebar.

Selain itu, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PLN Enjiniring yang dapat dijadikan sebagai prospek usaha ke depan antara lain, yaitu:

1. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
2. Jumlah pesaing terbatas, terutama dalam pekerjaan enjiniring hulu;
3. UU No.30 tahun 2009 membuka peluang untuk pengembangan listrik tidak hanya oleh PT PLN (Persero) sehingga terbuka peluang pasar di PEMDA dan IPP;

*The third factor that drives the demand growth for PLN electricity is the transfer from the captive power (the use of self-propelled oil-fired power plants) to become PLN customers. This captive power arises as a result of PLN's inability to meet customer demand in an area, especially industrial and business customers. If PLN's ability to serve in the area has increased, then this captive power with various considerations will turn to become PLN customers. The transfer of captive power to PLN is also driven by the high price of fuel to generate electricity belonging to industrial/business consumers, while the selling price of PLN's electricity is relatively cheaper. This third factor really depends on the ability of PLN's supply in an area/electricity system and the PLN electricity buying and selling business scheme with captive power, so it does not apply in general.*

*Another factor that can affect the growth of electricity demand is the company's financial ability to invest in serving the growing of customers' and the public's needs to get an adequate and reliable electricity supply.*

*In accordance to the electricity estimated demand that has been put forward by PLN as well as the investment needs in order to serve customer demand's growth, it seems that the prospects for PLN Enjiniring are very wide open in the near future.*

*There are several opportunities owned by PLN Enjiniring that can be used as the future business prospects :*

1. *PT PLN's (Persero) investment plan is still relatively large every year to catch up with the low national electrification ratio.*
2. *Limited number of competitors, particularly in upstream engineering work;*
3. *Laws of Republic of Indonesia Number 30 of 2009 opens up opportunities for electricity development not only by PT PLN (Persero) therefore there are market opportunities in Regional Government (PEMDA) and in IPP;*



4. Dapat menjadi pendorong atau pemrakarsa untuk implementasi teknologi baru;
5. Kecenderungan dunia untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi baru dan terbarukan;
6. Mitra kerja yang cukup banyak;
7. Akses pendanaan dari pasar modal akan diperoleh setelah *Initial Public Offering* (IPO);
8. Masih terbuka pasar di negara-negara Asia Tenggara yang perkembangan ketenagalistrikkannya belum maju dalam rangka kerja sama negara-negara ASEAN;
9. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 yang membuka peluang penunjukkan langsung dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan terafiliasi BUMN, maupun sebaliknya;
10. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 juga membuka peluang penunjukkan langsung walaupun sudah Perusahaan Terbuka dengan syarat tertentu;
11. Rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan total 35.000 MW dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, yang terdiri atas 10.000 MW oleh PLN dan 25.000 MW oleh swasta/IPP.

PLN Enjiniring juga tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan *engineering* dimana setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*.

4. *To be a driving force or initiator for the implementation of new technologies;*
5. *The world's trends to implement environmentally friendly technologies, especially in the field of new and renewable energy;*
6. *A considerable number of partners;*
7. *Access to funding from the capital market will be obtained after the Initial Public Offering (IPO);*
8. *There is still an open market in Southeast Asian countries where the electricity development is not yet advanced in the framework of cooperation between ASEAN countries;*
9. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 which opens opportunities for direct appointment of State Owned Enterprises (BUMN), State Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries and State Owned Enterprises (BUMN) affiliated companies, or vice versa;*
10. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 also opens opportunities for direct appointment even though it is already a Public Company with certain conditions;*
11. *The government's plan to build a power plants infrastructure with a total of 35,000 MW in the next 5 years, consisting of 10,000 MW by PLN and 25,000 MW by the private sectors/IPP.*

*PLN Enjiniring is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).*



## Strategi Pengembangan Usaha

### Business Development Strategy

Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) melakukan redefinisi dan konsolidasi seluruh kegiatan usahanya. Dalam kegiatan ini, PLN (Persero) mengarahkan portofolio bisnisnya kedepan agar menjadi lebih optimal ke dalam sebuah pernyataan yang bernama **"SOLID"** (**S**ecuring Business Sustainability, **O**ptimizing Cost Efficiency, **L**eading Industry Capabilities, **I**ncreasing Profit Contribution, and **D**eveloping New Edge).

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis *Optimizing Cost Efficiency* dan *Leading Industry Capabilities*. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN (Persero) dapat menjadi "price setter" dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan."
2. **Leading Industry Capabilities**, "mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis ("capability setter") bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global.

Sehubungan dengan kedua misi di atas, beberapa hal yang menjadi fokus PLN Enjiniring, yaitu:

#### 1. Pemantapan PLN Enjiniring sebagai Enjiniring terintegrasi

Sebagai suatu entitas bisnis, PT PLNE diharapkan tumbuh dan berkembang dengan efisien dan kompetitif sehingga unggul dan dapat

*PT PLN (Persero) redefined and consolidated all of its business activities in 2018. PT PLN (Persero) directs its future business portfolio to be more optimal in a statement called "SOLID" (Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, and Developing New Edge).*

*Based on the PLN Enjiniring's Core Business as an engaged company in engineering services, PLN Enjiniring has a strategic mission of Optimizing Cost Efficiency and Leading Industry Capabilities. With these 2 strategic missions, PLN Enjiniring applies the development of business activities which is in line with the strategic mission of "PLN SOLID" as follows:*

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "optimizing the PLN Group's cost structure along the value chain, so that PT PLN (Persero) can become a "price setter" and maximizing the PLN Group value creation through the entire cost efficiency."
2. **Leading Industry Capabilities**, "developing capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness and /or strategic advantages ("capability setters") for the PLN Group with the best standards in the national electricity industry and in accordance to the internationally or globally accepted standards."

*In connections to the two missions above, PLN Enjiniring has several things to focus on, namely:*

#### 1. Consolidating PLN Enjiniring as an integrated Engineering

*As a business entity, PT PLNE is expected to growing and developing competitively and efficiently so that it is to be excellent and is able*



mendukung proses bisnis di PT PLN (Persero) sesuai misi “PLN SOLID”. Pada kenyataannya, dalam menjalankan roda bisnis PLN Enjiniring terkadang mengalami benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan dan Unit PT PLN (Persero), terutama dalam pengerjaan proyek – proyek PT PLN (Persero), karena misi “PLN SOLID” belum sepenuhnya mendapat dukungan. Oleh karena berkaitan dengan masalah di atas, perlu kiranya ditegaskan kembali dukungan penuh dari PT PLN (Persero) sesuai dengan misi “PLN SOLID”, agar PLN Enjiniring dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai harapan Pemegang Saham. Sisi lain yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh jajaran PLN Enjiniring, adalah mayoritas pekerjaan PT PLNE adalah berasal dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan program – program untuk meningkatkan keterikatan PT PLN (Persero) yang akan berdampak positif bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha PLN Enjiniring, salah satunya adalah dengan memperkuat hubungan antara PT PLN (Persero) dengan PLN Enjiniring melalui sistem *Key Account Management*, yang dimonitor dan dimitigasi langsung oleh Top Management PLN Enjiniring melalui aplikasi “PLN Enjiniring Commit” yang telah diluncurkan sejak bulan Oktober 2018.

## 2. Lingkup Usaha Enjiniring

Pada kenyataannya, bisnis jasa konsultansi enjiniring bersifat fluktuatif, tergantung dari potensi pasar dan kondisi persaingan di industri jasa enjiniring ketenagalistrikan itu sendiri. Tentunya hal ini juga akan mengakibatkan berfluktuasinya “*income*” bagi PLN Enjiniring, terutama pada Jasa *Conceptual Design*. Untuk dapat mengatasi hal ini, PT PLNE tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan engineering. Dimana untuk setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan

*to support PT PLN (Persero) business processes in accordance to the “PLN SOLID” mission. In fact, there are several conflicts of interest in running the PLN Enjiniring business with the Subsidiaries and PT PLN (Persero) Units, because the mission of “PLN SOLID” has not been fully supported especially when working on PT PLN (Persero) projects. Therefore, relating to those mentioned problems, it is necessary of PT PLN (Persero) to reaffirm the full support in accordance to the mission of “PLN SOLID”, so that PLN Enjiniring can grow and develop as rapidly as expected by the Shareholders. The other part that needs to receive some attentions from all levels of PLN Enjiniring, is that the most important work for PT PLNE is from PT PLN (Persero), therefore, some programs which will have a positive impact on the growth and the sustainability of PT PLN (Persero) will be needed, to increase its engagement. One of PLN Enjiniring efforts is to improve the relationship between PT PLN (Persero) and PLN Enjiniring through the Key Account Management system, which is directly monitored and mitigated by PLN Enjiniring Top Management through an app called “PLN Enjiniring Commit” which has been launched since October 2018.*

## 2. Scope of Engineering Business

*In fact, the engineering consulting services business is fluctuating, it depends on the market potential and the competitive conditions in the electricity engineering services industry itself. Of course this will also result in fluctuating “income” for PLN Enjiniring, especially in Conceptual Design Services. To be able to overcome this matter, PT PLNE is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering,*



enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*.

Hingga saat ini bisnis atau lingkup usaha PLN Enjiniring sebagian besar bersifat *Partial Solution*. Artinya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk dalam bidang ketenagalistrikan khususnya, dikemas dan dilaksanakan sebagai bagian yang terpisah. Akan tetapi ke depannya, PLN Enjiniring akan menjadikan kemasan atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ini sebagai *Engineering Integrated Total Solution*, dimana PLN Enjiniring memulai pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun *Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment dan Demolish Plant*.

*One Package Engineering Integrated Total Solution* ini akan memberikan nilai lebih, baik untuk PLN Enjiniring maupun PLN Group. Dengan paket pekerjaan ini, PLN Enjiniring dimungkinkan merencanakan *Man Month (MM)* dengan lebih baik dan mengkoordinasikan serta melakukan inventarisasi dokumen enjiniring dalam satu siklus pembangunan secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu juga membuat evaluasi dan koreksi atas penyempurnaan desain sesuai tahapannya, menyederhanakan proses pengadaan di PT PLN (Persero) yang memudahkan PT PLN (Persero) dalam melakukan koordinasi dan monitoring suatu proyek.

### 3. Lingkup Usaha Mendukung Pengembangan dan Konstruksi PLN Group

Bisnis atau lingkup usaha yang selama ini dilakukan oleh PLN Enjiniring masih berada dalam lingkup konsultasi di bidang Jasa Enjiniring berkaitan dengan sarana ketenagalistrikan. Untuk mencapai target yang dicita-citakan dalam mendukung *optimizing cost dan leading capability*, PLN Enjiniring tidak dapat hanya semata – mata mengandalkan *business as usual*, tetapi harus tumbuh dan berkembang sesuai harapan Pemegang Saham. Oleh karenanya, perusahaan

*the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).*

*Up to date, most of the PLN Enjiniring business or business scope have quality of Partial Solution. This means that some works relating to Power plants, Transmission and Substation particularly in the electricity sector are packaged and carried out as a separated part. However, PLN Enjiniring will make the packaging or the implementing of these works as an Engineering Integrated Total Solution in the near future, of which PLN Enjiniring starts the implementation of the works by compiling Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment and Demolish Plant.*

*This One Package Engineering Integrated Total Solution will provide extended values, both for PLN Enjiniring and the PLN Group. It is possible for PLN Enjiniring to plan a better Man Month (MM) and to coordinate and to carry out an engineering documents inventory in a more comprehensive and structured development cycle, with this work package. In addition, it also makes evaluations and corrections for design improvements according to the stages, simplifies the process of procurement at PT PLN (Persero) which makes it easier for PT PLN (Persero) to coordinate and monitor a project.*

### 3. Business Scope to Support the Development and Construction of the PLN Group

*The business or the business scope that has so far been carried out by PLN Enjiniring is still within the scope of consultation in the field of Engineering Services related to electricity facilities. In order to achieve the desired targets in support of optimizing cost and leading capability, PLN Enjiniring can not rely, solely on business as usual, but it must grow and develop according to the expectations of shareholders. Therefore, the company will gradually get into*



secara bertahap akan berangsur – angsur masuk dalam bisnis yang mendukung *Development and Construction* PLN Group yang terdiri atas enjiniring terintegrasi (enjiniring untuk *design*, enjiniring untuk *procurement* dan enjiniring untuk konstruksi). Persiapan yang harus dilakukan untuk masuk dalam bisnis tersebut juga tidak sedikit (Keuangan, kepakaran, SDM, teknologi, budaya, dan seterusnya), sehingga PLN Enjiniring perlu menyusun rencana dan tahapan transformasi bisnis tersebut dengan baik. Pemupukan modal, pengalaman, reputasi, jaringan, sertifikasi internasional, dan seterusnya merupakan contoh – contoh aspek yang memerlukan penanganan serius. Berkaitan dengan masalah keuangan, PLN Enjiniring memerlukan dukungan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan tercapainya cita – cita bisnis di lingkup *Development and Construction* tersebut. Pemupukan kapabilitas dan kapasitas perlu dilakukan sejak dini, dengan berusaha meningkatkan kepercayaan kepada PT PLN (Persero) terkait kemampuan PLN Enjiniring dalam hal tersebut. Pada titik ini PLN Enjiniring memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT PLN (Persero).

*the business that supports the Construction and the Development of the PLN Group which consists of integrated engineering (engineering for design, engineering for procurement and engineering for construction). The preparations that must be made to get into the business are also not insignificant (finance, expertise, human resources, technology, culture, and so on), thus PLN Enjiniring needs to prepare plans and stages of business transformation properly. Capital accumulations, experiences, reputations, networks, international certifications, and so on are examples of aspects that require serious handling. Regarding the financial problems, PLN Enjiniring requires substantial financial support to prepare the achievement of business goals in the scope of Construction and Development. Capability and capacity building needs to be done earlier by trying to increase trust in PT PLN (Persero) regarding the ability of PLN Enjiniring. At this point PLN Enjiniring needs some supports from various parties, especially PT PLN (Persero).*



## Rencana Investasi Bisnis Baru

### *The New Business Investment Plan*

Agar rencana strategis perusahaan yang searah dengan dinamika proses bisnis korporat dapat berjalan, maka PLN Enjiniring ke depan akan melakukan investasi pada bidang IT guna menunjang bisnis enjiniring, baik bisnis enjiniring eksisting maupun bisnis enjiniring *detail design* yang fokus pada:

1. *Alignment* strategi teknologi informasi dengan proses bisnis perusahaan untuk membangun *enterprise system*.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi melalui rasionalisasi, standarisasi, konsolidasi, dan integrasi antara aplikasi yang ada.
3. Integrasi informasi dengan menggunakan arsitektur informasi dengan model tata kelola sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.
4. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung *agility*, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan TI.

*In order for the company's strategic plans that are in line with the dynamics of corporate business processes to run, PLN Enjiniring in the future will invest in the IT sector to support the engineering business, both the existing engineering business and the detailed design of engineering business that will be focusing on:*

1. *Alignment of information and technology strategies with the company's business processes to build an enterprise system.*
2. *Optimize the use of applications through rationalization, standardization, consolidation, and integration among existing applications.*
3. *Integration of information using the information architecture with a governance model according to the company's business needs.*
4. *Infrastructure and technology management that supports the agility, reliability, availability and security of it services.*

## TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## FINANCIAL REVIEW

*The financial review that will be described in this section refers to the Consolidated Financial Reports for the years which were ended on December 31, 2019 and on December 31, 2020. The Consolidated Financial Reports have been audited by RSM Indonesia Public Accounting Firm and received a fair opinion in all material matters, PT Prima Jasa Nasional Enjiniring's financial position on the December 31, 2020 as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date have been in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.*



## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

### Consolidated Financial Position Statements



**TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF FINANCIAL POSITION STATEMENT (IN MILLION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
<b>ASET</b> <i>ASSET</i>				
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	856,222	904,940	(48,718)	-5.38%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	226,180	345,219	(119,039)	-34.48%
<b>TOTAL ASET</b> <i>TOTAL ASSETS</i>	1,082,402	1,250,159	(167,757)	-13.42%
<b>LIABILITAS</b> <i>LIABILITY</i>				
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	268,642	334,367	(65,725)	-19.66%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	35,997	57,254	(21,257)	-37.13%
<b>TOTAL LIABILITAS</b> <i>TOTAL LIABILITY</i>	304,639	391,621	(86,982)	-22.21%
<b>TOTAL EKUITAS</b> <i>TOTAL EQUITY</i>	777,763	858,538	-80,775	-9.41%



## POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### • Aset

Jumlah Aset Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.082,40 miliar, mengalami penurunan sebesar 13,42% atau Rp 167,76 miliar dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp 1.250,16 miliar. Penurunan signifikan aset lancar antara lain berasal dari penurunan atas biaya dibayar dimuka dan tagihan bruto kepada pelanggan sebagai dampak dari perhitungan kembali PSAK 72 pada tahun 2022.

Perlu untuk diketahui bersama bahwa pada tahun 2021 terdapat penyajian kembali laporan keuangan dengan penerapan PSAK 38 sebagai dampak dari aksi korporasi share swap tahun 2022.

## CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

### • Assets

The Company's 2022 total assets amounted to IDR 1,082.40 billion, a decrease by 13.42% or IDR 167.76 billion compared to 2021, which was IDR 1,250.16 billion. The significant decrease in current assets stemmed from, among others, a decrease in prepaid costs and gross receivables to customers as a result of the recalculation of PSAK 72 in 2022.

It should be noted that in 2021 there was a financial restatement with the implementation of PSAK 38 as a result of the 2022 share swap corporate action.

**TABEL ASET LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Kas dan Setara Kas <i>Cash and cash equipment</i>	510,298	472,295	38,003	8.05%
Rekening bank yang dibatasi <i>Restricted bank account</i>	366	2,696	(2,330)	-86.42%
Piutang usaha <i>Accounts receivable</i>	101,226	79,039	22,187	28.07%
Piutang Lain lain <i>Other receivable</i>	23,879	13,842	10,037	72.51%
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	35,092	31,158	3,934	12.63%
Tagihan bruto kepada pelanggan <i>Gross bill to customers</i>	121,864	231,535	(109,671)	-47.37%
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	59,282	59,265	17	0.03%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka <i>Prepaid expenses and down payment</i>	4,215	15,110	(10,895)	-72.10%
Jumlah aset lancar <i>Total Current Assets</i>	856,222	904,940	(48,718)	-5.38%



• **Aset Lancar**

Jumlah Aset lancar perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp 856,22 miliar, mengalami penurunan sebesar 5,38% atau Rp 48,72 miliar dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp 904,94 miliar. Penurunan ini berasal dari biaya dibayar di muka dan tagihan bruto kepada pelanggan sebagai dampak dari perhitungan kembali atas penerapan PSAK 72.

**Current Assets**

The company's 2022 total current assets amounted to IDR 856.22 billion, decrease by 5.38% or IDR 48.72 billion from 2021, which was IDR 904.94 billion. This decrease comes from prepaid costs and gross bills to customers as a result of the recalculation of the PSAK 72 implementation.

**TABEL ASET TIDAK LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)**  
**TABLE OF NON - CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Rekening yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted cash in bank</i>	16,749	22,938	(6,189)	-26.98%
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	147,663	182,755	(35,092)	-19.20%
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama <i>Investment in association and joint venture</i>	12,373	11,764	609	5.18%
Aset Tetap <i>Fixed Asset</i>	11,247	20,899	(9,652)	-46.18%
Aset Lain - lain <i>Other Assets</i>	38,148	106,863	-68,715	-64.30%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total - Non Current Assets</i>	226,180	345,219	(119,039)	-34.48%

• **Aset Tidak Lancar**

Perusahaan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp 226,18 miliar pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 34,48% atau Rp 119,04 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 345,22 miliar. Penurunan pada asset tidak lancar didominasi oleh piutang sewa pembiayaan, akumulasi penyusutan pada aset tetap dan asset lainnya.

• **Non-Current Assets**

The Company posted total Non-Current Assets of IDR 226.18 billion in 2022, a decrease by 34.48% or IDR 119.04 billion when compared to 2021 which was recorded at IDR 345.22 billion. The decline in non-current assets was dominated by receivables, leases, financing, accumulated depreciation on fixed assets and other assets.



**TABEL LIABILITAS JANGKA PENDEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF SHORT - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Usaha <i>Account Payable</i>	57,108	76,393	(19,285)	-25.24%
Uang Muka dari Pelanggan <i>Advances From Costumer</i>	13,626	18,468	(4,842)	-26.22%
Utang Lain - lain <i>Other Payable</i>	5,851	15,465	-9,614	-62.17%
Utang bruto kepada pelanggan <i>Gross debt to customers</i>	80,740	108,706	(27,966)	-25.73%
Utang pajak <i>Tax payable</i>	37,489	19,209	18,280	95.16%
Biaya masih harus dibayar <i>Accured expenses</i>	45,933	61,107	-15,174	-24.83%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	1,692	502	1,190	237.01%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	2195.191	1617	578	35.76%
Pinjaman japan jatuh tempo dalam 1 tahun <i>Japan loan that matures in 1 year</i>	24,008	32,900	(8,892)	-27.03%
Jumlah liabilitas jangka pendek <i>Total Short Term Liabilities</i>	268,642	334,367	(65,725)	-19.66%

• **Liabilitas Jangka Pendek**

Perusahaan membukukan liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 268,64 miliar, menurun sebesar Rp 65,73 miliar atau 19,66% dari Rp 334,37 miliar tahun 2021. Penurunan yang signifikan adalah pada utang usaha hal ini disebabkan adanya pelunasan kewajiban pada pihak ketiga, penurunan atas uang muka dari pelanggan, perhitungan kembali atas penerapan PSAK 72 pada utang bruto dan penerapan PSAK 73 atas liabilitas sewa.

• **Short Term Liabilities**

The company booked short-term liabilities in 2022 of IDR 268.64 billion, a decrease by IDR 65.73 billion or 19.66% from IDR 334.37 billion in 2021. A significant decrease happened in the payable accounts, this due to the obligations repayment to third parties, a decrease from advances from customers, a recalculation in the application of PSAK 72 on gross debt and the application of PSAK 73 on lease liabilities.



**TABEL LIABILITAS JANGKA PANJANG (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF LONG - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Lain - lain <i>Other payable</i>	798	369	429	116.35%
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun <i>Long term loan after deducting by part of maturity due within one year</i>	-	23,119	(23,119)	-100.00%
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	35,199	32,052	3,147	9.82%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	-	1,714	-1,714	-100.00%
Jumlah liabilitas Jangka Panjang <i>Total Long Term Liabilities</i>	35,997	57,254	(21,257)	-37.13%

• **Liabilitas Jangka Panjang**

Pada tahun 2022, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp 35,98 miliar, mengalami penurunan sebesar 37,13% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 57,25 miliar. Penurunan tersebut didominasi oleh pelunasan atas pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

• **Long-Term Liabilities**

In 2022, the Company's Long-Term Liabilities were recorded at IDR 35.98 billion, a decrease by 37.13% compared to 2021, which was IDR 57.25 billion. The decline was dominated by the long-term loans repayment maturing in the current year.



**TABEL EKUITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF EQUITY (IN MILLION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Modal Saham <i>Capital Stock</i>	25,000	25,000	-	0.00%
Saldo Laba <i>Retain earning</i>				
Ditentukan penggunaanya <i>Determined to use</i>	5,169	5,169	-	0.00%
Tidak ditentukan penggunaanya <i>Unappropriated</i>	741,894	729,811	12,083	1.66%
Tambahan modal disetor <i>Additional paid-in capital</i>	3,652	-		
Penghasilan Komprehensif Lainnya <i>Other Comprehensive Income</i>	2,048	-1,089	3,137	-288.06%
Ekuitas merging entity <i>Equity merging entity</i>	-	99,632		
Kepentingan Non Pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	-	15	-15	-100.00%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	777,763	858,538	-80,775	-9.41%

• **Ekuitas**

Pada tahun 2022, Ekuitas Perusahaan menurun sebesar Rp 80,78 miliar atau 9,41% dari Rp 858,54 miliar menjadi Rp 777,76 miliar di 2022. Peningkatan Ekuitas ini sejalan dengan kenaikan Saldo Laba tahun 2022 yaitu sebesar Rp 8,99 miliar atau 12,17% dari tahun 2021.

• **Equity**

In 2022, the Company's Equity decreased by IDR 80.78 billion or 9.41% from IDR 858.54 billion to IDR 777.76 billion in 2022. This increase in Equity is in line with the increase in 2022 Retained Profit, which was IDR 8.99 billion or 12.17% from 2021.



## Laporan Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income

**TABEL LAPORAN LABA RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan <i>Income</i>	536,296	826,403	(290,107)	-35.10%
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(307,330)	(574,049)	266,719	-46.46%
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	228,966	252,354	(23,388)	-9.27%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(153,090)	(182,494)	29,404	-16.11%
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	75,876	69,860	6,016	8.61%
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	16,172	12,146	4,026	33.14%
Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	92,048	82,006	10,042	12.25%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(9,241)	(8,184)	(1,057)	12.92%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	82,807	73,822	8,985	12.17%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	3,227	(10,379)	13,606	-131.09%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	3,227	(10,379)	13,606	-131.09%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>	86,034	63,443	22,591	35.61%
Laba Per Saham (nilai penuh) <i>Earning per share (full amount)</i>	3,312	2,953	359	12.17%



- **Laba Bruto**

Laba Bruto Perusahaan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 228,97 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,27% dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp 252,35 miliar. Penurunan laba bruto tersebut disebabkan oleh penyajian kembali laporan keuangan tahun 2021 sebagai dampak dari penerapan PSAK 38 atas aksi korporasi share swap di tahun 2022.

- **Laba Sebelum Pajak**

Perusahaan mencatat Laba Sebelum Pajak pada tahun 2022 sebesar Rp 92,05 miliar mengalami peningkatan 12,25% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 10,04 miliar. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Beban Usaha dan Peningkatan pendapatan lainnya atas investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

- **Beban Pajak Penghasilan**

Beban Pajak Penghasilan Perusahaan tercatat mengalami peningkatan 12,92% dari tahun 2021 sebesar Rp 8,18 miliar menjadi Rp 9,24 miliar pada tahun 2022. Hal ini seiring dengan peningkatan persentase pendapatan non final perusahaan disertai efektifitas beban atas pendapatan non final dan penurunan beban bunga shl dari tahun 2021.

- **Laba Tahun Berjalan Dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

Pada tahun 2022, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif sebesar Rp 86,03 miliar dan Rp 63,44 miliar meningkat 35,61% dari tahun 2021.

- **Laba Bersih Per Saham**

Laba per saham di tahun 2022 tercatat sebesar Rp 3.312 meningkat sebesar 12,17% atau Rp 359 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 2.953.

- **Gross Profit**

*The Company's Gross Profit in 2022 was recorded at IDR 228.97 billion, a decrease by 9.27% compared to 2021, which was IDR 252.35 billion. The decline in gross profit caused by the restatement of the 2021 financial statements as a result of the PSAK 38 implementation on 2022 share swap corporate actions.*

- **Profit Before Tax**

*The company 2022 recorded Profit before Tax was IDR 92.05 billion, an increase by 12.25% compared to 2021, which was IDR 10.04 billion. This is due to the Operating Expenses efficiency and an increase in other investments income owned by the company.*

- **Income Tax Expense**

*Corporate Income Tax expense recorded an increase by 12.92% from 2021 of IDR 8.18 billion to IDR 9.24 billion in 2022. This is in line with the increase in the percentage of the company's non-final income accompanied by the effectiveness of expenses on non-final income and a decrease in shl interest expenses from 2021.*

- **Current Year Profit and Current Year Comprehensive Profit**

*In 2022, the Company posted Current Year Profit and Total Comprehensive Profit of IDR 86.03 billion and IDR 63.44 billion, an increase by 35.61% from 2021.*

- **Earnings per share**

*Earnings per share in 2022 were recorded at IDR 3,312, an increase by 12.17% or IDR 359 compared to 2021 which was IDR 2,953.*



## LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

### • Pendapatan

Pendapatan PLN Enjiniring di 2022 tercatat sebesar Rp 536,29 miliar, mengalami penurunan sebesar 35,10% atau Rp 290,11 miliar jika dibandingkan dengan 2021 yaitu sebesar Rp 826,40 miliar. Penurunan pendapatan tersebut merupakan dampak dari aksi korporasi share swap sehingga tidak ada kontribusi pada pendapatan EPC di PT PLN Enjiniring tahun 2022

## CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

### • Income

PLN Enjiniring's revenue in 2022 was recorded at IDR 536.29 billion, a decrease of 35.10% or IDR 290.11 billion when compared to 2021, which was IDR 826.40 billion. The decline in revenue is the impact of the share swap corporate action so that there is no contribution to EPC revenue at PT PLN Enjiniring in 2022.

### TABEL KONTRIBUSI PENDAPATAN JASA PERBIDANG (SEGMENT) (DALAM JUTAAN RUPIAH)

#### TABLE OF SERVICE REVENUE CONTRIBUTION PER SECTOR(SEGMENT) (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pembangkitan <i>Power Plant</i>	188,103	204,662	(16,559)	-8.09%
Konstruksi <i>Construction</i>	133,691	147,381	(13,690)	-9.29%
Transmisi & Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	135,697	60,282	75,415	125.10%
Operasional dan Perawatan <i>Operation and Maintenance</i>	-	-	-	0.00%
Kompresi GAS <i>Compression Nature Gas</i>	54,912	54,001	911	1.69%
Pendapatan Bunga Dari Sewa Pembiayaan <i>Interest income from finance lease receivables</i>	23,893	27,386	(3,493)	-12.75%
Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi <i>Engineering, Procurement and Construction</i>	0	332,691	(332,691)	-100.00%
Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i>	536,296	826,403	(290,107)	-35.10%

### • Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2022, Perusahaan mengalami penurunan beban jasa sebesar 47,32%. Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 307,33 miliar sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp 583,35 miliar. Penurunan beban pokok pendapatan salah satunya disebabkan oleh aksi korporasi share swap tahun 2023. Penurunan signifikan terdapat pada beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 69,98 miliar serta penurunan beban sub kontraktor sebesar Rp 189,98 miliar.

### • Cost of Revenue

In 2022, the Company experienced a decrease in service expenses by 47.32%. 2022 Cost of Revenue was recorded at IDR 307.33 billion, while in 2021 it was IDR 583.35 billion. One of the decreases in cost of revenue was due to the share swap corporate action in 2023. There was a significant decrease in salary and employee welfare expenses by IDR 69.98 billion and a decrease in sub-contractor expenses by IDR 189.98 billion.



**TABEL BEBAN JASA (DALAM JUTAAN RUPIAH)**  
**TABLE OF COMPANY SERVICE EXPENSE (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salary and welfare benefits</i>	117,936	178,620	(60,684)	-33.97%
Sub - Kontraktor <i>Sub - Contractor</i>	95,225	285,205	(189,980)	-66.61%
Peralanan Dinas dan Tansportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	21,607	16,676	4,931	29.57%
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	13,850	24,797	(10,947)	-44.15%
Penyusutan <i>Depreciation</i>	10,969	6,468	4,501	69.59%
Sewa <i>Rent</i>	8,488	15,086	(6,598)	-43.74%
Lain-lain <i>Other</i>	39,255	47,197	(7,942)	-16.83%
Jumlah Beban Jasa <i>Total Service Load</i>	307,330	574,049	(266,719)	-46.46%

**TABEL BEBAN USAHA (DALAM JUTAAN RUPIAH)**  
**TABLE OF OPERATING EXPENSE (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salary and employe benefit</i>	104,942	119,897	-14,955	-12.47%
Jasa tenaga kerja <i>Emloye services</i>			-	0.00%
Tunjangan pajak penghasilan karyawan <i>Employee income tax benefits</i>	11,985	11,411	575	5.03%
Alat keperluan kantor <i>Office suplies</i>	1,604	824	780	94.68%
Sewa <i>Rent</i>	1,741	2,004	(264)	-13.16%
Peralanan Dinas dan Tansportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	1,943	1,548	395	25.50%
Beban Imbal Kerja <i>Employee Benefit Expense</i>	7,702	7,144	558	7.81%
Telekomunikasi <i>Telecommunication</i>	2,189	1,535	654	42.58%
Konsultan <i>Consultant</i>	2,268	6,705	-4,437	-66.17%



Alat Tulis Kantor <i>Office stationary</i>	1,045	1,019	26	2.50%
Asuransi <i>Insurance</i>	-	-	-	0.00%
Konsumsi <i>Consumption</i>	500	334	166	49.66%
Pemeliharaan <i>Maintenance</i>	4,657	5,196	(539)	-10.38%
Srtifikasi dan Perjinaan <i>Certification and licensing</i>	177	31	146	469.55%
Iklan dan promosi <i>Ads and promotion</i>	179	182	(3)	-1.68%
Penyusutan <i>Depreciation</i>	4,567	6,213	(1,646)	-26.49%
Beban Kerugian Penurunan Piutang Usaha <i>Impairment Losses on Trade Receivables</i>	13	3,257	(3,244)	-99.60%
Lain-lain <i>Other</i>	7,579	15,193	(7,614)	-50.12%
Jumlah beban usaha <i>Total oprating expense</i>	153,090	182,494	(29,404)	-16.11%

#### • **Beban Usaha**

Pada tahun 2022, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 153,09 miliar, mengalami penurunan sebesar 11,61% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 173,19 miliar. Penurunan signifikan disebabkan oleh penurunan gaji dan kesejahteraan karyawan, biaya konsultan, biaya penyusutan dan penurunan beban lainnya. Penurunan tersebut merupakan dampak dari aksi korporasi share swap di tahun 2022.

#### • **Operating Expenses**

*In 2022, the Company posted IDR 153.09 billion on Operating Expenses, a decrease by 11.61% compared to 2021 of IDR 173.19 billion. The significant decrease was due to a decrease in salaries and employee welfare, consulting costs, depreciation costs and a decrease in other expenses. This decrease is the impact of 2022 share swap corporate actions.*



## Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih

### Net Financial Position And Others

#### POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH (DALAM JUTAAN RUPIAH)

#### NET FINANCIAL POSITION AND OTHER (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2022	2021	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Penghasilan bunga <i>Interest Income</i>	10,362	8,959	1,403	15.66%
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto <i>Gain (losses) on foreign exchangerates - net</i>	909	2,138	(1,229)	0.00%
Rugi atas investasi saham yang tidak tercatat <i>loss on stock investment not listed on the exchange</i>			0	0.00%
Beban bunga <i>Interest expense</i>	(5,212)	(9,090)	3,878	-42.66%
Lain-lain - neto <i>Other - net</i>	10,113	10,139	(26)	-0.26%
Jumlah pos keuangan dan lain-lain - neto <i>Number of financial post and other - net</i>	16,172	12,146	4,026	33.14%

#### • Pos Keuangan Dan Lain-Lain Bersih

Pada tahun 2022, Perusahaan mencatat Pos Keuangan dan Lain-lain sebesar Rp 16,17 miliar, mengalami kenaikan sebesar 33,14% dibanding tahun 2021 sebesar Rp 12,15 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas Perusahaan yang tercermin pada peningkatan penghasilan bunga deposito di tahun 2022.

#### • Laba Sebelum Pos Keuangan Dan Lain-Lain

Laba Sebelum Pos Keuangan dan lain-lain di 2022, tercatat sebesar Rp 75,88 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,61% atau Rp 6,02 miliar dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 69,86 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perolehan kontrak, capaian revenue dan penyelesaian kontrak terkendala disertai efisiensi biaya baik pada biaya pokok produksi maupun biaya usaha.

#### • Net Financial Position And Others

In 2022, the Company recorded Financial and Other Position of IDR 16.17 billion, increasing by 33.14% compared to 2021 of IDR 12.15 billion. The increase was mainly due to an increase in the Company's cash and cash equivalents as reflected in an increase in deposit interest income in 2022.

#### • Profit before financial position and others

Profit before Financial Post and others in 2022, was recorded at IDR 75.88 billion, an increase of 8.61% or IDR 6.02 billion compared to 2021, which was IDR 69.86 billion. This is due to an increase in contract acquisition, revenue achievement and contract settlement are constrained along with cost efficiency both in production and business costs.



## Laporan Arus Kas Konsolidasian

### Cash Flows Consolidated Statement

Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2022 sebesar Rp 38 miliar atau sebesar 8,05% disebabkan adanya peningkatan Arus Kas untuk Investasi sebesar Rp 66,21 miliar atau 29426,22% dibanding tahun 2021.

The increase in Net Cash and Cash Equivalents in 2022 amounted to IDR 38 billion or 8.05% due to an increase in Cash Flow for Investment of IDR 66.21 billion or 29426.22% compared to 2021.

#### TABEL ARUS KAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

##### TABLE OF CASH FLOW (IN MILION RUPIAH)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	115,181	115,482	(301)	-0.26%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2,385	(27,980)	30,365	-108.52%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(39,761)	(40,725)	964	-2.37%
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Increase in Net Cash and Cash Equivalents	38,003	87,647	(49,644)	-56.64%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Early Years	472,295	384,648	87,647	22.79%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Year and Cash Equivalents	510,298	472,295	38,003	8.05%

## LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

### • Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 76,19 miliar atau -48,41% hal ini disebabkan aksi korporasi share swap di tahun 2022. Adapun perolehan kas bersih dari aktivitas operasi sebagian besar berasal dari pelunasan piutang tahun lalu dan tahun berjalan 2022.

### • Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 66,43 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 66,21 miliar atau 29426,22% dibanding tahun 2021. Adapun hal tersebut disebabkan adanya penerimaan dividen atas investasi yang dimiliki perusahaan dan penerimaan kas atas selisih valuasi aksi korporasi shareswap.

## CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

### • Operating Activities Cash Flow

Net Cash Obtained from Operating Activities in 2022 decreased by IDR 76.19 billion or -48.41%, this was due to the corporate action of share swaps in 2022. The net cash from operating activities mostly came from the repayment of receivables last year and current year 2022.

### • Cash Flow for Investment Activities

Net Cash Used for Investment Activities in 2022 was recorded at IDR 66.43 billion, an increase of IDR 66.21 billion or 29426.22% compared to 2021. This was due to the receipt of dividends on investments owned by the company and cash receipts on the difference valuation of share swap corporate actions.



- **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 tercatat sebesar -Rp 109,63 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 56,64%. Adapun yang mempengaruhi adalah pelunasan SHL tahun berjalan dan pembayaran dividen tahun 2021 yaitu 100% dari laba tahun berjalan secara tunai.

- **Peningkatan/Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas**

Secara keseluruhan pada tahun 2022, terjadi peningkatan bersih Kas dan Setara Kas jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2022 sebesar Rp 38 miliar atau sebesar 8,05%.

- **Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun**

Besarnya Kas dan Setara Kas Akhir Tahun pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 510,29 miliar, meningkat Rp 38 miliar atau 8,05% dibanding tahun 2021.

- **Cash Flow from Funding Activities**

*Net cash used for funding activities in 2022 was recorded at -IDR 109.63 billion. Cash flow from funding activities decreased by 56.64%. The influence is the repayment of SHL for the current year and the payment of dividends in 2021, which is 100% of the current year's profit in cash.*

- **Net increase/decrease in cash and cash equivalents**

*Overall in 2022, there was a net increase in Cash and Cash Equivalents when compared to 2021. The net increase in Cash and Cash Equivalents in 2022 was IDR 38 billion or 8.05%.*

- **Year-end cash and cash equivalents**

*The amount of Year-End Cash and Cash Equivalents in 2022 was recorded at IDR 510.29 billion, an increase of IDR 38 billion or 8.05% compared to 2021.*



## Tingkat Kesehatan Perusahaan

### Corporate Health Level

Hasil pencapaian selama tahun berjalan tersebut kemudian dinilai berdasarkan Petunjuk Teknis KPI PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2021 yang mengacu kepada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0007.P/DIR/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi serta penggolongan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2021 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai "101,64" dengan rincian sebagai berikut:

The achievements results in year to date are assessed based on the 2021 PT Prima Jasa Nasional Enjiniring Technical KPI Guidelines which refers to PTPLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0007.P / DIR / 2022 dated February 23rd, 2022 concerning on Corporate Performance Management and Organizational Performance Appraisal as well as the health level assessments classification in accordance with the Decree of the State-Owned Enterprises Minister of the Republic Indonesia No. KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4th, 2002 concerning on the Assessment of the State-Owned Enterprises Minister Health Level and Regulation No. PER-11 / MBU / 11/2020 dated November 12th, 2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of SOE Directors. Based on this assessment, the Company's health level in 2021 is classified as "HEALTHY" in the "AAA" category with a value of "101.64" with the following details:

#### TABEL TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

##### TABLE OF COMPANY HEALTH LEVEL (IN MILLION RUPIAH)

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Value
1	Pelanggan Customer	8.00	7.70
2	Efektivitas Produk dan Proses Products effectivity and Process	32.00	33.50
3	Fokus Tenaga Kerja HR	12.00	12.20
4	Keuangan dan Pasar Finace and Markets	39.00	38.85
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasayarakatan Leadership, Governance and Community Responsibility	9.00	9.39
<b>TOTAL BOBOT TOTAL WEIGHT</b>		<b>100.00</b>	<b>101.64</b>



## Rasio Keuangan

### Financial Ratios

- **Kolektibilitas Piutang**

Umur Piutang (Collection Period) merupakan indikator dengan polaritas negatif yang pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan rata-rata saldo piutang usaha dengan jumlah pendapatan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari). Pada tahun 2022 tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 61 hari lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari.

Sedangkan pada tahun 2021, tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 52 hari, lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari.

- **Kemampuan Membayar Utang**

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.

- Rasio Kas menjelaskan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (asset yang paling likuid) yang dimiliki.
- Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva.

- **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 2021, diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang PLN Enjiniring di 2022 meningkat. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu dengan nilai 3,19.

- **Collectability of Receivables**

*Collection Period is a negative polarity indicator who's the smaller the realization achievement is better. The measurement is done by comparing the average accounts receivable balance with the amount of revenue multiplied by the number of days in a year (365 days). In 2022, the company's collectability of receivables was recorded at 61 days, higher than the target set at 30 days.*

*Meanwhile, in 2021, the company's receivable collectability was recorded at 52 days, longer than the target set at 30 days.*

- **Ability to Pay Debt**

*The ability to repay debt can be seen through liquidity ratios and solvency ratios. The liquidity ratio that shows the Company's ability to meet short-term liabilities, among others, can be measured through the cash ratio and current ratio.*

- *The Cash Ratio describes a company's ability to pay off its short-term liabilities through cash and cash equivalents (the most liquid assets) it owns.*
- *Current Ratio is a ratio used to see the company's ability to pay debts using assets.*

- **Liquidity Ratio**

*Compared to 2021, the 2022 liquidity ratio has been increased, measured using the Current Ratio. This shows that PLN Enjiniring's debt repayment ability in 2022 has increased. The liquidity ratio still shows in better conditions with a value of 3.19.*



### TABEL LIKUIDITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

#### TABLE OF LIQUIDITY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2022	2021
1	2	3
Rasio Kas (%) <i>Cash Ratio (%)</i>	1,90	1,45
Rasio Lancar (%) <i>Current Ratio (%)</i>	3,19	2,68

- **Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban- kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

- **Solvency Ratio**

*The solvency ratio that shows the Company's ability to pay its liabilities, among others, can be measured through the ratio of liabilities to equity, which is calculated by comparing the number of liabilities with the amount of equity, and the ratio of liabilities to assets, which is calculated by comparing the number of liabilities with the assets number.*

### TABEL SOLVABILITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

#### TABLE OF SOLVENCY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2022	2021
1	2	3
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas <i>Ratio of Liabilities to Equity</i>	0,39	0,48
Rasio Liabilitas Terhadap Aset <i>Ratio of Liabilities to Assets</i>	0,28	0,33

Rasio solvabilitas Perusahaan mengalami penurunan, baik untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun rasio liabilitas terhadap aset. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN Enjiniring dalam membayar kewajiban-kewajiban masih tergolong cukup baik dengan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 0,28 di tahun 2022.

*The Company's solvency ratio has decreased, both for the liabilities ratio to equity and liabilities ratio to assets. This shows that PLN Enjiniring's ability to pay liabilities is still quite good with a liability to asset ratio of 0.28 in 2022.*



## Struktur Modal

### Capital Structure

- Rincian Struktur Modal**

Komposisi struktur modal pada tahun 2022 yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Berasal dari Liabilitas sebesar 28,14% dan ekuitas sebesar 71,86%, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2021, dengan komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas sebesar 31,33% dan Ekuitas sebesar 68,67%.

- Capital Structure Details**

The 2022 capital structure composition that owned by the Company consists of equity and liabilities. Derived from 28.14% Liabilities and 71.86%, Equity, this composition has changed compared to 2021, with the capital structure composition derived from 31.33% Liabilities and 68.67% Equity.

**TABEL STRUKTUR MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF CAPITAL STRUCTURE (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	2022	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	2021	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
1	2	3	4	5	6=(2-4)/4
Liabilitas <i>Liabilities</i>	304,639	21.96%	416,320	24.62%	-26.83%
- Jangka Pendek <i>Short - Term</i>	268,642	19.37%	334,367	19.77%	-19.66%
- Jangka Panjang <i>Long - Term</i>	35,997	2.60%	81,953	4.85%	-56.08%
Ekuitas <i>Equity</i>	777,763	56.07%	858,538	50.77%	-9.41%
Total Modal yang Diinvestasikan <i>Total Capital Invested</i>	1,387,041	100.00%	1,691,178	100.00%	-17.98%

- Kebijakan Struktur Modal**

Perusahaan memiliki kebijakan menggunakan ekuitas sebagai sumber modalnya. Pada tahun 2022, rasio ekuitas terhadap liabilitas sebesar 39%.

- Capital Structure Policy**

The company has a policy of using equity as its source of capital. In 2022, the equity to liability ratio was 39%.

- Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal**

Selama tahun 2022, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

- Material Bonding for Capital Goods Investment**

During 2022, the Company has no material ties for capital goods investments.

- Investasi Barang Modal**

Selama tahun 2022, Perusahaan melakukan penambahan barang modal untuk Aset Tetap dan Properti Investasi sebagai berikut.

- Capital Goods Investment**

During 2022, the Company made additional Fixed Assets and Investment Properties capital goods as follows.



**TABEL INVESTASI BARANG MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)**

**TABLE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT (IN MILION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	Nilai Investasi <i>Investment Value</i>	Tujuan Investasi <i>Investment Objective</i>
1	2	3
Tanah <i>Soil</i>	-	Ekspansi/Pengembangan usaha <i>Expansion/Business Development</i>
Perabotan dan Peralatan <i>Furniture and equipment</i>	0.17	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
Perlengkapan Kantor <i>Office supplies</i>	-	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
<b>Jumlah</b> <i>Amount</i>	<b>0.17</b>	



## Perbandingan Target dan Realisasi

### Targets and Realization Comparison

Pencapaian target PLN Enjiniring pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi posisi keuangan, jumlah aset tercapai 101,01%, jumlah liabilitas tercapai 94,46%, dan jumlah ekuitas perusahaan tercapai 103,82% dari target yang telah dianggarkan pada RKAP tahun 2022.

Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, realisasi pendapatan mencapai 124,33% atau sebesar Rp 536,29 miliar dari RKAP tahun 2022 yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 431,33 miliar. Beban Operasi pada triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp 460,42 miliar atau sebesar 114% dibandingkan anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp 405,31 miliar. Realisasi laba rugi operasi pada triwulan IV tahun 2021 tercapai sebesar Rp 75,88 miliar atau mencapai 291,57% dari RKAP tahun 2022 yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 26,02 miliar. Realisasi laba tahun berjalan pada triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp 82,81 miliar atau tercapai 316,53% dari RKAP tahun 2022 yaitu sebesar Rp 26,16 miliar. Sedangkan untuk realisasi kas dan setara kas akhir tahun pada Laporan Arus Kas tercatat sebesar Rp 510,29 miliar atau mencapai 147,76% dari RKAP yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp 345,35 miliar.

The PLN Enjiniring's target achievement in 2022 shows varying results. In terms of financial position, total assets reached is 101.01%, total liabilities reached 94.46%, and total company equity reached 103.82% of the 2022 RKAP budgeted target.

In terms of Income Statement and other Comprehensive Income, revenue realization reached 124.33% or IDR 536.29 billion from the 2022 RKAP target of IDR 431.33 billion. Operating expenses in 2022 fourth quarter reached IDR 460.42 billion or 114% compared to the 2022 budget of IDR 405.31 billion. The realization of operating profit and loss in the 2021 fourth quarter reached IDR 75.88 billion or reached 291.57% of the targeted RKAP in 2022 of IDR 26.02 billion. The realization of profit for the year in the fourth quarter of 2022 was IDR 82.81 billion or reached 316.53% of the RKAP in 2022, which was IDR 26.16 billion. Meanwhile, the realization of cash and cash equivalents at the end of the year Cash Flow Statement was recorded at IDR 510.29 billion or reached 147.76% of the budgeted RKAP of IDR 345.35 billion.

**TABEL REALISASI DAN TARGET 2022 (DALAM JUTAAN RUPIAH)**  
**TABLE OF 2020 REALIZATION AND TARGET (IN MILLION RUPIAH)**

Uraian <i>Description</i>	Realisasi 2022 <i>Realization 2022</i>	RKAP 2022	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>
1			4=(2/3)
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> <i>FINANCIAL POSITION REPORT</i>			
<b>ASET</b> <i>ASSET</i>			
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	856,222	832,036	102.91%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	226,180	239,594	94.40%
<b>TOTAL ASET</b> <i>TOTAL ASSETS</i>	<b>1,082,402</b>	<b>1,071,630</b>	<b>101.01%</b>
<b>LIABILITAS</b> <i>LIABILITY</i>			
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	268,642	299,558	89.68%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	35,997	22,939	156.93%



TOTAL LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITY</i>	304,639	322,497	94.46%
TOTAL EKUITAS <i>TOTAL EQUITY</i>	777,763	749,133	103.82%
<b>Laba Rugi dan Penghasilan Lainnya</b> <i>Income Statement and Other Comprehensive Income</i>			
Pendapatan <i>Income</i>	536,296	431,334	124.33%
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(307,330)	(250,012)	122.93%
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	228,966	181,321	126.28%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(153,090)	(155,298)	98.58%
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	75,876	26,023	291.57%
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	16,172	2,530	639.32%
Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	92,048	28,553	322.38%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(9,241)	(2,392)	386.33%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	82,807	26,161	316.53%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	2,716	1,672	162.39%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	3,227	885	364.43%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>	86,034	27,046	318.10%
<b>Laporan Arus Kas</b> <i>Cash Flow Statement</i>			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	115,181	1,982	5811.48%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i>	2,385	67,824	3.52%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(39,761)	(32,011)	124.21%
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas <i>Increase in Net Cash and Cash Equivalents</i>	77,805	37,795	205.86%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents Early Years</i>	472,295	307,551	153.57%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Year and Cash Equivalents</i>	550,100	345,347	159.29%



## Proyeksi Tahun 2022

### 2022 Projections

Proyeksi keuangan pada tahun 2022 didasarkan pada asumsi nilai Kurs 1 US \$ sama dengan Rp15.731,- berdasarkan asumsi tersebut, Perusahaan memproyeksikan jumlah aset pada tahun 2022 sebesar Rp 1.071,63 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp 322,49 miliar, dan jumlah ekuitas diproyeksikan sebesar Rp 749,13 miliar. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Pada tahun 2022 Perusahaan memproyeksikan pendapatan operasi sebesar Rp 431,33 miliar dan Biaya Operasi sebesar Rp 405,31 miliar. Terkait Laba Rugi Operasi, Perusahaan memproyeksikan pendapatan laba operasi sebesar Rp 26,16 miliar. Laba Bersih tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan diproyeksikan mencapai Rp 27,83 miliar. Dari sisi Laporan Arus Kas, Perusahaan memproyeksikan kas dan setara kas pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 345,35 miliar.

*The financial projection in 2022 is based on the assumption that the exchange rate of 1 US \$ is equal to IDR 15,731, - based on these assumptions, the Company projects total assets in 2022 of IDR 1,071.63 billion, IDR 322.49 billion total liabilities, and total equity is estimated at IDR 749.13 billion. In terms of Income Statement and Other Comprehensive Income, in 2022 the Company projects operating income is IDR 431.33 billion and IDR 405.31 billion in Operating Expenses. Regarding Operating Profit and Loss, the Company projects operating profit revenue of IDR 26.16 billion. Net Profit for the current year and comprehensive profit for year to date are projected to reach IDR 27.83 billion. In terms of the Cash Flow Statement, the Company project in that the cash and cash equivalents at the end of 2022 of IDR 345.35 billion.*

### INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2022, Perseroan tidak menerima informasi material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

### MATERIAL INFORMATION THAT OCCURS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S STATEMENT

*During 2022, the Company did not receive any material information that occurred after the date of the accountant's report.*

### KEBIJAKAN DEVIDEN

Atas saldo laba tahun 2021, Perseroan tidak menerima informasi terkait pembagian Dividen.

### DIVIDEND POLICY

*For the balance of profit in 2021, the Company did not receive information regarding the distribution of dividends.*

### PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Perusahaan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP), hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

### MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES SHARE OWNERSHIP PROGRAM

*The Company does not implement a share ownership program by management and/or employees (ESOP/MSOP), this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.*



## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perusahaan tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

## REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

*The company has no record of the realization of the use of funds from the public offering, this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.*



## Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal

*Material information regarding Investments, Expansions, Divestitures, Mergers, Acquisitions or Debt/Capital restructurings*

### ■ Investasi

Pada tahun 2022, Perseroan telah menjelaskan investasi sebagai berikut:

1. PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, dimana merupakan perusahaan afiliasi PLN Enjiniring dengan kepemilikan saham sebesar 49% telah menyelesaikan pembangunan pabrik switchgear di kawasan industri modern Cikande, Banten pada tanggal 20 Agustus 2018.
2. CNG Plant Bangkanai, dimana merupakan unit bisnis PLN Enjiniring dengan ruang lingkup sebagai aset owner dan aset operator.

### ■ Ekspansi

Selama 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Ekspansi.

### ■ Divestasi

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Divestasi.

### ■ Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan penggabungan/ peleburan usaha.

### ■ Akuisisi

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan akuisisi perusahaan.

### ■ Investment

*In 2022, the Company has explained the investment as follows:*

1. *PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, which is an affiliated company of PLN Enjiniring with 49% share ownership has completed the construction of a switchgear factory in the modern industrial area of Cikande, Banten on August 20th, 2018.*
2. *CNG Plant Bangkanai, which is a one of PLN Enjiniring business unit with a scope as an asset owner and asset operator.*

### ■ Expansion

*During 2022, the Company has no information or no activities related to the Expansion.*

### ■ Divestitures

*During 2022, the Company has no information or no activities related to the Divestment.*

### ■ Business Merger

*Throughout 2022, the Company has no information or no activities related to business mergers/mergers.*

### ■ Acquisition

*During 2022, the Company has no information or no activities related to the acquisition of the company.*



### ■ Restrukturisasi Utang Dan/Atau Restrukturisasi Modal

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Restrukturisasi utang atau/Modal.

### ■ Debt Restructuring and/or Capital Restructuring

*During 2022, the Company has no information or no activities related to debt or / capital restructuring.*



## Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

### *Transaction Information Material Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Related Parties*

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

*The Company implements PSAK No. 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties". This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances of related parties, including commitments, in financial statements.*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

*The Company conducts transactions with related parties under the same terms and conditions as those applicable to third parties.*

Perusahaan tidak memiliki alasan khusus terkait pemberian transaksi dengan pihak berelasi. Pemberian transaksi kepada pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang sama terhadap transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

*The Company has no specific reasons related to providing transactions with related parties. The transactions provision to related parties is carried out reasonably in accordance with applicable provisions with the same purpose for transactions with other third parties.*

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan sebagai berikut.

*Significant transactions with related parties are disclosed as follows.*

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

*The nature of the relationship with related parties*

- a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- c. PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

- a. *The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and State-Owned Enterprises (SOEs).*
- b. *PLN and the Education and Welfare Foundation are the shareholders of the Company.*
- c. *PT Indonesia Power (IP), PT Jasa Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas and Geothermal (PLN Gas and Geothermal), PT Haleyora Power (HP), and PT Indonesia Comnets Plus (ICON) are companies whose shareholders are the same as the Company's major shareholders and or some of their management are the same as the Company.*
- d. *The Board of Commissioners and Board of Directors are the company key management personnel.*



## TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Group :

## RELATED PARTY TRANSACTIONS

*The following is a list of related parties that have transactions with the Group:*



## TABEL TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Uraian <i>Description</i>	2022		2021	
	Rp	%	Rp	%
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash equivalents</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	205,180	18.96%	226,299	18.10%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	-	0.00%	30,332	2.43%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	296,200	27.37%	206,217	16.50%
PT BSI	5,000	0.46%	5,000	0.40%
<b>Sub - Jumlah</b>	<b>506,380</b>		<b>467,848</b>	
<b>Sub - Total</b>				
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted account</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	366	0.03%	-	0.00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-		8,886	0.71%
Piutang usaha neto <i>Account receivable - net</i>				
PT PLN (Persero)	91,852	8.49%	65,269	5.22%
PT PLN Nusantara Power	4,003	0.37%	684	0.05%
PT PLN Indonesia Power	706	0.07%	402	0.03%
PT Crompton Prima Switchgear	-	-	16,219	1.30%
PT Indonesia Comnet Plus	-	-	8,464	0.68%
Lain-Lain	867	0.08%	724	0
<b>Sub - Jumlah</b>	<b>97,428</b>		<b>91,038</b>	
<b>Sub - Total</b>				
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>				
PT Crompton Prima Switchgear	22,248	2.06%	21,870	1.75%
PT PLN (Persero)	12,905	1.19%	8,624	0.69%
PT PLN Nusantara Power	8,455	0.78%	-	0.00%
Lain-Lain	482	0.04%	156	0.01%
<b>Sub - Jumlah</b>	<b>44,090</b>		<b>30,650</b>	
<b>Sub - Total</b>				
Aset Kontrak <i>Gross bill to customers</i>				
PT PLN (Persero)	94,272	8.71%	193,783	15.50%
PT Nusantara Power	14,818	1.37%	8,584	0.69%
PT PLN Batam	-	-	-	0.02%
PT Wijaya Karya (Persero)	-	-	-	0.01%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	0.00%
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	-	174	0.01%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	-	347	0.03%
PT Indonesia Comnet Plus	-	0.00%	-	0.00%
Lain-Lain	3,393	0.31%	6,291	0.50%
<b>Sub - Jumlah</b>	<b>112,483</b>		<b>202,888</b>	



#### Sub - Total

Uang muka dari pelanggan

*Advances from Customer*

PT PLN (Persero)	13,626	4.47%	18,468	4.72%
------------------	--------	-------	--------	-------

Utang Lain-lain

*Other Liabilities*

PT PLN (Persero)	1,025	3.17%	2,370	0.48%
PT Haleyora Power	3,033	0.45%	2,630	0.53%
PT PLN Indonesia Comnet Plus	1,776	0.46%	390	0.08%
Lain`	17			

**Sub - Jumlah** **5,851** **5,390**

#### Sub - Total

Liabilitas Kontrak

*Gross liabilities to customers*

PT PLN (Persero)	73,883	26.20%	98,608	25.18%
PT PLN Indonesia Power	4,326	1.42%	5,637	1.44%
PT PLN Gas Geothermal	-	0.00%	-	0.03%
PT Crompton Prima Switchgear	-	0.32%	-	0.00%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	0.00%	-	0.07%
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	0.00%	-	0.04%
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	-	0.00%	-	0.03%
Lain-Lain	361	0.12%	2,099	0.54%

**Sub - Jumlah** **78,570** **106,344**

#### Sub - Total

Pinjaman jangka panjang

*Long term loan*

PT PLN (Persero)	24,008	7.88%	56,019	14.30%
------------------	--------	-------	--------	--------

Pendapatan jasa konsultasi pihak berelasi

*Revenue from consulting service to related parties*

Piutang Sewa Pembiayaan

PT PLN (Persero)	443,738	82.74%	586,815	71.01%
------------------	---------	--------	---------	--------

Pendapatan

PT PLN (Persero)	443,738	82.74%	586,815	71.01%
PT PLN Nusantara Power	53,959	10.06%	61,322	7.42%
PT PLN Indonesia Power	7,862	1.47%	11,829	1.43%
PT Geo Dipa Energi	-	0.00%	22,201	2.69%
PT PLN Indonesia Comnet Plus	-	0.00%	16,747	2.03%
Lain-Lain	4,470	0.83%	17,062	2.06%

**Sub - Jumlah** **510,029** **715,976**

#### Sub - Total

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp 16.13 miliar dan Rp. 16.98 miliar. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mereview setiap transaksi dengan pihak berelasi agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang terkait.

*On December 31st, 2022 and 2021, the Company compensated the Company's Commissioners and Directors in the form of salaries, facilities, allowances and dividend bonuses of IDR 16.13 billion and IDR 16.98 billion, respectively. The Company has a policy to review every transaction with related parties so as not to violate the relevant rules and regulations.*



## Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

### *Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company*

Selama Tahun 2022, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

*During 2022, the Company has no information nor activities related to changes in laws and regulations that have a significant effect on the financial statements.*

## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"

- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi" – Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau tidak lancar"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Penggunaan yang Diintensifkan"

## CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

- a. *The application of the new standards, interpretation, amendments and annual adjustments to accounting standards, effective in January 1st, 2022, does not cause significant changes to the Group's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements in the current year:*

*Amendment to PSAK No. 22, "Business Combination - Business Definition"*

- *PSAK Amendment No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets" – Cost of Fulfilling Contracts"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 69, "Agriculture"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 71, "Financial Instruments"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 73, "Rent"*

*The new standards, annual amendments and adjustments that have been published, but are not yet effective for the financial year beginning on January 1st, 2022 are as follows:*

- *Revision of PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"*
- *PSAK Amendment No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Current or Non-Current Liabilities"*
- *PSAK Amendment No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policy"*
- *PSAK Amendment No. 16, "Fixed Assets - Results of Intensified Use"*



- Amendemen PSAK No. 22, "Bisnis Kombinasi Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Kewajiban yang Timbul dari Satu Transaksi"
- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"
- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Pengesahan amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

Standar baru, amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amendemen PSAK No. 1, Amendemen PSAK No. 16, Amendemen PSAK No. 25, Amendemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

- *PSAK Amendment No. 22, "Business Combination References to the of Financial Reporting Conceptual Framework"*
- *PSAK Amendment No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Accounting Estimates Definition"*
- *PSAK Amendment No. 46, "Income Tax - Deferred Tax on Assets and Liabilities Occurs from a Single Transaction"*
- *PSAK Amendment No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets of Burdensome Contracts - Cost of Fulfilling Contracts"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 69, "Agriculture"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 71, "Financial Instruments"*
- *Annual adjustment of PSAK No. 73, "Rent"*
- *PSAK No. 74, "Insurance Contract"*
- *PSAK Amendment Ratification No. 74, "Insurance Contract on PSAK No. 74 and PSAK No. 71 Early Application - Comparative Information"*

*The above new standards, amendments, revisions and annual adjustments are effective from January 1st, 2022, except PSAK Amendment No. 1, PSAK Amendment No. 16, PSAK Amendment No. 25, PSAK Amendment No. 46, and PSAK Revision No. 107 which are effective from January 1st, 2023 and PSAK No. 74 which are effective from January 1st, 2025, but early application is allowed.*









# Sumber Daya Manusia

*Human Resources*







"Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan"



## Sumber Daya Manusia

### Human Resources

Bagian SDM pada PLN Enjiniring terdiri dari sub bagian Pengembangan Organisasi dan Kinerja SDM, Administrasi dan Kesejahteraan SDM, dan Pengembangan SDM, sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 20.001.K/DIR/PLNE/VIII/2018 tentang Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja Tahun 2018 PT PLN Enjiniring. Keputusan Direksi tersebut menunjukkan bahwa dimana secara tidak langsung fungsi dari bagian SDM PLN Enjiniring tidak sekedar sebagai fungsi administratif ataupun supporting, melainkan mempunyai fungsi yang lebih besar yaitu peningkatan produktifitas, kapabilitas serta meningkatkan nilai dan keunggulan organisasi untuk menghadapi dinamika tantangan bisnis global.

Aktivitas Bagian SDM yang menunjang kinerja perusahaan dalam setiap tahun tertuang dalam Kontrak Manajemen, dimana *Key Performance Indicator* (KPI) untuk perspektif tenaga kerja adalah kesiapan sumber daya manusia (*Human Capital Readiness – HCR*) dan kesiapan organisasi (*Organizational Capital Readiness – OCR*). Pada tahun 2021, KPI Rasio Enjinir *Subletting*, yang sebelumnya masuk dalam Perspektif Tenaga Kerja, dipindahkan menjadi masuk dalam Perspektif Efektifitas Produk dan Proses. Selain dua aktivitas penunjang KPI Perusahaan tersebut, Bagian SDM PLN Enjiniring tetap melaksanakan fungsi SDM sebagaimana mestinya, yang juga dikenal dengan sebutan “Tujuh Pilar SDM”, yaitu :

1. pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
2. rekrutmen dan seleksi,
3. pembinaan kompetensi dan karir,
4. pengelolaan pembelajaran,
5. pengelolaan manajemen kinerja (*performance appraisal*),
6. pengelolaan kompensasi dan manfaat, dan
7. pengelolaan hubungan industrial.

*The HR section of PLN Enjiniring consists of sub-sections of Organizational and HR Performance Development, HR Administration and Welfare, and HR Development, in accordance with Decree of the Board of Directors No. 20.001.K / DIR / PLNE / VIII / 2018 regarding Position Formation and Workforce Formation. The Board of Directors decision shows that indirectly the function of the PLN Enjiniring Section is not just as personnel, but also has a function as for the development of human resources and organizations.*

*The HR Department activities that support the company's performance every year are contained in the Management Contract, where the Key Performance Indicator (KPI) for the workforce perspective is the Human Capital Readiness 'HCR' and Organizational Capital Readiness 'OCR'. In 2021, the Subletting Engineering Ratio KPI, which was previously included in the Labor Perspective, was transferred to the Product and Process Effectiveness Perspective. In addition to the two supporting activities of the Company's KPI, the Human Resources Department PLN Enjiniring continues to carry out the HR function as it should, also known as the “Seven Pillars of HR”, namely:*

1. *organizational development and workforce planning,*
2. *recruitment and selection,*
3. *competency and career development,*
4. *learning management,*
5. *performance management (performance appraisal),*
6. *compensation and benefit management, and*
7. *industrial relations management.*



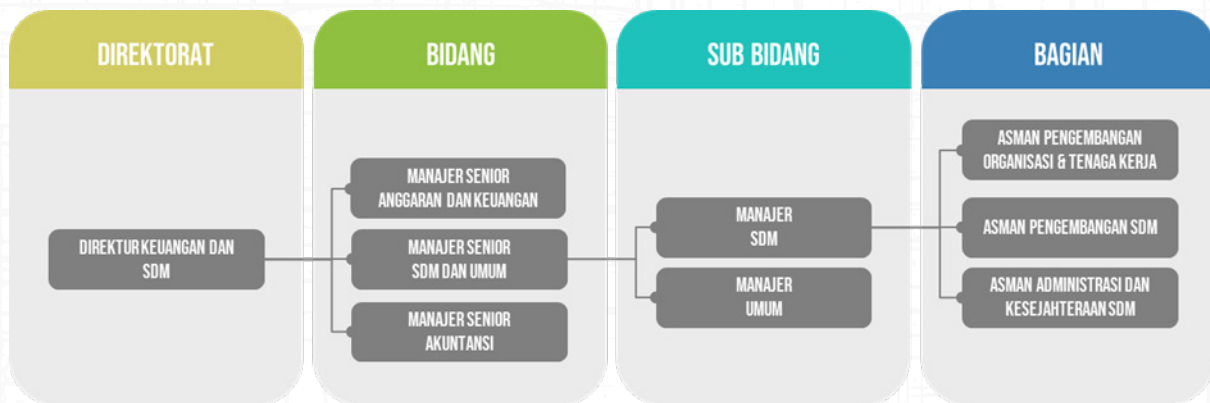
## ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

PLN Enjiniring menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja PLN Enjiniring. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan kompetitif. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin global saat ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk terus melakukan program pengembangan karyawan secara intensif guna mencetak insan PLN Enjiniring yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan dan sertifikasi serta program pengembangan lainnya. Pengelolaan SDM PLN Enjiniring berada di bawah tanggung jawab Direktorat Keuangan dan SDM dan dijalankan oleh Bidang SDM dan Umum yang dipimpin oleh Manajer Senior SDM dan Umum. Struktur organisasi pengelola SDM adalah sebagai berikut.

## HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION

PLN Enjiniring is aware that human resources are an important element that supporting PLN Enjiniring's productivity performance. The increasingly fierce competition in the business world requires humans to always develop for the better and competitive. To answer the challenges of the increasingly global era today, PLN Enjiniring committed to continuing to conduct intensive employee development programs in order to produce PLN Enjiniring people who are reliable and competent in the business world. This commitment demonstrated by involving employees in various training and certifications and other development programs. The management of human resources PLN Enjiniring is under the responsibility of the Directorate of Finance and HR and is carried out by the HR and General Affairs Division which is led by the Senior HR and General Managers. The organizational structure of the HR manager is as follows.

### Struktur Organisasi Pengelola SDM HR Management Organizational Structure





## Profil Vice President Sdm Dan Umum

### Vice President Of Hr And General Profile

#### ■ Fransiska Widyastuti

##### PLT Vice President SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2003. PLT Vice President SDM dan Umum sejak tahun 2021, sebelumnya menjabat sebagai PH Manajer Senior SDM dan Umum pada PT PLN Enjiniring.

#### FUNGSI DAN RUANG LINGKUP TUGAS BIDANG SDM & UMUM

Pada Bidang SDM & Umum terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian SDM, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
  - Pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
  - Rekrutmen dan seleksi,
  - Pembinaan kompetensi dan karir,
  - Pengelolaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan),
  - Pengelolaan manajemen kinerja,
  - Pengelolaan kompensasi dan manfaat,
  - Pengelolaan hubungan industrial,
2. Bagian Umum, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
  - Rumah tangga kantor
  - Manajemen gedung dan aset
  - Pengelolaan keamanan dan kebersihan kantor
  - Pengelolaan kendaraan dan fasilitas dinas
  - Pengelolaan perjalanan dinas

#### ■ Fransiska Widyastuti

##### PLT Vice President of HR and General

Indonesian citizen, 44 years old. Completed S1 Accounting from the University of Indonesia Depok in 2003. PLT Vice President of Human Resources and General Affairs since 2021, previously served as PH Senior Manager of Human Resources and General at PT PLN Enjiniring.

#### FUNCTIONS AND SCOPE OF DUTY IN THE SECTOR OF HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS

In the field of HR & General there are two parts, namely:

1. HR, has the following functions and scope
  - Organizational development and workforce planning,
  - Recruitment and selection,
  - Competency and career development,
  - Management of learning (education and training),
  - Management of performance management,
  - Management of compensation and benefits,
  - Management of Industrial Relations,
2. General Section, has the following functions and scope
  - Office household
  - Management of building and asset
  - Management of office security and cleanliness
  - Management of vehicles and service facilities
  - Management of official travel



## KEBIJAKAN REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, PLN Enjiniring membutuhkan peningkatan SDM dalam hal kualitas maupun kuantitas. Rekrutmen yang dilakukan terutama untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan. Rekrutmen dilakukan dengan pertimbangan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan penguatan kompetensi bisnis Perusahaan serta peningkatan target kinerja dan pendapatan. Keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian menjadi kriteria dalam melakukan seleksi calon pegawai PLN Enjiniring.

Terhitung mulai tahun 2018, rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring dilakukan melalui rekrutmen terpusat dalam lingkup PLN Grup. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui rekrutmen terbuka untuk umum, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan rekrutmen dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. PLN Enjiniring menghitung jumlah kebutuhan tambahan tenaga kerja sekaligus klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja, kemudian diserahkan kepada Bagian Rekrutmen PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang bertindak sebagai pelaksana rekrutmen. Sedangkan untuk proses rekrutmen karyawan *outsourcing* dan karyawan PKWT dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek.

Dalam proses rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui oleh para pelamar, yaitu (1) Seleksi administrasi, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris, (3) *General Aptitude Test* (GAT), (4) Psikotes, (5) Wawancara, dan (6) Tes Kesehatan.

Calon pegawai yang telah lulus melewati seluruh tahapan seleksi tersebut wajib mengikuti program pra-jabatan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan bimbingan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan pengenalan perusahaan, dan *on-the-job training* (OJT) dalam bentuk terjun langsung ke dalam pekerjaan di lingkungan PLN Enjiniring. Setelah selesai mengikuti program pra-jabatan dan dinyatakan lulus Uji Akhir, calon pegawai diangkat

## HUMAN RESOURCES RECRUITMENT POLICY

*Along with the company's business development, PLN Enjiniring requires an increase in human resources in terms of quality and quantity. Recruitment carried out primarily to fill in the position formation and workforce formation based on the decision of the Company's Board of Directors. Recruitment carried out with consideration of the analysis results of workforce needs based on strengthening the Company business competencies and increasing performance and revenue targets. The diversity of educational backgrounds, experiences, and expertise become the criteria in selecting the candidates for PLN Enjiniring.*

*Starting from 2018, the recruitment of prospective PLN Enjiniring employees carried out through a centralized recruitment within the scope of the PLN Group. The recruitment carried out by PT PLN (Persero) through open recruitment to the public, by opening up the broadest recruitment opportunities by not distinguishing ethnicity, religion, race, and between groups. PLN Enjiniring calculates the number of additional workforce needs as well as the classification of workforce needed to fill workforce formation, then submitted to the Recruitment Section of PT PLN (Persero) Head Office which acts as a recruitment executor. Whereas the recruitment process for outsourced employees and PKWT employees carried out based on project needs.*

*In the recruitment process of prospective PLN Enjiniring employees, there are a number of stages that must be passed by the applicants, namely (1) Administration selection, (2) Academic Potential Test (TPA) and English Test, (3) General Aptitude Test (GAT), (4) Psychology test, (5) Interview, and (6) Health Test.*

*Prospective employees who have passed all stages of the selection are required to take a pre-service program consisting of education and training in physical and mental guidance, education and company introduction training, and on-the-job training (OJT) in the form of working directly into employment within the environment of PLN Enjiniring. After completing the pre-service program, prospective employees*



menjadi Pegawai terhitung sejak tanggal selesai masa OJT dan/atau terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai melalui Keputusan Direksi. Terhitung sejak tahun 2020, PLN Enjiniring tidak melakukan rekrutmen pegawai Organik sesuai dengan arahan PLN selaku pemegang saham. Sehingga, dalam upaya memenuhi formasi tenaga kerja pegawai Organik, sepanjang tahun 2022 PLN Enjiniring mendapatkan tambahan pegawai Tugas Karya dari PLN sejumlah 3 orang pada semester I dan 3 orang pada semester II tahun 2022, serta 16 orang organik yang ditarik kembali dari masa Tugas Karya pada semester II tahun 2022.

*appointed as Employees from the date of completion of the OJT period and / or the issuance of a Decision Letter on Appointment of Employees through a Decree of the Board of Directors. Since 2020, PLN Enjiniring has not recruiting organic employees uniformly with PLN's instruction as a shareholder. Thus, in an effort to fulfill the organic employee workforce formation, throughout 2022 PLN Enjiniring will receive additional Work Task employees from PLN totaling 3 people in the first semester and 3 people in the second semester of 2022, as well as 16 organic people who were recalled from the Work Task period in semester II of 2022.*

## **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **PROGRAM PENGEMBANGAN SDM**

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnis PLN Enjiniring. Salah satu media pengembangan kompetensi SDM adalah melalui pemberdayaan program pelatihan, sertifikasi, dan penugasan. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pengembangan tersebut.

Program pengembangan didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen. Selain itu, program pengembangan bagi tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan sikap dalam menghadapi setiap pekerjaan atau penugasan.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2022, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 183 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 590 orang, serta 37 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 124 orang terdiri dari Anggota Dewan Direksi, dan Pegawai. Sementara Anggota Dewan Direksi tidak melaksanakan program capacity building dikarenakan tidak ditemukan materi pelatihan yang sesuai. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

## **DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES**

### **HR DEVELOPMENT PROGRAM**

*HR competency development carried out to ensure the availability of reliable HR in carrying out PLN Enjiniring's business activities. One of the media for developing HR competencies is through empowering training programs, certifications, and assignments. PLN Enjiniring gives the same opportunity to all employees in getting the development program.*

*The development program is based on the Company's needs to support the successful achievement of the Company's performance and objectives stipulated in the Management Contract. In addition, the development program for the workforce aims to increase knowledge, competencies, and attitudes in the face of each job or assignment.*

*In implementing HR development, PLN Enjiniring works with PLN Corporate University and training institutions at home and abroad. During 2022, employee competency development implemented in the company consisting of 183 Training Programs attended by 590 attendee, and 37 Certification Programs attended by 124 attendee consisting of the Board of Directors Member and Employees. Meanwhile, the Board of Directors members did not carry out capacity building programs because they did not find suitable training materials. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.*



**TABEL PELAKSANAAN PELATIHAN TAHUN 2021**  
**TABLE OF TRAINING IMPLEMENTATION FOR 2021**

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	Januari	Analisa Statistik	PUSDIKLAT	1
1	January	Statistical Analysis		1
2	Januari	Brand Management	PUSDIKLAT	1
2	January	<b>Brand Management</b>		1
3	Januari	DASAR - DASAR PLTS	PUSDIKLAT	10
3	January	Basic Solar Power Plant		10
4	Januari	Digital Talent	Telkom	13
4	January	Digital Talent		13
5	Januari	Enjiniring Desain Pembangkit Panas Bumi	PUSDIKLAT	2
5	January	Geothermal Plant Design Engineering		2
6	Januari	HSSE TALK SERIES #1 2022: CARBON PRICING	PUSDIKLAT	13
6	January	HSSE TALK SERIES #1 2022: CARBON PRICING		13
7	Januari	Implementasi Sistem Pembinaan Karir dan Kompetensi Pegawai	PUSDIKLAT	1
7	January	Implementation of Career Development System and Employee Competency		1
8	Januari	Manajemen Administrasi Perkantoran	PUSDIKLAT	2
8	January	Office Administration Management		2
9	Januari	Pengenalan Enjiniring Desain Pembangkit Panas Bumi	PUSDIKLAT	2
9	January	Plant Design Engineering Introduction Geothermal		2
10	Januari	Pengoperasian Peralatan Kelistrikan Pembangkit	PUSDIKLAT	3
10	January	Operation of Electrical Equipment of the Plant		3
11	Januari	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK)	PUSDIKLAT	2
11	January	Manpower Planning		2
12	Januari	Pra EE II	PUSDIKLAT	2
12	January	Pra EE II		2
13	Januari	Supervisi Desain Turbin Air & Peralatan Penunjang	PUSDIKLAT	2
13	January	Supervision of Water Turbine Design & Supporting Equipment		2
14	Januari	Supervisi Enjiniring Desain Pembangkit Panas Bumi	PUSDIKLAT	2
14	January	Geothermal Plant Design Engineering Supervision		2
15	Januari	Supply Chain Management	PUSDIKLAT	2
15	January	Supply Chain Management		2
16	Januari	The Art and Science of Coaching Modul II	PUSDIKLAT	1
16	January	The Art and Science of Coaching Modul II		1
17	Januari	Workshop On-Boarding Kepakaran dan Publication and Writing Skill	PUSDIKLAT	3



17	January	Workshop On-Boarding Expertise dan Publication and Writing Skill		3
18	Januari	Workshop Peningkatan TKDN Ketenagalistrikan dari Sisi Kesiapan Industri Logam	PUSDIKLAT	29
18	January	Workshop on Increasing Electricity TKDN in Side of Metal Industry Readiness		29
19	Februari	Analisa Beban Kerja Berbasis Produktivitas	PUSDIKLAT	2
19	February	Productivity-Based Workload Analysis		2
20	Februari	Analisa dan Evaluasi Pengembangan Usaha	PUSDIKLAT	1
20	February	Business Development Analysis and Evaluation		1
21	Februari	Aplikasi Software Transient ATPDRAW - EMTP	PUSDIKLAT	1
21	February	Software Application Transient ATPDRAW - EMTP		1
22	Februari	Asesmen EE III	PUSDIKLAT	3
22	February	Asesmen EE III		3
23	Februari	Design Enjiniring Listrik Pembangkit	PUSDIKLAT	1
23	February	Engineering Design of Power Plant		1
24	Februari	Digital Talent	Telkom	15
24	February	Digital Talent		15
25	Februari	Evaluasi Kinerja Transmisi	PUSDIKLAT	1
25	February	Transmission Performance Evaluation		1
26	Februari	Hydropower Project Development with Particular Focus on Feasibility Study	PUSDIKLAT	1
26	February	Hydropower Project Development with Particular Focus on Feasibility Study		1
27	Februari	Keterampilan Komunikasi Lanjutan	PUSDIKLAT	1
27	February	Advanced Communication Skills		1
28	Februari	Manajemen Perpajakan	PUSDIKLAT	1
28	February	Tax Management		1
29	Februari	Marketing Intelligence	PUSDIKLAT	1
29	February	Marketing Intelligence		1
30	Februari	Pemeliharaan Proteksi Mekanikal Pembangkit	PUSDIKLAT	1
30	February	Plant Mechanical Protection Maintenance		1
31	Februari	Penganggaran Perusahaan	PUSDIKLAT	2
31	February	Corporate Budgeting		2
32	Februari	Pengenalan PMBOK	PUSDIKLAT	3
32	February	PMBOK Introduction		3
33	Februari	Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek dan Kajian Kelayakan Risiko	PUSDIKLAT	3
33	February	Preparation of Project Feasibility Study and Risk Feasibility Study		3
34	Februari	Penyusunan Spesifikasi Teknis dan RAB Elektrikal Mekanik	PUSDIKLAT	3
34	February	Preparation of Technical Specifications and Cost Budget Plan of Electrical Mechanics		3



35	Februari	Pra SE I & SPE I	PUSDIKLAT	6
35	February	<i>Pra SE I &amp; SPE I</i>		6
36	Februari	Proses Penyelesaian Kontrak Dan Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Ketenagalistrikan	PUSDIKLAT	1
36	February	<i>Process of Contract Completion and Final Report on Electricity Development Activities</i>		1
37	Februari	Uji PA SE I	PUSDIKLAT	1
37	February	<i>PA SE I Examination</i>		1
38	Februari	Workshop Project Completion	PUSDIKLAT	1
38	February	<i>Workshop Project Completion</i>		1
39	Maret	Asesmen Pegawai Jenjang MA	PUSDIKLAT	1
39	March	<i>MA Level Officer Assessment</i>		1
40	Maret	Audit Internal SMK3	PUSDIKLAT	1
40	March	<i>Internal Audit of SMK3</i>		1
41	Maret	E-Procurement BUMN	PUSDIKLAT	6
41	March	<i>E-Procurement BUMN</i>		6
42	Maret	Internal Audit PLN	PUSDIKLAT	2
42	March	<i>Internal Audit PLN</i>		2
43	Maret	Keterampilan Bernegosiasi Lanjutan	PUSDIKLAT	3
43	March	<i>Advanced Negotiation Skills</i>		3
44	Maret	Manajemen Aset Properti	PUSDIKLAT	1
44	March	<i>Property Asset Management</i>		1
45	Maret	Manajemen Keuangan Untuk Pelaksana (Digital Learning)	PUSDIKLAT	1
45	March	<i>Financial Management for Implementers (Digital Learning)</i>		1
46	Maret	Manajemen Komunikasi Perusahaan	PUSDIKLAT	1
46	March	<i>Corporate Communication Management</i>		1
47	Maret	Manajemen Pengelolaan Bahan Bakar Gas	PUSDIKLAT	1
47	March	<i>Fuel Gas Management</i>		1
48	Maret	Pengantar Pembekalan Masa Purna Bakti	PUSDIKLAT	1
48	March	<i>Introduction to Retirement Period Briefing</i>		1
49	Maret	Pengantar Pembekalan Masa Purnabakti	PUSDIKLAT	1
49	March	<i>Introduction to Retirement Period Briefing</i>		1
50	Maret	Pengantar Strategi Bisnis, Korporat, Global	PUSDIKLAT	1
50	March	<i>Introduction to Business, Corporate, Global Strategy</i>		1
51	Maret	Pengelolaan Daftar Penyedia Terseleksi	PUSDIKLAT	1
51	March	<i>Management of Selected Provider Lists</i>		1
52	Maret	Pengendalian Gas dan BBM	PUSDIKLAT	1
52	March	<i>Gas and Fuel Control</i>		1
53	Maret	Pengendalian Proyek dengan Aplikasi MS Project	PUSDIKLAT	1
53	March	<i>Project Control with MS Project Application</i>		1



54	Maret	Penilaian Kapabilitas SPI Korporasi BUMN/D (Internal Audit Capability Model)	BPKP	2
54	March	<i>Internal Audit Capability Model</i>		2
55	Maret	Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	PUSDIKLAT	1
55	March	<i>Solar Power Plant Planning</i>		1
56	Maret	PHP Advance: Framework Laravel	PUSDIKLAT	2
56	March	<i>PHP Advance: Framework Laravel</i>		2
57	Maret	Pra EE III	PUSDIKLAT	3
57	March	<i>Pra EE III</i>		3
58	Maret	Pra SPE I & SE I	PUSDIKLAT	6
58	March	<i>Pra SPE I &amp; SE I</i>		6
59	Maret	Skema Bisnis Independent Power Producer (IPP)	PUSDIKLAT	2
59	March	<i>Independent Power Producer (IPP) Business Scheme</i>		2
60	Maret	SPE I	PUSDIKLAT	6
60	March	<i>SPE I</i>		6
61	Maret	Standar dan Prosedur PPA untuk IPP EBT s.d. 10 MW	PUSDIKLAT	1
61	March	<i>PPA Standards and Procedures for EBT IPPs up to 10 MW</i>		1
62	Maret	Strategi, Kebijakan, Program, dan Anggaran SDM Dasar	PUSDIKLAT	1
62	March	<i>Strategy, Policies, Programs, and Basic HR Budget</i>		1
63	Maret	Supervisi Penyusunan dan Pendokumentasian Perjanjian/Kontrak	PUSDIKLAT	2
63	March	<i>Supervision of Drafting and Documenting Agreements/Contracts</i>		2
64	Maret	Training of Trainer Software WAsP	PUSDIKLAT	2
64	March	<i>Training of Trainer Software WAsP</i>		2
65	Maret	Workshop Sosialisasi PerDir Tentang Kebijakan Strategis Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri di Lingkungan PT PLN (Persero)	PUSDIKLAT	3
65	March	<i>PerDir Socialization Workshop on Strategic Policy Guidelines for the Use of Domestic Products within PT PLN (Persero)</i>		3
66	April	Behavior Based Safety (BBS)	PUSDIKLAT	3
66	April	<i>Behavior Based Safety (BBS)</i>		3
67	April	Capital Budgeting With Risk	PUSDIKLAT	3
67	April	<i>Capital Budgeting With Risk</i>		3
68	April	Dasar-Dasar PLTB	PUSDIKLAT	4
68	April	<i>Basic Wind Power Plant</i>		4
69	April	DIGITAL LEADERSHIP SERIES 2022 #4: AMPLIFY PROFESSIONAL INFLUENCE THROUGHOUT THE ORGANIZATION BY CULTIVATING BUSINESS RELATIONSHIPS	PUSDIKLAT	4
69	April	<i>DIGITAL LEADERSHIP SERIES 2022 #4: AMPLIFY PROFESSIONAL INFLUENCE THROUGHOUT THE ORGANIZATION BY CULTIVATING BUSINESS RELATIONSHIPS</i>		4
70	April	Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMN	PUSDIKLAT	6



70	April	Discussion of BUMN Procurement Guidelines		6
71	April	Information Technology Infrastructure Library	PUSDIKLAT	1
71	April	Information Technology Infrastructure Library		1
72	April	Manajemen Pengelolaan Bahan Bakar Gas	PUSDIKLAT	1
72	April	Fuel Gas Management		1
73	April	Manajemen Persediaan	PUSDIKLAT	2
73	April	Inventory Management		2
74	April	Manajemen TKDN Bidang Ketenagalistrikan	PUSDIKLAT	1
74	April	TKDN Management in the Electricity Sector		1
75	April	Pembelajaran EE III	PUSDIKLAT	3
75	April	EE III Learning		3
76	April	Pemeliharaan DCS PLTA	PUSDIKLAT	1
76	April	DCS PLTA Maintenance		1
77	April	Pengenalan Sistem Proteksi	PUSDIKLAT	1
77	April	Protection System Introduction		1
78	April	Peningkatan Implementasi Sistem Manajemen Mutu	PUSDIKLAT	1
78	April	Improved Quality Management System Implementation		1
79	April	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Berbasis Risiko	PUSDIKLAT	1
79	April	Preparation of Risk-Based Work Programs and Budgets		1
80	April	Penyusunan Spesifikasi Teknik & RAB Sipil	PUSDIKLAT	5
80	April	Preparation of Technical Specifications & Civil Cost Budget Planning		5
81	April	Perhitungan Efisiensi Batubara dengan Metode Manual	PUSDIKLAT	2
81	April	Calculation of Coal Efficiency by Manual Method		2
82	April	Project Finance Dasar	PUSDIKLAT	1
82	April	Basic Project Finance		1
83	April	Skema Bisnis Independent Power Producer (IPP)	PUSDIKLAT	1
83	April	Independent Power Producer (IPP) Business Scheme		1
84	April	Teknik Design & Review Menggunakan Aplikasi MS Tower	PUSDIKLAT	5
84	April	Design Techniques & Review Using MS Tower Application		5
85	April	Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng	PUSDIKLAT	5
85	April	Calculation Techniques of Bottom Structure (Foundation), Stability & Slope Protection Methods		5
86	Mei	Asesmen Level Manajemen Dasar	PUSDIKLAT	1
86	May	Basic Management Level Assessment		1
87	Mei	Awareness dan Auditor Internal ISO 27001:2013	SUCOFINDO	6
87	May	Awareness and Internal Auditor of ISO 27001:2013		6
88	Mei	Awareness dan Auditor Internal ISO 9001:2015	SUCOFINDO	6
88	May	Awareness and Internal Auditor of ISO 9001:2015		6



89	Mei	Fraud Risk Management	PUSDIKLAT	1
89	May	<i>Fraud Risk Management</i>		1
90	Mei	Implementasi Peyusunan HPS	PUSDIKLAT	1
90	May	<i>HPS Preparation Implementation</i>		1
91	Mei	Mengantisipasi dan Menanggulangi Resiko Konflik Sosial	PUSDIKLAT	2
91	May	<i>Anticipating and Overcoming the Risk of Social Conflict</i>		2
92	Mei	Pengelolaan DPT	PUSDIKLAT	1
92	May	<i>DPT Management</i>		1
93	Mei	Pengembangan Organisasi Dasar	PUSDIKLAT	1
93	May	<i>Basic Organizational Development</i>		1
94	Mei	Supervisory Education I ( SE I )	PUSDIKLAT	2
94	May	<i>Supervisory Education I ( SE I )</i>		2
95	Mei	Tata Kelola Teknologi Informasi	PUSDIKLAT	1
95	May	<i>Information Technology Governance</i>		1
96	Juni	Asesmen Peralatan Primer Gardu Induk	PUSDIKLAT	1
96	June	<i>Substation Primary Equipment Assessment</i>		1
97	Juni	Audit Internal SMKU ISO 22301:2019	PT Cakra Manunggal Pratama	25
97	June	<i>Audit Internal SMKU ISO 22301:2019</i>		25
98	Juni	Awareness SMKU ISO 22301:2019	PT Cakra Manunggal Pratama	43
98	June	<i>Awareness SMKU ISO 22301:2019</i>		43
99	Juni	Dasar – Dasar PLTS	PUSDIKLAT	3
99	June	<i>Basic Solar Power Plant</i>		3
100	Juni	Dasar-Dasar PLTS	PUSDIKLAT	7
100	June	<i>Basic Solar Power Plant</i>		7
101	Juni	Desain Enjiniring Transmisi dan Gardu Induk	PUSDIKLAT	1
101	June	<i>Transmission Engineering and Substation Design</i>		1
102	Juni	Lobi dan Negosiasi Dalam Komunikasi	PUSDIKLAT	5
102	June	<i>Lobbying and negotiation in communication</i>		5
103	Juni	Pembelajaran Pra EE III	PUSDIKLAT	1
103	June	<i>Pre EE III Learning</i>		1
104	Juni	Pengantar Perpajakan	PUSDIKLAT	1
104	June	<i>Introduction to Taxation</i>		1
105	Juni	Peningkatan Kapasitas terkait Pendekatan Science dan Nature untuk Mencapai Net Zero Emission	PUSDIKLAT	2
105	June	<i>Capacity Building related to Science and Nature Approaches to Achieve Net Zero Emissions</i>		2
106	Juni	Program Management Office (PMO) – Project Management Methodology (PMM)	PUSDIKLAT	1
106	June	<i>Program Management Office (PMO) – Project Management Methodology (PMM)</i>		1
107	Juli	Build A Good Relationship	John Robert Powers	10



107	July	Build A Good Relationship		10
108	Juli	Desain PLTS PV	PUSDIKLAT	1
108	July	PV Solar Power Plant Design		1
109	Juli	Manajemen Administrasi Perkantoran	PUSDIKLAT	3
109	July	Office Administration Management		3
110	Juli	Pembelajaran EE III	PUSDIKLAT	1
110	July	EE III Learning		1
111	Juli	Pemeliharaan Generator	PUSDIKLAT	2
111	July	Generator Maintenance		2
112	Juli	Strategi Bisnis, Korporat, dan Global	PUSDIKLAT	1
112	July	Business, Corporate and Global Strategy		1
113	Juli	Strategic Management Stakeholder & Communication Skill	PUSDIKLAT	3
113	July	Strategic Management Stakeholder & Communication Skill		3
114	Juli	Supervisi Enjiniring Desain Gardu Induk	PUSDIKLAT	2
114	July	Substation Design Engineering Supervision		2
115	Juli	Supervisi Pengoperasian PLTMG	PUSDIKLAT	1
115	July	Operation Supervision of Gas Machine Power Plant		1
116	Juli	Total Quality Management	PUSDIKLAT	1
116	July	Total Quality Management		1
117	Juli	Workshop Coach PLN Indonesia Summit	PUSDIKLAT	1
117	July	Workshop Coach PLN Indonesia Summit		1
118	Agustus	Audit Proses Manajemen Risiko	PUSDIKLAT	1
118	August	Risk Management Process Audit		1
119	Agustus	Certified Cybersecurity Technisian	Trainocate Network Indonesia	3
119	August	Certified Cybersecurity Technisian		3
120	Agustus	Data Analytics Dasar	PUSDIKLAT	1
120	August	Basic Analytics Data		1
121	Agustus	EE III	PUSDIKLAT	1
121	August	EE III		1
122	Agustus	Integritas dan Antikorupsi SPI BUMN	PUSDIKLAT	1
122	August	Integrity and Anti-Corruption of SPI BUMN		1
123	Agustus	Leader as Coach	Loop Institute of Coaching	1
123	August	Leader as Coach		1
124	Agustus	Pengawasan Pengujian Peralatan Tegangan Tinggi (SKTT, SKTET) (DL)	PUSDIKLAT	3
124	August	High Voltage Equipment Testing Supervision (SKTT, SKTET) (DL)		3
125	Agustus	Penyusunan KKP Program Dedieselisasi dengan Aplikasi Homer Pro	PUSDIKLAT	2
125	August	Preparation of Dedieselization Program CTF with Homer Pro Application		2



126	Agustus	Simulasi Pengoperasian PLTU CFB	PUSDIKLAT	1
126	August	Operation Simulation of CFB Steam Power Plant		1
127	Agustus	Standar dan Prosedur PPA untuk IPP EBT s.d 10 MW	PUSDIKLAT	2
127	August	PPA Standards and Procedures for EBT IPPs up to 10 MW		2
128	Agustus	Supervisi Enjiniring Desain Gardu Induk	PUSDIKLAT	2
128	August	Substation Design Engineering Supervision		2
129	Agustus	SUPERVISI KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGKIT	PUSDIKLAT	11
129	August	Supervisi Konstruksi Proyek Pembangkit		11
130	Agustus	Troubleshooting PLTA	PUSDIKLAT	2
130	August	Hydropower Plant Troubleshooting		2
131	Agustus	Workshop Successful Capacity Building In Learning Delivery (SCBD) For Instructor	PUSDIKLAT	1
131	August	Workshop Successful Capacity Building In Learning Delivery (SCBD) For Instructor		1
132	September	Electricity Long Term Strategies	PUSDIKLAT	1
132	September	Electricity Long Term Strategies		1
133	September	Konsep & Desain Transmission Line serta Konsep & Desain Gardu Induk	PUSDIKLAT	2
133	September	Transmission Line Concept & Design and Substation Concept & Design		2
134	September	Pengenalan Manajemen Energi	PUSDIKLAT	2
134	September	Introduction to Energy Management		2
135	September	Pra EE II	PUSDIKLAT	1
135	September	Pra EE II		1
136	September	Pra EE III	PUSDIKLAT	1
136	September	Pra EE III		1
137	September	Pra SE I	PUSDIKLAT	1
137	September	Pra SE I		1
138	September	Sistem Proteksi Pembangkit	PUSDIKLAT	2
138	September	Plant Protection System		2
139	September	Soft Skills For Leader To Create Value	PPM Manajemen	6
139	September	Soft Skills For Leader To Create Value		6
140	September	Special Directorship Program	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)	1
140	September	Special Directorship Program		1
141	September	Standar Konstruksi Jaringan Distribusi	PUSDIKLAT	1
141	September	Distribution Network Construction Standards		1
142	September	Supervisi Aspek Hukum Agraria	PUSDIKLAT	1
142	September	Supervision of Agrarian Law Aspects		1
143	September	Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)	PUSDIKLAT	1
143	September	Information Technology Governance (IT Governance)		1
144	September	Training & Uji Kompetensi General Manager (GM) SDM	LSP MSDM	1



144	September	Training & Competency Test General Manager (GM) HR		1
145	September	Workshop Simulasi Aplikasi DAMS & Penyusunan Dokumen Pengajuan Usulan Investasi – Kategori D	PUSDIKLAT	8
145	September	DAMS Application Simulation Workshop &; Preparation of Investment Proposal Submission Document – Category D		8
146	Oktober	Chartered Accountant (CA) Review – Professional Level	Pusat Pengembangan Akuntansi FE UI	1
146	Oktober	Chartered Accountant (CA) Review – Professional Level		1
147	Oktober	Data Analytics Dasar	PUSDIKLAT	1
147	Oktober	Basic Analytics Data		1
148	Oktober	Enjiniring Energi Baru dan Terbarukan	PUSDIKLAT	6
148	Oktober	Engineering New and Renewable Energy		6
149	Oktober	Executive Education II (EE II)	PUSDIKLAT	4
149	Oktober	Executive Education II (EE II)		4
150	Oktober	Maintenance Excellent	PUSDIKLAT	2
150	Oktober	Maintenance Excellent		2
151	Oktober	Pelatihan Pengembangan PLTB	GIZ & Kementrian PPN	3
151	Oktober	Wind Power Plant Development Training		3
152	Oktober	Pengembangan Evaluasi Kinerja Penjualan dan Pendapatan	PUSDIKLAT	1
152	Oktober	Development of Sales and Revenue Performance Evaluation		1
153	Oktober	Pengenalan Manajemen Energi	PUSDIKLAT	2
153	Oktober	Introduction to Energy Management		2
154	Oktober	Pengenalan Project Management Body Of Knowledge (PMBOK)	PUSDIKLAT	8
154	Oktober	Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) Introduction		8
155	Oktober	Penyusun AMDAL	PSLH UGM	4
155	Oktober	AMDAL Compiler		4
156	Oktober	Perizinan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PUSDIKLAT	1
156	Oktober	Electricity Infrastructure Development Licensing		1
157	Oktober	Professional Coach Program	PLN PUSAT	1
157	Oktober	Professional Coach Program		1
158	Oktober	Sistem Proteksi Pembangkit	PUSDIKLAT	2
158	Oktober	Plant Protection System		2
159	Oktober	Strategic Management Stakeholder & Communication Skill	PUSDIKLAT	1
159	Oktober	Strategic Management Stakeholder & Communication Skill		1
160	Oktober	Supervisory Education I (SE I)	PUSDIKLAT	1
160	Oktober	Supervisory Education I (SE I)		1
161	Oktober	Workshop Portal HC BUMN	PUSDIKLAT	1
161	Oktober	BUMN HC Portal Workshop		1
162	November	Analisa Beban Kerja Berbasis Produktivitas	PUSDIKLAT	2
162	November	Productivity-Based Workload Analysis		2



163	November	Asesmen Level Manajemen Menengah	PUSDIKLAT	1
163	November	<i>Middle Management Level Assessment</i>		1
164	November	Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMN	PUSDIKLAT	33
164	November	<i>Discussion of BUMN Procurement Guidelines</i>		33
165	November	Information Technology Risk Management (ITRM)	IRMAPA	1
165	November	<i>Information Technology Risk Management (ITRM)</i>		1
166	November	Pra EE II	PUSDIKLAT	1
166	November	<i>Pra EE II</i>		1
167	November	Procurement General Knowledge	PUSDIKLAT	23
167	November	<i>Procurement General Knowledge</i>		23
168	November	Saham	PUSDIKLAT	1
168	November	<i>Stock</i>		1
169	November	Workshop Career Development Planning pada SAP SF	PUSDIKLAT	2
169	November	<i>Workshop Career Development Planning on SAP SF</i>		2
170	November	Workshop Penyusunan Kontrak Manajemen Tahun 2023	PUSDIKLAT	2
170	November	<i>Management Contract Preparation Workshop 2023</i>		2
171	November	Workshop Strengthening Integrated Communication Strategy	PUSDIKLAT	1
171	November	<i>Workshop Strengthening Integrated Communication Strategy</i>		1
172	November	Workshop Succession Planning On SAP Success Factor	PUSDIKLAT	2
172	November	<i>Workshop Succession Planning On SAP Success Factor</i>		2
173	Desember	Forum Psikologi "Psychology PLN In Harmony"	PUSDIKLAT	3
173	Desember	<i>Psychology Forum "Psychology PLN In Harmony"</i>		3
174	Desember	Leaders Talk Series 2022 #4: Indonesia Future Energy Roadmap	PUSDIKLAT	1
174	Desember	<i>Leaders Talk Series 2022 #4: Indonesia Future Energy Roadmap</i>		1
175	Desember	LEADERS TALK SERIES 2022 #5: BUILDING VALUE CREATION	PUSDIKLAT	3
175	Desember	<i>Leaders Talk Series 2022 #5: Building Value Creation</i>		3
176	Desember	Loop Certified Professional Coach Program	PUSDIKLAT	1
176	Desember	<i>Loop Certified Professional Coach Program</i>		1
177	Desember	Task Force EBT - Webinar #4 Pengenalan PLTB	PUSDIKLAT	18
177	Desember	<i>EBT Task Force - Webinar #4 Introduction to Wind Power Plant</i>		18
178	Desember	Transformation Journey Series #16 : Sh: Journey PLN EPI dalam Menjaga Ketahanan Pasokan Energi Primer dan PLN Icon Plus Sebagai Pusat Inovasi Bisnis Beyond Kwh	PUSDIKLAT	2
178	Desember	<i>Transformation Journey Series #16 : Sh: PLN EPI's Journey in Maintaining Primary Energy Supply Resilience and PLN Icon Plus as a Business Innovation Center Beyond Kwh</i>		2
179	Desember	Workshop Critical Review, Dampak Regulasi, dan Aspek Pendanaan Transisi Energi PLN Menuju Carbon Neutral 2060	PUSDIKLAT	1
179	Desember	<i>Workshop on Critical Review, Regulatory Impact, and Funding Aspects of PLN's Energy Transition to Carbon Neutral 2060</i>		1



180	Desember	Workshop Implementasi dan Rekonsiliasi LHKPN	PUSDIKLAT	2
180	December	LHKPN Implementation and Reconciliation Workshop		2
181	Desember	Workshop Perhitungan Keekonomian Lapangan Gas	PUSDIKLAT	4
181	December	Gas Field Economic Calculation Workshop		4
182	Desember	Workshop Perhitungan Pajak Rampung Tahun 2022	PUSDIKLAT	2
182	December	Tax Calculation Workshop Completed in 2022		2
183	Desember	Workshop Project, Procurement & Renewable Academy Improvement	PUSDIKLAT	1
183	December	Workshop Project, Procurement & Renewable Academy Improvement		1
<b>Total Jumlah Peserta Pelatihan</b>				<b>590</b>
<i>Total Number of Training Participants</i>				

(Catatan: jumlah peserta\* sebanyak 590 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

(Note: the number of participants\* is 590 people because there are some employees who received training more than once)

#### TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI TAHUN 2022

#### TABLE OF CERTIFICATION IMPLEMENTATION FOR 2022

No.	Waktu Pelaksanaan	Jenis/Judul Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah Peserta*
	<i>Execution Time</i>	<i>Type / Title of Certification</i>	<i>Organizer</i>	<i>Number of Participants*</i>
1	Februari	Perencanaan PLTD Level 5	Sentra Teknologi Terapan	2
1	February	Diesel power plant design 5th level	Sentra Teknologi Terapan	2
2	Februari	Perencanaan PLTD Level 6	Sentra Teknologi Terapan	1
2	February	Diesel power plant design 6th level	Sentra Teknologi Terapan	1
3	Februari	Perencanaan PLTGU Level 6	Sentra Teknologi Terapan	1
3	February	Steam gas power plant design 6th level	Sentra Teknologi Terapan	1
4	Maret	Perencanaan Distribusi Tegangan Menengah Level 5	Sentra Teknologi Terapan	3
4	March	Medium voltage distribution design 5th level	Sentra Teknologi Terapan	3
5	Maret	Perencanaan Distribusi Tegangan Rendah Level 5	Sentra Teknologi Terapan	3
5	March	Low voltage distribution design 5th level	Sentra Teknologi Terapan	3
6	Maret	Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Level 6	Sentra Teknologi Terapan	1
6	March	Electrical distribution design 6th level	Sentra Teknologi Terapan	1
7	Mei	Petugas DAMKAR Kelas D	MIDIATAMA	5
7	May	D level firefighter role	MIDIATAMA	5
8	Juni	Auditor SMK3	PHITAGORAS	2



8	June	Health and safety auditors	PHITAGORAS	2
9	Juni	Petugas P3K	PHITAGORAS	5
9	June	First aid role	PHITAGORAS	5
10	Juli	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	CRMS	18
10	July	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	CRMS	18
11	Juli	Ahli Utama Mesin	ATAKNAS	1
11	July	Main Expert on Machinery	ATAKNAS	1
12	Agustus	QIA Tingkat Lanjutan	YPIA	4
12	August	Advanced QIA	YPIA	4
13	Agustus	Brevet C	IAI	2
13	August	Brevet C	IAI	2
14	Agustus	Ahli K3 Umum	PHITAGORAS	8
14	August	Occupational Safety and Health Specialist	PHITAGORAS	8
15	Agustus	Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	ATAKNAS	4
15	August	Young Expert in Water Resources Engineering	ATAKNAS	4
16	September	Analisis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTGU	SKP Tenaga Listrik	1
16	September	Associate Analyst of PLTGU Construction and Installation Supervisory Consultant	SKP Tenaga Listrik	1
17	September	Analisis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTA	SKP Tenaga Listrik	1
17	September	Associate Analyst of Hydropower Development and Installation Supervisory Consultant	SKP Tenaga Listrik	1
18	September	Analisis Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU	SKP Tenaga Listrik	2
18	September	Associate Analyst Consultant Supervising the Construction and Installation of Steam Power Plant	SKP Tenaga Listrik	2
19	September	Analisis Madya Konsultansi Perencanaan PLTB	SKP Tenaga Listrik	1
19	September	Associate Analyst of Wind Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
20	September	Analisis Madya Konsultansi Perencanaan PLTG	SKP Tenaga Listrik	4
20	September	Associate Analyst of Gas Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	4
21	September	Analisis Madya Konsultansi Perencanaan PLTS	SKP Tenaga Listrik	1
21	September	Associate Analyst of Solar Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
22	September	Analisis Madya Konsultansi Perencanaan PLTMGU	SKP Tenaga Listrik	2
22	September	Associate Analyst of Steam Gas Engine Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	2
23	September	Analisis Utama Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTGU	SKP Tenaga Listrik	1
23	September	Main Analyst of Steam Gas Power Plant Construction and Installation Supervisory Consultant	SKP Tenaga Listrik	1
24	September	Analisis Utama Konsultansi Perencanaan PLTA	SKP Tenaga Listrik	1
24	September	Principal Analyst of Hydropower Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
25	September	Analisis Utama Konsultansi Perencanaan PLTB	SKP Tenaga Listrik	1
25	September	Main Analyst of Wind Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
26	September	Analisis Utama Konsultansi Perencanaan PLTGU	SKP Tenaga Listrik	1



26	September	Main Analyst of Steam Gas Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
27	September	Analisis Utama Konsultasi Perencanaan PLTS	SKP Tenaga Listrik	1
27	September	Main Analyst of Solar Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	1
28	September	Analisis Utama Konsultasi Perencanaan PLTU	SKP Tenaga Listrik	3
28	September	Main Analyst of Steam Power Plant Planning Consultancy	SKP Tenaga Listrik	3
29	September	QRMP (Qualified Risk Management Professional)	LSP MKS	6
29	September	QRMP (Qualified Risk Management Professional)	LSP MKS	6
30	September	Ahli K3 Listrik	MIDIATAMA	2
30	September	Electrical Safety Specialist	MIDIATAMA	2
31	September	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	ATAKNAS	1
31	September	Associate Expert in Water Resources Engineering	ATAKNAS	1
32	Oktober	CHRM (Certified Human Resource Manager)	PPM Manajemen	1
32	October	CHRM (Certified Human Resource Manager)	PPM Manajemen	1
33	November	Teknisi K3 Listrik	MIDIATAMA	1
33	November	Electrical Safety Technician	MIDIATAMA	1
34	November	Tenaga Kerja Pada Ketinggian Level 1 (TKPK 1)	MIDIATAMA	2
34	November	Manpower at Height 1st Level	MIDIATAMA	2
35	November	PBJ BUMN	PUSDIKLAT	7
35	November	BUMN Procurement	PUSDIKLAT	7
36	Desember	Governance Risk Compliance Professional	Grajosa Resources	8
36	December	Governance Risk Compliance Professional	Grajosa Resources	8
37	Desember	PBJ BUMN	PUSDIKLAT	16
37	December	BUMN Procurement	PUSDIKLAT	16
<b>Total Jumlah Peserta Sertifikasi</b>				<b>124</b>
<b>Total Number of Certification Participants</b>				

Untuk mengukur efektivitas atas program pengembangan yang telah dilakukan, Perusahaan melakukan evaluasi dengan menghitung tingkat pengembalian investasi pada pelatihan/sertifikasi (*Return on Training Investment – ROTI*) dan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan serta Hari Orang Pelatihan (HOP).

To measure the effectiveness of the development program that has been carried out, the Company conducts an evaluation by calculating the return on investment in training / certification (*Return on Training Investment - ROTI*) and evaluates the achievement of the Company performance and Hari Orang Pelatihan (HOP).

## BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2022 melalui pelatihan/sertifikasi sebesar Rp 3.331.100.000, meningkat sebesar 320,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 792.748.165. Di lain hal, pendapatan Perusahaan tahun 2022 (stand alone/ bukan konsolidasi) adalah sebesar Rp 480.902.141.378, meningkat sebesar 19,02% dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp 404.040.398.894. Maka, dengan

## EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The total cost of developing employee competencies in 2022 through training / certification amounted to IDR 3.331.100.000 increasing 320.2% compared to 2021 which amounted to IDR 792.748.165. On the other hand, the Company's revenue in 2022 (standalone / not consolidated) amounted to IDR 480.902.141.378, increasing by 19.02% compared to 2021 which



asumsi best practice tingkat dampak pelatihan/sertifikasi sebesar 10%, didapatkan nilai ROTI 2022 sebesar 13,44, sedangkan nilai ROTI 2021 sebesar 49,97. Nilai pencapaian KPI/kinerja Perusahaan tahun 2022 adalah 102,63, sementara itu pencapaian Kinerja tahun 2021 adalah 101,89. Sedangkan untuk HOP tahun 2022 adalah 0,57, sementara HOP tahun 2021 adalah 1,16.

Berdasarkan nilai ROTI, nilai ROTI tahun 2022 lebih kecil 36,53 poin dibandingkan tahun 2021. Selain itu, pencapaian skor KPI tahun 2022 juga lebih tinggi 0,74 poin dibandingkan tahun 2021. Maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas program pengembangan tahun 2022 adalah cukup efektif karena pencapaian KPI meningkat 0,73%, pendapatan meningkat 19,02%, tetapi nilai Return Of Training Investment (ROTI) menurun sebesar 73,11% dibanding tahun 2021. Sementara tingkat efisiensi program pengembangan tahun 2022 adalah kurang efisien 320,2% dari segi biaya dikarenakan adanya akrual biaya pelatihan tahun 2022 karena beberapa rencana capacity building belum terlaksana dan masuk rencana tahun 2023. Sementara dari segi jumlah HOP tahun 2022 menurun 51,17% dibandingkan tahun 2021.

*amounted to IDR 404.040.398.894. Then, assuming best practice the impact level of training / certification is 10%, by the 2022 ROTI score is 29.78, while the 2019 ROTI value is 13.44, meanwhile the 2022 ROTI score was 49.97. The KPI / Company's performance achievement value in 2022 is 102.63, while the 2022 performance achievement is 101.89. Whereas the 2022 HOP is 0.57 while the 2022 HOP was 1.16.*

*Based on the Return of Training Investment (ROTI) value, the 2022 Return of Training Investment (ROTI) value is smaller by 36.53 points compared to 2022. So it can be concluded that the development program effectively level in 2022 is quite effective because the KPI achievement has increased by 0.73%, income has increased by 19.02%, but the value of Return of Training Investment (ROTI) has decreased by 73.11% compared to 2022. While the 2022 development program efficiency rate was not really efficient from the cost perspectives by 320.2% because several capacity building plans have not been implemented and being push in the 2023. Meanwhile, in terms of 2022 HOP amount decreased compare to 2022.*

## RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2022

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2023 dalam kegiatan *Initiation Training Need* (ITN) mengikuti jadwal yang ditentukan oleh PLN Pusdiklat dan kegiatan *Training Need Analysis* (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring PE.PLNE.P.08.01, sebagai berikut.

## TRAINING AND CERTIFICATION PLANNING 2022

*In maintaining the quality of human resources, the continuity of employee competency development programs is the Company's commitment in order to support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring has planned and formulated training and certification needs for employees for the 2023 period in *Initiation Training Need* (ITN) activities following the schedule determined by PLN Pusdiklat and *Training Need Analysis* (TNA) activities independently following the PE Engineering Procedure. PLNE. P.08.01, as follows.*



## TABEL RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2023

### TABLE OF TRAINING AND CERTIFICATION PLANS FOR 2023

No.	Kebutuhan Pembelajaran <i>Learning Needs</i>	Peserta Pembelajaran <i>Learning Participants</i>	Tujuan Pembelajaran <i>Learning Objectives</i>
1	Administrasi Perkantoran Lanjutan <i>Advanced Office Administration</i>	Staff SDM & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Administrasi Perkantoran Lanjutan <i>After participating in this learning, participants are able to master Advanced Office Administration</i>
2	Alat Pelindung Diri <i>Personal Protective Equipment</i>	Staff USH	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Alat Pelindung Diri <i>After participating in this learning, participants are able to master Personal Protective Equipment</i>
3	Analisa Dokumen Kontrak EPC Berbasis Fidic <i>Fidic-Based EPC Contract Document Analysis</i>	Staff SETPER	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Analisa Dokumen Kontrak EPC Berbasis Fidic <i>After participating in this learning, participants are able to make Fidic-Based EPC Contract Document Analysis</i>
4	Analisa Enjiniring Struktur Bangunan Ketenagalistrikan <i>Engineering Analysis of Electrical Building Structure</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Analisa Enjiniring Struktur Bangunan Ketenagalistrikan <i>After participating in this learning, participants are able to make Engineering Analysis of Electrical Building Structure</i>
5	Analisa Laporan Keuangan <i>Financial Statement Analysis</i>	Staff USH	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Analisa Laporan Keuangan <i>After participating in this learning, participants are able to make Financial Statement Analysis</i>
6	Analisa Proyek Konstruksi Melalui PMIS (Project Management Information System) <i>Construction Project Analysis Through PMIS (Project Management Information System)</i>	Staff KONS	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Analisa Proyek Konstruksi Melalui PMIS (Project Management Information System) <i>After participating in this learning, participants are able to make Construction Project Analysis Through PMIS (Project Management Information System)</i>
7	Aplikasi CMMS EAM Pembangkitan (Maximo) <i>CMMS EAM Generation Application (Maximo)</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Aplikasi CMMS EAM Pembangkitan (Maximo) <i>After participating in this learning, participants are able to master CMMS EAM Generation Application (Maximo)</i>
8	Brand Management <i>Brand Management</i>	Staff SAR	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Brand Management <i>After participating in this learning, participants are able to master Brand Management</i>
9	Business Presentation Design Skill <i>Business Presentation Design Skill</i>	Perwakilan Bidang	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Business Presentation Design Skill <i>After participating in this learning, participants are able to master Business Presentation Design Skill</i>
10	Condition Based Maintenance <i>Condition Based Maintenance</i>	Staff USH	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Condition Based Maintenance <i>After participating in this learning, participants are able to master Condition Based Maintenance</i>
11	Desain PLTS PV <i>Solar Power Plant PV Design</i>	Staff KIT	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Desain PLTS PV <i>After participating in this learning, participants are able to master Solar Power Plant PV Design</i>



12	Electricity Long Term Strategies <i>Electricity Long Term Strategies</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Electricity Long Term Strategies <i>After participating in this learning, participants are able to master Electricity Long Term Strategies</i>
13	Employee Performance Management System Untuk Human Capital <i>Employee Performance Management System for Human Capital</i>	Staff KONS	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Employee Performance Management System Untuk Human Capital <i>After participating in this learning, participants are able to master Employee Performance Management System for Human Capital</i>
14	Energy Management For Renewable Energy <i>Energy Management For Renewable Energy</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Energy Management For Renewable Energy <i>After participating in this learning, participants are able to master Energy Management For Renewable Energy</i>
15	Enjiniring Desain Gardu Induk Tegangan Tinggi <i>Engineering High Voltage Substation Design</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Enjiniring Desain Gardu Induk Tegangan Tinggi <i>After participating in this learning, participants are able to master Engineering High Voltage Substation Design</i>
16	Enjiniring Proteksi Sistem <i>Engineering System Protection</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Enjiniring Proteksi Sistem <i>After participating in this learning, participants are able to master Engineering System Protection</i>
17	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa APLN <i>Evaluation of APLN Procurement of Goods/Services</i>	Staff PMO	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa APLN <i>After participating in this learning, participants are able to make Evaluation of APLN Procurement of Goods/Services</i>
18	Evaluasi Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Pendokumentasian Proses PBJ <i>Evaluation of Agreement/Contract Preparation and Documentation of Procurement Process</i>	Staff TND	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Evaluasi Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Pendokumentasian Proses PBJ <i>After participating in this learning, participants are able to make Evaluation of Agreement/Contract Preparation and Documentation of Procurement Process</i>
19	Evaluasi Penyusunan RKS PBJ Umum <i>Evaluation of General PBJ RKS Preparation</i>	Staff SAR	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Evaluasi Penyusunan RKS PBJ Umum <i>After participating in this learning, participants are able to make Evaluation of General PBJ RKS Preparation</i>
20	Evaluasi Variation Order, Extension Of Time, Price Adjustment Dan Klaim Pada Kontrak Konstruksi di PLN <i>Evaluation of Variation Order, Extension Of Time, Price Adjustment And Claims On Construction Contracts at PLN</i>	Staff KIT	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Evaluasi Variation Order, Extension Of Time, Price Adjustment Dan Klaim Pada Kontrak Konstruksi di PLN <i>After participating in this learning, participants are able to master Evaluation of Variation Order, Extension Of Time, Price Adjustment And Claims On Construction Contracts at PLN</i>
21	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum <i>General Occupational Health and Safety (K3)</i>	Staff USH	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum <i>After participating in this learning, participants are able to master General Occupational Health and Safety (K3)</i>
22	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Kontrak Berbasis FIDIC <i>After participating in this learning, participants are able to make FIDIC Based Contracts</i>
23	Manajemen dan Operasi CEMS (Continuous Emission Monitoring System) dan SISPEK KLHK <i>Management and Operation of CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and SISPEK KLHK</i>	Staff RKU & KIT	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Manajemen dan Operasi CEMS (Continuous Emission Monitoring System) dan SISPEK KLHK <i>After participating in this learning, participants are able to master Management and Operation of CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and SISPEK KLHK</i>



24	Manajemen Kontrak <i>Contract Management</i>	Staff KONS	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Manajemen Kontrak <i>After participating in this learning, participants are able to master Contract Management</i>
25	Manajemen Proyek Ketenagalistrikan Berbasis PMBOK <i>PMBOK-Based Electricity Project Management</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Manajemen Proyek Ketenagalistrikan Berbasis PMBOK <i>After participating in this learning, participants are able to master PMBOK-Based Electricity Project Management</i>
26	Market Design For Integrating Variable Renewable Energy <i>Market Design For Integrating Variable Renewable Energy</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Market Design For Integrating Variable Renewable Energy <i>After participating in this learning, participants are able to master Market Design For Integrating Variable Renewable Energy</i>
27	Mengembangkan dan Mempertahankan Keterikatan Pegawai <i>Developing and Maintaining Employee Engagement</i>	Staff SDM & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Mengembangkan dan Mempertahankan Keterikatan Pegawai <i>After participating in this learning, participants are able to master Developing and Maintaining Employee Engagement</i>
28	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum <i>Land Acquisition for Public Interest</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum <i>After participating in this learning, participants are able to master Land Acquisition for Public Interest</i>
29	Pengembangan Identifikasi Dan Penilaian Risiko (Digital Learning) <i>Development of Risk Identification and Assessment (Digital Learning)</i>	Staff ANGKEU	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Pengembangan Identifikasi Dan Penilaian Risiko (Digital Learning) <i>After participating in this learning, participants are able to master Development of Risk Identification and Assessment (Digital Learning)</i>
30	Pengendalian Proyek Dengan Aplikasi Primavera <i>Project Control with Primavera Application</i>	Staff RKU	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Pengendalian Proyek Dengan Aplikasi Primavera <i>After participating in this learning, participants are able to master Project Control with Primavera Application</i>
31	Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Dan Kajian Risiko <i>Preparation of Project Feasibility Assessment (CTF) and Risk Assessment</i>	Staff PMO	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Penyusunan Kajian Kelayakan Proyek (KKP) Dan Kajian Risiko <i>After participating in this learning, participants are able to make Preparation of Project Feasibility Assessment (CTF) and Risk Assessment</i>
32	Perencanaan Pemasangan Emergency Tower <i>Emergency Tower Installation Planning</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Perencanaan Pemasangan Emergency Tower <i>After participating in this learning, participants are able to make Emergency Tower Installation Planning</i>
33	Perencanaan Proteksi Sistem <i>System Protection Planning</i>	Staff TND	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Perencanaan Proteksi Sistem <i>After participating in this learning, participants are able to make System Protection Planning</i>
34	Planning and Design of Hydroelectric Power Plant <i>Planning and Design of Hydroelectric Power Plant</i>	Direktorat Enjiniring	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Planning and Design of Hydroelectric Power Plant <i>After participating in this learning, participants are able to make Planning and Design of Hydroelectric Power Plant</i>
35	Project Finance (Digital Learning) <i>Project Finance (Digital Learning)</i>	Staff ANGKEU	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Membuat Project Finance (Digital Learning) <i>After participating in this learning, participants are able to make Project Finance (Digital Learning)</i>



36	Renewable Energy Remote Power Generation <i>Renewable Energy Remote Power Generation</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Renewable Energy Remote Power Generation <i>After participating in this learning, participants are able to master Renewable Energy Remote Power Generation</i>
37	Sistem Proteksi Pembangkit <i>Plant Protection System</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Sistem Proteksi Pembangkit <i>After participating in this learning, participants are able to master Plant Protection System</i>
38	Site Survey And Site Selection <i>Site Survey And Site Selection</i>	Staff KIT	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Site Survey And Site Selection <i>After participating in this learning, participants are able to master Site Survey And Site Selection</i>
39	Supervisi Advertising Dan Manajemen Event <i>Supervision of Advertising and Event Management</i>	Staff SETPER	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Supervisi Advertising Dan Manajemen Event <i>After participating in this learning, participants are able to master Supervision of Advertising and Event Management</i>
40	Support Aplikasi Lanjutan <i>Advanced Application Support</i>	Staff SETPER	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Support Aplikasi Lanjutan <i>After participating in this learning, participants are able to master Advanced Application Support</i>
41	Teknik Pengolahan Data Soil Investigation <i>Soil Investigation Data Processing Techniques</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Teknik Pengolahan Data Soil Investigation <i>After participating in this learning, participants are able to master Soil Investigation Data Processing Techniques</i>
42	Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng <i>Calculation Techniques of Bottom Structure (Foundation), Stability &amp; Slope Protection Methods</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng <i>After participating in this learning, participants are able to master Calculation Techniques of Bottom Structure (Foundation), Stability &amp; Slope Protection Methods</i>
43	Workshop Evaluasi Extension Of Time (EOT), Variation Order (VO) dan Klaim <i>Workshop Evaluasi Extension Of Time (EOT), Variation Order (VO) and Claim</i>	Staff SDE & MUM	Setelah Mengikuti Pembelajaran Ini Peserta Mampu Menguasai Workshop Evaluasi Extension Of Time (EOT), Variation Order (VO) dan Klaim <i>After participating in this learning, participants are able to master Workshop Evaluasi Extension Of Time (EOT), Variation Order (VO) and Claim</i>

Selain itu, PLN Enjiniring mengimplementasikan *Knowledge Management* dalam wadah *knowledge sharing* dalam lingkungan kerja PLN Enjiniring yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Setiap materi *knowledge sharing* tersebut di-upload dalam aplikasi *Document Management (DM)* sebagai media portal *Knowledge Management*.

Diharapkan media yang sekarang ini berguna sebagai *data storage* yang dapat berkembang menjadi media yang berfungsi menjembatani kebutuhan perusahaan akan *knowledge sharing* dari enjinir senior ke junior, pimpinan ke bawahan, dan juga sebagai sarana mempermudah proses *coaching* dan *mentoring*.

*In addition, PLN Enjiniring implements Knowledge Management in a knowledge sharing platform within the PLN Enjiniring work environment which is routinely carried out every Monday and Wednesday. Each knowledge sharing material is uploaded in the Document Management (DM) application as a Knowledge Management portal media.*

*It is hoped that the current media is useful as data storage that can develop into a media that serves to bridge the needs of companies for knowledge sharing from senior to junior engineers, leaders to subordinates, and also as a means to facilitate the coaching and mentoring process.*



## Employee Engagement

### Employee Engagement

Pada tahun 2022, tingkat kerekatan karyawan PLN Enjiniring diukur dalam Employee Engagement Survey (EES) dengan metode online survey. Persentase Employee Engagement Index (EEI) tahun 2022 sebesar 80,86%, dimana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata EEI di Indonesia, yaitu 74%. Sementara hasil EEI tahun 2021 sebesar 76,46%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada EEI tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,40%.

Tantangan terbesar di tahun 2022 dalam peningkatan engagement karyawan dapat terjawab dengan terus meningkatnya Employee Engagement, yaitu di tahun 2021 meningkat sebesar 6,05% dan di tahun 2022 meningkat sebesar 4,40%. Meskipun dibanding dengan tahun 2021, peningkatan di tahun 2022 tidak lebih tinggi, tetapi tetap menunjukkan hasil EEI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen PLN Enjiniring cukup mampu memastikan kontribusi dan kepuasan karyawan, manajemen menunjukkan bukti kuat mengenai kepemimpinan yang efektif, memastikan bahwa karyawan adalah aset terpenting perusahaan dan kesempatan untuk promosi dianggap adil dan transparan bagi karyawan.

*In 2022, the level of adhesion of PLN Enjiniring employees is measured in the Employee Engagement Survey (EES) using the online survey method. The percentage of Employee Engagement Index (EEI) in 2022 is 80.86%, which is higher than the average EEI in Indonesia, which is 74%. Meanwhile, the EEI result in 2022 was 76.46%. So it can be concluded that in 2022 EEI has increased by 4.40%.*

*The biggest challenge in 2022 in increasing employee engagement can be solve by continuing to increase Employee Engagement, namely in 2022 it increased by 6.05% and in 2022 it increase by 4.40%. Even though the increasing number in 2022 has not been higher than 2022, it still shows that EEI results have increased from year to year. This shows that the PLN Enjiniring management is quite capable on ensuring employee contribution and satisfaction, management shows strong evidence of effective leadership, ensures that employees are the company's most important asset and opportunities for promotion are considered fair and transparent for employees.*

## MANAJEMEN KINERJA

PLN Enjiniring melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 03.001.K/DIR/PLNE/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tujuan ditetapkannya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai adalah (1) terwujudnya pengukuran kinerja yang berkeadilan guna membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi Pegawai bagi Perusahaan, dan (2) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Pegawai secara transparan,

## PERFORMANCE MANAGEMENT

*PLN Enjiniring conducts a performance appraisal based on the Performance Management System stipulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 03.001.K / DIR / PLNE / VI / 2019 dated June 3, 2019 concerning the Employee Performance Management System. The objectives of establishing the Employee Performance Management System are (1) the realization of fair performance measurements in order to foster a culture of learners and achievement and motivate Employees to improve Employee competencies and contributions to the Company, and (2) as a guideline for evaluating Employee performance in a transparent, measurable,*



terukur, dan obyektif. Siklus penilaian kinerja Pegawai dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) semester yang terdiri atas kegiatan:

### 1. Perencanaan

Merupakan tahap diskusi formal antara Atasan Langsung dengan Pegawai atau yang bersangkutan, tentang rencana pekerjaan utama yang akan dilakukan pada semester tersebut.

### 2. Pemantauan

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap kinerja Pegawai pada semester berjalan dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan konseling serta penugasan-penugasan yang mendorong pegawai dalam pencapaian KPI.

### 3. Penilaian

Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung setiap akhir semester. Hasil penilaian diketahui dan divalidasi oleh Karyawan dan Atasan Langsung.

Kriteria penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Individu, adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pemenuhan terhadap target kinerja individu Pegawai yang ditetapkan pada periode penilaian berjalan.
2. Kompetensi individu, adalah daftar kompetensi yang dimiliki oleh individu pegawai yang merupakan pemetaan dari *assessment* individu dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan dengan merujuk kepada Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan.
3. Kontribusi Individu yang terdiri dari:
  - a. Inovasi, yaitu inovasi alat, metode atau konsep yang memenuhi kriteria pada keputusan direksi yang berlaku.
  - b. **Knowledge Management**, adalah serangkaian langkah-langkah pengelolaan aset pengetahuan (mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan/menyebarkan pengetahuan) dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan seperti *knowledge sharing*, *knowledge capturing* dan *community of practice*.

and objective. The employee performance appraisal cycle is carried out in every 1 (one) semester consisting of activities:

### 1. Planning

This is the formal discussion stage between the Direct Supervisor and the Employee or concerned, about the main work plan that will be carried out in the following semester.

### 2. Monitoring

Monitoring conducted by the Direct Supervisor on the performance of Employees in the current semester by providing guidance, guidance, consultation and counseling.

### 3. Rating

The assessment is carried out by the Direct Supervisor at the end of the semester. The assessment results are known and validated by Employees and Direct Supervisors.

The criteria for evaluating employee performance are as follows:

1. *Individual Targets*, are assessments based on the fulfillment of the Employee's individual performance targets that are set in the current assessment period.
2. *Individual competencies*, is a list of competencies possessed by individual employees which is a mapping of individual assessments by using predetermined measurement tools by referring to the Competency Directory and Position Competency Needs.
3. *Individual contributions* consisting of:
  - a. *Innovation*, namely the innovation of tools, methods or concepts that meet the Company's innovation criteria.
  - b. *Knowledge Management*, is a series of steps for managing knowledge assets (collecting, storing, and using / disseminating knowledge) in order to continuously improve the Company's performance on an ongoing basis such as knowledge sharing, knowledge capturing and community of practice.



Penilaian Kinerja setiap individu berdasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Pegawai dalam menunjang kinerja Perusahaan yang dijabarkan dalam inisiatif strategis, ukuran kinerja, dan target. Penetapan KPI masing-masing individu Pegawai didasarkan pada KPI Perusahaan yang diturunkan ke KPI Direktorat. Dari KPI Direktorat akan diturunkan ke KPI Bidang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan KPI individu.

*The performance appraisal of each individual is based on the Key Performance Indicator (KPI), which is a quantitative or qualitative measure that is used to measure the achievement of employee performance in supporting Company performance that is outlined in strategic initiatives, performance measures, and targets. The determination of the KPI for each individual employee is based on the Company's KPI which is downgraded to the Directorate's KPI. From the KPI the Directorate will be demoted to the Field KPI and subsequently used as the basis for determining individual KPIs.*

## KEBIJAKAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Kebijakan sistem penghargaan kepada Pegawai mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Pasal 19 Ayat (2) huruf d yaitu Pemberian Penghargaan, dimana bertujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenagakerjaan, memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja, dan memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pegawai, memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai.

## EMPLOYEE POLICY TO EMPLOYEES

*The reward system policy for Employees refers to Decision Letter of the Board of Directors No. 21.002.K / DIR / PLNE / II / 2020 Article 19 Paragraph (2) letter d, concerning awarding, which aims to encourage employee professionalism, maintain and develop motivation and employment, maintain and develop work ability and productivity, and provide certainty for employee career development, provide opportunities for employee career development.*

Penghargaan yang diberikan oleh PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari (1) kompensasi tetap bulanan (*Pay for Person – P1*), (2) tunjangan posisi (*Pay for Position – P2*), tunjangan prestasi (*Pay for Performance – P3*), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai, (3) imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja, (4) penghargaan kesetiaan kerja. Manfaat terdiri dari (1) manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman kepemilikan rumah, dan program pensiun, serta (2) manfaat khusus, antara lain bantuan kepemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

*Awards given by PLN Enjiniring are of two types, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of (1) monthly fixed compensation (Pay for Person - P1), (2) position allowance (Pay for Position - P2), performance allowance (Pay for Performance - P3), holiday allowance, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security, (3) remuneration in the form of performance bonuses, (4) work loyalty awards. Benefits consist of (1) general benefits, including health care, leave entitlements, official clothing, housing facility replacement assistance, housing loan assistance, and pension programs, and (2) special benefits, including vehicle ownership assistance, communication tools, laptops, and work facilities.*

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

*Intrinsic awards are given to employees in the form of*



1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
2. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
3. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
4. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
5. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

1. *Formal education and professional certification programs, which are provided for employees who meet certain talent criteria requirements,*
2. *Special work facilities, which are provided on the basis of contributions and / or achievement of innovations that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,*
3. *Special balance program, which is given on the basis of cost efficiency of personal and family health and / or achievement of employee work loyalty,*
4. *Legal assistance, which is given in the form of defense of lawsuits related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
5. *Recognition, which is given on the basis of the Directors' award.*

## FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a) Rawat jalan,
- b) Rawat inap,
- c) Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e) Gugur kandung,
- f) Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g) Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
- h) Perawatan gigi,
- i) Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,

## HEALTH FACILITIES

*Health care facilities are part of extrinsic awards that fall into the general benefit category. PLN Enjiniring to provide health care assistance to employees and their families is regulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families Covered by PT PLN Enjiniring. Forms of health care borne by the Company consist of:*

- a) *Outpatient,*
- b) *Inpatient,*
- c) *Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,*
- d) *Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,*
- e) *Biological death,*
- f) *Care in the Emergency Unit (UGD),*
- g) *Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,*
- h) *Dental care,*
- i) *Rehabilitation tools to restore the function of organs,*



- j) Alat-alat cangkok/transplantasi,
- k) Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l) Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m) Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n) Terapi kejiwaan,

- j. Graft / transplant tools,*
- k. Heart related medical devices,*
- l. Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),*
- m. Special plastic surgery due to occupational accidents,*
- n. Psychiatric therapy,*

## PROGRAM PENSIUN

PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24. Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Bab XI Pasal 50 tentang Penghargaan Pensiun.

Bagi Pegawai tugas karya dari PT PLN (Persero), ketentuan pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) menanggung liabilitas imbalan pasca kerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan, dan penghargaan purna jabatan, dan pemeliharaan kesehatan, serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi Pegawai yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero). Selama Pegawai diperbantukan bekerja di PLN Enjiniring, Perusahaan wajib membayar iuran program pensiun kepada PT PLN (Persero) berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 332.K/010/DIR/2003. Iuran yang dibayar Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

## RETIREMENT PROGRAM

*PLN Enjiniring regulates the Employee Pension Program in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring Employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare for the Employees entering the MPP period, PLN Enjiniring provides after-service training. It is expected that with the provision of this training, employees can prepare themselves in retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are compensated. Employees are included in the Old Age Insurance Program (JHT), which is Old Age Insurance Compensation in accordance with applicable Labor Law and PSAK 24. The compensation provided by the Company refers to Company Regulation Number 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Chapter XI Article 50 concerning Pension Awards.*

*For employees of work assignments from PT PLN (Persero), the pension provision refers to the provisions that apply to PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) bears post-employment benefits liabilities including other pension benefits in the form of severance pay, long service awards and compensation, additional income allowances, and post-service awards, and health care, as well as providing a defined benefit pension plan for seconded employees. This pension program is managed by the PLN (Persero) Pension Fund. As long as an employee is employed to work at PLN Enjiniring, the Company is obliged to pay pension plan contributions to PT PLN (Persero) based on the decision letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 332.K / 010 / DIR / 2003. Contributions paid by the Company are recognized as expenses in the current year, because the Company has no legal or constructive obligation to pay further contributions.*



## PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020.

PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

## SURVEI BUDAYA

Rancangan Program dan Sasaran Budaya Perusahaan dirumuskan dalam Roadmap Penguatan Budaya Perusahaan Tahun 2020-2024 yang telah disusun mengacu kepada Visi maupun Aspirasi PLN Group 2024. Implementasi Program Budaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 difokuskan pada Tata Nilai AKLAK, yaitu tata nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan diselaraskan ke perusahaan BUMN. Untuk mendorong komunikasi dan internalisasi implementasi

## MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

*PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.*

*PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Enjiniring employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020.*

*PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.*

## CULTURAL SURVEY

*The Program Design and Corporate Culture Goals are formulated in the Roadmap for Strengthening Corporate Culture for the Year 2020-2024 which has been prepared referring to the Vision and Aspirations of the PLN Group 2024. The implementation of the Cultural Program that has been implemented in 2020 is focused on the AKLAK Values, namely the values that have been set by the Ministry of SOEs and aligned to state-owned companies. To encourage communication*



Budaya, ditetapkan Ranger Budaya Perusahaan yang merupakan gabungan pejabat struktural dan fungsional. Dalam mengevaluasi kegiatan budaya dilakukan metode survei lewat kuisisioner serta survei tanya jawab/diskusi melalui site visit yang dilakukan secara online. PLN Pusat sebagai pengelola program budaya perusahaan akan mengevaluasi dan memantau progress dan menilai implementasi di PLN Enjiniring. Site Visit ke-3 yang terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2021, PLN Enjiniring mendapatkan hasil exceeding artinya passing grade penilaian budaya PLN Enjiniring pada kategori angka 66-80. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa faktor yang harus ditingkatkan dalam implementasi budaya tersebut.

*and internalization of the implementation of Culture, a Corporate Culture Ranger is appointed which is a combination of structural and functional officials. In evaluating cultural activities, a survey method was carried out through questionnaires and a question and answer survey/discussion through site visits conducted online. PLN Central as the manager of the corporate culture program will evaluate and monitor progress and assess implementation at PLN Enjiniring. The 3rd Site Visit which was last carried out in June 2021, PLN Enjiniring received exceeding results, meaning that the passing grade of PLN Enjiniring's cultural assessment was in category numbers 66-80. These results indicate that there are still several factors that must be improved in the implementation of the culture.*

## KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil analisis melalui *site visit* dan survei yang dilakukan PLN Pusat, terdapat kekuatan, perbaikan dan faktor program budaya PLN Enjiniring, sebagai berikut :

Hal-hal yang harus dipertahankan dan menjadi kekuatan Program Budaya PLN Enjiniring:

1. Keterlibatan *Ranger Master, Ranger Leader* dan *Ranger* yang aktif dalam implementasi program budaya di PLN Enjiniring,
2. Implementasi program PLN 1 yang sudah berjalan dengan baik, karena telah melibatkan seluruh unsur Pegawai yang dilakukan secara rutin dan konsisten,
3. Pemahaman tata nilai dan budaya oleh Pegawai PLN Enjiniring yang sangat baik serta menjadi pedoman dalam perilaku di aktivitas maupun pekerjaan sehari-hari,
4. Secara umum pencapaian kinerja PLN Enjiniring tercapai dengan upaya mengimplementasi program PLN 1, 2, 3.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam Program Budaya PLN Enjiniring:

1. Diharapkan metode enforcement/dukungan yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dapat secara konsisten dilaksanakan untuk mengawal dan menjaga jalannya program PLN 2 dan 3,

## CONCLUSION OF SURVEY RESULTS

*From the results of the analysis through site visits and surveys conducted by PLN, there are strengths, improvements and factors for the PLN Enjiniring cultural program, as follows:*

*Things that must be maintained and become the strength of PLN Enjiniring Cultural Program:*

1. *The Ranger Master, Ranger Leader and Ranger involvement who are actively implementing the PLN Enjiniring's cultural program,*
2. *The implementation of the PLN 1 program that has been running well, because of the involvement of all employees elements and routinely and consistently carried out,*
3. *Excellent understanding of values and culture by PLN Enjiniring Employees and become a guideline in behavior in daily activities and work,*
4. *In general, the PLN Enjiniring performance achievement was achieved by implementing the PLN 1, 2, 3 program.*

*Things that need to be improved and improved in the PLN Enjiniring Cultural Program:*

1. *It is hoped that the enforcement/support method that has been running well can continue to be consistently implemented to oversee and maintain the running of the PLN 1,2 and 3 programs,*



2. Tetap konsisten melakukan refreshment program yang diluar kebiasaan sehingga diharapkan dari kegiatan tersebut bisa didapatkan perspektif baru,
3. Perlunya program recognition yang harus dilakukan oleh Manajemen PLN Enjiniring kepada para pegawai yang memberikan kontribusi lebih terhadap PLN Enjiniring.

2. Continue to consistently carry out refreshment programs that are out of the ordinary so that it is hoped that from these activities new perspectives can be obtained,
3. The need for a recognition program that must be carried out by PLN Enjiniring Management for employees who contribute more to PLN Enjiniring.

## PEMBINAAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan *grade*. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/ atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa *grade* yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan *grade* melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pembinaan karir terdiri dari pembinaan profesi dan pembinaan jabatan. Profesi adalah mengacu pada ketentuan tentang pohon profesi atau nama profesi, dimana belum diterapkan di PLN Enjiniring. Sedangkan jabatan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, dimana pembinaannya terdiri dari promosi, rotasi, dan demosi.

Promosi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih tinggi. Rotasi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki

## DEVELOPMENT OF COMPETENCY AND CAREER

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is required to provide guidance in terms of competency and career development for employees, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PLN Enjiniring has the provisions in Decision Letter of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Competency development consists of competency level and grade development. The competency level is based on the field of science, experience, and / or the ability of employees to develop competencies in accordance with job requirements. Each competency level consists of several grades that indicate the level of mastery of individual competencies at a certain level of competency. The level of competency and grade is inherent in the Employee, not the Position.

Career development consists of professional development and position development. Profession is referring to the provisions regarding the professional tree or the profession name, which has not been applied in PLN Enjiniring. While the position consists of structural positions and functional positions, where the development consists of promotion, rotation, and demotion.

Job promotion is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and a higher level of competency. Position rotation is a transfer of duties from one position to another that has the requirements



persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang sama. Demosi merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih rendah. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang memenuhi persyaratan pembinaan jabatan.

*of the Position Competency Requirement (KKJ) and the same level of competency. Demotion is a shift of assignment from one position to another that has a requirement of Position Competency Requirement (KKJ) and a lower level of competency. The company provides equal opportunities for all employees who meet the requirements for coaching positions.*



## PROFIL KARYAWAN

## EMPLOYEE PROFILE



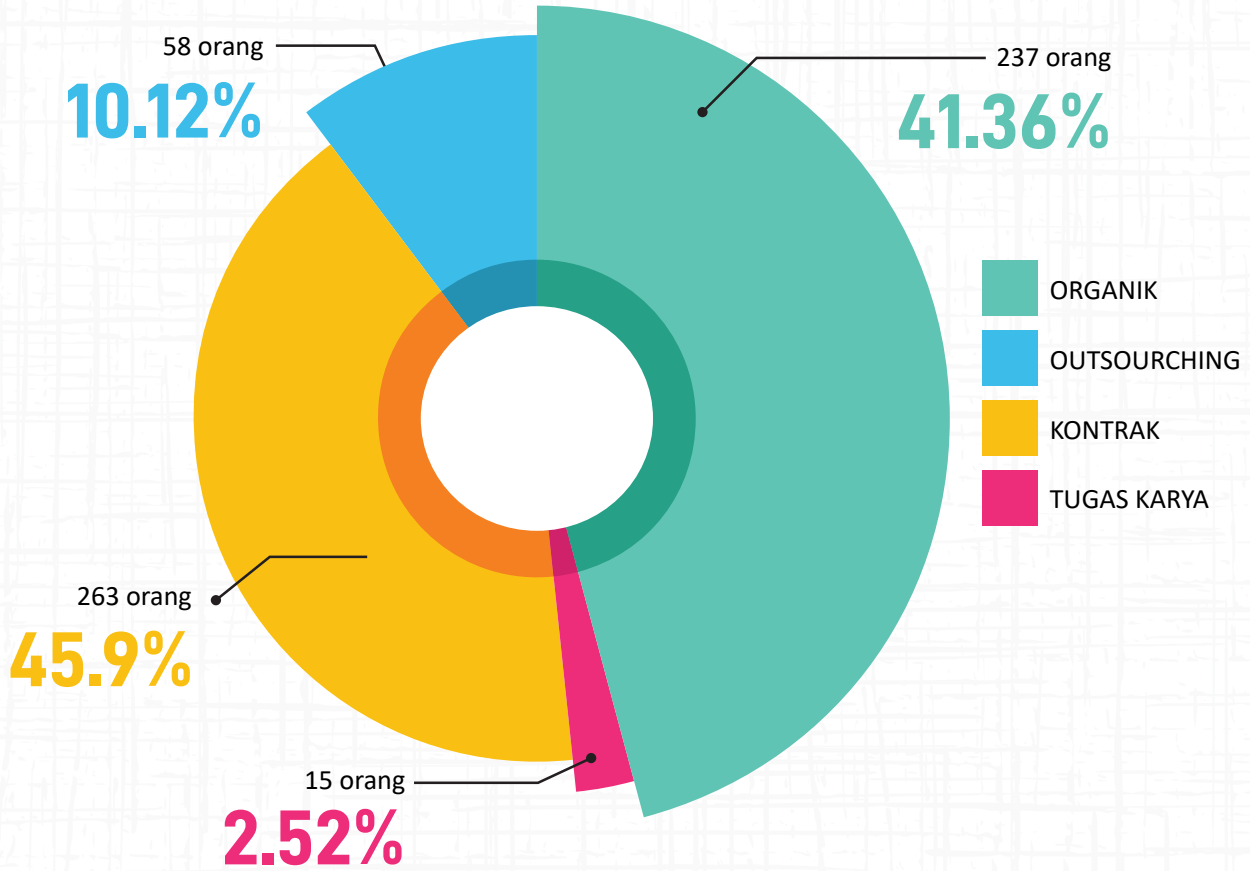
## Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition Based on Civil Service Status

TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN  
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS

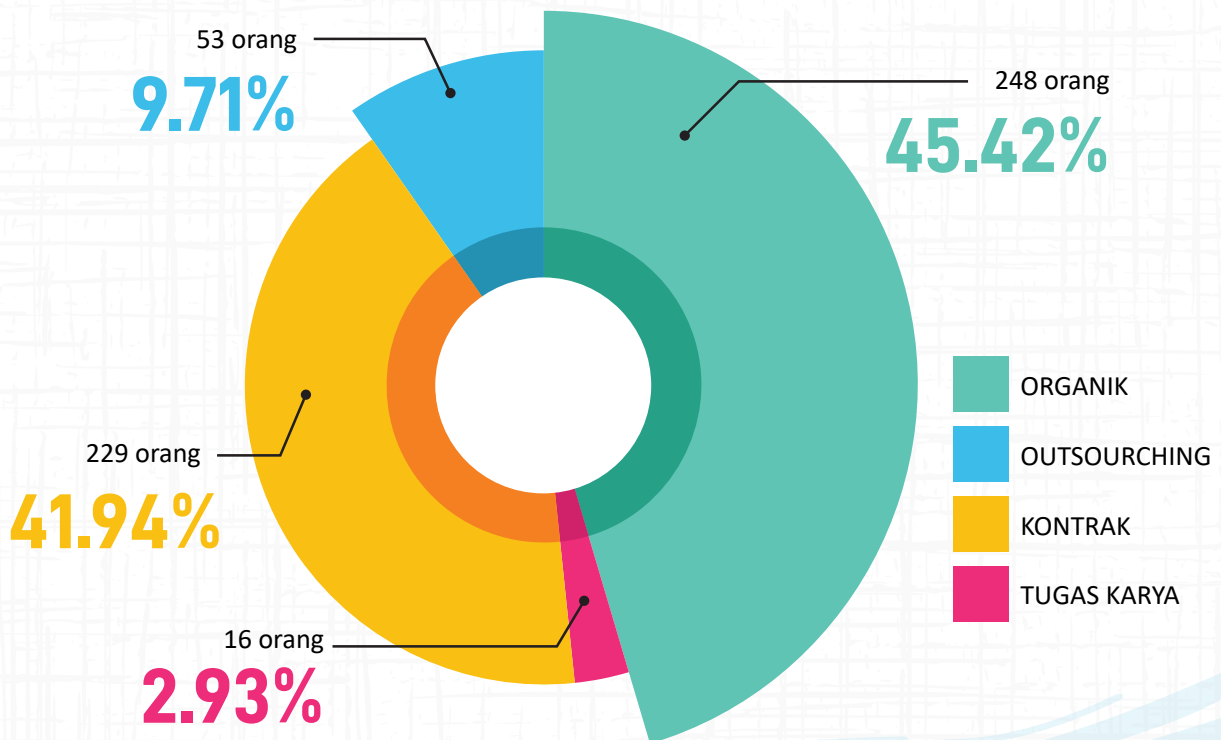
Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>						Perubahan <i>Change</i>	Perubahan <i>Change</i>
	Tahun 2022 <i>Year 2022</i>	Tahun 2021 <i>Year 2021</i>	Tahun 2020 <i>Year 2020</i>	Tahun 2022 <i>(Person) (%)</i>	Tahun 2021 <i>(Person) (%)</i>	Tahun 2020 <i>(Person) (%)</i>		
Organik <i>Organic</i>	248	237	306	45.42%	41.36%	41.35%	11	3.59%
Tugas Karya <i>Work Assignments</i>	16	15	10	2.93%	2.62%	1.35%	1	10.00%
Kontrak <i>Contract</i>	229	263	365	41.94%	45.90%	49.32%	-34	-9.32%
Tenaga Alih Daya <i>Outsourcing</i>	53	58	59	9.71%	10.12%	7.97%	-5	-8.47%
<b>TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>573</b>	<b>740</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-27</b>	<b>-4.19%</b>



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2021  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2021



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2022  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2022





Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan status kepegawaian secara jumlah didominasi oleh pegawai Organik, diikuti oleh karyawan kontrak (PKWT), karyawan outsourcing, dan pegawai Tugas Karya. Pada tahun 2022, komposisi pegawai Organik sebesar 45,42%, karyawan kontrak (PKWT) sebesar 41,94%, karyawan outsourcing sebesar 9,71%, dan pegawai tugas karya sebesar 2,93%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

Pada tahun 2022, jumlah karyawan dengan status PKWT dan Outsourcing mengalami penurunan karena mengundurkan diri dan habis masa kontrak proyeknya. Sementara pegawai Organik mengalami penambahan dikarenakan adanya pengembalian enjinir muda dengan cara dari masa tugas karya di unit-unit PLN. Selain itu, terdapat beberapa pegawai Organik yang pensiun dan mengundurkan diri. Sedangkan pegawai Tugas Karya mengalami kenaikan karena adanya penambahan Tugas Karya untuk mengisi formasi jabatan struktural yang kosong dan mengisi formasi jabatan sebagai enjinir berpengalaman.

*The composition of PLN Engineering employees based on employment status is numerically dominated by Organic employees, followed by contract employees (PKWT), outsourcing employees, and Job Task employees. In 2022, the composition of Organic employees will be 45.42%, contract work employees (PKWT) will be 41.94%, outsourced employees will be 9.71%, and work assignment employees will be 2.93%. The large dominance of contract employees in PLN Enjiniring caused by the company's business processes that engaged in engineering consulting services and construction supervision, so that the need for skilled workers is very high, based on the project, but a certain working period. This is conducted as a corporate strategy in streamlining staffing costs by not maintaining the workforce that is used only at certain times.*

*In 2022, the number of employees with PKWT and Outsourcing status will decrease due to resignations and project contracts expiring. Meanwhile, Organic employees experienced an increase due to the return of young engineers from work assignments in PLN units. Apart from that, there are several Organic employees who have retired and resigned. Meanwhile, Karya Assignment employees experienced an increase due to the addition of Karya Assignments to fill vacant structural positions and to fill positions as experienced engineers.*



## Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

*Employee Composition Based on Organization Position Levels*

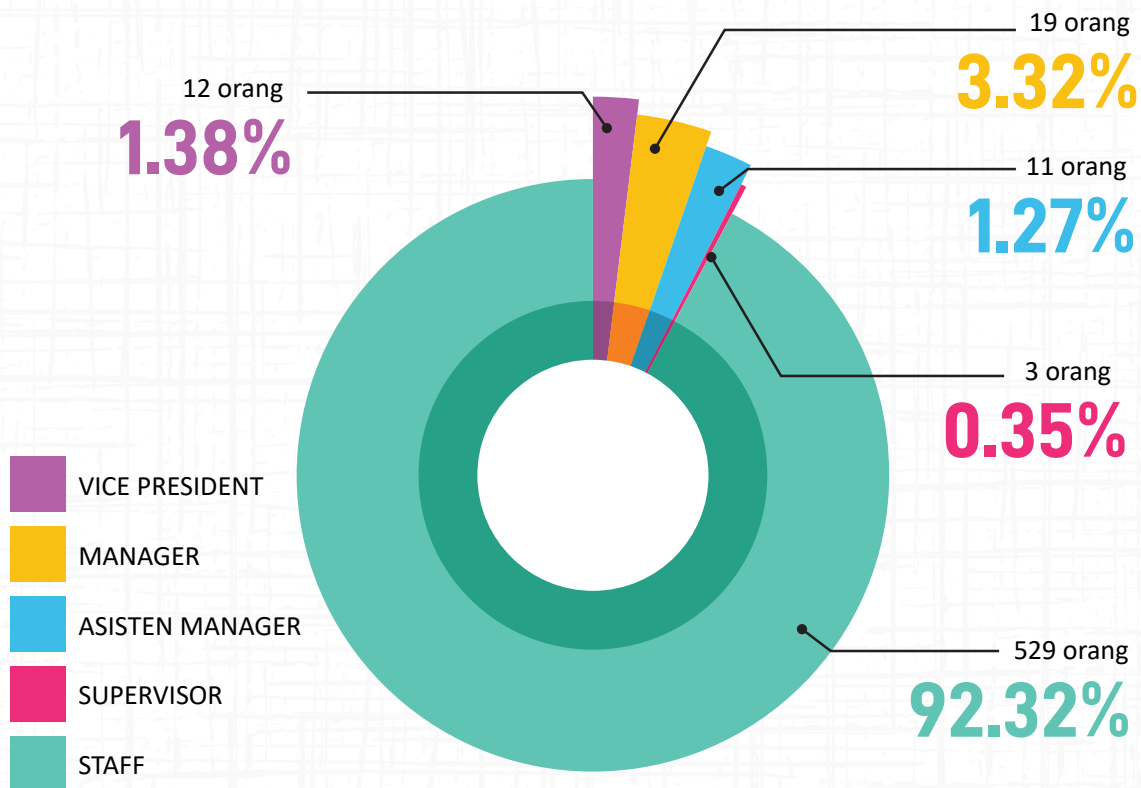


**TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI**  
**TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATION POSITION LEVELS**

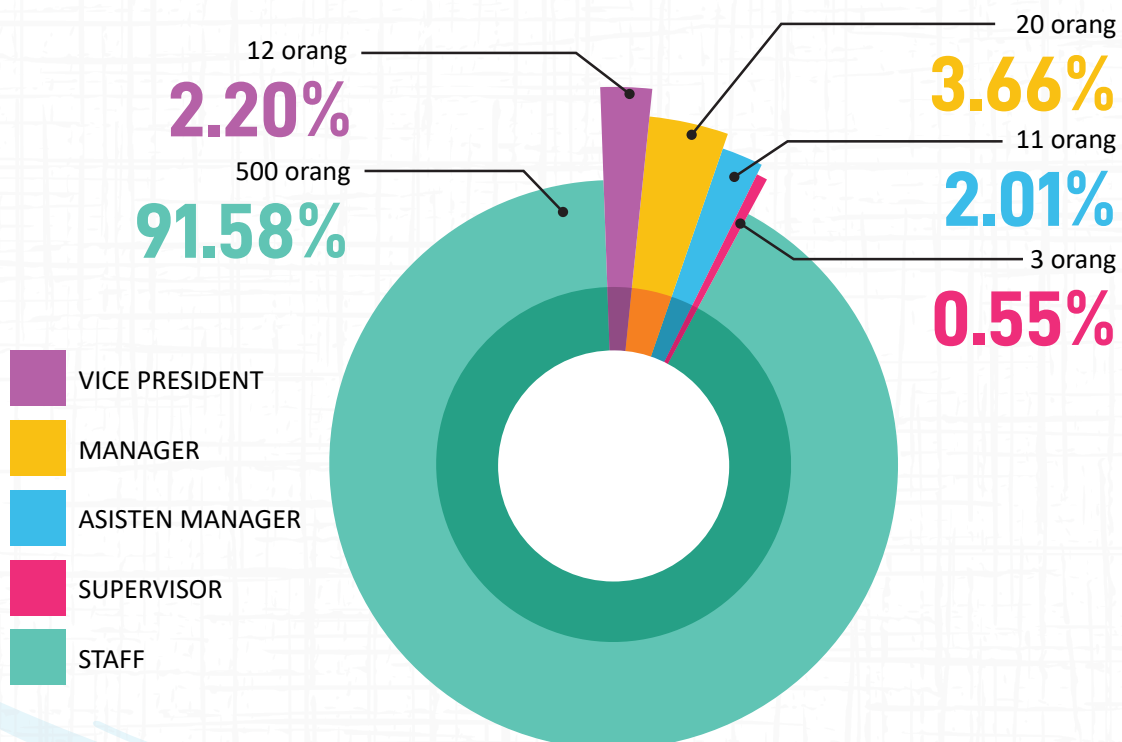
Level Jabatan Organisasi	Jumlah Pegawai Number of Employees					
	Tahun 2022 (orang) (%)	Tahun 2021 (orang) (%)	Tahun 2020 (orang) (%)	Perubahan (orang)	Perubahan (%)	
<i>Organizational Position Level</i>	<i>Year 2022 (Person) (%)</i>	<i>Year 2021 (Person) (%)</i>	<i>Year 2020 (Person) (%)</i>	<i>Change (Person)</i>	<i>Change (%)</i>	
Vice President	12 2.20%	11 1.92%	12 1.62%	1	8.33%	
Manajer Sub Bidang	20 3.66%	19 3.32%	19 2.57%	1	5.26%	
Assistant Manajer	11 2.01%	12 2.09%	12 1.62%	-1	-8.33%	
Supervisor	3 0.55%	2 0.35%	3 0.41%	1	33.33%	
Staf Fungsional	500 91.58%	529 92.32%	694 93.78%	-29	-4.18%	
<b>TOTAL</b>	<b>546 100%</b>	<b>573 100%</b>	<b>740 100%</b>	<b>-27</b>	<b>34.42%</b>	



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2021  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2021



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2022  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2022





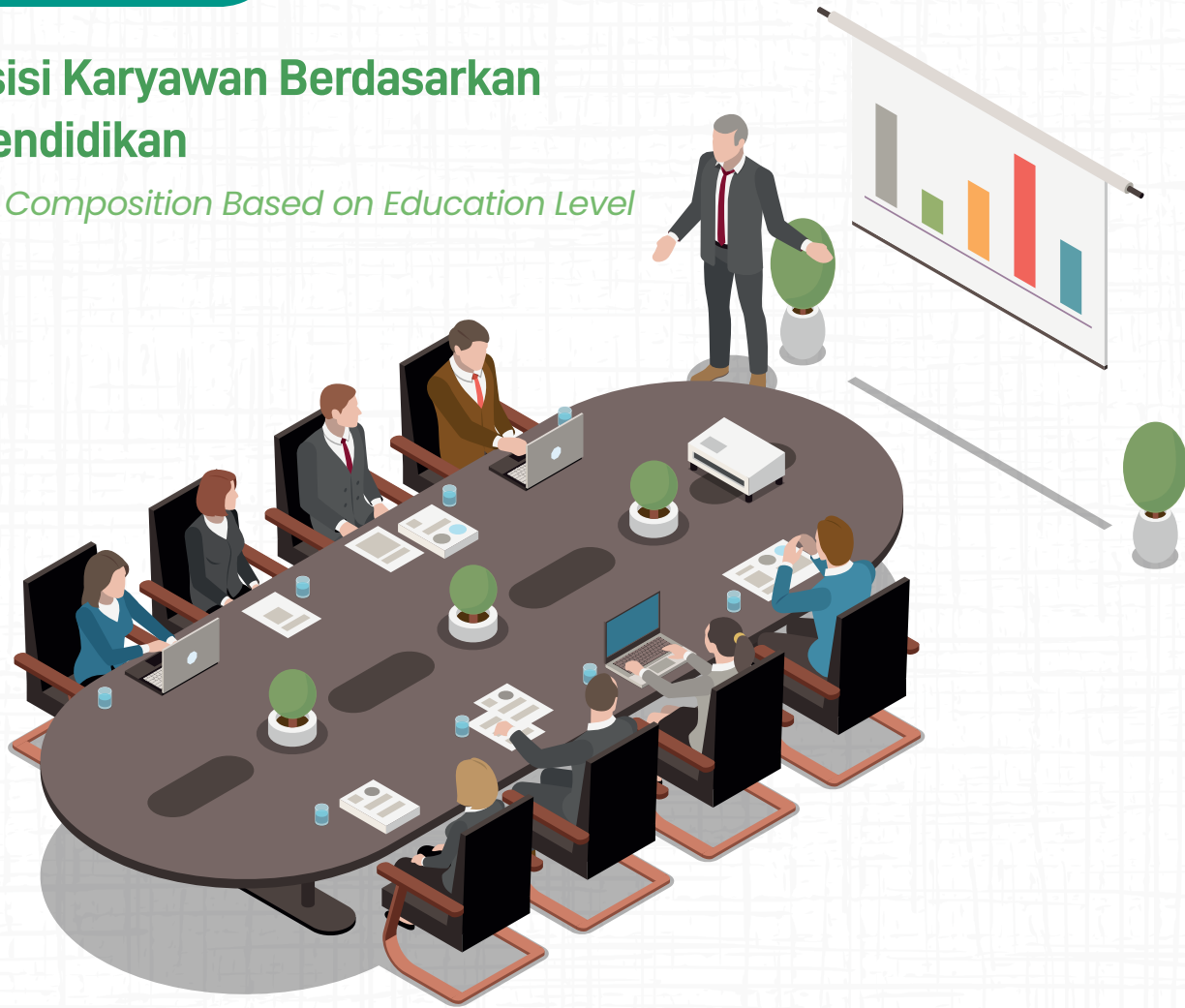
Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level organisasi secara jumlah didominasi oleh level Staf Fungsional yaitu sebesar 91,58%, selanjutnya diikuti level Manajer Sub Bidang sebesar 3,66%, Vice President sebesar 2,20%, Assistant Manajer sebesar 2,01%, dan Supervisor 0,55%. Pada tahun 2022, terdapat pengurangan jumlah karyawan pada level staf fungsional sebesar 29 orang, yang terdiri dari karyawan PKWT, karena selesainya masa kontrak proyek dan mengundurkan diri, serta pegawai Organik karena pensiun dan mengundurkan diri. Selain itu terdapat pengurangan jumlah Assistant Manajer dikarenakan promosi menjadi Manajer Sub Bidang.

*The composition of PLN Engineering employees based on organizational level is dominated by the Functional Staff level at 91.58%, followed by the Sub-Sector Manager level at 3.66%, Vice President at 2.20%, Assistant Manager at 2.01%, and Supervisor 0.55%. In 2022, there will be a reduction in the number of employees at the functional staff level of 29 people, consisting of PKWT employees, due to the completion of the project contract period and personal failure, as well as Organic employees due to retirement and personal failure. Apart from that, there is a reduction in the number of Assistant Managers due to promotions to Sub-Field Managers.*



## Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level

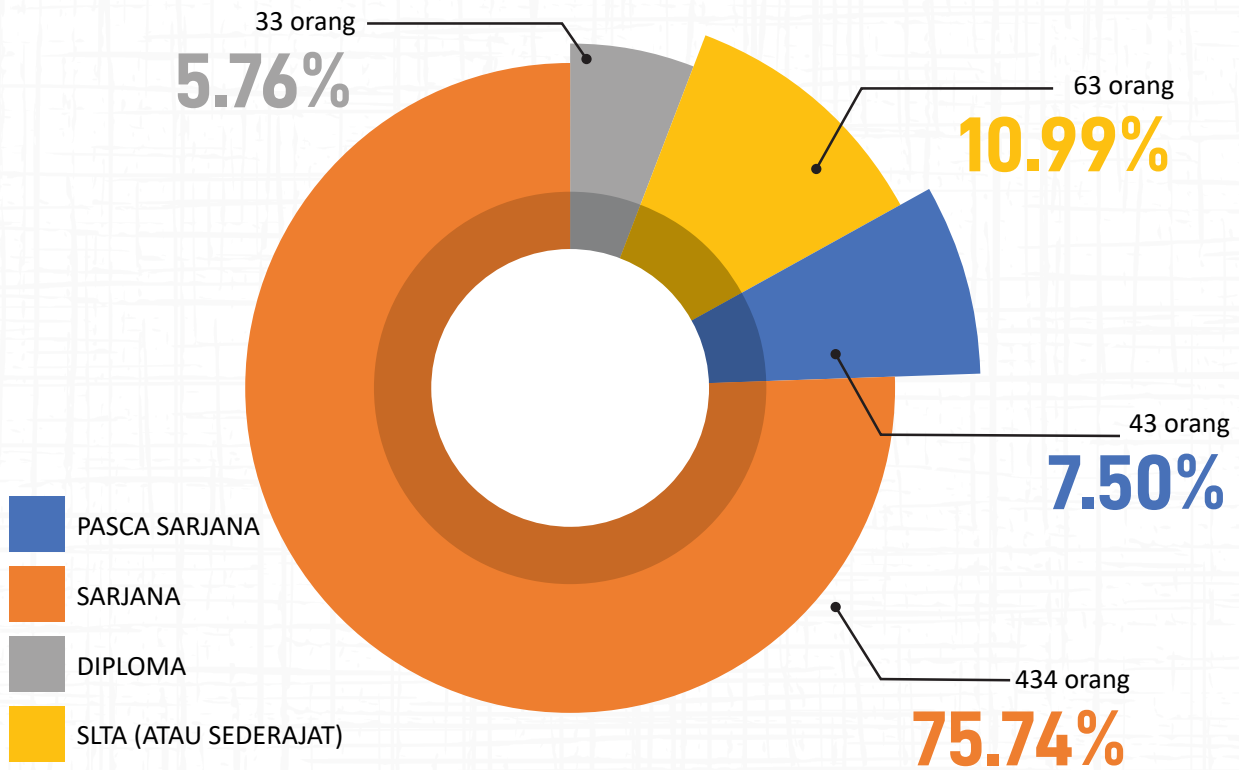


**TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN**  
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

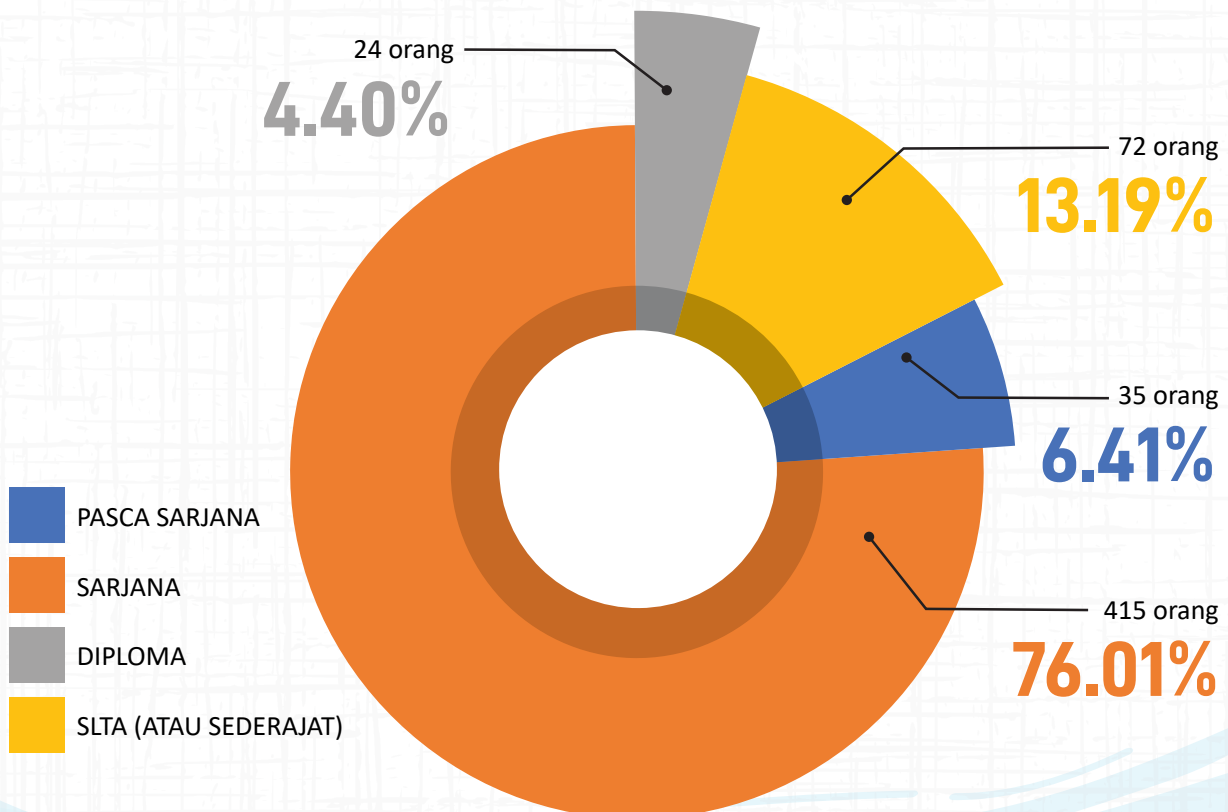
Level Pendidikan	Jumlah Pegawai Number of Employees					Perubahan (orang)	Perubahan (%)
	Tahun 2022 (orang) (%)	Tahun 2021 (orang) (%)	Tahun 2020 (orang) (%)	Perubahan (orang)	Perubahan (%)		
Education Level	Year 2022 (Person) (%)	Year 2021 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Change (Person)	Change (%)		
Pasca Sarjana Postgraduate	35 6.41%	43 7.50%	45 6.08%	-8	-17.78%		
Sarjana Bachelor	415 76.01%	434 75.74%	582 78.65%	-19	-3.26%		
Diploma Diploma	24 4.40%	33 5.76%	73 9.86%	-9	-12.33%		
SLTA (atau sederajat) High School (or equivalent)	72 13.19%	63 10.99%	40 5.41%	9	22.50%		
<b>TOTAL</b>	<b>546</b> <b>100%</b>	<b>573</b> <b>100%</b>	<b>740</b> <b>100%</b>	<b>-27</b>	<b>-10.87%</b>		



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2021  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2021



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2022  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2022





Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level pendidikan didominasi oleh karyawan dengan level pendidikan Sarjana, yaitu berjumlah 76,01%, selanjutnya level pendidikan SLTA (sederajat) sebesar 13,19%, level Pasca Sarjana sebesar 6,41%, dan level Diploma sebesar 4,40%. Jumlah tenaga kerja di seluruh level pendidikan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan perubahan komposisi karyawan mulai dari Tugas Karya, Organik, karyawan kontrak (PKWT), sampai dengan outsourcing.

*The composition of PLN Engineering employees based on educational level is dominated by employees with a Bachelor's level of education, namely 76.01%, followed by a high school (equivalent) education level of 13.19%, a Postgraduate level of 6.41%, and a Diploma level of 4.40%. The number of workers at all levels of education has changed compared to 2021 due to changes in employee composition ranging from Work Tasks, Organic, contract employees (PKWT), to outsourcing.*

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

### Employee Composition by Age



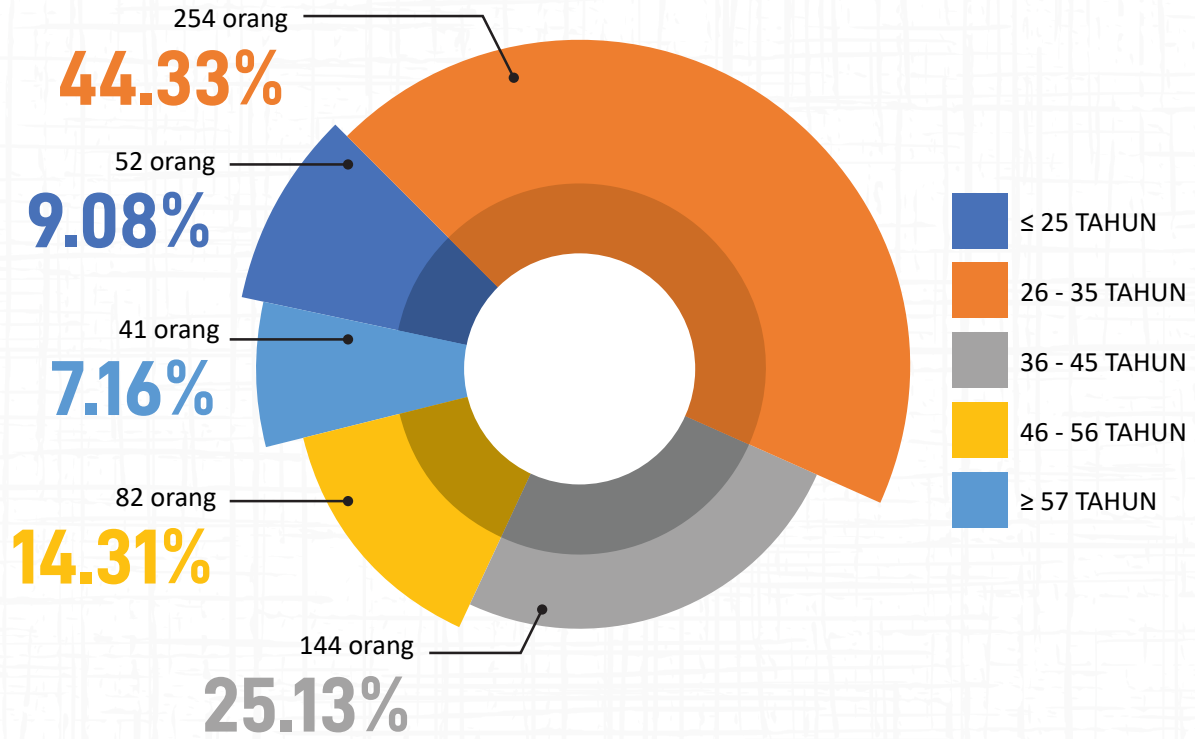
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

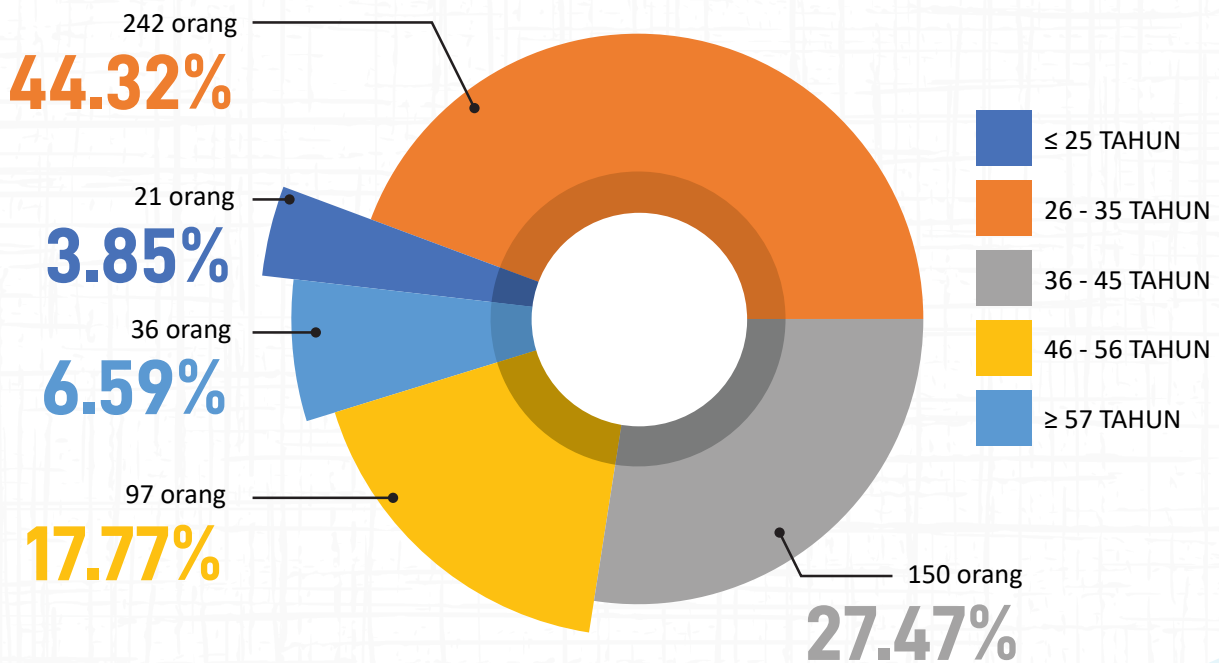
Usia Age	Jumlah Pegawai Number of Employees						Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2022 (orang) (%)		Tahun 2021 (orang) (%)		Tahun 2020 (orang) (%)			
	Year 2022 (Person) (%)	Year 2021 (Person) (%)	Year 2021 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)	Year 2020 (Person) (%)		
≤ 25 tahun ≤ 25 years	21	3.85%	52	9.08%	106	14.32%	-31	-29.25%
26 - 35 tahun 26 - 35 years	242	44.32%	254	44.33%	308	41.62%	0	0.00%
36 - 45 tahun 36 - 45 years	150	27.47%	144	25.13%	158	21.35%	6	3.80%
46 - 56 tahun 46 - 56 years	97	17.77%	82	14.31%	91	12.30%	15	16.48%
≥ 57 tahun ≥ 57 years	36	6.59%	41	7.16%	77	10.41%	-5	-6.49%
<b>TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>573</b>	<b>100%</b>	<b>740</b>	<b>100%</b>	<b>-27</b>	<b>-19.35%</b>



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA TAHUN 2021  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE IN 2021



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA TAHUN 2022  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE IN 2022





Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan usia, paling banyak berada pada usia produktif yaitu 26-35 tahun sebesar 44,32%, selanjutnya diikuti oleh kelompok usia 36-45 tahun sebesar 27,47%, kelompok usia 46-56 tahun sebesar 17,77%, kelompok usia di atas 56 tahun yaitu sebesar 6,59%, dan terakhir kelompok usia di bawah 25 tahun sebesar 3,85%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan jumlah dan persentase pada kelompok usia 36-45 tahun dan kelompok usia 46-56 tahun. Sementara yang lainnya terjadi penurunan jumlah pada kelompok usia dibawah 25 tahun, kelompok usia 26-35 tahun, dan kelompok usia di atas 56 tahun.

*The composition of PLN Engineering employees based on age, most are in the productive age, namely 26-35 years at 44.32%, followed by the 36-45 year age group at 27.47%, the 46-56 year age group at 17.77% , the age group over 56 years is 6.59%, and finally the age group under 25 years is 3.85%. When compared with the previous year, there was a slight increase in the number and percentage in the 36-45 year age group and the 46-56 year age group. Meanwhile, the number of others decreased in the age group under 25 years, the age group 26-35 years, and the age group over 56 years.*

## Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

*Employee Composition by Gender*

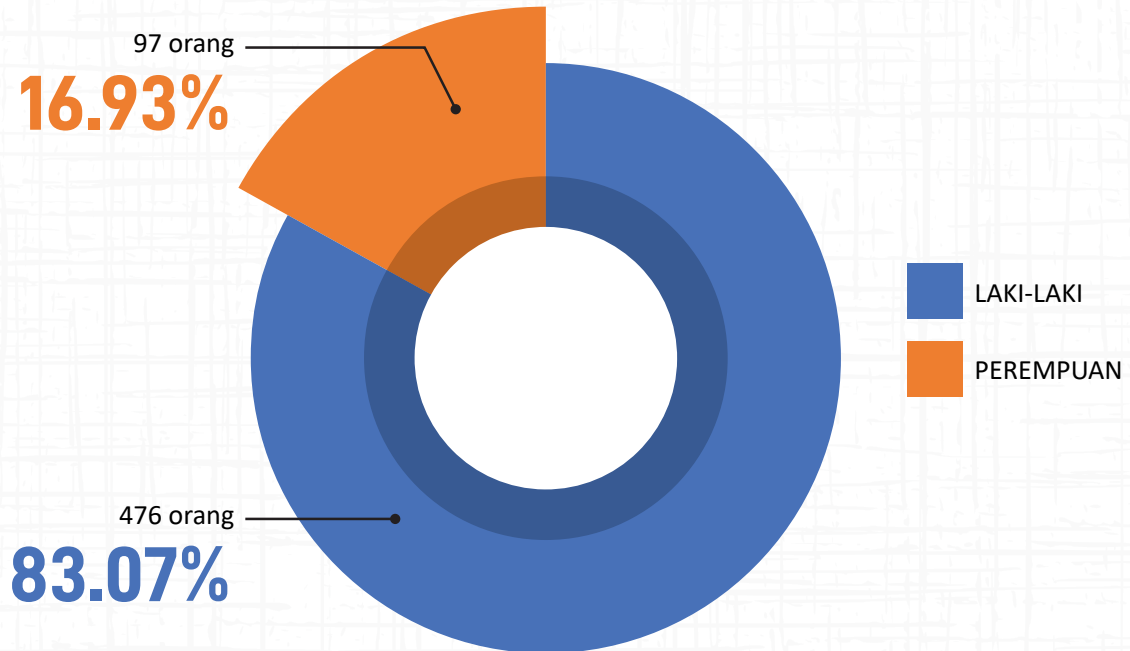


**TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER**  
**TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER**

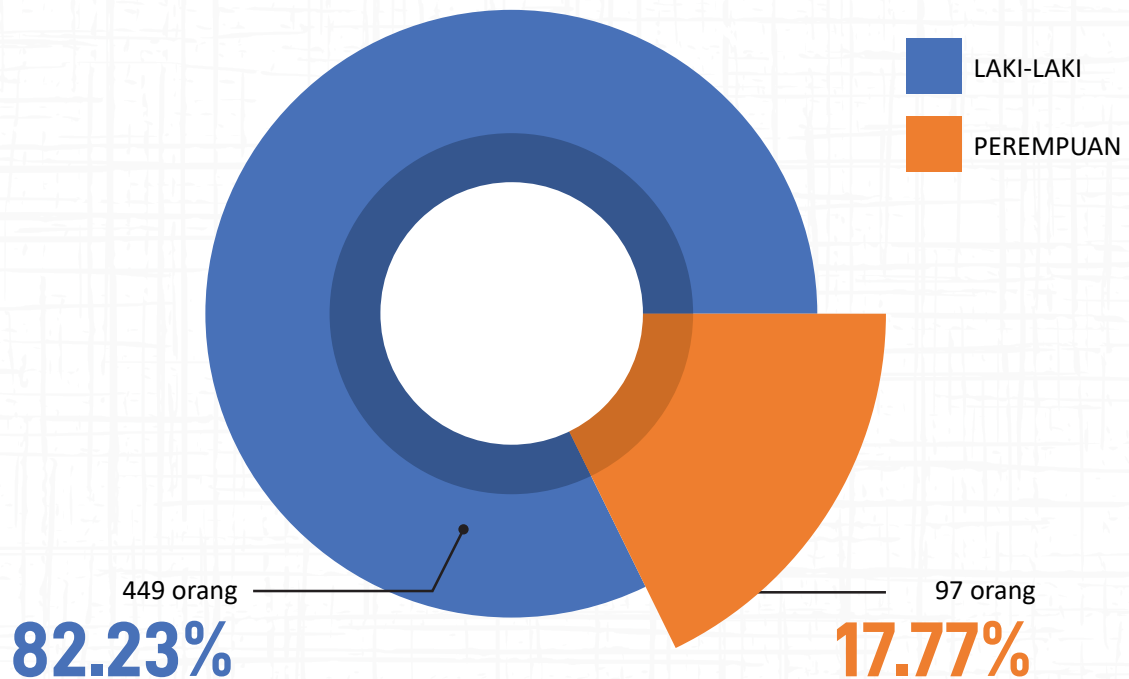
Gender	Number of Employees					
	Year 2022		Year 2021		Year 2020	
	(Person)	(%)	(Person)	(%)	(Person)	(%)
Male	449	82.23%	476	83.07%	592	80.00%
Female	97	17.77%	97	16.93%	148	20.00%
<b>TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>573</b>	<b>100%</b>	<b>740</b>	<b>100%</b>



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2021  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2021



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2022  
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2022





Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan gender didominasi oleh karyawan laki-laki yaitu sebesar 82,23%, sedangkan karyawan perempuan sebesar 17,77%. Secara jumlah, terjadi penurunan pada jumlah karyawan laki-laki, sementara jumlah karyawan perempuan tetap. Penurunan secara umum terjadi karena penurunan jumlah karyawan PLN Enjiniring dibanding tahun 2021. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama bagi calon karyawan laki-laki maupun perempuan pada saat pelaksanaan rekrutmen, namun berdasarkan bidang usaha dan jenis pekerjaan maka jumlah karyawan lebih banyak didominasi oleh karyawan laki-laki.

## BIAYA TENAGA KERJA

Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan yang dikeluarkan oleh PLN Enjiniring pada tahun 2022 mencapai Rp 104.632.473.509. Besarnya biaya gaji dan kesejahteraan karyawan ini menurun sebesar 6% atau sebesar Rp 6.586.473.016 jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp 111.218.946.525. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka Formasi Tenaga Kerja pada RKAP 2022, yaitu sebesar 287 orang pegawai. Menurun sebanyak 35 orang dari angka Formasi Tenaga Kerja pada RKAP 2021 sebesar 322 orang, dimana berpengaruh terhadap penurunan realisasi pembayaran insentif kinerja kepada Pegawai. Selain itu terdapat penurunan realisasi pembayaran tunjangan hari raya karena penambahan Pegawai terjadi di semester 2 tahun 2022, sementara hari raya terjadi pada semester 1 tahun 2022. Serta tidak adanya realisasi perjalanan dinas karena mutasi jabatan.

## TINGKAT TURNOVER PEGAWAI

Tingkat turnover Pegawai menunjukkan *level of engagement* Pegawai dalam sebuah perusahaan, dimana semakin rendah tingkat *turnover* Pegawai menunjukkan bahwa Pegawai memiliki *level of engagement* yang tinggi terhadap perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat *turnover* karyawan pada PLN Enjiniring relatif fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 terjadi turnover Pegawai sebesar 1,71% dan 1,06%. Sementara pada tahun 2020 tingkat turnover menjadi 0%. Pada tahun 2021 terjadi turnover Pegawai tertinggi, yaitu 2,11%, dimana tercatat

*The composition of PLN Enjiniring employees based on gender is dominated by male employees, namely 82.23%, while female employees are 17.77%. In terms of numbers, there has been a decline in the number of male employees, while the number of female employees has remained constant. The general decline occurred due to a decrease in the number of PLN Enjiniring employees compared to 2021. PLN Enjiniring provides equal opportunities for male and female prospective employees during recruitment, but based on the business field and type of work, the number of employees is dominated by male employees.*

## LABOR COSTS

*Employee Salary and Welfare Costs incurred by PLN Enjiniring in 2022 reach amounted to Rp. 104.632.473.509 The amount of salary and welfare costs of these employees decreased by 6% or as much as Rp. 6.586.473.016 when compared to 2022 costs, which amounted to Rp. 111.218.946.525. This caused by the decreasing of the 2022 RKAP Work Force Formation by 287 personel. Decrease by 35 from the 2021 RKAP Work Force Formation by 322 ersonel, which affected to the decrease in the performance incentive payments realization to the employees. In addition, there was a decrease in the holiday payment allowances realization because additional employees occurred in 2nd semester of 2022, while holidays occurred on the 1st semester of 2022. As well as the absence of realization of official travel due to position transfers.*

## TURNOVER OF EMPLOYEES

*Employee turnover rate shows the level of employee engagement in a company, where the lower employee turnover rate shows that employees have a high level of engagement towards the company. During the last 5 (five) years the employee turnover rate at PLN Enjiniring relatively volatile. In 2018-2019 the employee turnover rate 1.71% and 1.06%. Meanwhile, in 2020 the turnover rate became 0%. The 2021 became the highest year for employee turnover where 5 personel or 2.11% resigning. Furthermore, in 2021 there is 4 organic personel come*



ada 5 orang Pegawai keluar/resign. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 4 orang pegawai Organik pensiun dan 60 orang pegawai Organik melaksanakan Tugas Karya. Sementara pada tahun 2022 tingkat turnover kembali turun menjadi 0.81%. Jumlah turnover didasarkan atas jumlah Pegawai dengan status kepegawaian Organik atau Pegawai tetap dan dapat dilihat pada tabel di bawah.

to their retirement phase and 60 organic personnel assigned as a commisioned worker. While in 2022 the turnover rate are decreasing on 0.81% rate. The turnover rate above is based on the number of Employees with Organic employment status or permanent employee and can be seen in the table below.

Keterangan	Tahun					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah Pegawai di Awal Periode <i>Employee Number at the Beginning of year to date</i>	236	305	284	175	158	133
Jumlah Pegawai Masuk <i>New Employee</i>	19	1	23	115	25	25
Jumlah Pegawai Keluar ( <i>resign</i> ) <i>Resigning</i>	2	5	0	3	3	0
Jumlah Pegawai Keluar ( <i>tugas karya/tugas belajar</i> ) <i>Leave (Commisioned /Working Study)</i>	3	60	0	1	4	0
Jumlah Pegawai Keluar ( <i>pensiun</i> ) <i>Retired</i>	2	4	1	2	1	0
Jumlah Pegawai di Akhir Periode <i>Employee Number at the end of the year to date.</i>	248	237	306	284	175	158
<i>Turnover</i>	2	5	0	3	3	0
<b>% Turnover</b>	<b>0.81%</b>	<b>2.11%</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.06%</b>	<b>1.71%</b>	<b>0.00%</b>





# Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

*Good Corporate Governance*

**"Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan"**



## Penerapan Tata Kelola Perusahaan

### Implementation of Corporate Governance

Pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan Perseroan secara lebih baik antara lain dengan mendorong efisiensi pengelolaan Perseroan dan meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan serta menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau gratifikasi.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan untuk mewujudkan dan/atau mendorong nilai Perseroan (corporate value) dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk kelangsungan usaha (sustainability) Perseroan dalam jangka pendek dan jangka Panjang. Sehingga dalam memenuhi tuntutan perubahan perlu diimbangi dengan penerapan GCG secara berkesinambungan dan konsisten berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, etika. Perseroan melakukan penyempurnaan Panduan GCG dengan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal Perseroan agar terintegrasi dan mengikuti perkembangan regulasi GCG maupun best practice yang berlaku.

*The management of the Company based on the principles of GCG is basically an effort to make GCG as the rules and guidelines for company managers in carrying out their business activities. The application of GCG principles is currently very necessary so that the Company can survive and be resilient in the face of increasingly fierce competition. GCG is expected to be a means to better achieve the Company's goals, among others, by encouraging the efficiency of the Company's management and increasing budgetary discipline, utilizing supervision and inhibiting the practices of corruption, collusion and nepotism or gratification.*

*Good Corporate Governance (GCG) is a process and mechanism used by the Company to realize and/or promote corporate value by taking into account the interests of shareholders and stakeholders for the Company's business continuity in the long term, short and long term. So that in meeting the demands of change, it needs to be balanced with the implementation of GCG in a sustainable and consistent manner based on laws and regulations, morals, ethics. The Company made improvements to the GCG Guidelines by adjusting the Company's internal and external conditions so that they are integrated and follow the development of GCG regulations and applicable best practices.*

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### MAKSUD PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun maksud dari penerapan Tata Kelola Perusahaan ini adalah :

### PURPOSE, OBJECTIVES AND OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

#### PURPOSE OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

*The purposes of implementing this Corporate Governance are:*



1. Memaksimalkan keberadaan Perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen dan adil agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun lingkungan Perseroan.

1. *Maximizing the existence of the Company for shareholders by increasing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness so that the Company has strong competitiveness, both nationally and internationally.*
2. *Encouraging the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner, as well as empowering the functions and improving the performance of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders.*
3. *Encouraging shareholders, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations as well as awareness of the Company's social responsibility towards interested parties (stakeholders) and the environment Company.*

## TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah :

1. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham, bahwa Perseroan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan "return" yang wajar dan bernilai tinggi;
2. Mendorong terhadap pencapaian visi dan misi Perseroan;
3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumberdaya dan pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
4. Menciptakan nilai tambah Perseroan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan;
5. Mendorong terciptanya budaya kerja Perseroan ke arah yang lebih baik;
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

## PURPOSE OF IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The objectives of the Implementation of Good Corporate Governance are:

1. *Provide confidence to shareholders that the Company is managed properly and correctly with the aim of providing a reasonable and high-value "return";*
2. *Encouraging the achievement of the Company's vision and mission;*
3. *Encourage and support the development, resource management and risk management of the Company in a more prudent, accountable, and responsible manner in line with GCG principles;*
4. *Creating added value for the Company for shareholders and stakeholders;*
5. *Encouraging the creation of a better working culture for the Company;*
6. *Preventing irregularities in the management of the Company*



## SASARAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Adapun sasaran Penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah :

1. Terlaksananya sistem manajemen strategis yang handal, sehingga mampu merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan rencana strategis (strategic plan) Perseroan baik jangka pendek maupun jangka Panjang;
2. Adanya keterbukaan serta Komunikasi dua arah baik dengan regulator, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Berfungsinya dengan baik organ-organ pendukung kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perseroan, antara lain Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi, Internal Audit, Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, dan sebagainya;
4. Tegaknya komitmen dan aturan main dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang andal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;
6. Memastikan seluruh jajaran Perseroan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui punishment dan reward nya;
7. Tegaknya kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan melalui penerapan program CS yang tepat di area sekitar lingkungan Perseroan.

## DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan penerapan GCG, PLN Enjiniring menyadari bahwa Kebijakan GCG selain menjadi acuan yang wajib diterapkan oleh Perusahaan telah menjadi instrument yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan

## TARGETS FOR THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The targets for implementing good corporate governance are:

1. Implementation of a reliable strategic management system, so as to be able to formulate Vision, Mission, Objectives and Targets that are in line with the Company's strategic plan (strategic plan) both short term and long term;
2. Openness and two-way communication with regulators, shareholders and other stakeholders;
3. Well functioning of the supporting organs of the Company's internal control and development activities, including the Audit Committee, Risk Management Committee and GCG, Nomination and Remuneration Committee, Internal Audit, Risk Management, Corporate Secretary, and so on;
4. Upholding of commitments and rules of the game from ethical business practices;
5. Availability of human resources that are reliable, superior, professional and free from conflicts of interest;
6. Ensure that all levels of the Company know and are able to carry out their duties, obligations and responsibilities in accordance with applicable regulations and know the punishments and rewards;
7. Upholding concern for the surrounding community and environmental sustainability through the implementation of appropriate CS programs in the area surrounding the Company's environment.

## LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

In implementing the implementation of GCG, PLN Enjiniring realizes that the GCG Policy, apart from being a reference that must be applied by the Company, has become an instrument needed to ensure that the management of the company runs well in accordance with applicable regulations. Therefore,



menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Dasar penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara j.o. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara j.o Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

*the Company implements GCG at all levels and levels of the organization by referring to the provisions and regulations related to the implementation of GCG for the Company. The basis for implementing GCG in the Company refers to:*

1. *Law Number 8 of 1997 concerning Company Documents (Company Documents Law)*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption j.o Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (Corruption Law)*
3. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
4. *Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions;*
5. *Law number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;*
6. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Agencies j.o. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises ;*
7. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises j.o Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-04/MBU/06/2020 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises;*



8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha j.o Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  9. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
  10. Anggaran Dasar PT PLN Enjiniring beserta perubahannya;
  11. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017, tanggal 14 November 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring;
  12. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 02.006.K/DIR/PLNE/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
  13. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 28.002.K/DIR/PLNE/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kebijakan Umum Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan/Governance, Risk dan Compliance (GRC) di Lingkungan PLN Enjiniring;
  14. Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 12.002.K/DIR/PLNE/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
  15. Keputusan Direksi Nomor 01.007.K/DIR/PLNE/IV/2020 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko Untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PLN Enjiniring;
  16. Keputusan Direksi Nomor 10.001.K/DIR/PLNE/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Budaya Perusahaan.
8. *Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Business Entity Supervisory Board j.o Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
  9. *Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;*
  10. *Articles of Association of PT PLN Enjiniring and its amendments;*
  11. *Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017, dated November 14, 2017 concerning the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring;*
  12. *Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 02.006.K/DIR/PLNE/XII/2019 dated December 2, 2019 concerning Management of Conflicts of Interest within PT PLN Enjiniring;*
  13. *Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 28.002.K/DIR/PLNE/X/2019, October 28, 2019 regarding the General Policy for the Implementation of Risk Management and Compliance/Governance, Risk and Compliance (GRC) in the PLN Enjiniring Environment;*
  14. *Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 12.002.K/DIR/PLNE/XII/2019, December 12, 2019 regarding the Anti-Fraud Policy within PT PLN Enjiniring;*
  15. *Decision of the Board of Directors Number 01.007.K/DIR/PLNE/IV/2020 dated April 1, 2021 concerning the Mechanism of Preparation and Monitoring of Risk Studies for Activities and Draft Decisions within PT PLN Enjiniring;*
  16. *Decision of the Board of Directors Number 10001.K/DIR/PLNE/XII/2020 dated December 10, 2020 regarding Corporate Culture.*



## STRUKTUR GCG

### GCG STRUCTURE

#### ORGAN PERSEROAN

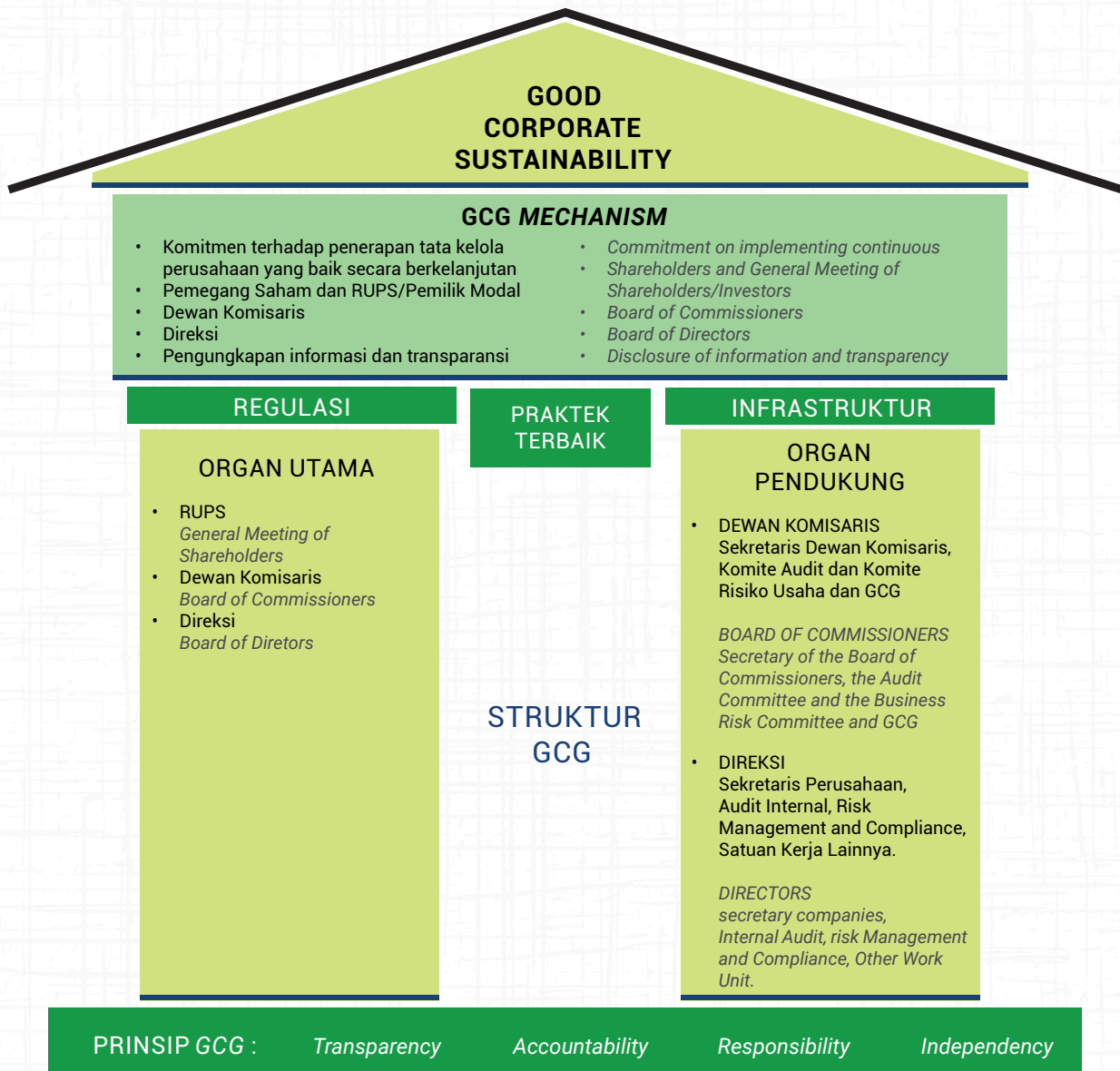
Organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Prinsip-prinsip GCG senantiasa disosialisasikan keseluruh elemen Perusahaan sebagai salah satu cara menyadarkan seluruh elemen Perusahaan akan nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai praktik GCG. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan. Berdasarkan asas-asas GCG, PLN Enjiniring mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG Organ Utama dan Organ Pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka Panjang. Komitmen Perusahaan terhadap penerapan GCG ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

#### COMPANY ORGANS

*The Company's organs, which consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, have an important role in the effective implementation of GCG. The Company's organs must carry out their functions in accordance with applicable regulations based on the principle that each organ has independence in carrying out its duties, functions and responsibilities solely for the benefit of the Company.*

*The principles of GCG are continuously socialized to all elements of the Company as a way to make all elements of the Company aware of the values that must be met in order to achieve GCG practices. The internalization of the various laws and regulations and guidelines above into the Company's internal policies is a commitment from the Board of Commissioners and Directors and all employees. Based on the principles of GCG, PLN Enjiniring has developed a GCG structure which includes GCG Main Organs and Supporting Organs to carry out GCG mechanisms in accordance with laws and regulations as well as existing best practices so as to create business continuity in the long term. The Company's commitment to the implementation of GCG is shown in the image below.*



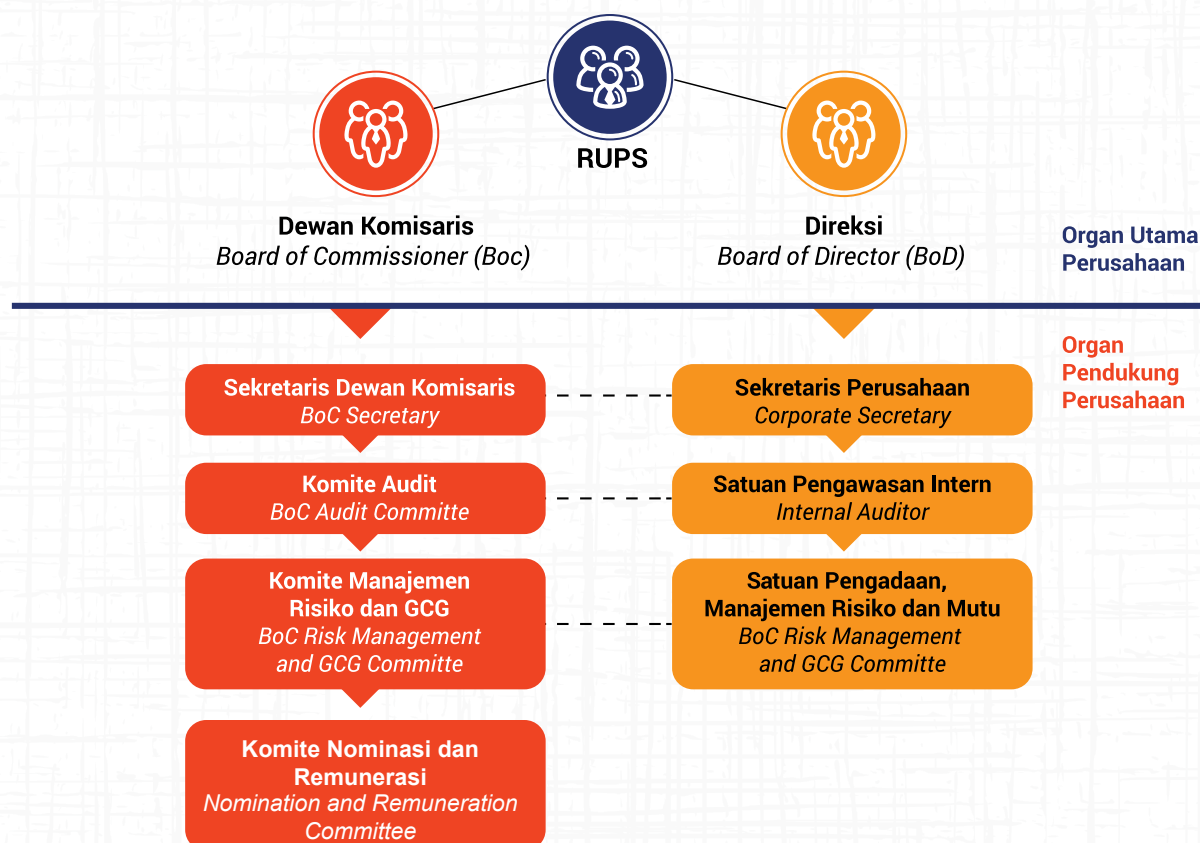
Sebagai infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di bawah Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Demikian juga dibawah Direksi dibentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi GCG serta menjadi mitra kerja dari Komite Dewan Komisaris.

*As a supporting infrastructure in carrying out its duties and responsibilities, under the Board of Commissioners a Committee of the Board of Commissioners and the Secretary of the Board of Commissioners have been formed. Likewise, under the Board of Directors a work unit is formed which is responsible for implementing GCG and becomes a working partner of the Committee of the Board of Commissioners.*

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PLN Enjiniring dapat dilihat pada gambar berikut ini :

*The structure of Corporate Governance at PLN Enjiniring can be seen in the following figure:*





Setiap Organ Perusahaan memiliki peranan penting dalam penerapan GCG dengan menjalankan fungsi hak dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.

*Each Company Organ has an important role in the implementation of GCG by carrying out its rights and responsibilities for the benefit of the Company including the functions of policy making, implementation and supervision.*

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Para Pemegang Saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi baik atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai amanah yang diberikan. Kewenangan yang dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar serta Keputusan RUPS

*The GMS is an organ of a Limited Liability Company that has exclusive authority which is not granted to the Board of Directors and the Board of Commissioners. The authority of the GMS, its form and extent are determined in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. Shareholders have the main authority to obtain information about the Company from both the Board of Directors and the Board of Commissioners as the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners is the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners has full responsibility in supervising the management of the Company which is carried out by the Board of Directors both at the discretion of the Board of Directors in managing the Company. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Company in accordance with the mandate given. The authority of the Board of Directors is unlimited and unconditional as long as it does not conflict with the Law and the Articles of Association and the GMS Resolutions.*



## PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan Direktur Keuangan dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan GCG di lingkungan PLN Enjiniring dan untuk mengelola pelaksanaan program-program GCG yang telah direncanakan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan membentuk Tim Penerapan GCG guna memaksimalkan pemantauan dan mengukur sejauh mana efektivitas program-program GCG dijalankan oleh Perusahaan. Kunci keberhasilan penerapan GCG di Perseroan menitikberatkan kepada :

17. Penerapan Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku guna memastikan pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tata kelola perusahaan agar dapat terselenggara dengan baik dan terdokumentasikan dengan baik di setiap Bidang;
19. Melakukan evaluasi, koordinasi dan memantau pelaksanaan kebijakan/proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang ada;
20. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan penerapan Kode Etik Perseroan telah dilakukan dengan baik diseluruh kegiatan Perseroan;
21. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilakukan dengan baik dan sesuai.

## TAHAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menyusun strategi dan rencana kerja penerapan kebijakan GCG untuk mencapai tujuan yang akan dicapai perusahaan. Sebagai bentuk komitmen PLN Enjiniring terhadap penerapan GCG, perusahaan berusaha memenuhi ketentuan dari setiap tahapan penerapan GCG. Tahapan penerapan GCG ini memiliki fungsi sebagai acuan dalam menyempurnakan penerapan GCG PLN Enjiniring dan menjadi media antara rencana kerja dengan rencana strategi.

## RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

*The Company has appointed the Director of Finance and HR as the Person in Charge of GCG Implementation within PLN Enjiniring and to manage the implementation of GCG programs that have been planned to be managed by the Corporate Secretary.*

*The Company formed a GCG Implementation Team to maximize monitoring and measure the effectiveness of the Company's GCG programs. The key to the successful implementation of GCG in the Company focuses on:*

1. *Implementation of compliance with applicable laws and regulations to ensure that the management of the company is in accordance with the applicable laws and regulations;*
2. *Directing and controlling corporate governance activities so that they can be well implemented and well documented in each field;*
3. *Evaluating, coordinating and monitoring the implementation of the company's business policies/ processes to comply with existing regulations;*
4. *Monitoring, evaluating and encouraging the implementation of the Company's Code of Ethics implementation activities that have been carried out properly throughout the Company's activities;*
5. *Monitoring, evaluating and encouraging the implementation of Good Corporate Governance practices that have been carried out properly and appropriately.*

## STAGES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

*PLN Enjiniring prepares strategies and work plans for implementing GCG policies to achieve the goals to be achieved by the company. As a form of PLN Enjiniring's commitment to the implementation of GCG, the company strives to comply with the provisions of each stage of GCG implementation. This stage of GCG implementation has a function as a reference in perfecting PLN Enjiniring's GCG implementation and becomes a medium between work plans and strategic plans.*





## ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

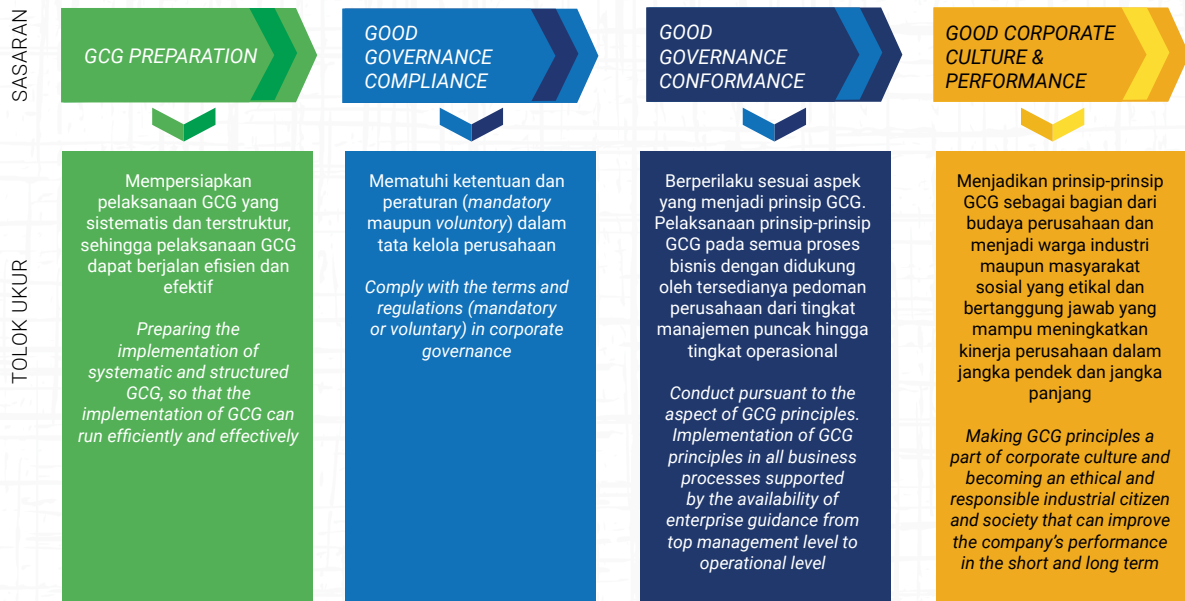
Sebagai panduan dalam penerapan GCG, Perseroan menyusun Roadmap GCG sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Roadmap CGC menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dicapai terkait dengan penerapan GCG dalam jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan.

## CORPORATE GOVERNANCE ROAD MAP

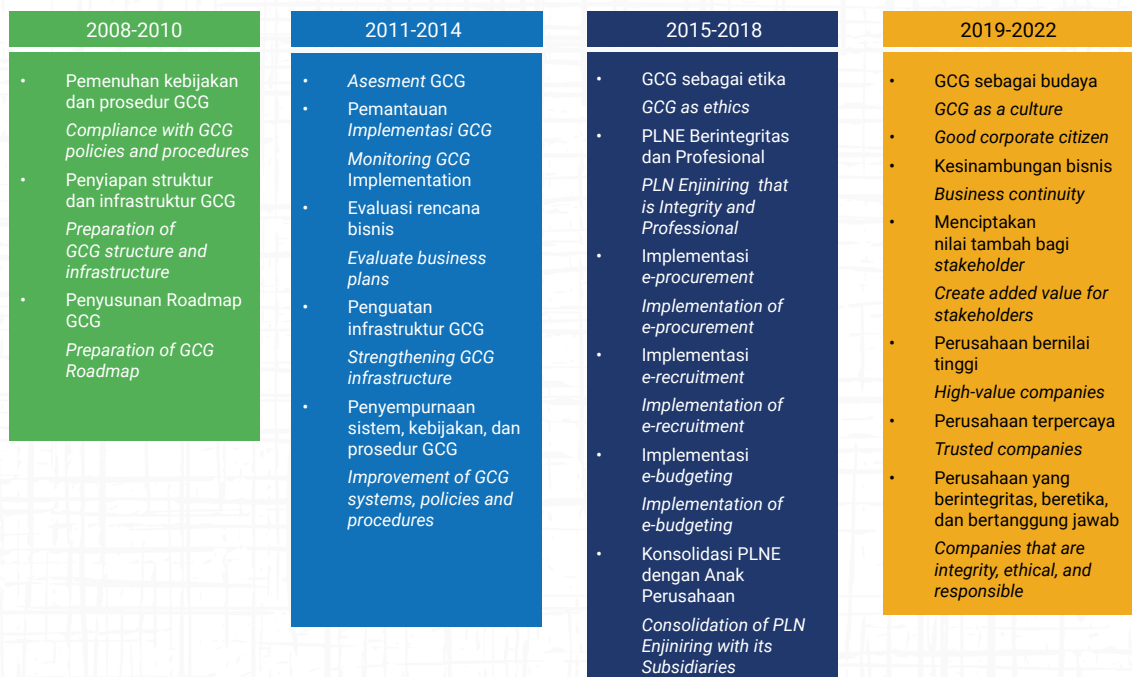
*As a guide in the implementation of GCG, the Company prepares a GCG Roadmap as part of strategic planning in implementing GCG in a sustainable manner. The CGC Roadmap describes the stages to be achieved related to the consistent and sustainable implementation of GCG in the long term.*



GCG ROADMAP 2008-2022



PROSES VALUE CREATION



Pada saat ini, PLN Enjiniring telah berada pada fase Good Governance Conformance yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus melakukan internalisasi implementasi prinsip-prinsip GCG dan melengkapi soft structure dan memutakhirnya pedoman yang ada. Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat

At this time, PLN Enjiniring is in the Good Governance Conformance phase which continuously and continuously continues to internalize the implementation of GCG principles and complete the soft structure and update existing guidelines. The company seeks to apply the principles of GCG in all business processes, supported by the availability of company guidelines from the top management level to the operational level



manajemen puncak hingga tingkat operasional dan terintegrasi antara rencana kerja dengan rencana strategis guna mencapai tujuan akhir tahapan penerapan GCG pada face Good Corporate Citizen.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan guna mendukung fase Good Corporate Governance antara lain adalah :

1. Implementasi program PLNE Bersih dan Berintegritas dengan kegiatan : Multistakeholder Forum (collective action), Pengendalian Gratifikasi Pelaporan LHKPN.
2. Melakukan review dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik edisi 3 (Pedoman GCG) , dan Buku Panduan bagi Dekom dan Direksi (Board Manual) khusus untuk organ utama dalam struktur GCG.
3. Melakukan review dan menyempurnakan Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris.
4. Melakukan review dan menyempurnakan Buku Pedoman Perilaku (code of conduct) yang berlaku bagi seluruh organ dalam struktur perusahaan.

*and the integration between work plans and strategic plans in order to achieve the final goal of the stages of implementing GCG on the face of Good Corporate Citizen.*

*Activities that have been carried out by the Company to support the Good Corporate Governance phase include:*

1. *Implementation of the Clean and Integrity PLNE program with the following activities: Multistakeholder Forum (collective action), Gratification Control for LHKPN Reporting.*
2. *Review and refine the Guidelines for Good Corporate Governance 3rd edition (GCG Guidelines), and the Board Manual for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual) specifically for the main organs in the GCG structure.*
3. *Review and refine the Audit Committee Charter and the Risk Management Committee Charter as guidelines for the supporting organs of the Board of Commissioners.*
4. *Review and improve the Code of Conduct that applies to all organs within the company structure.*

## PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2021

Penerapan GCG merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perseroan dalam bentuk pencapaian skor Penerapan GCG sejak tahun 2009. Penilaian atas Penerapan GCG di Perseroan dilakukan oleh Assesor Independen dan pada tahun 2013 Perseroan pertama kali melaksanakan penilaian secara mandiri (self assessment). Untuk penilaian secara mandiri dibentuk Tim Verifikator yang diketuai dari Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Tim Penerapan GCG PLNE. Sesuai dengan arahan Pemegang Saham, penilaian GCG dilakukan secara berkala.

Untuk tahun 2021, Penilaian Penerapan GCG secara Self Assessment dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN sebagai tercantum dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

**“Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan”**

## ASSESSMENT FISCAL YEAR 2021

*The implementation of GCG is one of the Key Performance Indicators (KPI) in the Company's Management Contract in the form of achieving a GCG Implementation score since 2009. The assessment of the implementation of GCG in the Company is carried out by an Independent Assessor and in 2013 the Company conducted a self-assessment for the first time. . For independent assessment, a Verification Team was formed, chaired by the Internal Audit Unit together with the PLNE GCG Implementation Team. In accordance with the direction of the Shareholders, GCG assessment is carried out periodically.*

*For 2021, Self-Assessment of GCG Implementation using the parameters of the Ministry of SOEs as stated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*



Aspek pengujian dalam assessment GCG meliputi :

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan,
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
4. Direksi,
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Transparansi
6. Aspek lainnya. Indikator pengujian berjumlah 43 indikator sedangkan parameter pengujian berjumlah 153 parameter.

Aspects of testing in the GCG assessment include:

1. Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a Sustainable manner,
2. Shareholders and GMS/Capital Owners,
3. Board of Commissioners/Supervisory Board,
4. Directors,
5. Information Disclosure and Transparency, and Transparency
6. Other aspects. The test indicators are 43 indicators while the test parameters are 153 parameters.

Berdasarkan hasil assessment, penerapan GCG di Perseroan masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor sebesar 88,309 dari total bobot sebesar 100,00 atau memperoleh capaian sebesar 88,309%.

Based on the results of the assessment, the implementation of GCG in the Company is in the Very Good category with a total score of 88,309 out of a total weight of 100.00 or an achievement of 88,309%.

**TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2022**

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2022 <i>Achievements in 2022</i>		Tingkat Pemenuhan (%) <i>Fulfillment Rate(%)</i>
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,816	97,371
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,859	87,322
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	32,464	92,754
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	32,426	92,646
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,494	83,267
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	1,250	25,000
Total Skor <i>Total Score</i>		100,00	88,309	



## PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2021

Pelaksanaan Assessment GCG untuk periode tahun 2021 dilaksanakan secara Self Assessment dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN sebagai tercantum dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan Skor Penerapan GCG PT PLN Enjiniring tahun 2021 adalah 91,653% dengan predikat "Sangat Baik".

Berikut ini disampaikan pencapaian skor untuk masing-masing aspek penilaian, sebagai berikut :

## ASSESSMENT FOR FINANCIAL YEAR 2022

The implementation of GCG Assessment for the 2022 period is carried out by Self-Assessment using the parameters of the Ministry of SOEs as stated in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6th, 2012 concerning Indicators / Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, with the GCG Implementation Score of PT PLN Enjiniring in 2022 is 91, 653% with a "Very Good" predicate.

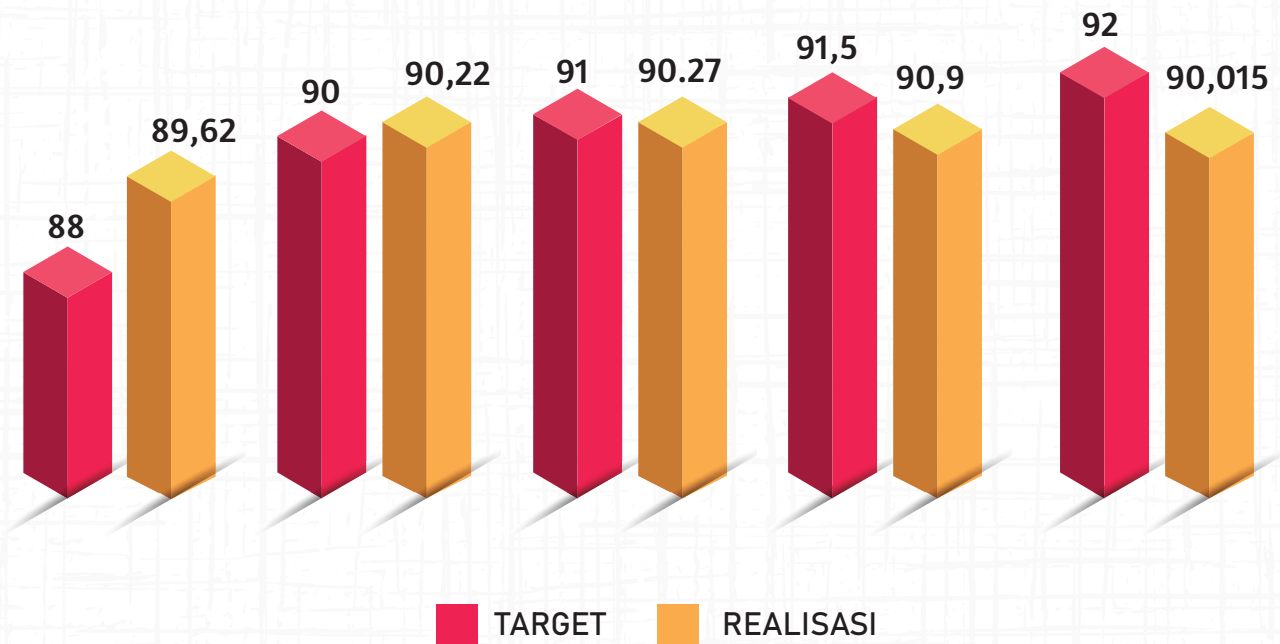
The following is conveyed the achievement of scores for each aspect of the assessment, as follows:

**TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2021**  
GCG ASSESSMENT TABLE 20221

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2021 <i>Achievements in 2021</i>		Tingkat Pemenuhan (%) <i>Fullfilment Rate(%)</i>
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,884	98,34
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,905	87,83
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	33,725	96,36
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,889	91,11
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,500	83,33
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,750	75,00
Total Skor <i>Total Score</i>		100,00	91,653	91,653

Sehingga pencapaian skor GCG pada Kontrak Manajemen PT PLN Enjiniring mengalami trend peningkatan, sebagai mana ditunjukkan pada grafik ini :

So that the achievement of the GCG score on the PT PLN Enjiniring Management Contract has an increasing trend, as shown in this graph:



### SINERGI DENGAN INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berintegrasi dengan PLN Holding guna memonitoring dan mengendalikan secara efektif penerapan GCG di PLN dan Anak Perusahaannya dengan menggunakan aplikasi.

Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero), bersama-sama dengan Anak Perusahaan lainnya memandang perlunya sinergi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi GCG di Perseroan. Perseroan membentuk "Forum GCG" AP PLN sejak tahun 2016 yang bertujuan :

1. Berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam organisasi perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

### SYNERGY WITH THE PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

To support the implementation of Good Corporate Governance, the Company integrates with PLN Holding in order to effectively monitor and control the implementation of GCG in PLN and its Subsidiaries by using an application.

The Company is one of the subsidiaries of PT PLN (Persero), together with other Subsidiaries see the need for synergy in the Implementation of Corporate Governance which has an important role in supporting the successful implementation of GCG in the Company. The Company has established the "GCG Forum" AP PLN since 2016 which aims to:

1. Committed to implementing the Principles of Good Corporate Governance (GCG) in a transparent, accountable and trusted company organization in order to increase added value for the company.



2. Membentuk dan meningkatkan komunikasi antar anak perusahaan sebagai wadah komunitas yang efektif di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
  3. Membentuk persepsi yang sama terhadap penerapan dan pengukuran prinsip-prinsip GCG sehingga mendukung peningkatan penerapan GCG di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
  4. Saling mendukung penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik antar anak perusahaan PT PLN (Persero).
2. *Establish and improve communication between subsidiaries as an effective community forum within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
  3. *Establishing a common perception of the implementation and measurement of GCG principles so as to support the improvement of GCG implementation within the Subsidiary of PT PLN (Persero).*
  4. *Mutual support for the implementation and improvement of good corporate governance among subsidiaries of PT PLN (Persero). AP GCG Forum Pictures.*



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak nya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. RUPS Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan, RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa).

## PEDOMAN PELAKSANAAN RUPS

- 1) Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan, dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - i. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perseroan;
  - ii. Perseroan yang memiliki komite nominasi dan remunerasi, dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut;
  - iii. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;
  - iv. Dalam menetapkan auditor eksternal harus berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris;

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which is a forum for Shareholders to make decisions by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations. The GMS has powers that are not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the Company's Articles of Association and the laws and regulations. The GMS and/or Shareholders may not intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations, including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and or the Board of Directors. The Company's GMS consists of the Annual GMS, RKAP Approval GMS and other GMS (Extraordinary GMS).*

## GMS IMPLEMENTATION GUIDELINES

- 1) *Decision-making in the GMS must be carried out fairly and transparently, taking into account matters needed for the long-term business interests of the Company, including but not limited to:*
  - i. *Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed at the GMS must consist of people who are fit and proper for the Company;*
  - ii. *Companies that have a nomination and remuneration committee, in the appointment of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must consider the opinion of the committee;*
  - iii. *In making decisions to accept or reject reports from the Board of Commissioners and Directors, it is necessary to consider the quality of reports related to GCG;*
  - iv. *In determining the external auditor, it must be based on the candidates proposed by the Board of Commissioners;*



- v. Dalam hal anggaran dasar Perseroan dan atau peraturanperundangundangan mengharuskan adanya keputusan RUPS, maka keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan;
  - vi. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi dan kesehatan keuangan Perseroan.
- 2) RUPS diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS harus ditujukan untuk kepentingan Perseroan, diantaranya:
- i. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS;
  - ii. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
  - iii. Bahan (materi) setiap mata acara dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS, dan jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
  - iv. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
  - v. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perseroan, dan Perseroan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut.
  - vi. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
  - vii. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.
- 3) Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- v. *In the event that the Company's articles of association and/or laws and regulations require a GMS decision, the decisions taken must take into account the reasonable interests of the stakeholders;*
  - vi. *In making decisions to award bonuses, bonuses and dividends, the Company's financial condition and health must be taken into account.*
- 2) *GMS is held in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations with adequate preparation, so that it can take legal decisions. The decisions taken at the GMS must be aimed at the interests of the Company, including:*
- i. *Shareholders are given the opportunity to submit proposals for the agenda of the GMS;*
  - ii. *The invitation to the GMS must include information regarding the agenda, date, time and place of the GMS;*
  - iii. *Materials (materials) for each agenda item in the invitation to the GMS must be available at the Company's office from the date of the GMS invitation, and if the materials are not yet available at the time of the invitation for the GMS, then the materials must be provided before the GMS is held;*
  - iv. *An explanation of other matters relating to the agenda of the GMS can be given before and/or during the GMS;*
  - v. *The minutes of the GMS must be available at the Company's office, and the Company provides facilities so that Shareholders can read the minutes.*
  - vi. *Minutes of the GMS must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the participants of the GMS. The signature as referred to is not required if the minutes of the GMS are made with a notarial deed.*
  - vii. *Every shareholder has the right to obtain a copy of the minutes of the GMS.*
- 3) *The holding of the GMS is the responsibility of the Board of Directors. In the event that the Board of Directors is unable to attend, the GMS will be held by the Board of Commissioners or Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association and the laws and regulations.*



- 4) RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- 4) *GMS can also be conducted through teleconference media, video conference or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in meetings.*

## HAK PEMEGANG SAHAM

- 1) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Memutuskan perubahan modal Perseroan;
- 3) Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham Perseroan;
- 4) Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemisahan bentuk badan hukum Perseroan serta pembubaran Perseroan;
- 5) Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - ii. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - iii. Menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;
  - iv. Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - v. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar;
  - vi. Memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris;
  - vii. Menetapkan sistem dan prosedur penjaringan dan penilaian yang salah satunya dilakukan melalui *fit & proper test* dalam memilih Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

## SHAREHOLDERS' RIGHTS

- 1) *Amend the Company's Articles of Association;*
- 2) *Decide on changes to the Company's capital;*
- 3) *Approving or rejecting the transfer of rights to the Company's shares;*
- 4) *Decide on the merger, consolidation, and acquisition, separation of the legal entity form of the Company and the dissolution of the Company;*
- 5) *Decide to transfer, make debt collateral, relinquish rights to all or most of the Company's assets within one financial year;*
- 6) *Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners, with the following provisions:*
  - i. *Establish guidelines for the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
  - ii. *Carry out an assessment of the candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
  - iii. *Determine the appointment of members and the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
  - iv. *Establish arrangements regarding concurrent positions for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
  - v. *Dismissing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association;*
  - vi. *Responding to job vacancies and/or temporary dismissal of the Board of Directors by the Board of Commissioners;*
  - vii. *Establish systems and procedures for screening and assessment, one of which is carried out through a fit & proper test in selecting Members of the Board of Commissioners and Board of Directors;*



- 7) Menyetujui dan menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
  - 8) Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP;
    - i. Memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    - ii. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
    - iii. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
  - 9) Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
  - 10) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar, melalui langkah sebagai berikut:
    - i. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris;
    - ii. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
    - iii. Menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan;
    - iv. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris;
    - v. Menetapkan penggunaan laba bersih;
    - vi. Mengesahkan dan menyetujui Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu.
  - 11) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - 12) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan prinsip sebagai berikut:
    - i. Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) *Approve and reject the Company's Work and Budget Plan (RKAP) and the Company's Long-Term Plan (RJPP);*
  - 8) *Provide approval of the Company's Long Term Plan (RJPP) or Revised RJPP;*
    - i. *Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP);*
    - ii. *Give approval/decision on the proposed corporate action that needs approval/decision of the GMS.*
    - iii. *Give approval/decision on the proposed corporate action that needs approval/decision of the GMS.*
  - 9) *Provide the necessary decisions to safeguard the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association;*
  - 10) *Approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and/or the Articles of Association, through the following steps:*
    - i. *Provide an assessment of the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners;*
    - ii. *Determine salary/honorarium, allowances, facilities and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
    - iii. *Establish an external auditor to audit the Company's Financial Statements;*
    - iv. *Approval of the annual report including the ratification of financial statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners;*
    - v. *Determine the use of net income;*
    - vi. *Approving and approving Financial Statements that are carried out on time.*
  - 11) *Making decisions through an open and fair and accountable process;*
  - 12) *Implement Good Corporate Governance in accordance with the authority and responsibility, with the following principles:*
    - i. *Provide direction/guidance on the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners;*



- ii. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
- iii. Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perseroan yang signifikan.

- ii. *Not to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors;*
- iii. *Responding to information received from the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the symptoms of a significant decline in the Company's performance and losses.*

## KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

## SHAREHOLDERS' OBLIGATIONS

Dalam menjalankan perannya, Pemegang Saham berkewajiban untuk:

*In carrying out their roles, Shareholders are obliged to:*

- a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

- a. *Comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- b. *Not carrying out supervision and management activities of the Company carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors.*
- c. *Not using the Company for personal, family, Company or business group interests in a spirit and way that is contrary to the laws and regulations*
- d. *Evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS mechanism.*

## PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUN 2022

## IMPLEMENTATION OF THE 2022 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Pada tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari RUPS Pengesahan RKAP 2022 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 .

*In 2022, the Company has held a GMS for 2 (two) times, consisting of the GMS Ratification of the 2022 RKAP and the GMS for Approval of the Annual Report for the 2021 Financial Year.*

Seluruh kegiatan RUP telah dilaksanakan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior dan Manajer terkait.

*All GMS activities have been carried out by the Company in accordance with applicable regulations, both regarding the place, notification, invitation to the GMS, leadership and minutes of the GMS as well as provisions for quorum, voting rights and resolutions of the GMS. The GMS was attended by Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Corporate Secretary, Senior Managers and related Managers.*



# Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

*Decision of the General Meeting of Shareholders (GMS)*

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RKAP 2022

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat nomor : 03.006/M00/PLNE/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 perihal Surat Undangan RUPS RKAP 2022 PT PLN Enjiniring dengan Agenda RUPS :

1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022
  - a. Isu Strategis
  - b. Sasaran Utama Perseroan
  - c. Program Prioritas Perseroan Tahun 2022
  - d. Asumsi RKAP 2022
  - e. Proyeksi Keuangan
  - f. Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom
  - g. Tindak Lanjut Penugasan Pemegang Saham SHL
2. Persetujuan dan Pengesahan KPI
  - a. Pemaparan dan Penjelasan KPI 2022
  - b. Usulan Keputusan RUPS

## KEPUTUSAN RUPS :

### 1. Agenda Pertama

Setelah menilai RKAP PT PLN Enjiniring Tahun Buku 2022 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut :

- a. Perhitungan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) RATIFICATION OF RKAP 2022

*Prior to the GMS, the Company submitted an invitation to the GMS through registered letter number: 03.006/M00/PLNE/II/2022 dated January 3rd, 2022 regarding the Invitation Letter for the 2022 GMS of PT PLN Enjiniring with the GMS Agenda:*

1. *Approval and Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2022*
  - a. *Strategic Issues*
  - b. *The Company's Main Target*
  - c. *Company Priority Program for 2022*
  - d. *Assumption of RKAP 2022*
  - e. *Financial Projections*
  - f. *Follow-up on GMS Directives and Recommendations from the Board of Commissioners*
  - g. *Follow-up on Assignment of SHL Shareholders*
2. *KPI Approval and Approval*
  - a. *Presentation and explanation of KPI 2022*
  - b. *Proposed GMS Decision GMS Resolutions:*

## GMS RESOLUTIONS:

### 1. First Agenda

*After assessing PT PLN Enjiniring's RKAP for the 2022 Fiscal Year proposed by the Board of Directors and discussing and taking into account the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the GMS decided to approve and ratify the 2022 Company Work Plan and Budget (RKAP) with the following main objectives:*

- a. *Calculation of Profit (Loss) and Comprehensive*



Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2022 dianggarkan sebesar Rp. 26,2 Milliar.

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Total Aset/Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dianggarkan masing-masing sebesar Rp. 1.071,6 Milliar.

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Saldo Kas per 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp. 345,3 Milliar

d. Investasi

Investasi Tahun Buku 2022 dianggarkan sebesar Rp. 343,88 Milliar, dengan Disburse sebesar Rp. 343,88 Milliar.

*Consolidation Profit (Loss) After Tax for Financial Year 2022 is budgeted at Rp. 26,2 Billion.*

c. *Consolidated Statement of Financial Position*

*Total Assets/Liabilities and Equity as of December 31, 2022 are budgeted at Rp. 1.071,6 Billion.*

e. *Consolidated Statement of Cash Flows*

*Cash balance as of December 31, 2022 is budgeted at Rp. 345,3 Billion*

d. *Investation*

*The investment for the 2022 Fiscal Year is budgeted at Rp. 343,88 billion, with a Disburse of Rp. 343,88 Billion.*

## 2. Agenda Kedua

- RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) 2022 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT PLN Enjiniring.
- Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) 2022 PT PLN Enjiniring terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

## 2. Second Agenda

- The GMS approved and ratified the Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) 2022 between the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders of PT PLN Enjiniring.*
- The Management Contract/Key Performance Indicator (KPI) 2022 PT PLN Enjiniring attached is an integral part of this minutes.*

## RUPS LPT TAHUN BUKU 2021

Dalam rangka menjalankan perannya, Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan menyampaikan arahan secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### 1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat Nomor : 24.001/M00/PLNE/V/2022 tanggal 24 Mei 2024 dengan agenda RUPS

- Persetujuan dari Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*)

## GMS ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2021

*In order to carry out its role, the Shareholders have requested an explanation and delivered directives at the General Meeting of Shareholders.*

### 1. GMS Approval of the 2021

*Prior to the GMS, the Company submitted an invitation to the GMS through registered letter Number: 24.001/M00/PLNE/V/2022 dated May 24<sup>th</sup>, 2024 with the agenda of the GMS:*

- Approval of the Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021 including the Report on the Implementation of Supervision of the Board of Commissioners during Fiscal Year 2021 as well as the Granting of Full Settlement and Release of Liability (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors*



kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021;

- b) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021;
- c) Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2021; dan
- d) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

## KEPUTUSAN RUPS LPT TAHUN BUKU 2021

### 1. Agenda Pertama :

- 1) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- 2) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.
- 3) RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat **"Wajar dalam semua hal yang material"** sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 01101/2.1025/AU.1/03/1789-1/1/VI/2021, Tanggal 07 Juni 2022.
- 4) RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

*and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions Executed During the Year Books 2021;*

- b. Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2021;*
- c. Approval of Tantiem for Fiscal Year 2021 and Remuneration for Fiscal Year 2022 for Directors and Commissioners, as well as Employee Bonuses for Fiscal Year 2021; and*
- d. Determination of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year.*

## DECISION OF GMS ANNUAL REPORT FISCAL YEAR 2021<sup>1</sup>

### 1. First Agenda:

- 1) The GMS approves and accepts the Annual Report regarding the Condition and Operation of the Company during the 2021 Financial Year which consists of the Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports.*
- 2) The GMS approved and received the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2021 Financial Year.*
- 3) The GMS ratified the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021 containing the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Cash Flow Statements and Consolidated Statements of Changes in Equity along with their explanations which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners with the opinion "Fair in all material respects" as referred to in his report No. 01101/2.1025/AU.1/03/1789-1/1/VI/2021, dated June 07th, 2022.*
- 4) The GMS grants full release (Volledig Acquit Et De Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations*



berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

## 2. Agenda Kedua :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.

## 3. Agenda Ketiga :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2020.

## 4. Agenda Keempat :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022.

*and contained in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners. The ratification and discharge of responsibility does not release legal responsibility for the Board of Directors and/or Board of Commissioners if the disclosed report is proven to have violated applicable legal provisions and procedures and/or it is later proven that there have been deviant actions and/or detrimental to the Company.*

## 2. Second Agenda:

*The GMS grants power of attorney to the majority shareholder to determine the use of net profit for the financial year 2021.*

## 3. Third Agenda:

*The GMS authorizes the majority Shareholders to determine the Tantiem for Fiscal Year 2021 and Remuneration for Fiscal Year 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for employees for Fiscal Year 2020.*

## 4. Fourth Agenda:

*The GMS authorizes the majority shareholder to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for the 2022 Financial Year.*



## Dewan Komisaris

### Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

*The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the general course of management both regarding the company and the company's business carried out by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, provisions of the Articles of Association, Meeting Resolutions General Shareholders, as well as the prevailing laws and regulations for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to spend time in carrying out their duties. thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners must enable effective, precise and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to be able to act independently, in the sense of not having a conflict of interest (conflict of interest) that can interfere with its ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and the relationship to the Board of Directors.*

### BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. *Board Manual* antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya *Board Manual* diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

### BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The Board of Commissioners work guidelines are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains guidelines for the work procedures of the Board of Commissioners, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand manner and must be carried out consistently, so that it can be a reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company Vision and Mission. With the Board Manual it is expected that high work standards will be achieved in line with the principles of GCG.*



Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris .

*The contents of the Board Manual are as follows.*

- Chapter I : Introduction;*
- Chapter II : Board of Directors;*
- Chapter III : Board of Commissioners;*
- Chapter IV : Procedure for Board of Directors Authority with Board of Commissioners Approval;*
- Chapter V : Procedure for Board of Directors Authority with General Meeting of Shareholders Approval Based on the Recommendations of the Board of Commissioners.*

## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri – sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

## COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. *The Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more.*
2. *The Board of Commissioners which consists of more than 1 (one) member is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but based on the decision of the Board of Commissioners.*
3. *In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) member, one member of the Board of Commissioners is appointed as the President Commissioner.*

### TABEL KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

TABLE OF BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Domisili <i>Domicile</i>	Tanggal Pengangkatan <i>Appointment Date</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
1	Bob Saril	Komisaris Utama  <i>President Commissioner</i>	Tangerang	- 21 September 2022  <i>September 21, 2022</i>	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 21 September 2022  - Akta Notaris Lenny Janis Ishak,SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022  - <i>GMS (Circular) Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners on 21 September 2022</i>  - <i>Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22 2022</i>
2	Edward Siagian	Komisaris	Jakarta	- 8 Desember 2020	- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 08 Desember 2020.  - Akta Notaris Lenny Janis Ishak,SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021



		Commissioner		- December 8, 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GMS (Circular) Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners on 08 December 2020.</li> <li>- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated 09 March 2021</li> </ul>
3	Muhammad Rizali Karliansyah	Komisaris	Jakarta	- 19 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RUPS (Sirkuler) Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 19 Februari 2021</li> <li>- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 05 tanggal 09 Maret 2021</li> </ul>
		Commissioner		- February 19, 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GMS (Circular) Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners on February 19 2021.</li> <li>- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 05 dated 09 March 2021.</li> </ul>
4	Fritz Edward Siregar	Komisaris Independen	Jakarta	- 21 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RUPS (Sirkuler) Pemberitahuan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 21 September 2022</li> <li>- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022</li> </ul>
		Independent Commissioner		- September 21, 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GMS (Circular) Notification and Appointment of Members of the Board of Commissioners on September 21, 2022</li> <li>- Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH Number 56 dated September 22, 2022</li> </ul>



## Komisaris Independen

### INDEPENDENT COMMISSIONER

Anggota Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 3 (tiga) orang diantaranya atau sama dengan 75% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

*Members of the Board of Commissioners of PLN Enjiniring have met the number, composition, criteria and independence in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011. At least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. The current number of members of the Company's Board of Commissioners is 4 (four) people, of which 3 (three) people or equal to 75% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Thus, the composition has also complied with the regulations set by the Ministry of SOEs regarding Independent Commissioners.*

### KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. RUPS/Pemegang Saham menetapkan Anggota Komisaris Independen paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

### CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

1. The GMS/Shareholders determine the Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners explicitly in the decision on their appointment. The Independent Commissioner has competence in auditing, finance and accounting.
2. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
3. The number of Independent Commissioners must be able to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and in accordance with the laws and regulations. One of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.



## PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

## STATEMENT OF THE INDEPENDENT COMMISSIONER

Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, which includes:

- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or controlling Shareholders.
- Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and e) Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or controlling Shareholders.
- Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, can be seen in the table below:

### TABEL HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

#### TABLE OF AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris <i>Financial, Family and Management Relations of the Commissioners</i>														
Komisaris <i>Commissioners</i>	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Kepengurusan  <i>Management Relations</i>	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>		<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Bob Saril		√		√		√		√		√		√		√
Edward Siagian		√		√		√		√		√		√		√
Muhammad Rizali Karlansyah		√		√		√		√		√		√		√
Fritz Edward Siregar		√		√		√		√		√		√		√



## MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Board Manual yang berisi Petunjuk dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan yang secara umum mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta

## THE SERVICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is set at 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.
2. The position of a member of the Board of Commissioners ends when:
  - a. Pass Away;
  - b. His term of office ends;
  - c. Dismissed based on the General Meeting of Shareholders; and/or
  - d. No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on these articles of association and other laws and regulations.
3. The provisions as referred to in number 2 above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignation.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the articles of association and the authority granted by the GMS, which are contained in the Board Manual which contains the Instructions and Work Procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is responsible to shareholders in terms of overseeing the policies of the Board of Directors on the Company's operations which generally refers to the approved business plan, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

In detail, the main duties of the Board of Commissioners related to supervision are:

1. The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, the course of management in general both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Company's Budget as well as the provisions of the Articles of Association and Decisions General Meeting of Shareholders, as well as the



- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
    - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
    - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
  4. Pengawasan oleh Komisaris dilakukan dengan cara:
    - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
    - b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/pembangkit/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
    - c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
  5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
- prevailing laws and regulations for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
2. *In carrying out these duties, each member of the Board of Commissioners must:*
    - a. *Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence and accountability.*
    - b. *Good intentions, full of prudence and responsibility in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
  3. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is responsible and authorized to supervise the management policies, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business and provide advice to the Board of Directors.*
  4. *Supervision by the Commissioners is carried out by:*
    - a. *Requesting written information from the Board of Directors regarding a problem in the Company.*
    - b. *Conducting visits to certain work units/plants/projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors.*
    - c. *Provide feedback on periodic reports from the Board of Directors.*
  5. *The Board of Commissioners/Supervisory Board must ensure that the SOE Annual Report contains information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other companies, including the meetings held in one financial year (internal meetings and other corporate meetings). joint venture with the Board of Directors), as well as honorarium, facilities, and/or other allowances received from the relevant BUMN.*

## WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

## AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*In carrying out its duties, the Board of Commissioners is authorized to:*



1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan Verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan /atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan /atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat Sekretaris Dewan komisaris jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1. View books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and check company assets.
2. Entering yards, buildings and offices used by the company.
3. Requesting an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the company.
4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Requesting the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting.
6. Appoint the Secretary to the Board of Commissioners if deemed necessary.
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the company's Articles of Association.
8. Establish other committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the company's capabilities.
9. Using experts for certain matters and for a certain period of time at the expense of the company, if deemed necessary.
10. Take actions to manage the company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of the company's Articles of Association.
11. Attending Board of Directors meetings and providing views on the matters discussed.
12. Carry out other supervisory powers as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders.

## KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

## OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</li><li>3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.</li><li>4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.</li><li>5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala-gejala menurunnya kinerja Perseroan.</li><li>6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan.</li><li>7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan, apabila diminta.</li><li>8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.</li><li>9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lainnya.</li><li>10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li><li>11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. <i>Researching and reviewing and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.</i></li><li>3. <i>Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the RJP and RKAP.</i></li><li>4. <i>Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company.</i></li><li>5. <i>Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of a decline in the Company's performance.</i></li><li>6. <i>Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.</i></li><li>7. <i>Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the annual report, if requested.</i></li><li>8. <i>Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting and keep a copy there of.</i></li><li>9. <i>Report to the Company regarding the ownership of shares and/or their families in the Company and other companies.</i></li><li>10. <i>Provide reports on supervisory duties that have been carried out during the last financial year to the General Meeting of Shareholders.</i></li><li>11. <i>Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, articles of association and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.</i></li></ol> |
|--|--|

## PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Board Manual Perusahaan, pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri oleh Perusahaan dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas sebagai berikut :

## DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*Based on the Company's Board Manual, the division of work among members of the Board of Commissioners is regulated by the Company and for the smooth running of its duties the Board of Commissioners can be assisted by the Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners divided into the following areas of duty:*



**TABEL PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS**  
**TABLE OF DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
Bob Saril	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan perusahaan dan tugas Dewan Komisaris</li> <li>2 Mengundang, memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan menandatangani dokumen Perseroan antara lain Risalah RUPS, Laporan Manajemen Tahunan dan lain-lain.</li> <li>3 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala, Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.</li> <li>4 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan menyampaikan hasil Pengawasannya serta menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>5 Mengikuti perkembangan Perseroan</li> <li>6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham</li> <li>7 Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap KPI Manajemen</li> <li>8 Meneliti dan menelaah laporan berkala dan tahunan yang disampaikan Direksi serta menandatangani laporan tahunan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <i>Responsible for coordinating company supervision and the duties of the Board of Commissioners.</i></li> <li>2 <i>Inviting, chairing the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, and signing the Company's documents including Minutes of the General Meeting of Shareholders, Annual Management Reports, etc.</i></li> <li>3 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues that considered important for the management of the Company.</i></li> <li>4 <i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>5 <i>Following the development of the Company.</i></li> <li>6 <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>7 <i>Carrying out overall supervision of the Management KPI.</i></li> <li>8 <i>Researching and analyzing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing Annual Report.</i></li> </ol>
Edward Siagian	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bertanggung jawab utamanya pada Bidang Keuangan, Bidang Enjiniring, Pengawasan Internal dan Komite Audit, meliputi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengawasi Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan</li> <li>(b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan internal, dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan eksternal</li> <li>(c) Mengawasi Keuangan dan Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM</li> </ol> </li> </ol>



		<p>(d) Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Enjiniring, termasuk proses produksi dan Pengendalian Mutu.</p> <p>(e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris</p> <p>2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.</p> <p>3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasan dan menyampaikan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM serta Bidang Enjiniring</p> <p>5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan</p> <p>6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>1 <i>Mainly responsible for the Financial sector, Engineering sector, Internal Control, Marketing and Audit Committee, including the following activities ;</i></p> <p><i>(a) Supervising the implementation of the Annual Work Plan and Budget including Financial Statements and Company Performance Reports.</i></p> <p><i>(b) Supervising the implementation of internal controls, ensure the effectiveness of internal and external control systems.</i></p> <p><i>(c) Supervising the company organizations and HR development strategy.</i></p> <p><i>(d) Supervising the Implementation of Engineering Activities, including the production process and Quality Control</i></p> <p><i>(e) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.</i></p> <p>2 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues deemed important for the management of the Company.</i></p> <p>3 <i>Overseeing the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>4 <i>Monitoring KPI in administration, finance and HR as well as in Engineering</i></p> <p>5 <i>Following the development of the company.</i></p> <p>6 <i>Perform other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
Muhammad Rizali Karlansyah	Komisaris <i>Commissioner</i>	<p>1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi, Bidang Organisasi dan SDM, Komite Manajemen Risiko dan pelaksanaan GCG dan sasaran nya serta Issue Strategis perusahaan, meliputi kegiatan antara lain:</p> <p>(a) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan</p> <p>(b) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan</p> <p>(c) Mengawasi atas perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha, rencana Investasi termasuk Sasaran Strategis dan Issue Issue strategis lainnya</p>



- (d) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM
- (e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
- 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan
- 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM serta pelaksanaan GCG.
- 5 Mengikuti perkembangan perusahaan
- 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for Engineering Sector, Bussiness Development and Investment, Risk Management Committee and GCG and other strategic targets and issues, including activities including :*
  - (a) *Supervising the preparation of the Company's Long-Term Plan and periodically conduct reviews and propose updating if needed.*
  - (b) *Supervising the preparation of the Annual Company Budget Work Plan.*
  - (c) *Supervising the implementation of business development, investment plans including strategic targets and other strategic issues.*
  - (d) *Supervising company organizations and HR development strategy.*
  - (e) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.*
- 3 *Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
- 4 *Monitoring KPI in the fields of Marketing and Bussiness Development, Organization, HR Organization and Development and the implementation of GCG.*
- 5 *Following the development of the company.*
- 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

Fritz Edward Siregar

Komisaris  
Commissioner

- 1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pemasaran, Bidang Pengusahaan, Komite Audit dan sasaran serta Issue Strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain:
  - (a) Mengawasi Pelaksanaan Pemasaran termasuk Kebijakan Pemasaran dan *Pricing Policy*
  - (b) Mengawasi Pelaksanaan Pengusahaan
  - (c) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
  - (d) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan *updating* jika diperlukan.
  - (e) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM
  - (f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris



- 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan
  - 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil Pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham
  - 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengusahaan, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM
  - 5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan
  - 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for the Marketing Sector, Business Sector, Audit Committee and other strategic issues and targets, including activities below :*
- (a) *Supervising the implementation of marketing including marketing and pricing policy.*
  - (b) *Supervising the implementation of business.*
  - (c) *Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.*
  - (d) *Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and Periodically conduct reviews and propose updating if necessary.*
  - (e) *Supervising the organization of the company and the development of HR.*
  - (f) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.*
  - 3 *Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of the research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
  - 4 *Monitoring KPI in the fields of marketing and business, as well as HR organization and development.*
  - 5 *Following the development of the company.*
  - 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan tiga komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris membagi tugas dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris dalam bentuk penetapan Komisaris sebagai ketua maupun anggota pada komite-komite tersebut. Per 31 Desember 2022 anggota Dewan Komisaris yang bertugas di Komite Dewan Komisaris adalah :

*The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on reports received or direct findings in the field. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and three committees consisting of the Audit Committee, Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The Board of Commissioners divides the duties and authorities among the members of the Board of Commissioners in the form of appointing the Commissioner as chairman or member of these committees. As of December 31, 2022, the members of the Board of Commissioners serving on the Committee of the Board of Commissioners are:*



## TABEL DEWAN KOMISARIS BERTUGAS PADA KOMITE

### TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN CHARGE OF THE COMMITTEE

No.	Nama   Name	Jabatan   Position
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	M.R. Karliansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap anggota <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, concurrently member</i>
3	Fritz Edward Siregar	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Risk Management &amp; Good Corporate Governance Committee, concurrently member</i>

## KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas terbuka, maka dasar penetapan kriteria Dewan Komisaris PLN Enjiniring sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh ketentuan dimaksud telah tercantum di dalam Anggaran dasar dan *board manual* PLN Enjiniring. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut.

1. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan Pailit;
  - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,

## CRITERIA FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a subsidiary of PT PLN (Persero) which is a State-Owned Enterprise in the form of Limited Liability Company is open, then the basis for determining the criteria for the Board of Commissioners of PLN Enjiniring is in accordance with the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. All of these provisions have been stated in the Articles of Association and the PLN Enjiniring board manual. The criteria for members of the Board of Commissioners are as follows.

1. Parties who may be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment:
  - a. Declared bankrupt;
  - b. Become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt; or
  - c. Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or BUMN and/or related to the financial sector.
2. In addition to meeting the criteria as referred to in point 1, the appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by considering integrity, dedication, understanding of the company's management issues related to one of the management functions, having



- memiliki pengetahuan di bidang usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
    - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
    - b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
    - c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
    - d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
    - e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.
  4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
  5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
  6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
- knowledge in the company's business field, and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on statutory regulations.*
3. *Other requirements for members of the Board of Commissioners, namely:*
    - a. *Not administrators of Political Parties and/or candidates for members of the legislature and/or members of the legislature. Candidates for legislative members or members of the legislature consist of candidates/members of DPR, DPD, Level I DPRD, and Level II DPRD;*
    - b. *Not a candidate for Regional Head/Deputy Head and/or Regional Head/Deputy Head;*
    - c. *Not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the relevant BUMN for 2 (two) consecutive periods;*
    - d. *Physically and mentally healthy (not suffering from an illness that can hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board), as evidenced by a health certificate from a doctor;*
    - e. *For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on a proposal letter from the relevant agency.*
  4. *Appointment of members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements as referred to in points 1 and 2 above, is null and void from the moment the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors know that these requirements are not fulfilled.*
  5. *The appointment of members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors.*
  6. *Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
  7. *Members of the Board of Commissioners are appointed from the candidates proposed by the shareholders and the nominations are binding for the General Meeting of Shareholders.*



## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Seluruh Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and Proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen.

## CAPABILITY AND FITNESS ASSESSMENT

*The entire Board of Commissioners of PLN Enjiniring has met the criteria and provisions in the Fit and Proper Test based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other relevant rules and regulations, including the provisions regarding the Independent Commissioner.*

**TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**  
TABEL OF ABILITY AND COMPLIANCE ASSESSMENT

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Bob Saril	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Edward Siagian	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Muhammad Rizali Karliansyah	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Fritz Edward Siregar	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

PLN Enjiniring memiliki Pedoman Good Corporate Governance yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Dewan Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen.

## BOARD OF COMMISSIONERS' DIVERSITY POLICY

*PLN Enjiniring has Good Corporate Governance Guidelines which, among other things, regulate the diversity of the composition of the Board of Commissioners. Based on these guidelines, the composition of the Board of Commissioners should be in such a way as to enable effective, precise, fast and independent decisions to be made.*

Komposisi Dewan Komisaris merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik. Perusahaan juga senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman dalam usia, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian.

*The composition of the Board of Commissioners is the right mix of managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities carried out, and has good character. The Company also strives to ensure that the composition of the Board of Commissioners has diversity in terms of age, education, work experience and expertise.*

Pada periode 2022, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

*In the 2022 period, the diversity of the composition of the Board of Commissioners can be seen in the table below:*



**TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

**TABLE OF DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Nama Dewan Komisaris <i>Name of the Board of Commissioners</i>	Lahir <i>Birth</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Keahlian <i>Expertise</i>
Bob Saril	Oktober 1968	Laki-laki	S1 Teknik Elektro - Universitas Sriwijaya S2 Electrical Engineering - University Of New South Wales	Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2020 - 2022, General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur tahun 2019-2020, General Manager PT PLN (Persero) UIW Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat tahun 2017 - 2019 Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tehnik Elektro di Universitas Sriwijaya pada tahun 1993, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Electrical Engineering di University Of New South Wales pada tahun 2022.	Teknik Elektro
	October 1968	Male	Bachelor degree in Electrical Engineering at Sriwijaya University S2 Electrical Engineering - University Of New South Wales	Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since 21 September 2022. Previously he had experience as Director of Commerce and Customer Management at PT PLN (Persero) Head Office in 2020 - 2022, General Manager of PT PLN (Persero) UID East Java in 2019-2020, , General Manager of PT PLN (Persero) UIW South, Southeast and West Sulawesi 2017 - 2019 Completed his bachelor degree in Electrical Engineering at Sriwijaya University in 1993, then continued his master degree Electrical Engineering Education at the University Of New South Wales in 2022.	Electrical Engineering
Edward Siagian	Desember 1967	Laki-laki	S1 Tehnik Tenaga Listrik - Institut Teknologi Bandung S2 Manajemen - Institut Teknologi Bandung	Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tehnik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.	Teknik Tenaga Listrik Manajemen



	December 1967	Male	<p>Bachelor Degree in Electrical Engineering - Bandung Institute of Technology</p> <p>Master of Management - Bandung Institute of Technology</p>	<p>Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously, he had experience as a Project Control Expert (TK) at PT PLN (Persero) Head Office (Task Work to PT PLN Enjiniring) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control ( Kindergarten) at (PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014.</p> <p>Completed his Bachelor degree at the Faculty of Electrical Power Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1982, then continued his Master Education in Management at the Bandung Institute of Technology in 1997.</p>	<p>Electric Power Engineering Management</p>
Muhammad Rizali Karliansyah	Maret 1961	Laki-laki	<p>S1 Biologi - Universitas Indonesia</p> <p>S2 Ilmu Lingkungan - Universitas Indonesia</p>	<p>Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Februari 2021 Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015, dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010.</p> <p>Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tehnik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.</p>	<p>Biologi</p> <p>Lingkungan Hidup</p>
	March 1961	Male	<p>Bachelor Degree in Biology - University of Indonesia</p> <p>Master of Environmental Science - University of Indonesia</p>	<p>He has served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since 19 February 2021. Previously he had experience as Director General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021, Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015, and Assistant Deputy for Environmental Affairs Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment 2007 – 2010.</p> <p>Completed his Bachelor degree in Biology Education at the University of Indonesia in 1985, then completed his master degree on Environmental Science Education at the University of Indonesia in 1989.</p>	<p>Biology</p> <p>Environment</p>



Fritz Edward Siregar	November 1976	Laki-laki	S1 Hukum - Universitas Indonesia	Menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN Enjiniring sejak 21 September 2022. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu RI dari tahun 2017 - 2022, Tenaga Ahli Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Unit Akreditasi dan Evaluasi STHI Jentara, Counselor di Budidjaja & Associates.	Hukum
			S2 Hukum - Erasmus University Rotterdam, Belanda	Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Hukum di Erasmus University Rotterdam, Belanda dan melanjutkan Pendidikan Doctor in Juridical Science di University of New South Wales, Australia.	
	November 1976	Male	Bachelor degree in Law Education at the University of Indonesia	Serving as Independent Commissioner of PT PLN Enjiniring since 21 September 2022. Previously he had experience as a Member of the Indonesian Election Supervisory Body from 2017 - 2022, Legal Expert for the Regional Representative Council, Head of the STHI Jentara Accreditation and Evaluation Unit, Counselor at Budidjaja & Associates.	Law
			Master degree in Law Education at Erasmus University Rotterdam, the Netherlands	Completed his bachelor degree in Law Education at the University of Indonesia, then continued his master degree in Law Education at Erasmus University Rotterdam, the Netherlands and continued his Doctoral in Juridical Science Education at the University of New South Wales, Australia.	
			Doctor in Juridical Science - University of New South Wales, Australia		

## RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau ;

## DUAL POSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Articles of Association and the Company's Board Manual, Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises.
2. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/or candidates for legislative members, and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head and/or;



3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas atau untuk pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagi anggota Direksi Perusahaan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat anggota Direksi.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

**TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS**  
**TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONER**

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris		
<i>Concurrent Positions of the Board Manual of Commissioner</i>		
Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Positions</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>
Bob Saril	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	-
Edward Siagian	Komisaris <i>Commissioner</i>	-
Muhammad Rizali Karliansyah	Komisaris <i>Commissioner</i>	-
Fritz Edward Siregar	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	-

3. *Other positions that may cause a conflict of interest.*

*For concurrent positions of the Board of Commissioners that are not included in the above provisions or for exceptions to the provisions referred to above, approval from the General Meeting of Shareholders is required.*

*For members of the Board of Directors of the Company who are no longer in office, cannot be appointed as President Commissioner of the same Company for 2 (two) years since the person concerned is not a member of the Board of Directors.*

*The Board of Commissioners has disclosed his concurrent positions. The concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:*

## PROGRAM PENGENALAN UNTUK KOMISARIS BARU

1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.
  - a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris.

## INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

1. *The newly appointed Board of Commissioners participates in the introduction program organized by the company.*
  - a. *The Board of Commissioners conveys to the Board of Directors to hold an introduction program for members of the Board of Commissioners.*



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan.</li><li>c. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan.</li></ul> <p>2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.</p> <p>3. Program pengenalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;</li><li>b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;</li><li>c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.</li><li>d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.</li></ul> <p>4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>b. Newly appointed members of the Board of Commissioners participate in the company introduction program.</li><li>c. The level of attendance/activity of members of the Board of Commissioners in participating in the company introduction program.</li></ul> <p>2. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as a corporate secretary.</p> <p>3. The introduction program includes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Implementation of GCG principles by the Company;</li><li>b. Description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;</li><li>c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.</li><li>d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as things that are not allowed.</li></ul> <p>4. Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.</p> |
|--|---|

## PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan adalah sebagai berikut.

### 1. Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

## DISCLAIMER AND REGISTRATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The mechanism for the dismissal and resignation of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and the Company's Board Manual is as follows.

### 1. Termination of The Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the Decision of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons.



2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan komisaris:
    - a. Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
    - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau ketentuan Anggaran dasar Perseroan;
    - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
    - d. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
    - e. Mengundurkan diri.
  3. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
  4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.
  5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  6. Dalam hal pemberhentian di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 4.
  7. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
  8. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
2. *Dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in number 1 above, is carried out if based on the facts, members of the Board of Commissioners:*
    - a. *Unable to perform their duties properly;*
    - b. *Not implementing or violating the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company's Articles of Association;*
    - c. *Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;*
    - d. *Is declared guilty in connection with letters a, b and c based on a court decision which has permanent legal force; and/or*
    - e. *Resign.*
  3. *In addition to the reasons for the dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 above, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.*
  4. *The plan to dismiss members of the Board of Commissioners as referred to in number 2 shall be notified to the relevant member of the Board of Commissioners orally or in writing by the shareholders.*
  5. *The decision to dismiss for reasons as referred to in number 2 letters a, b and c, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself.*
  6. *In the event of dismissal outside the General Meeting of Shareholders forum, the self-defense as referred to in number 5 shall be submitted in writing to the Shareholders within 15 (fifteen) days from the date the member of the Board of Commissioners concerned is notified as referred to in number 4.*
  7. *As long as the termination plan as referred to in number 2 is still in process, the member of the Board of Commissioners concerned must carry out his duties properly.*
  8. *Dismissal for reasons as referred to in number 3 letters c and d is a dismissal with disrespect.*



## 2. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

1. Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

## 2. Resignation

1. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying in writing of his intention to the Company with a copy to the shareholders, other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. If the resignation letter mentions an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered not to mention the effective date of resignation.*
2. *If up to the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter is received in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then The member of the Board of Commissioners resigns automatically on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.*
3. *For members of the Board of Commissioners who resign before or at the end of their term of office, unless they resign due to death, then the person concerned remains responsible for his actions for which his accountability has not been received by the General Meeting of Shareholders.*

## MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST BOARD OF COMMISSIONERS

*The board of commissioners/supervisors has a conflict of interest policy and consistently implements the policy.*

1. *There is a policy of the Board of Commissioners/ Supervisory Board regarding (potential) conflicts of interest that may interfere with the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*



2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal:
    - a. Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun:
      - 1) Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.
      - 2) Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.
    - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.
  3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
2. *The Board of Commissioners/Supervisory Board signs a statement that they do not have a conflict of interest and states in writing matters that have the potential to cause a conflict of interest to themselves and submits them to the GMS/Capital Owners:*
    - a. *There is a statement letter from the Board of Commissioners that there is no conflict of interest at the beginning of the appointment which is renewed at the beginning of each year:*
      - 1) *For the annual statement, it can be implemented by adding the statement as an attachment or part of the Performance Contract or RKAT of the Board of Commissioners.*
      - 2) *If during the period of carrying out their duties, the Board of Commissioners/Supervisory Board experiences a (potential) conflict of interest, there is a statement from the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding this matter and submitted to the Shareholders/Equity Owners.*
    - c. *The Board of Commissioners/Supervisory Board shall make an Integrity Pact attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain a recommendation from the Board of Commissioners/Supervisory Board and approval of the GMS/Equity Owner.*
  3. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is required to report to the company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register regarding share ownership and/or family members in the company and other companies.*

## KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di PLN Enjiniring dan perusahaan lain, serta telah menandatangani Pakta Integritas. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dewan Komisaris dalam menghindari aktivitas yang berpotensi benturan kepentingan.

## SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The Board of Commissioners has organized a Special Register containing share ownership of members of the Board of Commissioners and their families in PLN Enjiniring and other companies, and has signed an Integrity Pact. This is a form of the commitment of the Board of Commissioners in avoiding activities that have the potential to conflict of interest.*



Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Dewan Komisaris sebagai berikut.

*The Board of Commissioners does not own any shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Commissioners is as follows.*

#### TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

##### TABLE OF SHAREHOLDERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
Name	Share Ownership at PLN Enjiniring	Share Ownership in Other Companies
Bob Saril	Nihil   Nil	Nihil   Nil
Edward Siagian	Nihil   Nil	Nihil   Nil
Muhammad Rizali Karliansyah	Nihil   Nil	Nihil   Nil
Fritz Edward Siregar	Nihil   Nil	Nihil   Nil

### KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

### BOARD OF COMMISSIONERS' REMUNERATION POLICY

*In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Commissioners is based on Article 6 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Proxy of Shareholders.*

### PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

*Members of the Board of Commissioners are given honoraria and allowances/facilities including post-service benefits, the types and amounts of which are determined by the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations.*

### FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
  - a. Fasilitas kesehatan; dan
  - b. Fasilitas bantuan hukum
2. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas

### BOARD OF COMMISSIONERS' FACILITIES

1. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board may be granted the following facilities:
  - a. Medical facility; and
  - b. Legal aid facilities
2. Provisions regarding health facilities for members of the Board of Directors, mutatis mutandis apply



kesehatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.

3. Fasilitas kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan kepada Anggota Dewan Komisaris.
- b. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat fasilitas kesehatan.
- c. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: (i) Rawat jalan dan obat; (ii) Rawat inap dan obat; dan (iii) *Medical Check-up*.
- d. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- e. *Medical Check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
  - 2) *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
- f. Dalam hal Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu fasilitas Kesehatan yaitu fasilitas kesehatan pada Perseroan.

7. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan

*to health facilities for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board. In the event that a person serves as a member of the Board of Commissioners and the Supervisory Board in more than one BUMN and/or in a subsidiary/joint venture, then the person concerned is only given one health facility.*

3. *Health facilities for members of the Board of Commissioners are provided with the following conditions:*

- a. *The Company is obliged to provide health facilities in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses to Members of the Board of Commissioners.*
- b. *Health facilities are provided to Members of the Board of Commissioners along with a wife or husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 (twenty five) years with the stipulation that if the child who is not yet 25 years old has been married or has worked, the person concerned is not entitled to health facilities.*
- c. *Health facilities are provided in the form of: (i) Outpatient and medication; (ii) Hospitalization and medication; and (iii) Medical Check-ups.*
- d. *In the event that the treating doctor provides a referral for treatment abroad, the provision of health facilities can be provided in full or in part by taking into account the financial capacity of the Company.*
- e. *Medical Check-up is provided with the following conditions:*
  - 1) *Medical check-up is given 1 (one) time every year.*
  - 2) *Medical check-ups are carried out in the country.*
- f. *In the event that the Board of Directors concurrently serves as a member of the Board of Commissioners of a subsidiary/joint venture, then the person concerned is only given one Health facility, namely health facility in the Company.*

7. *Provisions regarding legal aid facilities for members of the Board of Directors and former members of the Board of Directors, mutatis mutandis apply to legal aid facilities for members*



Pengawas serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

8. Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Anggota Dewan Komisaris yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
  - c. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
  - d. Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara /atau konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
  - e. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
  - f. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
  - g. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.

*of the Board of Commissioners/Supervisory Board and former members of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*

8. *Legal aid facilities for members of the Board of Commissioners are provided with the following conditions:*
  - a. *Legal aid facilities are provided in the event of an action/deed for and on behalf of the position related to the aims and objectives as well as the Company's business activities.*
  - b. *Members of the Board of Commissioners who will use legal aid facilities are required to make a statement on paper with sufficient stamps explaining the position in question in a particular case, not as a person and willing to return the legal aid facility to the company if it turns out to be to the company if it is proven that the position in question is in the case is as private.*
  - c. *Legal aid facilities are provided in the form of financing for the services of a lawyer/legal consultant office covering the examination process as witnesses, suspects and defendants in a judicial institution.*
  - d. *The services of a lawyer's office/legal consultant whose financing can be charged to the Company are only for one attorney's office/ or legal consultant for one particular case.*
  - e. *The appointment of a lawyer/legal consultant office is carried out by the Company in accordance with the provisions of the procurement of goods and services that apply in the Company.*
  - f. *In the event that the person concerned is found guilty and sentenced by a court of judgment which has permanent legal force, then the costs of the attorney/legal consultant, whether issued or not yet paid by the Company, shall be borne by the person concerned.*
  - g. *In the event that the person concerned is acquitted/declared not guilty by the court with a decision that has permanent legal force, the costs of the attorney's office/legal consultant will be borne by the Company.*



- h. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
  - i. Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kerta bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
  - j. Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
  - k. Anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - l. Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. *The cost of the attorney's office/legal consultant is given by taking into account the principles of fairness, transparency and accountability in accordance with applicable regulations, and taking into account the financial capacity of the Company.*
  - i. *As long as the legal issue does not have permanent legal force, the post-employment compensation for members of the Board of Commissioners is not paid and is deposited into a special account held by the Board of Directors of the Company as collateral for court costs incurred by the Company. Members of the Board of Commissioners who receive legal aid facilities are required to make a statement on paper with sufficient stamps explaining that the person concerned is willing to make his post-employment insurance as collateral for court costs incurred by the Company.*
  - j. *In the event that a member of the Board of Commissioners uses a lawyer/legal consultant of their own choice, either at the level of investigation/investigation, court of first instance, appeal, cassation or review, the costs of the attorney/legal consultant are not borne/reimbursed by the Company.*
  - k) *The Board of Commissioner Members whose lawyer / legal consultant office are financed by the Company, then they are required to make a statement that they will replace / refund the costs incurred by the Company if they abided by the law and the court found guilty.*
  - l. *The Company does not bear the costs of a lawyer/legal consultant in the event that a member of the Board of Commissioners becomes a witness, suspect or defendant due to a criminal process reported by the Company concerned, the State (State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting Shareholders.*



- m. Anggota Dewan Komisaris yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- n. Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang:
- Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
  - Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
  - Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
  - Anggota Dewan Komisaris Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- o. Perseroan wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- p. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum di atas, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Dewan Komisaris.
- m. *The litigated member of the Board of Commissioners is prohibited from being involved in making decisions regarding the appointment of a lawyer/legal consultant office.*
- n. *In cases of Civil or State Administration, the costs of the case shall be borne by the Company as long as:*
- Only one attorney/legal consultant is used for one particular case.*
  - The appointment of a lawyer/legal consultant office is carried out by the Company in accordance with the provisions of the procurement of goods and services that apply in the Company.*
  - Lawyer/legal consultant fees are official fees and can be legally accounted for.*
  - Members of the Company's Board of Commissioners were sued because of legal problems that arose in the context of carrying out the duties of the Company in accordance with applicable regulations.*
  - The plaintiff or defendant is a party other than the company concerned, the State (the State as a Legal Entity or Legal Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting of Shareholders.*
- o. *The Company is obliged to provide legal assistance facilities to former members of the Board of Commissioners in the event of legal problems arising because the person concerned takes actions/deeds for and on behalf of his position in relation to the purposes and objectives as well as the Company's business activities, which he did while he was serving as a member of the Board of Commissioners. Commissioner of the Company.*
- p. *The provisions regarding the provision of legal aid facilities above, mutatis mutandis apply to the provision of legal aid facilities for former members of the Board of Commissioners.*



## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Rapat Internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris
2. Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi

Sepanjang tahun 2022, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

## MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners meeting is a meeting held by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners' meeting consists of:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners which is only attended by members of the Board of Commissioners
2. Meeting of the Board of Commissioners by inviting the Board of Directors

Throughout 2022, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners' Meetings are as follows :

### TABEL FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### TABLE OF FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
		<i>Internal Meeting of the Board of Commissioner</i>			<i>Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors</i>		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		<i>Number and (%) Attendance</i>			<i>Number and (%) Attendance</i>		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Edwin Nugraha Putra	Komisaris Utama	29	20	70%	12	8	67%
<i>Edwin Nugraha Putra</i>	<i>President Commissioner</i>	29	20	70%	12	8	67%
Edward Siagian	Komisaris	29	29	100%	12	12	100%
<i>Edward Siagian</i>	<i>Commissioner</i>	29	29	100%	12	12	100%
Muhammad Rizali Karliansyah	Komisaris	29	29	100%	12	12	100%
<i>Muhammad Rizali Karliansyah</i>	<i>Commissioner</i>	29	29	100%	12	12	100%
Hardiv Harris Situmeang	Komisaris Independen	29	20	70%	12	8	67%
<i>Hardiv Harris Situmeang</i>	<i>Independent Commissioner</i>	29	20	70%	12	8	67%
Bob Saril	Komisaris Utama	29	9	30%	12	4	33%
<i>Bob Saril</i>	<i>President Commissioner</i>	29	9	30%	12	4	33%



Fritz Edward Siregar	Komisaris Independen	29	9	30%	12	4	33%
Fritz Edward Siregar	Independent Commissioner	29	9	30%	12	4	33%

## RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dengan ketentuan:

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
8. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3.7 angka 2 di atas, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

## INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds an internal meeting of the Board of Commissioners with the following provisions:

1. All decisions of the Board of Commissioners are taken at the meeting of the Board of Commissioners.
2. Decisions can also be taken outside the meeting of the Board of Commissioners as long as all members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.
3. Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if attended or represented by more than (one half) of the total members of the Board of Commissioners.
4. In other agendas, the meeting of the Board of Commissioners is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their legal representatives attend and approve the addition of the agenda for the meeting.
5. All decisions in the meeting of the Board of Commissioners are taken by deliberation to reach a consensus.
6. If through deliberation no consensus is reached, the decisions of the Board of Commissioners meeting are taken by ordinary majority vote.
7. Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of the Board of Commissioners he represents.
8. If the number of votes agree and disagree is the same, the chairperson of the meeting shall decide on the outcome of the meeting, with due observance of the provisions regarding accountability as referred to in item 3.7 number 2 above, except for individuals, meeting decisions are made by closed voting.
9. A blank vote (abstain) is deemed to have approved the proposal submitted at the meeting.



10. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. *In the event that there are more than 2 (two) alternatives and the voting results have not obtained an alternative with a vote of more than (one half) of the total votes cast, then a re-election will be conducted on the 2 (two) proposals that received votes. the most so that one of the proposals receives more than (one half) of the total votes cast.*

11. *Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.*

Sepanjang tahun 2022, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

*Throughout 2022, the Agenda, Dates and Participants of the Internal Meeting of the Board of Commissioners*

**TABEL RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS**  
**BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING TABLE**

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	19 Januari 2022	1. Pembahasan Struktur Organisasi <i>1. Discussion of Organizational Structure</i>	1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
2	25 Januari 2022	1. Pembahasan CPSI 2. Persiapan RUPS RKAP Tahun 2022 <i>1. CPSI Discussion 2. Preparation for the 2022 GMS RKAP</i>	1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
3	18 Januari 2022	1. Pembahasan Draft RKAP Tahun 2022 2. Pembahasan Inisiatif Strategis PLNE 3. Brainstorming Usulan Pengembangan Bisnis ke PLNE termasuk Struktur Organisasi <i>1. Discussion of the 2022 Draft RKAP 2. Discussion of PLNE Strategic Initiatives 3. Brainstorming Business Development Proposals to PLNE including Organizational Structure</i>	1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang
4	25 Februari 2022	1. Pembahasan Kinerja Perseroran TW IV Tahun Buku 2021 (Kinerja Keuangan Unaudited dan KPI) 2. Hasil Kajian Ernst and Young terkait Penyelesaian Masalah CPSI 3. Tindak Lanjut Strategi Quick Win Akuisisi PPN dan ReCONSULT 4. Program Prioritas Taun 2022 (Program Strategis Tahun 2022) 5. Persiapan RKAP Tahun 2023 (Asumsi-asumsi RKAP Tahun 2023)	1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussion of Company Performance QW IV Fiscal Year 2021 (Unaudited Financial Performance and KPI)</li> <li>2. Results of the Ernst and Young Study regarding CPSI Problem Solving</li> <li>3. Follow-up to the Quick Win Strategy for the Acquisition of PPN and ReCONSULT</li> <li>4. Priority Program for 2022 (Strategic Program for 2022)</li> <li>5. Preparation of the 2023 RKAP (2023 RKAP assumptions)</li> </ol>	
5	15 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak Lanjut Penyelesaian CPSI</li> <li>1. CPSI Completion Follow-up</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>
6	19 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Manajemen Risiko &amp; GCG</li> <li>2. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>3. Laporan Komite Audit</li> <li>1. Risk Management &amp; GCG Committee Report</li> <li>2. Nomination and Remuneration Committee Report</li> <li>3. Audit Committee Report</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>
7	13 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Manajemen Risiko &amp; GCG</li> <li>2. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi</li> <li>3. Laporan Komite Audit</li> <li>1. Risk Management &amp; GCG Committee Report</li> <li>2. Nomination and Remuneration Committee Report</li> <li>3. Audit Committee Report</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>
8	20 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review, Updating dan Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris</li> <li>1. Reviewing, Updating and Preparing Board of Commissioners Guidelines</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>
9	24 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris</li> <li>1. Income of the Board of Commissioners' Supporting Organs</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>
10	10 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review, Updating dan Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris</li> <li>1. Review, Updating and Preparation of Board of Commissioners Guidelines</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>



11	17 Juni 2022	<p>1. Review, Updating dan Penyusunan Pedoman Dewan Komisaris</p> <p><i>1. Review, Updating and Preparation of Board of Commissioners Guidelines</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
12	24 Juni 2022	<p>1. Pembahasan Pembagian Laba, Tantiem dan Bonus Tahun 2021 dan Remunerasi Tahun 2022</p> <p>2. Draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2021</p> <p>3. Persiapan Materi RUPS LPT Tahun Buku 2021</p> <p><i>1. Discussion of Profit Distribution, Tantiem and Bonuses for 2021 and Remuneration for 2022</i></p> <p><i>2. Draft 2021 Board of Commissioners Supervision Report</i></p> <p><i>3. Preparation of LPT GMS Materials for the 2021 Fiscal Year</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
13	27 Mei 2022	<p>1. Pembahasan Prognosa Pendapatan dan Biaya Enjiniring s.d Desember 2022</p> <p>2. Pembahasan Peningkatan Koordinasi Kerja Diteng dan Ditsar mendukung pencapaian Kinerja Perusahaan</p> <p>3. Tindak Lanjut RDD tanggal 22 April 2022</p> <p><i>1. Discussion of Prognosis of Engineering Revenue and Costs until December 2022</i></p> <p><i>2. Discussion on improving the work coordination of Diteng and Ditsar to support the achievement of company performance</i></p> <p><i>3. Follow-up RDD on April 22, 2022</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
14	06 Juni 2022	<p>1. Tindak Lanjut RDD tanggal 22 April Tahun 2022</p> <p>2. Penanganan Limbah Kondensat CNG Bangkanai sebagai Optima Action</p> <p>3. Hasil Kajian Opsi Pelelangan Aset PT CPSI</p> <p>4. Memastikan Legally, Financially dan Commercially Balanced</p> <p>5. Status Proyek Strategis PLNE Tahun 2022</p> <p><i>1. RDD Follow-up on April 22, 2022</i></p> <p><i>2. Handling Bangkanai CNG Condensate Waste as Optima Action</i></p> <p><i>3. Results of PT CPSI Asset Auction Options Study</i></p> <p><i>4. Ensure Legally, Financially and Commercially Balanced</i></p> <p><i>5. Status of PLNE Strategic Projects in 2022</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>



15	22 Juni 2022	<p>1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2021 <i>1. Preparation for the 2021 LPT AGM</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
16	08 Juli 2022	<p>1. Pembahasan Tindakan Korporasi Terkait CPSI 2. Laporan Komite Audit 3. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi 4. Laporan Komite MR &amp; GCG <i>1. Discussion of Corporate Actions Related to CPSI 2. Audit Committee Report 3. Nomination &amp; Remuneration Committee Report 4. MR &amp; GCG Committee Report</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
17	05 Agustus 2022	<p>1. Laporan Komite Audit 2. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi 3. Laporan Komite MR dan GCG <i>1. Audit Committee Report 2. Nomination &amp; Remuneration Committee Report 3. MR and GCG Committee Report</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
18	12 Agustus 2022	<p>1. Laporan Komite Audit 2. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi 3. Laporan Komite MR dan GCG <i>1. Audit Committee Report 2. Nomination &amp; Remuneration Committee Report 3. MR and GCG Committee Report</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
19	26 Agustus 2022	<p>1. Laporan Komite Audit 2. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi 3. Laporan Komite MR dan GCG <i>1. Audit Committee Report 2. Nomination &amp; Remuneration Committee Report 3. MR and GCG Committee Report</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
20	09 September 2022	<p>1. Laporan Komite Audit 2. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi 3. Laporan Komite MR dan GCG <i>1. Audit Committee Report 2. Nomination &amp; Remuneration Committee Report 3. MR and GCG Committee Report</i></p>	<p>1. Edwin Nugraha Putra 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Hardiv Harris Situmeang</p>
21	23 September 2022	<p>1. Perkenalan Dewan Komisaris <i>1. Introduction to the Board of Commissioners</i></p>	<p>1. Bob Saril 2. Edward Siagian 3. Muhammad Rizali Karliansyah 4. Fritz Edward Siregar</p>



22	15 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Tindakan Korporasi Terkait CPSI</li><li>2. Pembahasan Kontrak Manajemen dan KPI Direksi Tahun 2022</li><li>3. Pembahasan Laporan Manajemen TW I dan TW II Tahun 2022</li></ol> <p><i>1. Discussion of Corporate Actions Related to CPSI</i></p> <p><i>2. Discussion of Management Contracts and Directors' KPIs for 2022</i></p> <p><i>3. Discussion of the 2022 TW I and TW II Management Reports</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>
23	22 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Tindakan Korporasi Terkait CPSI</li></ol> <p><i>1. Discussion of Corporate Actions Related to CPSI</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>
24	31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencapaian Laporan Manajemen TW II - 2022</li><li>2. Proyeksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022, Permasalahan dan Solusinya</li></ol> <p><i>1. Management Report Achievements QW II - 2022</i></p> <p><i>2. Projected Performance Achievements in 2022, Problems and Solutions</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>
25	24 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2023</li></ol> <p><i>1. Discussion of the 2023 RKAP Proposal</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>
26	24 November 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencapaian Target Pendapatan PLNE Tahun 2022</li><li>2. Penjelasan Rencana Penyelesaian PLTMG Luwuk</li></ol> <p><i>1. Achievement of PLNE Revenue Target in 2022</i></p> <p><i>2. Explanation of the Luwuk PLTMG Completion Plan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>
27	14 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Singkat Komite Dekom</li><li>2. Pembahasan terkait Pencapaian Target RKAP 2022</li><li>3. Pembahasan terkait Perusahaan Afiliasi PT CPSI</li><li>4. Pembahasan terkait usulan RKAP 2023 dan RJPP</li></ol> <p><i>1. Brief Report of the BOC Committee</i></p> <p><i>2. Discussion regarding Achieving the 2022 RKAP Target</i></p> <p><i>3. Discussion regarding PT CPSI Affiliate Companies</i></p> <p><i>4. Discussion regarding the proposed 2023 RKAP and RJPP</i></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob Saril</li><li>2. Edward Siagian</li><li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li><li>4. Fritz Edward Siregar</li></ol>



28	10 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Endorsement BOD &amp; BOC Anak Perusahaan PLNE</li> </ol> <p><i>1. Endorsement BOD &amp; BOC PLNE Subsidiaries</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bob Saril</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Fritz Edward Siregar</li> </ol>
29	21 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Komite Audit</li> <li>2. Laporan Komite Nominasi &amp; Remunerasi</li> <li>3. Laporan Komite MR &amp; GCG</li> </ol> <p><i>1. Audit Committee Report</i> <i>2. Nomination &amp; Remuneration Committee Report</i> <i>3. MR &amp; GCG Committee Report</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bob Saril</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Fritz Edward Siregar</li> </ol>

## RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDAK DIREKSI

## MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BY INVITE THE BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan mengundang Direksi dengan ketentuan:

*The Board of Commissioners may hold a meeting by inviting the Board of Directors with the following conditions:*

1. Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada anggota Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

1. *Meetings of the Board of Commissioners in the presence of the Board of Directors are held as needed.*
2. *The summons for the meeting of the Board of Commissioners as referred to in number 1 above shall be made in writing by the President Commissioner or a Member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner and delivered to other members of the Board of Commissioners Commissioners and the Board of Directors at least 3 (three) days prior to the meeting.*
3. *The summons for the meeting must include the agenda, date, time and place of the meeting.*

Sepanjang tahun 2022, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

*Throughout 2022, the Agenda, Date and Participants of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows.*

**TABEL RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS**  
**BOARD OF COMMISSIONERS JOINT MEETING TABLE**

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>Meeting Participants - Board of Commissioners</i>	Peserta Rapat -Direksi <i>Meeting Participants - Directors</i>
1	18 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Draft RKAP 2022</li> <li>2. Inisiatif Strategis PLNE</li> <li>3. Brainstorming Usulan Pengembangan Bisnis ke PLNE Termasuk Struktur Organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>



	January 18, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022 RKAP Draft Discussion</li> <li>PLNE Strategic Initiative</li> <li>Brainstorming Business Development Proposals to PLNE Including Organizational Structure</li> </ol>		
2	25 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja Perseroan TW IV - 2021 (Kinerja Keuangan Unaudited &amp; KPI)</li> <li>Hasil Kajian EY Terkait Penyelesaian Masalah CPSI</li> <li>Tindak Lanjut Strategi Quick Win Akusisi PPN-REC</li> <li>Program Prioritas Tahun 2022 (Program Strategis Tahun 2022)</li> <li>Persiapan RKAP Tahun 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	February 25, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Company Performance QW IV - 2021 (Unaudited Financial Performance &amp; KPI)</li> <li>EY Study Results Regarding CPSI Problem Solving</li> <li>Follow-up to the Quick Win Strategy for the PPN-REC Acquisition</li> <li>Priority Programs for 2022 (Strategic Programs for 2022)</li> <li>2023 RKAP Preparation</li> </ol>		
3	15 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tindak Lanjut Penyelesaian CPSI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	March 15, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>CPSI Completion Follow-up</li> </ol>		
4	22 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Kinerja Keuangan TW I - 2022</li> <li>Upaya Peningkatan Akurasi Penyusunan Rencana Biaya Proyek</li> <li>Pembahasan Draft RKAP Tahun 2023</li> <li>Tindak Lanjut CNG Bangkanai</li> <li>Tindak Lanjut PT CPSI</li> <li>Pemaparan Usulan Perubahan Struktur Organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	April 22, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>QW I - 2022 Financial Performance Program</li> <li>Efforts to Increase the Accuracy of Preparing Project Cost Plans</li> <li>2023 RKAP Draft Discussion</li> <li>Follow-up on CNG Bangkanai</li> <li>Follow-up on PT CPSI</li> <li>Presentation on Organizational Structure Changes Proposal</li> </ol>		



5	27 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prognosa Pendapatan dan Biaya Enjiniring s.d Desember 2022</li> <li>2. Peningkatan Koordinasi Kinerja Direktorat Enjiniring dan Direktorat Pemasaran dalam mendukung pencapaian Kinerja Perusahaan</li> <li>3. Tindak lanjut Rapat Dekom Direksi tanggal 22 April 2022</li> <li>4. Penanganan Limbah Kondensat CNG Bangkanai sebagai Optimal Action</li> <li>5. Hasil Kajian Opsi Pelelangan Aset PT CPSI</li> </ol> <p>1. <i>Engineering Revenue and Costs until Prognosis December 2022</i></p> <p>2. <i>Engineering Directorate and Marketing Directorate Improvement Performance Coordination to support the achievement of Company Performance</i></p> <p>3. <i>Follow-up on the Board of Directors Meeting on April 22 2022</i></p> <p>4. <i>Handling Bangkanai CNG Condensate Waste as Optimal Action</i></p> <p>5. <i>PT CPSI Asset Auction Options Study Results</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
6	06 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut Rapat Dekom Direksi tanggal 22 April 2022</li> <li>2. Penganganan Limbah Kondensat CNG Bangkanai sebagai Optima Action</li> <li>3. Hasil Kajian Opsi Pelelangan Aset PT CPSI</li> <li>4. Memastikan Legally, Financially dan Commercially Balanced; status proyek strategis PLNE Tahun 2022</li> <li>5. Progres dan Kendala ; Diskusi Laporan Manajemen TW I - 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
7	22 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan RUPS LPT Tahun Buku 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edwin Nugraha Putra</li> <li>2. Edward Siagian</li> <li>3. Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>4. Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
	June 22, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>LPT GMS for the 2021 Fiscal Year Preparation</i></li> </ol>		



8	15 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Tindakan Korporasi Terkait CPSI</li> <li>Pembahasan Kontrak Manajemen dan KPI Direksi Tahun 2022</li> <li>Pembahasan Laporan Manajemen TW I dan TW II Tahun 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	July 15, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Corporate Actions Related to CPSI</li> <li>Discussion on Management Contracts and Directors' KPIs for 2022</li> <li>Discussion on the 2022 TW I and TW II Management Reports</li> </ol>		
9	22 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Tindakan Korporasi Terkait CPSI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	July 22, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Corporate Actions Related to CPSI</li> </ol>		
10	31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Laporan Manajemen TW II - 2022</li> <li>Proyeksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022, Permasalahan dan Solusinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Edwin Nugraha Putra</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Hardiv Harris Situmeang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Sudarmadi</li> <li>Martono</li> <li>Bernadus Sudarmanta</li> <li>Muhamad Reza</li> </ol>
	August 31, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Submission on Management Report QW II - 2022</li> <li>Projection on Performance Achievements in 2022, Problems and Solutions</li> </ol>		
11	24 Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Usulan RKAP 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bob Saril</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Fritz Edward Siregar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chairani Rachmatullah</li> <li>Martono</li> <li>Kurnia Rumdhony</li> <li>Muhammad Firmansyah</li> </ol>
	October 24, 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Discussion on 2023 RKAP Proposal</li> </ol>		
12	24 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian Target Pendapatan PLNE Tahun 2022</li> <li>Penjelasan Rencana Penyelesaian PLTMG Luwuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bob Saril</li> <li>Edward Siagian</li> <li>Muhammad Rizali Karliansyah</li> <li>Fritz Edward Siregar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Chairani Rachmatullah</li> <li>Martono</li> <li>Kurnia Rumdhony</li> <li>Muhammad Firmansyah</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Achievement of PLNE Revenue Target in 2022</li> <li>Explanation of the Luwuk PLTMG Completion Plan</li> </ol>		



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

### PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan *Assessment Good Corporate Governance* (GCG).

*The Board of Commissioners is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, an assessment of the performance of the Board of Commissioners has been carried out through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the Good Corporate Governance (GCG) Assessment.*

### KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui Kontrak Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

### BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

*The assessment criteria based on the KPIs that have been determined in the GMS through the Management Contract are as follows:*

1. Customer Focus
2. Effectiveness of Products and Processes
3. HR
4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Social Responsibility

### PROSEDUR PELAKSANAAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

### BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE IMPLEMENTATION PROCEDURES

*The performance appraisal of the Board of Commissioners through KPI is carried out by the Shareholders through the mechanism of the Annual General Meeting of Shareholders.*

### PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Key Performance Indicator (KPI) tahun 2021 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tanggal 30 Januari 2021.

### BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON KPI

*Performance appraisal of the Board of Commissioners through the 2021 Key Performance Indicator (KPI) which was approved by the Shareholders on January 30, 2021.*



## PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2021 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

## PARTIES THAT CONDUCT THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The party that evaluates the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable laws and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners will be responsible for their performance in the 2021 period at the GMS which will be held in 2022.

## HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melekat pada KPI Perusahaan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI pada tahun 2022, sebagai berikut.

## RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance appraisal of the Board of Commissioners is attached to the Company's KPIs. The results of the Board of Commissioners' performance assessment based on KPI in 2022, are as follows.

### TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

No	Indikator   Indicator	Bobot   Weight	Nilai   Score
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	40	40.25
2	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	24	25.78
3	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	14	14.60
4	Peningkatan Investasi Peningkatan Investasi	12	10.88
5	Pengembangan Talenta Talent Development	10	11.00
6	Aspek Kepatuhan Compliance Aspects	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>102.51</b>

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai 102.51.

The results of the performance assessment of the Board of Commissioners are classified as "HEALTH" in the "AAA" category with a score of 102.51.



## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment GCG. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**TABEL ASSESSMENT GCG DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2021**  
TABLE OF GCG ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2021

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2021 <i>Achievements in 2021</i>		Tingkat Pemenuhan (%)
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	Fullfilment Rate(%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,816	97,371
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,859	87,322
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	32,464	92,754
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	32,426	92,646
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,494	83,267
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	1,250	25,000
<b>Total Skor</b>		<b>100,00</b>	<b>88,309</b>	
<b>Total Score</b>				

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ASSESSMENT

The Board of Commissioners is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, the Board of Commissioners Performance Assessment is carried out through the GCG Assessment. The Board of Commissioners' Performance Assessment through the Good Corporate Governance (GCG) Assessment that has been carried out in 2022 is as follows.



## KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris.
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Pemberian arahan dan pengawasan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
6. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi,
7. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris.
8. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
9. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut.
10. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

## PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.

1. BPKP menugaskan Tim Assessment dalam pelaksanaan Assessment GCG 2022 PT PLN Enjiniring.

## BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners include:

1. Implementation of training/learning programs for the Board of Commissioners.
2. The division of tasks and determination of the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
3. Approval of the draft RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors.
4. Providing direction and supervision to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.
5. Implementation of supervision on the implementation of policies on the management of subsidiaries/joint ventures.
6. Role in nominating members of the Board of Directors, evaluating the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing tantiem/incentives for the performance of the Board of Directors,
7. Implementation of actions against potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners.
8. Monitoring the implementation of Good Corporate Governance principles.
9. The holding of the Board of Commissioners' Meeting and the level of attendance at the meeting.
10. There is a Secretary to the Board of Commissioners and Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

## PROCEDURE FOR IMPLEMENTING THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT THE GCG

Assessment Implementation Procedures related to the Performance of the Board of Commissioners are as follows.

1. BPKP assigned the Assessment Team to implement the 2022 GCG Assessment of PT PLN Enjiniring.



2. Tim *Assessment* mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan *Assessment GCG 2022*.
3. Tim *Assessment* memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan *Assessment GCG* ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

2. *The Assessment Team coordinates all related work units including coordinating with the Board of Commissioners in order to carry out the 2022 GCG Assessment.*
3. *The Assessment Team assigns a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then asks for approval from the Board of Commissioners.*
4. *Implementation of the GCG Assessment is carried out periodically every year.*

## PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2022 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

## PARTIES THAT PERFORM THE BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

*The party that evaluates the performance of the Board of Commissioners is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable laws and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Commissioners will account for their performance in the 2022 period at the GMS which will be held in 2023.*

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

1. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
3. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

## COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The Board of Commissioners carries out training/learning programs on an ongoing basis in order to improve the competence of members of the Board of Commissioners as needed.*

1. *There is a work plan and budget for training activities for the Board of Commissioners.*
2. *The implementation of training for members of the Board of Commissioners is realized in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
3. *There is a report on the results of the training that has been undertaken by members of the Board of Commissioners.*

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini :

*Throughout 2022, members of the Company's Board of Commissioners who have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:*



Dewan Komisaris	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Penyelenggara
Board of Commissioner	Competency/Training Development Materials	Execution Time		Organizers
		Start	Finished	
Ahmad Rofik	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)	November 22, 2021	November 23, 2021	CRMS
Edward Siagian	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum Terkait Laporan Keuangan	23 September 2021	23 September 2021	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)
	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	Responsibilities of the Audit Committee When the Company Is Involved in Legal Issues Related to Financial Statements	September 23, 2021	September 23, 2021	IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia)
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)	November 22, 2021	November 23, 2021	CRMS
M.R Karlansyah	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)	November 22, 2021	November 23, 2021	CRMS
Hardiv Harris Situmeang	GCG	03 November 2021	03 November 2021	DPS Consulting
	Pelatihan QRGP (Qualified Risk Governance Professional)	22 November 2021	23 November 2021	CRMS
	GCG	November 03, 2021	November 03, 2021	DPS Consulting
	QRGP training (Qualified Risk Governance Professional)	November 22, 2021	November 23, 2021	CRMS



## Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022

### *Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2022*

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perusahaan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2022, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diadakan pada setiap bulan.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali yang diadakan pada setiap bulan.
3. Dewan Komisaris telah mengikuti RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS RKAP Tahun 2022 dan RUPS LPT Tahun Buku 2021 PT PLN Enjiniring.
4. Dewan Komisaris telah menerbitkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan 2022.
5. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis atau proyek PLN Enjiniring.
6. Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap persoalan strategis, serta efektifitas pelaksanaan internal kontrol dan GCG di perusahaan.

*As part of its duties and responsibilities, the Company's Board of Commissioners continues to proactively supervise the performance of the Board of Directors and provide input to the Board of Directors. The form of supervision carried out by the Board of Commissioners of course refers to the implementation of the recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors as well as through the committees formed. In the period from January to December 2022, the Board of Commissioners does the following.*

1. *The Board of Commissioners has conducted Coordination Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 13 (thirteen) times which are held every month.*
2. *The Board of Commissioners has held Internal Meetings of the Board of Commissioners 29 (twenty nine) times which are held every month.*
3. *The Board of Commissioners has attended the GMS for 2 (two) times, namely the 2022 RKAP GMS and the LPT GMS for the 2021 Financial Year of PT PLN Enjiniring.*
4. *The Board of Commissioners has issued the 2022 Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners.*
5. *The Board of Commissioners has made a working visit related to the implementation of a PLN Enjiniring business or project.*
6. *The Board of Commissioners has reviewed matters that require the approval of the Board of Commissioners.*
7. *The Board of Commissioners has carried out supervision and monitoring of strategic issues, as well as the effectiveness of the implementation of internal control and GCG in the company.*



## REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

## REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

### TABEL REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

### BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION TABLE

Jabatan Position	Struktur Remunerasi Remuneration Structure
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>	<p>1. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama.</p> <p>2. Tunjangan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari honorarium</li> <li>- Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari honorarium dalam satu tahun.</li> </ul> <p>3. Fasilitas, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rapat inap, obat-obatan dan general check up 1 kali setahun termasuk kepada seorang istri/suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan.</li> <li>- Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan</li> </ul> <p>4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran untuk Komisaris Utama yaitu 45% dari Direktur Utama dan anggota bagi anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama</p> <p><i>1. The Honorarium for the President Commissioner is 45% of the President Director, while the Honorarium for members of the Board of Commissioners is set at 90% of the President Commissioner.</i></p> <p><i>2. Benefits consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Transportation allowance of 20% of the honorarium</i></li> <li>- <i>Post-Service Insurance of a maximum of 25% of the honorarium in one year.</i></li> </ul> <p><i>3. Facilities, consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Health facilities, namely outpatient care and medication, in-patient meetings, medication and general check-up once a year, including for a wife/husband and a maximum of 3 children who have not reached the age of 25 years, have not worked and are not married. Provided in the form of health insurance or medical expenses.</i></li> <li>- <i>Legal Assistance facilities are provided in the event of actions/deeds for and on behalf of his/her position relating to the aims and objectives and business activities of the Company</i></li> </ul> <p><i>4. Tantiem is determined by Shareholders with the composition of the amount for the President Commissioner being 45% of the President Director and for members of the Board of Commissioners being 90% of the President Commissioner</i></p>



## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Organ Pendukung Dewan komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

1. Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:
  - a. Komite Audit;
  - b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama;
  - c. Sekretariat Dewan komisaris, jika diperlukan;
  - d. Satu komite lain, jika diperlukan
2. Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Komisaris
3. Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, maksimal berjumlah 2(dua) orang.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari 2 (dua) dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
  - a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan.
5. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### • SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretaris Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.

## SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*Supporting Organs for the Board of Commissioners are the instruments of the Board of Commissioners whose function is to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties.*

1. *Supporting organs of the Board of Commissioners, consisting of:*
  - a. *Audit Committee;*
  - b. *Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function;*
  - c. *Secretariat of the Board of Commissioners, if required;*
  - d. *One more committee, if needed*
2. *One or more committee members as referred to in paragraph (1) are members of the Board of Commissioners*
3. *Members of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function and other committees that are not members of the Board of Commissioners, a maximum of 2 (two) people.*
4. *The Board of Commissioners may form more than 2 (two) other committees and/or determine the number of committee members who are not members of the Board of Commissioners more than 2 (two) people, if:*
  - a. *Required based on statutory regulations; or*
  - b. *Approved by the Minister based on the complexity and burden faced by the Board of Commissioners in carrying out their duties in the relevant BUMN.*
5. *The Committee is responsible to the Board of Commissioners.*

### • SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*Appointment and Dismissal of Members of the Secretary to the Board of Commissioners*

1. *The Board of Commissioners may establish a Secretariat of the Board of Commissioners which is led by a Board of Commissioners assisted by the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners.*



2. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan.

2. *The Secretary of the Board of Commissioners and the staff of the Secretariat of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
3. *Secretary to the Board of Commissioners comes from outside the Company.*

## TUGAS SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas, dengan ketentuan:

1. Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.
2. Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
  - b. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
  - c. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
  - d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

## DUTIES OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The Board of Commissioners has a Secretary to the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners. The Secretariat of the Board of Commissioners has a clear job description, with the following provisions:*

1. *There is a job description for the Secretariat of the Commissioners determined by the President Commissioner.*
2. *The main duties and functions are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities, at least covering the following matters:*
  - a. *Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners;*
  - b. *Organizing Board of Commissioners meetings and meetings/meetings between the Board of Commissioners and Shareholders/Capital Owners, Directors and other related parties;*
  - c. *Provide data/information needed by the Board of Commissioners and the committees within the Board of Commissioners in relation to (a) monitoring the follow-up to the decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners; (b) Administrative materials regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the company; (c) Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendation from the Board of Commissioners in connection with the company management activities carried out by the Board of Directors;*
  - d. *Collecting technical data originating from the Committees within the Board of Commissioners for the purposes of the Board of Commissioners.*



3. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
  - a. Mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh perusahaan.
  - b. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.
4. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

3. *The Secretary to the Board of Commissioners performs the administration and storage of documents in the form of: a. Has a Board of Commissioners document storage facility provided by the company. b. Administering outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.*
4. *Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Secretariat of the Board of Commissioners can access records or information about employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the implementation of their duties.*

## MASA JABATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## TERM OF OFFICE OF SECRETARY AND SECRETARIAT STAFF OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The term of office of the Secretary and staff of the Secretariat of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.*

## EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

## PERFORMANCE EVALUATION OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*Evaluation of the performance of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisory Board is carried out every 1 (one) year using the method determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board.*

## PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

### ■ Hadeyanti Sylviani

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2020. Pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengemangan Usaha di Rekadaya ElektriKA (2019-2020), menjabat sebagai

## BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY PROFILE

### ■ Hadeyanti Sylviani

*Indonesian citizens. Served as Secretary to the Board of Commissioners since 2020. He served as Director of Marketing and Business Development at Rekadaya ElektriKA (2019-2020), served as Director of Finance and*



Direktur Keuangan dan Pemasaran di PT Rekadaya ElektriKa (2017-2019), menjabat sebagai Dewan Komisaris di PT Rekadaya ElektriKa Consult (2013-2017). Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran dan Magister Management Keuangan dari Universitas Padjajaran.

*Marketing at PT Rekadaya ElektriKa (2017-2019), served as Board of Commissioners at PT Rekadaya ElektriKa Consult (2013-2017). Graduated with a Bachelor's degree in Accounting from Padjajaran University and a Masters in Financial Management from Padjajaran University.*

## KOMITE DEWAN KOMISARIS

Organ pendukung Dewan Komisaris Perseroan saat ini terdiri dari: Sekretaris Dewan komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance. Adapun pembentukan Komite Dewan Komisaris tersebut selaras dengan PERMEN BUMN PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan PERMEN BUMN No. Per-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

## COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

*The supporting organs of the Company's Board of Commissioners currently consist of: Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management and Good Corporate Governance Committee. The formation of the Committee for the Board of Commissioners is in line with PERMEN BUMN PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises and PERMEN BUMN No. Per-06/MBU/04/2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*

## KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab tealh mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual , dengan keanggotaan sebagai berikut :

## AUDIT COMMITTEE

*The Audit Committee was formed based on the decision of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with the following memberships:*

**TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE AUDIT**

**TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE**

No	Nama   Name	Jabatan   Position
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Risma Royani	Anggota <i>Member</i>
4	Julita Safitri Evawani	Anggota <i>Member</i>



## PROFIL KOMITE AUDIT

### AUDIT COMMITTEE PROFILE

No	Nama   Name	Jabatan   Office	Profil   Profile
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a Chairman of the Audit Commite since 2021. Previously he had experience as an Project Control Expert (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology (IRB) in 1982, then continued his Masters in Management at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1997.</i></p>
2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit sejak tahun 2021. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Direktur PLN Transmisi Luar Jawa- Bali (2008-2009), General Manager PLN Jasa Enjiniring (2002-2008), Direktur Transmisi dan Distribusi PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Asisten Kepala Divisi Transmisi dan Gardu Induk PLN Jasa Enjiniring (1996-2002), Senior Enjinir dan Ketua Tim berbagai Proyek Transmisi dan Gardu Induk 150kV dan 500kV PLN Jasa Enjiniring (1988-2002), serta Kepala Seksi Teknik Listrik, pada Sub Direktorat Teknik Jaringan dan Gardu (SUBDITRING), PT PLN (Persero) (1984-1988). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Inggris.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as Secretary of the Audit Commite since 2020. He served as Head of Engineering and Technology Division of PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Enjiniring Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the Transmission Division and PLN Enjiniring Service Sub-Station (1996-2002), Senior Engineering and Team Leader of PLN 150kV and 500kV transmission and substation projects(1988-2002), and head of Electricity Section, Network Construction Divisio PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the Universitas Indonesia and Master of Science in Electrical Engineering from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.</i></p>



3 Risma Royani Anggota  
Member

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Vice President Pengeluaran Operasi pada Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ( 2021 - sekarang), Vice President Treasury Business Management pada Divisi Treasury Direktorat Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ( 2020 -2021), Senior, Senior Manager Keuangan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (2018-2020) . Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 1994, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Universitas Lampung.

*Indonesian citizens. Has served as a Member of the Audit Committee since 2021. Previously he had experience as Vice President of Operational Expenditure at the Treasury Division of the Finance Directorate of PT PLN (Persero) Head Office ( 2021 - present), Vice President of Treasury Business Management at the Treasury Division of the Finance Directorate of PT PLN (Persero) ) Head Office ( 2020 -2021), Senior, Senior Finance Manager at PT PLN (Persero) West Java Transmission Main Unit (2018-2020) . Completed his Bachelor of Economics at the University of Lampung in 1994, then continued his Masters in Financial Management at the University of Lampung.*

4 Julita Safitri Anggota  
Evawani Member

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Senior Specialist 1 Perbendaharaan Divisi Treasury pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat( 2016 – sekarang), PLT Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Haleyora Power (2015 -2016). Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1989, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta pada tahun 2003.

*Indonesian citizens. Served as a Member of the Audit Committee since 2021. Previously he had experience as Senior Specialist 1 Treasury Division of Treasury at PT PLN (Persero) Head Office(2016 – present), PLT President Director concurrently as Director of Finance & HR at PT Haleyora Power (2015 -2016) . Completed Bachelor of Economics at Parahyangan University, Bandung in 1989, then continued his Masters in Management at Atmajaya Catholic University, Jakarta in 2003.*

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

## APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

*The appointment and dismissal of the Audit Committee is carried out under the following conditions:*

- a. *The Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee.*



- |  |   |
|--|---|
| <p>b. Ketua dan Anggota Komite Audi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.</p> <p>d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.</p> <p>e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>f. Anggota Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.</p> <p>g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.</p> | <p>b. <i>The Chairman and Members of the Audi Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.</i></p> <p>c. <i>The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners who is an Independent Member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Commissioners who can act independently.</i></p> <p>d. <i>Members of the Audit Committee can come from members of the Board of Commissioners or from outside the company.</i></p> <p>e. <i>The appointment and dismissal of members of the Audit Committee is reported to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>f. <i>Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.</i></p> <p>g. <i>In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Audit Committee ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee must be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.</i></p> |
|--|---|

## TUGAS KOMITE AUDIT

Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit bertugas untuk:
  - i. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
  - ii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
  - iii. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

## AUDIT COMMITTEE DUTIES

The duties of the Audit Committee are as follows:

- a. The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.
- b. The Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reporting and reporting directly to the Board of Commissioners.
- c. The Audit Committee is tasked with:
  - i. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties.
  - ii. Assess the implementation of activities as well as the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.
  - iii. Provide recommendations regarding the improvement of the management control system and its implementation.



- iv. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
- v. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
- vi. Selain tugas di atas Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

- iv. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company.
- v. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of the Board of Commissioners.
- vi. In addition to the above duties, the Board of Commissioners may give other assignments to the Audit Committee as stipulated in the audit committee charter.

## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

## TERM OF OFFICE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

## PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
  - 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
  - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif;
  - 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - 5) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis perusahaan.

## AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- a. The requirements for members of the Audit Committee are as follows:
  - 1) Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/ inspection;
  - 2) Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company;
  - 3) Able to communicate effectively;
  - 4) Can provide sufficient time to complete the task; and
  - 5) Other requirements set out in the audit committee charter, if necessary.
- b. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one must understand the company's industry/business.



## INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang berasal dari luar perusahaan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Independensi Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :

### TABEL INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

TABLE OF THE INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Edward Siagian	Bowo Setiadji	Risma Royani	Julita Safitri Evawani
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Having no financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Having no share ownership relationship at the company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Audit Committee members</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrator of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√

## INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

*The Audit Committee and the Risk Management Committee carry out their roles professionally and independently, and do not accept/intervene from/to other parties. Members of the Audit Committee and Risk Management Committee are not related to the Shareholders, the Board of Commissioners, or the Board of Directors. The Audit Committee and the Risk Management Committee who come from outside the company do not have personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest with the company. The independence of the Audit Committee and the Risk Management Committee is as follows:*



## KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab tealh mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual , dengan keanggotaan sebagai berikut :

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was formed based on the Decree of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with membership as follows:

### TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

#### TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

No	Nama   Name	Jabatan   Position
1	M.R. Karliansyah	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Committee, concurrently member</i>
2	Furqan Tanzala	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Robert Aprianto Purba	Anggota <i>Member</i>

### PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

#### NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

No	Nama   Name	Jabatan   Position	Profil   Profile
1	M.R. Karliansyah	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, merangkap anggota <i>Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2021, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 – 2015, dan Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2007 – 2010. Menyelesaikan Pendidikan S1 Biologi di Universitas Indonesia pada tahun 1985, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia pada tahun 1989</p> <p><i>Indonesia Citizen. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since 2021. Previously he had experience as Director General of Environmental Pollution and Damage Control at the Ministry of Environment and Forestry in 2015 – 2021, Deputy for Environmental Pollution Control at the Ministry of Environment in 2010 – 2015, and Assistant Deputy for Environmental Affairs Mining, Energy and Oil and Gas Pollution Control at the Ministry of Environment 2007 – 2010. Completed his Bachelor of Biology at the University of Indonesia in 1985, then completed his Masters in Environmental Science at the University of Indonesia in 1989</i></p>



2	Furqan Tanzala	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Vice President Human Capital Development di PT Indonesia Power (2019), Senior Spesialist I Mutu &amp; Kepatuhan di PT PLN (Persero) Corporate University (2020). Menyelesaikan Pendidikan S1 Ekonomi Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana pada tahun 1986</p> <p><i>Indonesian citizens. Served as Secretary of the Nomination and Remuneration Committee in 2021. Previously he had experience as Vice President of Human Capital Development at PT Indonesia Power (2019), Senior Specialist I Quality &amp; Compliance at PT PLN (Persero) Corporate University (2020). Completed Bachelor Degree in Corporate Economics from Krisna Dwipayana University in 1986</i></p>
3	Robert Aprianto Purba	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Executive Vice President Konstruksi Regional Maluku dan Papua pada Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua di PT PLN (Pers, ero) Kantor Pusat (2018-sekarang), Kepala Divisi Konstruksi Regional Maluku dan Papua pada Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua di PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1994, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 bidang Manajemen di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006.</p> <p><i>Indonesian citizens. Served as Member of the Nomination and Remuneration Committee in 2021. Previously he had experience as Executive Vice President of Regional Construction of Maluku and Papua at the Directorate of Regional Business of Maluku and Papua at PT PLN (Pers, ero) Head Office (2018-present), Head of Regional Construction Division Maluku and Papua at the Maluku and Papua Regional Business Directorate at PT PLN (Persero) Head Office (2018). Completed his Bachelor Degree in Electrical at the University of North Sumatra in 1994, then completed his Masters in Management at the University of North Sumatra in 2006.</i></p>

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang terdiri dari Ketua dan Anggota.

## APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The appointment and dismissal of the Nomination and Remuneration Committee is carried out under the following conditions:

- a. The Board of Commissioners is required to establish a Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function consisting of the Chairman and Members.



- |   |  |
|---|--|
| <p>b. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama adalah Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independent</p> <p>d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.</p> <p>e. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.</p> <p>f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Berakhir.</p> <p>g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.</p> | <p>b. <i>The Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.</i></p> <p>c. <i>The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is the President Commissioner/Independent Member of the Board of Commissioners or Member of the Board of Commissioners who can act independently</i></p> <p>d. <i>Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function may come from members of the Board of Commissioners or from outside the Company.</i></p> <p>e. <i>The appointment and dismissal of members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is reported to the General Meeting of Shareholders/Capital Owners.</i></p> <p>f. <i>Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function who are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as a member of the Board of Commissioners expires.</i></p> <p>g. <i>In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function must be replaced by another member of the Board of Commissioners at the latest. no later than 30 (thirty) days.</i></p> |
|---|--|

## **TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bekerja secara kolektif yang sama bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## **DUTIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE**

- a. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function works collectively and works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.*
- b. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is independent both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.*



- c. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama bertugas untuk :
- 1) melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
  - 2) melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi;
  - 3) melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talents), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (Nominated Talent);
  - 4) melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
  - 5) melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi;
  - 6) menyiapkan usulan system evaluasi Kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7) menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
  - 8) melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
  - 9) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- d. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama.
- c. *The Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function is tasked with:*
- 1) *conduct periodic reviews of the company's Talent Management System as well as monitoring and evaluation of its implementation;*
  - 2) *evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;*
  - 3) *validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talents), to produce a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Ministerial (Nominated Talent);*
  - 4) *evaluate the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, prior to submission to the GMS/Minister;*
  - 5) *evaluate the proposed Individual Key Performance Indicators for members of the Board of Directors;*
  - 6) *prepare a proposed individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
  - 7) *prepare a proposed development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;*
  - 8) *evaluate the remuneration policy for employees who require approval/response from the Board of Commissioners;*
  - 9) *Evaluate the recommendation of the Board of Directors regarding the company's organizational structure.*
- d. *In addition to the duties as referred to in letter a, the Board of Commissioners may assign other assignments to the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function as stipulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function.*



## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

- Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Mampu berkomunikasi secara efektif;
- Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama jika diperlukan.

## KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab telah mencerminkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Board Manual , dengan keanggotaan sebagai berikut :

## TERM OF OFFICE FOR NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBERS

*The term of office for members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without prejudice to the rights of the Board of Directors. Commissioner to dismiss him at any time.*

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER REQUIREMENTS

*Members of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function originating from other than the Board of Commissioners must meet the following requirements:*

- Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration;*
- Do not have any personal interests/relationships that may have a negative impact and conflict of interest on the Company;*
- Able to communicate effectively;*
- Can provide sufficient time to complete the task; and*
- Other requirements stipulated in the charter of the Nomination and Remuneration Committee or other nomenclature with the same function if necessary.*

## RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

*The Risk Management and GCG Committee was established based on the Decision of the Company's Board of Commissioners with the duties and responsibilities reflecting the provisions as stipulated in the Board Manual, with the following memberships :*



## TABLE JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE RISK MANAGEMENT & GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

No	Nama   Name	Jabatan   Position
1	Fritz Edward Siregar	Ketua Komite, merangkap anggota <i>Chairman of the Committee, concurrently member</i>
2	Fajar Seno Utomo	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Budhi Wicaksono	Anggota <i>Member</i>
4	Erwin Siagian	Anggota <i>Member</i>

## PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

### RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE PROFILE

No	Nama   Name	Jabatan   Office	Profil   Profile
1	Fritz Edward Siregar	Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG, merangkap anggota <i>Chairman of the Risk Management and GCG Committee, concurrently member</i>	<p>Warga negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau mempunyai pengalaman sebagai Ahli Utama di PT PLN (Persero) sejak tahun 2003, Direktur Perencanaan di PT PLN (Persero) pada tahun 2001 dan Direktur Perencanaan di PT PLN (Persero) pada tahun 1998. Beliau menyelesaikan gelar Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1976, gelar Magister Teknik Elektro di Union College, Schenectady, New York pada tahun 1985, dan menyelesaikan gelar Doktor di bidang System Science &amp; Mathematics di Washington University pada tahun 1993.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a Chairman of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Principal Expert at PT PLN (Persero) from 2003, Planning Director at PT PLN (Persero) in 2001 and Planning Director at PT PLN (Persero) in 1998. He completed his Bachelor's Degree in Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1976, Master's Degree in Electrical Engineering at Union College, Schenectady, New York in 1985, and completed his Doctoral Degree in System Science &amp; Mathematics at Washington University in 1993.</i></p>
2	Fajar Seno Utomo	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Pelaksana Pengadaan III pada Divisi Pengadaan Strategis Direktorat Pengadaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018), Vice President Pelaksana Pengadaan III pada Divisi Pengadaan Strategis Direktorat Pengadaan Strategis I PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Geodesi dari Institute Teknologi Bandung dan S1 Manajemen Bisnis dari Universitas Indonesia</p>



			<p><i>Indonesian citizens. Served as Secretary of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as Senior Manager of Procurement III in the Strategic Procurement Division of the Procurement Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2018), Vice President of Procurement III in the Strategic Procurement Division of the Directorate of Procurement Strategic I PT PLN (Persero) Head Office (2018). Graduated with a Bachelor of Geodetic Engineering from the Bandung Institute of Technology and a Bachelor of Business Management from the University of Indonesia</i></p>
3	Budhi Wicaksono	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Enjinir Prinsipal di PT Indo Koppe Enjiniring (2016 - 2021), Enjinir Konsultan pada PT PLN (Persero) PUSENLIS (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan Insinyur dari Departemen Teknik Listrik, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1985 dan melanjutkan Master of Science dari Departemen Teknik Listrik, Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1998.</p> <p><i>Indonesian citizen, Served as a member of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Principal Engineer at PT Indo Koppe Engineering (2016 - 2021), Consultant Engineer at PT PLN (Persero) PUSENLIS (2015-2016). Completed his Engineering Education from the Department of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) in 1985 and continued his Master of Science from the Department of Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB) in 1998.</i></p>
4	Erwin Siagian	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Senior Enjinir Mechanical PE di PT Indo Koppe Enjiniring (2015 - sekarang), PT PLN (Persero) PUSENLIS (1990-2015). Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1984 dan melanjutkan S2 Tehnik Mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1998.</p> <p><i>Indonesian citizen, Serving as a member of the Risk Management and GCG Committee since 2021. Previously he had experience as a Senior Mechanical PE Engineer at PT Indo Koppe Engineering (2015 - present), PT PLN (Persero) PUSELLIS (1990-2015). Completed his Bachelor of Mechanical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1984 and continued his Masters in Mechanical Engineering at the Bandung Institute of Technology in 1998.</i></p>



## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Risiko dan GCG.
- Membantu pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Good Corporate Governance di Perseroan.
- Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan praktek Good Corporate Governance di Perseroan.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko dan GCG melaksanakan tugasnya dengan lingkup kerja :

- Melakukan penelaahan Risiko Sasaran Strategis Perseroan dan isu-isu Strategis Internal dan Eksternal Perseroan.
- Melaksanakan monitoring atas efektifitas pengelolaan risiko perusahaan.
- Memastikan pencapaian maturity level ERM (Enterprise Risk Management) Perseroan.
- Melaksanakan monitoring atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan.
- Membantu melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan.
- Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas Komite MR dan GCG kepada Dewan Komisaris.

## MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Masa jabatan Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## RISK MANAGEMENT & GCG COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Risk Management and GCG Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners to:

- Conduct regular assessments and provide recommendations on the implementation of Risk Management and GCG.
- Assist in the assessment and assessment of the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance in the Company.
- Ensuring the effectiveness of the implementation of Risk Management and Good Corporate Governance practices in the Company.
- Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.

The Risk Management and GCG Committee carries out its duties with the following scope of work:

- Reviewing the Risks of the Company's Strategic Targets and the Company's Internal and External Strategic Issues.
- Carry out monitoring of the effectiveness of the company's risk management.
- Ensuring the achievement of the Company's ERM (Enterprise Risk Management) maturity level.
- Carry out monitoring on the effectiveness of GCG implementation in the Company.
- Assist in assessing the effectiveness of GCG implementation in the Company.
- Make a written report on the implementation of the duties of the MR and GCG Committee to the Board of Commissioners.

## TERM OF OFFICE FOR RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEMBERS

The term of office for members of the Risk Management and GCG Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.



## PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG yang berasal dari selain Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan :

- Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang Manajemen Risiko dan GCG;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidangnya, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.

## TATA KERJA KOMITE

### PIAGAM KOMITE

Piagam Komite disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

### PAKTA INTEGRITAS

Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

## RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE MEMBER REQUIREMENTS

Members of the Risk Management and GCG Committee who come from other than the Board of Commissioners must meet the following requirements:

- Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of Risk Management and GCG;
- Do not have any personal interests/relationships that may have a negative impact and conflict of interest on the Company;
- Have adequate knowledge in the field, and can provide sufficient time to complete the task; and
- Able to work together and communicate effectively.

## COMMITTEE WORKING PROCEDURES

### COMMITTEE CHARTER

The Committee's Charter is prepared with the following provisions:

- The Board of Commissioners determines the Committee Charter based on the Committee's proposal.
- The original Committee Charter is submitted to the Board of Directors for documentation.

### INTEGRITY PACT

The Committee is required to sign an integrity pact which is a statement and commitment to comply with all provisions of laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance.



## RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

Rencana kerja dan penganggaran disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- Salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

## RAPAT KOMITE

Rapat Komite dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
- Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

## PELAPORAN

Ketentuan pelaporan Komite adalah sebagai berikut:

- Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- Komite membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.

## WORK PLAN AND BUDGET

*The work plan and budgeting are prepared with the following provisions:*

- Prior to the current financial year, the Committee is required to prepare and submit an annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval.*
- A copy of the Committee's work plan and budget is submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors for information.*
- The implementation of the Committee's annual work plan and budget is reported to the Board of Commissioners.*

## COMMITTEE MEETING

*Committee meetings are held under the following conditions:*

- The Committee holds a meeting at least equal to the minimum requirements for the meeting of the Board of Commissioners set out in the articles of association.*
- Each Committee meeting is stated in the minutes of the meeting signed by all Committee members present.*
- The minutes of the meeting are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners.*
- The attendance of Committee members at meetings is reported in the quarterly reports and annual reports of the Committee.*

## REPORTING

*The Committee's reporting requirements are as follows:*

- The Committee is responsible to the Board of Commissioners and is required to submit reports to the Board of Commissioners on each task implementation, accompanied by recommendations if necessary.*
- The Committee makes quarterly reports and annual reports to the Board of Commissioners.*



- c. Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

- c. *The Committee Report is signed by the Committee Chair and Committee members.*

## AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Ketentuan akses dan kerahasiaan informasi Komite adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.

Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

## EVALUASI KINERJA KOMITE

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.

## ACCESS AND CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

*The provisions for access and confidentiality of Committee information are as follows:*

- a. *Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Committee can access records or information about the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties.*
- b. *The Committee is required to report in writing the results of the assignment to the Board of Commissioners.*

*The Committee is required to maintain the confidentiality of Company documents, data and information, both from internal and external parties and is only used for the purpose of carrying out its duties.*

## COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION

*Evaluation of the Committee's performance is carried out periodically as part of the Board of Commissioners' periodic reports using the method determined by the Board of Commissioners.*



## DIREKSI

### DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

*The Board of Directors is an authorized organ of the company and fully responsible for the management of the company in the interests of the company in accordance with the aims and objectives of the company, and represents the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The appointment and dismissal of the Board of Directors shall be carried out by the General Meeting of Shareholders and in carrying out their duties, the Board of Directors shall be responsible to the General Meeting of Shareholders.*

## PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

## REQUIREMENTS AND APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS

*The Company is managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Director.*

Adapun Kriteria Persyaratan Anggota Direksi adalah sebagai berikut.

*The Criteria for Requirements for Members of the Board of Directors are as follows.*

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. Dinyatakan pailit.
  - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau;
  - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

1. *Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they have:*
  - a. *Declared bankrupt.*
  - b. *Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who is found guilty of causing a Company or Perum to be declared bankrupt, or;*
  - c. *Sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or BUMN and/or related to the financial sector.*
2. *The fulfillment of the requirements as referred to in number 1 (one) above, is evidenced by a statement letter signed by the candidate for the Board of Directors and the letter is kept by the Company.*



3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan persyaratan peraturan perundangan.
4. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) tersebut di atas batal demi hukum sejak saat Anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

3. *In addition to meeting the requirements as referred to in number 1 (one) above, the appointment of Members of the Board of Directors is carried out by taking into account the expertise, experience and other requirements based on the requirements of the legislation.*
4. *The appointment of a member of the Board of Directors who does not meet the requirements as referred to in number 1 (one) and number 3 (three) above is null and void from the moment the other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners become aware of the non-fulfillment of these requirements.*

## BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Board Manual. Board Manual antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya Board Manual diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris.

## BOARD MANUAL BOARD OF DIRECTORS

*The work guidelines of the Board of Directors are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains instructions for the work of the Board of Directors, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner and must be carried out consistently, so that they can become a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission. With the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved, in line with GCG principles.*

*The contents of the Board Manual are as follows.*

- Chapter I : Introduction;*
- Chapter II : Directors;*
- Chapter III : Board of Commissioners;*
- Chapter IV : Management of the Authority of the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners;*
- Chapter V : Management of the Authority of the Board of Directors with the Approval of the GMS Based on Recommendations Board of Commissioners.*

## TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

*The Board of Directors is a company organ that is authorized and fully responsible for managing the company for the benefit of the company in accordance with the aims and objectives of the company, as well as representing the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*



Secara khusus, tugas Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka :
  - a. Direksi berwenang untuk;
    - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
    - 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang lain;
    - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5) Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan;
    - 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

*In particular, the duties of the Board of Directors include the following:*

1. *The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or General Meeting of Shareholders.*
2. *In carrying out its duties as referred to in number 1, then:*
  - a. *The Board of Directors is authorized to;*
    - 1) *To determine the management policy of the Company;*
    - 2) *Regulate the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people;*
    - 3) *Regulating provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and decisions of the General Meeting of Shareholders;*
    - 4) *Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;*
    - 5) *Appoint a Corporate Secretary;*
    - 6) *Take all other actions and actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court on all matters and all events, with the restrictions as regulated in the legislation, the Articles of Association and/or the decision of the General Meeting of Shareholders;*



b. Direksi berkewajiban untuk ;

- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- 2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana kerja dan Anggaran Perseroan;
- 4) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi;
- 5) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
- 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
- 7) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
- 8) Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- 9) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 di atas, dan dokumen Perseroan lainnya;

b. *The Board of Directors is obliged to;*

- 1) *Strive for and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the aims and objectives as well as its business activities;*
- 2) *Prepare on time the Company's Long-Term Plan, Work Plan and Budget and its amendments and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval at the General Meeting of Shareholders;*
- 3) *Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;*
- 4) *Make a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders and Minutes of Meeting of the Board of Directors;*
- 5) *Prepare an Annual Report as a form of accountability for the management of the Company as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;*
- 6) *Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to public accountants for auditing;*
- 7) *Submitting the Annual Report including Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification;*
- 8) *Provide explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report;*
- 9) *Submitting the Balance Sheet and Profit and Loss Report which has been approved by the General Meeting of Shareholders to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation;*
- 10) *Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of General Meeting of Shareholders, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors, Annual Report and Financial Documents of the Company as referred to in numbers 4 and 5 above, and other Company documents;*



- 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan yaitu :
    - a) Daftar Pemegang Saham;
    - b) Daftar Khusus;
    - c) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
    - d) Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi;
    - e) Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan;
    - f) Dokumen Perseroan lainnya.
  - 12) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
  - 13) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
  - 14) Menyiapkan susunan Organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
  - 15) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
  - 16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh kepada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran.
  5. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) *Save at the domicile of the Company, namely:*
    - a) *Register of Shareholders;*
    - b) *Special Lists;*
    - c) *Minutes of the General Meeting of Shareholders;*
    - d) *Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors;*
    - e) *Annual Report and Financial Documents of the Company;*
    - f) *Other Company documents.*
  - 12) *Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision;*
  - 13) *Provide periodic reports according to the method and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;*
  - 14) *Prepare the organizational structure of the Company complete with details and duties;*
  - 15) *Provide an explanation of all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and the Shareholders;*
  - 16) *Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and as determined by the General Meeting of Shareholders based on the laws and regulations.*
3. *In carrying out its duties, the Board of Directors is required to devote full thought, attention and dedication to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.*
  4. *In carrying out their duties, the Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.*
  5. *Each member of the Board of Directors must in good faith and full responsibility carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations.*



6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai tindakan tersebut disetujui oleh Rapat Direksi.
8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
  - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
  - b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerja sama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;  
Batasan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
    - 1) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan, transaksi, pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilainya per transaksi maksimal 15% (lima belas persen) dari ekuitas Perseroan yang telah di audit tahun buku terakhir.  
Pembatasan tersebut di atas diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan dimaksud;
    - 2) Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan dengan ketentuan pekerjaan, transaksi, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilainya per transaksi melebihi 15% (lima belas persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas perseroan yang telah di audit tahun buku terakhir.  
Pembatasan tersebut di atas diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan dimaksud;

6. *Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the company.*
7. *Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the Meeting of the Board of Directors are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Meeting of the Board of Directors.*
8. *The following acts of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners for:*
  - a. *As collateral for fixed assets for short-term loan withdrawal (up to 1 (one) year);*
  - b. *Conduct transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with business entities/other parties with a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;  
The limits for the delegation of authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners are as follows:*
    - 1) *The authority of the Board of Directors as referred to in letter (b) which does not require the approval of the Board of Commissioners is carried out with the provisions, transactions, work, cooperation, contracts or activities that the value per transaction is a maximum of 15% (fifteen percent) of the Company's equity that has been audited last financial year.  
The restrictions mentioned above are given without regard to the period of execution of the work, cooperation, contract or activity in question;*
    - 2) *The authority of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners as referred to in letter (b) is exercised with the provisions of the work, transaction, cooperation, contract or activity whose value per transaction exceeds 15% (fifteen percent) to 50% (fifty percent) of the company's equity which has been audited for the last financial year.  
The restrictions mentioned above are given without regard to the period of execution of the work, cooperation, contract or activity in question;*



- 3) Menyimpang dari hal-hal sebagaimana diatur pada angka (1) dan (2) di atas, khusus untuk kegiatan, transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dimana Perseroan bertindak sebagai penyedia layanan bidang enjiniring, Direksi Perseroan dapat memutuskan tanpa memperhatikan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, sepanjang harga penyediaan layanan tidak lebih rendah dari biaya produksi.
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
9. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
- a. Mengagunkan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan;
- b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- c. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- d. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (Corporate
- 3) *Notwithstanding the matters as regulated in numbers (1) and (2) above, specifically for activities, transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation where the Company acts as a service provider in the field of engineering, the Company's Board of Directors may decide without regard to the regulation of restrictions as referred to in numbers (1) and (2) above, as long as the price for providing services is not lower than the cost of production.*
- c. *Receive or provide medium/long term loans (more than 1 (one) year), except for loans (debts or receivables) granted to Subsidiaries provided that loans to the Company's Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;*
- d. *To write off bad debts and dead goods inventory from the books;*
- e. *Dispose of movable fixed assets with an economic life that is generally valid in the industry in general up to 5 (five) years;*
- f. *Determine the organizational structure of 1 (one) level below the Board of Directors, excluding the appointment of its officers.*
9. *The following actions can only be carried out by the Board of Directors after receiving a written response from the Board of Commissioners and approval from the General Meeting of Shareholders for:*
- a. *As collateral for equity participation in other companies, including additional capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
- b. *Make equity participation in other companies, including additional capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
- c. *Establishing Subsidiaries and/or joint ventures;*
- d. *Releasing participation in part or all of the capital in Subsidiaries and/or joint ventures;*
- e. *Merging, consolidating, taking over, separating and dissolving Subsidiaries and/or joint ventures;*
- f. *Bind the Company as guarantor (borg or avalist) and other guarantees (Corporate*



- Guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis;
- g. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang melebihi nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
- i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan;
- k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- l. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran-- Perusahaan (RKAP) termasuk melakukan perubahan RKAP, kecuali untuk perubahan pos anggaran maupun peruntukannya wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan;
- n. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
- o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
- Guarantee and the like), except for the issuance of Standby Letter of Credit/SBLC, Letter of Credit/LC arising from business transactions;*
- g. Entering into transactions, contracts, agreements, agreements and/or cooperation with other business entities/parties exceeding a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;*
- h. No longer collect bad debts that have been written off;*
- i. To release and write off the Company's fixed assets, except for movable fixed assets with an economic life which is generally applicable in the industry up to 5 (five) years;*
- j. To determine the blue print of the Company's organization;*
- k. Establish and change the Company's logo;*
- l. Take actions as referred to in paragraph 8 of this article that have not been stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), including making changes to the RKAP, except for changes to budget items and their allocations, which must obtain approval from the Board of Commissioners;*
- m. Establishing foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company which have an impact on the Company;*
- n. The imposition of fixed and routine Company fees for the activities of foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company;*
- o. Proposing the Company's representatives to become candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in joint ventures and or Subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the General Meeting of Shareholders.*
- 10. If within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and complete documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not make a decision, then the Board of Commissioners is deemed to have approved the proposal of the Board of Directors.*



11. Penetapan pagu pelimpahan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atas suatu transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 8 huruf b, baik jangka waktu atau nilai/besarannya akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah adanya usulan tertulis dari Direksi dan Dewan Komisaris.
  12. Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rekomendasi Dewan Komisaris, apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
  13. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:
    - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
    - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
  14. Transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 13 adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
  15. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 2.4.1 angka 13 tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
  16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian
11. *Determination of the ceiling on the delegation of authority to the Board of Directors and the Board of Commissioners to make decisions on a transaction as referred to in point 2.4.1 number 8 letter b, both the time period or the value/ amount will be decided by the General Meeting of Shareholders after a written proposal from the Board of Directors and Board of Commissioners.*
  12. *Acts of the Board of Directors that require the approval of the General Meeting of Shareholders with the recommendation of the Board of Commissioners, if within 30 (thirty) days from the receipt of the application or explanation and complete documents by the General Meeting of Shareholders from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not provide a recommendation, then The General Meeting of Shareholders may make decisions without a written response from the Board of Commissioners.*
  13. *The Board of Directors is required to seek approval from the General Meeting of Shareholders for:*
    - a. *transfer the Company's assets; or*
    - b. *make collateral for the Company's assets debt which is more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not.*
  14. *The transaction as referred to in point 2.4.1 number 13 is a transaction for the transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year. letter a is a transaction for the transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) financial year.*
  15. *The legal action as referred to in point 2.4.1 number 13 without the approval of the General Meeting of Shareholders, remains binding on the Company as long as the other party in the legal action has good intentions.*
  16. *Legal actions to transfer or make as collateral for debt or relinquish rights to the Company's assets as referred to in paragraph 13 of this article must obtain approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by Shareholders who own at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) part of the total number of shares with valid voting rights and approved by at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the total votes. In the event*



dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan kehadiran paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

17. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur Anggaran Dasar ini.
18. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
19. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
20. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
21. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
22. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

*that a quorum of attendance cannot be held a second General Meeting of Shareholders with the attendance of at least  $\frac{2}{3}$  (two thirds) of the total shares with valid voting rights and approved by at least  $\frac{3}{4}$  (three quarters) of the total number of shareholders. the voice.*

17. *The General Meeting of Shareholders may reduce restrictions on the actions of the Board of Directors stipulated in this Articles of Association or determine other restrictions on the Board of Directors other than those stipulated in these Articles of Association.*
18. *In order to implement the policy on the management of the Company, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company provided that all the actions of the said President Director have been approved by the Meeting of the Board of Directors.*
19. *If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
20. *In the event that the President Director does not make an appointment, then the Member of the Board of Directors who has served the longest in office is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.*
21. *In the event that there are more than 1 (one) member of the Board of Directors who has served the longest in office, then the Member of the Board of Directors as referred to in number 15 above is the oldest in age who is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
22. *In the event that a Member of the Board of Directors other than the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, the other Member of the Board of Directors shall appoint a Member of the Board of Directors to carry out the duties of the absent Member of the Board of Directors.*



23. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
24. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
25. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
26. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
27. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.4.1 angka 26 di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
23. *The Board of Directors for certain actions on their own responsibility has the right to appoint one or more persons as their representatives or proxies, by granting them or them the power to carry out certain actions as regulated in a power of attorney.*
24. *The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders. In the case of the General Meeting of Shareholders does not determine the division of tasks and authorities, then the division of tasks among the Board of Directors is determined by the Board of Directors.*
25. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as they do not conflict with the laws and regulations and/or these Articles of Association.*
26. *Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:*
- There is a case before the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; or*
  - The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.*
27. *In the event that there are conditions as referred to in point 2.4.1 number 26 above, those who are entitled to represent the Company are:*
- Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;*
  - the Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or*
  - Other parties appointed by the General Meeting of Shareholders in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company*



## MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

## TERM OF SERVICE, TERMINATION AND REDEMPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

### MASA JABATAN

### LENGTH OF SERVICE

1. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatan berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
4. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.
5. Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

1. *The term of office for members of the Board of Directors is set at 4 (four) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.*
2. *The position of a member of the Board of Directors ends when:*
  - a. *Passed Away;*
  - b. *Term of office ends;*
  - c. *Dismissed based on the decision of the General Meeting of Shareholders;*
  - d. *No longer meets the requirements as a Member of the Board of Directors based on the provisions of the Articles of Association and the laws and regulations.*
3. *The provisions as referred to in number 2 letter d above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignation.*
4. *In the event that the term of office of the Member of the Board of Directors ends and the General Meeting of Shareholders has not been able to determine a replacement, the duties of the vacant Member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling the position of the vacant Member of the Board of Directors.*
5. *For members of the Board of Directors who resign before or at the end of their term of office, unless they resign due to death, then the person concerned must submit accountability for his actions whose accountability has not been received by the General Meeting of Shareholders.*

### PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI

### TERMINATION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi:

1. *The General Meeting of Shareholders may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.*
2. *The reason for the dismissal of a Member of the Board of Directors as referred to in number 1 above is made if based on the facts, the Member of the Board of Directors:*



- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - d. Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara;
  - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f tersebut di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
  4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka 3 di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  5. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
  6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
  7. Dalam hal Anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas dianggap telah terpenuhi.
  8. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
- a. Unable to fulfill its obligations as agreed in the management contract;
  - b. Unable to carry out their duties properly;
  - c. Not implementing or violating the provisions of the legislation and/or the provisions of the Articles of Association;
  - d. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
  - e. Found guilty in connection with letters a, b and c above based on a court decision that has permanent legal force.
  - f. Resign.
3. In addition to the reasons for dismissing the members of the Board of Directors as referred to in numbers 2 letters a to f above, the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders based on other reasons deemed appropriate by the General Meeting of Shareholders for the interests and objectives of the Company.
  4. The decision to dismiss as referred to in number 2 letters a, b, c and d and number 3 above, is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself.
  5. The plan to dismiss at any time the members of the Board of Directors as referred to in number 1 above, shall be notified to the member of the Board of Directors concerned orally or in writing by the Shareholders.
  6. In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, the self-defense as referred to in number 4 above, shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days as of the date the member of the Board of Directors concerned is notified as referred to in paragraph (1). number 5 above.
  7. In the event that the dismissed Member of the Board of Directors has defended himself and expressed no objection to his dismissal plan when notified, the time provision as referred to in item 6 above is deemed to have been fulfilled.
  8. In the event that the dismissal is carried out at the General Meeting of Shareholders, the self-defense as referred to in number 4 above, shall be carried out at the General Meeting of Shareholders by ignoring the provisions of the time limit as referred to in number 6 above.



9. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e tersebut di atas, adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

9. *As long as the dismissal plan as referred to in number 5 above is still in process, the relevant Member of the Board of Directors must carry out his duties properly.*
10. *Dismissal for the reasons as referred to in number 2 letters d and e above, is a dismissal with no respect.*

## PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

## TEMPORARY TERMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act contrary to the Company's Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting their obligations or there are urgent reasons for the Company, taking into account the following provisions:*

1. *The decision of the Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors shall be made in accordance with the procedures for making decisions of the Board of Commissioners.*
2. *The said temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons causing the action with a copy to the Shareholders and the Board of Directors.*
3. *The notification as referred to in number 2 above shall be submitted no later than 2 (two) days after the stipulation of the temporary suspension.*
4. *Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management of the Company and represent the Company both inside and outside the court.*
5. *Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary suspension, a General Meeting of Shareholders must be held by the Board of Commissioners which will decide whether to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal.*



6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
  8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
  9. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas.
  10. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
  11. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
  12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
6. *In the General Meeting of Shareholders as referred to in number 5 above, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.*
  7. *The meeting as referred to in number 5 above is chaired by one of the Shareholders who is elected by and from among the Shareholders present.*
  8. *In the event that the period of 30 (thirty) days has elapsed, the General Meeting of Shareholders as referred to in number 5 above is not held or the General Meeting of Shareholders cannot make a decision, then the temporary suspension will be cancelled.*
  9. *Temporary dismissal cannot be extended or re-assigned for the same reason, if the temporary suspension becomes void as referred to in number 8 above.*
  10. *The decision to revoke or strengthen the decision to temporarily suspend a Member of the Board of Directors, may also be made by the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders on condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant decision with due observance of the time provisions as referred to in number 5 above.*
  11. *In the event of a decision to revoke or strengthen the decision to temporarily suspend a Member of the Board of Directors outside the General Meeting of Shareholders as referred to in number 10 above, the relevant Member of the Board of Directors shall be notified orally or in writing, with the opportunity to present his/her self-defense in writing within a period of time. 14 (fourteen) days after receiving the notification.*
  12. *If the General Meeting of Shareholders or Shareholders cancels the temporary suspension or there is a situation as referred to in number 8 above, the Member of the Board of Directors concerned must carry out his duties again as appropriate.*



## PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif tanggal pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

## PELAKSANA TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG LOWONG

1. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih Anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
  - a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut.
  - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk sementara salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau pihak lain selain Anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menjalankan

## RESIGNATION

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying in writing of his intention to the Company with a copy to the Shareholders, the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days prior to the date of his resignation. If the resignation letter mentions an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered not to mention the effective date of resignation.
2. If up to the date requested by the relevant Member of the Board of Directors or within 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter, in the event that the effective date of the resignation date is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then the Member The Board of Directors resigns on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.

## IMPLEMENTATION OF DUTIES FOR MEMBERS OF THE VACANT BOARD OF DIRECTORS

1. If for any reason the position of one or more members of the Board of Directors of the Company is vacant, then:
  - a. Within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders must be held to fill the vacant position of the Member of the Board of Directors.
  - b. As long as the position is vacant and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Member of the Board of Directors as referred to in letter a above, then temporarily another Member of the Board of Directors appointed by the Board of Commissioners or other party other than the existing Member of the Board of Directors is determined by the General Meeting Shareholders, to carry out the



- pekerjaan Anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
- c. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka untuk sementara Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai ditetapkannya Anggota Direksi yang definitif.
  - d. Bagi Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c di atas selain Anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
2. Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan Anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
- a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi jabatan Anggota Direksi yang lowong tersebut.
  - b. Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
  - c. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka untuk sementara Anggota-Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- work of the vacant Member of the Board of Directors with the same power and authority, until the appointment of a definitive Member of the Board of Directors.*
- c. *In the event that the position is vacant due to the end of the term of office and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Member of the Board of Directors as referred to in letter a above, then for the time being the Member of the Board of Directors whose term of office has ended may be determined by the Board of Commissioners to continue to carry out his work with authority. and the same authority, until a definitive Member of the Board of Directors is determined.*
  - d. *For the vacant members of the Board of Directors as referred to in letters b and c above, other than the members of the Board of Directors who are still in office, receive the same salary and allowances/facilities as the vacant members of the Board of Directors, excluding post-employment benefits.*
2. *If for any reason all positions of the members of the Board of Directors of the Company are vacant, then:*
- a. *Within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders must be held to fill the vacant position of the Member of the Board of Directors.*
  - b. *As long as the position is vacant and the General Meeting of Shareholders has not filled the vacant position of the Board of Directors as referred to in letter a above, the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners, or other parties determined by the General Meeting of Shareholders, with the same power and authority.*
  - c. *In the event that the position of the Board of Directors is vacant due to the end of the term of office and the General Meeting of Shareholders has not determined a replacement, then the members of the Board of Directors whose term of office has ended may be appointed by the Board of Commissioners to carry out their work with the same power and authority.*



- d. Bagi pelaksana tugas Anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut di atas, selain Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
3. Bagi Pelaksana Tugas Direksi yang lowong diberikan fasilitas santunan/asuransi purna jabatan atau fasilitas lain selama hal tersebut ditentukan oleh Pemegang Saham baik melalui RUPS maupun keputusan yang diambil di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

- d. For those who carry out the duties of the vacant members of the Board of Directors as referred to in letters b and c above, other than the Board of Commissioners, they receive the same salary and allowances/facilities as the vacant members of the Board of Directors, excluding post-employment benefits.

3. The vacant Acting Directors are provided with post-service compensation/insurance facilities or other facilities as long as this is determined by the Shareholders either through the GMS or decisions taken outside the GMS on condition that all shareholders with voting rights agree in writing by signing the proposed proposal.

## PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

1. Kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung Jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3. Program Pengenalan meliputi:
  - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
  - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
  - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
  - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan

## ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

1. Members of the Board of Directors who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company in question.
2. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as a corporate secretary.
3. The Introductory Program includes:
  - a. Implementation of GCG principles by the Company;
  - b. A description of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues;
  - c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
  - d. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors as well as things that are not allowed.
5. Company introduction programs can be in the form of presentations, meetings, company visits



dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

5. Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan:
  - a. Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.
  - b. Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.

*and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.*

6. *Newly appointed members of the Board of Directors participate in the introduction program organized by the company:*
  - a. *The Board of Directors submits to the Corporate Secretary to hold an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors.*
  - b. *The level of attendance/activity of members of the Board of Directors in participating in a series of company introduction programs.*

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

### PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
4. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung-jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
5. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara

## SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

### DEVELOPMENT OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. *The division of duties and authorities of each Member of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders. In the event that the General Meeting of Shareholders does not determine the division of duties and authorities, then the division of tasks among the Board of Directors is determined by the Board of Directors.*
2. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as they do not conflict with the laws and regulations and/or the Company's Articles of Association.*
3. *Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.*
4. *Actions taken by members of the Board of Directors other than those decided by the Meeting of the Board of Directors shall be the personal responsibility of the person concerned until the said action is approved by the Meeting of the Board of Directors.*
5. *If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then a member of the Board of Directors appointed in writing by the President*



tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

6. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
8. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
9. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
10. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

*Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*

6. *In the event that the President Director does not make an appointment, the member of the Board of Directors who has served the longest in office is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.*
7. *In the event that there are more than 1 (one) member of the Board of Directors who has served the longest in office, then the Member of the Board of Directors as referred to in point (6) above is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
8. *In the event that a Member of the Board of Directors other than the President Director is absent for any reason, which does not need to be proven to a third party, the other Member of the Board of Directors shall appoint a Member of the Board of Directors to carry out the duties of the absent Member of the Board of Directors.*
9. *The Board of Directors for certain actions on their own responsibility has the right to appoint one or more persons as their representatives or proxies, by granting them or them the power to carry out certain actions as regulated in a power of attorney.*
10. *In order to implement the management policy of the Company, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company provided that all the actions of the said President Director have been approved by the Meeting of the Board of Directors.*

**TABEL PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI**

**TABLE OF ASSIGNMENTS FOR DIRECTORS DUTIES**

Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
PLT Direktur Utama <i>President Director</i>	Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan PLN Enjiniring. <i>Establish, decide and determine the planning strategy and implementation of all PLN Enjiniring activities.</i>
Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kegiatan produksi dan operasi guna mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the production and operating activities to achieve the Company's goals and objectives effectively and efficiently.</i>



Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha

*Director of Marketing and Business Development*

Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan kegiatan pemasaran serta pengembangan usaha dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

*Establish, decide, determine and control the policies of marketing and business development activities in order to achieve the targets determined.*

Direktur Keuangan dan SDM

*Director of Finance and HR*

Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan dan SDM guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

*Establish, decide, determine and control the financial and HR policies and strategies to achieve the company goals and objectives effectively and efficiently.*

## PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Seluruh Direksi PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.

## FITNESS ASSESSMENT

*All Directors of PLN Enjiniring have met the criteria and provisions in the Fit and Proper Test based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other related rules and regulations.*

### TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

#### FIT AND PROPER TEST TABLE

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Chairani Rachmatullah	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Kurnia Rumdhony	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Martono	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Muhammad Firmansyah	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

PLN Enjiniring memiliki Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Direksi. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Direksi hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen. Komposisi Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik.

## DIVERSITY POLICY COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*PLN Enjiniring has a Good Corporate Governance Manual which, among other things, regulates the diversity of the composition of the Board of Directors. Based on these guidelines, the composition of the Board of Directors should be in such a way as to enable effective, precise, fast and independent decisions to be made. The composition of the Board of Directors is the right mix of managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities carried out, and has good character.*



Pada periode 2021, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam usia, pendidikan, dan pengalaman kerja, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

*In the 2021 period, the diversity of the composition of the Board of Directors, which is reflected in age, education, and work experience, can be seen in the table below:*

**TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI**

**TABLE OF COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS**

Nama Direksi <i>Name of Directors</i>	Usia <i>Age</i>	Pendidikan <i>Education</i>	Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>
Chairani Rachmatullah	54 Tahun	S1 Sipil Universitas Brawijaya S2 Teknik di The University Of Melbourne S3 Sipil di Universitas Indonesia	Senior Executive Vice President Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2021 – 2022, General Manager PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2019 – 2021, Executive Vice President Gas dan BBM pada tahun 2018 – 2019
	54 Years	<i>Bachelor of Civil Engineering from Brawijaya University Masters in Engineering at The University of Melbourne Doctoral Degree in Civil Engineering at the University of Indonesia</i>	<i>Senior Executive Vice President Risk Management PT PLN (Persero) Head Office in 2021 – 2022, General Manager of PT PLN (Persero) Electricity Engineering Center in 2019 – 2021, Executive Vice President Gas and BBM in 2018 – 2019</i>
Martono	53 Tahun	D3 Manajemen Bisnis di Politeknik UI  S1 Manajemen Keuangan di UNIBA	Vice President Anggaran III pada Bagian Anggaran Direktorat Keuangan Kantor Pusat PT PLN (Persero) tahun 2018-2021, Manajer Senior Anggaran III pada Bagian Anggaran Direktorat Keuangan Kantor Pusat PT PLN (Persero) Tahun 2016-2018, Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero) Unit Pengembangan Utama III Tahun 2013-2015
	53 Years	<i>Associate Degree in Business Management at UI Polytechnic  Bachelor's Degree in Financial Management at UNIBA</i>	<i>Vice President for Budget III in the Budget Section of the Finance Directorate of PT PLN (Persero) Head Office for 2018-2021, Senior Budget Manager III in the Budget Section of the Finance Directorate of PT PLN (Persero) Head Office 2016-2018, Finance and Human Resources Manager PT PLN (Persero) Main Development Unit III 2013-2015</i>



Kurnia Rumdhony	54 Tahun	S1 Informatika STMIK Gunadarma	Vice President Business Strategy Development Kantor Pusat PT PLN (Persero) tahun 2020 – 2022, Vice President Corporate Strategic Planning PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2018 – 2020, dan pernah berkarir di beberapa anak perusahaan antara lain PT PLN Batam sebagai General Manager Service Business Unit, PT Geodipa Energy sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan PT Indonesia Commet Plus terakhir sebagai Manager of Wilayah Jawa Barat.
	54 Years	Bachelor's degree informatic STMIK Gunadarma	Vice President Business Strategy Development PT PLN (Persero) Head Office 2020 – 2022, Vice President Corporate Strategic Planning PT PLN (Persero) Head Office in 2018 – 2020, and has had a career in several subsidiaries including PT PLN Batam as General Manager Service Business Unit, PT Geodipa Energy as Head of Business Planning and Development Division and PT Indonesia Commet Plus most recently served as Manager of the West Java Region.
Muhammad Firmansyah	48 Tahun	S1 Listrik di Institut Teknologi Bandung,  S2 Bidang Kelistrikan di Delft University Of Technology	Direktur Utama Anak Perusahaan PT Haleyora Power pada tahun 2021 – 2022, Executive Vice President Operation di PT Haleyora Power pada tahun 2020 – 2021, Senior Specialist II Operation dan Distribusi Pemeliharaan PT Haleyora Power tahun 2018 – 2020
	48 Years	Bachelor's Degree Electrical Engineering at Bandung Institute of Technology,  Masters in Electrical Engineering at Delft University of Technology	President Director of PT Haleyora Power Subsidiary in 2021 – 2022, Executive Vice President Operations at PT Haleyora Power in 2020 – 2021, Senior Specialist II Operation and Distribution Maintenance PT Haleyora Power 2018 – 2020

## JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Direksi PLN Enjiniring terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu seorang Direktur Utama dan 3 orang Direktur. Seluruh Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan

## NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTOR

*In accordance with the Articles of Association and the Board Manual, the Company is managed and led by a Board of Directors whose number is adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Director.*

*The Board of Directors of PLN Enjiniring consists of 4 (four) people, namely a President Director and 3 Directors. The entire Board of Directors has met the*



dalam *fit and proper test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

*criteria and provisions in the fit and proper test based on the Limited Liability Company Law and the provisions of GCG, as well as other related rules and regulations. Each member of the Board of Directors has sufficient integrity, competence and reputation.*

Komposisi Direksi PLN Enjiniring sebagai berikut.

*The composition of the Board of Directors of PLN Enjiniring is as follows.*

**TABEL KOMPOSISI DIREKSI**

**TABLE OF BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION**

No	Nama   Name	Jabatan   Position
1	Didik Sudarmadi	Direktur Utama <i>President Director</i>
2	Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>
3	Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>
4	Muhamad Reza	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>

**DASAR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MULAI BERLAKUNYA JABATAN DIREKSI**

**BASIS FOR APPOINTMENT, TERMINATION AND ENTRY INTO THE POSITION OF BOARD OF DIRECTORS**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan melalui Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian

1. *Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
2. *The decision of the General Meeting of Shareholders regarding the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall also determine the effective date of the appointment and dismissal. In the event that the General Meeting of Shareholders does not determine, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors shall take effect as of the closing of the General Meeting of Shareholders.*
3. *In the event that the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors is carried out through a decision of the shareholders outside the general meeting of shareholders, the appointment and dismissal shall take effect in the decision of the shareholders. In the event that the decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders does not stipulate, then the appointment and dismissal of*



Anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

4. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham

Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

*the Member of the Board of Directors is effective as of the decision of the Shareholders.*

4. *Members of the Board of Directors are appointed from the candidates proposed by the Shareholders and the nominations are binding for the General Meeting of Shareholders*

*The basis for the appointment of each member of the Board of Directors is as follows.*

### TABEL DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

#### TABLE OF BASIS OF DIRECTORS APPOINTMENT

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
Chairani Rachmatullah	Direktur Utama <i>President Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 21 September 2022</li> <li>2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022</li> </ol> <p><i>1. AGM Appointment of Directors on September 21, 2022 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 56 on September 22, 2023</i></p>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 19 Februari 2021</li> <li>2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 19 tanggal 26 Februari 2021</li> </ol> <p><i>1. AGM Appointment of Directors on February 19, 2021 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number, SH Number 19 on February 26, 2021</i></p>
Kurnia Rumdhony	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022</li> <li>2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022</li> </ol> <p><i>1. AGM Appointment of Directors on September 21, 2022 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 56 on September 22, 2022</i></p>
Muhamad Reza	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 21 September 2022</li> <li>2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 56 tanggal 22 September 2022</li> </ol> <p><i>1. AGM Appointment of Directors on 21 September 2022 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 56 on September 22, 2022</i></p>

### HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

### BOARD OF DIRECTORS AFFILIATE RELATIONSHIPS

*The Board of Directors always acts independently, in the sense that they do not have a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in relation to each other and the relationship to the Board of Commissioners.*



Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

*The Board of Directors has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Company, so that they can carry out their duties and responsibilities independently.*

*The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional and Private Enterprises or other positions related to the management of the Company, as well as structural positions, and other functional positions in central and local government agencies/institutions, as well as other positions. in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations.*

*Affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or controlling Shareholders, which includes:*

1. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
2. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
3. *Affiliation relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or controlling Shareholders.*
4. *Affiliate relationship between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and*
5. *Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major and/or controlling Shareholders.*



## TABEL HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

### TABEL OF BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION

Direksi <i>Directors</i>	Hubungan Keuangan dan Keluarga Direksi <i>Financial and Family Relations</i>													
	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relation With</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Family Relations With</i>						Hubungan Kepengurusan Dengan <i>Management Relation With</i>	
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Dewan Komisaris <i>Boards of Commissioners</i>		Direksi <i>Directors</i>		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>		Perusahaan lain <i>Other Companies</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Chairani Rachmatullah		√		√		√		√		√		√		√
Martono		√		√		√		√		√		√		√
Kurnia Rumdhony		√		√		√		√		√		√		√
Muhamad Reza		√		√		√		√		√		√		√

Antar anggota Direksi dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

*Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors there is no blood relationship up to the third degree, either in a straight line or a sideways line or by marriage.*

## KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Direksi sebagai berikut.

## SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

*The Board of Directors does not own any shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Directors is as follows.*



## TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### TABLE OF BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Board of Directors</i>	<i>Position</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Chairani Rachmatullah	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Kurnia Rumdhony	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Muhammad Firmansyah	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>

## RANGKAP JABATAN DIREKSI

## DUAL POSITIONS OF BOARD OF DIRECTORS

### PENGATURAN RANGKAP JABATAN

### MULTIPLE POSITION ARRANGEMENTS

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
  - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota legislatif ; dan/atau
  - e. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin 1, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as mentioned below, namely:
  - a. Members of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
  - b. Member of the Board of Commissioners in State-Owned Enterprises;
  - c. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
  - d. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, management and/or legislative candidates/ members; and/or
  - e. Other positions that may cause a conflict of interest.
2. In addition to concurrent positions as referred to in point 1, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other companies, except:



- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/ selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.</p> <p>3. Direksi yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.</p> | <p>a. <i>Members of the Board of Commissioners in the relevant SOE subsidiary/joint venture company, provided that they are only entitled to the accumulated income as a member of the Board of Commissioners in one or more subsidiaries/joint venture companies of a maximum of 30% (thirty percent) of the salary of the member of the Board of Directors concerned in the SOE, while the remaining/other income shall be turned over to the income of the relevant SOE.</i></p> <p>b. <i>Members of the Board of Commissioners in other companies to represent/fight for the interests of SOEs as long as they obtain permission from the Minister.</i></p> <p>3. <i>Directors who hold concurrent positions as referred to in number 1, their term of office as Directors ends as of the occurrence of these concurrent positions.</i></p> |
|--|---|

Pada Tahun 2022 tidak ada Direksi yang melakukan rangkap Jabatan di Perusahaan lain.

*In 2022 there are no Directors who hold concurrent positions in other companies.*

**TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS**

**TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Nama Direksi <i>Name of Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>
Chairani Rachmatullah	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Martono	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Kurnia Rumdhony	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Muhammad Firmansyah	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Tidak Ada <i>None</i>

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris

*In order to minimize the occurrence of conflicts of interest due to concurrent positions, each member of the Board of Directors is required to sign an Integrity Pact which contains information that in carrying out their duties, members of the Board of Directors will not do things that may cause a conflict of interest. The Integrity Pact is kept and administered by the Secretary.*



## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan.

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan, meliputi:
  - a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
  - b. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan;
  - c. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
  - a. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus;
  - b. Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
  - c. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.

## CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

*The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest.*

1. *Establish policies on mechanisms for the Board of Directors and structural officers to prevent personal and other party profits from being taken due to conflicts of interest, including:*
  - a. *Develop a mechanism to prevent the taking of personal benefits of the Board of Directors and structural officers of the Company due to conflicts of interest;*
  - b. *Disseminate policies on mechanisms to prevent the taking of personal benefits for the Board of Directors and structural officers of the Company;*
  - c. *Signing a statement that the Board of Directors does not have a conflict of interest between personal/family interests, other positions, or groups with the interests of the Company at the beginning of the appointment which is renewed at the beginning of each year.*
2. *Establish policies to prevent conflicts of interest.*
  - a. *Submit a report on share ownership in other companies to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in a special register;*
  - b. *Signing the Integrity Pact attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain approval from the Board of Commissioners and/or recommendation from the Board of Commissioners and approval of the GMS;*
  - c. *There is no transactional decision making that contains a conflict of interest.*



## BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan kepentingan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka RUPS dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

## CONFLICT OF INTEREST

1. *If something happens where the interests of the Company conflict with the interests of a member of the Board of Directors, the Company will be represented by another member of the Board of Directors appointed by and from members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest.*
2. *If the conflict of interest concerns all members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or represented by one or more persons appointed by the Board of Commissioners in writing.*
3. *In the absence of a Board of Commissioners, the GMS may appoint one or more persons to represent the Company in carrying out the duties referred to in points 1 and 2 above.*



## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2022

### IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan PT PLN Enjiniring sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan perusahaan, antara lain RKAP Tahun 2022.
2. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
3. Pelaksanaan *Cost Revenue Management Program* (CRMP).
4. Penjajakan *Partnership* dengan investor *reputable* dalam pengembangan energi terbarukan.
5. Sistem penilaian kinerja Direksi secara Individu/ Direktorat dan Kolegial.
6. KKG, KKO, Kajian Risiko dan Mitigasinya untuk *project* yang didanai oleh SHL.
7. *Compliance* terhadap *covenant* obligasi
8. Penyelenggaraan rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; serta
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan perusahaan.

*During 2022, the Board of Directors has carried out the duties of managing PT PLN Enjiniring in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association, including:*

1. *Preparation of company plans, including the 2022 RKAP.*
2. *Fulfillment of company performance targets.*
3. *Implementation of Cost Revenue Management Program (CRMP).*
4. *Scoping partnerships with reputable investors in the development of renewable energy.*
5. *Individual/Directorate and Collegial Board of Directors performance appraisal system.*
6. *KKG, KKO, Risk Assessment and Mitigation for projects funded by SHL.*
7. *Compliance with bond covenants*
8. *Organizing meetings of the Board of Directors, attending meetings of the Board of Commissioners and General Meeting of Shareholders;*
9. *Supervision and improvement of internal business processes; as well as*
10. *Implementation of other duties related to the management of the company.*

### RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan rapat Direksi PLN Enjiniring diselenggarakan minimal sekali dalam seminggu. Rapat Direksi tersebut dapat berupa rapat internal Direksi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

### BOARD OF DIRECTORS MEETING

*The PLN Enjiniring Board of Directors meeting is held at least once a week. The Board of Directors meeting can be in the form of an internal meeting of the Board of Directors, or a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*



## FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

### FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

TABEL FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

TABLE OF FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Direksi <i>Board of Directors Meeting</i>			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners</i>		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
			<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>	<i>Number of Meetings</i>	<i>Frequency of Meetings</i>	<i>Percentage of Attendance rate</i>
1	Didik Sudarmadi	Direktur Utama	20	11	55%	12	6	60%
	<i>Didik Sudarmadi</i>	<i>President Director</i>	<i>20</i>	<i>11</i>	<i>55%</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>60%</i>
2	Martono	Direktur Keuangan dan SDM	20	19	96%	12	8	75%
	<i>Martono</i>	<i>Director of Finance and HR</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>96%</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>75%</i>
3	Bernadus Sudarmanta	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha	20	11	55%	12	8	75%
	<i>Bernadus Sudarmanta</i>	<i>Director of Marketing and Business Development</i>	<i>20</i>	<i>11</i>	<i>55%</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>75%</i>
4	Muhamad Reza	Direktur Enjiniring	20	11	55%	12	8	75%
	<i>Muhamad Reza</i>	<i>Director of Engineering</i>	<i>20</i>	<i>11</i>	<i>55%</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>75%</i>
1	Chairani Rachmatullah	Direktur Utama	20	9	45%	12	4	25%
	<i>Chairani Rachmatullah</i>	<i>President Director</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>45%</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>25%</i>
2	Kurnia Rumdhony	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha	20	9	45%	12	4	25%
	<i>Kurnia Rumdhony</i>	<i>Director of Marketing and Business Development</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>45%</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>25%</i>
3	Muhammad Firmansyah	Direktur Enjiniring	20	9	45%	12	4	25%
	<i>Muhammad Firmansyah</i>	<i>Director of Engineering</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>45%</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>25%</i>



## AGENDA, TANGGAL DAN PERSIAPAN RAPAT INTERNAL DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut.

## AGENDA, DATE AND PREPARATION FOR INTERNAL MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2022, the agenda, dates and participants of the Internal Meeting of the Board of Directors are as follows.

### TABEL AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT INTERNAL DIREKSI

#### THE AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF INTERNAL DIRECTORS' MEETINGS

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	19 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Risiko Korporat Tahun 2022</li> <li>2. Presentasi Terkait Roadmap PLNE dengan Pendampingan dari Konsultan Smartrisk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
2	24 Februari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Perseroan TW IV - 2021 (Kinerja Keuangan Unaudited dan KPI)</li> <li>2. Hasil Kajian EY terkait Penyelesaian Masalah CPSI</li> <li>3. Tindak Lanjut Strategi Quickwin Akuisisi PPN - REC</li> <li>4. Program Prioritas Tahun 2022</li> <li>5. Persiapan RKAP 2023 (Asumsi RKAP 2023)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
3	02 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan Realisasi Program FGD 1-3</li> <li>2. Pemaparan Materi Dedieselisasi</li> <li>3. Mekanisme Penerimaan Pekerjaan dari Luar PLN yang belum ada PPA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
4	06 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progress FGD 1-3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>
5	20 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Realisasi KPI s.d April 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didik Sudarmadi</li> <li>2. Martono</li> <li>3. Bernadus Sudarmanta</li> <li>4. Muhamad Reza</li> </ol>



6	31 Mei 2022	1. Pembahasan Kondisi PT CPSI	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
7	08 Juni 2022	1. Pemaparan Realisasi Program FGD 1-3	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
8	04 Juli 2022	1. Pemaparan Realisasi Program FGD 1-3	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
9	03 Agustus 2022	1. Rapat Tinjauan Manajemen	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
10	24 Agustus 2022	1. Tindak Lanjut Pending Items dari Rapat Sebelumnya 2. Sosialisasi HSH 3. Value Creation PLNE 4. Update PLTMG Luwuk	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
11	07 September 2022	1. Pembahasan Keputusan Direksi Sirkuler Tentang Ijin Prinsip Penutupan Asuransi Asset CNG Plant Bangkanai	1. Didik Sudarmadi 2. Martono 3. Bernadus Sudarmanta 4. Muhamad Reza
12	06 Oktober 2022	1. Pembahasan RKAP 2023 2. Permintaan Keputusan Amandemen Kontrak Dari Direktorat Enjiniring 3. Usulan Perubahan Beberapa Keputusan Direksi	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
13	20 Oktober 2022	1. Kerjasama dengan Pusharlis 2. Pembahasan PT CPSI	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah



14	28 Oktober 2022	1. Prosedur Enjiniring Business Development	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
15	10 November 2022	1. Kebijakan Pengelolaan Anggaran 2. Usulan Investasi Pengambilalihan Saham CPSI 3. Paparan Revisi PE di Sub Bidang Perencanaan Pengadaan	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
16	17 November 2022	1. Usulan Perubahan Organisasi di TND 2. Proses Pemecahan Pemegang Saham REC	1. Chairani Rachmatullah 2. Kurnia Rumdhony 3. Muhammad Firmansyah
17	18 Desember 2022	1. Usulan Implementasi Pembaharuan Prosedur Terkait Pengendalian Anggaran Operasi 2. Harga Produk dan Layanan PLNE 3. Pembahasan Maurity Level ERM Semester 2 4. Pembahasan Lain-Lain	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
18	15 Desember 2022	1. Pembahasan Materi Pra RUPS RKAP 2023	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
19	22 Desember 2022	1. Usulan Perubahan Logo PLNE 2. Pulling Anggaran untuk Lisensi Aplikasi 3. Laporan tentang Kondensat CNG Bangkanai 4. Non Allowable Cost (NAC) di Lingkungan PLNE	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah
20	29 Desember 2022	1. Progress DRUPS 2. Progress Penugasan PLTMG Luwuk 3. Kajian Legal PLTMG Luwuk 4. Kajian Risiko PLTMG Luwuk 5. Kondensat CNG Bangkanai	1. Chairani Rachmatullah 2. Martono 3. Kurnia Rumdhony 4. Muhammad Firmansyah



Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

*The agenda, date and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the agenda, date and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors in this annual report.*

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

1. Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
2. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
4. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

Sepanjang tahun 2022, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

## BOARD OF DIRECTORS' COMPETENCE DEVELOPMENT

*The Board of Directors carries out training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed.*

1. *There is a policy on training for members of the Board of Directors as needed.*
2. *There is a work plan and budget for training activities for members of the Board of Directors.*
3. *Training for members of the Board of Directors is realized in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
4. *There is a report on the results of the training that has been undertaken by members of the Board of Directors.*

*Throughout 2021, members of the Company's Board of Directors have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:*

**TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI**

**TABLE OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT**

Direksi	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
		Start	Finished	
Board of Directors	Competency/Training Development Materials	Start	Finished	Types of Training and Organizers
Chairani Rachmatullah	Tingkatkan Produktivitas Organisasi melalui Peningkatan Kompetensi SDM	22 Oktober 2022	22 Oktober 2022	IIEA
	Pengembangan Profesional Social Media	14 November 2022	31 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
Chairani Rachmatullah	Increase Organizational Productivity through HR Competency Improvement	October 22, 2022	October 22, 2022	IIEA
	Social Media Professional Development	November 14, 2022	December 31, 2022	PLN CORPU



Martono	Professional Coach Program	17 Oktober 2022	02 Desember 2022	PLN PUSAT
	Pengembangan Profesional Social Media	14 November 2022	31 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
	Loop Certified Professional Coach Program	1 Desember 2022	2 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
	Governance Risk Compliance Professional	5 Desember 2022	7 Desember 2022	Grajosa Resources
	LEADERS TALK SERIES 2022 #5: BUILDING VALUE CREATION	14 Desember 2022	14 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
Martono	Professional Coach Program	October 17, 2021	December 02, 2022	PLN PUSAT
	Social Media Professional Development	November 14, 2022	December 31, 2022	PLN CORPU
	Loop Certified Professional Coach Program	December 01, 2022	December 02, 2022	PLN CORPU
	Governance Risk Compliance Professional	December 05, 2022	December 07, 2022	Grajosa Resources
	LEADERS TALK SERIES 2022 #5: BUILDING VALUE CREATION	December 14, 2022	December 14, 2022	PLN CORPU
Kurnia Rumdhony	Pengembangan Profesional Social Media	14 November 2022	31 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
	Governance Risk Compliance Professional	5 Desember 2022	7 Desember 2022	Grajosa Resources
Kurnia Rumdhony	Social Media Professional Development	November 14, 2022	December 31, 2022	PLN CORPU
	Governance Risk Compliance Professional	December 05, 2022	December 07, 2022	Grajosa Resources
Muhammad Firmansyah	Pengembangan Profesional Social Media	14 November 2022	31 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
	Governance Risk Compliance Professional	5 Desember 2022	7 Desember 2022	Grajosa Resources
	WORKSHOP PROJECT, PROCUREMENT & RENEWABLE ACADEMY IMPROVEMENT	1 Desember 2022	2 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT
	LEADERS TALK SERIES 2022 #5: BUILDING VALUE CREATION	14 Desember 2022	14 Desember 2022	PLN PUSDIKLAT



Muhammad Firmansyah	Social Media Professional Development	November 14, 2022	December 31, 2022	PLN CORPU
	Governance Risk Compliance Professional	December 05, 2022	December 07, 2022	Grajosa Resources
	WORKSHOP PROJECT, PROCUREMENT & RENEWABLE ACADEMY IMPROVEMENT	December 01, 2022	December 02, 2022	PLN CORPU
	LEADERS TALK SERIES 2022 #5: BUILDING VALUE CREATION	December 14, 2022	December 14, 2022	PLN CORPU

## PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan pelaksanaan *Assessment GCG*.

- PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KPI**

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2022 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen tanggal 28 Januari 2022.

- PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS Tahunan. Keputusan RUPS Tahunan sudah diuraikan dalam bagian RUPS dalam laporan ini.

- KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui kontrak manajemen adalah sebagai berikut.

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja

## BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

*The Board of Directors has committed to continuously improve its performance achievement. To support this, the Board of Directors' performance assessment has been carried out through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the implementation of the GCG Assessment.*

- PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS BASED ON KPI**

*Performance appraisal of the Board of Directors through the 2022 Key Performance Indicator (KPI) which has been approved by the Shareholders through the Management Contract on January 28, 2022.*

- PROCEDURE FOR THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*The procedure for implementing the performance appraisal of the Board of Directors is carried out through the mechanism of the Annual GMS. The resolutions of the Annual GMS have been described in the GMS section of this report.*

- BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA**

*The assessment criteria based on KPIs that have been determined in the GMS through a management contract are as follows.*

1. Customer Focus
2. Product and Process Effectiveness
3. Workforce Focus



4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

• **PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2022 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

• **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI pada tahun 2022, sebagai berikut ;

**TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN DIREKSI**

TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTOR PERFORMANCE ASSESSMENT

No	Indikator   Indicator	Bobot   Weight	Nilai   Score
1	Fokus Pelanggan Customer Focus	8	7.70
2	Efektifitas Produk dan Proses Effectiveness of Products and Processes	32	33.50
3	Fokus Tenaga Kerja HR	12	12.20
4	Keuangan dan Pasar Finance and Markets	39	38.85
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, governance and social responsibility	9	9.39
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>101.64</b>

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan nilai 102.51

• **PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN ASSESSMENT GCG**

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui pelaksanaan Assessment GCG.

4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Community Responsibility

• **PARTIES THAT CONDUCT THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The party that evaluates the performance of the Board of Directors is the Shareholders in the GMS based on the obligations contained in the applicable legislation and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Directors will account for their performance in the 2022 period at the GMS which will be held in 2023.

• **BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS**

The results of the Board of Directors' performance assessment based on KPI in 2022, are as follows;

The results of the Board of Directors' performance assessment based on KPI are classified as "HEALTH" in the "AAA" category with a score of 102.51.

• **PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS BASED ON GCG ASSESSMENT**

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, an assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through the implementation of the GCG Assessment.



• **PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. PLN Enjiniring menugaskan tim assessment Perseroan dalam melaksanakan Assessment GCG.
2. Tim Assessment GCG mengkoordinir seluruh unit kerja terkait, termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan Assessment GCG
3. Tim Assessment memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun

• **KINERJA PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;

• **PROCEDURE FOR THE PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*The procedure for implementing the GCG Assessment related to the Performance of the Board of Directors is as follows.*

1. *PLN Enjiniring assigns the Company's assessment team to carry out the GCG Assessment.*
2. *The GCG Assessment Team coordinates all related work units, including coordinating with the Board of Commissioners in carrying out the GCG Assessment*
3. *The Assessment Team assigns a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then asks for approval from the Board of Commissioners*
4. *Implementation of this GCG Assessment is carried out periodically every year*

• **PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE**

*The criteria used in assessing the performance of the Board of Directors include:*

1. *Implementation of training/learning programs for the Board of Directors;*
2. *Clear division of duties/functions, authorities and responsibilities of the Board of Directors;*
3. *Preparation of corporate planning;*
4. *Fulfillment of company performance targets;*
5. *Implementation of operational and financial controls on the implementation of plans and company policy;*
6. *Implementation of company management in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association;*
7. *Implementation of value-added relationships for the company and stakeholders;*
8. *Monitor and manage potential conflicts of interest of members of the Board of Directors and management under the Board of Directors;*
9. *Implementation of information disclosure and communication, as well as timely delivery of information to the Board of Commissioners and Shareholders;*



10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

• **PIHAK YANG MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksi terdiri dari Tim Assessment PLN Enjiniring yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan.

• **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pada tahun 2022, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor **32.426** dengan capaian **88.309** dan predikat Sangat Baik.

• **KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Direksi didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

• **PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI**

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi juga dapat diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Organizing meetings of the Board of Directors and attendance at meetings of the Board of Commissioners;
11. Implementation of quality and effective internal control;
12. Quality and effective implementation of the function of the Corporate Secretary;
13. The holding of the Annual GMS and other GMS in accordance with the laws and regulations.

• **PARTIES PERFORMING THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT**

The party conducting the Board of Directors Performance Assessment consists of the PLN Enjiniring Assessment Team which is chaired by the Corporate Secretary.

• **BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS**

In 2022, the results of the Board of Directors' performance assessment reached a score of **32.426** with an achievement of 88.309 and a very good predicate.

• **BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION POLICY**

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Directors is based on Article 6 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) as the Shareholder's Proxy.

• **PROCEDURE FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Members of the Board of Directors are given salaries and allowances/facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions of the laws and regulations. Members of the Board of Directors may also be provided with facilities that are adjusted to the Company's financial conditions and capabilities and must not conflict with the laws and regulations and may not conflict with the decisions of the General Meeting of Shareholders.



## ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

#### • SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung dalam struktur organ tata kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

#### • PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2022, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fajar Suroyo sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 12.001.K/S11/DIR/PLNE/VIII/2021 tentang Mutasi Jabatan.

Profil Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia, lahir pada April 1968. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak September 2021. Sebelumnya pernah menjabat sebagai PLT General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (2018-2020) dan PLT Manajer UPK Kalimantan Barat PT PLN (Persero) Regional Kalimantan Indonesia Bagian Tengah. Menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang, S2 Bidang Manajemen Bisnis Administration dari Universiti Tenaga Nasional Malaysia dan S3 Universitas Padjadjaran DMB UNPAD Bandung.

*In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.*

#### • CORPORATE SECRETARY

*The Corporate Secretary as a supporting organ in the corporate governance structure has an important role in ensuring that the company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the principles of good corporate governance. In addition, the Corporate Secretary plays a role in facilitating communication between the Company's organs, responsible for formulating policies, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relations, investor relations while still paying attention to the principles of the Company's ethical standards, principles of corporate governance, and values. Company.*

#### • CORPORATE SECRETARY PROFILE

*In 2022, the function of the Corporate Secretary was held by Fajar Suroyo based on Directors Decree number 12.001.K / S11 / DIR / PLNE / VIII / 2021 concerning Position Transfer.*

*Profile of the Corporate Secretary is as follows.*

*Indonesian citizen, born in April 1968. He has been serving as Corporate Secretary since September 2021. Previously, he served as PLT General Manager of PT PLN (Persero) Southern Sumatra Development Main Unit (2018-2020) and PLT Manager of West Kalimantan UPK PT PLN (Persero) Regional Central Kalimantan Indonesia. Completed Bachelor Degree in Civil Engineering from Diponegoro University Semarang, Master Degree in Business Administration Management from Universiti Tenaga Nasional Malaysia and Doctoral Degree from Padjadjaran University DMB UNPAD Bandung.*

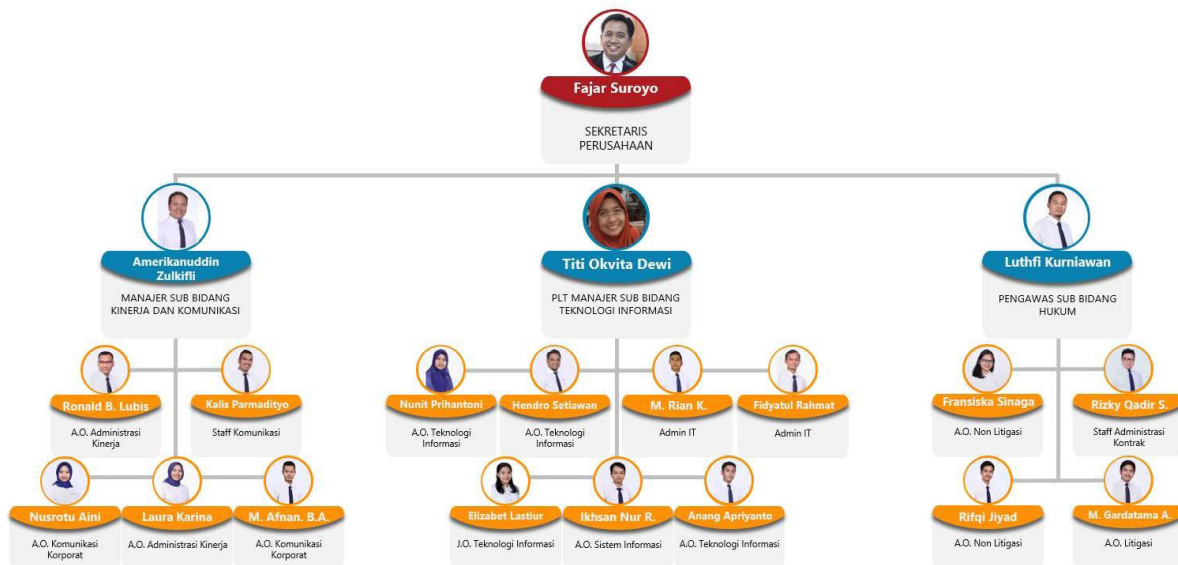


• **STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring didukung oleh beberapa unit kerja. Unit kerja pendukung fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring.

• **STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY**

*In carrying out its functions, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring is supported by several work units. The work unit supporting the function of the Corporate Secretary based on the Decree of the Directors of PT PLN Enjiniring Number: 01.004.K / DIR / PLNE / XI / 2021 dated November 01, 2021 concerning Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring.*



• **TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS POKOK SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PLN Enjiniring, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

- a. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesekretariatan Perusahaan, termasuk didalamnya pengelolaan rapat, keadministrasian, fasilitas dan keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memastikan Perusahaan memiliki peangkat dan pedoman GCG serta melakukan pemantauan dan implementasi GCG;
- c. Mengelola hubungan kemasarakatan dan kelembagaan dalam dan luar negeri antara lain institusi/Lembaga negara, dewan perwakilan rakyat, pemerintah daerah/pusat, dan kedutaan besar;

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY**

*Based on the Decree of the Board of Directors regarding the PLN Enjiniring Structure, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows.*

- a. *Ensuring the planning, implementation and evaluation of the Company's secretarial management policies, including meeting management, administration, facilities and protocols for the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
- b. *Ensuring the implementation of planning, implementation and evaluation of Good Corporate Governance management policies, ensuring that the Company has GCG standards and guidelines as well as monitoring and implementing GCG;*
- c. *Manage community relations and domestic and foreign institutions, including state institutions/agencies, people's representative councils, regional/central governments, and embassies;*



- |   |   |
|---|---|
| <p>d. Mengelola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi data operasional dan laporan Perusahaan, termasuk di dalamnya Laporan Manajemen (LM), laporan tahunan/Annual Report (AR), dan laporan Perusahaan lainnya yang diperlukan oleh pemangku kepentingan;</p> <p>e. Mengelola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik;</p> <p>f. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan program strategis Perusahaan, termasuk di dalamnya mengelola program KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN);</p> <p>g. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan program Corporate Social Responsibilities (CSR) sesuai dengan strategi Perusahaan;</p> <p>h. Memastikan terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan strategi Perusahaan dalam fungsi pelayanan hukum atas perjanjian-perjanjian Perusahaan termasuk di dalamnya mensupervisi pembuatan kontrak, memberikan pendapat hukum atas kontrak, dan untuk penyelesaian masalah kontrak serta operasional di seluruh Bidang dan Satuan;</p> <p>i. Memberikan masukan untuk penyusunan peraturan perundangan, mengelola hubungan dengan Lembaga hukum atau pembuatan kebijakan hukum serta melakukan pendokumentasian atas produk hukum Perusahaan;</p> <p>j. Memastikan terlaksananya pengelolaan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya pada Sekretariat Perusahaan;</p> <p>k. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Sekretariat Perusahaan yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK) pengembangan kompetensi Pegawai dan pelaksanaan kegiatan Knowledge Management (KM);</p> | <p><i>d. Manage the planning, implementation and evaluation of operational data and Company reports, including Management Reports (LM), Annual Reports (AR), and other Company reports required by stakeholders;</i></p> <p><i>e. Manage planning, implementation and evaluation as functions of information and documentation management officials in accordance with the needs of public information disclosure;</i></p> <p><i>f. Ensuring the implementation of planning, implementation and evaluation of the management of the Company's strategic programs, including managing the KPKU (Excellent Performance Assessment Criteria) SOE program;</i></p> <p><i>g. Ensure the implementation of planning, implementation and evaluation of policies in the management of the Corporate Social Responsibilities (CSR) program in accordance with the Company's strategy;</i></p> <p><i>h. Ensuring the implementation of the planning, implementation and evaluation of the Company's policies and strategies in the legal service function of the Company's agreements, including supervising the making of contracts, providing legal opinions on contracts, and for resolving contractual and operational problems in all fields and units;</i></p> <p><i>i. Provide input for drafting laws and regulations, managing relationships with legal institutions or making legal policies and documenting the Company's legal products;</i></p> <p><i>j. Ensuring the implementation of risk-based business process management, compliance, and the principles of good corporate governance in a sustainable manner including planning and following up on risk mitigation related to programs under the authority of the Corporate Secretariat;</i></p> <p><i>k. Ensure and be responsible for human resource management at the Corporate Secretariat in the form of optimizing the management of the Manpower Formation (FTK), developing employee competencies and implementing Knowledge Management (KM) activities;</i></p> |
|---|---|



l. Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : Knowledge Management System (KMS), Dokumen Manajemen (DM), RICO, Inteling, Erbas, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Aplikasi Manajemen Surat (AMS), dan Business One, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas.

• **PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2021**

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan program kerja yang ditetapkan, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan 2021 sesuai dengan pembagian sub-bidang dalam struktur organisasi meliputi:

1. Sub-bidang Kinerja dan Komunikasi
  - a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama tahun 2022 telah terselenggara sebanyak 26 (dua puluh) kali;
  - b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris - Direksi yang selama tahun 2022 telah terselenggara sebanyak 9 (Sembilan) kali;
  - c. Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2022 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2021 pada 28 Januari 2022 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 pada tanggal 28 Juni 2022;
  - d. Melakukan Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Tahun Buku 2022 ;
  - e. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahun 2021 dan 2022;
  - f. Melaksanakan Rapat Kerja tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021;
  - g. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
  - h. Menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 (*Annual Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* PLN Enjiniring dan diunggah di *website* PLN Enjiniring;

l. *Ensure the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Document Management (DM), RICO, Inteling, Erbas, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One, optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2021**

*As a manifestation of accountability for the implementation of the specified functions and work programs, the Corporate Secretary has compiled and submitted a report in the form of the 2021 Corporate Secretary Report based on the task sub-division in the organizational structure including:*

1. *Performance and Communication Sub-Division*
  - a. *Conducting Board of Director Meeting, which in 2022 have been held 20 (twenty) times;*
  - b. *Coordinator the Board of Commissioner - Director Meeting, which in 2022 have been held 9 (nine) times;*
  - c. *Implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholder which in 2022 was held 2 (two)times, namely GMS 2022 concerning APBD's Approval on January 28,2022 and the Annual General Meeting of Financial Statements Approval and Ratification of the 2021 Financial Statements on June 28, 2022;*
  - d. *Conducting a GCG self-assessment in 2022;*
  - e. *Monitoring the follow-up to the resolutions of GMS 2021 and 2022;*
  - f. *Organizing a Work Meeting in 2021 on February 11, 2021;*
  - g. *Preparing Corporate Management Reports publised and submitted to the Shareholders and the Board of Commisioners.*
  - h. *Preparing the 2021 Annual Report which have been distributed to PLN Enjiniring stakeholders and have been uploaded on PLN Enjiniring website;*



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>i. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;</li><li>j. Melaksanakan program komunikasi perusahaan melalui pengelolaan media sosial PLN Enjiniring berupa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pengelolaan Website dan Majalah Korporat Perusahaan;</li><li>k. Melaksanakan Kegiatan Protokoler Perusahaan;</li><li>l. Pelaksanaan Program CSR Perusahaan.</li></ul> <p>2. Sub-bidang Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi;</li><li>b. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan;</li><li>c. Membuat kajian hukum;</li><li>d. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan;</li><li>e. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan;</li><li>f. Memberikan pendampingan hukum;</li><li>g. Kepengurusan Perizinan Perusahaan.</li><li>h. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi</li><li>i. Pemantauan pelaporan LHKPN.</li></ul> <p>3. Sub-bidang Teknologi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengelola sistem teknologi dan informasi;</li><li>b. Membangun sistem kerja berbasis aplikasi;</li><li>c. Pelaksanaan IT Master Plan;</li><li>d. Mengelola kesediaan layanan IT untuk kebutuhan perusahaan.</li><li>e. Melakukan pengukuran terhadap Tingkat Kematangan TI / IT Maturity Level.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>i. <i>Providing data and information services to all parties interested in company namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other third parties;</i></li><li>j. <i>Implement corporate communication programs through PLN Enjiniring social media management in the form of Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Website Management and Corporate Magazines;</i></li><li>k. <i>Acting as a Coordinator of Corporate Protocol Activities;</i></li><li>l. <i>Implementation as the CSR Company Program</i></li></ul> <p>2. <i>Legal Sub-division</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation;</i></li><li>b. <i>Conduct a legal analysis of the company's legal issues;</i></li><li>c. <i>Providing legal opinion;</i></li><li>d. <i>Conduct a review of all the company's legal products;</i></li><li>e. <i>Evaluate, manage and monitor the company's compliance with regulations and laws and regulations;</i></li><li>f. <i>Provide legal assistance</i></li><li>g. <i>Company Licensing Management</i></li><li>h. <i>Management of Gratification Control</i></li><li>i. <i>Monitoring LHKPN reporting.</i></li></ul> <p>3. <i>Technology and Information Sub-division</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>Manage information and technology system;</i></li><li>b. <i>Build an application-based work system;</i></li><li>c. <i>Implementation of the IT Master Plan;</i></li><li>d. <i>Manage the availability of IT service for company needs</i></li><li>e. <i>Measure the IT Maturity Level.</i></li></ul> |
|---|---|



• **PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Selama tahun 2022, Bidang Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring mengikuti Pengembangan kompetensi sebagai berikut.

• **PROGRAM FOR ENHANCING COMPETENCE SECRETARY OF THE COMPANY**

During 2022, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring participated in the development of competencies as follows.

**TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN**  
**TABLE OF CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT**

Nama <i>Name</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Penyelenggara <i>Organizers</i>
		Start	Finished	
Surya Milpan	GRCP	05-Dec-22	07-Dec-22	Grajosa Resources
Luthfi Kurniawan	Manajemen Kontrak	14-Feb-22	16-Feb-22	PLN Udiklat
	Uji Kompetensi Pengadaan Barang/ Jasa	04-Oct-22	07-Oct-22	PLN Udiklat
Fransiska Sinaga	Awareness SMKU ISO 22301:2019	07-Jun-22	07-Jun-22	PT Cakra Manunggal Pratama
	Training Lobi dan Negosiasi dalam Komunikasi	17-Jun-22	30-Jun-22	Pusdiklat
	QRMA	18-Jul-22	21-Jul-22	CRMS
	Diskusi Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa BUMN	02-Nov-22	03-Nov-22	Pusdiklat
	Procurement General Knowledge	10-Nov-22	11-Nov-22	Pusdiklat
Mohammad Gardatama Atmadibrata	Training Lobi dan Negosiasi dalam Komunikasi	17-Jun-22	30-Jun-22	Pusdiklat
Rifqi Jiyad	Awareness ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha	07-Jun-22	07-Jun-22	PT Cakra Manunggal Pratama
	Training dan Sertifikasi QRMA	18-Jul-22	21-Jul-22	CRMS Indonesia
	Supervisi Aspek Hukum Agraria	05 September 2022	8 September 2022	PUSDIKLAT



## ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

#### • SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

SPI memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. SPI memiliki komitmen untuk melakukan fungsi pemantauan pengendalian intern secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

#### • VISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Visi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring yaitu "To be trusted partner yang diandalkan oleh stakeholder internal audit."

#### • MISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Misi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring dijabarkan sebagai berikut.

1. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;
2. Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);
3. Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan
4. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.

#### • INTERNAL SUPERVISORY UNIT

*Internal Supervisory Unit (SPI) is an independent work unit that is located directly under the President Director. SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*

*SPI has a strong foundation in carrying out its functions to monitor and evaluate the adequacy and effectiveness of internal control in the Company. SPI has a commitment to carry out internal control monitoring functions effectively and efficiently, and can achieve the targets set.*

#### • VISION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

*The Vision of the PLN Enjiniring Internal Supervisory Unit is "To be a trusted partner that is relied on by internal audit stakeholders."*

#### • MISSION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

*The mission of the PLN Enjiniring Internal Supervisory Unit is elaborated as follows.*

1. *Assist the President Director of the company in enhancing the understanding and commitment of company leaders to continuously develop and implement an effective management control system.*
2. *Growing and developing common perception and cooperation between SPI (auditors and internal consultants) and operational units to encourage the realization of Good Corporate Government (GCG);*
3. *Develop the competence of internal auditors and consultants in carrying out audits and consulting services in accordance with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards);*
4. *Increasing the effectiveness of information on the results of SPI's supervision to prevent, detect, and disclose fraudulent practices in the corporate environment.*



• PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai dari Juli 2019 dijabat oleh **Izhar Syafril** berdasarkan SK Direksi No. 0057.K/SDM.03.01/DIR/2019. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2019 sebelumnya menjabat sebagai *Group Head Audit Maluku Papua* 20 pada 01 Maret 2018 menamatkan pendidikan D3 Mesin UNSRI 1990, S1 Teknik Mesin UNITAS tahun 2001.

Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai dari Juli 2022 dijabat oleh **Oka Hadisasmita** berdasarkan SK Direksi No. 01.001.K/S11/DIR/PLNE/VII/2022. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, umur 38 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2022 sebelumnya menjabat sebagai Deputy Group Head Audit Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali pada Inspektorat Jawa, Madura, dan Bali Satuan Pengawas Intern PT PLN (Persero) dari 2021, menamatkan pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Sriwijaya (UNSRI) tahun 2007.

• PROFILE OF HEAD OF INTERNAL CONTROL UNIT

*The Head of Internal Supervisory Unit starting from July 2019 is held by **Izhar Syafril** based on Directors Decree 0057.K / SDM.03.01 / DIR / 2019. The profile of the Head of SPI is as follows:*

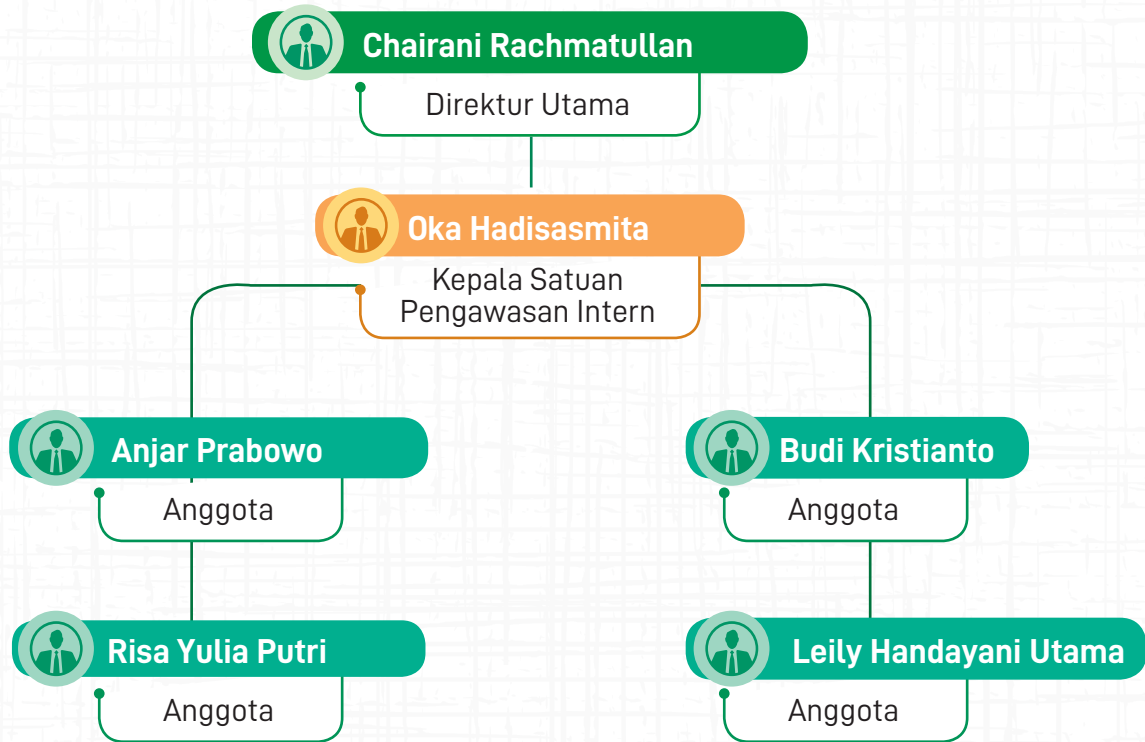
*Indonesian citizen, 52 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 01, 2019. Previously he served as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from D3 Mechanical Engineering UNSRI 1990, S1 Mechanical Engineering UNITAS in 2001.*

*The Head of the Internal Audit Unit starting from July 2022 is held by **Oka Hadisasmita** based on the Decree of the Board of Directors No. 01.001.K/S11/DIR/PLNE/VII/2022. Profile of the Head of SPI as follows:*

*Indonesian citizen, 38 years old. Serving as Head of Internal Supervision Unit since July 1st, 2022, previously served as Group Head Deputy of East Java and Bali Transmission Audit at Java, Madura, and Bali Inspectorate of Internal Supervisory Unit of PT PLN (Persero) from 2021, completed his bachelor degree on Electrical Engineering education at Sriwijaya University (UNSRI) in 2007.*



## Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern *Internal Audit Unit Organizational Structure*





• **Komposisi Kepala Satuan Pengawasan Intern**

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu oleh 4 (empat) orang auditor internal. 4 (empat) orang Auditor anggota SPI memiliki keterampilan/ keahlian yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor internal.

Komposisi SPI PLN Enjiniring sebagai berikut.

• **Composition of Head of Internal Supervisory Unit**

*The Internal Supervisory Unit (SPI) is led by a Head of SPI and is assisted by 4 (four) internal auditors. 4 (four) internal auditors have the skills / expertise required to become internal auditors.*

*The composition of the SPI PLN Enjiniring is as follows*

**TABEL KOMPOSISI SATUAN PENGAWASAN INTERN**  
**TABLE OF COMPOSITION OF INTERNAL CONTROL UNIT**

No	Nama   Name	Jabatan   Position
1	Oka Hadisasma	Kepala Satuan Pengawasan Intern <i>Head of Internal Audit Unit</i>
2	Anjar Prabowo	Auditor
3	Budi Kristianto	Auditor
4	Leily Handayani Utama	Auditor
5	Risa Yulia Putri	Auditor

• **Sertifikasi Profesi Audit Internal**

• **Certification of Internal Audit Professions**

**TABEL SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL**  
**TABLE OF INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION**

No	Nama   Name	Jabatan   Position	Sertifikasi   Certification
1	Oka Hadisasma	Kepala Satuan Pengawasan Intern <i>Head of Internal Audit Unit</i>	QIA GRCP GRCA
2	Anjar Prabowo	Auditor	QIA Intermediate
3	Budi Kristianto	Auditor	QIA Intermediate
4	Leily Handayani Utama	Auditor	QIA Intermediate
5	Risa Yulia Putri	Auditor	QIA Intermediate



• **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA LINGKUP PEKERJAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Satuan Pengawasan Intern berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern meliputi:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;
2. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/Integrated Audit Charter dan Pedoman RBIA;
3. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;
4. Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen alas seluruh proses audit;
5. Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;
8. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;
9. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;
10. Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan
11. Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT**

*The Internal Audit Unit has the role of ensuring and providing independent and objective consultancy to management so as to encourage the creation of added value and improve business operations. Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:*

1. *Develop and refine the SPI strategy in accordance with the vision and mission;*
2. *Develop and improve the Integrated Audit Charter and the RBIA Guidelines;*
3. *Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);*
4. *To evaluate the quality of audits and consulting services by the SPI staff and independent parties for the entire audit process;*
5. *Carry out analysis and preparation of audit reports for management and external parties, SPI budget management, evaluation and reporting of the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT), Budget Work Plans in accordance with the authority of their field of duty;*
6. *Carry out studies and development of the SPI organization, human resource development, management of SPI education as well as HR administration, logistics and secretariat of SPI;*
7. *Carry out coordination and cooperation in SPI as well as other fields and units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the set targets, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;*
8. *Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;*
9. *Carry out operational supervision and investigative audit functions;*
10. *Provide consultation or suggestions for improvement required by management; and*
11. *Following up on WBS by conducting an audit of WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that may cause financial and non-financial losses and the image of the Company.*



#### • PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengendalian intern, SPI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* yang ditetapkan oleh Komisararis Utama dan Direktur Utama pada Tanggal 23 Oktober 2022. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SPI. Oleh karena itu Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan PLN Enjiniring.

Isi dari *Internal Audit Charter* adalah

##### 1. Visi;

*To be trusted partner* yang diandalkan oleh stakeholder internal audit.

##### 2. Misi;

- a) Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;
- b) Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);
- c) Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan
- d) Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.

##### 3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Lingkup Pekerjaan ;

- a) Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;
- b) Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* dan Pedoman RBIA;

#### • CHARTER OF INTERNAL SUPERVISION UNIT

*In carrying out internal control, SPI has been equipped with Work Guidelines with the Integrated Audit Charter established by the President Commissioner and President Director on October 23<sup>rd</sup>, 2022. Apart from being a work guideline, the Integrated Audit Charter also plays a role in strengthening roles and responsibilities as well as the basis for the existence and implementation of supervisory duties for SPI. Therefore, the Integrated Audit Charter is disseminated so that it is known by all employees and other related parties so that mutual understanding and good cooperation can be established in realizing the Vision, Mission, and Objectives of PLN Enjiniring.*

*The contents of the Internal Audit Charter are*

##### 1. Vision;

*"To be a trusted partner that is relied on by internal audit stakeholders."*

##### 2. Mission;

- a) *Assist the President Director of the company in enhancing the understanding and commitment of company leaders to continuously develop and implement an effective management control system.*
- b) *Growing and developing common perception and cooperation between SPI (auditors and internal consultants) and operational units to encourage the realization of Good Corporate Government (GCG);*
- c) *Develop the competence of internal auditors and consultants in carrying out audits and consulting services in accordance with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards);*
- d) *Increasing the effectiveness of information on the results of SPI's supervision to prevent, detect, and disclose fraudulent practices in the corporate environment.*

##### 3. Duties and Responsibilities and Scope of Work;;

- a) *Develop and refine the SPI strategy in accordance with the vision and mission;*
- b) *Develop and improve the Integrated Audit Charter and the RBIA Guidelines;*



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>c) Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;</li><li>d) Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen atas seluruh proses audit;</li><li>e) Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;</li><li>f) Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;</li><li>g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;</li><li>h) Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;</li><li>i) Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;</li><li>j) Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan</li><li>k) Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.</li></ul> <p>4. Kewenangan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dapat mengakses dan melakukan forensik seluruh data dan informasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja dan pegawai yang tersimpan dalam peralatan kerja, antara lain yang tidak terbatas pada <i>handphone, personal computer (PC)</i> dan <i>laptopnya</i>, juga melakukan pengeledahan (<i>searching</i>), analisis rekening koran bank dan pelaksanaan polygraph sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>b) Memiliki <i>continuous access</i> terhadap data di database perusahaan untuk keperluan <i>continuous auditing</i>;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>c) <i>Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);</i></li><li>d) <i>To evaluate the quality of audits and consulting services by the SPI staff and independent parties for the entire audit process;</i></li><li>e) <i>Carry out analysis and preparation of audit reports for management and external parties, SPI budget management, evaluation and reporting of the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT), Budget Work Plans in accordance with the authority of their field of duty;</i></li><li>f) <i>Carry out studies and development of the SPI organization, human resource development, management of SPI education as well as HR administration, logistics and secretariat of SPI;</i></li><li>g) <i>Carry out coordination and cooperation in SPI as well as other fields and units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the set targets, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;</i></li><li>h) <i>Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;</i></li><li>i) <i>Carry out operational supervision and investigative audit functions;</i></li><li>j) <i>Provide consultation or suggestions for improvement required by management; and</i></li><li>k) <i>Following up on WBS by conducting an audit of WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that may cause financial and non-financial losses and the image of the Company.</i></li></ul> <p>4. Authority;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>Can access and perform forensics on all data and information relevant to the main tasks of work units and employees stored in work equipment, including but not limited to cellphones, computer personnel (PCs) and laptops, also conduct searches, analyze bank statements and implementation of polygraphs in accordance with applicable regulations;</i></li><li>b) <i>Have continuous access to data in the company database for continuous auditing purposes;</i></li></ul> |
|--|---|



- c) Dapat melakukan komunikasi, rapat secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit;
  - d) Dapat melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dll);
  - e) Memberikan rekomendasi yang terkait penegakan disiplin pegawai sebagai dasar yang cukup bagi tindak lanjut proses disiplin pegawai oleh pihak – pihak terkait; dan
  - f) KSPI dapat menentukan rencana, metodologi, organisasi dan SDM SPI, serta melakukan pengawasan terhadap Audit Internal Perusahaan Anak
5. Sasaran;
- Melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan semua pengendalian internal telah dilaksanakan dengan efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengendalian internal di setiap aktivitas agar lebih ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif).
6. Hubungan Kemitraan dengan Komite Audit;
- a) Komunikasi Periodik, yaitu SPI melakukan komunikasi kepada Komite Audit untuk mendapatkan masukan mengenai Perencanaan Audit Tahunan; dan
  - b) Komunikasi Non Periodik, yaitu komunikasi yang dilakukan atas inisiasi dari SPI maupun atas permintaan Komite Audit.
7. Hubungan dengan Auditor Eksternal;
- a) Komunikasi Periodik yaitu komunikasi dengan Auditor BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dan lainnya; dan
  - b) Komunikasi Non Periodik atas persetujuan Direktur Utama dapat melakukan komunikasi bersifat insidental dengan pihak eksternal terkait hasil pengawasan yang menjadi lingkup tugas SPI.
8. Kode Etik
- a) Auditor Internal.  
Auditor Internal harus memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:
- c) *Able to communicate, held regular meeting with the Board of Directors,, Board of Commissioners, and or the Audit Committee;*
  - d) *Can coordinate with external auditors (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) etc.);*
  - e) *Provide recommendations related to the enforcement of employee discipline as a sufficient basis for the follow-up of the employee discipline process by related parties; and*
  - f) *KSPI can determine the plan, methodology, organization and HR of SPI, as well as supervise the Internal Audit of Subsidiaries*
5. *Targets;*
- Carry out inspections to ensure that all internal controls have been implemented effectively and provide recommendations for improvements in internal control in each activity to make it more economical, efficient and effective in accordance with applicable regulations with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and 3E (Economic, Efficient and Effective)*
6. *Partnership with the Audit Committee;*
- a) *Periodic Communication, namely SPI communicates to the Audit Committee to get input on the Annual Audit Planning; and*
  - b) *Non-Periodic Communication, which is communication initiated by SPI or at the request of the Audit Committee*
7. *Relationship with External Auditor;*
- a) *Periodic Communication, namely communication with the Auditor of BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) and others; and*
  - b) *Non-Periodic Communication with the approval of the President Director may conduct incidental communication with external parties related to the results of supervision within the scope of SPI's duties.*
8. *Code of Ethics;*
- a. *Internal Auditor*  
*Internal Auditors must have a code of ethics in carrying out their duties in accordance with their profession and applicable standards, namely:*



- |  |   |
|--|---|
| <p>1) Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab;</li><li>• Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PLNE yang berlaku; Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor;</li><li>• Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLNE.</li></ul> <p>2) Objektivitas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor;</li><li>• Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan</li><li>• Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan PLNE.</li></ul> <p>3) Kerahasiaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan</li><li>• Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di PLNE.</li></ul> <p>4) Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;</li><li>• Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal PLNE yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan</li></ul> | <p>1) Integrity</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perform internal audit work honestly, productively, professionally and responsibly;</li><li>• Complying with applicable laws and regulations and internal PLNE regulations; Not participating in illegal activities or carrying out activities prohibited by the Auditor profession;</li><li>• Respect and contribute to the legal and ethical objectives set by PLNE.</li></ul> <p>2) Objectivity</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Not participating in activities that may affect the Auditor's assessment;</li><li>• Do not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and</li><li>• Disclosing all important facts that he knows in carrying out his duties and if not reported it can harm PLNE.</li></ul> <p>3) Confidentiality</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wisely in using and protecting the information obtained in carrying out their duties; and not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and</li><li>• Do not use the information obtained in carrying out their duties for their own interests in a way that is not legal or does not work with legal and ethical purposes at PLNE.</li></ul> <p>4) Competence</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conduct audits on objects that are in accordance with the skills, knowledge, expertise and experience possessed in carrying out audits;</li><li>• Carry out audits in accordance with the PLNE Internal Audit Charter and Guidelines which are in line with the Internal Auditor Professional Standards; and</li></ul> |
|--|---|



- Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

b) Kode Etik Investigator

Selain memiliki kode etik integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:

- 1) Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi;
- 2) Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*;
- 3) Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional;
- 4) Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (*prejudice*);
- 5) Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah;
- 6) Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang;
- 7) Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta; dan
- 8) Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

- *Improving competence through continuing professional education for the purpose of improving work quality and efficiency.*

b. *Investigator Code of Conduct*

*In addition to having a code of ethics of integrity, objectivity, confidentiality and competence, the Investigator must have a work ethic in carrying out his duties in accordance with his profession and applicable standards, namely:*

- 1) *Investigators always demonstrate a commitment to professionalism and prudence in carrying out investigations;*
- 2) *The investigator is not involved in illegal acts or violates the code of ethics or any activity that creates a conflict of interest;*
- 3) *Investigators always show high integrity in every investigation and will only accept investigative assignments if there is sufficient confidence that the assignment can be completed with professional competence;*
- 4) *Investigators comply with court orders/ authorized parties and provide honest testimony without bias or prejudice;*
- 5) *The investigator obtains evidence or other documentation during the course of the investigation as a sufficient basis for giving an opinion, but does not express an opinion whether a certain person/entity is guilty or not;*
- 6) *The investigator does not disclose the information obtained during the investigation assignment without the approval of the authorized party;*
- 7) *Investigators report relevant matters found during the assignment, which if omitted can cause distortion of facts; and*
- 8) *Investigators always improve their competence on an ongoing basis and the effectiveness of the investigative activities they carry out/lead.*



• **KEBIJAKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Perusahaan memiliki berbagai kebijakan yang mendasari dan mengatur penerapan sistem pengendalian intern di perusahaan. Perusahaan memiliki Pedoman Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 13.001.K/DIR/II/2018 tanggal 13 Februari 2018. Perusahaan juga telah memiliki Standar Prosedur Audit yang diperbaharui dan dimutakhirkan secara berkala.

Adapun Standar Prosedur Audit (SPA) yang sudah berlaku adalah:

1. SPA – 01 tentang Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. SPA – 02 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Audit
3. SPA – 03 tentang Penentuan Sampel
4. SPA – 04 tentang Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Audit
5. SPA – 06 tentang Pelaksanaan Audit Khusus
6. SPA – 07 tentang Layanan Konsultasi
7. SPA – 09 tentang Pelaporan Kegiatan Fungsi SPI dengan Manajemen

• **PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen dan keyakinan tentang pencapaian tujuan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan PLN Enjiniring, maka Satuan Pengawasan pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Audit Operasional
3. Asesmen *Maturity Level* Manajemen Risiko
4. Asesmen GCG
5. Pemutakhiran Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter*
6. Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Prosedur Audit (SPA)
7. Dan lainnya

• **INTERNAL SUPERVISORY UNIT POLICY**

*In carrying out internal control, the Company has various policies that underlie and regulate the implementation of the internal control system in the company. The Company has Internal Control Guidelines based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number: 13.001.K/DIR/II/2018 dated February 13, 2018. The Company also has Standard Audit Procedures which are updated and updated regularly.*

*The Standard Audit Procedures (SPA) that have been applied are:*

1. SPA – 01 concerning the Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)
2. SPA – 02 on Planning, Implementation and Reporting of Audit Activities
3. SPA – 03 on Sampling
4. SPA – 04 on Follow-up Monitoring and Recommendations on Audit Results
5. SPA – 06 concerning the Implementation of Special Audits
6. SPA – 07 on Consulting Services
7. SPA – 09 concerning Reporting of SPI Function Activities with Management

• **IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT**

*In order to improve the Management Control System and confidence in the achievement of the Company's goals to minimize risks that may hinder the achievement of objectives for the implementation of activities within PLN Enjiniring, the Supervisory Unit in 2020 has carried out the following activities.*

1. *Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)*
2. *Operational Audit*
3. *Risk Management Maturity Level Assessment*
4. *GCG Assessment*
5. *Update the Integrated Audit Charter*
6. *Preparation and Update of Standard Audit Procedures (SPA)*
7. *And more*



• **PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2022**

Selama tahun 2022, evaluasi system pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan audit operasional. Audit dilaksanakan di 8 Bidang dengan detail sebagai berikut:

• **OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION IN 2021**

*During 2022, the evaluation of the internal control system will be carried out through the implementation of an operational audit. The audit was carried out in 8 fields with the following details:*

**TABEL PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL TAHUN 2022**

**TABLE OF OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION IN 2022**

No	Jenis Audit <i>Auditee</i>	Periode Pelaksanaan <i>Period</i>	Ruang Lingkup Audit <i>Audited</i>
1	Direktorat Enjiniring  - Bidang Pembangkit - Bidang Transmisi dan Distribusi - Bidang Konstruksi  <i>Directorate of Engineering</i>  - <i>Power Plant Division</i> - <i>Transmission and Distribution Division</i> - <i>Construction Division</i>	Februari 2022 Juli 2022 Juni 2022  Februari 2022 Juli 2022 Juni 2022	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan  <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i> <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i> <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i>
2	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha  - Bidang Perencanaan Korporat dan Pengembangan Usaha  <i>Directorate of Marketing and Business Development</i>  - <i>Corporate Planning and Bussiness Development</i>	Agustus 2022  Agustus 2022	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan  <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i>
3	Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, dan Risiko  <i>Procurement Unit, Quality and Risk Management</i>	September 2022  September 2022	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan  <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i>
4	Sekretaris Perusahaan  <i>Corporate Secretary</i>	September 2022 September 2022	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i>
5	Direktorat Keuangan dan SDM  - Akuntansi, Pajak, dan Asuransi - SDM dan Umum  <i>Directorate of Finance and HR</i>  - <i>Accounting, Tax, and Assurance</i> - <i>HR and General</i>	Oktober 2022 Oktober 2022  Oktober 2022 Oktober 2022	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan  <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i> <i>Risk Base Audit and Compliance Audit</i>

Pelaksanaan audit tersebut telah disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dan saran.

*The audit has been submitted by SPI to the President Director and the Board of Commissioners for input and suggestions.*



• **TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT**

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan dan tindak lanjut sebagai berikut.

**AUDIT TAHUN 2022**

**AUDITEE IN 2022**

No.	Audit <i>Auditee</i>	Jumlah Temuan <i>Number of Findings</i>	Temuan Selesai <i>Finding Completed</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	Direktorat Enjiniring			
	- Bidang Pembangkit	3	3	Selesai
	- Bidang Transmisi dan Distribusi	2	1	Belum Selesai
	- Bidang Konstruksi	3	3	Selesai
	<i>Directorate of Engineering</i>			
	- <i>Power Plant Division</i>	3	3	<i>Completed</i>
	- <i>Transmission and Distribution Division</i>	2	2	<i>Uncompleted</i>
	- <i>Construction Division</i>	3	3	<i>Completed</i>
2	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha,			
	- Bidang Perencanaan Korporat dan Pengembangan Usaha	2	1	Belum Selesai
	<i>Directorate of Marketing and Business Development</i>			
	- <i>Corporate Planning and Bussiness Development</i>	2	1	<i>Uncompleted</i>
3	Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, dan Risiko	2	1	Belum Selesai
	<i>Procurement Unit, Quality and Risk Management</i>	2	1	<i>Uncompleted</i>
4	Sekretaris Perusahaan	1	1	Selesai
	<i>Corporate Secretary</i>	1	1	<i>Completed</i>
5	Direktorat Keuangan dan SDM			
	- Bidang Akuntansi, Pajak, dan Asuransi	0	0	Selesai
	- Bidang SDM dan Umum	3	0	Belum Selesai
	<i>Directorate of Finance and HR</i>			
	- <i>Accounting, Tax, and Assurance</i>	0	0	<i>Completed</i>
	- <i>HR and General</i>	3	0	<i>Uncompleted</i>

• **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SPI telah mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi yang diikuti SPI selama 2021 sebagai berikut.

• **FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS**

Based on the audits that have been carried out, a number of findings and follow-ups were obtained as follows.

• **COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT**

To support the implementation of its duties, SPI has participated in competency development programs, in the form of education and training. Competency development that will be followed by SPI during 2021 is as follows



**TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN**  
**INTERNAL BOARD OF SUPERVISION COMPETITION DEVELOPMENT TABLE**

No	Nama <i>Name</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Penyelenggara <i>Organizers</i>
			Start	Finished	
1	Oka Hadisasmita	Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)	5/Dec/22	7/Dec/22	OCEG
		Governance Risk Compliance Auditor (GRCA)	12/Dec/22	16/Dec/22	OCEG
	Oka Hadisasmita	<i>Governance Risk and Compliance Professional (GRCP)</i>	<i>5/Dec/22</i>	<i>7/Dec/22</i>	<i>OCEG</i>
		<i>Governance Risk Compliance Auditor (GRCA)</i>	<i>12/Dec/22</i>	<i>16/Dec/22</i>	<i>OCEG</i>
2	Anjar Prabowo	Qualified Internal Auditor - Tingkat Lanjutan	05/Dec/22	17/Dec/22	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	18/Jul/22	20/Jul/22	LSP MKS
	Anjar Prabowo	<i>Qualified Internal Auditor - Intermediate</i>	<i>05/Dec/22</i>	<i>17/Dec/22</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
		<i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	<i>18/Jul/22</i>	<i>20/Jul/22</i>	<i>LSP MKS</i>
3	Budi Kristianto	Qualified Internal Auditor - Tingkat Lanjutan	01/Aug/22	13/Aug/22	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	<i>Budi Kristianto</i>	<i>Qualified Internal Auditor - Intermediate</i>	<i>01/Aug/22</i>	<i>13/Aug/22</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
4	Leily Handayani Utama	Qualified Internal Auditor - Tingkat Lanjutan	01/Aug/22	13/Aug/22	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	<i>Leily Handayani Utama</i>	<i>Qualified Internal Auditor - Intermediate</i>	<i>01/Aug/22</i>	<i>13/Aug/22</i>	<i>Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)</i>
5	Risa Yulia Putri	Qualified Internal Auditor - Tingkat Lanjutan	05/Dec/22	17/Dec/22	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	18/Jul/22	20/Jul/22	LSP MKS
	Risa Yulia Putri	Qualified Internal Auditor - Intermediate	05/Dec/22	17/Dec/22	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	18/Jul/22	20/Jul/22	LSP MKS



## SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain menjamin semua kegiatan usaha Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan ketentuan intern Perusahaan. Selain itu, system pengendalian intern yang efektif dapat membantu Perusahaan menjaga asset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Direksi adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Perusahaan terus mendorong upaya peningkatan system pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Perusahaan memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. SPI senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai koridornya.

*The internal control system is an important aspect in the management of a healthy and safe company. The internal control system was built to fulfill several objectives, including ensuring that all of the Company's business activities comply with applicable regulations. These provisions consist of laws, government regulations, supervisory authorities and the Company's internal regulations. In addition, an effective internal control system can help the Company maintain its assets, ensure the availability of accurate financial reporting, increase the Company's compliance with applicable regulations, and reduce the risk of losses, deviations and violations of prudential aspects.*

*The implementation of the internal control system at the Board of Commissioners level is to supervise and provide advice regarding the adequacy and fairness in the preparation of financial reports and risk management by taking into account the principle of prudence. Meanwhile, the implementation of the internal control system at the Board of Directors level is by consistently implementing the Company's policies and procedures and complying with applicable regulations. The implementation includes, among others, related to operational activities, risk management, strategic planning, division of tasks, delegation of authority, and accounting policies. adequate.*

*The company continues to encourage efforts to improve an effective internal control system. Internal control is an integrated part of systems and procedures in every activity in the work unit so that if there is a deviation, it can be detected early and corrective steps are taken by the work unit concerned. The Company has an Internal Supervisory Unit (SPI) which plays a role in evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control carried out by the Company's management. SPI always carries out internal supervision by taking a systematic approach so that the implementation of GCG principles can run according to the corridor.*



Dalam melaksanakan audit, SPI menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Audit). SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang antara lain mengatur tentang sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan. Sasaran pemeriksaan dalam PKPT mencakup pemeriksaan pengendalian keuangan dan pengendalian operasional dan kepatuhan. Pemeriksaan operasional keuangan meliputi pemeriksaan penyusunan RKAP dan Laporan Keuangan, pemenuhan kebutuhan pendanaan, pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Perusahaan, pemantauan persekot dinas, mitigasi risiko finansial, pelaksanaan evaluasi realisasi RAB, penagihan dan pengelolaan piutang pelanggan, laporan kinerja Perusahaan, pemantauan utang Perusahaan, pencatatan dan penghapusan aset, pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaksanaan pengakuan, pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh/ sampling. Sedangkan, pemeriksaan operasional meliputi pemeriksaan bidang pemasaran, pengembangan usaha, keuangan, akuntansi, SDM, umum, transmisi dan distribusi, pembangkitan, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Manajemen Mutu dan Risiko.

*In carrying out the audit, SPI uses a risk-based approach (Risk Based Audit). SPI has an Annual Supervision Work Program (PKPT) which, among other things, regulates the target of the audit to be carried out in the relevant year. The audit objectives in the PKPT include audits of financial controls and operational and compliance controls. The audit of financial operations includes examination of the preparation of the RKAP and Financial Statements, fulfillment of funding needs, management of the company's revenue and financing budgets, monitoring of service plans, financial risk mitigation, implementation of evaluation of RAB realization, collection and management of customer receivables, company performance reports, monitoring of company debt, recording and asset write-off, development of accounting systems and procedures, as well as the implementation of recognition, recording and reporting as a whole/sampling. Meanwhile, operational audits include inspections in the fields of marketing, business development, finance, accounting, HR, general, transmission and distribution, generation, Corporate Secretary, as well as the Quality and Risk Management Unit.*

## EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern di Perusahaan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-Komite yang telah dibentuk.

## INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

*The Company always evaluates the implementation of the internal control system in the Company and provides suggestions for improvement in achieving continuous improvement of existing line processes. Everything related to the problem of adequacy of internal control has been reported to the Board of Directors. Follow-up steps have been taken to minimize the risk. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through the Committees that have been established.*

## KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* di tahun 2013. Tujuan pengendalian intern menurut

## CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL WITH COSO FRAMEWORK

*The Company's internal control system is in accordance with the Internal Control Integrated Framework developed by The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) in 2013. The objectives of internal control according to COSO*



COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Perusahaan yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

*include operational objectives, reporting objectives and compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Company's internal control system as described above.*

*Operational objectives are related to the effectiveness of operating efficiency. Reporting objectives are related to the importance of financial reporting that meets the criteria of being reliable, timely, transparent and other requirements set by the regulator and the Company. Meanwhile, the compliance objective relates to the Company's compliance with laws and regulations. According to COSO, the elements of internal control include the following components:*

1. *Control environment;*
2. *Risk assessment;*
3. *Control activities;*
4. *Information and Communication;*
5. *Monitoring activities.*



## ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

### ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

*In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.*

### SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada SNI 8651:2018 Manajemen Risiko-Pedoman yang diadopsi dari Standard ISO 31000:2018 Risk Management sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Perseroan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko dalam kerangka pengelolaan risiko yang menyeluruh dalam Enterprise Risk Management (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian yang mengakibatkan kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, mendorong praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan serta budaya risiko yang terinternalisasi sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

### PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT

*Risk Management implementation policies and strategies refer to SNI 8651:2018 Risk Management-Guidelines adopted from the ISO 31000:2018 Risk Management Standard as an effort to ensure the sustainability of risk management implementation in the Company. The Company establishes Risk Management Guidelines within a comprehensive risk management framework in Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize potential losses that result in losses and optimize profitability, encourage Good Corporate Governance practices, increase stakeholder trust and create added value for the Company and culture. internalized risk as part of the Corporate Culture.*

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan kaidah sehingga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

*The Risk Management function is tasked with ensuring the implementation of Risk Management based on rules so that it can be used as a reference in decision making. Risk Management is under the coordination of the Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit (KSPMR) who reports directly to the President Director. The Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit is appointed and dismissed by the President Director.*

#### • PROFIL KEPALA SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

##### ■ Runggun Fredo Amarta

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

#### • PROFILE OF THE HEAD OF PROCUREMENT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT

##### ■ Runggun Fredo Amarta

*Indonesian citizens. Served as Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit since April 2020, previously served as Manager of Production & Workshop III Implementation Unit at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 - 2020). Completed Bachelor of Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.*

**“PLNE Transformation with Efficiency and Innovation Along With High Competitiveness Towards Sustainable Business”**



• **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring berperan untuk memastikan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi dan pengendalian Manajemen Risiko dapat memberikan nilai tambah untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab KSPMR meliputi:

1. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Perusahaan, terlaksananya pembinaan atau pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan, Bidang, dan Sekretariat Perusahaan, dan pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa dan kontrak;
2. Memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi Perusahaan dalam pengelolaan risiko termasuk penerapan *3 Lines Model* dan *4 Eyes Principle*, *maturity framework* serta memastikan penerapannya baik dalam proses pengambilan keputusan, maupun kegiatan strategis lainnya;
3. Memastikan terlaksananya pengelolaan kebijakan terpusat termasuk harmonisasi kebijakan dan dampaknya, penanggung jawab *governance*, *risk management*, and *compliance* (GRC) serta pengelolaan *integrated management system*;
4. Memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kajian risiko Perusahaan, dan mitigasi risiko bekerja sama dengan pemilik risiko, serta melakukan *assessment*, pemantauan dan pelaporan risiko-risiko utama (*key risks*) Perusahaan;
5. Memastikan perencanaan dan standarisasi mutu produk eksisting dan produk baru termasuk di dalamnya menetapkan persyaratan mutu produk eksisting dan produk baru, mengelola ketidaksesuaian produk eksisting dan produk

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT**

*Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit (KSPMR) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 01.004.K/DIR/PLNE/XI/2021 concerning the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring's role is to ensure that the Procurement of Goods and Services is carried out in accordance with GCG principles, the management of Integrated Management Systems and Risk Management control can provide added value to maintain the Company's business continuity. The duties and responsibilities of KSPMR include:*

1. *Ensuring the implementation of policies and strategies for the implementation of the Company's procurement of goods/services, the implementation of guidance or assistance in the implementation of the procurement of goods/services in the Units, Divisions, and Corporate Secretariats, and the management of the administration of procurement of goods/services and contracts;*
2. *Ensuring the implementation of the Company's policies and strategies in risk management including the implementation of the 3 Lines Model and 4 Eyes Principles, the maturity framework and ensuring its implementation both in the decision-making process, as well as in other strategic activities;*
3. *Ensure the implementation of centralized policy management including harmonization of policies and their impacts, those in charge of governance, risk management, and compliance (GRC) as well as the management of integrated management systems;*
4. *Ensure the planning, implementation, management of the Company's risk studies, and risk mitigation in collaboration with risk owners, as well as conducting assessment, monitoring and reporting of the Company's key risks;*
5. *Ensuring planning and standardization of the quality of existing and new products, including establishing quality requirements for existing and new products, managing non-conformances of existing and new products, conducting*



baru, melakukan operasi intelijen pasar untuk melihat respons pelanggan terhadap produk dan menganalisis keefektifan proses penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan;

6. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait proses bisnis dan mekanisme kerja terkait pengembangan mutu produk dan penetapan kualitas produk dengan Bidang terkait;
7. Memimpin, merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan audit mutu internal maupun eksternal untuk mencapai sasaran yang konsisten dan tujuan Perusahaan;
8. Memastikan terlaksananya pengelolaan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya pada Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko;
9. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK), pengembangan kompetensi Pegawai, dan pelaksanaan kegiatan *Knowledge Management* (KM);
10. Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : *Knowledge Management System* (KMS), *Dokumen Manajemen* (DM), *RICO*, *Inteling*, *eRBAS*, *Virtual Cubicle* (VC), *Sunfish*, *Aplikasi Manajemen Surat* (AMS), dan *Business One*, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

- **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGADAAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Tim SPMR dalam melaksanakan tugasnya, setiap awal tahun 2021 diusulkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa Pendidikan dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:

*market intelligence operations to see customer responses to products and analyzing the effectiveness of product and service delivery processes to customers;*

6. *Ensure the planning, implementation and evaluation of policies related to business processes and work mechanisms related to product quality development and product quality determination with related fields;*
7. *Lead, plan, and control the implementation of internal and external quality audits to achieve consistent goals and objectives of the Company;*
8. *Ensure the implementation of risk-based business process management, compliance, and the principles of good corporate governance in a sustainable manner, including planning and following up on risk mitigation related to programs under the authority of the Procurement, Quality and Risk Management Unit;*
9. *Ensure and be responsible for human resource management in the Procurement Unit, Quality and Risk Management in the form of optimizing the management of Manpower Formation (FTK), developing employee competencies, and implementing Knowledge Management (KM) activities;*
10. *Ensure the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Management Documents (DM), RICO, Inteling, eRBAS, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One, optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

- **COMPETENCY DEVELOPMENT OF QUALITY AND RISK MANAGEMENT PROCUREMENT UNITS**

*In improving and developing the competence of the SPMR Team in carrying out their duties, every early 2021 it is proposed to take part in a competency development program, in the form of education and training, including the following:*



**TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**  
**TABLE OF COMPETENCY DEVELOPMENT FOR QUALITY AND RISK MANAGEMENT UNITS**

Nama Name	Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 Competency Development
Runggun Fredo Amarta	Awareness SMKU ISO 22301:2019 Audit Internal SMKU ISO 22301:2019 Governance Risk Compliance Professional Digital Talent #10: Telkomsel
Katherine Amaranila	Awareness SMKU ISO 22301:2019 Audit Internal SMKU ISO 22301:2019 Strategi Bisnis, Korporat, dan Global Wokshop Successful Capacity Building In Learning Delivery (SCBD) for Instructor Soft Skills For Leader To Create Value Governance Risk Compliance Professional
Indratno Hariyanto	Awareness SMKU ISO 22301:2019 Pelatihan Tata Nilai Akhlak
Achiarli Khalilul Rahman	Pembelajaran Implementasi Penyusunan HPS Pelatihan dan Sertifikasi QRMA Awareness SMKU ISO 22301:2019
Wizasko Ardiansyah	Supervisi Penyusunan dan Pendokumentasian Perjanjian/Kontrak Petugas DAMKAR Kelas D Auditor SMK3 Audit Internal SMKU ISO 22301:2019
Ahmad Ihsani	Manajemen Persediaan
M. Agung Saputra	Supervisi Penyusunan dan Pendokumentasian Perjanjian/Kontrak Digital Leadership Series 2022 #4: Amplify Proessional Influence Throughout The Organization By Cultivating Business Relationship Awareness dan Auditor Internal ISO 9001:2015 Awareness SMKU ISO 22301:2019 Audit Internal SMKU ISO 22301:2019 Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA)
Citra Resmi	Training Awareness & Audit Internal ISO 27001:2013
Dewi Safitri	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Berbasis Risiko Awareness dan Auditor Internal ISO 9001:2015 Awareness SMKU ISO 22301:2019 Audit Internal SMKU ISO 22301:2019 Awareness SMKU ISO 22301:2019
Nurroh Habibah	Audit Internal SMKU ISO 22301:2019 Data Analytics Dasar
Galuh Wijayanto	Kajian Keekonomian PLTS Pelatihan Key Risk Indicator (KRI) Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Awareness dan Auditor Internal ISO 27001:2013



### • ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan pengendalian risiko untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan dengan mengendalikan risiko tertentu yang secara spesifik dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan. Agar penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan efektif, Perseroan membentuk unit kerja Satuan Mutu dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Manajemen (Risk Owner) di Perseroan. Berikut adalah Organisasi Manajemen Risiko, Wewenang, dan Tanggung Jawab sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 22.001.K/DIR/PLNE/X/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Enjiniring.

### • RISK MANAGEMENT ORGANIZATION, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY

*In the context of implementing Good Corporate Governance practices, the Company carries out risk management and control to ensure the achievement of company goals by controlling certain risks that can specifically affect the Company's business continuity. In order for the implementation of Risk Management to run effectively, the Company establishes a Quality and Risk Management Unit which is responsible for coordinating the risk management and control processes carried out by all levels of Management (Risk Owner) in the Company. The following are the Risk Management Organizations, Authorities, and Responsibilities in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring No. 22.001.K/DIR/PLNE/X/2021 concerning General Guidelines for Integrated Risk Management of PT PLN Enjiniring.*

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penerapan Manajemen Risiko, melibatkan seluruh organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen Perusahaan, Pemilik Risiko, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko dan sub-Bidang Manajemen Risiko.

Adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris  
Peran dan kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PLNE.
2. Direksi
  - Peran  
Berperan sebagai pemegang delegasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan, mulai dari perencanaan strategis hingga 'pada eksekusinya dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran perusahaan.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES

*Implementation of Risk Management, involves all organs of the company starting from the Board of Commissioners, Directors, Board of Management of the Company, Risk Owners, Internal Audit, Risk Management function and sub-Sector of Risk Management.*

*The respective authorities and responsibilities are as follows:*

1. Board of Commissioners  
*The roles and authorities of the Board of Commissioners are in accordance with the laws and articles of association of PLNE.*
2. Directors
  - Role  
*Acting as the holder of the delegation of the General Meeting of Shareholders (GMS) to carry out company management, including implementing Integrated Risk Management and corporate Risk management practices, from strategic planning to execution in order to achieve company goals.*



- Akuntabilitas
  - a) Menetapkan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - b) Memimpin penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan di direktoratnya masing-masing.
  - c) Membangun dan memperkuat budaya Risiko perusahaan.
  - d) Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis perusahaan.
  - e) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan

### 3. Satuan Manajemen Mutu dan Risiko

- Peran
  - a) Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya.
  - b) Sebagai pendamping dan *Checker/Reviewer*, dan *Approval* sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan.
  - c) Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Satuan Kerja.
- Kewenangan
  - a) Mengusulkan pembentukan entitas kerja untuk membantu Direksi dalam hal mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).

- *Accountability*
  - a) *Establish policies and strategic directions for the implementation of Integrated Risk Management.*
  - b) *Leading the implementation of Integrated Risk Management and providing a commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as providing the necessary resources in managing the company's risk in their respective directorates.*
  - c) *Build and strengthen the company's Risk culture.*
  - d) *Determine, manage, and monitor the Main Risks faced by the company in achieving the company's strategic goals.*
  - e) *Take risk management decisions according to the limits of authority that apply within the company*

### 3. Quality and Risk Management Unit

- Role
  - a) *As the person in charge of implementing the company's Integrated Risk Management in accordance with the framework design and risk management, along with its development efforts.*
  - b) *As a companion and Checker/Reviewer, and Approval according to the mechanism of delegation of authority for Risk assessment and follow-up to the company's Risk.*
  - c) *As a provider of input on Risk assessment and Risk follow-up carried out by Risk Leaders and Risk Champions in the Work Unit.*
- Authority
  - a) *Propose the establishment of a working entity to assist the Board of Directors in coordinating the implementation of the company's Integrated Risk Management for approval by the Director of Risk Management Development (DPMR).*



- b) Mengusulkan rumusan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan maupun tata kelola Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - c) Mengusulkan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya kriteria Risiko perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - d) Menyediakan rumusan target kinerja efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko yang dijalankan perusahaan untuk disetujui Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - e) Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan Risiko secara berkala, serta pengembangan berkelanjutan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - f) Meminta informasi dari para pihak internal PLNE untuk kebutuhan penyusunan kajian Risiko, perumusan laporan Profil Risiko, dan efektivitas pengelolaan Risiko PLNE untuk dilaporkan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) serta informasi lain yang dibutuhkan Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) dalam menjalankan perannya.
  - g) Merancang program peningkatan kapabilitas internal di bidang Manajemen Risiko, termasuk di dalamnya kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, sesuai kebutuhan perusahaan bersama fungsi kerja terkait.
- **Akuntabilitas**
    - a) Merumuskan usulan kebijakan dan arahan strategis penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
- **Accountability**
    - a) Formulate policy proposals and strategic directions for the implementation of Integrated Risk Management to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).
- b) *Propose the formulation of strategic directions for the implementation of the company's Integrated Risk Management and corporate Risk governance to be approved by the Director of Risk Management (DPMR).*
  - c) *Propose policies and strategies for the implementation of Integrated Risk Management, including the company's Risk criteria for approval by the Director of Risk Management (DPMR).*
  - d) *Provide a formulation of performance targets for the effectiveness of Integrated Risk Management implementation as well as Risk management practices carried out by the company to be approved by the Risk Management Guiding Director (DPMR).*
  - e) *Carry out periodic evaluations of Risk management performance achievements, as well as continuous development of Integrated Risk Management.*
  - f) *Request information from PLNE internal parties for the needs of compiling Risk studies, formulation of Risk Profile reports, and the effectiveness of PLNE Risk management to be reported to the Director of Risk Management Fostering (DPMR) as well as other information needed by the Director of Fostering Risk Management (DPMR) in carrying out their roles.*
  - g) *Designing an internal capability improvement program in the field of Risk Management, including awareness and culture of Risk in implementing Integrated Risk Management, as well as the maturity level of Integrated Risk Management implementation, according to the needs of the company and related work functions.*



- b) Merekomendasikan strategi maupun keputusan pengelolaan Risiko di tingkatan perusahaan, sesuai permintaan Direksi.
  - c) Menjalankan kepemimpinan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memimpin operasional penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan memberikan komitmen untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta merencanakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Risiko perusahaan untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - d) Merancang program pembangunan dan penguatan budaya Risiko perusahaan sebagai bagian dari program kerja, termasuk di dalamnya sosialisasi/pelatihan/capacity building kepada para pegawai dalam pengelolaan Risiko.
  - e) Merumuskan usulan upaya kepastian efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Manajemen Risiko Terintegrasi serta mengusulkan tindakan antisipatif terhadap perkembangan internal dan eksternal PLNE untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - f) Melaporkan Profil Risiko perusahaan, efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - g) Mengukur efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - h) Merumuskan usulan pengembangan berkelanjutan serta tingkat maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk diajukan kepada Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR).
  - i) Mengelola informasi dan data terkait Manajemen Risiko untuk kebutuhan peningkatan efektivitas penerapan dan praktik Manajemen Risiko Terintegrasi.
- b) Recommend risk management strategies and decisions at the company level, according to the request of the Board of Directors.*
  - c) Carry out Integrated Risk Management leadership by leading the operational implementation of Integrated Risk Management and providing a commitment to support the implementation of Integrated Risk Management as well as planning the resources needed in managing the company's Risk to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
  - d) Designing development programs and strengthening the company's Risk culture as part of the work program, including socialization/training/capacity building to employees in risk management.*
  - e) Formulate proposals for ensuring the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and Integrated Risk Management management practices as well as proposing anticipatory actions to PLNE's internal and external developments to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
  - f) Reporting the company's Risk Profile, the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and the company's Risk management practices to the Director of Risk Management (DPMR).*
  - g) Measuring the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management.*
  - h) Formulate proposals for sustainable development and maturity level of Integrated Risk Management implementation to be submitted to the Director of Risk Management Development (DPMR).*
  - i) Manage information and data related to Risk Management for the need to increase the effectiveness of the implementation and practice of Integrated Risk Management.*



- j) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko di Bidang/Satuan/SETPER sesuai batasan kewenangan yang berlaku di lingkungan PLNE.

#### 4. Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan

- **Peran**

- a) Berperan sebagai entitas kerja yang dibentuk Direksi untuk membantu direksi melaksanakan perannya sesuai delegasi yang diberikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya dalam melaksanakan fungsi audit internal PLNE.
- b) Sebagai *reviewer* sekaligus *independent assurance provider* terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko perusahaan.

- **Kewenangan**

- a) Mengelola audit *universe* dalam rangka perumusan rencana audit internal tahunan.
- b) Meminta informasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko serta *auditee* dalam rangka menjalankan perannya.
- c) Melaksanakan fungsi audit internal, merumuskan laporan hasil audit internal, dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan komite audit.
- d) Meminta *auditee* untuk melaksanakan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangan berdasarkan hasil audit.

- **Akuntabilitas**

- a) Merencanakan dan melaksanakan audit berbasis Risiko, audit kepatuhan, dan atau audit *surveillance* terhadap penerapan sistem 16 manajemen sebagai upaya pemastian independen terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko perusahaan.
- b) Menetapkan laporan hasil audit dan efektivitas pelaksanaan pelaporannya.

- j) *Make decisions in risk management in the Bidang/Satuan/SETPER according to the limits of authority that apply within the PLNE environment.*

#### 4. *Company Internal Supervisory Unit (SPI)*

- **Role**

- a) *Act as a working entity established by the Board of Directors to assist the Board of Directors in carrying out their roles according to the delegation given by the General Meeting of Shareholders (GMS), particularly in carrying out the PLNE internal audit function.*
- b) *As a reviewer as well as an independent assurance provider for the implementation of integrated risk management and corporate risk management practices.*

- **Authority**

- a) *Manage the audit universe in the framework of the formulation of the annual internal audit plan.*
- b) *Request information from the Risk Management Unit and auditees in order to carry out their roles.*
- c) *Carry out the internal audit function, formulate a report on the results of the internal audit, and report it to the President Director and the audit committee.*
- d) *Request the auditee to implement the proposed corrective actions or development recommendations based on the audit results.*

- **Accountability**

- a) *Plan and carry out Risk-based audits, compliance audits, and/or surveillance audits of the implementation of the management system as an effort to independently ensure the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and the company's Risk management practices.*
- b) *Determine the audit result report and the effectiveness of the reporting implementation.*



- c) Melaksanakan upaya pemastian terhadap tindak lanjut *auditee* atas laporan hasil audit.
  - d) Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap Risiko yang dilakukan oleh *auditee* di seluruh lingkungan dan tingkatan perusahaan, beserta merumuskan usulan tindakan perbaikan atau rekomendasi pengembangannya.
  - e) Melakukan penilaian kematangan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi di Bidang/Satuan/SETPER serta Anak Perusahaan jika diperlukan
5. Direksi Anak Perusahaan
- a. Menetapkan pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Anak Perusahaan, diselaraskan dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang berlaku di PLNE, termasuk di dalamnya adalah penetapan matriks Risiko yang digunakan di Anak Perusahaan yang menggambarkan Selera Risiko Anak Perusahaan dengan kategori yang mengacu pada skala tingkat kemungkinan kejadian, skala tingkat dampak, dan Tingkat Risiko yang ditetapkan oleh PLNE.
  - b. Membentuk satuan kerja di bawah Direksi Anak Perusahaan yang bertugas sebagai *framework owner* dalam implementasi manajemen Risiko terintegrasi di lingkungan Anak Perusahaan, dengan fungsi utama mengacu pada fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam Keputusan ini.
  - c. Menetapkan, mengelola, dan memantau Risiko Utama yang dihadapi Anak Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis PLNE.
  - d. Menciptakan lingkungan internal Anak Perusahaan yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan kematangan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya Manajemen Risiko di Anak Perusahaan.
  - e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Anak Perusahaan.
- c) *Carry out efforts to ensure the auditee's follow-up on the audit report.*
  - d) *Evaluating the effectiveness of internal control against Risks carried out by auditees at all levels and levels of the company, as well as formulating recommendations for corrective actions or recommendations for their development.*
  - e) *Assessing the maturity of the implementation of Integrated Risk Management in the Field/Unit/SETPER and Subsidiaries if necessary*
5. *Subsidiary Directors*
- a. *Establishing guidelines for the implementation of Integrated Risk Management within the Subsidiaries, aligned with the guidelines for implementing Integrated Risk Management applicable at PLNE, including the determination of the Risk matrix used in Subsidiaries which describes the Risk Appetite of Subsidiaries with categories that refer to the scale of the likelihood of an event occurring, impact level scale, and Risk Level determined by PLNE.*
  - b. *Establish a work unit under the Board of Directors of the Subsidiary which serves as the framework owner in the implementation of integrated Risk management within the Subsidiary, with the main function referring to the function of the Risk Management Work Unit in this Decree.*
  - c. *Determine, manage, and monitor the Main Risks faced by Subsidiaries in achieving PLNE's strategic goals.*
  - d. *Creating a conducive internal environment for the Subsidiaries to implement and improve the maturity of the implementation of Integrated Risk Management in a sustainable manner, and to instill a Risk Management culture in the Subsidiaries.*
  - e. *Provide the necessary resources in the implementation of Integrated Risk Management in Subsidiaries.*



## 6. Risk Leader

- **Peran**
  - a) Sebagai *reviewer* dan *approver* atas:
    - 1) penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal;
    - 2) penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada unit kerjanya; dan
    - 3) pelaporan Risiko kepada atasan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - b) *Risk Leader* bertanggung jawab kepada Direktur, atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada entitas kerjanya.
- **Kewenangan**
  - a) Meminta laporan penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko, beserta informasi terkait lainnya dari *Risk Champion* pada unit kerjanya.
  - b) *Risk Leader* Bidang/Satuan/SETPER dapat meminta pendampingan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan akuntabilitasnya.
  - c) Mengambil keputusan pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.
- **Akuntabilitas**
  - a) Melakukan persetujuan terhadap penilaian Risiko dan tindak lanjut Risiko pada entitas kerjanya.
  - b) Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam pengelolaan Risiko sesuai dengan batasan kewenangan yang berlaku.
  - c) Memimpin unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - d) Memperkuat kesadaran dan budaya Risiko dalam menjalankan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi maupun praktik pengelolaan Risiko, beserta peningkatan maturitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

## 6. Risk Leader

- **Role**
  - a) *As a reviewer and approver of:*
    - 1) *assessment and follow-up of the Risk Assessment in the critical decision-making process;*
    - 2) *assessment and follow-up of the Risk Profile in the work unit; and*
    - 3) *Risk reporting to superiors and the Risk Management Work Unit.*
  - b) *The Risk Leader is responsible to the Director, for the effectiveness of the implementation of Integrated Risk Management and internal control in his working entity.*
- **Authority**
  - a) *Request a Risk assessment report and Risk follow-up, along with other related information from the Risk Champion in his work unit.*
  - b) *The Risk Leader of the Division/Unit/SETPER may request assistance from the Risk Management Unit in carrying out its accountability.*
  - c) *Take risk management decisions in accordance with the applicable authority limits.*
- **Accountability**
  - a) *Approve the Risk assessment and follow-up Risk in the working entity.*
  - b) *Responsible for decisions taken in risk management in accordance with the applicable authority limits.*
  - c) *Lead the work unit that is his responsibility in implementing Integrated Risk Management.*
  - d) *Strengthening Risk awareness and culture in implementing Integrated Risk Management and Risk management practices, as well as increasing the maturity of Integrated Risk Management implementation.*



• PROFIL RISIKO KORPORAT

Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2022. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor Key Risk Indicator risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan. Adapun risviko-risiko utama yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PROFIL RISIKO KORPORAT  
CORPORATE RISK PROFILE

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Inherent Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
1	Survey Kepuasan pelanggan per proyek	Terkendalanya Pemenuhan Kompetensi Personil Enjiniring Sesuai Persyaratan Kontrak Pekerjaan	E.4 / Sangat Tinggi	B.3/Moderat	A.3/Moderat
	Customer satisfaction survey per project	Constraints on the Fulfillment of Engineering Personnel Competencies in accordance with the Requirements of the Work Contract	E.4 / Very High	B.3/Moderate	A.3/Moderate
2	Kajian Engineering untuk Peningkatan Kapasitas EBT di luar Program Konversi PLTD ke EBT	Transformasi Permintaan Pasar untuk Jenis Pekerjaan Baru (EBT) Belum Dapat Dipenuhi PLNE	E.4 / Sangat Tinggi	B.3 / Moderat	A.3/Moderat
	Engineering Study for Increasing NRE Capacity outside PLTD to NRE Conversion Program	Transformation of Market Demand for New Types of Jobs (EBT) Cannot Be Fulfilled by PLNE	E.4 / Very High	B.3 / Moderate	A.3/Moderate
3	Penyelesaian Dokumen Engineering (FS, RFP, Bid Doc, HPE) Program Konversi PLTD ke EBT sesuai Penugasan	PLNE Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Pasar Terkait Produk Enjiniring Konversi PLTD ke EBT	E.4 / Sangat Tinggi	C.2 / Moderat	A.3 / Moderat
	Completion of Engineering Documents (FS, RFP, Bid Doc, HPE) PLTD to EBT Conversion Program according to Assignment	PLNE Unable to Meet Market Demand Related to Engineering Products PLTD to EBT Conversion	E.4 / Very High	C.2 / Moderate	A.3 / Moderate
4	Survey Kepuasan pelanggan per proyek	Kualitas Produk dan Layanan Tidak Sesuai Ekspektasi Pelanggan	D.5/Ekstrem	B.3 / Moderat	A.3 / Moderat

• CORPORATE RISK PROFILE

The corporate risk profile is prepared to ensure the achievement of PT PLN Enjiniring's strategic objectives as stated in the 2022 RKAP. The PT PLN Enjiniring Corporate Risk Profile is used as the main reference for company management to monitor the company's risk Key Risk Indicators as management material for making decisions. The main risks determined in 2022 are as follows:



No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Inherent Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
	<i>Customer satisfaction survey per project</i>	<i>The Quality of Products and Services Does Not Meet Customer Expectations</i>	<i>D.5/Extreme</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>A.3/ Moderate</i>
5	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Tingginya Total Realisasi Biaya Proyek	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	D.3 / Tinggi
	<i>Operating Costs to Operating Income (BOPO)</i>	<i>High Total Realization of Project Costs</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>D.3 / High</i>
6	Engineering On-Time Delivery	Penyelesaian Produk Enjiniring Terkendala karena Perencanaan yang Tidak Matang oleh Pemberi Kerja	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.3/Moderat
	<i>Engineering On-Time Delivery</i>	<i>Engineering Product Completion Constrained by Inadequate Planning by Employer</i>	<i>C.4 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>B.3/Moderate</i>
7	Pengembangan Portofolio Usaha	Transformasi Bisnis PLNE Belum Mendukung Keberlangsungan Usaha	D.2 / Moderat	B.2 / Rendah	B.2 / Rendah
	<i>Business Portfolio Development</i>	<i>PLNE's Business Transformation Has Not Supported Business Continuity</i>	<i>D.2/ Moderate</i>	<i>B.2 / Low</i>	<i>B.2 / Low</i>
8	Transformasi PLNE	Eksistensi PLNE akan dihilangkan	D.4 / Sangat Tinggi	B.3 / Moderat	C.2 / Moderat
	<i>PLNE Transformation</i>	<i>The existence of PLNE will be eliminated</i>	<i>D.4 / Highly Elevated</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>C.2 / Moderate</i>
9	Business Continuity CPSI	Kegagalan Pengelolaan Portofolio Saham Minoritas pada PT CPSI	D.3 / Tinggi	B.3 / Moderat	E.5 / Ekstrem
	<i>CPSI Business Continuity</i>	<i>Failure to Manage Minority Share Portfolio at PT CPSI</i>	<i>D.3 / High</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>E.5 / Extreme</i>
10	Survey Kepuasan pelanggan per proyek	Keluhan Pelanggan terhadap Produk dan Layanan PLNE Masih Tinggi	D.4 / Sangat Tinggi	B.3 / Moderat	B.3 / Moderat
	<i>Customer satisfaction survey per project</i>	<i>Customer Complaints against PLNE Products and Services Still High</i>	<i>D.4 / Highly Elevated</i>	<i>B.3 / Moderate</i>	<i>B.3 / Moderate</i>

• **KAJIAN RISIKO BIDANG**

Pada tahun 2022 tidak hanya untuk proyek-proyek strategis, penerapan manajemen risiko sudah mencapai ke level bidang dan Sekper sebanyak 73 dokumen kajian risiko, sebagaimana berikut:

• **FIELD RISK ASSESSMENT**

In 2022, not only for strategic projects, the implementation of risk management has reached the sector level and Sekper as many as 73 risk assessment documents, as follows:



## KAJIAN RISIKO BIDANG

### FIELD RISK ASSESSMENT

No	Bidang	Judul Kajian Risiko
1	Transmisi dan Distribusi  <i>Transmission and Distribution</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi Enjinir Bidang Transmisi dan Distribusi masih belum merata khususnya untuk pekerjaan yang lebih detail dari biasanya</li> <li>b. Pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal</li> <li>c. Kualitas Produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan</li> <li>d. Layanan yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan</li> <li>e. Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan</li> <li>f. Proses penagihan yang panjang khususnya untuk verifikasi eviden-eviden penagihan</li> <li>g. Penyelesaian produk enjiniring terlambat</li> <li>h. Pengendalian biaya proyek belum efektif</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The competence of the Engineer in the Field of Transmission and Distribution is still uneven, especially for work that is more detailed than usual</i></li> <li>b. <i>Management and handling of customer complaints that are not optimal</i></li> <li>c. <i>The quality of the products produced is not in accordance with customer expectations</i></li> <li>d. <i>The resulting service does not match customer expectations</i></li> <li>e. <i>Service Quality does not match customer expectations</i></li> <li>f. <i>Long billing process, especially for verification of billing clients</i></li> <li>g. <i>Late engineering product completion</i></li> <li>h. <i>Project cost control has not been effective</i></li> </ul>
2	Pembangkit  <i>Power plant</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terkendalanya Pemenuhan Kompetensi Personil Enjiniring Sesuai Persyaratan Kontrak Pekerjaan</li> <li>b. Kualitas Produk dan Layanan Tidak Sesuai Ekspektasi Pelanggan</li> <li>c. PLNE Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Pasar Terkait Produk Enjiniring Khususnya EBT</li> <li>d. Tingginya Total Realisasi Biaya Proyek</li> <li>e. Penyelesaian Produk Enjiniring Terkendala</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Constraints on the Fulfillment of Engineering Personnel Competencies in accordance with the Requirements of the Work Contract</i></li> <li>b. <i>The Quality of Products and Services Does Not Meet Customer Expectations</i></li> <li>c. <i>PLNE Cannot Meet Market Demand Related to Engineering Products, Especially EBT</i></li> <li>d. <i>High Total Realization of Project Costs</i></li> <li>e. <i>Constrained Engineering Product Completion</i></li> </ul>
3	Konstruksi  <i>Construction</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya jumlah enjinir <i>dedicated</i> untuk proyek supervisi konstruksi yang sesuai dengan persyaratan kontrak</li> <li>b. Pemenuhan TKA sesuai <i>requirement</i> kontrak</li> <li>c. Proses penagihan yang panjang khususnya untuk verifikasi eviden-eviden penagihan</li> <li>d. Remunerasi yang kurang bersaing sehingga pergantian personil cukup dinamis</li> <li>e. Pergantian personil yang cukup dinamis sehingga biaya mob/demob cukup tinggi</li> <li>f. Pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal-inisiatif</li> <li>g. Pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal-SOP</li> <li>h. Pengelolaan dan penanganan keluhan pelanggan yang belum optimal-Feedback</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Limited number of dedicated engineers for construction supervision projects in accordance with contract requirements</i></li> <li>b. <i>TKA fulfillment according to contract requirements</i></li> <li>c. <i>Long billing process, especially for verification of billing clients</i></li> <li>d. <i>Remuneration is less competitive so that personnel turnover is quite dynamic</i></li> <li>e. <i>Personnel turnover is quite dynamic so that the cost of mob / demob is quite high</i></li> </ul>



No	Bidang	Judul Kajian Risiko
4	SDM dan Umum	f. <i>Management and handling of customer complaints that have not been optimal-initiative</i>
		g. <i>Management and handling of customer complaints that are not optimal-SOP</i>
		h. <i>Management and handling of customer complaints that are not optimal-Feedback</i>
		a. SDM dituntut untuk beradaptasi terhadap kebijakan baru
	HR and General	b. Adanya biaya yang timbul di luar rencana
		c. Terjadinya keluhan pelanggan terkait kebersihan
		d. Implementasi SMK3 tidak sesuai dengan target yang ditentukan
		a. <i>HR is required to adapt to new policies</i>
		b. <i>There are costs incurred outside the plan</i>
		c. <i>The occurrence of customer complaints related to cleanliness</i>
5	Anggaran & Keuangan	d. <i>The implementation of SMK3 is not in accordance with the specified target</i>
		a. PLNE terlambat menerbitkan invoice karena adanya permasalahan dalam pembuatan BAPP dan dokumen tagihan sehingga sasaran pencapaian target kas tidak tercapai
		b. Proses realisasi investasi terkendala karena progres tidak berjalan sesuai dengan <i>schedule</i> yang sudah ditetapkan sehingga sasaran pencapaian investasi tidak tercapai
		c. Dengan adanya penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya operasi sehingga rasio operasi perusahaan menjadi tinggi
		d. Ketersediaan Kas untuk pembayaran kewajiban SHL tidak tersedia karena penurunan pendapatan diakibatkan penurunan produksi CNG Bangkanai sehingga kewajiban pembayaran SHL tidak terbayar (wanprestasi)
	Budget & Finance	e. Ketersediaan Kas Perusahaan tidak mencukupi karena pelunasan piutang terlambat sehingga Likuiditas perusahaan terganggu
		a. <i>PLNE was late in issuing invoices due to problems in making BAPP and billing documents so that the target of achieving cash targets was not achieved</i>
		b. <i>The investment realization process is constrained because the progress does not run according to the schedule that has been set so that the investment achievement target is not achieved</i>
		c. <i>With the decline in revenue and increasing operating costs so that the company's operating ratio becomes high</i>
		d. <i>Cash availability for payment of SHL obligations is not available due to a decrease in revenue due to a decrease in CNG Bangkanai production so that SHL payment obligations are not paid (default)</i>
6	Akuntansi	e. <i>The Company's Cash Availability is insufficient due to late repayment of receivables so that the company's liquidity is disrupted</i>
		a. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan karena Nota Debet Tidak Diterima Pemberi Kerja
		b. Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan Perusahaan yang sesungguhnya karena keterlambatan dalam pengakuan biaya
		c. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan karena keterlambatan dalam perolehan data
		d. Restitusi tidak dapat diperoleh secara optimal
	Accountancy	e. PLNE menanggung biaya/kerugian atas Kerusakan aset perusahaan karena tidak diasuransikan
		a. <i>Delay in preparing financial statements due to Debit Note Not Received by Employer</i>
		b. <i>The Financial Statements do not reflect the Company's actual financial condition due to delays in cost recognition</i>
		c. <i>Delay in preparing financial statements due to delay in data acquisition</i>
		d. <i>Restitution cannot be obtained optimally</i>
e. <i>PLNE bears costs/losses for damage to company assets because they are not insured</i>		



No	Bidang	Judul Kajian Risiko
7	Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlambatnya penyelesaian BAPP dan BAST karena proses verifikasi harus menempuh beberapa kota sehingga adanya</li> <li>b. Turunnya tarif jasa CNG dan <i>Pre treatment</i> sehingga mengurangi pendapatan</li> <li>c. Turunnya jam produksi CNG Bangkanai karena banyaknya pemeliharaan di tahun 2022 sehingga jasa <i>Pre Treatment</i> dan CNG yang diberikan kepada pemberi kerja menurun</li> <li>d. Adanya temuan dari auditor karena tidak lengkapnya dokumen untuk mendukung pengoperasian CNG Bangkanai sehingga berpotensi penghentian pengoperasian unit.</li> <li>e. Terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan karena kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan K3IH sehingga berpotensi adanya korban jiwa, cacat, atau luka</li> <li>f. Kurang terpantaunya realisasi anggaran karena tidak adanya monitoring pengeluaran setiap bulan sehingga berpotensi tingginya pengeluaran terhadap RAB yang ada.</li> </ul>
	Exploitation	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The delay in the completion of BAPP and BAST because the verification process has to go through several cities so that there is</i></li> <li>b. <i>Lower CNG and Pretreatment service tariffs thereby reducing revenue</i></li> <li>c. <i>The decrease in Bangkanai CNG production hours due to the large amount of maintenance in 2022 so that Pre Treatment and CNG services provided to employers decreased</i></li> <li>d. <i>There are findings from the auditor due to incomplete documents to support the operation of CNG Bangkanai so that it has the potential to stop the operation of the unit.</i></li> <li>e. <i>The occurrence of work accidents and environmental pollution due to lack of awareness in the implementation of K3IH so that there is the potential for casualties, disabilities, or injuries</i></li> <li>f. <i>Lack of monitoring of budget realization due to the absence of monitoring expenditures every month so that there is the potential for high expenditure on the existing RAB.</i></li> </ul>
8	Perencanaan Korporat dan Pengembangan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil survey kepuasan pelanggan korporat dan analisisnya belum tersosialisasi dengan baik</li> <li>b. Kendala dalam melakukan inisiasi pengembangan usaha</li> <li>c. Keterlambatan penyampaian RJP kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pada Kepdir RJP</li> <li>d. Kelemahan pengelolaan portofolio saham minoritas pada PT CPSI</li> <li>e. Kelemahan pengelolaan portofolio saham minoritas pada 4 IPP</li> <li>f. Ketidaklengkapan dokumen GCG dan ketidaksesuaian target Implementasi Quick Win Transformasi Portofolio PLN Grup</li> <li>g. Program kerja bidang tidak selaras dengan Program Transformasi PLNE</li> <li>h. Penyusunan kajian dampak inisiatif strategis Pembentukan Holding - Sub Holding terhadap PLNE kurang komprehensif</li> </ul>
	Corporate Planning and Business Development	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The results of the corporate customer satisfaction survey and its analysis have not been well socialized</i></li> <li>b. <i>Obstacles in initiating business development</i></li> <li>c. <i>Late submission of CPR to Shareholders in accordance with the provisions in the Kepdir RJP</i></li> <li>d. <i>Weaknesses in the management of minority share portfolios at PT CPSI</i></li> <li>e. <i>Weaknesses in minority stock portfolio management in 4 IPPs</i></li> <li>f. <i>Incompleteness of GCG documents and mismatch of targets Quick Win Implementation of PLN Group Portfolio Transformation</i></li> <li>g. <i>Field work programs are not aligned with PLNE Transformation Program</i></li> <li>h. <i>The preparation of an impact study of the strategic initiative of the Establishment of Holding - Sub Holding on PLNE is less comprehensive</i></li> </ul>



No	Bidang	Judul Kajian Risiko
9	Pemasaran	a. Permintaan Pasar dari AP PLN Belum Dapat Dipenuhi PLNE
		b. Permintaan Pasar dari Non PLN Group Belum Dapat Dipenuhi PLNE
		c. Permintaan Pasar dari Internal PLN Belum Dapat Dipenuhi PLNE
		d. Tidak terdokumentasinya eviden laporan dengan baik
		e. Tidak terdokumentasinya eviden laporan dengan baik
		f. PLNE tidak dapat memenuhi <i>on time delivery</i> untuk kebutuhan dalam kontrak akibat dari adanya kebutuhan <i>subletting/subkon</i>
		g. Terlambatnya diterima Daftar Potensi Rencana Pengadaan dari Pengguna /Sub Bidang Pemasaran pada Tahun Berjalan
		h. PLNE tidak dapat memenuhi <i>on time delivery</i> untuk kebutuhan dalam kontrak akibat dari adanya kebutuhan <i>subletting/subkon</i>
		l. PLNE tidak dapat memenuhi <i>on time delivery</i> untuk kebutuhan dalam kontrak akibat dari adanya kebutuhan <i>subletting/subkon</i>
	Marketing	a. <i>Market Demand from AP PLN Cannot Be Met by PLNE</i>
		b. <i>Market Demand from Non PLN Group Cannot Be Met by PLNE</i>
		c. <i>Market Demand from Internal PLN Cannot Be Met by PLNE</i>
		d. <i>Not well documented evidence reports</i>
		e. <i>Not well documented evidence reports</i>
		f. <i>PLNE cannot fulfill on time delivery for the needs in the contract due to the need for subletting/subcont</i>
		g. <i>Late receipt of List of Potential Procurement Plans from Users / Marketing Sub-Fields in the Current Year</i>
		h. <i>PLNE cannot fulfill on time delivery for the needs in the contract due to the need for subletting/subcon</i>
		l. <i>PLNE cannot fulfill on time delivery for the needs in the contract due to the need for subletting/subcon</i>
		10
b. Penyampaian hasil <i>review</i> perjanjian antara pemberi kerja dengan PLNE tidak tepat waktu karena tingginya permintaan Pendampingan Hukum secara tiba-tiba sehingga <i>draft</i> tidak dapat segera difinalkan.		
c. Posisi PLNE menjadi lemah di dalam suatu perkara karena data dan informasi pendukung terkait sengketa tidak lengkap sehingga Putusan atas sengketa tidak menguntungkan PLNE.		
d. Tidak terpantaunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis PLNE sehingga peraturan internal PLNE yang direview oleh Sub Bidang Hukum tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan		
e. Insan PLNE tidak memahami ketentuan dalam peraturan internal PLNE terkait kepatuhan karena kurangnya komitmen dan informasi terkait kepatuhan sehingga berpotensi melakukan pelanggaran kepatuhan		
f. PLNE tidak memiliki Izin usaha yang dibutuhkan karena keterlambatan pengurusan setelah menerima dokumen lengkap sehingga PLNE terkendala dalam mendapatkan pekerjaan		
g. Pemenuhan <i>evidence</i> IT <i>Maturity</i> level tidak tercapai		
h. Adanya risiko keterlambatan penyelesaian pada pelaksanaan inisiatif ITMP		
i. Rapat Direksi pengambilan keputusan oleh Direksi tidak melalui mekanisme GRC		
j. Pedoman/PE CSR tidak sesuai ISO 26000		
k. Monitoring pemenuhan <i>Evidence</i> KPI Korporat sesuai SE Kinerja berjalan tidak rutin/maksimal		
l. Pengesahan Laporan Manajemen terlambat		



No	Bidang	Judul Kajian Risiko
	Company Secretary	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The results of Legal Assistance (Assistance in Dispute Resolution, Legal Review, Agreement Review, Legal Assistance, etc.) are not comprehensive because the supporting documents received are incomplete so that PLNE's legal rights and interests are not protected.</i></li> <li>b. <i>Submission of the results of the review agreement between the givers work with PLNE was not timely due to the sudden high demand for Legal Assistance so that the draft could not be finalized immediately.</i></li> <li>c. <i>PLNE's position becomes weak in a case because the data and supporting information related to the dispute are incomplete so that the decision on the dispute does not benefit PLNE.</i></li> <li>d. <i>Non-monitoring of laws and regulations related to PLNE's business processes so that PLNE's internal regulations reviewed by the Legal Sub-Division are not in accordance with the provisions in the laws and regulations</i></li> <li>e. <i>PLNE personnel do not understand the provisions in PLNE's internal regulations related to compliance due to lack of commitment and information related to compliance so that they have the potential to commit compliance violations</i></li> <li>f. <i>PLNE does not have the required business license due to delays in processing after receiving complete documents so that PLNE is constrained in getting a job</i></li> <li>g. <i>Fulfillment of evidence IT Maturity level not achieved</i></li> <li>h. <i>There is a risk of late completion in implementation of ITMP initiatives</i></li> <li>i. <i>Board of Directors meetings are not made by the Board of Directors through the GRC mechanism</i></li> <li>j. <i>CSR guidelines/PE are not ISO 26000 compliant</i></li> <li>k. <i>Monitoring the fulfillment of Corporate KPI Evidence in accordance SE Performance runs not routine/maximum</i></li> <li>l. <i>Late Management Report Attestation</i></li> </ul>
11	Satuan Pengawasan Intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Temuan auditor internal dan eksternal belum terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan</li> <li>b. Audit Internal tidak terlaksana sesuai perencanaan</li> </ul>
	Internal Control Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The findings of internal and external auditors have not been resolved in accordance with predetermined targets</i></li> <li>b. <i>Internal Audit was not carried out as planned</i></li> </ul>
12	Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya <i>evidence Maturity Level</i> yang tidak dapat terpenuhi, karena kurangnya <i>awareness</i> insan PLN Enjiniring terkait Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (khususnya pemenuhan eviden RMM)</li> <li>b. Ketidakmampuan PLN Enjiniring dalam mempertahankan produk, mutu dan layanan kepada pemberi kerja karena adanya gangguan bencana/pandemi yang berdampak pada proses bisnis PLN Enjiniring</li> <li>c. Kehilangan/ kebocoran/ kerusakan data akibat keamanan data perusahaan yang kurang baik</li> <li>d. Penyusunan program strategis, anggaran maupun profil risiko RKAP tidak selaras dengan sasaran perusahaan (tidak <i>inline</i> dengan proses bisnis yang ada di dalam RJP)</li> <li>e. Rapat Direksi pengambilan keputusan tidak melalui mekanisme GR</li> <li>f. Laporan/ Nota analisis yang dibuat SPMR belum komprehensif dan tidak sesuai target</li> <li>g. Penyedia jasa tidak memenuhi persyaratan pengadaan</li> </ul>



No	Bidang	Judul Kajian Risiko
	<i>Procurement, Quality and Risk Management Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>There is an evidence Maturity Level that cannot be met, due to the lack of awareness of PLN Enjiniring personnel related to the Implementation of Integrated Risk Management (especially the fulfillment of RMM evidence)</i></li> <li>b. <i>PLN Enjiniring's inability to maintain products, quality and services to employers due to disaster/pandemic disruptions that have an impact on PLN Enjiniring's business processes</i></li> <li>c. <i>Data loss/ leakage/ damage due to poor company data security</i></li> <li>d. <i>The preparation of strategic programs, budgets and risk profiles of RKAP is not in line with the company's objectives (not inline with the business processes in the CPR)</i></li> <li>e. <i>Board of Directors meetings decision making is not through GR mechanism</i></li> <li>f. <i>The report/analysis memorandum made by SPMR has not been comprehensive and is not on target</i></li> <li>g. <i>The service provider does not meet the procurement requirements</i></li> </ul>

• **IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022**

Pada tahun 2022, Tim Manajemen Risiko berhasil meraih pencapaian yang memberikan kontribusi kepada realisasi pencapaian Kontrak Manajemen PLN Enjiniring dan meningkatkan reputasi Perusahaan melalui keikutsertaan dalam *Risk Award* yang dilaksanakan oleh PLN (Persero). Selain itu Tim Manajemen Risiko untuk pertama kalinya berhasil menunjukkan kemampuan dalam memberikan konsultasi Manajemen Risiko melalui kerja sama dengan Anak Perusahaan PLN lain.

Adapun pencapaian tersebut antara lain:

1. Pencapaian target *Risk Management Maturity* dengan target di semester 2 tahun 2022 adalah level 3.47 dan tercapai pada level 3.55
2. Berhasil meraih penghargaan ke-3 (Bronze Winner) untuk kategori "*Best Risk Leadership Award*" PLN (Persero).
3. Berhasil meraih penghargaan posisi ke-4 untuk kategori "*Best Risk Implementer Award*" PLN (Persero)
4. Melakukan pekerjaan Jasa Konsultasi Manajemen Risiko pada Anak Perusahaan PLN (Persero), PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dan berhasil mendorong pencapaian skor RMM PT BAG dengan target pada level 2.66 di tahun 2022 dan tercapai level 2.68 sesuai dengan simulasi hasil asesmen RMM yang dilakukan PLN Enjiniring.

• **RISK MANAGEMENT WORK PROGRAM IMPLEMENTATION IN 2022**

*In 2022, the Risk Management Team succeeded in achieving achievements that contributed to the realization of the achievement of the PLN Enjiniring Management Contract and improved the Company's reputation through participation in the Risk Award implemented by PLN (Persero). In addition, the Risk Management Team for the first time successfully demonstrated its ability to provide Risk Management consulting through collaboration with other PLN subsidiaries.*

*The achievements include:*

1. *The achievement of the Risk Management Maturity target with the target in 2nd semester of 2022 is level 3.47 and achieved at level 3.55*
2. *Won the 3rd award (Bronze Winner) for the category of "Best Risk Leadership Award" PLN (Persero).*
3. *Won the 4th position award for the category of "Best Risk Implementer Award" PLN (Persero)*
4. *Carrying out Risk Management Consulting Services work at PLN (Persero) Subsidiary, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna and successfully encouraging the achievement of PT BAG's RMM score with a target of 2.66 in 2022 and achieving level 2.68 in accordance with the simulation of RMM assessment results conducted by PLN Enjiniring.*



5. Sertifikasi *Governance, Risk and Compliance Professional (GRCP)* yang diikuti oleh 2 orang Direksi, 3 orang Satuan dan 2 orang MSB.

5. *Governance, Risk and Compliance Professional (GRCP) certification which was attended by 2 Directors, 3 Units and 2 MSBs.*

Berikut kegiatan-kegiatan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2022:

*The following Risk Management activities have been carried out in 2022:*

1. Mereview Profil Risiko Korporat tahun 2023 yang telah disusun pada akhir tahun 2022;
2. Membentuk Tim Enterprise Risk Management Tahun 2022;
3. Mengadakan Pelatihan Manajemen Risiko untuk BOC, BOD, beberapa Vice President, dan anggota Fungsi Manajemen Risiko di SPMR;
4. Penyusunan Profil Risiko Bidang untuk setiap Bidang, Satuan dan Sekper;
5. Pemantauan mitigasi Profil Risiko Bidang pada aplikasi RICO setiap bulan;
6. Pemantauan mitigasi Profil Risiko Korporat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada PT PLN (Persero) SDT MRO setiap akhir Triwulan;
7. Pembuatan Roadmap MRT bersama Konsultan;
8. Pelaksanaan sosialisasi Juknis dan kriteria RMM PT PLN (Persero) untuk pengisian RMM pada PT PLN Enjiniring;
9. Telah dilaksanakan kegiatan By One Get Excellent (BOGE) terkait Refreshment Mekanisme Kajian Risiko Pengambilan Keputusan, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Four Eyes Principle;
10. Pelaksanaan Budaya Risiko dengan program kerja Risk Talk;
11. Pemenuhan Risk Maturity Level PT PLN Enjiniring Tahun 2022 yang diverifikasi oleh PT PLN (Persero) SDT MRO dengan skor akhir 3,55 ;
12. Pemutakhiran Aplikasi RICO menjadi TAKER (Tata Kelola, Kepatuhan, dan Risiko).

1. *Review the 2023 Corporate Risk Profile prepared at the end of 2022;*
2. *Forming an Enterprise Risk Management Team in 2022;*
3. *Conducted Risk Management Training for BOC, BOD, several Vice Presidents, and members of the Risk Management Function at SPMR;*
4. *Preparation of Field Risk Profiles for each Field, Unit and Secretary;*
5. *Field Risk Profile mitigation monitoring on RICO applications on a monthly basis;*
6. *Monitoring the mitigation of the Corporate Risk Profile and reporting the results of its implementation to PT PLN (Persero) SDT MRO at the end of each quarter;*
7. *Making MRT Roadmap with Consultants;*
8. *Implementation of socialization of PT PLN (Persero) Juknis and RMM criteria for filling RMM at PT PLN Enjiniring;*
9. *By One Get Excellent (BOGE) activities have been carried out related to the Refreshment of the Decision Making Risk Assessment Mechanism, Integrated Risk Management, and Four Eyes Principles;*
10. *Implementation of Risk Culture with Risk Talk work program;*
11. *Fulfillment of the Risk Maturity Level of PT PLN Engineering in 2022 verified by PT PLN (Persero) SDT MRO with a final score of 3.55;*
12. *Upgrade RICO Application to TAKER (Governance, Compliance, and Risk).*



## SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perseroan menetapkan kebijakan dan berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi yang mencakup Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai PP No. 50 Tahun 2012.

Dalam rangka penerapan manajemen terintegrasi tersebut, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan mendokumentasikan prosedur-prosedur yang ada sehingga dapat memenuhi kriteria sertifikasi manajemen mutu, K3 dan anti penyuapan. Perseroan secara berkala melakukan audit internal pelaksanaan manajemen mutu, K3 dan anti penyuapan di tiap unit kerja. Perseroan juga senantiasa meningkatkan sertifikasi manajemen mutu, K3 dan anti penyuapan yang telah dimiliki, di samping berupaya memperoleh sertifikasi-sertifikasi lain yang dipersyaratkan dalam aktivitas usaha.

Perusahaan telah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 PLN Enjiniring dengan Lingkup Sistem Manajemen Mutu yang berlaku untuk Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan dengan pertimbangan utama, bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebagai tool dalam rangka menjaga dan mendukung proses bisnis serta produk yang dihasilkan PLN Enjiniring.

Sistem Manajemen Mutu ini telah banyak membantu dalam rangka pengelolaan proses bisnis di Perusahaan untuk menyelesaikan setiap penugasan agar supaya tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan mutu, baik dari sisi kontrak penugasan maupun standar lingkup enjiniring yang berlaku. Sertifikasi yang diperoleh berlaku dalam periode 3 (tiga) tahun, dengan periode *surveillance* tiap semester, dan pada tahun 2022 dilakukan audit *surveillance* untuk memastikan konsistensi penerapan dimana audit resertifikasi dilakukan di tahun 2020 dan berlaku hingga tahun 2023.

## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

*The Company establishes policies and is committed to the implementation of an Integrated Management System which includes a Quality Management System (QMS) in accordance with ISO 9001: 2015, Anti-Bribery Management System (SMAP) in accordance with ISO 37001: 2016, Occupational Health and Safety Management System (SMK3) in accordance with PP No. 50 of 2012.*

*In order to implement such integrated management, the Company continuously improves and documents existing procedures so that it can meet the criteria for quality management, K3 and anti-bribery certification. The Company periodically conducts internal audits of the implementation of quality management, K3 and anti-bribery in each work unit. The Company also continuously improves its quality management, K3 and anti-bribery certifications, in addition to obtaining other certifications required in business activities.*

*The Company has obtained ISO 9001:2015 PLN Enjiniring Certification with the Scope of Quality Management System applicable to Engineering Design (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) and Supervision of Electrical Installation Construction with the main consideration, that ISO 9001: 2015 Quality Management System, as a tool in order to maintain and support business processes and products produced by PLN Enjiniring.*

*This Quality Management System has helped a lot in the framework of managing business processes in the Company to complete each assignment in order to be on time and in accordance with quality requirements, both in terms of the assignment contract and applicable engineering scope standards. The certification obtained is valid for a period of 3 (three) years, with a surveillance period every semester, and in 2022 a surveillance audit is carried out to ensure consistency in application where the recertification audit is carried out in 2020 and is valid until 2023.*



Pada tahun 2022, PT PLN Enjiniring telah berhasil:

1. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan lingkup Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan melalui audit surveillance ISO 9001:2015.
2. Mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016 dengan lingkup proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan yang melibatkan fungsi Perencana Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan termasuk pengadaan yang dilaksanakan oleh Bidang sesuai dengan batasan kewenangannya dan didukung oleh fungsi lainnya yaitu Keuangan dan Non Keuangan.
3. Memperoleh sertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 tahun 2012 di Gedung Menara Enjiniring sesuai hasil audit resertifikasi SMK3 yang dilaksanakan di bulan April 2023.

*In 2022, PT PLN Enjiniring has succeeded:*

1. *Maintain ISO 9001: 2015 certification with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electrical Installation Construction through ISO 9001: 2015 surveillance audit.*
2. *Maintain the Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate in accordance with ISO 37001: 2016 with the scope of the procurement process of goods/services within the Company involving the functions of Procurement Planner and Procurement Implementer including procurement carried out by the Field in accordance with the limits of its authority and supported by other functions, namely Finance and Non-Finance.*
3. *Obtained SMK3 certification according to PP No. 50 of 2012 at Menara Enjiniring Building according to the results of the SMK3 recertification audit conducted in April 2023.*

## 1. Pelaksanaan Manajemen Mutu

Selama tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi manajemen mutu perusahaan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melakukan review terhadap beberapa Prosedur Enjiniring
2. Pemutakhiran Pedoman, Kebijakan, Sasaran & Tujuan
3. Sosialisasi Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi
4. Sosialisasi Kebijakan dan Komitmen SMT
5. Sosialisasi Sasaran dan Tujuan SMT
6. Sosialisasi Prosedur setiap semester
7. Pelaksanaan Audit Internal SMT yang terdiri dari SMM dan SMKU
8. Melaksanakan tinjauan manajemen atas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, dan Kelangsungan Usaha
9. Pelaksanaan Audit *Surveillance*-2 ISO 9001:2015
10. Pelaksanaan Audit *Surveillance*-1 ISO 37001:2016
11. Pelaksanaan Audit Resertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012

## 1. Implementation of Quality Management

*During 2022 the activities that have been carried out in the context of implementing the company's quality management are as follows:*

1. *Compile and review several Engineering Procedures*
2. *Updated Guidelines, Policies, Goals & Objectives*
3. *Integrated Management System Guidelines Socialization*
4. *SMT Policies and Commitments Socialization*
5. *SMT Goals and Objectives Socialization*
6. *Procedures Socialization every semester*
7. *SMT Internal Audit consisting of SMM and SMKU Implementation*
8. *Carry out management reviews on the implementation of the Quality Management System, and Business Continuity*
9. *ISO 9001:2015 Surveillance 2 Audit Implementation*
10. *ISO 37001:2016 Surveillance-1 Audit Implementation*
11. *Implementation of SMK3 Recertification Audit in accordance with PP No. 50 of 2012*



## 2. Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu

Satuan Manajemen Mutu & Risiko secara berkala membuat Jadwal Program Audit Mutu Internal, pemeriksaan pemastian mutu (*quality assurance*) dengan rujukan Standard, pedoman mutu, prosedur enjiniring dan acuan lainnya termasuk regulasi atau peraturan pemerintah. Pemeriksaan mutu lainnya adalah pemeriksaan mutu produk (*quality control*) yang berkaitan dengan Pemeriksaan Teknis Manajemen yang di atur dalam Prosedur Enjiniring yang berlaku. Pada prinsipnya hierarki sistem manajemen mutu terdiri:

Level 1 (satu) merupakan Kebijakan-Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi;

Level 2 (dua) merupakan Prosedur Enjiniring PLN Enjiniring (PE PLNE);

Level 3 (tiga) merupakan Petunjuk Teknis Enjiniring PLN Enjiniring (PTE);

Level 4 (empat) merupakan Formulir dan *Logsheet* di atur di dalam masing-masing Bidang sesuai dengan kebutuhannya.

Pada tahun 2022 telah dilakukan review dan melakukan revisi terhadap beberapa Prosedur Enjiniring untuk perbaikan proses serta melakukan penyusunan prosedur baru dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi. Total keseluruhan Prosedur Enjiniring (PE) sebanyak 100 dokumen dan Petunjuk Teknis Enjiniring (PTE) sebanyak 39 dokumen. Adapun Prosedur Enjiniring yang telah ditetapkan, antara lain:

1. PE.PLNE.P.01.01 Prosedur Siklus Proyek Enjiniring
2. PE.PLNE.P.01.02 Prosedur Pengelolaan Risiko dan Monitoring KRI
3. PE.PLNE.P.01.03 Prosedur Penyusunan Dokumen Prakualifikasi dan/atau Dokumen Pelelangan/RKS Pengadaan Barang/Jasa
4. PE.PLNE.P.01.04 Prosedur Penyusunan Harga Perhitungan Enjiniring (HPE) Pengadaan Barang/Jasa
5. PE.PLNE.P.01.05 Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa

## 2. Quality Management System Management

*The Quality & Risk Management Unit periodically makes Internal Quality Audit Program Schedules, quality assurance checks with reference to Standards, quality guidelines, engineering procedures and other references including government regulations or regulations. Other quality inspections are product quality checks (quality control) related to Management Technical Inspections regulated in the applicable Engineering Procedures. In principle, the quality management system hierarchy consists of:*

*Level 1 (one) is the Integrated Management System Policies and Guidelines;*

*Level 2 (two) is the PLN Enjiniring Procedure (PE PLNE);*

*Level 3 (three) is the PLN Enjiniring Technical Guidelines (PTE);*

*Level 4 (four) is a Form and Logsheet arranged in each Field according to their needs.*

*In 2022, several Engineering Procedures have been reviewed and revised for process improvement and drafted new procedures for the implementation of the Integrated Management System. The total number of Engineering Procedures (PE) is 100 documents and the Engineering Technical Guidelines (PTE) are 39 documents. The Engineering Procedures that have been established, among others:*

1. PE.PLNE.P.01.01 Engineering Project Cycle Procedure
2. PE.PLNE.P.01.02 Risk Management and Monitoring Procedures KRI
3. PE.PLNE.P.01.03 Procedure for Preparation of Prequalification Documents and/or Auction Documents/RKS Procurement of Goods/Services
4. PE.PLNE.P.01.04 Procedure for Preparing Engineering Calculation Prices (HPE) for Procurement of Goods/Services
5. PE.PLNE.P.01.05 Procedure for Preparing Self-Estimated Prices (HPS) for Procurement of Goods/Services



6. PE.PLNE.P.01.06	Prosedur Tinjauan Dokumen Lelang/RKS dan HPE Pengadaan Barang/Jasa	6. PE.PLNE.P.01.06	Document Review Procedure for Auction/RKS and HPE Procurement of Goods/ Services
7. PE.PLNE.P.01.07	Prosedur Analisa Dampak Usaha	7. PE.PLNE.P.01.07	Business Impact Analysis Procedure
8. PE.PLNE.P.01.08	Prosedur Perencanaan Pengadaan	8. PE.PLNE.P.01.08	Procurement Planning Procedure
9. PE.PLNE.D.01.01	Prosedur Penyusunan, Pengendalian & Penggunaan Dokumen SMT	9. PE.PLNE.D.01.01	Procedure for Drafting, Controlling & Using SMT Documents
10. PE.PLNE.D.01.02	Prosedur Pengendalian Dokumen Non Proyek	10. PE.PLNE.D.01.02	Non-Project Document Control Procedure
11. PE.PLNE.D.01.03	Prosedur Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	11. PE.PLNE.D.01.03	Procedure for Evaluation of Goods/Services Procurement Offer Documents
12. PE.PLNE.D.01.04	Prosedur Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa	12. PE.PLNE.D.01.04	Procedure for Clarification and Negotiation of Goods/Services Procurement Offer Documents
13. PE.PLNE.D.01.05	Prosedur Laporan Pengadaan dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa	13. PE.PLNE.D.01.05	Procurement Report Procedure and Announcement of Goods/ Services Procurement Winners
14. PE.PLNE.D.01.06	Prosedur Pengadaan di Bidang	14. PE.PLNE.D.01.06	Procurement Procedures in the Field
15. PE.PLNE.D.01.07	Prosedur Komunikasi	15. PE.PLNE.D.01.07	Communication Procedure
16. PE.PLNE.D.01.09	Prosedur Penanganan Gangguan	16. PE.PLNE.D.01.09	Interference Management Procedures
17. PE.PLNE.C.01.01	Prosedur Audit Internal SMT	17. PE.PLNE.C.01.01	SMT Internal Audit Procedure
18. PE.PLNE.C.01.02	Prosedur Pemastian Mutu (QA) Produk Enjiniring	18. PE.PLNE.C.01.02	Product Engineering Quality Assurance (QA) Procedure
19. PE.PLNE.C.01.03	Prosedur Evaluasi Unjuk Kerja Sub Konsultan	19. PE.PLNE.C.01.03	Sub Consultant Performance Evaluation Procedure
20. PE.PLNE.A.01.01	Prosedur Rapat Direksi Pengambilan Keputusan	20. PE.PLNE.A.01.01	Board Meeting Procedure Decision Making
21. PE.PLNE.A.01.02	Prosedur Kebijakan Kompensasi Mutu Produk	21. PE.PLNE.A.01.02	Product Quality Compensation Policy Procedure
22. PE.PLNE.A.01.03	Prosedur Pemulihan	22. PE.PLNE.A.01.03	Recovery Procedure
23. PE.PLNE.P.02.01	Prosedur Penyusunan IT Master Plan	23. PE.PLNE.P.02.01	IT Master Plan Preparation Procedure
24. PE.PLNE.P.02.02	Prosedur Penyusunan Anggaran TI	24. PE.PLNE.P.02.02	IT Budgeting Procedure
25. PE.PLNE.P.02.03	Prosedur Pengelolaan Website dan Portal	25. PE.PLNE.P.02.03	Website and Portal Management Procedures
26. PE.PLNE.P.02.04	Prosedur Pengelolaan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT PLN Enjiniring	26. PE.PLNE.P.02.04	Management Procedures for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PT PLN Enjiniring
27. PE.PLNE.P.02.05	Prosedur Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	27. PE.PLNE.P.02.05	Performance Preparation, Monitoring and Evaluation Procedures



28. PE.PLNE.D.02.01	Prosedur Asistensi Hukum	28. PE.PLNE.D.02.01	Legal Assistance Procedure
29. PE.PLNE.D.02.02	Prosedur Kajian Hukum	29. PE.PLNE.D.02.02	Legal Review Procedure
30. PE.PLNE.D.02.03	Prosedur Penyelesaian Sengketa Litigasi	30. PE.PLNE.D.02.03	Litigation Dispute Resolution Procedure
31. PE.PLNE.D.02.04	Prosedur Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi	31. PE.PLNE.D.02.04	Non-Litigation Dispute Resolution Procedure
32. PE.PLNE.D.02.05	Prosedur Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring	32. PE.PLNE.D.02.05	Procedure for Using Engineering Device Applications
33. PE.PLNE.D.02.06	Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna	33. PE.PLNE.D.02.06	User Account Management Procedure
34. PE.PLNE.D.02.07	Prosedur Penyusunan Analisa Dampak Perubahan Perundang-Undangan Terbaru Yang Terkait Dengan Proses Bisnis PLN Enjiniring	34. PE.PLNE.D.02.07	Procedure for Preparing Impact Analysis of Recent Laws and Regulations Related to PLN Enjiniring Business Process
35. PE.PLNE.D.02.08	Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	35. PE.PLNE.D.02.08	Training Procedure for the Use of Information System Applications
36. PE.PLNE.D.02.09	Prosedur Penyusunan Laporan Manajemen	36. PE.PLNE.D.02.09	Management Report Preparation Procedure
37. PE.PLNE.D.02.10	Prosedur Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik	37. PE.PLNE.D.02.10	Procedures for Management and Submission of Public Information
38. PE.PLNE.D.02.11	Prosedur Pengelolaan Helpdesk dan Penanganan Insiden TI	38. PE.PLNE.D.02.11	Helpdesk Management and IT Incident Management Procedures
39. PE.PLNE.D.02.12	Prosedur Pelaksanaan Program CSR	39. PE.PLNE.D.02.12	CSR Program Implementation Procedure
40. PE.PLNE.C.02.01	Prosedur Review Perjanjian	40. PE.PLNE.C.02.01	Agreement Review Procedure
41. PE.PLNE.A.02.02	Prosedur Pengembangan Aplikasi	41. PE.PLNE.A.02.02	Application Development Procedure
42. PE.PLNE.P.03.01	Prosedur Penyusunan Program Kerja Bidang/Satuan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	42. PE.PLNE.P.03.01	Procedure for Preparation of Field / Unit Work Programs in the Company's Work Plan and Budget (RKAP)
43. PE.PLNE.D.03.01	Prosedur Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	43. PE.PLNE.D.03.01	Customer Satisfaction Survey Implementation Procedure
44. PE.PLNE.A.03.01	Prosedur Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan	44. PE.PLNE.A.03.01	Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations
45. PE.PLNE.P.04.01	Prosedur Ketentuan Penomoran dan Penyusunan Register Proyek	45. PE.PLNE.P.04.01	Procedure for Numbering and Drafting Project Registers
46. PE.PLNE.P.04.02	Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Proyek	46. PE.PLNE.P.04.02	Project Activity Plan Preparation Procedure
47. PE.PLNE.P.04.03	Prosedur Tinjauan Peluang dan Risiko Penugasan Proyek	47. PE.PLNE.P.04.03	Project Assignment Opportunity and Risk Review Procedure
48. PE.PLNE.D.04.01	Prosedur Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga	48. PE.PLNE.D.04.01	Technical Administration and Price Bid Document Preparation Procedure
49. PE.PLNE.A.04.01	Prosedur Pembatalan Surat Penugasan	49. PE.PLNE.A.04.01	Procedure for Cancellation of Letter of Assignment



50. PE.PLNE.P.05.01	Prosedur Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Tim Proyek	50. PE.PLNE.P.05.01	Project Team Formation, Change and Dissolution Procedure
51. PE.PLNE.P.05.02	Prosedur Penyusunan DPD/DPDR/DPSK	51. PE.PLNE.P.05.02	DPD/DPDR/DPSK Preparation Procedure
52. PE.PLNE.P.05.03	Prosedur Penyusunan Rencana Mutu Proyek (RMP)	52. PE.PLNE.P.05.03	Project Quality Plan (RMP) Preparation Procedure
53. PE.PLNE.P.05.04	Prosedur Penomoran Dokumen/Gambar Proyek	53. PE.PLNE.P.05.04	Project Document/Image Numbering Procedure
54. PE.PLNE.P.05.05	Prosedur Penyusunan, Perubahan, dan Penutupan Rencana Biaya Produksi	54. PE.PLNE.P.05.05	Procedure for Preparation, Change, and Closing of Production Cost Plan
55. PE.PLNE.D.05.01	Prosedur Monitoring Kemajuan Proyek	55. PE.PLNE.D.05.01	Project Progress Monitoring Procedure
56. PE.PLNE.D.05.02	Prosedur Penyusunan Dokumen Feasibility Study	56. PE.PLNE.D.05.02	Feasibility Study Document Preparation Procedure
57. PE.PLNE.D.05.05	Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang (Bidding Document)/ Rencana Kerja dan Syarat	57. PE.PLNE.D.05.05	Procedure for Preparing Auction Document (Bidding Document) / Work Plan and Terms
58. PE.PLNE.D.05.06	Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir	58. PE.PLNE.D.05.06	Engineer Estimate Pricing Procedure
59. PE.PLNE.D.05.07	Prosedur Pendampingan Pengadaan	59. PE.PLNE.D.05.07	Procurement Assistance Procedure
60. PE.PLNE.D.05.08	Prosedur Design Review	60. PE.PLNE.D.05.08	Design Review Procedure
61. PE.PLNE.D.05.09	Prosedur Pembuatan Detailed Design	61. PE.PLNE.D.05.09	Detailed Design Procedure
62. PE.PLNE.D.05.10	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi	62. PE.PLNE.D.05.10	Construction Supervision Implementation Procedure
63. PE.PLNE.D.05.11	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi (Consultant Leading)	63. PE.PLNE.D.05.11	Construction Supervision Implementation Procedure (Consultant Leading)
64. PE.PLNE.D.05.12	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Masa Pemeliharaan	64. PE.PLNE.D.05.12	Procedure for Implementation of Maintenance Period Supervision
65. PE.PLNE.D.05.13	Prosedur Pengendalian Dokumen Proyek	65. PE.PLNE.D.05.13	Project Document Control Procedure
66. PE.PLNE.D.05.14	Prosedur Penyelesaian Dokumen dan BAPP	66. PE.PLNE.D.05.14	Document Completion Procedure and BAPP
67. PE.PLNE.D.05.15	Prosedur Penutupan Proyek	67. PE.PLNE.D.05.15	Project Closing Procedure
68. PE.PLNE.D.05.16	Prosedur Pengendalian Dokumen Perangkat Enjiniring	68. PE.PLNE.D.05.16	Engineering Device Document Control Procedure
69. PE.PLNE.D.05.17	Prosedur Rekrutmen Karyawan PKWT Di Direktorat Enjiniring	69. PE.PLNE.D.05.17	PKWT Employee Recruitment Procedure at the Directorate of Engineering
70. PE.PLNE.D.05.18	Prosedur Layanan Jasa Enjiniring dari Internal PLN Enjiniring	70. PE.PLNE.D.05.18	Engineering Service Procedure from Internal PLN Enjiniring
71. PE.PLNE.D.05.19	Prosedur Penerimaan Gambar Supervisi Konstruksi	71. PE.PLNE.D.05.19	Construction Supervision Drawing Acceptance Procedure



72. PE.PLNE.D.05.20	Prosedur	Pelaksanaan Mobilisasi dan Demobilisasi Personil	72. PE.PLNE.D.05.20	Procedures for Mobilization and Demobilization of Personnel
73. PE.PLNE.D.05.21	Prosedur	Pelaksanaan Temporary Leave	73. PE.PLNE.D.05.21	Procedure for Implementing Temporary Leave
74. PE.PLNE.D.05.22	Prosedur	Pembayaran Subkonsultan di Direktorat Enjiniring	74. PE.PLNE.D.05.22	Payment Procedure Sub consultant in Directorate of Engineering
75. PE.PLNE.C.05.01	Prosedur	Pengawasan Waktu Kerja	75. PE.PLNE.C.05.01	Working Time Supervision Procedure
76. PE.PLNE.C.05.02	Prosedur	Pemeriksaan Teknis	76. PE.PLNE.C.05.02	Technical Inspection Procedure
77. PE.PLNE.C.05.03	Prosedur	Pengendalian Mutu Produk Enjiniring	77. PE.PLNE.C.05.03	Engineering Product Quality Control Procedure
78. PE.PLNE.C.05.04	Prosedur	Persetujuan Progres Pekerjaan Kontraktor	78. PE.PLNE.C.05.04	Contractor Work Progress Approval Procedure
79. PE.PLNE.A.05.01	Prosedur	Permohonan Pelayanan Enjiniring	79. PE.PLNE.A.05.01	Engineering Service Application Procedure
80. PE.PLNE.A.05.02	Prosedur	Perubahan Desain Proyek di Lapangan	80. PE.PLNE.A.05.02	Project Design Change Procedure in the Field
81. PE.PLNE.A.05.03	Prosedur	Penyusunan Dokumen Amandemen Kontrak dengan Pemberi Kerja	81. PE.PLNE.A.05.03	Procedure for Drafting Contract Amendment Documents with Employer
82. PE.PLNE.A.05.04	Prosedur	Laporan Umpan Balik Pengalaman Pelaksanaan Kontrak	82. PE.PLNE.A.05.04	Contract Performance Experience Feedback Report Procedure
83. PE.PLNE.A.05.05	Prosedur	Pengendalian Ketidaksesuaian Produk dan Tindakan Korektif	83. PE.PLNE.A.05.05	Product Nonconformity Control Procedures and Corrective Actions
84. PE.PLNE.D.06.01	Prosedur	Penagihan Jasa Pre-Treatment dan CNG Bangkanai	84. PE.PLNE.D.06.01	Billing Procedure for Pre-Treatment and CNG Bangkanai Services
85. PE.PLNE.D.06.02	Prosedur	Pelaksanaan Penagihan Invoice	85. PE.PLNE.D.06.02	Invoice Billing Procedure
86. PE.PLNE.C.06.01	Prosedur	Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk Monitoring Pendapatan PLN Enjiniring	86. PE.PLNE.C.06.01	Integrated Information System (SIT) Procedure for PLN Enjiniring Revenue Monitoring
87. PE.PLNE.C.07.01	Prosedur	Rekonsiliasi Proyek	87. PE.PLNE.C.07.01	Project Reconciliation Procedure
88. PE.PLNE.C.07.02	Prosedur	Inventarisasi Aset Tetap	88. PE.PLNE.C.07.02	Fixed Asset Inventory Procedure
89. PE.PLNE.D.07.01	Prosedur	Penyusunan Laporan Keuangan	89. PE.PLNE.D.07.01	Financial Statement Preparation Procedure
90. PE.PLNE.D.07.02	Prosedur	Penyusunan Perhitungan PSAK 72	90. PE.PLNE.D.07.02	PSAK 72 Calculation Preparation Procedure
91. PE.PLNE.P.08.01	Prosedur	Pelaksanaan Formal Learning ITN dan TNA	91. PE.PLNE.P.08.01	ITN and TNA Formal Learning Implementation Procedures
92. PE.PLNE.D.08.01	Prosedur	Rekrutmen Karyawan PKWT	92. PE.PLNE.D.08.01	PKWT Employee Recruitment Procedure



- 93. PE.PLNE.D.08.02 Prosedur Pengajuan ATK, Peralatan Kantor, Komputer, dan Peripheral
- 94. PE.PLNE.D.08.03 Prosedur Penggunaan kendaraan Operasional
- 95. PE.PLNE.D.08.04 Prosedur Pemusnahan Arsip Dokumen
- 96. PE.PLNE.D.08.05 Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 97. PE.PLNE.D.08.06 Prosedur Pelaksanaan Fit and Proper Test Jabatan Struktural
- 98. PE.PLNE.D.08.07 Prosedur Monitoring Biaya Administrasi Umum
- 99. PE.PLNE.D.10.01 Prosedur Operasi CNG Plant Bangkanai
- 100. PE.PLNE.D.10.02 Prosedur Pemeliharaan CNG Plant Bangkanai

- 93. PE.PLNE.D.08.02 *Application Procedure for ATK, Office Equipment, Computers, and Peripherals*
- 94. PE.PLNE.D.08.03 *Operational vehicle usage procedure*
- 95. PE.PLNE.D.08.04 *Document Archive Destruction Procedure*
- 96. PE.PLNE.D.08.05 *Facilities and Infrastructure Maintenance Procedures*
- 97. PE.PLNE.D.08.06 *Procedure for Implementing Fit and Proper Test for Structural Positions*
- 98. PE.PLNE.D.08.07 *General Administration Cost Monitoring Procedure*
- 99. PE.PLNE.D.10.01 *CNG Plant Bangkanai Operation Procedure*
- 100. PE.PLNE.D.10.02 *Bangkanai CNG Plant Maintenance Procedure*

### 3. Peningkatan Kualitas Produk Enjiniring

Dalam Rangka peningkatan kualitas produk Enjiniring maka pada tahun 2022 PLN Enjiniring mengupayakan penyempurnaan Perangkat Enjiniring meliputi:

Review dan penyempurnaan SMM ISO 9001, Prosedur Enjiniring dan Petunjuk Teknis Enjiniring, termasuk Prosedur dan Petunjuk Teknis di Bidang Supervisi Konstruksi dan Pembangkit.

### 4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sesuai Standar ISO 9001:2015, Audit Mutu Internal dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem mutu dan dituangkan dalam PE.PLNE.C.01.01 Prosedur Audit Mutu Internal sebelum dilakukan Audit pihak Eksternal. Pada tahun 2022 audit internal dilakukan pada bulan Juni hingga Juli yaitu dimulai dari pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 dan diakhiri dengan penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 Serta dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen tertanggal 03 Agustus 2022.

### 3. Improving the Quality of Engineering Products

*In order to improve the quality of engineering products, in 2022 PLN Enjiniring seeks to improve Engineering Devices including:*

*Review and improvement of ISO 9001 QMS, Engineering Procedures and Engineering Technical Instructions, including Technical Procedures and Guidelines in the Field of Construction and Power Plant Supervision.*

### 4. Implementation of Internal Quality Audit

*In accordance with ISO 9001:2015 Standard, Internal Quality Audit is carried out periodically to measure the effectiveness of the quality system and is outlined in PE. PLNE. C.01.01 Internal Quality Audit Procedure prior to External Party Audit. In 2022, internal audits were carried out from June to July, starting from the opening held on June 6th, 2022 and ending with the closing which was held on July 16th, 2022 and reported in the Management Review Meeting dated August 3rd, 2022.*



## 5. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)

Telah dilaksanakan Audit Eksternal antara lain:

- a. Audit *surveillance*-2 SMM ISO 9001:2015 pada tanggal 12 s.d. 14 September 2022 oleh Lembaga Sertifikasi LMK (PLN PUSERTIF) dengan lingkup Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan.
- b. Audit *surveillance*-1 SMAP ISO 37001:2016 pada tanggal 14 Februari 2022 oleh lembaga sertifikasi PT Chesna dengan lingkup proses pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan.
- c. Audit Resertifikasi SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 Gedung Menara Enjiniring oleh Lembaga Sertifikasi LMK (PLN PUSERTIF) pada tanggal 25 – 27 April 2022.

## 5. Implementation of ISO 9001:2015 Certification (External Audit)

*External Audit has been carried out, among others:*

- a. *Surveillance audit-2 QMS ISO 9001:2015 on September 12th to 14th 2022 by LMK Certification Body (PLN PUSERTIF) with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electrical Installation Construction.*
- b. *Surveillance audit-1 SMAP ISO 37001:2016 on February 14th, 2022 by PT Chesna certification body with the scope of the procurement process of goods/services within the company.*
- c. *Audit of Recertification of SMK3 PP No. 50 of 2012 Menara Enjiniring Building by LMK Certification Body (PLN Pusertif) on April 25th – 27th, 2022.*



## Sistem Manajemen K3

### HEALTH AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja/karyawan;
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

SMK3 menjadi salah satu fokus utama korporat dalam implementasi SMK3 di PT PLN Enjiniring. PT PLN Enjiniring menerapkan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja baik di PT PLN Enjiniring Kantor Pusat maupun di CNG Plant Bangkanai. Program kerja SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:

- *Man*, menyiapkan personil dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi dan pelatihan;
- *Machine*, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir, hydrant, alarm, dll;
- *Method*, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi kerja, formulir dll;
- *Management*; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta membuat sistem pendukung implementasi K3;

*SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace.*

*The implementation of Health and Safety System to aims:*

- *Increasing the effectiveness of planned, measured, structured and integrated health and safety system;*
- *Prevent and reduce accidents and diseases in the working place by involving management and workers / employees as the elements;*
- *Creating a safe, comfortable and efficient workplace to boost productivity.*

*Health and safety system management is one of the company main focus. PT. PLN Enjiniring implemented their health and safety system management to prevent accident and Diseases arising because of the work weather in PT PLN Enjiniring head quarter or in CNG Plant Bangkanai. The Health and safety system management work program is structured through five elements, namely:*

- *Man, preparing the personnel and support team to implementing the health ad safety system management including certification and training;*
- *Machine, prepare and install supporting installations of occupational health and safety management systems such as lightning rods, hydrant, alarm, etc;*
- *Method, drafting and repairing health and safety managemnet system documents such as guidelines, procedures, working instructions, forms, etc;*
- *Management; implementing the health and safety management system in company's management by maintaining the health and safety management system documents, conducting HIRARC, health checks and creating support system in impementaion of the health and safety management system;*



- *Money*, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan penerapan SMK3.

- *Money*, prepare a budget to support the fulfillment of the implementation of health and safety management system.

Berikut pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Tahun 2021:

Following is the implementation of 2021 Health and safety management system :

- Pelaksanaan simulasi Tanggap Darurat kebakaran
- Pelaksanaan Audit Internal SMK3 untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SMK3 dengan Nilai 90,96%
- Pelaksanaan sertifikasi disnaker Ahli K3 Umum (AK3U) dan Ahli K3 Listrik (AK3L)
- Pelaksanaan Rapat P2K3 dan Sosialisasi Pencegahan COVID-19
- Pelaksanaan MCU (*Medical Check Up*) pada pegawai dengan kategori umur 45 tahun ke atas

- *Emergencies response training.*
- *Internal audit of the Health and Safety Management System to measure the compliance of Health and Safety Management System with 90,96% on score.*
- *Implementation of the Ministry of Manpower certification for General K3 Expert (AK3U) and Electrical K3 Expert (AK3L)*
- *Implementation of P2K3 Meetings and COVID-19 Prevention Socialization*
- *Medical Check Up for the employee above 45 years old.*

Sasaran kegiatan K3 pada tahun 2021 telah tercapai dengan hasil kecelakaan kerja nihil

*The target of Health and Safety activities in 2021 has been achieved with zero work accidents.*



## Sistem Teknologi Informasi *Information Technology System*

Sejalan dengan visinya untuk menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se-Asia Tenggara dan Pilihan Nomor Satu Pelanggan, PLN Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring senantiasa mengikuti perkembangan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam aktivitas perusahaan.

Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh Sub-bidang Teknologi Informasi (TIF) yang dikelola di bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TIF PLNE :

*In line with its vision to become the Leading Integrated Engineering Consulting Company in Southeast Asia and the Number One Choice of Customers, PLN Enjiniring continues to improve to grow and develop in meeting stakeholder expectations. In the midst of an increasingly complex world development, PLN Enjiniring always keeps up with the times, one of which is by using Information Technology (IT) as an information dissemination tool as well as a control system in company activities.*

*At PLN Enjiniring, the application of Information Technology is carried out by the Information Technology Sub-sector (TIF) which is managed under the Corporate Secretary. The following are some of the main activities in the PLNE TIF sector:*

### KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 01.004 . K/DIR/PLNE/XI/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring menyebutkan bahwa, tugas pokok Bidang Teknologi Informasi (TIF) pada Sekretariat Perusahaan antara lain:

- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kebijakan penyalarsan antara pengembangan Teknologi Informasi terhadap proses bisnis Perusahaan;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi dalam implementasi layanan teknologi dan system informasi Perusahaan sesuai dengan tata kelola teknologi informasi Perusahaan;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi dalam mengelola operasional pelayanan infrastruktur dan keamanan sistem informasi Perusahaan yang menjamin ketersediaan, keamanan, keandalan dan keakuratan layanan teknologi informasi;
- Merencanakan, melaksanakan dan evaluasi pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan BPO (*Business Process Owner*) yang telah diajukan;
- Mendukung operasi dan pemeliharaan aplikasi secara periodik;

### INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

*Based on the Decree of the Board of Directors No. 01.004 . K/DIR/PLNE/XI/2021 regarding the Organizational Structure and Main Duties of PT PLN Enjiniring stated that the main tasks of the Information Technology Sector (TIF) at the Corporate Secretariat include:*

- *Planning, implementing and evaluating policy of alignment between Information Technology development and the Company's business processes;*
- *Planning, implementing and evaluating the implementation of the Company's information technology and system services in accordance with the Company's information technology governance;*
- *Planning, implementing and evaluating the operational management of the Company's information system infrastructure and security services that ensure the availability, security, reliability and accuracy of information technology services;*
- *Planning, implementing and evaluating application development according to the proposed BPO (Business Process Owner) requirements;*
- *Support operation and periodic maintenance*



- Mengoperasikan dan mengelola jaringan internet dan intranet di PT PLN Enjiniring;
  - Menyiapkan fasilitas kerja berbasis TI;
  - Menjamin kehandalan dan ketersediaan operasi dan infrastruktur di bidang TI;
  - Menyusun rencana dan melaksanakan untuk pekerjaan Sub Bidang Teknologi Informasi sesuai dengan arahan Sekretaris Perusahaan;
  - Memberikan penilaian tentang kinerja bulanan, semesteran, dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup Sub Bidang Teknologi Informasi;
  - Menyusun rencana dan melaksanakan proses bisnis berbasis risiko, kepatuhan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan termasuk merencanakan dan menindaklanjuti mitigasi risiko terkait program yang menjadi kewenangannya sesuai dengan arahan Sekretaris Perusahaan;
  - Memastikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen sumber daya manusia pada Sub Bidang Teknologi Informasi yang berupa optimasi pengelolaan Formasi Tenaga Kerja (FTK), pengembangan kompetensi Pegawai, dan pelaksanaan kegiatan Knowledge Management (KM);
  - Memastikan penggunaan aplikasi di lingkungan PT PLN Enjiniring, antara lain : *Knowledge Management System (KMS)*, *Dokumen Manajemen (DM)*, *RICO*, *Inteling*, *eRBAS*, *Virtual Cubicle (VC)*, *Sunfish*, *Aplikasi Manajemen Surat (AMS)*, dan *Business One*, secara optimal dan selaras dengan bidang atau fungsinya, dalam rangka pengelolaan data dan Informasi beserta pemutakhirannya, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas.
- *Operate and manage internet and intranet networks at PT PLN Enjiniring;*
  - *Setting up IT-based work facilities;*
  - *Ensure the reliability and availability of operations and infrastructure in the IT sector;*
  - *Prepare plans and carry out for the work of the Information Technology Sub-Sector in accordance with the direction of the Corporate Secretary;*
  - *Provide an assessment of monthly, semi-annual, and annual performance to employees within the Information Technology Sub-Sector;*
  - *Planning and implement risk-based business process, compliance, and the principles of Good Corporate Governance on an ongoing basis including planning and following up on risk mitigation related to programs under their authority in accordance with the direction of the Corporate Secretary;*
  - *Ensure and be responsible for human resource management in the Information Technology Sub-Sector in the form of optimizing the management of Manpower Formation (FTK), developing employee competencies, and implementing Knowledge Management (KM) activities;*
  - *Ensuring the use of applications within PT PLN Enjiniring, including: Knowledge Management System (KMS), Management Documents (DM), RICO, Inteling, eRBAS, Virtual Cubicle (VC), Sunfish, Mail Management Application (AMS), and Business One , optimally and in line with its field or function, in the context of managing data and information and updating it, as well as supporting a quality decision-making process.*

Selain terkait tugas pokok, teknologi informasi juga memiliki kebijakan dan pedoman umum tata kelola teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 dan kebijakan dan pedoman umum keamanan informasi elektronik dan teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.

Sebagai pedoman pengembangan dan aktivitas operasional TI, berikut adalah prosedur-prosedur di bidang TI yang berlaku.

*In addition to the main tasks related to information technology, information technology also has general policies and guidelines for information technology governance as stated in the Decree of the Board of Directors No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 and the general policies and guidelines for electronic information security and information technology contained in the Decree of the Board of Directors No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.*

*As a guideline for IT operational development and activities, the following are the applicable IT procedures.*



- a. PE.PLNE.P.02.01 Prosedur Penyusunan IT Master Plan
- b. PE.PLNE.P.02.02 Prosedur Penyusunan Anggaran TI
- c. PE.PLNE.D.02.05 Prosedur Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring
- d. PE.PLNE.D.02.06 Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna
- e. PE.PLNE.D.02.08 Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
- f. PE.PLNE.D.02.11 Prosedur Bantuan Penggunaan Teknologi Informasi
- g. PE.PLNE.A.02.01 Prosedur Pengelolaan Penanganan Insiden TI
- h. PE.PLNE.A.02.02 Prosedur Pengembangan Dan Pengujian Aplikasi Sistem Informasi

- a. *PE.PLNE.P.02.01 Procedure for Preparation of IT Master Plan*
- b. *PE.PLNE.P.02.02 IT Budgeting Procedure*
- c. *PE.PLNE.D.02.05 Procedure for Use of Engineering Device Applications*
- d. *PE.PLNE.D.02.06 User Account Management Procedure*
- e. *PE.PLNE.D.02.08 Training Procedure for Using Information System Applications*
- f. *PE.PLNE.D.02.11 Procedure for Assistance in Using Information Technology*
- g. *PE.PLNE.A.02.01 IT Incident Management Procedures*
- h. *PE.PLNE.A.02.02 Information System Application Development and Testing Procedure*

## ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan telah disahkannya Keputusan Direksi no. 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring tahun 2020-2023, sepanjang tahun 2022, subbidang Teknologi Informasi melaksanakan inisiatif – inisiatif pekerjaan yang ada pada tahun 2022 sesuai dengan kategori roadmapnya antara lain:

1. Roadmap Optimalisasi Aplikasi
2. Roadmap Pengembangan / Implementasi Aplikasi
3. Roadmap Infrastruktur TI
4. Roadmap Tata Kelola TI

## PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kegiatan subbidang Teknologi Informasi PLN Enjiniring selama tahun 2022 mencakup:

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
2. Pelaksaan IT Master Plan
3. Pengukuran IT Maturity Level
4. Layanan Operasional TI
5. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI
6. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+
7. Manajemen Risiko dan GCG

## INFORMATION TECHNOLOGY ROADMAP

*In line with the ratification of the Decree of the Board of Directors no. 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 regarding the Information Technology Master Plan (IT Master Plan) of PT PLN Enjiniring for 2020-2023, throughout 2022, the Information Technology sub-sector will carry out existing work initiatives in 2022 according to the roadmap category among others:*

1. *Application Optimization Roadmap*
2. *Application Development/Implementation Roadmap*
3. *IT Infrastructure Roadmap*
4. *IT Governance Roadmap*

## INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

*PLN Enjiniring Information Technology sub-sector activities during 2022 include:*

1. *Information Technology System Development*
2. *Implementation of IT Master Plan*
3. *Measurement of IT Maturity Level*
4. *IT Operational Services*
5. *Completion of Recommendations in LHA SPI*
6. *Synergy of PLN's Subsidiaries with PT ICON+*
7. *Risk Management and GCG*



## 1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Adapun pengembangan system teknologi informasi selama tahun 2022 sebagai berikut.

## 1. Development of Information Technology Systems

The development of information technology systems during 2022 is as follows.

TABEL PENGEMBANGAN SISTEM TI TAHUN 2022

No.	Nama <i>Name</i>	Fungsi <i>Function</i>	Status terakhir 2022 <i>Last Status in 2022</i>
1	Aplikasi Compliance Online System (COS) <i>Compliance Online System (COS) Application</i>	Aplikasi yang berfungsi untuk Pengelolaan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan <i>Applications that work for Gratification and Works good Conflict of Interest Management</i>	Berfungsi dengan baik
2	Aplikasi AMS Korporat <i>AMS Korporat Application</i>	Aplikasi yang berfungsi untuk mengelola Tata Naskah Dinas dan Kearsipan (TNDK) dengan tanda tangan elektronik berbasis QR Code <i>An application that functions to manage Service and Archives Manuscripts (TNDK) with QR Code-based electronic signatures</i>	Berfungsi dengan baik
3	Konsolidasi Data Kepegawaian PLN group <i>Consolidation of PLN group Personnel Data</i>	Konsep / Sistem untuk mengintegrasikan data kepegawaian diseluruh PLN Group menjadi 1 (satu) sistem konsolidasi <i>Concept / System to integrate personnel data throughout PLN Group into 1 (one) consolidation system</i>	Sudah dilakukan proses migrasi data awal

## 2. Pelaksanaan IT Master Plan

Selaras dengan Keputusan Direksi Nomor 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring Tahun 2020 – 2023, pelaksanaan IT Master Plan pada tahun 2022 tercapai 100% diantaranya terkait dengan:

- Optimalisasi Aplikasi RICO
- Pengembangan Dashboard Keuangan
- Optimalisasi Aplikasi COS
- Optimalisasi Aplikasi DLP
- Optimalisasi Aplikasi Virtual Cubicle
- Implementasi Perangkat Security

## 2. Implementation of IT Master Plan

In line with the Decree of the Board of Directors Number 30.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Information Technology Master Plan (IT Master Plan) of PT PLN Enjiniring for 2020 – 2023, the implementation of the IT Master Plan in 2022 has been achieved 100% of which is related to:

- RICO Application Optimization
- Financial Dashboard Development
- COS Application Optimization
- DLP Application Optimization
- Virtual Cubicle Application Optimization
- Security Device Implementation



### 3. Pengukuran IT Maturity Level

RUPS RKAP PLN Enjiniring tahun 2022 memutuskan bahwa pengukuran IT Maturity Level tetap dilaksanakan. Pengukuran IT Maturity Level bersumber PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/ 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. Tujuan dari Pengukuran IT Maturity Level adalah untuk meningkatkan tata Kelola TI di perusahaan sehingga TI dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian dan peningkatan kinerja perusahaan.

Pada November 2022, dilakukan *independent assessment* oleh PT Mitratex Konsultan dengan hasil skor IT Maturity Level sebesar 3.09 dari target 3.00 sehingga kinerja IT Maturity Level Semester 1 tahun 2022 tercapai 103.00%.

### 4. Layanan Operasional TI

Subbidang TI melaksanakan dukungan operasi TI kepada pengguna yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakati. Adapun bentuk Dukungan operasi TI antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan backup, pengecekan kondisi Perangkat Enjiniring, pengecekan masa berlaku lisensi layanan TI dan pemeliharaan/optimalisasi penggunaan lisensi,
- Penyediaan jaringan internet maupun intranet,
- Memastikan *availability* layanan Teknologi Informasi,
- layanan Helpdesk dan Penanganan Insiden TI.

### 5. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Tata Kelola TI yang baik, Subbidang TI telah di audit oleh SPI PT PLN (Persero) grup khusus TI. Sampai dengan bulan Desember, telah selesai dengan tepat waktu sebanyak **12 rekomendasi dari 12 rekomendasi**.

### 3. Measurement of IT Maturity Level

*The 2022 GMS of PLN Enjiniring decided that the IT Maturity Level measurement would still be carried out. IT Maturity Level measurement sourced from Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 02/2018 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-02 / MBU / 2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management of State-Owned Enterprises. The purpose of IT Maturity Level Measurement is to improve IT Governance in the company so that IT can have a more significant impact on the achievement and improvement of company performance.*

*In November 2022, an independent assessment was carried out by PT Mitratex Konsultan with the results of an IT Maturity Level score of 3.09 from the target of 3.00 so that the performance of IT Maturity Level Semester 1 of 2022 reached 103.00%.*

### 4. IT Operational Services

*The IT sub-sector carries out IT operation support to users which in its implementation is based on the agreed SLA (Service Level Agreement). The forms of IT operations support include:*

- *Implementation of maintenance activities which include backup activities, checking the condition of Engineering Devices, checking the validity period of IT service licenses and maintenance/ optimization of license use,*
- *Provision of internet and intranet networks,*
- *Ensure the availability of Information Technology services,*
- *Helpdesk services and IT Incident Handling.*

### 5. Completion of Recommendations in LHA SPI

*In order to implement Good Corporate Governance and Good IT Governance, the IT Subfield has been audited by SPI PT PLN (Persero) IT special group. As of December, **12 recommendations out of 12 recommendations** have been completed on time.*



## 6. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+

Sinergi antar anak perusahaan PT PLN (Persero) dari sub-bidang teknologi informasi adalah bersinergi dengan PT Indonesia Comnet+ dalam pengembangan aplikasi Virtual Cubicle dan penyediaan infrastruktur khususnya cloud dan layanan internet.

## 7. Manajemen Risiko dan GCG

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, subbidang TI secara rutin bulanan melaporkan mitigasi risiko ke aplikasi RICO dan penyediaan eviden untuk kebutuhan *Risk Maturity*. Selain itu, TI juga turut berkontribusi di dalam penyediaan eviden untuk penilaian GCG.

## 6. Synergy of PLN's Subsidiaries with PT ICON+

*Synergy between subsidiaries of PT PLN (Persero) from the information technology sub-field is synergizing with PT Indonesia Comnet+ in developing Virtual Cubicle applications and providing infrastructure, especially cloud and internet services.*

## 7. Risk Management and GCG

*In the context of implementing Good Corporate Governance, the IT sub-sector regularly reports on risk mitigation to the RICO application and provides evidence for Risk Maturity needs. In addition, IT also contributes in providing evidence for GCG assessment.*



## Perkara Hukum yang Dihadapi PLN Enjiniring

### Legal Cases Faced by PLN Enjiniring

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan Anak Perusahaan:

**a. Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan**

Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

**b. Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak**

Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan.

**c. Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi**

Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

*The following information is about some legal cases currently faced by the Company and its subsidiaries:*

**a. Legal Cases Faced By The Company**

*There were no legal cases faced by the Company during 2022.*

**b. Legal Cases Faced by The Subsidiaries**

*There were no legal cases faced by the Subsidiaries during 2022.*

**c. Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Directors**

*There were no legal cases involving members of the Company's Board of Commissioners and Directors during 2022.*



## PEDOMAN PERILAKU

### CODE OF CONDUCT

#### TUJUAN CODE OF CONDUCT

1. Merupakan petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi Jajaran perseroan yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
2. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku etis dari Jajaran Perseroan serta meningkatkan kepekaan Perseroan dan jajaran Perseroan terhadap nilai-nilai etika bisnis.

#### PURPOSE OF THE CODE OF CONDUCT

1. It is a practical guide and a code of conduct for the Company's staff that must be obeyed in daily interactions with all parties and must be used as a basis for thinking in the decision-making process;
2. Creating and maintaining a positive work environment that supports the ethical behavior of the Company's staff and increases the sensitivity of the Company and the Company's ranks to the values of business ethics.

#### TANGGUNG JAWAB PENERAPAN DAN PENGAWASAN CODE OF CONDUCT

1. Direksi menetapkan *key success factors* implementasi *Code of Conduct* yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta menerapkan pengawasan melekat serta mekanisme pengendalian yang efektif;
2. Direksi memastikan bahwa *Code of Conduct* telah dipahami dan ditandatangani oleh segenap Jajaran Perseroan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa seluruh Jajaran Perseroan dan pihak yang terkait di luar Perseroan patuh terhadap *Code of Conduct*, termasuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul;
4. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan *Code of Conduct* Perseroan.

#### RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTING AND OVERSEEING THE CODE OF CONDUCT

1. The Board of Directors determines the key success factors for implementing an effective, efficient and sustainable Code of Conduct as well as implementing inherent supervision and effective control mechanisms;
2. The Board of Directors ensures that the Code of Conduct has been understood and signed by all levels of the Company;
3. The Board of Commissioners and the Board of Directors ensure that all levels of the Company and related parties outside the Company comply with the Code of Conduct, including resolving any conflicts that arise;
4. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for establishing the Company's Code of Conduct.



## RUANG LINGKUP CODE OF CONDUCT

*Code of Conduct* Perseroan meliputi pengaturan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Kebijakan Etika Perseroan  
Mencakup Etika Bisnis Perseroan yang mengatur hubungan Perseroan dengan para Stakeholder-nya dan Etika Kerja Pegawai;
2. Pelaksanaan Code of Conduct Perseroan  
Mencakup internalisasi, penghargaan dan sanksi, pernyataan komitmen, serta sosialisasi terhadap *Code of Conduct*;
3. Pernyataan Komitmen  
Mencakup pernyataan bahwa seluruh Jajaran Perseroan diwajibkan membaca, memahami dan mematuhi *Code of Conduct* dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perseroan.

## SCOPE OF THE CODE OF CONDUCT

*The Company's Code of Conduct* covers the following aspects:

1. *Company Ethical Policy*  
*Includes the Company's Business Ethics which regulates the Company's relationship with its Stakeholders and Employee's Work Ethics;*
2. *Implementation of the Company's Code of Conduct*  
*Includes internalization, rewards and sanctions, statement of commitment, and socialization of the Code of Conduct;*
3. *Commitment Statement*  
*Includes a statement that all employees of the Company are required to read, understand and comply with the Code of Conduct properly and correctly in an effort to improve and maximize work results for the progress of the Company.*

## ISI CODE OF CONDUCT

*Code of Conduct* mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan PLN Enjiniring.

*Code of Conduct* berisi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kewajiban
- III. Visi dan Misi
- IV. Pedoman Prilaku
- V. Sanksi
- VI. Komitmen

## CODE OF CONDUCTS CONTENT

*The Code of Conduct* regulates ethical values policies, stated explicitly as a standard of behaviour that must be followed by all PLN Enjiniring Personnel.

*The Code of Conduct* contains the following matters:

- I. *Introduction*
- II. *Responsibility*
- III. *Vision and Mission*
- IV. *Code of Conduct*
- V. *Penalty*
- VI. *Comitment*

## KEPATUHAN TERHADAP CODE OF CONDUCT

Pada tahun 2022, upaya implementasi *Code of Conduct* dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

- a. Sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh karyawan/pegawai/alih daya dilingkungan PT PLN Enjiniring.

## CODE OF CONDUCT COMPLIANCED

*In 2022, the efforts to implement the Code of Conduct* were carried out in several ways, including:

- a. *Code of Conducts Socialization to all employees / workers/ outsourcing of PT PLN Enjiniring.*



- b. Melakukan kegiatan *Collective Action* yang bertujuan mengurangi terjadinya praktek suap dan kecurangan dalam proses bisnis PLNE melalui proses internalisasi terhadap karyawan PLNE dan mensosialisasikan terhadap Mitra Kerja.
- c. Melakukan kegiatan *Complaint Handling Management*, PLNE telah melaksanakannya sesuai laporan kepuasan pelanggan dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun.

- b. *Conducting Collective Action activities, aiming to reduce the occurrence of bribery and fraud in PLNE business process through the internalization to PLNE employees and socializing with Business Partners.*
- c. *Carrying out Complaint Handling Management activities, PLNE has implemented it according to customer satisfaction reports where these activities were being carried out regularly every year.*

## JENIS SANKSI PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Pelanggaran terhadap *code of conduct* pada PLN Enjiniring akan dikenakan hukuman disiplin sesuai yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Sanksi yang diberikan terdiri dari hukuman Disiplin Ringan, Disiplin Sedang dan Disiplin Berat.

## TYPES OF PENALTY FOR CODE OF CONDUCT VIOLATION

*Violation against PLN Enjiniring code of conduct will be subject to disciplinary penalties as regulated in the Company's Code of Conduct. The penalty given consist of mild, moderate and heavy discipline.*

**TABLE JENIS PELANGGARAN CODE OF CONDUCT**  
**TYPE OF CODE OF CONDUCT VIOLATION TABLE**

Tingkat Sanksi <i>Sanction Level</i>	Jenis Pelanggaran <i>Types of Violations</i>
Disiplin Ringan <i>Mild Discipline</i>	<p>Tidak mentaati ketentuan jam kerja di Perseroan, termasuk meninggalkan kantor tanpa ijin atasan langsung, kecuali untuk keperluan pekerjaan ;</p> <p><i>Not complying with the provisions of working hours in the Company, including leaving the office without direct supervisor's permission, except for work purposes;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 1 hari kerja;</p> <p><i>Not coming to work without a valid reason for 1 working day;</i></p>
Disiplin Sedang <i>Moderate Discipline</i>	<p>Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin ringan melakukan perbuatan disiplin ringan kembali ;</p> <p><i>If in the light of a disciplinary sentence to lightly commit a mild disciplinary act again;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 2 hari atau lebih secara berturut-turut atau berpencar sampai dengan 4 hari kerja dalam kurun waktu 1 bulan</p> <p><i>Not going to work without valid reasons for 2 days or more in a row or split up to 4 working days in 1 month</i></p> <p>Menyalahgunakan asset milik perseroan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, kecuali dengan seijin Perseroan;</p> <p><i>Misusing the assets of the company for personal and other interests, either with the intention of obtaining profits or not, except with the permission of the Company;</i></p> <p>Menolak melaksanakan tugas pekerjaan atau perintah yang diberikan Perseroan;</p> <p><i>Refusing to carry out work duties or orders given by the Company;</i></p> <p>Menolak melaksanakan mutasi jabatan;</p> <p><i>Refusing to carry out transfer positions;</i></p>



Tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab jabatannya;

*Not carrying out duties which are the responsibility of his position*

Melakukan pelanggaran atas undang-undang dalam lingkup hukum pidana dan atas perbuatan tersebut pegawai divonis hukuman penjara urang 2 (dua) (putusan final);

*Violating the law within the scope of criminal law and for the deed the employee is sentenced to sentence 2 (two) (final decision);*

Melakukan hal-hal yang dapat mencoreng atau menurunkan nama baik Perseroan atau harkat dan martabat pegawai;

*Doing things that can tarnish or ruin the reputation of the Company or the dignity of employees;*

Membuat keonaran atau kegaduhan dalam lingkungan kerja;

*Make disturbance or noise in the work environment;*

Memiliki Perusahaan atau memiliki saham suatu Perusahaan atau bekerja pada suatu Perusahaan lain yang kegiatan usahanya sama dengan Perseroan;

*Owning a company or owning shares of a company or working for another company whose business activities are the same as the Company;*

Meminta, menerima atau menggunakan, fasilitas atau jasa lainnya dari pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;

*Requesting, receiving or using, other facilities or services from any party, which is known or reasonably suspected to be related to their position or job;*

Memberikan atau menjanjikan kepada pihak lain berupa barang, fasilitas atau jasa apapun;

*Providing or promising to other parties in the form of goods, facilities or any services;*

Melakukan serangan secara fisik (kecuali tindakan pembelaan diri) atau mengancam, mengintimidasi kepada sesama pegawai dan atau Direksi;

*Carrying out physical attacks (except self-defense actions) or threaten, intimidate fellow employees and or Directors;*

Ceroboh atau lalai dalam melakukan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan

*Careless or negligent in doing work, resulting in a loss for the Company*

Disiplin Berat  
*Heavy Discipline*

Pegawai apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin sedang, melakukan perbuatan pelanggaran disiplin sedang kembali;

*Employees when undergoing a moderate disciplinary sentence, committing moderate disciplinary offenses once more;*

Mengambil dan memberikan atau membocorkan informasi penting atau dokumen penting Perseroan kepada pihak lain;

*Taking and providing or leaking important information or important documents of the Company to other parties;*

Dengan sengaja merancang atau membuat atau mengarahkan dalam penentuan spesifikasi peralatan sehingga merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan atau Vendor baik materil maupun immateril;

*Deliberately designing or making or directing in determining the specifications of the equipment so that it is detrimental or potentially detrimental to the Company or the Vendor, both material and immaterial;*

Mengerjakan pekerjaan selain untuk kepentingan Perseroan namun menggunakan fasilitas atau inventaris milik Perseroan;



*Doing work other than for the interests of the Company but using facilities or inventory belonging to the Company;*

Mengerjakan atau turut serta atau membantu mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Perusahaan atau pihak lain;

*Doing or participating or helping to do the work that has been given by the Company to the Company or other parties;*

Melakukan perbuatan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan;

*Acting or cooperating with other parties to commit actions that are detrimental to or potentially detrimental to the Company;*

## JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

## NUMBER OF CODE OF CONDUCTS VIOLATIONS

Selama tahun 2022, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.

*There were no code of conduct violations happen in 2022*



## Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

### Gratuity Policy

Dalam kegiatan bisnis PLN Enjiniring, pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan pihak internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Terkait dengan hubungan bisnis sering terjadi praktek yang muncul dan tidak dapat dihindari yaitu adanya penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu PLN Enjiniring perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dan tata acara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PLN Enjiniring. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PLN Enjiniring sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan PLN Enjiniring dalam mewujudkan visi dan misi PLN Enjiniring dengan perilaku yang bermartabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pelanggan atau *stakeholdernya*.

#### • Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Apabila Insan PLN Enjiniring secara langsung mengalami peristiwa gratifikasi baik berupa penerimaan atau penolakan gratifikasi, maka dapat membuat laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PLN Enjiniring melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS) dengan mengakses link <http://cos.plne.co.id> atau dengan cara melakukan konfirmasi kejadian gratifikasi melalui email yang dikirim secara otomatis dari aplikasi COS kepada alamat email masing-masing Insan PLN Enjiniring. Selain itu apabila Insan PLN Enjiniring atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di PLN Enjiniring sebagaimana diatur dalam sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu

*In PLN Enjiniring business activities, in general, it is inseparable from relationships and interactions with internal and external parties who establish harmonious, harmonious and sustainable cooperation by not forgetting the ethics and principles of Good Corporate Governance.*

*Related to business relationships, there are often practices that arise and cannot be avoided, namely the acceptance, giving or request for gifts / souvenirs and entertainment (*entertainment*) from one party to another. Therefore, PLN Enjiniring has regulated matters related to gratification control, both the receipt, giving and request for gifts/souvenirs and entertainment from one party to another as well as the procedures/reporting mechanisms. This is important to be cultivated within PLN Enjiniring as a learning process for PLN Enjiniring personnel in realizing the vision and mission of PLN Enjiniring with dignified behavior and a high image in business relations with customers or stakeholders.*

#### • Gratuity Control Management

*If PLN Enjiniring Personnel directly experience a gratification event in the form of acceptance or rejection of gratification, then they can make a report to the PLN Enjiniring Gratification Control Unit (UPG) through the Compliance Online System (COS) application by accessing the link <http://cos.plne.co.id> or by confirming the gratification event via email which is sent automatically from the COS application to the email address of each PLN Enjiniring Personnel. In addition, if PLN Enjiniring Personnel or third parties are aware of a violation of the provisions contained in the Gratification Control Guidelines, they must immediately report the violation in accordance with the applicable provisions at PLN Enjiniring as stipulated in the Whistleblowing System, namely by telephone, Short Message Service (SMS), and/or Whatsapp to number 08111995177, email*



melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), dan/atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, email ke [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id), dan/atau surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PLN Enjiniring dengan disertai bukti/eviden yang jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. PLN Enjiniring menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

#### • Sosialisasi Gratifikasi

Dalam rangka menjamin bahwa Peraturan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor : 10.002.K/DIR/PLNE/II/2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT PLN Enjiniring ("Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLNE") diketahui oleh seluruh Insan PLN Enjiniring dan pihak ketiga yang berhubungan dengan PLN Enjiniring, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginformasikan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi beserta jenis-jenis gratifikasi sesuai dengan yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring.
2. Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Fungsi Humas di lingkungan PLN Enjiniring untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga/eksternal terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring.
3. Menugaskan Fungsi Pengadaan, Fungsi Pemasaran dan fungsi lain di lingkungan PLN Enjiniring yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan Penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring ini kepada seluruh pihak terkait dengan mata rantai supply di lingkungan PLN Enjiniring (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Kontraktor, Sub-Kontraktor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya).
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan terkait gratifikasi yang berlaku.

to [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id), and/or a letter addressed to the President Director of PLN Enjiniring accompanied by clear, detailed and accountable evidence/evidence. PLN Enjiniring guarantees that the reporting process carried out by PLN Enjiniring Personnel and third parties will be kept confidential.

#### • Gratification Socialization

In order to ensure that the Regulation of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring Number: 10.002.K/DIR/PLNE/II/2022 concerning Guidelines for Gratification Control at PT PLN Enjiniring ("PLNE Gratification Control Guidelines") is known to all PLN Enjiniring personnel and third parties related to PLN Enjiniring, the following has been done:

1. Informing the provisions on the prohibition of receiving gratuities along with the types of gratuities in accordance with those stipulated in the PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines.
2. Assign the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and Public Relations Function within PLN Enjiniring to continuously provide information to all PLN Enjiniring personnel and third / external parties related to the existence of PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines.
3. Assign Procurement Functions, Marketing Functions and other functions within PLN Enjiniring that have working relationships with third parties to carry out the Submission of PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines to all parties related to the supply chain within PLN Enjiniring (Goods/Services Providers, Agents, Distributors, Contractors, Subcontractors, Consultants, Auditors/Assessors and Customers and other Stakeholders).
4. Provide clear information to any party also related to the applicable gratuity provisions.



5. UPG PLN Enjiniring memonitor pelaksanaan/ implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dan KSPI mengenai implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi termasuk laporan-laporan yang masuk kepada UPG PLN Enjiniring melalui aplikasi COS.

5. UPG PLN Enjiniring monitors the implementation/ implementation of the PLN Enjiniring Gratification Control Guidelines and provides periodic reports every 6 (six) months to the President Director and KSPI regarding the implementation of the Gratification Control Guidelines including reports submitted to UPG PLN Enjiniring through the COS application.



## Whistleblowing System

### Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah system yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonym dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta anggota perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN Enjiniring.

*Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints / disclosures regarding unlawful act, confidential unethical / improper actions, anonymous and independent manner which used to optimize the participation of company members and partners in exposing violations that occur in the PLN Enjiniring*

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Landasan penyusunan system pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah

*Based on the Decree of the Board of Directors Number: 04.004.K /DIR/PLNE/IV/2019 date April 04, 2019 concerning Whistleblowing System. The basis for the preparation of a whistleblowing system is:*

1. Keinginan PLN Enjiniring untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan PLN Enjiniring, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
2. Sebagai komitmen perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab;
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PLN Enjiniring

1. *PLN Enjiniring desire to continue to uphold the principles of good corporate governance throughout the PLN Enjiniring environment, especially those related to integrity and transparency;*
2. *As the company's commitment to providing the media for upholding the principles of good corporate governance, thus creating a clean and responsible work situation;*
3. *As one of the powerful tools in preventing and detecting potential violations at PLN Enjiniring*

- **Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**

Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah untuk menyelenggarakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama sekaligus memberikan keamanan Pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan Pelapor, penyediaan perlindungan Pelaporan. Tujuan diberlakukannya pedoman ini adalah:

- ***The Purposes, Objectives and Benefits of Implementing the Whistleblowing System***

*The purpose of the enactment of these Guidelines is to implement a Whistleblowing System which provides certainty and confidence that the submitted reports will be followed up by the President Director while at the same time providing security for the Whistleblower and the recipient of the report by guaranteeing the confidentiality of the Whistleblower, and providing Reporting protection. The aims of this guideline are :*



1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun *non finansial*, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan
  2. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
  3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi Pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
  4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
  5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
- **Pengelola Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan terhadap implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI) selaku Chief Compliance Officer (CCO). Selanjutnya apabila diperlukan secara berkala, CCO dapat mengadakan penyempurnaan dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

1. *Creating a conducive climate and encouraging reporting on things that can cause financial and non-financial losses, including things that can damage the company's image*
  2. *Facilitate the effective handling of reports of violations and at the same time protect the confidentiality of the identity of the Whistleblower and keep this information in a special archive that is guaranteed to be safe.*
  3. *Develop a policy and infrastructure to protect the Whistleblower from retaliation from internal and external parties.*
  4. *Reducing losses due to violations through early detection.*
  5. *Improve the reputation of the Company*
- **Whistleblowing System Process Management**

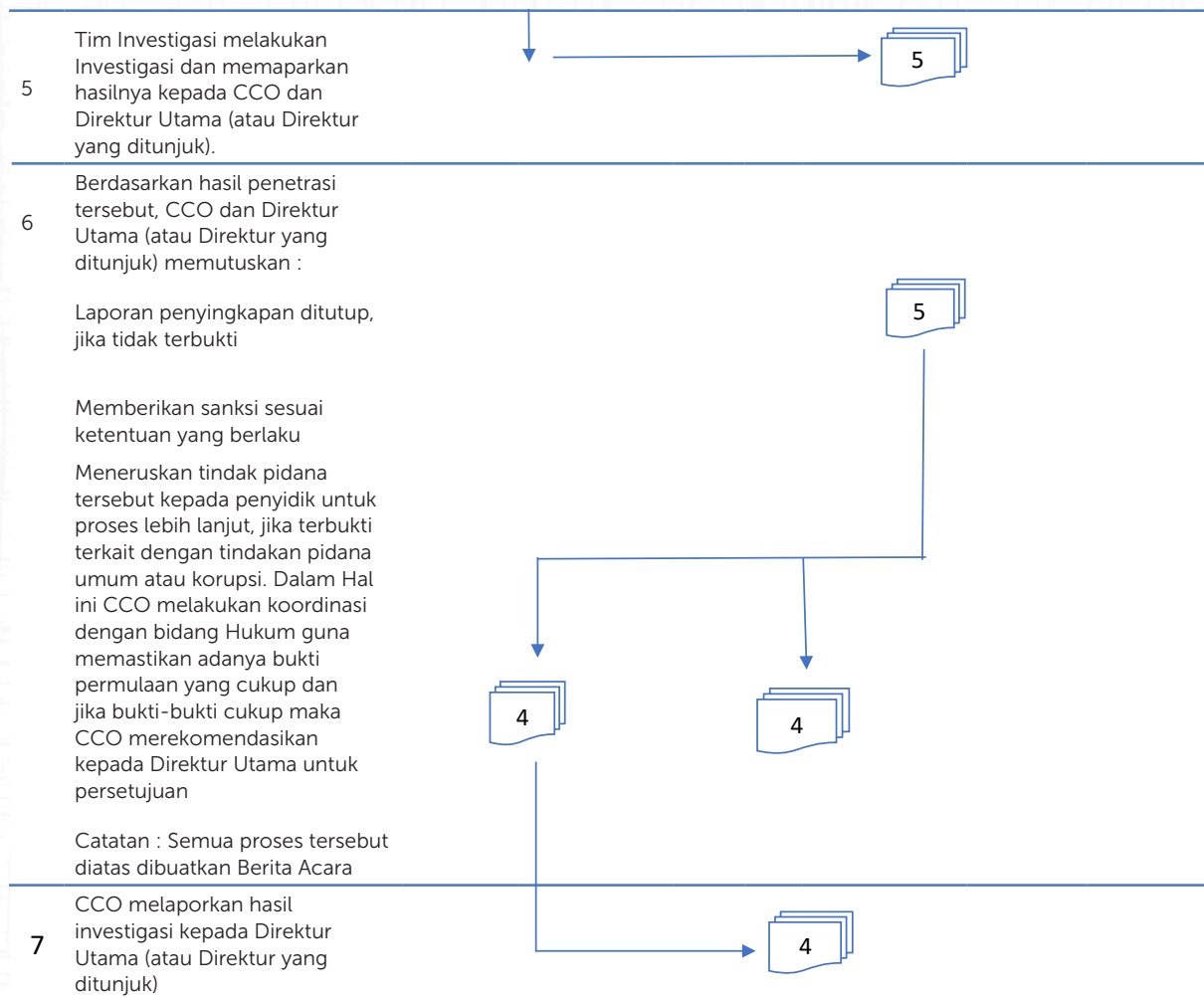
*The work unit responsible for implementing and managing the implementation of the Whistleblowing System is the Head of the Internal Supervisory Unit (KSPI) as the Chief Compliance Officer (CCO). Furthermore, if necessary periodically, the CCO can make improvements in the context of continuous improvement in accordance with the Company's business development.*



**TABEL PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**  
**WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT TABLE**

No.	Prosedur <i>Procedur</i>	Pelapor <i>Reporter/ Informan</i>	Pengelolaan WBS		Dewan Komisaris <i>Commissioner Board</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tim Investigasi <i>Investigation Team</i>
			TC	CCO			
1	Membuat pengaduan/ penyingkapan dan mengirimkan kepada Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut :  Telephone : 62-811 1995 177 Email : wbs@plne.co.id Surat : Kepada Direktur Utama	1					
2	Menerima pelaporan/ pengaduan/penyingkapan, lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard yang menghasilkan  Laporan penerimaan kontrak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan Laporan Penyingkapan		2				
3	Menyampaikan laporan penyingkapan (disclosure report) melalui email atau media internet yang dapat di akses oleh Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor)		3		3		
4	Tim Compliance melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/ penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada CCO dan Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut CCO dan Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk) memutuskan tindak lanjut :  dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT PLN Enjiniring dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI. bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/ atau Sekuriti sesuai dengan substansi pengaduan/ penyingkapan dilakukan oleh Tim Compliance atas justifikasi dan penunjukkan dari CCO		4				





• **Mekanisme Penyampaian Laporan**

Mekanisme penyampaian Pelaporan terhadap Tindakan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, *email* ke [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id), dan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- 2) Direktur Utama menerima Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran dan menetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.
- 3) Direktur Utama menyampaikan setiap Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran yang telah ditetapkan penyelesaiannya melalui mekanisme audit CCO.
- 4) CCO akan melakukan audit dan mengevaluasi tingkat kompleksitas Pelaporan tersebut berkaitan dengan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.

• **Report Submission Mechanism**

*The mechanism for submitting Reports on Violation Actions is as follows:*

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or Whatsapp to number 08111995177, email to [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id), and letters addressed to the President Director.*
- 2) *The President Director receives the Report related to the Violation Act and determines the form of follow-up for the settlement of the Report.*
- 3) *The President Director submits each Report related to Violation Actions whose resolution has been determined through the CCO audit mechanism.*
- 4) *CCO will conduct an audit and evaluate the level of complexity of the Report in relation to the form of follow-up to the completion of the Report.*



- 5) CCO akan meneruskan hasil tindak lanjut penyelesaian Pelaporan disertai dengan kesimpulan apakah Pelaporan tersebut terbukti atau tidak terbukti dan usulan tindak lanjut penyelesaian pelanggarannya kepada Direktur Utama untuk ditetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut:
- Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
  - Meneruskan kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia untuk proses tindak lanjut penerapan hukuman disiplin Perusahaan apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin.
  - Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan internal dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Sub-bidang Hukum untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Dalam mengelola whistleblowing system, perusahaan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor.

#### • **Perlindungan Bagi Whistleblower**

Perusahaan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap Pelapor yang meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
- Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang berpotensi merugikan Pelapor
- Jaminan terhadap tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, hingga Tindakan fisik yang dilakukan oleh pihak melakukan Tindakan Pelanggaran/terlapor.

- 5) *The CCO will forward the results of the follow-up to the completion of the Report accompanied by a conclusion whether the Report is proven or not and the proposed follow-up action to resolve the violation to the President Director to determine the form of follow-up settlement with the following details:*

- Dismissed and declared completed if the results of the audit or the results of the confirmation/description/explanation state that the complaint is untrue or unproven.*
- Forward to the Director of Finance and Human Resources for the follow-up process for imposing disciplinary penalties on the Company if it is proven that there has been a disciplinary violation.*
- With the consideration of the Board of Directors, cases of violations that are detrimental to the company can be submitted to the authorities for further processing in accordance with internal regulations and applicable laws. In this case, communication and coordination will be carried out with the team from the Legal Sub-Sector to ensure that the evidence that has been collected is declared sufficient to be submitted to the competent authorities.*

*In managing the whistleblowing system, the company maintains the confidentiality of the whistleblower as a form of protection for the whistleblower.*

#### • **Whistleblower Protection**

*The Company provides protection and confidentiality guarantees for each Whistleblower which includes:*

- The reporter's identity and content of the reports confidentiality is a guaranteed.*
- Security guarantees for reporters and their families.*
- guarantee of protection against treatment that has the potential to harm the Whistleblower.*
- Guarantee against pressure, postponement of promotion/position, dismissal, lawsuits, to physical actions taken by the party committing the Violation Act/reported*



• **Media Whistleblowing System**

Penyampaian pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai media sebagai berikut

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service (SMS)*, atau *WhatsApp* ke nomor +62 811-1995-177,
- 2) *email* ke: [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id),
- 3) surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.

• **Pengelola Whistleblowing System**

Whistleblowing system merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan PLN Enjiniring. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh pengelola whistleblowing system. Pengelola WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Tim Compliance/CCO/ Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori Terlapor).

• **Sosialisasi Whistleblowing System**

Sosialisasi WBS dilakukan kepada setiap bidang pada setiap pelaksanaan *Entry Meeting* Audit Operasional oleh KSPI.

• **Laporan Whistleblowing System**

Pada tahun 2022, Tidak ada Laporan WBS yang diterima oleh Tim *Whistleblowing System*.

• **Whistleblowing System Media**

*Submission of violation reports can be done through various media as follows*

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or WhatsApp to +62 811-1995-177,*
- 2) *email to: [wbs@plne.co.id](mailto:wbs@plne.co.id)*
- 3) *a letter addressed to the President Director.*

• **Whistleblowing System Management**

*The whistleblowing system is a mechanism for reporting violations violations committed secretly by employees or leaders of PLN Enjiniring. Reporting is addressed through a standard mechanism and is professionally managed by the whistleblowing system manager. The WBS Manager submits a disclosure report to the Compliance Team / CCO / Board of Commissioners / President Director (according to the Reported Party category).*

• **Whistleblowing System Socialization**

*WBS socialization is carried out to every field in every Operational Audit Entry Meeting implementation by KSPI.*

• **Whistleblowing System Report**

*In 2022, No WBS Report was received by the Whistleblowing System Team.*

No.	Bulan <i>Month</i>	Nomor Laporan <i>Report Number</i>	Jumlah Laporan <i>Number of Reports</i>	Jenis Keputusan dan/atau tindakan yang dilaporkan <i>Types of Decisions and/or Actions Reported</i>	Tindak lanjut laporan <i>Follow up report</i>
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	April	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	September	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Nopember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



## Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

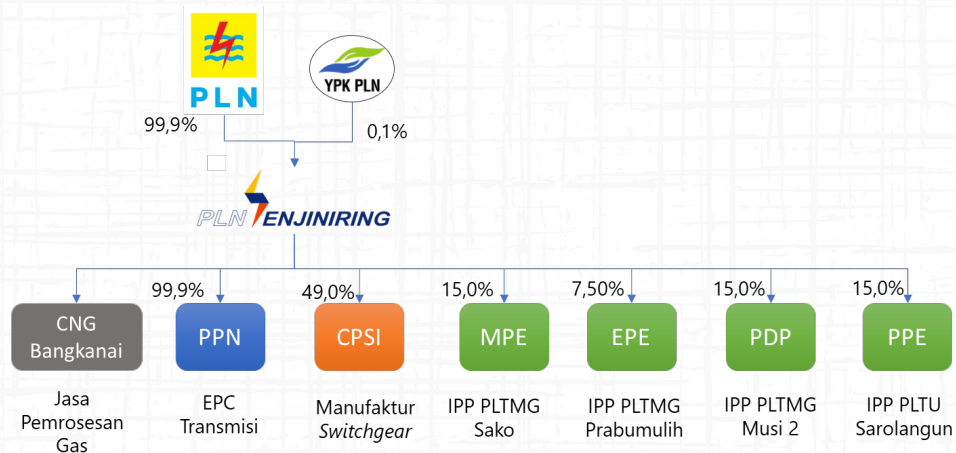
### Information on Major and Controlling Shareholders

Saham PLN Enjiniring dimiliki 99.90% oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 0.10% oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Hal ini menjadikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali di PLN Enjiniring.

PLN Enjiniring shares are owned 99.99% by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and 0.01% by the Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. This makes PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) the main and controlling shareholder in PLN Enjiniring.

Skema kepemilikan saham PLN Enjiniring sebagai berikut.

The PLN Enjiniring share ownership scheme is as follows.



- Unit Usaha
- Anak Perusahaan
- Joint Venture Company
- Afiliasi/Penyertaan Saham

CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai  
 PPN : PT Prima Power Nusantara  
 CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia  
 MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo  
 EPE : PT Energi Prima ElektriKa  
 PDP : PT Pura Daya Prima  
 PPE : PT Permata Prima Elektrindo

## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring bertujuan untuk menciptakan persepsi yang baik dan kepuasan publik terhadap system informasi perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan keterbukaan informasi public berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 17.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2010 tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

## ACCESS TO COMPANIES INFORMATION AND DATA

PLN Enjiniring aiming to create good perceptions and public satisfaction of the company's information system. The Company has a public information disclosure policy based on the Board of Directors Decree Number: 17.001.K / 010 / DIR / PLNE / XI / 2010 concerning in Classification and Information Disclosure. The implementation of public information disclosure is the responsibility of the Corporate Secretary.



Bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi perusahaan dengan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui berbagai media.

*The form of implementation of this policy is to provide convenience for stakeholders to obtain company information by constantly updating the supporting facilities and infrastructure for the delivery of information. In addition, the company also continues to strengthen its information technology platform to maintain and improve reliability in providing information in an integrated, timely and targeted manner through various media.*

## MEDIA INFORMASI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring memiliki media yang berfungsi sebagai saluran dalam memastikan ketersediaan akses dan pengungkapan informasi secara update, transparan, fair dan berimbang kepada *stakeholders* dan *shareholders* diantaranya adalah Website, Media Elektronik Interaktif, Media Sosial dan Media Internal.

## INFORMATION MEDIA TO COMPANY

*PLN Enjiniring has a media that serves as a channel to encourage information disclosure updates, transparent, fair and balance to stakeholders and shareholders including Website, Printed Media, Interactive Electronic Media, Social Media, and Internal Media.*

## WEBSITE

Shareholders dan stakeholders dapat mengakses informasi mengenai PLNE di situs [www.plne.co.id](http://www.plne.co.id) yang memuat informasi mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Website PLNE disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## WEBSITE

*Shareholders and stakeholders can access the information about PLNE at [www.plne.co.id](http://www.plne.co.id) that containing fairly complete and comprehensive information toward the operational activity and performance of the Company. The PLNE website is presented bilingually in Indonesian and English.*

Website PLNE menyediakan informasi terkait Perusahaan, peristiwa di Lingkungan Perusahaan, *Soft Copy* Majalah *Prima News*, *Annual Report*, Laporan Keuangan, pengumuman pelelangan dan informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.

*PLNE website provides information of companies, events in the corporate environment, soft copy of Prima News magazine, Annual Report, Financial Report, the Tender announcement and some other information that could be easily accessed by public.*



## MEDIA ELEKTRONIK INTERAKTIF

PLN Enjiniring menggunakan media elektronik dalam menyediakan informasi antara lain menggunakan email, LCD TV, Paging Call di kantor PLNE. Alamat email PLNE adalah [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id). Tujuan dibuatnya email PLNE berguna untuk memberikan kemudahan bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan PLNE. Sarana komunikasi lainnya yaitu display LCD TV yang menayangkan informasi terbaru terkait PLNE dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu PLNE.

## MEDIA SOSIAL

PLN Enjiniring juga menyediakan informasi mengenai perusahaan serta untuk berkomunikasi kepada publik dengan memanfaatkan media sosial melalui akun Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

## MEDIA INTERNAL

PLN Enjiniring menyediakan saluran dan media komunikasi internal dalam rangka sarana komunikasi dengan karyawan melalui pelaksanaan acara *knowledge sharing*, *coffee morning*, dan *email*.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PLN Enjiniring, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

- **Sekretaris Perusahaan**

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia  
T (62-21) 27510363  
F (62-21) 27510362  
E [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id)

## INTERACTIVE ELECTRONIC MEDIA

*PLN Enjiniring uses electronic media in providing information including e-mail, LCD TV, Paging Call at the PLNE office. PLNE email address is [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id). The purpose of PLNE e-mail made is to provide convenience for the public who wish to ask everything related to PLNE. Other communication facilities are LCD TV display that shows the latest information related PLNE in the form of photos and video and other information that needs to be known by employees and guests.*

## SOCIAL MEDIA

*PLN Enjiniring also provides information regarding the company as well as to communicate to the public by utilizing social media through Instagram, Facebook, Youtube and Twitter accounts.*

## INTERNAL MEDIA

*PLN Enjiniring provides information channels and internal communication media in order to communication with employees through *knowledge sharing*, *coffee morning*, and *email blast*.*

*To get more information about PLN Enjiniring, the general public and investors can contact:*

- **Corporate Secretary**

*Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123  
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia  
T (62-21) 27510363  
F (62-21) 27510362  
E [contact@plne.co.id](mailto:contact@plne.co.id)*









# Tanggung Jawab Perusahaan

*Company Responsibilities*





"Transformasi PLNE dengan Efisiensi dan Inovasi Serta Berdaya Saing Tinggi Menuju Bisnis Berkelanjutan"





# Tanggung Jawab Perusahaan

## Corporate Responsibility

### TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan merupakan tanggung jawab Perusahaan yang berdampak pada keputusan dan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat dan Lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

#### • MAKSUD DAN TUJUAN

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat sehingga mendorong terciptanya keselarasan dan keharmonisan dengan masyarakat terutama disekitar lokasi usaha Perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan visi Perusahaan:

**“Menjadi Perusahaan Konsultan Enjiniring Terintegrasi yang Terkemuka se Asia Tenggara dan Pilihan No. 1 Pelanggan ”**

Melalui visi tersebut, PT PLN Enjiniring terus menjalankan komitmennya untuk berkontribusi dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Kesadaran ini didasarkan bahwa keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) tercermin dalam konsep *triple bottom line* yaitu *people*, *profit*, dan *planet*.

### SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

*Social & Environmental Responsibility is the company responsibility which impacted to the Company's decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior.*

#### • PURPOSE AND OBJECTIVES

*The accompany has a high commitment to create sustainability in economic development and to improve the quality of life that is beneficial so as to encourage harmony with the community, especially around the Company's business location. The Company realizes the importance of Environmental Social Responsibility in supporting the company's operations with the Company's vision:*

**“To be the Leading Integrated Engineering Consulting Company in Southeast Asia and the No. 1 Customer”**

*Throught this vision, PT PLN Enjiniring continuous to carry out its commitment to contribute in carrying out corporate social responsibility (CSR). This is an integral part of the company's operational activities. The company realizes that the company's performance is not only measured from the economic aspect, but also social and environmental performance. This awareness is based that corporate sustainability is reflected in the triple bottom line concept of people, profit and planet.*

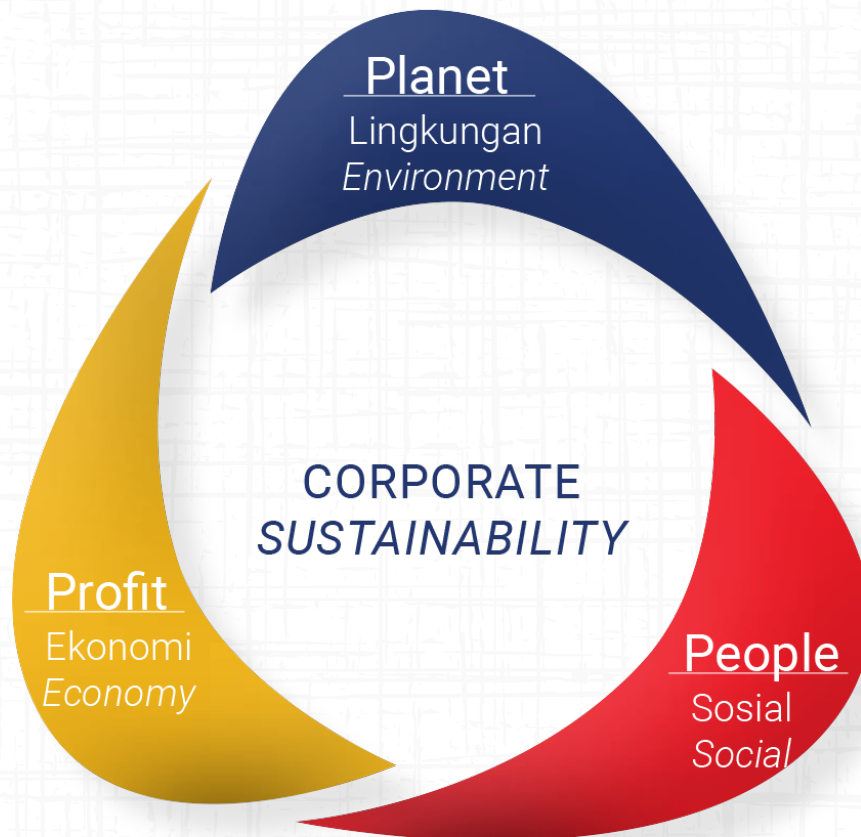


Maksud dari penyelenggarakan CSR Perusahaan adalah sebagai perwujudan visi dan misi Perusahaan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Adapun tujuan pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar tempat usaha khususnya di sektor ketenagalistrikan dengan kelompok sasaran program yaitu komunitas lokal / kelompok / konsumen, karyawan, lingkungan hidup, pemegang saham, kreditor, pemasok/ mitra kerja.
2. Meningkatkan pemahaman publik terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menunjang peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.

*The purpose of organizing the Company CSR is as a manifestation of the Company vision and mission to create sustainability in economic development to improve the quality of the life that is beneficial. The objectives of implementing CSR are as follows:*

1. *Encourage the community economic development and improvement around the place of business, especially in the electricity sector with the program target group's namely local communities / groups / Consumers, employees, environment, shareholders, creditors, supplier/ partners.*
2. *Increase public understanding on the company through information channeled in social activities so that it can support the increase in the company value through the establishment of good reputation.*





Bagi PT PLN Enjiniring, tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Tujuan tersebut tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan termasuk dalam hal ini adalah komitmen PT PLN Enjiniring dalam melestarikan lingkungan yang tercermin dalam berbagai kebijakan perusahaan.

- **KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT PLN Enjiniring menyusun Program CSR yang ditetapkan dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Pedoman CSR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring dapat terselenggara secara efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, PT PLN Enjiniring mengacu kepada standar ISO 26000 sebagai panduan prinsip keberlanjutan perusahaan. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis sehingga pelaksanaan CSR bersifat holistik dan melibatkan berbagai fungsi di perusahaan. Prinsip-Prinsip keberlanjutan antara lain:

### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas yang membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan, Perusahaan seharusnya menerima dan bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

*For PT PLN Enjiniring, the company objectives not only to fulfill the interests of shareholders, but also to contribute a value to other stakeholders, including employees, customers, supplier and other parties. These objectives are embedded in every activity of the company including in this case the PLN Enjiniring commitment in preserving the environment which is reflected in various company policies.*

- **POLICY AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY**

*In the implementation of company social responsibility PT PLN Enjiniring prepares a CSR Program specified in Company Plans and Budgets in accordance with the CSR Guidelines stipulated in the Decision Letter of the Board of Directors Number 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 regarding CSR Guideline. This guideline is used as a guideline in the management of activities so that the implementations of CSR activities within the PT PLN Enjiniring can be carried out effectively and on target as well as sustainably.*

*The sustainability principles used in supporting the achievement of these objectives, PT PLN Enjiniring refers to the ISO 26000 standard as a guiding principles for the company's sustainability. ISO 26000 translate social responsibility as the responsibility of an organization for the impact of decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior so that the implementation of CSR is holistic and involves various function in the company. Sustainability principles, among others:*

### **1. Accountability**

*Accountability that proves that the organization is doing everything right. The accountability requested is for all stakeholders, in terms of the Company's impact on society and environment, including accidental or unanticipated impacts, the Company should accept and even encourage in-depth investigation of its operational impacts.*



## 2. Transparansi

Perusahaan menyatakan secara transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan keterbukaan yang jelas, akurat dan lengkap atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitasnya.

## 3. Perilaku Etis

Perusahaan harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Penerapan perilaku etis dilaksanakan melalui: (a) Pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (b) Membuat dan mengaplikasikan perilaku etis baku, dan (c) Terus menerus meningkatkan perilaku etis baku tersebut.

## 4. Penghormatan kepada pemangku kepentingan Perusahaan

Menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: (a) Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, (b) Menanggapi kebutuhannya, (c) Mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (d) Mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

## 5. Kepatuhan terhadap Hukum

Perusahaan menerima bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah suatu kewajiban. Hal-hal yang harus dilakukan adalah (a) Patuh terhadap semua peraturan, (b) Memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (c) Patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan tidak memihak, (d) Mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan-perundangan, dan (e) Secara berkala memeriksa kepatuhannya.

## 2. Transparency

*The company transparently states all its decisions and activities that have an impact on society and environment. Company is required to implement clear, accurate and complete disclosure of all policies, decisions and activities.*

## 3. Ethical Behavior

*Companies must behave ethically at all times, upholding honesty, equality and integrity. The practice of ethical behavior is implemented through: (a) development governance structures that encourage ethical behavior, (b) create and apply standard ethical behavior, and (c) continuously improving the standard ethical behavior.*

## 4. Respect for the Company's stakeholders

*Respect and respond to the interests of all Stakeholders. The things that must be done are: (a) identifying Stakeholders, (b) responding to their needs, (c) recognizing legal rights and legitimate interests, and (d) identifying broader interests related to sustainable development.*

## 5. Compliance with Laws

*The company accepts that compliance with the law is an obligation. Things that must be done are (a) comply with all regulations, (b) ensure that all activities are in suitable with the relevant legal framework, (c) comply with all rules that he/she made themselves fairly and impartially, (d) aware of the changes in laws and regulations, and (e) periodically checking compliance.*



## 6. Penghormatan Terhadap Norma Perilaku International

Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, Perusahaan harus mengacu kepada norma perilaku internasional.

## 7. Penghormatan terhadap HAM

Perusahaan menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Hal-hal yang harus dilakukan, apabila ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, Perusahaan tersebut harus tetap melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tak ada peraturan perundangan HAM di tingkat nasional, maka Perusahaan harus mengacu pada nilai baku HAM internasional.

### • UNIT PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring, Sekretaris Perusahaan melalui Sub Bidang Kinerja dan Komunikasi berperan sebagai fasilitator dan memberikan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan dokumentasi kegiatan CSR.

### • PENERAPAN CSR SECARA HOLISTIK

Bagi PT PLN Enjiniring, CSR bukan hanya sekedar membagi donasi dan kegiatan sosial. Penerapan CSR di PT PLN Enjiniring dikelola secara holistik dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada Semua pemangku kepentingan. Kegiatan CSR diimplementasikan pada setiap hubungan antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

### • KEBIJAKAN

Komitmen PT PLN Enjiniring untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi yang dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan Perseroan bertanggung jawab atas dampak tersebut.

## 6. Respect for the Norms of International Conduct

*In countries where its laws or their implementation are insufficient to protect their environmental and social conditions, Companies must comply with international norms of conduct.*

## 7. Respect for human rights

*Human rights is respected by the company, and recognizes on how important it is. Things that must be done, if a human rights is not protected, the company must continue to protect human rights, and not take advantage of it situation, and if there is no human rights regulation at the state law, the company must refer to international human rights standards.*

### • DEPARTMENT OF CORPORATE CSR MANAGEMENT

*In implementing CSR activities within PT PLN Enjiniring, the Corporate Secretary acts as a facilitator and provides planning, implementation and preparation of CSR activities documentation.*

### • HOLISTIC IMPLEMENTATION OF CSR

*For PT PLN Enjiniring, CSR is not just about sharing donations and social activities. The implementation of CSR at PT PLN Enjiniring is managed holistically in order to fulfill the company's responsibilities to all stakeholders. CSR activities are implemented in every relationship between the Company and its stakeholders.*

### • POLICY

*PT PLN Enjiniring commitment to be environmentally responsible is stated in the Directors decree which is implemented through various programs, both internally and in the community. Environmental arising impacts from the company's operational must be kept as low as possible and the Company is responsible for these impacts.*



Perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan program-program sosial demi menciptakan perusahaan yang lebih peduli kepada lingkungan

*The company contribution in sustainable development considering the stakeholders expectation and integrating social programs in order to create a company that cares more for the environment*

• **SASARAN STRATEGIS**

PT PLN Enjiniring berupaya untuk melakukan berbagai program dengan merujuk pada ruang lingkup implementasi dari CSR berbasis pada ISO 26000, yang terdiri dari:

- a) Tata Kelola Organisasi, Kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil dan minat stakeholder;
- b) Hak Asasi Manusia, hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja;
- c) Aktivitas Tenaga Kerja, hubungan antar pekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan kerja dan sumber daya manusia;
- d) Lingkungan, preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi dan restorasi lingkungan alam;
- e) Aktivitas operasi yang adil, anti korupsi dan anti suap, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, perhatian pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- f) Isu Konsumen, marketing yang adil, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, pengembangan produk dan jasa yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi/perindungan data konsumen, akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, pendidikan dan kepedulian; dan
- g) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, melibatkan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial (TJSL).

• **STRATEGIC TARGET**

*PT PLN Enjiniring strives to carry out various programs by referring to the scope of implementation of CSR based on ISO 26000, which consists of:*

- a. *Organizational Governance, Compliance with law, accountability, transparency, code of ethics, profile recognition and stakeholder interest;*
- b. *Human rights, civil and political rights, social, economic, cultural and vulnerable groups, as well as basic rights at work;*
- c. *Labor activities, relations between workers, working conditions and social protection, health, job security and human resources;*
- d. *Environment, pollution prevention, sustainable consumption, climate change adaptation and mitigation, protection and restoration of the natural environment;*
- e. *Fair operating activities, anti-corruption and anti-bribery, fair competition, promotion of social responsibility through the supply chain, attention to Intellectual Property Rights (IPR);*
- f. *Consumer Issues, fair marketing, protection of consumer safety and health, development of products and services that provide social and environmental benefits, consumer services, dispute resolution, consumer privacy/data protection, access to key products and services, sustainable consumption, education and care; and*
- g. *Contribution to the community and society, involving the community, contribution to economic development and contribution to social development (TJSL).*



- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**

Sebagaimana bidang usaha utama PT PLN Enjiniring sebagai jasa konsultan enjiniring dalam industri ketenagalistrikan yang tidak memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan, maka tidak terdapat sertifikasi di bidang lingkungan.

- **AWARDS AND CERTIFICATIONS**

*PLN Enjiniring main business is as an engineering consultant service in the electricity industry which have no impact on environmental pollution, because of that there is no environmental certification.*



# Corporate Social Responsibility (CSR) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

*Corporate Social Responsibility (CSR) Related to Labor, Health and Safety Work*

## KETENAGAKERJAAN

### • Kebijakan

PT PLN Enjiniring, sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa konsultan enjiniring ketenagalistrikan, memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman arah tujuan perusahaan. Terkait dengan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja, PT PLN Enjiniring memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang menjadi landasan hukum tertinggi di perusahaan. Dalam PP, diatur tentang Sistem Manajemen SDM, Hubungan Kerja, Penghasilan, Pembinaan Pegawai, Disiplin Pegawai, Tata Tertib, Cuti, Perjalanan Dinas, Jaminan Sosial, Penghargaan Pensiun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Koperasi Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Peralihan, dan lain-lain. PP PT PLN Enjiniring tunduk dan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### • Kegiatan

Program kerja terkait ketenagakerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Pada PT PLN Enjiniring, tenaga kerja terbagi menjadi empat macam berdasarkan status hubungan kerjanya, yaitu Pegawai organik, Pegawai tugas karya, karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karyawan Outsourcing (OS). Dalam pemenuhan tenaga kerja tersebut, jenis rekrutmen yang dilakukan berbeda satu dengan lainnya. Pegawai organik direkrut melalui sistem dan prosedur rekrutmen berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja (FJFTK) sesuai dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK). Pegawai tugas karya direkrut berdasarkan kebutuhan FJ-FTK melalui seleksi fit and proper

## EMPLOYMENT

### • Policy

*PT PLN Enjiniring, as PT PLN (Persero) subsidiary company which is engaged in electricity engineering consulting services, has a vision and mission that guides the direction of the company's goals. Regarding industrial relations between companies and workers, PLN Enjiniring has a Company Regulation (PP) which is the highest legal basis in the company. In Company Regulation (PP), it regulating the HR Management System, Work Relations, Income, Employee Development, Employee Discipline, Rules, Leave, Official Travel, Social Security, Retirement Awards, Religious Holiday Allowances, Employee Cooperatives, Employee Termination and Retirement, Industrial Relations Dispute Resolution, Transitional Provisions, and others. PP PLN Enjiniring is subject and refers to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.*

### • Activity

*Employment-related work programs implemented through 2021 include the following:*

1. *Employment Relations at PLN Enjiniring, the labor force is divided into four types based on the work relationship status, namely organic employees, work assignments employees, Fixed Time Work Agreement (PKWT) employees, and outsourcing employees (OS). In fulfilling this labor force, the types of recruitment carried out are different from one to another. Organic employees are recruited through recruitment systems and procedures based on job formation needs and labor force formation (FJFTK) appropriate with Competency-Based HR Management (MSDM-BK). Work assignments employees are recruited based on the needs of the FJ-FTK through a*



test. Sedangkan karyawan PKWT dan OS direkrut berdasarkan kebutuhan jenis pekerjaan administratif dan project based.

Pada 2021, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 45,90%, pegawai Organik sebesar 41,36%, karyawan *outsourcing* sebesar 10,12%, dan pegawai tugas karya sebesar 2,52%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PT PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan injiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

2. Pembinaan Pegawai PT PLN Enjiniring melakukan pembinaan Pegawai dengan tujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi, kemampuan, dan produktivitas, serta memberikan kesempatan pengembangan karir.

Macam-macam kegiatan pembinaan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan,
- b. Pembinaan karir,
- c. Penilaian unjuk kerja,
- d. Pemberian penghargaan,
- e. Penegakan peraturan disiplin, dan
- f. Pemberian sanksi disiplin.

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PT PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2021 dalam kegiatan Training Need Analysis (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13.

*fit and proper test selection. Meanwhile, PKWT and OS employees are recruited based on the needs of administrative and project based jobs.*

*In 2021, the composition of contract employees (PKWT) is 45.90%, Organic employees are 41.36%, outsourcing employees are 10.12%, and work-duty employees are 2.52%. The large dominance of contract employees at PT PLN Enjiniring is caused by the company's business processes that are engaged in engineering consulting services and construction supervision, so the need for skilled workers is very high, which is project-based, but has a certain working period. This is done as the company's strategy to streamline staffing costs by not maintaining the workforce only for a certain period of time.*

2. *PLN Enjiniring Employee Development conducted to encourage employee professionalism, maintaining and developing motivation, abilities, and productivity, as well as providing career development opportunities.*

*The types of employee coaching activities are as follows:*

- a. *Training and Education Program*
- b. *Career Coaching*
- c. *Performance Assessment*
- d. *Awards*
- e. *Disciplinary Enforment, and*
- f. *Disciplinary Penalty*

*In maintaining the quality of human resources, the employee competency development continuity program became the Company's commitment so that it can support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring planned and formulated the training and certification needs for employees on the 2021 period regarding Training Need Analysis (TNA) activities independently following Engineering Procedures (PE) 6.13.*



Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selama tahun 2021, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari Selama tahun 2021, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 539 orang, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 68 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai. Pengembangan Kompetensi dilakukan dengan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan grade. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa grade yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan grade melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PT PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan karir ditujukan kepada seluruh Pegawai dengan kesempatan yang sama dan dilakukan berdasarkan kompetensi, nilai unjuk kerja, dan dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. Pembinaan karir adalah tanggung jawab dari atasan, Pegawai yang bersangkutan, dan pejabat yang menangani SDM. Selain digunakan untuk pembinaan karir, nilai unjuk kerja juga digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai dalam bentuk insentif kerja. Penghargaan juga diberikan kepada Pegawai sebagai apresiasi Perusahaan dalam bentuk penghargaan kesetiaan kerja dan penghargaan pensiun.

*In developing its human resource, PT PLN Enjiniring collaborates with PLN Corporate University and also domestic and foreign training institutions. During 2021, the Company implemented employee competency development consisting of 81 Training Programs with 539 participants, and 25 Certification Programs attended by 68 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equal opportunity for all employees.*

*Competency coaching consists of competency level and grade coaching. The competency level is based on the employee's scientific field, experience, and / or ability, in developing competencies that suitable with the job requirements. Each competency level consists of several grades which indicate the level of mastery of individual competencies at a certain competency level. Competency level and grade are attached to employees, not to positions.*

*Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is obliged to provide guidance in terms of competency and career development, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PT PLN Enjiniring already has provisions in the Decree of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.*

*Career development is aimed at all employees with equal opportunities and is carried out based on competence, performance value, and with due regard for employee appreciation. Career development is the responsibility of superiors, concerned employees, and officials who handle HR. Apart from being used for career development, performance value is also used to reward employees in the form of work incentives. Awards are also given to employees as company appreciation in the form of work loyalty awards and retirement awards.*



3. Penghargaan yang diberikan oleh PT PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari
- kompensasi tetap bulanan (*Pay for Person – P1*),
  - tunjangan posisi (*Pay for Position – P2*), tunjangan prestasi (*Pay for Performance – P3*), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai,
  - imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja.

Manfaat terdiri dari

- manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman kepemilikan rumah, dan program pensiun, serta
- manfaat khusus, antara lain bantuan kepemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

- Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
- Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
- Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
- Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
- Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

3. *There are two types of awards given by PT PLN Enjiniring, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of:*

- fixed monthly compensation (Pay for Person - P1),*
- position allowances (Pay for Position - P2), achievement allowances (Pay for Performance - P3), holiday allowances, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security,*
- fees in the form of performance bonuses.*

*The benefits consist of:*

- general benefits, including health care, leave rights, official clothing, assistance to replace housing facilities, assistance with housing loans, and pension programs, as well as,*
- special benefits, including assistance for ownership of vehicles, communication devices, laptops and work facilities.*

*Intrinsic rewards are given to employees in form:*

- Formal education programs and professional certification, which are given to employees who meet certain criteria for talent,*
- Special work facilities, which are given on the basis of contribution and / or innovations achievement that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,*
- A special balance program, which is given on the basis of efficiency in personal and family health costs and / or achievement of employee job loyalty,*
- Legal aid assistance, which is provided in the form of defense of legal claims related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
- Recognition, which is given on the basis of an award from the Board of Directors.*



Selain penghasilan dalam bentuk remunerasi tersebut di atas, PT PLN Enjiniring juga memberikan bonus sesuai dengan pencapaian kinerja dan kemampuan Perusahaan. Dalam hal PP PT PLN Enjiniring patuh terhadap ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan juga memberikan tunjangan wajib yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) dan imbalan kerja lembur.

4. PT PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PT PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PT PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24.
5. PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja

*In addition to income in the form of remuneration mentioned above, PLN Enjiniring also provides bonuses in accordance with the Company's performance, achievements and capabilities. In the event that PP PT PLN Enjiniring complies with the applicable Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013 concerning Manpower, the Company also provides mandatory allowances, namely Hari Raya Allowances (THR) and overtime benefits.*

4. *PLN Enjiniring regulates Employee Pension Program in Directors Decree No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare the employees who enter the MPP period, PLN Enjiniring provides post-service training. It is hoped that with this training provision, employees can prepare themselves for retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are given compensation. Employees are included in the Old Age Security Program (JHT), namely Old Age Security Compensation in accordance with the applicable Manpower Law and PSAK 24.*
5. *PT PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.*

*PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Enjiniring employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower*



dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020. PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

*and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020. PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.*

## KESEHATAN

### • Kebijakan

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PT PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a. Rawat jalan,
- b. Rawat inap,
- c. Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e. Gugur kandung,
- f. Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g. Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
- h. Perawatan gigi,
- i. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j. Alat-alat cangkok/transplantasi,

## HEALTH

### • Policy

*Health care facilities are part of an extrinsic award that falls into the category of general benefits. PLN Enjiniring provides health care assistance to employees and their families as regulated in the Decree of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families covered by PT PLN Enjiniring. The form of health care borne by the Company consists of:*

- a. Outpatient,
- b. Inpatient,
- c. Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,
- d. Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,
- e. Biological death,
- f. Care in the Emergency Unit (UGD),
- g. Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,
- h. Dental care,
- i. Rehabilitation tools to restore the function of organs,
- j. Graft / transplant tools,



- k. Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l. Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m. Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n. Terapi kejiwaan,

Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat melanggan sarana kesehatan milik pemerintah atau swasta, berupa rumah sakit, klinik, poliklinik, puskesmas, dokter umum, dokter spesialis, psikolog, psikiater, apotek, laboratorium, dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya,
2. Dalam hal sarana rawat inap, level Manajemen Atas/Fungsional I dan Manajemen Menengah/Fungsional II mendapat fasilitas rawat inap kelas VIP, level Manajemen Dasar/Fungsional III mendapat fasilitas rawat inap kelas I, dan level Supervisor Atas hingga Fungsional IV mendapat fasilitas rawat inap kelas II,
3. Perusahaan melakukan upaya pencegahan gangguan kesehatan dengan cara:
  - a. Penyediaan sarana olahraga dan fasilitas olahraga lainnya;
  - b. Penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, ataupun seminar;
  - c. Pemeriksaan kesehatan tiap satu tahun sekali bagi Pegawai berusia di atas 40 tahun dan Pegawai yang bertugas di tempat berpotensi mengakibatkan penyakit.
  - d. Memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga,
  - e. Penyediaan sarana untuk ibu menyusui dan penitipan anak sampai dengan usia tiga tahun.

- k. Heart related medical devices,*
- l. Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),*
- m. Special plastic surgery due to occupational accidents,*
- n. Psychiatric therapy,*

*Implementation of health care carried out by PLN Enjiniring is as follows:*

- 1. Companies can subscribe to government-owned or private health facilities, in the form of hospitals, clinics, polyclinics, health centers, general practitioners, specialists, psychologists, psychiatrists, pharmacies, laboratories, and other supporting examination places,*
- 2. In terms of inpatient facilities, Upper Management / Functional I and Middle / Functional II inpatient facilities receive VIP class inpatient facilities, Basic / Functional III inpatient facilities class I, and Upper Supervisor to Functional IV levels receive class inpatient facilities II,*
- 3. The company makes efforts to prevent health problems by:*
  - a. Provision of sports facilities and other sports facilities;*
  - b. Delivering health information in the form of counseling, socialization, or seminars;*
  - c. Health checks every once a year for employees over 40 years of age and employees who work in places that have the potential to cause illness.*
  - d. Facilitating activities in the field of health and sports,*
  - e. Provision of facilities for breastfeeding mothers and child care up to the age of three.*



## KESELAMATAN KERJA

- **Kebijakan**

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa menjaga keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 26.001.K/DIR/PLNE/V/2015 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta no. 404 tahun 2017. Sejak tahun 2016, sesuai dengan Risalah RUPS tanggal 19 Januari 2016, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) menjadi salah satu indikator kinerja PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017 dalam perspektif kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat. Oleh karena itu, PT PLN Enjiniring membentuk Tim Setup Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 27.001.K/DIR/PLNE/VI/2016 dan dilanjutkan dengan membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.003.K/DIR/PLNE/VII/2020, Tim Pengawas K3 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.004.K/DIR/PLNE/VII/2020, dan Tim Tanggap Darurat yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.002.K/DIR/PLNE/VII/2020.

- **Kegiatan**

Dalam mendukung komitmen untuk menyelenggarakan program-program terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PT PLN Enjiniring memberikan pembekalan bagi tim dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Beberapa judul pelatihan dan sertifikasi yang telah terlaksana di tahun 2022 sebagai berikut:

## WORK SAFETY

- **Policy**

*PT PLN Enjiniring is committed to always maintaining work safety as stated in the Company Regulation (PP) which is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 and legalized by the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province no. 404 of 2017. Since 2016, according to the Minutes of the GMS dated 19 January 2016, Health, Safety and Environment (K3LH) has become one of the performance indicators for PLN Enjiniring as stated in the 2017 Key Performance Indicator (KPI) Contract. a leadership perspective, Governance, and Community Responsibility. Therefore, PLN Enjiniring formed the Occupational Health and Safety Management System Setup Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 27.001.K / DIR / PLNE / VI / 2016 and continued by forming an Occupational Health and Safety Committee (P2K3) as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.003.K / DIR / PLNE / VII / 2020, K3 Supervisory Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.004.K / DIR / PLNE / VII / 2020, and the Emergency Response Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.002.K / DIR / PLNE / VII / 2020.*

- **Activity**

*In supporting the commitment to carry out programs related to Occupational Health and Safety, PT PLN Enjiniring provides provision for the team in the form of training and certification. Some of the training and certification titles that have been carried out in 2022 are as follows:*



**TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI K3 TAHUN 2022**

**TABLE OF 2022 K3 CERTIFICATION IMPLEMENTATION**

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari	Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	PT Phitagoras Global Duta	1
	January	<i>The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms</i>		
2	Januari	Pembinaan Tehnik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik	PT Phitagoras Global Duta	16
	January	<i>The Occupational Safety and Health (OSH) Norms of Supervision Training of Electrical</i>		
<b>Total Jumlah Peserta Sertifikasi</b>				<b>17</b>
<i>Total Number of Certification Participants</i>				

Selain program pelatihan dan sertifikasi, kegiatan terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) di PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

*Beside training and certification programs, activities related to Health, Safety, and Environment (K3LH) at PLN Enjiniring are as follows:*

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen pedoman K3,</li> <li>2. Melakukan inspeksi APAR dan kotak P3K,</li> <li>3. Pengadaan rambu-rambu K3 di dalam maupun di halaman kantor PT PLN Enjiniring,</li> <li>4. Pemeriksaan lingkungan kantor, yaitu suhu, cahaya, debu, kebisingan,</li> <li>5. Penerbitan SLO listrik, proteksi kebakaran, dan penyalur petir,</li> <li>6. Membuat laporan kecelakaan kerja dan monitoring SMK3 untuk PT PLN (Persero) Pusat,</li> <li>7. Membuat laporan P2K3 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Triwulan,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Prepare the Occupational Health and Safety (K3) guideline document,</i></li> <li>2. <i>Fire extinguisher inspection and first aid kit,</i></li> <li>3. <i>Procurement of K3 signs inside and on the PT PLN Enjiniring office yard,</i></li> <li>4. <i>Inspection of the office environment, namely temperature, light, dust, noise,</i></li> <li>5. <i>Issuance of electricity SLO, fire protection, and lightning distributor,</i></li> <li>6. <i>Creating work accident reports and monitoring SMK3 for PT PLN (Persero) Pusat,</i></li> <li>7. <i>Make a P2K3 report for the Manpower and Transmigration Office per quarter,</i></li> </ol> |
|---|---|



## Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

### Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

#### • Kebijakan

Sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizenship*), PT PLN Enjiniring menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi PT PLN Enjiniring. Kebijakan yang dimiliki PT PLN Enjiniring dituangkan dalam bentuk komitmen untuk membangun kesejahteraan bersama melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan.

#### • Kegiatan

Selama tahun 2022 PT PLN Enjiniring telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* terkait sosial kemasyarakatan yang meliputi 4 (empat) kegiatan dengan total dengan rincian sebagai berikut:

#### • Policy

As part of a *Good Corporate Citizenship*, PLN Enjiniring realizes that relations with the community in the form of *mutualism symbiosis* is very beneficial for PLN Enjiniring. The policies that are owned by PLN Enjiniring are outlined in the form of a commitment to build mutual welfare through various efforts that can be made.

#### • Activity

During 2021, PT PLN Enjiniring has implemented various *Corporate Social Responsibility* programs related to social communities which include 4 (four) activities in total with the following details:

#### KEGIATAN CSR TAHUN 2022 THE 2022 CSR EVENTS

No	Kegiatan <i>Activity</i>	Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Time of Implementation</i>	Biaya (Rp) <i>Cost (Rp)</i>	Mobilisasi/ Pelaksanaan <i>Mobilization/ Implementation</i>
1	CSR: Bantuan Sarana Pendidikan untuk Yayasan Pendidikan SMP Bangkanai <i>CSR: Educational Facility Assistance for Junior High School Bangkanai Education Foundation</i>	Pendidikan <i>Education</i>	SMP Yayasan Pendidikan Bangkanai <i>Junior High School Bangkanai Education Foundation</i>	25 Maret 2022 <i>March 25, 2022</i>	20,000,000	20,000,000
2	Bantuan CSR Dukungan Pembelajaran LKSA Perempuan Al Irsyad Al Islamiyyah Jakarta <i>CSR Assistance for Women's LKSA Learning Support Al Irsyad Al Islamiyyah Jakarta</i>	Community Development	TK Al Irsyad Al Islamiyyah <i>Al Irsyad Al Islamiyyah Kindergarten</i>	11 Agustus 2023 <i>August 11, 2023</i>	16,000,000	16,000,000



3	CSR: Education Assistance for TPA Berkah Menyapa	Community Development	TPA Berkah Menyapa	24 Agustus 2022 August 24, 2022	11,350,000	11,350,000
4	CSR : Titian Peranginan Bridge Construction Assistance at Karendan Village	Community Development	Desa Karendan, sekitar CNG Plant Bangkanai Karendan Village, around CNG Plant Bangkanai	30 Agustus 2023 August 30, 2023	79,000,000	79,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>126,350,000</b>	

Sehingga total biaya CSR tahun 2022 adalah Rp 126.350.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan program CSR yang mendapat persetujuan untuk direalisasikan adalah seluruh kegiatan.

Untuk pelaksanaan program CSR di Bangkanai, Tim Sub-Bidang Komunikasi dan Kinerja telah melakukan social mapping terhadap 7 isu penting yang timbul di wilayah kerja PT PLN Enjiniring dan bobot tertinggi adalah pembangunan PAUD di Desa Karendan.

*So the total CSR costs in 2022 are IDR 126,350,000 (one hundred twenty-six million three hundred and fifty thousand rupiah) and the CSR programs that have received approval to be realized are all activities.*

*For the implementation of the CSR program in Bangkanai, the Communication and Performance Sub-Division Team has carried out social mapping of 7 important issues arising in the PT PLN Enjiniring work area and the highest weight is the development of PAUD in Karendan Village.*



## Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

### Corporate Social Responsibility Related To Consumer Responsibility

#### • Kebijakan

PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Perbaikan kualitas layanan dan kinerja PT PLN Enjiniring terus ditingkatkan dan berbagai upaya dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan baik pelanggan internal (PLN Group) maupun eksternal.

#### • Kegiatan

PT PLN Enjiniring senantiasa menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satu pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan aspirasi dan keluhan pelanggan.

Untuk memenuhi Kepuasan Pelanggan PT PLN Enjiniring dilakukan dengan cara mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan guna memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan PT PLN Enjiniring kepada pelanggan internal (PLN Group) melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan afiliasinya maupun yang diinisiasikan sendiri oleh PT PLN Enjiniring.

Pendekatan yang dilakukan PT PLN Enjiniring untuk menindaklanjuti suara pelanggan dan memperoleh informasi serta umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi/masukan serta umpan balik pelanggan pada setiap tahapan pekerjaan;

#### • Policy

*PLN Enjiniring is always committed in providing the best service for all customers. Improvements in service quality and performance of PLN Enjiniring continue to be improved and various efforts are made to determine the level of customer satisfaction, both internal (PLN Group) and external customers.*

#### • Activity

*PLN Enjiniring always maintains and improves customer satisfaction and builds relationships with customers. One of the fulfillment of customer satisfaction is done by listening to the voice of customers, both current and potential customers. Meanwhile, to build relationships with customers is done by managing customer relationships and managing customer aspirations and complaints.*

*To fulfill customer satisfaction, PT PLN Enjiniring is done by listening, interacting and observing customer behavior in order to obtain information on products and services provided by PLN Enjiniring to internal customers (PLN Group) through coordination meetings held by PT PLN (Persero) and its affiliates as well as which was initiated by PT PLN Enjiniring.*

*The approach taken by PT PLN Enjiniring to follow up on customer voices and obtain customer information and feedback is as follows:*

- *Weekly and monthly coordination meetings are held to obtain information / input and customer feedback at each stage of work;*



- Media komunikasi (Telepon, SMS, email dan website) untuk menampung aspirasi dan keluhan pelanggan;
- Survey Kepuasan, Loyalitas dan Keterikatan Pelanggan yang dilakukan setiap tahun oleh Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat untuk memperoleh informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap kinerja, kualitas layanan dan produk PT PLN Enjiniring;
- In-depth interview yang dilakukan kepada pelanggan potensial;
- Pendekatan secara personal; dan
- Customer Day

PT PLN Enjiniring menindaklanjuti aspirasi, keluhan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki kinerja, mutu produk, dan kualitas layanan yang dilakukan PT PLN Enjiniring dengan cara:

- Mengoptimalkan fungsi kerja tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan/sesuai permintaan pelanggan;
- Melakukan kunjungan lapangan untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga tim proyek dapat merespon langsung keluhan pelanggan.

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui rapat formal, diskusi informal, survey, pameran, Customer Day dan media elektronik (Telepon, SMS, email dan website).

- *Communication media (telephone, SMS, email and website) to accommodate customer aspirations and complaints;*
- *Survey of Customer Satisfaction, Loyalty and Engagement that is conducted annually by the Business Development and Corporate Planning Sector to obtain information on customer perceptions of PLN Enjiniring performance, service quality and products;*
- *In-depth interviews conducted with potential customers;*
- *Personal approach; and*
- *Customer Day*

*PLN Enjiniring follows up on customer aspirations, complaints and feedback to improve performance, product quality, and service quality carried out by PLN Enjiniring by:*

- *Optimizing the project team work function to coordinate with customers and submit monthly work progress reports / according to customer requests;*
- *Conduct field visits to listen to customer voices, so that the project team can respond directly to customer complaints.*

*Regarding potential customers, customer votes are obtained through formal meetings, informal discussions, surveys, exhibitions, Customer Days and electronic media (telephone, SMS, e-mail and website).*



## Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara

*Corporate Social Responsibility Related to Responsibility to the State*

### • Kebijakan

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan negara dengan berkontribusi sesuai dengan bidang kerja dan usaha yang dijalankan. Tanggung jawab terhadap Negara diwujudkan dalam hal mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan dukungan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

### • Kegiatan

Dukung Program 35.000 MW, Menerangi Nusantara. Terkait program 35.000 MW yang ditugaskan Pemerintah kepada PLN dalam menerangi Nusantara, PT PLN Enjiniring memiliki kontribusi penting dalam mewujudkannya. Hal ini tampak jelas dari penugasan PLN kepada PT PLN Enjiniring untuk “mengawal” beberapa tugas strategis berkenaan dengan konsultasi pengerjaan berbagai proyek strategis. PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, yang merupakan mitra kerja PLN, untuk penggunaan jasa injenir dari PT PLN Enjiniring.

PT PLN Enjiniring sebagai Perusahaan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Perusahaan menyadari bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir Perusahaan telah memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 34.802 Milyar.

### • Policy

*PT PLN Enjiniring is committed to always supporting the country's development by contributing in accordance with the field of work and business being carried out. Responsibility to the State is manifested in terms of following the provisions of the applicable laws, compliance with the obligation to pay taxes and support for programs launched by the Government.*

### • Activity

*Support the 35,000 MW Program, Lighting the Archipelago. Regarding the 35,000 MW program assigned by the Government to PLN in lighting up the archipelago, PT PLN Enjiniring has an important contribution to make. This is evident from the assignment of PLN to PT PLN Enjiniring to “guard” several strategic tasks with regard to consulting the work of various strategic projects. PT PLN Enjiniring collaborates with several private companies, which are PLN partners, to use engineering services from PT PLN Enjiniring.*

*PT PLN Enjiniring as a Company always fulfills its tax payment obligations. The company realizes that the tax contribution paid can support and assist the government in various domestic development programs. During the last 5 (five) years, the Company has contributed tax amounting to Rp 34,802 billion..*



Adapun rincian kontribusi pajak selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

*The details of tax contributions for the last 5 (five) years are as follows.*

**RINCIAN KONTRIBUSI PAJAK SELAMA 5 TAHUN**  
**DETAILS OF TAX CONTRIBUTION FOR 5 YEARS**

Tahun	Jumlah (Rp Juta)
<i>Year</i>	<i>Amount (IDR Million)</i>
2022	25,689
2021	7,386
2020	4,947
2019	7,392
2018	5,056
<b>Total</b>	<b>50,470</b>

Selama 5 (lima) tahun terakhir, PT PLN Enjiniring belum pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi terkait dengan pemenuhan pembayaran pajak.

*During the last 5 (five) years, PLN Enjiniring has never received a warning or sanction regarding the fulfillment of tax payments.*



## Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditor

### Corporate Social Responsibility With Responsibility To Creditors

#### • Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Investor termasuk dalam hal ini adalah kreditor perusahaan. Dalam hubungan dengan Investor ditetapkan kebijakan sebagai berikut ;

1. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab.
2. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
3. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
4. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.
5. Menjaga kepercayaan investor.

#### • Pelaksanaan

PT PLN Enjiniring senantiasa berupaya untuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku maupun aturan internal lainnya. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi apa yang telah ditetapkan bisa terlihat dalam hal-hal berikut ini.

1. Perusahaan tidak pernah melakukan restrukturisasi utang selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Perusahaan memiliki kemampuan membayar utang yang baik.

#### • Policy

*In the Code of Conduct that has been established by PT PLN Enjiniring is regulated on The Relationship with Investors including in this case the creditors of the company. In relation to investors are set the following policie ;*

1. *Choose a trusted, credible and responsible investor.*
2. *Making work agreements that are mutually beneficial.*
3. *Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.*
4. *Provide actual, accurate and prospective information.*
5. *Maintain investor confidence.*

#### • Implementation

*PLN Enjiniring always strives to apply the rules set out in the Code of Conduct and other internal rules. Several things that show that the Company has fulfilled what has been determined can be seen in the following matters.*

1. *The company has never restructured its debt for the last 5 (five) years.*
2. *The company has a good debt repayment ability.*



## Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok

### Corporate Social Responsibility With Responsibilities To Suppliers

#### • Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok. Dalam hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Menilai secara obyektif, transparan dan akuntabel.
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
5. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

#### • Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

PT PLN Enjiniring akan senantiasa melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Untuk hal-hal yang pemenuhannya masih belum optimal akan segera ditindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga tanggung jawab Perusahaan kepada Pemasok dapat terpenuhi dengan baik dan selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

#### • Policy

*In the Code of Conduct established by PLN Enjiniring, it regulates Relationships with Work Partners / Suppliers. In relation to Business Partners / Suppliers, the following policies are established:*

1. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
2. *Assessing objectively, transparently and accountably.*
3. *Making work agreements that are mutually beneficial.*
4. *Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.*
5. *Provide sanctions if they do not fulfill the work contract.*

#### • Activity

*The implementation of goods and services procurement activities has complied with what has been determined by the Company.*

*PLN Enjiniring will always conduct evaluations based on the results of the survey that has been conducted. For matters whose fulfillment is still not optimal, it will be immediately followed up with corrective efforts so that the Company's responsibilities to suppliers can be fulfilled properly and will subsequently have a positive impact on the Company's performance in a sustainable manner.*



# Laporan Keuangan

*Financial Report*







## Akuntan Publik

### Public Accounting

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan PLN Enjiniring tahun buku 2021 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, PLN Enjiniring mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

PLN Enjiniring selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan

*The independent supervisory function of the Company's financial aspects is carried out by carrying out an External Audit examination conducted by a Public Accounting Firm (KAP). The External Auditor who examines PLN Enjiniring's financial statements for the 2022 financial year is determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and Audit Committee.*

*In the use of External Auditors, PLN Enjiniring refers to the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 17 / PMK.01 / 2008 dated February 5th, 2008 article 3 paragraph 1 which states that the provision of general audit services on the financial statements of an entity is carried out by KAP no longer than 6 (six) consecutive financial years and by a Public Accountant no longer than 3 (three) consecutive financial years.*

*PLN Enjiniring always strives to improve communication between the Public Accounting Firm, Audit Committee and Management to minimize obstacles that occur during the audit process. In order for the audit process to be in accordance with the Professional Standards of Accountants as well as work agreements and audit scopes that have been determined and completed in accordance with predetermined time targets, meetings are routinely held that discuss several significant important issues*

### KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Data Auditor Eksternal yang melakukan audit laporan keuangan PLN Enjiniring sebagai berikut.

### PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Data from the External Auditor who audited PLN Enjiniring's financial statements are as follows.



**TABEL DATA AUDITOR EKSTERNAL YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PLN ENJINIRING**  
**TABLE OF EXTERNAL AUDITOR DATA THAT CONDUCTS AUDIT ON THE FINANCIAL STATEMENT OF PLN ENJINIRING**

Tahun	Nama Kantor Akuntan Publik	Periode	Partner Pelaksana	Biaya Audit
Year	Name of Public Accountant Office	Period	Executor Partner	Cost of Audit
2022	Pricewaterhouse Cooper (PWC)	2 Tahun 2 Years	Firman Sababalat	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2021	Pricewaterhouse Cooper (PWC)	2 Tahun 2 Years	Firman Sababalat	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2020	Pricewaterhouse Cooper (PWC)	2 Tahun 2 Years	Daniel Kohar S.E.,Ak.,CPA	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2019	RSM Indonesia	2 Tahun 2 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2018	RSM Indonesia	2 Tahun 2 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2017	RSM Indonesia	2 Tahun 2 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2016	RSM Indonesia	2 Tahun 2 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)

## JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Pada Periode 2021, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PLN Enjiniring memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan, yaitu Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal.

## OTHER SERVICES ACCOUNTANTS PROVIDE

In the 2021 period, Public Accountants and Public Accounting Firms of PLN Enjiniring provide other services besides Financial Statement Audit services, namely Performance Evaluation Reports and Compliance Reports with Laws and Regulations and Internal Control.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/  
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK  
TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR  
THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022**

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Chairani Rachmatullah  
Alamat Kantor : Jl. KS Tubun I No. 2, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, 11420  
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Martono  
Alamat Kantor : Jl. KS Tubun I No. 2, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, 11420  
Jabatan : Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia

*On behalf of the Board of Director, we, the undersigned:*

1. Name : Chairani Rachmatullah  
Office address : Jl. KS Tubun I No. 2, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, 11420  
Position : President Director
2. Name : Martono  
Office address : Jl. KS Tubun I No. 2, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, 11420  
Position : Finance & Human Resource Director

menyatakan bahwa:

*declare that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *Responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
  - a. *All information in the Group's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
  - b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
3. *We are responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Thus, this statement is made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Director

Jakarta, 26 Mei/May 2023



The image shows two signatures in blue ink. The signature on the left is 'Chairani Rachmatullah' and the signature on the right is 'Martono'. There are two circular stamps: one for PT PLN and one for a 1000 Rupiah meter stamp with the serial number Q1ED6AKX059670867.

**Chairani Rachmatullah**  
Presiden Direktur/President Director

**Martono**  
Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia/  
Finance & Human Resource Director





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**Basis for opinion**

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

### **Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

### **Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*





- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
  - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
  - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
  - Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
  - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
  - *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

JAKARTA,  
26 Mei/May 2023

  
**Firman Sababalat, CPA**  
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1789



Prima Layanan Nasional Enjiniring  
00963/2.1025/AU.1/05/1789-2/1/V/2023

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021*	1 Januari/ January 2021*	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	6	510,298	472,295	384,648	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	366	2,696	3,546	Restricted cash in banks
Piutang usaha	8				Trade receivables
- Pihak berelasi		97,188	75,303	167,476	Related parties -
- Pihak ketiga		4,038	3,736	12,870	Third parties -
Piutang lain-lain	9				Other receivables
- Pihak berelasi		21,842	8,780	7,657	Related parties -
- Pihak ketiga		2,037	5,062	4,778	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	10	35,092	31,158	27,665	Finance lease receivables
Aset kontrak	11				Contract assets
- Pihak berelasi		112,483	222,822	258,439	Related parties -
- Pihak ketiga		9,380	8,713	12,982	Third parties -
Pajak dibayar di muka	23a				Prepaid taxes
- Pajak lainnya		59,282	59,265	74,829	Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka		4,215	15,110	20,201	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar		856,221	904,940	975,091	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	16,749	22,938	23,128	Restricted cash in banks
Piutang sewa pembiayaan	10	147,663	182,755	213,913	Finance lease receivables
Investasi pada ventura bersama	12	12,373	11,764	9,851	Investments in joint venture
Aset tetap	13	11,245	20,899	31,522	Fixed assets
Pajak dibayar di muka	23a				Prepaid taxes
- Pajak lainnya		23,407	88,516	39,833	Other taxes -
- Pajak penghasilan badan		-	-	1,336	Corporate income taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka		181	2,532	6,291	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud		5,489	8,710	13,413	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya		9,074	7,105	16,375	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		226,181	345,219	355,662	Total Non-Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,082,402</b>	<b>1,250,159</b>	<b>1,330,753</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.



## PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

## Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021*	1 Januari/ January 2021*	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	14				Trade payables
- Pihak berelasi		402	2,611	-	Related parties -
- Pihak ketiga		56,706	73,782	134,900	Third parties -
Utang muka dari pelanggan	15	13,626	18,468	21,006	Advances from customer
Utang lain-lain		5,851	15,465	8,977	Other payables
Liabilitas kontrak	16				Contract liabilities
- Pihak berelasi		78,570	106,344	137,393	Related parties -
- Pihak ketiga		2,170	2,362	7,808	Third parties -
Utang pajak	23b				Taxes payable
- Pajak penghasilan badan		17,259	3,277	99	Corporate income taxes -
- Pajak lainnya		20,230	15,932	9,876	Other taxes -
Biaya masih harus dibayar	17	45,933	61,107	61,445	Accrued expenses
Liabilitas sewa		1,692	502	7,979	Lease liabilities
Utang deviden		-	-	9,704	Dividend payable
					Post-employment
Liabilitas imbalan pasca kerja	24	2,195	1,617	1,999	benefit obligation
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	18	24,008	32,900	32,978	Current maturity of long-term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		268,642	334,367	434,164	Total Current Liabilities
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18	-	23,119	55,050	Long-term loan - net of current maturity
					Post-employment
Liabilitas imbalan pasca kerja	24	35,667	32,052	25,886	benefit obligation
Liabilitas sewa		-	1,714	875	Lease liabilities
Utang lain-lain		330	369	142	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		35,997	57,254	81,953	Total Non-Current Liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>304,639</b>	<b>391,621</b>	<b>516,117</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham; modal dasar - 25.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh - 25.000.000 saham	19	25,000	25,000	25,000	Share capital - par value of Rp1,000 (full amount) per share; authorised - 25,000,000 shares; issued and fully paid - 25,000,000 shares
Saldo laba					Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya		5,169	5,169	5,169	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		741,894	729,811	659,940	Unappropriated -
Tambahan modal disetor		3,652	-	-	Additional paid-in capital
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain		2,048	(1,089)	9,329	Other comprehensive income/(loss)
Ekuitas <i>merging entity</i>		-	99,632	115,184	Equity merging entity
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		<b>777,763</b>	<b>858,523</b>	<b>814,622</b>	<b>Equity attributable to owner of the Company</b>
Kepentingan nonpengendali		-	15	14	Non-controlling interests
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>777,763</b>	<b>858,538</b>	<b>814,636</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1,082,402</b>	<b>1,250,159</b>	<b>1,330,753</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 2 Schedule

LAPORAN POSISI LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022  
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021*	
<b>PENDAPATAN</b>	20	<b>536,296</b>	<b>826,403</b>	<b>REVENUES</b>
BEBAN POKOK PENDAPATAN	21	(307,330)	(583,354)	COST OF REVENUES
<b>LABA BRUTO</b>		<b>228,966</b>	<b>243,049</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
BEBAN USAHA	22	(153,090)	(173,189)	OPERATING EXPENSES
<b>LABA USAHA</b>		<b>75,876</b>	<b>69,860</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
Penghasilan bunga		10,362	8,959	Finance income
Laba investasi pada ventura bersama	12	909	2,138	Gain on investments in joint ventures
Beban bunga	18	(5,212)	(9,090)	Interest expenses
Lain-lain - bersih		10,113	10,139	Others - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>92,048</b>	<b>82,006</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	23c	(9,241)	(8,184)	INCOME TAX EXPENSES
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>82,807</b>	<b>73,822</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income/(loss) for the year
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja karyawan	24	511	(787)	Remeasurement of post- employment benefit obligation
Pengukuran kembali nilai wajar atas atas investasi saham		2,716	(9,592)	Remeasurement of fair value of investments in shares
		3,227	(10,379)	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>86,034</b>	<b>63,443</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		82,807	73,821	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	1	Non-controlling interest
<b>JUMLAH</b>		<b>82,807</b>	<b>73,822</b>	<b>TOTAL</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		86,034	63,442	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		-	1	Non-controlling interest
<b>JUMLAH</b>		<b>86,034</b>	<b>63,443</b>	<b>TOTAL</b>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY  
Lampiran 3 Schedule

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022**  
(Expressed in millions of Rupiah)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Catatan/ Notes	Modal diterbitkan disebelum issued and paid-up capital	Tambahan disebelum dibayar Additional paid-up capital	Saldo laba/retained earnings Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/retained earnings Bakim diformulasikan penggunaannya/ Unappropriated	Pengukuran kembali investasi kepada Remeasurement of employment benefit obligation	Komponen ekuitas lain/ Other components of equity	Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ Changes in fair value of financial assets and liabilities through other comprehensive income	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ attributable to owners of the parent entity	Ekuitas neto/ Equity merging entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as at 1 January 2021* before restatement	Diferensi in value of business combination transaction of entity under common control	Balance as at 1 January 2021* after restatement	Cash dividend Profit for the year Total comprehensive income for the year	Balance as at 31 December 2021	Cash dividend Profit for the year Total comprehensive income for the year	Diferensi in value of business combination transaction of entity under common control	Balance as at 31 December 2022	
																				Perbedaan dari nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali
	25,000	-	5,169	699,940	(6,685)	16,014	699,438	-	-	14	699,452									
	-	-	-	-	-	-	115,184	115,184	-	-	115,184									
	25,000	-	5,169	699,940	(6,685)	16,014	814,622	115,184	-	14	814,636									
19	-	-	-	69,871	-	-	(19,541)	(19,541)	-	-	(19,541)									
	-	-	-	-	(826)	(9,952)	(10,379)	3,950	1	-	73,822									
	25,000	-	5,169	729,811	(7,511)	6,422	868,523	99,632	-	15	868,538									
	-	-	-	(69,872)	-	-	(69,872)	-	-	-	(69,872)									
	-	-	-	81,955	-	-	82,807	852	-	-	82,807									
	-	-	-	-	511	2,716	3,227	-	-	-	3,227									
	-	3,652	-	-	(90)	-	(96,922)	(100,484)	-	(15)	(96,937)									
	25,000	3,652	5,169	741,894	(7,090)	9,138	777,763	-	-	-	777,763									

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* AS restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 4/1 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022  
(Expressed in millions of Rupiah)

	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021*	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Laba sebelum pajak	92,048	82,006	Profit before tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak:			Adjustments to reconcile profit before tax:
Laba investasi pada ventura bersama	(909)	(2,138)	Gain on investments in joint ventures
Pendapatan dividen dari investasi saham	(750)	-	Dividend income from investment in shares
Beban imbalan pasca kerja	7,830	7,334	Post-employment benefit expense
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain - neto	687	8,595	Net allowances for impairment of trade and other receivables
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	15,459	12,701	Depreciation of fixed assets and right-of-use assets
Amortisasi perangkat lunak	5,966	7,053	Amortisation of software
Beban bunga	5,212	9,090	Interest expenses
Penghasilan bunga	(10,362)	(8,959)	Finance income
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>115,181</u>	<u>115,682</u>	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
Piutang usaha	(42,996)	98,591	Trade receivables
Piutang lain-lain	(31,671)	(7,286)	Other receivables
Aset kontrak	6,900	39,886	Contract assets
Pajak dibayar di muka	(9,066)	(32,118)	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	946	8,850	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud	(3,151)	(2,350)	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	668	(322)	Other non-current assets
Utang usaha	25,040	(58,507)	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	(4,757)	(2,538)	Advances from customer
Utang lain-lain	1,146	6,715	Other payables
Liabilitas kontrak	(21,064)	(36,495)	Contract liabilities
Utang pajak lainnya	6,701	6,056	Other taxes payable
Biaya masih harus dibayar	(10,887)	(338)	Accrued expenses
Penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(366)	-	Placement of restricted cash in banks
Penarikan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	6,189	1,040	Withdrawal of restricted cash in banks
Penerimaan dari pelanggan atas piutang sewa pembiayaan	31,158	27,665	Receipts from customers of finance lease receivables
Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai	19,089	-	Restitution of value added tax
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	-	335	Restitution of corporate income tax
Pembayaran bunga	(5,212)	(9,090)	Payments for interest expenses
Penerimaan bunga	10,362	8,959	Interest received
Pembayaran imbalan pasca kerja	(2,285)	(2,337)	Payments of post-employment benefit
Pembayaran pajak penghasilan badan	(10,723)	(5,006)	Payments of corporate income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>81,202</u>	<u>157,392</u>	Net cash provided by operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas atas transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali - neto	65,384	-	Cash receipts of business combination entity under common control - net
Penerimaan dividen	1,050	225	Receipts of dividends
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas investasi	<u>66,434</u>	<u>225</u>	Net cash provided by investing activities

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 4/2 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2022  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2022  
(Expressed in millions of Rupiah)

	<u>31 Desember/ December 2022</u>	<u>31 Desember/ December 2021*</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran liabilitas sewa	(7,750)	(8,716)	<i>Payments of lease liabilities</i>
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(32,011)	(32,009)	<i>Payments for long-term loan</i>
Pembayaran dividen	<u>(69,872)</u>	<u>(29,245)</u>	<i>Payment of dividends</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(109,633)</u>	<u>(69,970)</u>	<i>Net cash used in financing activities</i>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>38,003</b>	<b>87,647</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u><b>472,295</b></u>	<u><b>384,648</b></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><u><b>510,298</b></u></u>	<u><u><b>472,295</b></u></u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (“Perusahaan”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 Oktober 2002 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Akta Notaris Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 22 September 2022 dari Muhammad Hanafi, S.H., mengenai perubahan komposisi direksi dan komisaris Perusahaan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan terkait amandemen anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 12 Oktober 2022 No. AHU-AH.01.09-0064789.

Perusahaan berdomisili di Jakarta. Kantor pusat berkedudukan di Jalan KS Tubun I No. 2, Jakarta. Perusahaan merupakan entitas anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”). Kegiatan komersial Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2003.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (“AMDAL”);
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan dan pembangunan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi listrik;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi; dan
- k. Penyediaan atau manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut “Grup”) masing-masing sebanyak 635 dan 619 (tidak diaudit).

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (“the Company”) was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 9 dated 3 October 2002 of Haryanto S.H., a notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decision Letter No.C-00184.HT.01.01TH.2003 dated 6 January 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.kom 19, Supplement No. 1891 dated 7 March 2003.

The Company’s Notarial Deed have been amended several times, recently by Notarial Deed No. 56 dated 22 September 2022 of Muhammad Hanafi, S.H., related to change of the composition of board of director and board of commissioner, which notification regarding the amendment of its Article of Association had been duly received by Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia by virtue of its letter dated 12 October 2022 No. AHU-AH.01.09-0064789.

The Company is domiciled in Jakarta. The headquarters is located in Jalan KS Tubun I No. 2, Jakarta. The Company is a subsidiary of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (“PLN”). The commercial activity of the Company started on 1 January 2003.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of the Company’s activities encompasses engineering, procurement and construction, operation and maintenance within the electricity and non electricity sectors. The activities are as follows:

- a. Engineering consultancy services and/or project management including services related to project integrator electricity;
- b. Study of electrical systems;
- c. Study of environmental impact analysis (“EIA”);
- d. Information technology;
- e. Education and training;
- f. Research and development;
- g. Electricity supply;
- h. Planning, procurement and construction or installation (construction services) of the generation, transmission and/or distribution of electricity;
- i. Maintenance and/or operation of the generation, transmission and/or distribution;
- j. Processing, stockpiling, transportation, trade, installation operation and maintenance of oil and/or gas; and
- k. Provision or manufacturing of various items of electrical equipment for electrical transmission and also for the transmission and distribution of electricity.

As at 31 December 2022 and 2021, the Company and its subsidiary (collectively referred to as the “Group”)’s total number of employees was 635 and 619 (unaudited), respectively.



## Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM (lanjutan)

## b. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
<b>Komisaris</b>			<b>Commissioner</b>
Komisaris Utama	Bob Saril	Ahmad Rofik	President Commissioner
Komisaris	M.R. Karliansyah	M.R. Karliansyah	Commissioner
Komisaris	Edward Siagian	Edward Siagian	Commissioner
Komisaris	Fritz Edward Siregar	Hardiv Harris Situmeang	Commissioner

Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
<b>Direktur</b>			<b>Director</b>
Direktur Utama	Chairani Rachmatullah	Didik Sudarmadi	President Director
Direktur	Martono	Martono	Director
Direktur	Kurnia Rumdhony	Bernadus Sudarmanta	Director
Direktur	Muhammad Firmansyah	Muhamad Reza	Director

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
<b>Komite Audit</b>			<b>Audit Committee</b>
Ketua	Edward Siagian	Edward Siagian	Chairman
Sekretaris	Bowo Setiadji	Bowo Setiadji	Secretary
Anggota	Risma Royani	Risma Royani	Member
Anggota	Julita Safitri Ewani	Julita Safitri Ewani	Member

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

## a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali untuk akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain yang dijelaskan dalam masing-masing kebijakan akuntansi. Laporan keuangan juga disusun atas dasar konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan konsolidasian Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

## 1. GENERAL (continued)

## b. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

	2022	2021	
<b>Commissioner</b>			<b>Commissioner</b>
President Commissioner	Bob Saril	Ahmad Rofik	President Commissioner
Commissioner	M.R. Karliansyah	M.R. Karliansyah	Commissioner
Commissioner	Edward Siagian	Edward Siagian	Commissioner
Commissioner	Fritz Edward Siregar	Hardiv Harris Situmeang	Commissioner

The composition of the Company's Board of Directors was as follows:

	2022	2021	
<b>Director</b>			<b>Director</b>
President Director	Chairani Rachmatullah	Didik Sudarmadi	President Director
Director	Martono	Martono	Director
Director	Kurnia Rumdhony	Bernadus Sudarmanta	Director
Director	Muhammad Firmansyah	Muhamad Reza	Director

The composition of the Company's Audit Committee was as follows:

	2022	2021	
<b>Audit Committee</b>			<b>Audit Committee</b>
Chairman	Edward Siagian	Edward Siagian	Chairman
Secretary	Bowo Setiadji	Bowo Setiadji	Secretary
Member	Risma Royani	Risma Royani	Member
Member	Julita Safitri Ewani	Julita Safitri Ewani	Member

## 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

## a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The financial statements have been prepared on the basis of the historical cost concept, except for certain accounts which are prepared based on other measurement described in the respective accounting policies. The financial statements have also been prepared on the basis of accrual concept, except for the statements of cash flows. The statements of cash flows have been prepared using the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income and expense have been shown separately.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. Areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")**

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"

Standar baru, amendemen dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa - Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa-balik"
- Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"
- Siaran pers PSAK 24 "Imbalan Kerja".

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Perusahaan, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada periode berjalan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")**

The adoption of the following new standards, interpretation, amendments and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2022 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment SFAS No. 22, "Business Combinations - Reference to the Conceptual Framework for Financial Reporting"
- Amendment SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract."
- Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"
- Annual Improvement to SFAS No. 71, "Financial Instruments"
- Annual Improvement to SFAS No. 73, "Leases"

New standard, amendments and revisions issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- SFAS No. 74, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-current"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"
- Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Long-term Liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS No. 16, "Property, Plant and Equipment - Proceeds before Intended Use"
- Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"
- Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"
- Amendment to SFAS No. 73, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback Transaction"
- Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contracts regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"
- Press release SFAS 24 "Employee Benefit".

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja 11/2020 dan PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Company, therefore the impact of the changes is recorded entirely in the financial statements for the current year.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)**

Standar baru, amendemen, dan revisi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali untuk Amendemen PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan", Amendemen PSAK No. 73, revisi PSAK No. 101 dan 109 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, dan PSAK No. 74 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen pada laporan keuangan Grup.

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi**

**i. Entitas anak**

**- Konsolidasi**

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

**- Akuisisi**

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)**

The above new standard, amendments and revisions are effective beginning 1 January 2023, except for Amendment to SFAS No. 1 "Presentation of Financial Statements – Long-term Liabilities with Covenants", Amendment to SFAS No. 73, revisions to SFAS No. 101 and 109 which are effective beginning 1 January 2024, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74 which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's financial statements.

**c. Principles of consolidation**

**i. Subsidiary**

**- Consolidation**

Subsidiary is all the entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect such returns through its power over the entity.

A subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and is de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiary have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

**- Acquisition**

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired and the liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)**

**i. Entitas anak (lanjutan)**

**- Akuisisi (lanjutan)**

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

**ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian**

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

**i. Subsidiary (continued)**

**- Acquisition (continued)**

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

**ii. Changes in ownership interest in subsidiary without loss of control**

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of the net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)**

**iii. Pelepasan entitas anak**

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama**

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

**- Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

*Goodwill* pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar aset neto teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

**iii. Disposal of subsidiary**

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

**iv. Accounting for associates and joint ventures**

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

**- Acquisitions**

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, the equity instruments issued or the liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

*Goodwill* on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)**

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)**

**- Akuisisi (lanjutan)**

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

**- Metode ekuitas**

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

**- Pelepasan**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di mana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi. Hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

**iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)**

**- Acquisitions (continued)**

*When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.*

**- Equity method**

*Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed, where necessary, to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.*

*Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.*

*At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.*

**- Disposals**

*An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and subsequently any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.*

*Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate or a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss. Only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.*



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

## d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

## i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

## ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	2022*	2021*	
Mata uang			Currency
US\$	15,731	14,269	US\$
CNY	2,257	2,238	CNY

\* dalam nilai penuh/in full amount

## e. Transaksi pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Kebijakan Perusahaan atas transaksi tersebut adalah dengan menggunakan persyaratan komersial normal.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

## d. Foreign currency transaction and balances

## i. Functional and presentation currency

Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional and the Group's presentation currency.

## ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

## e. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties as defined in SFAS No.7 "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Company with Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

The Company elected to disclose the transaction with the Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transactions with the related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of transactions between unrelated parties.

The Company's policy on such transactions is to use normal commercial terms.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Aset keuangan**

**f. Financial assets**

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran**

**i. Classification, recognition and measurement**

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

The Group classified its financial assets in the following measurement categories:

- Financial assets measured at amortised cost; and
- Financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya "semata dari pembayaran pokok dan bunga".

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether the cash flows are solely payment of principal and interest ("SPPI").

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Financial assets held at amortised cost

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis "dimiliki untuk mendapatkan arus kas" dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

This classification applies to debt instruments which are held under a "hold to collect" business model and which have cash flows that meet SPPI criteria.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

At initial recognition, trade receivables that do not have a significant financing component, are recognised at their transaction price. Other financial assets are initially recognised at fair value minus related transaction costs. They are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Any gains or losses on derecognition or modification of a financial asset held at amortised cost are recognised in profit or loss.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Financial assets held at FVTPL

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

The classification applies to the following financial assets. In all cases, transaction costs are immediately expensed in profit or loss.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau di mana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or FVOCI. Subsequent fair value gains or losses are taken to profit or loss.

- Equity investments which are held for trading or where the FVOCI election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**f. Aset keuangan (lanjutan)**

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividends diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial assets (continued)**

**i. Classification, recognition and measurement (continued)**

Financial assets held at FVTPL (continued)

- Derivatives which are not designated as a hedging instrument. All subsequent fair value gains or losses are recognised in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Financial assets held at FVOCI

This classification applies to the following financial assets:

- Debt instruments that are held under a business model where they are held for collection of contractual cash flows and also for sale ("collect and sell") and which have cash flows that meet the SPPI criteria.

All movements in the fair value of these financial assets are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue (including transaction costs by applying the effective interest method), gains or losses arising on derecognition and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

- Equity investments where the Group has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income.

The election can be made for each individual investment; however, it is not applicable to equity investments held for trading. Fair value gains or losses on revaluation of such equity investments, including any foreign exchange component, are recognised in other comprehensive income. When the equity investment is derecognised, there is no reclassification of fair value gains or losses previously recognised in other comprehensive income to profit or loss. Dividends are recognised in profit or loss when the right to receive payment is established.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**f. Aset keuangan (lanjutan)**

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

- Investasi ekuitas di mana Grup telah memilih secara tak terbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain. (lanjutan)

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

**ii. Penghentian pengukuran**

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

**g. Penurunan nilai aset keuangan**

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian ("KKE") terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah KKE. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**f. Financial assets (continued)**

**i. Classification, recognition and measurement (continued)**

Financial assets held at FVOCI (continued)

- Equity investments where the Group has irrevocably elected to present fair value gains and losses on revaluation in other comprehensive income. (continued)

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

**ii. Derecognition**

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and when the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

**g. Impairment of financial assets**

The Group assesses on a forward-looking basis, the expected credit losses ("ECL") associated with its financial assets carried at amortised cost and FVOCI. The impairment method applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of ECL. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**h. Saling hapus antar instrumen keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**i. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**j. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya**

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

**k. Piutang usaha dan piutang lain-lain**

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Offsetting financial instruments**

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and when there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**i. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of three months or less from the date of placement that are not used as collateral or that are unrestricted.

**j. Restricted cash in banks**

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash and cash equivalents.

**k. Trade and other receivables**

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss. When a trade or other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**I. Biaya dibayar di muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

**m. Aset tetap**

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

**Tahun/Years**

Perlengkapan umum

5

General equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

**m. Fixed assets**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of fixed assets includes: (a) the purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of fixed assets with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from the disposal of the asset after deducting the estimated costs of disposal, if the asset is already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is recognised using the straight-line method based on the estimated economic useful life of the assets as follows:

The estimated useful life, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, and the effect of any changes in estimates is accounted for on a prospective basis.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service a fixed assets are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Land rights are recognised at cost and not depreciated.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to the renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised over the contractual life of the land rights.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**m. Aset tetap (lanjutan)**

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73: Sewa. Apabila hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16: Aset Tetap.

**n. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset nonkeuangan, selain *goodwill*, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur dengan menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK yang lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak akan dipulihkan lagi.

Beban dan pembalikan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

**o. Utang usaha dan utang lain-lain**

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok di luar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Fixed assets (continued)**

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land right in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group but give the rights to use the underlying assets, the Group treats these transactions as leases for accounting purposes under SFAS No. 73: Leases. If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16: Fixed Assets.

**n. Impairment of non-financial asset**

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash generating unit).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill, would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Any reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the operating profit line.

**o. Trade and other payables**

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**p. Pinjaman**

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, dengan selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait. Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan dari tanggal pelaporan.

**q. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan

Grup telah menerapkan PSAK No. 72, yang mengharuskan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah *margin*.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Borrowing**

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost, with any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for financing costs and amortised over the period of the facility to which it relates. Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months from the reporting date.

**q. Revenue and expense recognition**

Revenue

The Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Pendapatan (lanjutan)

Grup telah menerapkan PSAK No. 72, yang mengharuskan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian: (lanjutan)

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi saat:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual

**r. Imbalan kerja karyawan**

Imbalan pasca kerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pada hukum yang berlaku di Indonesia ("Peraturan Ketenagakerjaan") atau Peraturan Perusahaan, mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau Peraturan Perusahaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau Peraturan Perusahaan adalah program imbalan pasti.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition (continued)**

Revenue (continued)

The Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment: (continued)

5. Recognise revenue when the performance obligation has been satisfied via the transferral of a promised good or service to a customer (transferral is considered to have occurred when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at:

- a. Point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

The payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of the performance obligation that has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligation that has been satisfied.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

**r. Employee benefits**

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity. The Company has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the manpower regulations on the applicable law in Indonesia ("the Manpower Regulations") or the Company Regulation, whichever is higher. Since the Manpower Regulations or the Company Regulation sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under the Manpower Regulations or the Company Regulation are defined benefit plans.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**r. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pasca kerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang di mana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain pada tahun di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di kerugian komprehensif lain di bagian ekuitas.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

**s. Provisi**

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Employee benefits (continued)**

Post-employment benefits (continued)

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in other comprehensive loss in equity section.

Other long-term benefits

Other long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit* Method. Past service costs are recognised immediately in profit or loss. The Group recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged to other comprehensive income in the period in which they occur.

The long-term post-employment benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.

**s. Provisions**

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, when it is probable that the Group will be required to settle the obligation and when a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**s. Provisi (lanjutan)**

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

**t. Sewa**

**Grup sebagai penyewa**

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, Grup menerapkan cara praktis untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan penjaminan.

Sewa diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Provisions (continued)**

*The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration that is expected to be required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. In cases where a provision is measured using the cash-flows estimate to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of such cash flows.*

*When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and if the amount of the receivable can be measured reliably.*

**t. Leases**

**The Group as a lessee**

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:*

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

*At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:*

- *The initial amount of the lease liability;*
- *Lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *Initial direct cost incurred; and*
- *An estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

*For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group has used the practical expedient of not separating non-lease payments from lease components by class of underlying assets.*

*Lease terms are negotiated on individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.*

*Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Group.*

*Assets and liabilities arising from lease arrangements are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**t. Sewa (lanjutan)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset hak-guna juga diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2n.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Leases (continued)**

**The Group as a lessee (continued)**

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- Penalty payments for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" in the consolidated statements of financial position. Right-of-use assets are also tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2n.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**t. Sewa (lanjutan)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**Grup sebagai pesewa**

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Dalam sewa pembiayaan, di mana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Leases (continued)**

**The Group as a lessee (continued)**

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- Determines the lease term of the modified lease;
- Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the remainder of the lease term;
- Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- Makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

**The Group as a lessor**

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognises and presented a finance lease receivables in the consolidated statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**u. Perpajakan**

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Grup dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pokok pendapatan.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban usaha diakui sebagai utang pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan di mana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation**

Final income tax

According to the tax regulation, certain Group income is subject to final tax.

For the purpose of financial statement preparation, final income tax expenses are stated in the consolidated statement of profit or loss as part of the cost of revenues.

Tax expenses on income subjected to final tax are recognised proportionally with total income in the current period. The differences between the final income tax paid and the total charged as operating expenses are recognised as tax payable.

The difference between the carrying amount of assets and liabilities related to final income tax are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Non-final income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rate that has been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investment in associates, except from deferred income tax liabilities where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**u. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak penghasilan di luar pajak final (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tanggungan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

Pajak tanggungan tidak dihitung karena tidak terdapat perbedaan temporer yang signifikan antara dasar pengenaan pajak dan komersial.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation (continued)**

Non-final income tax (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

Deferred tax is not accounted as there is no significant temporary difference identified for commercial and tax base values.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditinjau kembali secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode di mana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2, the Group's management are required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**Critical judgements in applying accounting policies**

In the process of applying the accounting policies described in Note 2, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In order to determine the incremental borrowing rate, the Group must consider a number of factors and reliably quantify any adjustments; so doing requires careful judgement. Only in this way can the final discount rates be determined.

In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan  
akuntansi (lanjutan)**

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

**Sumber ketidakpastian estimasi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung jumlah kewajiban tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan di masa depan, tingkat perputaran tahunan karyawan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakui di penghasilan komprehensif lain dan ketika terjadi. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi Grup material dapat mempengaruhi kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja dan penghasilan komprehensif lain.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 24.

Pengakuan pendapatan kontrak

Grup mengakui pendapatan kontrak yang masih dalam proses berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. Asumsi diperlukan dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Pendapatan kontrak diungkapkan dalam Catatan 20.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGEMENTS (continued)**

**Critical judgements in applying accounting policies  
(continued)**

Leases (continued)

*In determining the lease term, management considers all the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or to not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if it is reasonably certain that the lease will be extended (or not terminated).*

**Sources of estimation uncertainty**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation used at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:*

Post-employment benefits

*The determination of employee benefits obligations is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increases, annual employee turn-over rates, disability rates, retirement ages and mortality rates. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognised immediately in other comprehensive income and when they occur. While management is of the opinion that assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for post-employment benefits and other comprehensive income.*

*Assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 24.*

Contract revenue recognition

*The Group recognises contract revenues that are still in progress based on the percentage-of-completion method. The stage of completion is measured based on the proportion of contract costs incurred for the work performed up to the calculation date compared to the estimated total contract costs. Assumptions are required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of the estimated income. Contract revenue is disclosed in Note 20.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI**

**Pelepasan dan akuisisi entitas anak**

Efektif pada tanggal 28 Juli 2022, sesuai dengan Akta No.101, 103 dan 104 dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham dengan PT Rekadaya ElektriKA ("RE"), anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB"), yang merupakan entitas sepengendali di bawah PLN, untuk menjual 125.074.552 (nilai penuh) lembar saham biasa atau setara 99,99% kepemilikan atas PT Prima Power Nusantara ("PPN") dan mengakuisisi 93.411.836 (nilai penuh) lembar saham biasa atau setara dengan 99,80% kepemilikan atas PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC") dengan nilai pengalihan bersih sebesar Rp65.384 dan RE telah melakukan pembayaran nilai pengalihan bersih tersebut. Nilai buku bersih pelepasan dan akuisisi untuk porsi kepemilikan Perusahaan adalah sebesar Rp46.268. Selisih sebesar Rp19.116 antara nilai pengalihan bersih dengan nilai buku bersih yang dilepas dicatat dalam akun ekuitas sebagai tambahan modal disetor. Ekuitas dari REC sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai ekuitas *merging entities* pada bagian ekuitas.

Transaksi ini dibukukan sesuai dengan PSAK 38 – Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali karena Perusahaan dan RE merupakan entitas sepengendali di bawah PLN.

Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal transaksi adalah sebagai berikut:

	<u>28 Juli/ July 2022</u>
Imbalan yang diterima:	
Kas yang diterima - neto	65,384
Dikurangi dengan:	
Nilai buku aset yang dilepas - neto	<u>(46,268)</u>
<b>Tambahan modal disetor</b>	<b><u>19,116</u></b>
Dampak pajak (Catatan 23c)	<u>(15,464)</u>
<b>Tambahan modal disetor setelah pajak</b>	<b><u>3,652</u></b>

Sesuai dengan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", transaksi pelepasan entitas sepengendali tidak perlu disajikan kembali seolah-olah tidak dikonsolidasikan oleh Perusahaan sejak 1 Januari 2021.

**4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON CONTROL**

**Divestment and acquisition of subsidiary**

Effective on 28 July 2022, according to Notarial Deed No.101, 103 and 104 of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company entered into a sales purchase agreement with PT Rekadaya ElektriKA ("RE"), subsidiary of PT Pembangkitan Jawa Bali ("PJB"), which is an entity under common control of PLN, to sell 125,074,552 (full amount) ordinary shares or equivalent to 99.99% ownership of PT Prima Power Nusantara ("PPN") and acquire 93,411,836 (full amount) ordinary shares or equivalent to 99.80% of ownership of PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC") with a net consideration amounting to Rp65,384 and RE has fully paid the net consideration. The net book value of the disposal and acquisition which are part of the Company's ownership are Rp46,268. The difference of Rp19,116 between net consideration and net book value disposed was recorded as additional paid-in capital. The equity of REC prior to the date of combination is presented as equity *merging entities* in equity section.

The transaction was recorded in accordance with SFAS 38 – Business Combination of Entities under Common Control since the Company and RE are entities under common control of PLN.

Calculation of additional paid-in capital at transaction date is as follows:

Cash consideration received:	
Cash received - net	65,384
Less:	
Book value of asset disposed - net	<u>(46,268)</u>
<b>Additional paid-in capital</b>	<b><u>19,116</u></b>
Tax impact (Note 23c)	<u>(15,464)</u>
<b>Additional paid-in capital after tax</b>	<b><u>3,652</u></b>

In accordance with PSAK No. 38 "Business Combinations of Entities Under Common Control", divestment transactions of entities under common control not required to be restated as if it had not been consolidated by the Company since 1 January 2021.

## Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  
(lanjutan)Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian -  
akuisisi entitas anak

Sesuai dengan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", transaksi akuisisi antar entitas sepengendali ini dibukukan dengan menggunakan metode seperti penyatuan kepemilikan ("pooling of interest method"). Dengan menggunakan metode ini, laporan keuangan Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021 telah disajikan kembali sedemikian rupa seolah-olah akuisisi tersebut telah efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, yang merupakan permulaan dari periode sajian paling awal. Selain itu, Grup juga telah menyesuaikan dampak reklasifikasi akun dan eliminasi sehubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian antara para pihak.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut:

## 4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON CONTROL (continued)

Restatement on consolidated financial statements -  
acquisition of subsidiary

In accordance with SFAS No. 38, "Business Combinations of Entities Under Common Control", acquisition transactions between entities under common control are accounted for as if using the pooling of interest method. By using this method, the Group's financial statements as at and for the years ended 31 December 2021 and 1 January 2021, have been restated in such a way as if the acquisition had been effective since 1 January 2021, which is the beginning of the earliest period presented. In addition, the Group had also adjusted the impact of the accounts reclassification and elimination in connection with the related sale and purchase transactions between parties.

The Group's consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, which has been restated is as follows:

31 Desember/December 2021						
Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated		
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	450,783	21,512	472,295	-	472,295	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2,696	-	2,696	-	2,696	Restricted cash in banks
Piutang usaha						Trade receivables
- Pihak berelasi	66,232	9,071	75,303	-	75,303	Related parties -
- Pihak ketiga	1,931	1,805	3,736	-	3,736	Third parties -
Piutang lain-lain						Other receivables
- Pihak berelasi	8,780	-	8,780	-	8,780	Related parties -
- Pihak ketiga	5,062	-	5,062	-	5,062	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	31,158	-	31,158	-	31,158	Finance lease receivables
Aset kontrak						Contract assets
- Pihak berelasi	187,440	35,382	222,822	-	222,822	Related parties -
- Pihak ketiga	5,072	3,641	8,713	-	8,713	Third parties -
Pajak dibayar di muka	59,265	-	59,265	-	59,265	Prepaid taxes
- Pajak lainnya						Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka	12,557	2,553	15,110	-	15,110	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar	830,976	73,964	904,940	-	904,940	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	22,938	-	22,938	-	22,938	Restricted cash in banks
Piutang sewa pembiayaan	182,755	-	182,755	-	182,755	Finance lease receivables
Investasi pada ventura bersama	11,764	-	11,764	-	11,764	Investments in joint venture
Aset tetap	20,801	98	20,899	-	20,899	Fixed assets
Pajak dibayar di muka						Prepaid taxes
- Pajak lainnya	46,245	42,271	88,516	-	88,516	Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2,532	-	2,532	-	2,532	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud	8,330	380	8,710	-	8,710	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	6,490	615	7,105	-	7,105	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	301,855	43,364	345,219	-	345,219	Total Non-Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,132,831</b>	<b>117,328</b>	<b>1,250,159</b>	<b>-</b>	<b>1,250,159</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>



## Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  
(lanjutan)4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON  
CONTROL (continued)Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian -  
akuisisi entitas anak (lanjutan)Restatement on consolidated financial statements -  
acquisition of subsidiary (continued)Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal  
31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut:  
(lanjutan)The Group's consolidated statement of financial position as  
at 31 December 2021, which has been restated is as  
follows: (continued)

31 Desember/December 2021					
Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES</b>					
Utang usaha	66,764	9,629	76,393	-	76,393
Utang muka dari pelanggan	18,468	-	18,468	-	18,468
Utang lain-lain	15,465	-	15,465	-	15,465
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	106,344	-	106,344	-	106,344
- Pihak ketiga	2,362	-	2,362	-	2,362
Utang pajak					
- Pajak penghasilan badan	3,266	11	3,277	-	3,277
- Pajak lainnya	14,591	1,341	15,932	-	15,932
Biaya masih harus dibayar	54,739	6,368	61,107	-	61,107
Liabilitas sewa	502	-	502	-	502
Liabilitas imbalan pasca kerja	1,617	-	1,617	-	1,617
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	32,900	-	32,900	-	32,900
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	317,018	17,349	334,367	-	334,367
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>					
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	23,119	-	23,119	-	23,119
Liabilitas imbalan pasca kerja	31,705	347	32,052	-	32,052
Liabilitas sewa	1,714	-	1,714	-	1,714
Utang lain-lain	369	-	369	-	369
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	56,907	347	57,254	-	57,254
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>373,925</b>	<b>17,696</b>	<b>391,621</b>	<b>-</b>	<b>391,621</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>					

## Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  
(lanjutan)4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON  
CONTROL (continued)Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian -  
akuisisi entitas anak (lanjutan)Restatement on consolidated financial statements -  
acquisition of subsidiary (continued)Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal  
31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut:  
(lanjutan)The Group's consolidated statement of financial position as  
at 31 December 2021, which has been restated is as  
follows: (continued)

31 Desember/December 2021						
	Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham; modal dasar - 25.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh - 25.000.000 saham	25,000	93,599	118,599	(93,599)	25,000	Share capital - par value of Rp1,000 (full amount), per share; authorised - 25,000,000 shares; issued and fully paid - 25,000,000 shares
Saldo laba						Retained earnings
- Ditetapkan penggunaannya	5,169	-	5,169	-	5,169	Appropriated -
- Tidak ditentukan penggunaan	729,811	5,951	735,762	(5,951)	729,811	Unappropriated -
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(1,089)	82	(1,007)	(82)	(1,089)	Other comprehensive (loss)/income
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	-	-	99,632	99,632	Equity <i>merging entity</i>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>758,891</b>	<b>99,632</b>	<b>858,523</b>	<b>-</b>	<b>858,523</b>	<b>Equity attributable to owner of the Company</b>
Kepentingan nonpengendali	15	-	15	-	15	Non-controlling interests
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>758,906</b>	<b>99,632</b>	<b>858,538</b>	<b>-</b>	<b>858,538</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,132,831</b>	<b>117,328</b>	<b>1,250,159</b>	<b>-</b>	<b>1,250,159</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain  
konsolidasian Grup pada tahun yang berakhir  
31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut:The Group's restated consolidated statement of profit and  
loss and other comprehensive income for the year ended  
31 December 2021, which has been restated is as follows:

31 Desember/December 2021						
	Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>736,732</b>	<b>90,396</b>	<b>827,128</b>	<b>(725)</b>	<b>826,403</b>	<b>REVENUES</b>
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(500,492)	(74,282)	(574,774)	(8,580)	(583,354)	COST OF REVENUES
<b>LABA BRUTO</b>	<b>236,240</b>	<b>16,114</b>	<b>252,354</b>	<b>(9,305)</b>	<b>243,049</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
BEBAN USAHA	(170,916)	(11,578)	(182,494)	9,305	(173,189)	OPERATING EXPENSES
<b>LABA USAHA</b>	<b>65,324</b>	<b>4,536</b>	<b>69,860</b>	<b>-</b>	<b>69,860</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
Penghasilan bunga	8,321	638	8,959	-	8,959	Finance income
Laba investasi pada ventura bersama	2,138	-	2,138	-	2,138	Gain on investments in joint ventures
Beban bunga	(9,090)	-	(9,090)	-	(9,090)	Interest expenses
Lain-lain - neto	10,565	(426)	10,139	-	10,139	Others - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>77,258</b>	<b>4,748</b>	<b>82,006</b>	<b>-</b>	<b>82,006</b>	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan	(7,386)	(798)	(8,184)	-	(8,184)	Income tax expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>69,872</b>	<b>3,950</b>	<b>73,822</b>	<b>-</b>	<b>73,822</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>

## Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI  
(lanjutan)4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON  
CONTROL (continued)Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian -  
akuisisi entitas anak (lanjutan)Restatement on consolidated financial statements -  
acquisition of subsidiary (continued)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

The Group's restated consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2021, which has been restated is as follows: (continued)

	31 Desember/December 2021					
	Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Total/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b> (lanjutan)	<b>69,872</b>	<b>3,950</b>	<b>73,822</b>	<b>-</b>	<b>73,822</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b> (continued)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja karyawan	(826)	39	(787)	-	(787)	Remeasurement of post-employment benefit obligation
Pengukuran kembali nilai wajar atas investasi saham	(9,592)	-	(9,592)	-	(9,592)	Remeasurement of fair value of investments in shares
	(10,418)	39	(10,379)	-	(10,379)	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>59,454</b>	<b>3,989</b>	<b>63,443</b>	<b>-</b>	<b>63,443</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:						Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	69,871	3,950	73,821	-	73,821	Owners of the parent entity
	1	-	1	-	1	Non-controlling interest
<b>JUMLAH</b>	<b>69,872</b>	<b>3,950</b>	<b>738,822</b>	<b>-</b>	<b>73,822</b>	<b>TOTAL</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:						Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali	59,453	3,989	63,442	-	63,442	Owners of the parent entity
	1	-	1	-	1	Non-controlling interest
<b>JUMLAH</b>	<b>59,454</b>	<b>3,989</b>	<b>63,443</b>	<b>-</b>	<b>63,443</b>	<b>TOTAL</b>



## Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan) 4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON CONTROL (continued)

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian - akuisisi entitas anak (lanjutan)Restatement on consolidated financial statements - acquisition of subsidiary (continued)

Laporan arus kas konsolidasian Grup pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 disajikan kembali sebagai berikut:

The Group's restated consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2021, which has been restated is as follows:

	31 Desember/December 2021			
	Disajikan sebelumnya/ Previously presented	Penyesuaian/ Adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Laba sebelum pajak	77,258	4,748	82,006	Profit before tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak:				Adjustments to reconcile profit before tax:
Laba investasi pada ventura bersama	(2,138)	-	(2,138)	Gain on investments in joint ventures
Beban imbalan pasca kerja	7,280	54	7,334	Post-employment benefit expense
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain - neto	8,307	288	8,595	Net allowances for impairment of trade and other receivables
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	12,386	315	12,701	Depreciation of fixed assets and right-of-use assets
Amortisasi perangkat lunak	6,853	200	7,053	Amortisation of software
Beban bunga	9,090	-	9,090	Interest expenses
Penghasilan bunga	(8,321)	(638)	(8,959)	Finance income
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	110,715	4,967	115,682	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:				Changes in working capital:
Piutang usaha	88,468	10,123	98,591	Trade receivables
Piutang lain-lain	(7,285)	(1)	(7,286)	Other receivables
Aset kontrak	22,662	17,224	39,886	Contract assets
Pajak dibayar di muka	(22,649)	(9,469)	(32,118)	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	8,951	(101)	8,850	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud	(2,111)	(239)	(2,350)	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	48	(370)	(322)	Other non-current assets
Utang usaha	(36,726)	(21,781)	(58,507)	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	(2,538)	-	(2,538)	Advances from customer
Utang lain-lain	6,715	-	6,715	Other payables
Liabilitas kontrak	(35,735)	(760)	(36,495)	Contract liabilities
Utang pajak lainnya	127	5,929	6,056	Other taxes payable
Biaya masih harus dibayar	960	(1,298)	(338)	Accrued expenses
Penarikan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	352	688	1,040	Withdrawal of restricted cash in banks
Penerimaan dari pelanggan atas piutang sewa pembiayaan	27,665	-	27,665	Receipts from customers of finance lease receivables
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan	335	-	335	Restitution of corporate income tax
Pembayaran bunga	(9,090)	-	(9,090)	Payments for interest expenses
Penerimaan bunga	8,321	638	8,959	Interest received
Pembayaran imbalan pasca kerja	(2,337)	-	(2,337)	Payments of post-employment benefit
Pembayaran pajak penghasilan badan	(4,178)	(828)	(5,006)	Payments of corporate income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	152,670	4,722	157,392	Net cash provided by operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen	225	-	225	Receipts of dividends
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	225	-	225	Net cash provided by investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran liabilitas sewa	(8,694)	(22)	(8,716)	Payments of lease liabilities
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(32,009)	-	(32,009)	Payments for long-term loan
Pembayaran dividen	-	(29,245)	(29,245)	Payment of dividends
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(40,703)	(29,267)	(69,970)	Net cash used in financing activities
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>112,192</b>	<b>(24,545)</b>	<b>87,647</b>	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>338,591</b>	<b>46,057</b>	<b>384,648</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>450,783</b>	<b>21,512</b>	<b>472,295</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan) 4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON CONTROL (continued)

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian - akuisisi entitas anak (lanjutan)

Restatement on consolidated financial statements - acquisition of subsidiary (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari 2021 disajikan kembali sebagai berikut:

The Group's consolidated statement of financial position as at 1 January 2021, which has been restated is as follows:

1 Januari/January 2021						
	Disajikan sebelumnya/ Previously- presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	338,591	46,057	384,648	-	384,648	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2,858	688	3,546	-	3,546	Restricted cash in banks
Piutang usaha						Trade receivables
- Pihak berelasi	147,497	19,979	167,476	-	167,476	Related parties -
- Pihak ketiga	11,563	1,307	12,870	-	12,870	Third parties -
Piutang lain-lain						Other receivables
- Pihak berelasi	7,657	-	7,657	-	7,657	Related parties -
- Pihak ketiga	4,778	-	4,778	-	4,778	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	27,665	-	27,665	-	27,665	Finance lease receivables
Aset kontrak						Contract assets
- Pihak berelasi	210,059	48,380	258,439	-	258,439	Related parties -
- Pihak ketiga	5,115	7,867	12,982	-	12,982	Third parties -
Pajak dibayar di muka						Prepaid taxes
- Pajak lainnya	74,829	-	74,829	-	74,829	Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka	17,749	2,452	20,201	-	20,201	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar	848,361	126,730	975,091	-	975,091	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23,128	-	23,128	-	23,128	Restricted cash in banks
Piutang sewa pembiayaan	213,913	-	213,913	-	213,913	Finance lease receivables
Investasi pada ventura bersama	9,851	-	9,851	-	9,851	Investments in joint venture
Aset tetap	31,131	391	31,522	-	31,522	Fixed assets
Pajak dibayar di muka						Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	1,336	-	1,336	-	1,336	Corporate income taxes -
- Pajak lainnya	-	39,833	39,833	-	39,833	Other taxes -
Biaya dibayar di muka dan uang muka	6,291	-	6,291	-	6,291	Prepaid expenses and advances
Aset tak berwujud	13,072	341	13,413	-	13,413	Intangible assets
Aset tidak lancar lainnya	16,130	245	16,375	-	16,375	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	314,852	40,810	355,662	-	355,662	Total Non-Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,163,213</b>	<b>167,540</b>	<b>1,330,753</b>	<b>-</b>	<b>1,330,753</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	103,490	31,410	134,900	-	134,900	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	21,006	-	21,006	-	21,006	Advances from customer
Utang lain-lain	8,977	-	8,977	-	8,977	Other payables
Liabilitas kontrak						Contract liabilities
- Pihak berelasi	136,633	760	137,393	-	137,393	Related parties -
- Pihak ketiga	7,808	-	7,808	-	7,808	Third parties -
Utang pajak						Taxes payable
- Pajak penghasilan badan	58	41	99	-	99	Corporate income taxes -
- Pajak lainnya	7,433	2,443	9,876	-	9,876	Other taxes -
Biaya masih harus dibayar	53,779	7,666	61,445	-	61,445	Accrued expenses
Liabilitas sewa	7,979	-	7,979	-	7,979	Lease liabilities
Utang dividen	-	9,704	9,704	-	9,704	Dividend payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	1,999	-	1,999	-	1,999	Post-employment benefit obligation
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	32,978	-	32,978	-	32,978	Current maturity of long-term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	382,140	52,024	434,164	-	434,164	Total Current Liabilities

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI 4. BUSINESS COMBINATION ENTITY UNDER COMMON CONTROL (lanjutan) (continued)

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian - akuisisi entitas anak (lanjutan)

Restatement on consolidated financial statements - acquisition of subsidiary (continued)

Laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 1 Januari 2021 disajikan kembali sebagai berikut: (lanjutan)

The Group's consolidated statement of financial position as at 1 January 2021, which has been restated is as follows: (continued)

1 Januari/January 2021						
	Disajikan sebelumnya/ Previously-presented	REC	Jumlah/ Total	Eliminasi dan penyesuaian/ Elimination and adjustment	Disajikan kembali/ As restated	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	55,050	-	55,050	-	55,050	Long-term loan - net of current maturity
Liabilitas imbalan pasca kerja	25,554	332	25,886	-	25,886	Post-employment benefit obligation
Liabilitas sewa	875	-	875	-	875	Lease liabilities
Utang lain-lain	142	-	142	-	142	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	81,621	332	81,953	-	81,953	Total Non-Current Liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>463,761</b>	<b>52,356</b>	<b>516,117</b>	<b>-</b>	<b>516,117</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham; modal dasar - 25.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh - 25.000.000 saham	25,000	10,000	35,000	(10,000)	25,000	Share capital - par value of Rp1,000 (full amount) per share; authorised - 25,000,000 shares issued and fully paid - 25,000,000 per share
Saldo laba						Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	5,169	-	5,169	-	5,169	Appropriated -
- Tidak ditentukan penggunaannya	659,940	105,141	765,081	(105,141)	659,940	Unappropriated -
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	9,329	43	9,372	(43)	9,329	Other comprehensive income/(loss)
Ekuitas merging entity	-	-	-	115,184	115,184	Equity merging entity
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>699,438</b>	<b>115,184</b>	<b>814,622</b>	<b>-</b>	<b>814,622</b>	<b>Equity attributable to owner of the Company</b>
Kepentingan nonpengendali	14	-	14	-	14	Non-controlling interests
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>699,452</b>	<b>115,184</b>	<b>814,636</b>	<b>-</b>	<b>814,636</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,163,213</b>	<b>167,540</b>	<b>1,330,753</b>	<b>-</b>	<b>1,330,753</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

5. SUBSIDIARY

The Company has the following subsidiary:

Entitas anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2022	2021		2022	2021
REC <sup>1)</sup>	Jakarta	Jasa supervisi dan konsultan Supervision service and consultant	99.99	-	2010	116,404	-
PPN <sup>2)</sup>	Jakarta	Jasa engineering, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and Construction	-	99.99	2017	-	240,387

1) Diakuisisi dari RE pada tahun 2022/Acquired from RE in 2022

2) Perusahaan menjual 99.99% kepemilikan atas PPN pada tahun 2022 ke RE/The Company sold 99.99% of its ownership of PPN in 2022 to RE.



## Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 6. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Kas	1,081	1,986	Cash on hand
Kas di bank	387,105	425,309	Cash in banks
Deposito	<u>122,112</u>	<u>45,000</u>	Deposits
Jumlah	<u>510,298</u>	<u>472,295</u>	Total

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for details of transactions and balances with related parties.

## 7. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini merupakan rekening bank yang digunakan sebagai jaminan bank garansi untuk pelaksanaan proyek. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)	366	8,886	Related party (Note 25)
Pihak ketiga	<u>16,749</u>	<u>16,748</u>	Third parties
Jumlah	17,115	25,634	Total
Bagian lancar	<u>(366)</u>	<u>(2,696)</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>16,749</u>	<u>22,938</u>	Non-current portion

## 7. RESTRICTED CASH IN BANKS

This account represents cash in banks that was used as collateral on bank guarantees for project execution. As at 31 December 2022 and 2021, the restricted bank account balances were as follows:

## 8. PIUTANG USAHA

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi (Catatan 25)	97,428	91,762	Related parties (Note 25)
Pihak ketiga	<u>11,452</u>	<u>10,840</u>	Third parties
Jumlah	<u>108,880</u>	<u>102,602</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowances for impairment losses
Pihak berelasi	(240)	(16,459)	Related parties
Pihak ketiga	<u>(7,414)</u>	<u>(7,104)</u>	Third parties
Jumlah	<u>(7,654)</u>	<u>(23,563)</u>	Total
Jumlah piutang usaha - neto	<u>101,226</u>	<u>79,039</u>	Total trade receivables - net

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Belum jatuh tempo	8,150	25,528	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 s/d 60 hari	57,140	34,696	1 to 60 days
61 s/d 90 hari	12,065	3,729	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>31,525</u>	<u>38,649</u>	More than 90 days
Jumlah	108,880	102,602	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(7,654)</u>	<u>(23,563)</u>	Allowances for impairment losses
Jumlah piutang usaha - neto	<u>101,226</u>	<u>79,039</u>	Total trade receivables - net

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

## Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Saldo awal	23,563	20,848
Penambahan	562	3,544
Pemulihan	(253)	(829)
Dampak pelepasan entitas anak	(16,218)	-
Saldo akhir	<u>7,654</u>	<u>23,563</u>

Manajemen Grup menyatakan bahwa cadangan penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

## 8. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

Beginning balance  
Additions  
Reversal  
Effect of divestment of subsidiary  
Ending balance

## 9. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi (Catatan 25)	44,090	30,650
Pihak ketiga	2,037	5,062
Jumlah	<u>46,127</u>	<u>35,712</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Pihak berelasi	(22,248)	(21,870)
Pihak ketiga	-	-
Jumlah	<u>(22,248)</u>	<u>(21,870)</u>
Jumlah piutang lain-lain - neto	<u>23,879</u>	<u>13,842</u>

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Saldo awal	21,870	15,990
Penambahan	378	5,880
Saldo akhir	<u>22,248</u>	<u>21,870</u>

Manajemen Grup menyatakan bahwa cadangan penurunan nilai telah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

## 9. OTHER RECEIVABLES

Other receivables  
Related parties (Note 25)  
Third parties

Total

Allowances for impairment losses  
Related parties  
Third parties

Total

Total other receivables - net

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

## 10. FINANCE LEASE RECEIVABLES

## 10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)		
PLN	182,755	213,913
Jumlah	<u>182,755</u>	<u>213,913</u>

Related party (Note 25)  
PLN

Total

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

## Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara piutang sewa pembiayaan bruto dengan piutang sewa pembiayaan neto sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<b>Piutang sewa pembiayaan bruto:</b>		
- Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55,050	55,050
- Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	178,914	233,964
Dikurangi:		
Pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	(51,209)	(75,101)
Piutang sewa pembiayaan bersih	<u>182,755</u>	<u>213,913</u>
Dikurangi: Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(35,092)	(31,158)
Bagian jangka panjang	<u>147,663</u>	<u>182,755</u>

Piutang sewa bagian tidak lancar akan terealisasi dalam jangka waktu dua sampai lima tahun.

Piutang sewa pembiayaan dari PLN timbul dari penyediaan jasa *pre-treatment* gas dan jasa *compressed natural gas* untuk keperluan pembangkit di Bangkanai, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu kontrak selama sepuluh tahun yang dimulai pada tahun 2017.

## 10. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The reconciliation of gross finance lease receivables with the net finance lease receivables as reported in the statement of financial position is as follows:

	2022	2021
<b>Gross finance lease receivables:</b>		
Due within one year -		
Due within two until five years -		
Less:		
Unearned finance lease income	(51,209)	(75,101)
Net finance lease receivables	<u>182,755</u>	<u>213,913</u>
Less: Due within one year	(35,092)	(31,158)
Long-term portion	<u>147,663</u>	<u>182,755</u>

The non-current portion of finance lease receivables will be realised within two until five years.

The finance lease receivables from PLN arise from pre-treatment gas and compressed natural gas services for power generator in Bangkanai, Central Kalimantan with a contract period of ten years starting from 2017.

## 11. ASET KONTRAK

	2022	2021*
Pihak berelasi (Catatan 25)	112,483	222,822
Pihak ketiga	9,380	8,713
Jumlah	<u>121,863</u>	<u>231,535</u>

## 11. CONTRACT ASSETS

Related parties (Note 25)  
Third parties  
Total

## 12. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada ventura bersama sebagai berikut:

## 12. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE

The details of investments in joint venture are as follows:

	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
				2022 %	2021 %
<u>Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint venture</u>					
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity control and distribution	2014	49	49
PT Pura Daya Prima ("PDP")	Jakarta	Pembangkit listrik/ Power plant	2006	15	15

Seluruh entitas ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham tersebut.

All joint ventures are recorded by the Company using the equity method. All entities are unlisted private companies and there are no quoted market prices available for these shares.

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)



## Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 12. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)

## 12. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE (continued)

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The changes in investments in joint venture are as follows:

	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Cadangan penurunan nilai/ Allowance for impairment	Bagian laba diserap tahun berjalan/ Share of profit for the year	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance
Ventura bersama/Joint venture PDP	11,764	-	909	(300)	12,373
	2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Cadangan penurunan nilai/ Allowance for impairment	Bagian laba diserap tahun berjalan/ Share of profit for the year	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance
Ventura bersama/Joint venture PDP	9,851	-	2,138	(225)	11,764

PDP

PDP

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas PDP pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table is the summarised financial information of PDP as of 31 December 2022 and 2021, which has been accounted for using the equity method.

	2022	2021	
Aset lancar	50,576	34,189	Current assets
Aset tidak lancar	46,230	58,632	Non-current assets
	96,806	92,821	
Liabilitas jangka pendek	(7,176)	(7,701)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(7,146)	(6,695)	Non-current liabilities
	(14,322)	(14,396)	
Aset bersih	82,484	78,425	Net asset
Bagian atas aset bersih	12,373	11,764	Share of net assets
	2022	2021	
Pendapatan	124,469	125,243	Revenue
Beban pokok penjualan	(100,828)	(95,865)	Cost of goods sold
Beban umum dan administrasi	(12,580)	(11,691)	Operating expenses
(Beban)/penghasilan lain-lain - neto	(1,301)	561	Other (expenses)/income - net
Laba sebelum pajak	9,760	18,248	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(4,013)	(4,331)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	5,747	13,917	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lainnya	314	339	Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	6,061	14,256	Total comprehensive income for the year
Bagian Perusahaan atas laba investasi	909	2,138	The Company's shares of profit
Dividen yang diterima dari investasi	300	225	Dividend received from investments

## Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 13. ASET TETAP

## 13. FIXED ASSETS

	1 Januari/ January 2022*	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Divestment	31 Desember/ December 2022	
<b>Biaya perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Tanah	5,592	-	-	5,592	Land
Perlengkapan umum	11,697	-	(8,271)	3,426	General equipment
Subjumlah	17,289	-	(8,271)	9,018	Subtotal
<b>Aset hak guna</b>					<b>Right-of-use assets</b>
Bangunan	32,300	2,873	(817)	34,356	Building
Perlengkapan umum	1,157	-	(1,157)	-	General equipment
Kendaraan	3,127	6,067	(407)	8,787	Vehicles
Jumlah	53,873	8,940	(10,652)	52,161	Total
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Perlengkapan umum	(8,616)	(47)	5,289	(3,374)	General equipment
<b>Aset hak guna</b>					<b>Right-of-use assets</b>
Bangunan	(20,204)	(10,187)	697	(29,694)	Building
Perlengkapan umum	(1,157)	-	1,157	-	General equipment
Kendaraan	(2,997)	(5,225)	374	(7,848)	Vehicles
Jumlah	(32,974)	(15,459)	7,517	(40,916)	Total
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>20,899</b>			<b>11,245</b>	<b>Net book value</b>

	1 Januari/ January 2021*	Penambahan/ Additions	31 Desember/ December 2021*	
<b>Biaya perolehan</b>				<b>Acquisition cost</b>
Tanah	5,592	-	5,592	Land
Perlengkapan umum	11,674	23	11,697	General equipment
Subjumlah	17,266	23	17,289	Subtotal
<b>Aset hak guna</b>				<b>Right-of-use assets</b>
Bangunan	30,423	1,877	32,300	Building
Kendaraan	2,949	178	3,127	Vehicles
Perlengkapan umum	1,157	-	1,157	General equipment
Jumlah	51,795	2,078	53,873	Total
<b>Akumulasi penyusutan</b>				<b>Accumulated depreciation</b>
Perlengkapan umum	(6,647)	(1,969)	(8,616)	General equipment
<b>Aset hak guna</b>				<b>Right-of-use assets</b>
Bangunan	(10,412)	(9,792)	(20,204)	Building
Kendaraan	(2,057)	(940)	(2,997)	Vehicles
Perlengkapan umum	(1,157)	-	(1,157)	General equipment
Jumlah	(20,273)	(12,701)	(32,974)	Total
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>31,522</b>		<b>20,899</b>	<b>Net book value</b>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2022	2021*	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	10,969	6,468	Cost of revenues (Note 21)
Beban usaha (Catatan 22)	4,490	6,233	Operating expenses (Note 22)
Jumlah	15,459	12,701	Total

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

## Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 13. ASET TETAP (lanjutan)

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Sumatera Selatan, Nias Utara dan Kalimantan Barat dengan hak legal berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Perolehan tanah tersebut sehubungan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara dan pembangkit tenaga modular pengganti diesel.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.816 dan Rp1.130.

## 13. FIXED ASSETS (continued)

The Group owns several pieces of land located in South Sumatera, North Nias and West Kalimantan with Building Use Rights for a period of 20 years until 2031. The land acquisitions were performed in relation to the construction and operation of a coal gas power plant and substitute diesel power modular.

As of 31 December 2022 and 2021, the cost of the Group's fixed assets that had been fully depreciated but were still being used in operational activities amounting to Rp2,816 and Rp1,130, respectively.

## 14. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang sehubungan dengan pembelian material dan jasa konstruksi kepada sub kontraktor.

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	402	2,611
Pihak ketiga	<u>56,706</u>	<u>73,782</u>
Jumlah	<u><u>57,108</u></u>	<u><u>76,393</u></u>

## 14. TRADE PAYABLES

This account represents payables from purchase of material and construction service to sub contractors.

Related parties (Note 25)  
Third parties  
Total

## 15. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan jasa konsultasi atas konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Upper Cisokan.

## 15. ADVANCES FROM CUSTOMER

This account represents advances received from customer in relation to revenue incurred from consulting services for Hydropower Plant ("PLTA") Upper Cisokan construction.

## 16. LIABILITAS KONTRAK

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	78,570	106,344
Pihak ketiga	<u>2,170</u>	<u>2,362</u>
Jumlah	<u><u>80,740</u></u>	<u><u>108,706</u></u>

## 16. CONTRACT LIABILITIES

Related parties (Note 25)  
Third parties

Total

## 17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Biaya pegawai	23,840	37,961
Biaya non-pegawai	<u>22,093</u>	<u>23,146</u>
Jumlah	<u><u>45,933</u></u>	<u><u>61,107</u></u>

## 17. ACCRUED EXPENSES

Employee expenses  
Non-employee expenses

Total

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. PINJAMAN JANGKA PANJANG**

**18. LONG-TERM LOAN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jumlah utang pokok	24,008	56,019	Principal amount
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(24,008)</u>	<u>(32,900)</u>	Current maturities
Bagian jangka panjang	<u>=</u>	<u>23,119</u>	Long-term portion

Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN untuk keperluan pendanaan program investasi dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Jumlah pokok total pinjaman yang diberikan adalah maksimum sebesar Rp250.000. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp220.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,95%. Pinjaman akan berakhir setelah jangka waktu 7 tahun dihitung sejak selesainya masa *grace period* selama 12 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman pertama kali.

On 28 December 2015, the Company entered into a loan agreement with PLN for the funding of the Company's investment program to support its business operations. The maximum loan to be granted amounting to Rp250,000. The Company has drawdown Rp220,000 with an interest rate of 11.95% per annum. The loan expires after a period of 7 years from the end of the grace period of 12 months from the date of the first loan withdrawal.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 saldo pokok pinjaman yang sudah dibayar masing-masing sebesar Rp32.011 dan Rp32.009 (Catatan 26).

As at 31 December 2022 and 2021 the principal loan that had been paid amounting to Rp32,011 and Rp32,009, respectively (Note 26).

Beban bunga pinjaman tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.212 dan Rp9.090.

Interest expense charges related to the loan in 2022 and 2021 amounting to Rp5,212 and Rp9,090, respectively.

**19. MODAL SAHAM**

**19. SHARE CAPITAL**

	<u>2022 dan/and 2021</u>		
	<u>Jumlah saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>
<b>Pemegang saham/Shareholders</b>			
PLN	24,975,000	99.90%	24,975
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) ("YPK PLN")	<u>25,000</u>	<u>0.10%</u>	<u>25</u>
Jumlah/Total	<u>25,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,000</u>

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas Perusahaan tanggal 28 Juni 2022 Perusahaan mendeklarasikan dividen tahun 2022 dengan menggunakan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp69.872. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham sesuai kepemilikan sahamnya secara bertahap pada Oktober, November dan Desember 2022.

Based on the General Meeting of the Company's Majority Shareholders dated 28 June 2022, the Company declared dividend for 2022 using net profit for the year 2021 amounting to Rp69,872. Dividend paid to shareholders according to their share ownership in stages in October, November and December 2022.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas Entitas anak tanggal 29 Oktober 2021, Entitas anak mendeklarasikan dividen tahun 2021 dan 2020 dengan menggunakan laba bersih tahun buku 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.769 dan Rp17.772. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham sesuai kepemilikan sahamnya pada tanggal 30 November 2021 dan 22 Desember 2021. Entitas anak juga telah melakukan pembayaran utang dividen sebesar Rp9.704 pada tanggal 30 September 2021.

Based on the General Meeting of the Subsidiary's Majority Shareholders dated 29 October 2021, the Subsidiary declared dividend for 2021 and 2020 using net profit for the year 2020 and 2019 amounting to Rp1,769 and Rp17,772, respectively. Dividend paid to shareholders according to their share ownership on 30 November 2021 and 22 December 2021. The Subsidiary has also paid dividend payable amounting to Rp9,704 on 30 September 2021.

## Lampiran 5/39 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 20. PENDAPATAN

## 20. REVENUES

	2022	2021*	
Pembangkitan	188,103	204,662	Generators
Transmisi dan distribusi	135,697	60,282	Transmission and distributions
Konstruksi	133,691	147,381	Constructions
Kompresi gas	54,912	54,001	Gas compressions
Pendapatan bunga dari sewa pembiayaan	23,893	27,386	Interest income from finance lease receivables
Engineering Procurement Construction	-	332,691	Engineering Procurement Construction
Jumlah	<u>536,296</u>	<u>826,403</u>	Total

Manajemen memperkirakan bahwa harga transaksi yang dialokasikan untuk kontrak pekerjaan yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.022.236 akan diakui sebagai pendapatan selama rentang waktu antara 1-3 tahun ke depan.

Management expects that the transaction price allocated to the unsatisfied contracts as of 31 December 2022 amounting to Rp1,022,236 will be recognised as revenue within the next 1-3 years.

Lihat Catatan 25 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for details of transactions with related parties.

## 21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

## 21. COST OF REVENUES

	2022	2021*	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	117,936	187,925	Salary and welfare benefits
Subkontraktor	95,225	285,205	Subcontractors
Perjalanan dinas dan transportasi	21,607	16,676	Business trip and transportation
Beban pajak final	13,850	24,797	Final income tax
Penyusutan (Catatan 13)	10,969	6,468	Depreciation (Note 13)
Sewa	8,488	15,086	Rental
Lain-lain	<u>39,255</u>	<u>47,197</u>	Others
Jumlah	<u>307,330</u>	<u>583,354</u>	Total

## 22. BEBAN USAHA

## 22. OPERATING EXPENSES

	2022	2021*	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	104,852	110,806	Salary and welfare benefits
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	11,985	11,411	Employee income tax allowances
Amortisasi perangkat lunak	5,966	7,053	Amortisation of software
Penyusutan (Catatan 13)	4,490	6,233	Depreciation (Note 13)
Lain-lain	<u>25,797</u>	<u>37,686</u>	Others
Jumlah	<u>153,090</u>	<u>173,189</u>	Total

## 23. PERPAJAKAN

## 23. TAXATION

## a. Pajak dibayar di muka

## a. Prepaid taxes

	2022	2021*	
<u>Bagian lancar</u>			<u>Current portion</u>
Pajak lainnya			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pajak pertambahan nilai	26,432	19,089	Value added tax
Lain-lain	-	13	Others
Entitas anak			Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	32,850	39,786	Value added tax
Lain-lain	-	377	Others
	<u>59,282</u>	<u>59,265</u>	

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

## Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 23. PERPAJAKAN (lanjutan)

## a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
<b>Bagian tidak lancar</b>		
Perusahaan		
Pajak pertambahan nilai	11,669	31,339
Entitas anak		
Pajak pertambahan nilai	<u>11,738</u>	<u>57,177</u>
	<u>23,407</u>	<u>88,516</u>
Jumlah	<u><u>82,689</u></u>	<u><u>147,781</u></u>

## b. Utang pajak

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
<b>Pajak penghasilan badan</b>		
Perusahaan	17,193	3,266
Entitas anak	<u>66</u>	<u>11</u>
Jumlah pajak penghasilan badan	<u>17,259</u>	<u>3,277</u>
<b>Pajak lainnya</b>		
Perusahaan		
Pajak pertambahan nilai		
- Wajib Pungut	14,112	7,031
Pasal 4(2)	3,718	3,005
Pasal 21	814	1,906
Pasal 23	333	156
Pasal 25	378	91
Entitas anak		
Pasal 4(2)	413	2,662
Pasal 21	436	874
Pasal 23	26	157
Pasal 25	<u>-</u>	<u>50</u>
Jumlah pajak lainnya	<u>20,230</u>	<u>15,932</u>

## c. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	92,048	82,006
Laba sebelum beban pajak penghasilan entitas anak	(2,224)	(4,748)
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	<u>716</u>	<u>-</u>
Laba sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	<u>90,540</u>	<u>77,258</u>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

## 23. TAXATION (continued)

## a. Prepaid taxes (continued)

*Non-current portion  
The Company  
Value added tax  
Subsidiary  
Value added tax*

Total

## b. Taxes payable

**Corporate income tax**  
*The Company  
Subsidiary*

Total corporate income tax

**Other taxes**  
*The Company*

Value added tax - VAT collector

Article 4(2)

Article 21

Article 23

Article 25

Subsidiary

Article 4(2)

Article 21

Article 23

Article 25

Total other taxes

## c. Income tax expense

*A reconciliation between income before tax as per the consolidated statements of profit or loss and the taxable income of the Company is as follows:*

*Consolidated profit before  
income tax expense  
Profit before income tax  
expense of subsidiary  
Adjustment for consolidation  
elimination entries*

*Profit before income tax expense  
of the Company*

\* As restated (refer to Note 4)



## Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 23. PERPAJAKAN (lanjutan)

## c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2022	2021*
Laba sebelum beban penghasilan Perusahaan (lanjutan)	90,540	77,258
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal:		
Pelepasan entitas anak	70,290	-
Kesejahteraan dan tunjangan pajak	38,413	35,429
Piutang sewa pembiayaan	13,571	8,706
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	390	3,257
Bagian laba investasi pada ventura bersama	(909)	(2,138)
Penghasilan bunga	(10,209)	(7,898)
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan biaya-biaya yang berkaitan	(92,766)	(81,039)
Estimasi laba kena pajak	109,320	33,575
<b>Beban pajak kini perusahaan</b>	<b>24,050</b>	<b>7,387</b>
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka		
Pasal 23	(2,610)	(2,848)
Pasal 25	(4,247)	(1,273)
<b>Estimasi kurang bayar pajak penghasilan Perusahaan</b>	<b>17,193</b>	<b>3,266</b>

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2022	2021*
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	92,048	82,006
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	20,251	18,041
Penyesuaian dampak pajak atas pelepasan entitas anak	15,464	-
Beban yang tidak dapat dikurangkan	11,722	10,571
Penghasilan bukan objek pajak	(2,480)	(2,441)
Dampak pelepasan entitas anak ke ekuitas	(15,464)	-
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	(20,252)	(17,987)
<b>Beban pajak kini</b>	<b>9,241</b>	<b>8,184</b>

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

## 23. TAXATION (continued)

## c. Income tax expense (continued)

A reconciliation between income before tax as per the consolidated statements of profit or loss and the taxable income of the Company is as follows: (continued)

	2022	2021*
Laba sebelum beban penghasilan Perusahaan (lanjutan)	90,540	77,258
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal:		
Pelepasan entitas anak	70,290	-
Kesejahteraan dan tunjangan pajak	38,413	35,429
Piutang sewa pembiayaan	13,571	8,706
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	390	3,257
Bagian laba investasi pada ventura bersama	(909)	(2,138)
Penghasilan bunga	(10,209)	(7,898)
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan biaya-biaya yang berkaitan	(92,766)	(81,039)
Estimasi laba kena pajak	109,320	33,575
<b>Beban pajak kini perusahaan</b>	<b>24,050</b>	<b>7,387</b>
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka		
Pasal 23	(2,610)	(2,848)
Pasal 25	(4,247)	(1,273)
<b>Estimasi kurang bayar pajak penghasilan Perusahaan</b>	<b>17,193</b>	<b>3,266</b>

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amount may be adjusted when the Annual Tax Returns are filed to the Tax Office.

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to income before tax is as follows:

	2022	2021*
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	92,048	82,006
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	20,251	18,041
Penyesuaian dampak pajak atas pelepasan entitas anak	15,464	-
Beban yang tidak dapat dikurangkan	11,722	10,571
Penghasilan bukan objek pajak	(2,480)	(2,441)
Dampak pelepasan entitas anak ke ekuitas	(15,464)	-
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	(20,252)	(17,987)
<b>Beban pajak kini</b>	<b>9,241</b>	<b>8,184</b>

\* As restated (refer to Note 4)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Tarif pajak**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP menetapkan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%.

Pada tanggal 21 Februari 2022, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ("PP No. 9 tahun 2022") telah disahkan. PP No. 9 tahun 2022 menetapkan perubahan tarif Pajak Penghasilan Final menjadi 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha.

**e. Surat ketetapan pajak**

Perusahaan

Pada November 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") dari Kantor Pajak, yang menyatakan Perusahaan memiliki lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk tahun 2018 sebesar Rp19.089. Pada Desember 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp19.071 setelah dikurangi dengan Surat Tagihan Pajak atas pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak April, Mei dan September 2022 sebesar Rp18.

Entitas anak

Pada Februari 2023, REC menerima SKPLB dari Kantor Pajak, yang menyatakan REC memiliki lebih bayar atas pajak pertambahan nilai masa pajak Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2019 sebesar Rp31.746. Pada Maret 2023, REC telah menerima pengembalian secara penuh.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, REC sedang diaudit oleh Kantor Pajak atas lebih bayar pajak pertambahan nilai untuk tahun 2020 sebesar Rp3.357.

**23. TAXATION (continued)**

**d. Tax rates**

On 29 October 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law stipulates that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

On 21 February 2022, Government regulation No. 9 Year 2022 on Second Amendment to Government Regulation No. 51 of 2008 related to Income Tax on Income from Construction Services ("PP No. 9 of 2022") was issued. PP No. 9 of 2022 stipulates a change in the Final Income Tax rate to 3.5% for construction consulting services carried out by service providers who have business entity certificates.

**e. Tax assessment letters**

The Company

In November 2022, the Company received a Letter of Tax Overpayment ("SKPLB") from the Tax Office, which stated that the Company had the overpayment of value added tax for the year 2018 amounting to Rp19,089. In December 2022, the Company had received the refund of Rp19,071 after offset by the Tax Collection Letter of income tax article 21 for April, May and September 2022 amounting to Rp18.

Subsidiary

In February 2023, REC received a Letter of SKPLB from the Tax Office, which stated that REC had the overpayment of value added tax for June, July, August, September, November and December 2019 amounting to Rp31,746, respectively. In March 2023, REC had received the refund in full amount.

As at the completion date of these consolidated financial statement, REC is being audited by the Tax Office for overpayment of value added tax for the year 2020 amounting to Rp3,357.

## Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 24. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan pasca kerja

Grup menyelenggarakan imbalan pasca kerja tanpa pendanaan kepada karyawan tetap berdasarkan peraturan Perusahaan No. 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 259 karyawan pada tahun 2022 dan 294 karyawan pada tahun 2021\*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa tunjangan uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan bantuan kematian dan pemakaman bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

	<u>2022</u>
Tingkat diskonto per tahun	7.43%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%
Tingkat kematian	CSO-1958
Umur pensiun normal	55-56 tahun/years

Penilaian aktuarial atas program pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial terdaftar, Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, dengan laporan 361/IPK/KKA-TBA/III-2023 tanggal 31 Maret 2023 dan No. 326/IPK/KKA-TBA/II-2022 tanggal 25 Februari 2022.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

## 24. EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Post-employment benefits

The Group provides unfunded defined post-employment benefits to permanent employees which are determined based on the Company's regulation No. 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020. The number of employees eligible for the benefits totalled 259 in 2022 and 294 in 2021\*.

Other long-term benefits

The Group also provides unfunded long-term benefits such as long-service leave, work-accident allowance, death and funeral allowances for its qualifying employees.

Assumptions used in calculations of employment benefit liabilities

	<u>2021*</u>	
Tingkat diskonto per tahun	7.39%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.41%	Rate of salary increase per annum
Tingkat kematian	CSO-1958	Mortality rate
Umur pensiun normal	55-56 tahun/years	Normal retirement age

The actuarial calculations of pension plan and other long-term benefits for the years ended 31 December 2022 and 2021 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuarial ("KKA") Tubagus Syafrial and Amran Nangasan with report No. 361/IPK/KKA-TBA/III-2023 dated 31 March 2023 and No. 326/IPK/KKA-TBA/II-2022 dated 25 February 2022.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group has considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Based on the study, the Group found that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners is CSO-58.

\* As restated (refer to Note 4)



## Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Beban imbalan pasca kerja Grup dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Biaya jasa kini	5,552	5,297	Current service cost
Beban bunga	2,278	2,037	Interest cost
Jumlah	<u>7,830</u>	<u>7,334</u>	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja Grup dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Nilai kini liabilitas - jangka pendek	2,195	1,617	Present value of obligation - current
Nilai kini liabilitas - jangka panjang	35,667	32,052	Present value of obligation - non-current
Jumlah	<u>37,862</u>	<u>33,669</u>	Total

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>	
Saldo awal	33,669	27,885	Beginning balance
Biaya jasa kini	5,552	5,297	Current service cost
Biaya bunga	2,278	2,037	Interest expenses
Pembayaran manfaat	(2,285)	(2,337)	Payment of benefits
Pelepasan	(841)	-	Divestment
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Perubahan asumsi demografi	(18)	-	Change in demographic assumption
Perubahan asumsi keuangan	(14)	1,426	Change in financial assumption
Kombinasi perubahan asumsi	37	(50)	Combination of assumption changes
Penyesuaian atas pengalaman	(516)	(589)	Experience adjustment
Saldo akhir	<u>37,862</u>	<u>33,669</u>	Ending balance

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/  
Impact on defined benefit obligation

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	1%	(4,122)	4,956	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	5,079	(4,301)	Future salary growth rate

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pasca kerja yang tidak terdiskonto dan imbalan pasca kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term post-employment benefit liabilities is as follows:

	<u>Kurang dari 1 tahun/ Less than a year</u>	<u>Antara 1-2 tahun/ Between 1-2 years</u>	<u>Antara 2-5 tahun/ Between 2-5 years</u>	<u>Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Imbalan pasca kerja program pensiun	1,151	632	2,924	592,641	597,348	Post-employment benefit pension plan
Imbalan jangka panjang lainnya	1,231	1,213	6,666	8,840	17,950	Other post-employment benefit
Jumlah	<u>2,382</u>	<u>1,845</u>	<u>9,590</u>	<u>601,481</u>	<u>615,298</u>	Total

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\* As restated (refer to Note 4)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan transaksi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

25. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of relationships and transactions

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/Nature of relationship	Sifat transaksi/Nature of transaction
PLN	Entitas pemegang saham utama/ Ultimate parent entity	Piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan, aset kontrak, uang muka dari pelanggan, utang usaha, liabilitas kontrak, pinjaman jangka panjang, dan pendapatan/ Trade receivable, other receivables, finance lease receivable, contract asset, advances from customer, trade payables, contract liability, long-term loan, and revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash and cash equivalents and restricted cash in bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Syariah Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya/ Placement of cash and cash equivalents and restricted cash in bank
PT Geo Dipa Energi (Persero) ("Geo Dipa Energi")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Indonesia Power ("IP")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha, liabilitas kontrak dan pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Trade receivable, contract liability and revenue from engineering supervision and construction
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha, aset kontrak, dan pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Trade receivable, contract asset, and revenue from engineering supervision and construction
PJB	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Piutang usaha, aset kontrak, piutang lain-lain, dan pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Trade receivable, contract asset, other receivable, and revenue from engineering supervision and construction
CPSI	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore Pte. Ltd dan Perusahaan/ Joint venture between CG International Holdings Singapore Pte. Ltd and the Company	Piutang usaha dan piutang lain-lain/ Trade receivable and other receivable
Dewan Komisaris dan Direksi/ Board of Commissioners and Directors	Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya/ Salaries and other short-term benefit

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Balances and transactions with related parties

Catatan/ Notes	2022		2021*		
	Rp	%**	Rp	%**	
Kas dan setara kas	6				Cash and cash equivalents
Bank Negara Indonesia	296,200	27.37%	206,217	16.50%	Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri	205,180	18.96%	226,299	18.10%	Bank Mandiri
Bank Syariah Indonesia	5,000	0.46%	5,000	0.40%	Bank Syariah Indonesia
Bank Rakyat Indonesia	-	0.00%	30,332	2.43%	Bank Rakyat Indonesia
Subjumlah	506,380	46.79%	467,848	37.43%	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7				Restricted cash in bank
Bank Mandiri	366	0.03%	-	0.00%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia	-	0.00%	8,886	0.71%	Bank Negara Indonesia
Subjumlah	366	0.03%	8,886	0.71%	Subtotal
Piutang usaha	8				Trade receivables
PLN	91,852	8.49%	65,269	5.22%	PLN
PJB	4,003	0.37%	684	0.05%	PJB
IP	706	0.07%	402	0.03%	IP
CPSI	-	0.00%	16,219	1.30%	CPSI
ICON	-	0.00%	8,464	0.68%	Icon
Lain-lain	867	0.08%	724	0.06%	Others
Subjumlah	97,428	9.01%	91,762	7.34%	Subtotal

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\*\* Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

\* As restated (refer to Note 4)

\*\* Percentage of related total assets/liabilities/revenues

## Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

## 25. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS  
WITH RELATED PARTIES (continued)

## Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Balances and transactions with related parties  
(continued)

	Catatan/ Notes	2022		2021*		
		Rp	%**	Rp	%**	
Piutang lain-lain	9					Other receivables
CPSI		22,248	2.06%	21,870	1.75%	CPSI
PLN		12,905	1.19%	8,624	0.69%	PLN
PJB		8,455	0.78%	-	0.00%	PJB
Lain-lain		482	0.04%	156	0.01%	Others
Subjumlah		44,090	4.07%	30,650	2.45%	Subtotal
Piutang sewa pembiayaan	10					Finance lease receivables
PLN		182,755	16.88%	213,913	17.11%	PLN
Aset kontrak	11					Contract assets
PLN		94,272	8.71%	193,783	15.50%	PLN
PJB		14,818	1.37%	8,584	0.69%	PJB
ICON		-	0.00%	14,164	1.13%	ICON
Lain-lain		3,393	0.31%	6,291	0.50%	Others
Subjumlah		112,483	10.39%	222,822	17.82%	Subtotal
Utang usaha	14					Trade payables
PLN		402	0.13%	2,611	0.67%	PLN
Uang muka dari pelanggan	15					Advances from customer
PLN		13,626	4.47%	18,468	4.72%	PLN
Liabilitas kontrak	16					Contract liabilities
PLN		73,883	24.25%	98,608	25.18%	PLN
IP		4,326	1.42%	5,637	1.44%	IP
Lain-lain		361	0.12%	2,099	0.54%	Others
Subjumlah		78,570	25.79%	106,344	27.16%	Subtotal
Pinjaman jangka panjang	18					Long-term loan
PLN		24,008	7.88%	56,019	14.30%	PLN
Pendapatan	20					Revenues
PLN		443,738	82.74%	586,815	71.01%	PLN
PJB		53,959	10.06%	61,322	7.42%	PJB
IP		7,862	1.47%	11,829	1.43%	IP
Geo Dipa Energi		-	-	22,201	2.69%	Geo Dipa Energi
ICON		-	-	16,747	2.03%	ICON
Lain-lain		4,470	0.83%	17,062	2.06%	Others
Jumlah		510,029	95.10%	715,976	86.64%	Total

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Grup memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp16.134 dan Rp16.975.

On 31 December 2022 and 2021, the Group provided compensation to its Commissioners and Directors, which included salaries, facilities, allowances and bonuses amounting to Rp16,134 and Rp16,975, respectively.

26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI  
AKTIVITAS PENDANAAN26. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM  
FINANCING ACTIVITIES

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details the changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. The liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or those for which future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Nonkas/ Non-cash	Arus Kas/ Cashflow	Pelepasan/ Divestment	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman jangka panjang	56,019	-	(32,011)	-	24,008	Long-term loan
Liabilitas sewa	2,216	8,940	(7,750)	(1,714)	1,692	Lease liabilities

\* Disajikan kembali (lihat Catatan 4)

\*\* Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

\* As restated (refer to Note 4)

\*\* Percentage of related total assets/liabilities/revenues



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)**      **26. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)**

	2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Nonkas/ Non-cash	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman jangka panjang	88,028	-	(32,009)	56,019	Long-term loan
Liabilitas sewa	8,854	2,078	(8,716)	2,216	Lease liabilities

**27. KOMITMEN DAN KONTIJENSI**

Pada tanggal 16 November 2018, Perusahaan dan PLN Unit Induk Pembangunan ("UIP") Jawa Bagian Timur I melakukan kerjasama untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain, dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage, kapasitas 4x260 MW. Pada 3 Februari 2022, kedua belah pihak sepakat untuk membuat amandemen, yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp546.807 dan mengubah jangka waktu kontrak menjadi 97 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 19 Februari 2019, PJB membentuk konsorsium dengan Perusahaan dan REC untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control ("QA/QC") Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3&4 Add-on Project. Pada 6 Juni 2022, para pihak sepakat untuk membuat amandemen yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp182.600 dan mengubah jangka waktu kontrak menjadi 84 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan dan PT Kayan Hydropower Nusantara mengadakan kerja sama untuk Jasa Profesional untuk Studi Sistem Evakuasi Tenaga Listrik PLTA Mentarang Induk dengan nilai kontrak sebesar Rp19.960. Jangka waktu kontrak yaitu selama 28 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 17 Juni 2022, Perusahaan dan PLN UIP Jawa Bagian Timur dan Bali ("JBTB") mengadakan kerja sama untuk Jasa Konsultansi Desain Enjiniring Gardu Induk dan Transmisi Tersebar dan Inventarisasi Tanah di Lingkungan UIP JBTB dengan nilai kontrak sebesar Rp15.806. Jangka waktu kontrak yaitu selama 12 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan**

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan aset kontrak sebesar Rp957.136 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2021: Rp1.036.258) dan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp8.459 sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (2021: Rp6.490).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, liabilitas kontrak, biaya masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa sebesar Rp215.662 sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2021: Rp320.275).

**27. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

On 16 November 2018, the Company and PLN Unit Induk Pembangunan ("UIP") Jawa Bagian Timur I entered into agreement for Design Update Consultant Services, Design Supervision, and Construction Supervision of Upper Cisokan Pumped Storage Hydroelectric Power Plant, capacity 4x260 MW. On 3 February 2022, both parties agreed to make an amendment, which revised the contract value becoming Rp546,807 and revised the contract period becoming 97 months from the start date of the contract agreement.

On 19 February 2019, PJB formed a consortium with the Company and REC for Design Supervision Consultancy Services, Construction and Quality Assurance & Quality Control ("QA/QC") for the Construction of Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2.3 & 4 Add-ons Project. On 6 June 2022, the parties agreed to make an amendment which revised the contract value becoming Rp182,600 and revised the contract period becoming 84 months from the start date of the contract agreement.

On 12 April 2021, the Company and PT Kayan Hydropower Nusantara entered into an agreement for Professional Services for the Study of the Electric Power Evacuation System for the Mentarang Induk Hydroelectric Power Plant with a contract value of Rp19,960. The contract period is 28 months from the start date of the contract agreement.

On 17 June 2022, the Company and PLN UIP Jawa Bagian Timur dan Bali ("JBTB") entered into an agreement for Consultancy Services of Engineering Design for Substations and Distributed Transmission and Stocktaking of Soil in UIP JBTB Environment with a contract value amounting to Rp15,806. The contract period is 12 months from the start date of the contract agreement.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

**a. Categories and classes of financial instrument**

As at 31 December 2022, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, finance lease receivables and contract assets amounting to Rp957,136 as financial assets at amortised cost (2021: Rp1,036,258) and other non-current assets amounting to Rp8,459 as financial assets measured at fair value through other comprehensive income (2021: Rp6,490).

As at 31 December 2022, the Company classified its trade payables, other payables, contract liabilities, accrued expenses, long-term loan, and lease liabilities amounting to Rp215,662 as financial liabilities carried at amortised cost (2021: Rp320,275).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

**i. Manajemen risiko mata uang asing**

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Grup tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Grup untuk memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima adalah dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidak seimbangan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jika Rupiah menguat/(melemah) sebesar 10% terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain konstan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan lebih tinggi/(rendah) sebesar Rp47 (2021: Rp46), terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas dan utang usaha. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba sebelum pajak tahun berjalan.

**ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman jangka panjang. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022, pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap berkaitan dengan pinjaman jangka panjang (Catatan 18). Grup tidak mempunyai pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, perubahan tingkat suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (continued)**

**b. Financial risk management objectives and policies**

The objective and policies of the Group's financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of its business while managing the Group's exposure to financial risks, which comprise market risk (including foreign currency risk and interest-rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within a defined policy approved by the Directors.

**i. Foreign currency risk management**

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

The Group does not hedge its foreign currency exposure. To manage their foreign currency exposure, the Group's policy is to ensure that their net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

As at 31 December 2022, if Rupiah had appreciated/(depreciated) by 10% against foreign currency with all other variables held constant, total comprehensive income for the year would have been Rp47 lower/(higher) (2021: Rp46) mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on the translation of cash and cash equivalents and trade payables. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

**ii. Interest rate risk management**

The Group interest rate risk arises from long-term loans. The interest rate risk from cash is not significant.

Fixed rate loans expose the Group to fair value interest rate risk.

As at 31 December 2022, the Group had a fixed rate long-term loan (Note 18). The Group does not account for any fixed rate loan at fair value through profit or loss. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would not affect profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan  
(lanjutan)**

**iii. Manajemen risiko kredit**

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Risiko ini lebih disebabkan oleh pembayaran pelanggan yang tidak tepat waktu dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Upaya meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang dilaksanakan dengan penjadwalan ulang pembayaran pelanggan.

Grup melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan. Jika pelanggan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, Grup akan mengirimkan surat pemberitahuan kembali ke pelanggan untuk melakukan pembayaran.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Pelanggan Grup terdiri dari pihak berelasi (95,10%) dan pihak ketiga (4,90%). Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, PLN memiliki kontribusi 82,74% dan 71,01% masing-masing dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena tidak pernah ada kegagalan kredit dari PLN.

Pada tanggal 31 Desember 2022, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp956.055 (2021: Rp1.034.272), yang berasal dari kas di bank, deposito, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan aset kontrak.

**iv. Manajemen risiko likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas, yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (continued)**

**b. Financial risk management objectives and policies  
(continued)**

**iii. Credit risk management**

*Credit risk arises from the risk that counterparties will default on their contractual obligations resulting in financial loss to the Group. This risk is caused mostly by customers who do not pay on time and delays in the completion of the Group's work. The risk-management effort to minimise the risk of uncollectible receivables is by rescheduling customer payments.*

*The Group takes a persuasive approach to its customers. If the customer does not pay at the time that has been determined, the Group will send a notice back to the customer to make a payment.*

*The carrying value of financial assets on the financial statements net of an allowance for losses reflects the Group's exposure to credit risk.*

*The Group's customers consist of related parties (95.10%) and third parties (4.90%). For the years ended 31 December 2022 and 2021, PLN accounted for 82.74% and 71.01% of the total net sales, respectively. Management believes that the credit risk is limited because there has been no credit default from PLN.*

*As at 31 December 2022, the total maximum exposure from credit risk was Rp956,055 (2021: Rp1,034,272), which consists of cash in banks, deposits, restricted cash in bank, trade receivables, other receivables, finance lease receivables and contract assets.*

**iv. Liquidity risk management**

*Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-term, medium-term, and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash and reserves by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.*

*Furthermore, the Group maintains an adequate amount of cash and cash equivalents, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.*



## Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan  
(lanjutan)

## iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini memberikan rincian jatuh tempo kontraktual Grup untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
<b>Liabilitas Keuangan</b>						<b>Financial Liabilities</b>
Utang usaha	57,108	-	-	-	57,108	Trade payables
Utang lain-lain	5,851	330	-	-	6,181	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	22,093	-	-	-	22,093	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	25,459	-	-	-	25,459	Long-term loan
Liabilitas sewa	1,693	-	-	-	1,693	Lease liabilities
Jumlah	112,204	330	-	-	112,534	Total
	2021					
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
<b>Liabilitas Keuangan</b>						<b>Financial Liabilities</b>
Utang usaha	76,393	-	-	-	76,393	Trade payables
Utang lain-lain	15,465	369	-	-	15,834	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	23,146	-	-	-	23,146	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	38,229	24,569	-	-	62,798	Long-term loan
Liabilitas sewa	503	1,714	-	-	2,217	Lease liabilities
Jumlah	153,736	26,652	-	-	180,388	Total

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu paling awal di mana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar masa depan yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (continued)b. Financial risk management objectives and policies  
(continued)

## iv. Liquidity risk management (continued)

The following table details the Group remaining contractual maturities for its financial liabilities with an agreed repayment period as of 31 December 2022 and 2021:

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the date of contractual maturity, which is the earliest date on which the Group can be required to pay. For financial liabilities denominated in a foreign currency, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

Management considers that the carrying amounts of the recorded financial assets and financial liabilities approximate their fair values either because of their short-term maturities or because they carry a market interest rate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan  
(lanjutan)**

**v. Manajemen risiko modal**

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 19) dan saldo laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**28. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK  
MANAGEMENT (continued)**

**b. Financial risk management objectives and policies  
(continued)**

**v. Capital risk management**

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders, capital stock (Note 19), and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Company's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital in order to maximise its value. Therefore, the Group has a policy of seeking funding in which it always takes into account the financial risk that may arise in the future.

**29. TRANSAKSI NON KAS**

**29. NON-CASH TRANSACTIONS**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	8,940	2,078	Additions of right-of-use assets through lease liabilities

**30. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2023.

**30. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and approved by the Directors for issuance on 26 May 2023.